Surabaya CITY OF HEROES



PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SURABAYA

RKPD TAHUN 2026











Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur





WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

47. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

50. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 7);

53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.

Pasal 3

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
   a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD;
   b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 4

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

(1) PD melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi atas pelaksanaan Renja-PD sebagai berikut:
   a. laporan setiap bulan, meliputi indikator kinerja dan kelompok sasaran pada level kegiatan dan subkegiatan;
   b. laporan setiap triwulan dan tahunan, meliputi indikator kinerja dan kelompok sasaran pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan

   yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui aplikasi e-planning paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya bulan dan triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan terhadap usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh PD untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah pengampu bidang urusan perencanaan melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi setiap triwulan dan tahunan terhadap hasil RKPD Tahun 2026 yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan menggunakan hasil evaluasi Renja-PD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

(3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya

Pasal 7

(1) Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program kegiatan, dan subkegiatan dan/atau;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
   c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

   yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

(3) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari :
1. Lampiran I Dokumen RKPD Tahun 2026;
2. Lampiran II Konsistensi Program Antara RPJMD Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
3. Lampiran III Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
4. Lampiran IV Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
5. Lampiran V Daftar Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
6. Lampiran VI Daftar Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota;
7. Lampiran VII Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama;
8. Lampiran VIII Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan Di Surabaya
Pada Tanggal 11 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari SE., MM., CGCAE.
Pembina Utama Madya
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 31

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : **KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA** Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Daftar Isi

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-10

1.4 Maksud dan Tujuan I-12

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II–1

2.1 Kondisi Umum Daerah II–1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II–212

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II–568

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-21

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-6

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-I

5.1 Rencana Program ..... V-I

5.2 Kerangka Pendanaan V-892

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

Daftar Gambar

Gambar I.1 Alur Penyusunan RKPD I-11
Gambar II.1 Grafik Curah Hujan dan Kelembapan Udara Kota Surabaya
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025 ..... II–2
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya Sumber: RTRW Kota
Surabaya Tahun 2025-2045 ..... II–12
Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya Sumber: RTRW Kota
Surabaya Tahun 2025-2045 ..... II–13
Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya II–16
Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng II–17
Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara II–18
Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya II–18
Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya II–19
Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan
kelompok usia II–23
Gambar II.10 Inflasi Kota Surabaya (year-to-date) Tahun 2021–2025 (TW I) .. II–35
Gambar II.11 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2021–2025 (TW I) II–51
Gambar II.12 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2020–2024
Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025 ..... II–54
Gambar II.13 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2025 (TW I) ... II–90
Gambar II.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan
Tahun 2025 (TW I) II–91
Gambar II.15 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi
Tahun 2024 ..... II–95
Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi II–153
Gambar II.17 Perangkat Smart Water Level II–190
Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020 – 2024 (persen) III-15
Gambar IV.1 Visi dan Misi dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ..... IV-7
Gambar IV.2 Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 ..... IV-13
Gambar IV.3 Penyelarasan Tema Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-19

Gambar VI.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... V I- 1

Daftar Tabel

Tabel II.1 Sistem Drainase di Kota Surabaya II–4
Tabel II.2 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan II–15
Tabel II.3 Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2021–2025 (TW I) II–15
Tabel II.4 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–20
Tabel II.5 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–20
Tabel II.6 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–21
Tabel II.7 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan II–22
Tabel II.8 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2024 ..... II–23
Tabel II.9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama II–24
Tabel II.10 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024 ..... II–25
Tabel II.11 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 ..... II–26
Tabel II.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 ..... II–27
Tabel II.13 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020–2024 (dalam persen) II–28
Tabel II.14 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rp)..... II–30
Tabel II.15 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rp)..... II–31
Tabel II.16 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) II–32

Tabel II.17 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–34
Tabel II.18 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 ..... II–36
Tabel II.19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 ..... II–37
Tabel II.20 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–39
Tabel II.21 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–39
Tabel II.22 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–40
Tabel II.23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020–2024 II–40
Tabel II.24 Proporsi Penduduk Kota Surabaya Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020–2024 ..... II–40
Tabel II.25 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–41
Tabel II.26 Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–43
Tabel II.27 Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–44
Tabel II.28 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–44
Tabel II.29 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–45
Tabel II.30 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–45
Tabel II.31 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–46
Tabel II.32 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2021–2025 (TW I) II–47
Tabel II.33 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–49
Tabel II.34 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–49
Tabel II.35 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–49

Tabel II.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–51
Tabel II.37 TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020–2024 II–52
Tabel II.38 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–53
Tabel II.39 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2024 ..... II–56
Tabel II.40 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021–2024 ..... II–79
Tabel II.41 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Per Kecamatan Tahun 2024 ..... II–81
Tabel II.42 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II–83
Tabel II.43 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2020–2024..... II–85
Tabel II.44 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2021–2025 (TW I) II–86
Tabel II.45 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021–2025 (TW I) II–86
Tabel II.46 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2025 (TW I) II–87
Tabel II.47 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–89
Tabel II.48 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025 (TW I) II–89
Tabel II.49 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025 (TW I)..... II–90
Tabel II.50 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2025 (TW I) II–90
Tabel II.51 Satuan Pendidikan memenuhi Standar Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi Nasional di Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I) II–91
Tabel II.52 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2021–2025 (TW I) II–93

Tabel II.53 Cakupan Penemuan, Pengobatan dan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 ..... II–93
Tabel II.54 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–94
Tabel II.55 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2021–2025 (TW I) II–95
Tabel II.56 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2021–2025 (TW I) II–96
Tabel II.57 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2021–2025 (TW I) II–96
Tabel II.58 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I) II–97
Tabel II.59 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–98
Tabel II.60 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–98
Tabel II.61 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–99
Tabel II.62 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–99
Tabel II.63 Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–100
Tabel II.64 Tempat Pengolahan Makanan (TPM)/Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2020–2024..... II–101
Tabel II.65 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2022–2024 ..... II–102
Tabel II.66 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–103
Tabel II.67 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–104
Tabel II.68 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2025 (TW I) II–105
Tabel II.69 IMB/PBG yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I) II–106
Tabel II.70 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB/PBG Tahun 2021 – 2025 (TW I) II–106

Tabel II.71 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2020–2025 (TW I) II–107
Tabel II.72 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–108
Tabel II.73 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa II–108
Tabel II.74 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–112
Tabel II.75 Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–112
Tabel II.76 Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis Tahun 2021–2025 (TW I) II–113
Tabel II.77 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2021–2025 (TW I) II–114
Tabel II.78 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I) II–114
Tabel II.79 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I) II–115
Tabel II.80 Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–116
Tabel II.81 PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–117
Tabel II.82 PSKS Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–117
Tabel II.83 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–118
Tabel II.84 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–119
Tabel II.85 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir II–119
Tabel II.86 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–120
Tabel II.87 Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–120
Tabel II.88 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–121
Tabel II.89 Indeks Ketimpangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–122

Tabel II.90 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–122
Tabel II.91 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–123
Tabel II.92 KDRT Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–123
Tabel II.93 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–124
Tabel II.94 Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–125
Tabel II.95 Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–125
Tabel II.96 Indeks Ketahanan Pangan Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–126
Tabel II.97 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–127
Tabel II.98 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–127
Tabel II.99 Pola Pangan Harapan Tahun 2020–2024 ..... II–128
Tabel II.100 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–129
Tabel II.101 Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2021–2025 (TW I) II–131
Tabel II.102 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–131
Tabel II.103 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–133
Tabel II.104 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–133
Tabel II.105 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–134
Tabel II.106 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2021–2025 (TW I) II–134
Tabel II.107 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–135

Tabel II.108 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2020–2024 ... II–136
Tabel II.109 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–137
Tabel II.110 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–137
Tabel II.111 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020–2024 ... II–139
Tabel II.112 Indikator Penyusun IKLH Kota Surabaya Tahun 2020-2024 ... II–139
Tabel II.113 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ... II–140
Tabel II.114 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ... II–142
Tabel II.115 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–143
Tabel II.116 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–144
Tabel II.117 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–145
Tabel II.118 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ... II–146
Tabel II.119 Angka ASFR Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ... II–146
Tabel II.120 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ... II–147
Tabel II.121 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ... II–147
Tabel II.122 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ... II–148
Tabel II.123 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–149
Tabel II.124 Rasio Izin Trayek Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–149
Tabel II.125 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–150
Tabel II.126 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–151
Tabel II.127 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–151
Tabel II.128 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) ... II–151

Tabel II.129 Weather Information Display Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–152
Tabel II.130 Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–152
Tabel II.131 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I) II–153
Tabel II.132 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–153
Tabel II.133 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2020–2024 ..... II–154
Tabel II.134 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–155
Tabel II.135 Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2020–2024 .. II–155
Tabel II.136 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–156
Tabel II.137 Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2020–2024..... II–157
Tabel II.138 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–158
Tabel II.139 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–158
Tabel II.140 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–159
Tabel II.141 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–160
Tabel II.142 Cakupan Pembinaan Olahraga Prestasi di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–161
Tabel II.143 Prestasi Olahraga Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–162
Tabel II.144 Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–163
Tabel II.145 Kader Anti Kenakalan Remaja Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–164
Tabel II.146 Pelatihan Wirasusaha Pemuda Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–164
Tabel II.147 Hasil Analisis Data yang Terpublikasi Tahun 2022-2025 (TW I) .. II–166

Tabel II.148 Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–166
Tabel II.149 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–168
Tabel II.150 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–170
Tabel II.151 Jumlah Perpustakaan dan Pustakawan Tahun 2021–2025 (TW I) II–171
Tabel II.152 Jumlah Koleksi dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2021–2025 (TW I) II–172
Tabel II.153 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2021–2025 (TW I) II–173
Tabel II.154 Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–174
Tabel II.155 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–175
Tabel II.156 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2021–2025 (TW I) II–175
Tabel II.157 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–178
Tabel II.158 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–178
Tabel II.159 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2021–2025 (TW I) II–178
Tabel II.160 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–179
Tabel II.161 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–180
Tabel II.162 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2020–2024..... II–180
Tabel II.163 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–181
Tabel II.164 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–181
Tabel II.165 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2021–2025 (TW I) II–182
Tabel II.166 SOP Dievaluasi Tahun 2021–2025 (TW I) II–182

Tabel II.167 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2020–2025 (TW I) II–183
Tabel II.168 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–183
Tabel II.169 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2020–2024 II–184
Tabel II.170 MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2023–2025 (TW I) II–185
Tabel II.171 MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023–2025 (TW I) II–185
Tabel II.172 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2021–2025 (TW I) II–185
Tabel II.173 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–188
Tabel II.174 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–188
Tabel II.175 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–189
Tabel II.176 Rata – Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–189
Tabel II.177 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–190
Tabel II.178 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2021–2025 (TW I) II–190
Tabel II.179 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–191
Tabel II.180 Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–191
Tabel II.181 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–192
Tabel II.182 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)..... II–193
Tabel II.183 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–193
Tabel II.184 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ..... II–194
Tabel II.185 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–194

Tabel II.186 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Tahun 2020–2024 ..... II–195
Tabel II.187 Indeks Infrastruktur Kota Surabaya Tahun 2022–2024 ..... II–195
Tabel II.188 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–197
Tabel II.189 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–197
Tabel II.190 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–197
Tabel II.191 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2020–2024 .. II–198
Tabel II.192 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 ..... II–198
Tabel II.193 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–200
Tabel II.194 Rata-rata Lama Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–201
Tabel II.195 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–201
Tabel II.196 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–201
Tabel II.197 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2021–2025 (TW I) II–202
Tabel II.198 Jumlah Unjuk Rasa di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) . II–204
Tabel II.199 Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) II–205
Tabel II.200 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 II–205
Tabel II.201 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2020-2024 ..... II–206
Tabel II.202 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–206
Tabel II.203 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2020–2024..... II–207

Tabel II.204 Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020–2024 ..... II–207
Tabel II.205 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020–2024 ..... II–208
Tabel II.206 Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020-2024 ..... II–208
Tabel II.207 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 ..... II–209
Tabel II.208 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2023 ..... II–210
Tabel II.209 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kota Surabaya II–216
Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam juta) III-7
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam Juta) III-10
Tabel III.3 eranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 s/d Tahun 2024*(dalam %)..... III-13
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2020 - 2024*..... III-14
Tabel III.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2020 –Tahun 2025. III-18
Tabel III.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2020 - 2024 ..... III-19
Tabel III.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027 ..... III-35
Tabel III.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Per PD Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027 ..... III-36
Tabel III.9 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027..... III-52
Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027 ..... III-57
Tabel IV.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IV-3
Tabel IV.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2026..... IV-20

Tabel IV.3 Penyelarasan Subkegiatan Kota Surabaya dengan Astacita Presiden Tahun 2026 ..... IV-42
Tabel IV.4 Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dengan Program Strategis Nasional Tahun 2026..... IV-120
Tabel IV.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026 ..... IV-136
Tabel IV.6 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen..... IV-139
Tabel V.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026 ..... V-2
Tabel V.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2026 ..... V-892
Tabel VI.1 Keselarasan Indikator Makro Tahun 2026……VI-3
Tabel VI.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029……VI-4
Tabel VI.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2029……...VI-6

Daftar Lampiran

Lampiran II : Konsistensi Program Antara Rpjmd Tahun 2026 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Lampiran III : Konsistensi Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Tahun Pelaksanaan 2026 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Lampiran IV : Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Lampiran V : Daftar Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Dengan Kabupaten/Kota

Lampiran VI : Daftar Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota

Lampiran VII : Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama

Lampiran VIII : Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 JULI 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Surabaya periode sebelumnya dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Kota

Surabaya Tahun 2024, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta penelaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan RKPD;
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
c. Penyusunan Rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

Pada Tahun 2024, telah diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka sesuai dengan ketentuan ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disahkan maksimal 6 (enam) bulan sejak pelantikan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan selanjutnya Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Selain itu, penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, dimana belanja daerah disusun secara berkualitas, efektif, efisien, selektif, dan produktif untuk mendukung

pencapaian prioritas daerah yang telah ditetapkan dan berfokus pada target kinerja pelayanan publik.

Sebagai dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta dalam rangka menjamin konsistensi dalam penyusunan perencanaan di pusat, Propinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, maka disusun RKPD Tahun 2026 yang berpedoman pada prioritas nasional sesuai Asta Cita sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas Propinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya, serta visi dan misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
45. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
47. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
50. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
51. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025, Nomor 18 Seri E);
52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

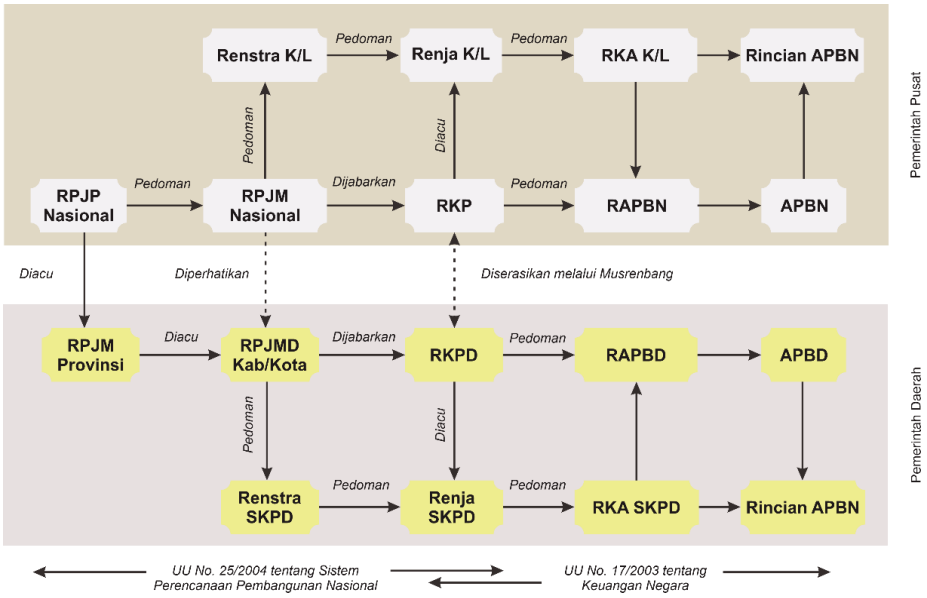
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Kota Surabaya 2026 berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan RKPD Propinsi Jawa Timur. Penyusunan RKPD Tahun 2026 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Pada saat penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026, RPJMD Kota Surabaya berada dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, sehingga muatan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 tidak lagi mempedomani pada Rancangan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 namun pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Racangan Peraturan Daerah. Dokumen RKPD Kota Surabaya 2026 merupakan tahapan akhir penyusunan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan tindaklanjut hasil fasilitasi dari Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur dan disahkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya untuk dapat ditetapkan sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 juga mempedomani prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas propinsi yang tertuang dalam RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2026, serta merupakan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD yang telah difasilitasi oleh Propinsi Jawa Timur, masukan masayarakat melalui Musrenbang RKPD dan masukan DPRD Kota Surabaya melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

Secara substansial, RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2026.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar I.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 mengacu pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, program prioritas nasional dalam Rancangan RKP 2026, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2026, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD

Tahun 2024, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2026 adalah untuk:

1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2026.

5. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Surabaya Tahun 2026.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, latar belakang penyusunan RKPD serta proses penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, Propinsi maupun kota.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Propinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5 Sistematika

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu menguraikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan dokumen RKPD Tahun 2025 sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Menjelaskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam bentuk tabel yang disertai dengan penjelasan dan analisis untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan pencapaian indikator TPB/SDGs.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Propinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Raperda RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2026, dengan memperhatikan prioritas nasional sesuai Asta Cita sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas Propinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya dan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil. Penentuan prioritas tersebut dilakukan melalui sinkronisasi keselarasan tema dan prioritas pada RKP dan RKPD Propinsi Jawa Timur yang

disampaikan pada Rakortekrenbang, dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun rencana. Selain itu, dijabarkan juga kebijakan dan inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut, sasaran pembangunan, serta inovasi unggulan

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Surabaya. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d. 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d. 112°54' Bujur Timur.

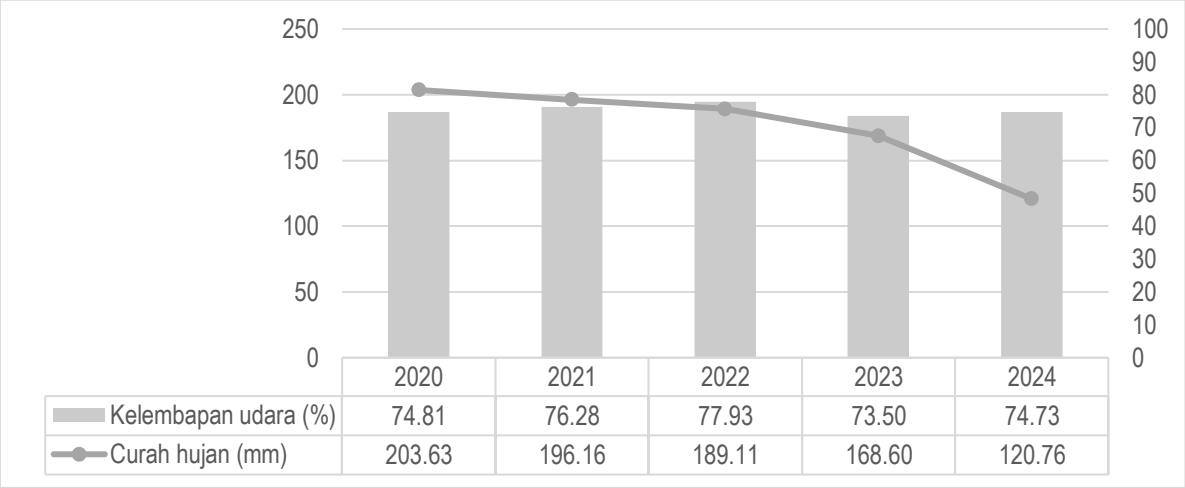
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045, bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas kurang lebih 33.850 Hektare. Menurut publikasi Surabaya Dalam Angka Tahun 2025, yang dirilis oleh Badan

Pusat Statistika (BPS) Kota Surabaya, luas wilayah daratan Kota Surabaya kurang lebih 32.681 Hektare.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah antara 3-6 meter di atas permukaan laut, pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Di tahun 2023, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yakni sebesar 487,1 milimeter dengan temperatur berkisar antara 20°C hingga 36°C, dan kelembapan udara juga mencapai puncak tertingginya di tahun itu, yakni pada 83,2 persen. Sedangkan untuk data tahun 2024, curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Februari, yakni sebesar 463,8 milimeter. Sedangkan temperatur berkisar antara 21,8°C hingga 37,8°C, dan kelembapan udara mencapai puncak tertingginya pada bulan Februari dan April tahun itu, yakni pada 98 persen. Gambar II.1 menunjukkan grafik hubungan curah hujan dengan kelembapan udara di Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kelembapan udara (%)	74.81	76.28	77.93	73.50	74.73
Curah hujan (mm)	203.63	196.16	189.11	168.60	120.76

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan dan Kelembapan Udara Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan pencatatan data kelembapan udara di Kota Surabaya tersebut serta rata-rata tingkat kelembapan udara keseluruhan setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda. Tinggi

rendahnya kelembapan udara sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu suhu, tekanan udara, pergerakan angin, kuantitas dan kualitas penyinaran dan vegetasi. Rata-rata kelembapan tertinggi berada pada angka 77,93 persen dan kelembapan terendah berada pada 73,5 persen.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas dan Kali Jagir. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya rawan terkena dampak atas yang terjadi di daerah hulu, secara kuantitas (debit air) maupun kualitas. Pada musim penghujan, limpahan air yang berasal dari DAS yang melalui Kota Surabaya, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu upaya yang telah dilakukan antara lain dengan pembuatan boezem di seluruh wilayah Kota Surabaya, yang berjumlah 110 boezem hingga tahun 2024, yang berfungsi sebagai tampungan air sementara yang berkontribusi dalam pengendalian banjir di Kota Surabaya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui PDAM Surya Sembada dengan Perum Jasa Tirta (PJT) I juga melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik terkait pengondisian dan kontrol atas pintu air Ngagel dan pintu air Jagir untuk memastikan memastikan pasokan air baku tetap terpenuhi baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau. Sedangkan kualitas air Sungai Brantas saat ini mengalami penurunan, sehingga berdampak pada tingginya kandungan zat pencemar dalam air baku yang diolah oleh Kota Surabaya seperti nitrit, amonia, dan bahan organik. Untuk mengatasi hal ini, PDAM Surya Sembada melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan dosis disinfektan, menggunakan koagulan baru, memodifikasi sistem, serta mengoptimalkan proses produksi dan distribusi. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada juga berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) I serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas untuk ikut serta dalam upaya pencegahan pencemaran sungai.

Sebagai upaya mengatasi potensi banjir, Kota Surabaya memiliki sistem drainase yang terintegrasi dan dirancang untuk mengelola limpasan air hujan secara efektif. Sistem drainase ini mencakup saluran primer, sekunder, dan tersier yang membagi Kota Surabaya menjadi 30 sistem drainase dengan *catchment area* seluas 31.881,1 Ha. Saluran primer berfungsi mengalirkan air dari daerah tangkapan besar ke sungai-sungai utama, sementara saluran sekunder dan tersier

berfungsi mengalirkan air dari lingkungan permukiman dan jalan-jalan. Upaya pembangunan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem drainase ini terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah banjir dan mengurangi dampak genangan air di berbagai wilayah.

Tabel II.1
Sistem Drainase di Kota Surabaya

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
1	Saluran Perbatasan	10.166.967	Saluran Perbatasan	Saluran Dukuh Menanggal
				Saluran Menanggal Indah
				Saluran Cabang Menanggal Indah
				Saluran Tengah A. Yani Selatan
				Saluran Siwalankerto Permai
				Saluran Siwalankerto Selatan
				Saluran Cabang Siwalankerto
				Saluran Siwalankerto
				Saluran Kutisari Indah
				Saluran Rungkut Industri Selatan
				Saluran Rungkut Barat
				Saluran Rungkut Industri II
				Saluran Cabang Rungkut Industri II
				Saluran Tengah MERR
				Saluran Rungkut Barata
				Saluran Rungkut Menanggal
				Saluran Cabang Amir Mahmud
				Saluran BP2IP
2	Kebon Agung	16.795.892	Saluran Kebon Agung	Saluran Kebon Agung
				Saluran Gayungan Peternakan I
				Saluran Gayungan Peternakan II
				Saluran Gayung Kebonsari
				Saluran Gayungsari
				Saluran Jemur Andayani
				Saluran Kutisari XII
				Saluran Kutisari IV
				Saluran Kutisari Utara I
				Saluran Gunung Anyar
				Saluran Gunung Anyar Jaya
				Saluran Rungkut Kidul
				Saluran Rungkut Harapan
				Saluran Medokan Asri
				Saluran Wiguna Timur
				Saluran Medayu Selatan
				Saluran Gunung Anyar Mas
3	Kali Sumo	3.834.787	Saluran Kali Sumo	Saluran Ngagel Jaya Tengah Barat
				Saluran Ngagel Jaya Tengah Timur
				Saluran Ngagel Jaya Selatan Barat
				Saluran Ngagel Jaya Selatan Timur
				Saluran Bratang Perintis VI

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
4	Avoor Wonorejo	19.539.892	Saluran Avoor Wonorejo	Saluran Jambangan
				Saluran Bibis Karah
				Saluran Karah Agung
				Saluran Ketintang Selatan
				Saluran Prof Supomo
				Saluran Ketintang Wiyata
				Saluran Ketintang
				Saluran Jemur Gayungan
				Saluran Tengah A. Yani Utara
				Saluran Wonokromo
				Saluran Cabang Wonokromo
				Saluran Wonocolo
				Saluran Raya Panjang Jiwo
				Saluran Kalirejo
				Saluran Tenggilis Kauman
				Saluran Rungkut
				Saluran Sidosermo
				Saluran Sidosermo Indah
				Saluran Drasimo
				Saluran Panjang Jiwo
				Saluran Rungkut Waru
				Saluran Cabang Rungkut Waru
				Saluran Kedung Asem
				Saluran Nirwana
				Saluran Penjaringan Timur
				Saluran Kendal Sari
				Saluran Nirwana Eksekutif
				Saluran Wonorejo Permai
				Saluran Wonorejo Permai Utara VIII
				Saluran Rungkut Jaya
				Saluran Wonorejo Rungkut I
5	Jagir Kalimir	2.701.859	Saluran Jagir Kalimir	Saluran Karang Rejo
				Saluran Bendul Merisi
6	Rungkut	7.789.178	Saluran Rungkut	Saluran Rungkut Asri
				Saluran Rungkut Asri Utara
				Saluran Rungkut Medokan
				Saluran Medokan Timur
				Saluran Medokan Asri
				Saluran Medokan Asri Selatan
7	Medokan Semampir	19.504.694	Saluran Medokan Semampir	Saluran Manyar Indah
				Saluran Wisma Mukti
				Saluran Klampis Indah 4
				Saluran Semolo Waru Utara
				Saluran Semolo Waru
				Saluran Araya Barat
				Saluran Araya Timur
				Saluran Suko Semolo
				Saluran Semolo Waru Bahari

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Araya Selatan
				Saluran Semampir Tengah
				Saluran Semolo Waru Timur
				Saluran Nginden Jangkungan
				Saluran Brimob
				Saluran Medokan Semampir Baru
				Saluran Medokan Semampir Baru I
				Saluran Medokan Semampir Tengah
				Saluran Keputih Tegal
8	Kalidami	15.111.012	Saluran Kalidami	Saluran Pucang Anom timur
				Saluran Pucang Adi
				Saluran Kertajaya X
				Saluran Srikana
				Saluran Karang Menjangan
				Saluran Dharmahusada Indah
				Saluran Wisma Permai II
				Saluran Mleto
				Saluran Raya ITS / Sawahan
				Saluran ITS Barat
				Saluran Bhaskara
9	Kalibokor	11.363.661	Saluran Kalibokor	Saluran Manyar Tirtosari
				Saluran Manyar Tirtomoyo
				Saluran Manyar Tirtoyoso
				Saluran Klampis Ngasem
				Saluran UPB
				Saluran ITS Tengah
				Saluran ITS selatan
				Saluran Laguna Utara
				Saluran Keputih Barat
				Saluran Keputih Tengah
				Saluran Keputih Timur
				Saluran Marina Barat
				Saluran Marina Tengah
				Saluran Marina Timur
				Saluran Laguna Selatan
10	Jeblokan	6.985.578	Saluran Jeblokan	Saluran Jolotundo
				Saluran Gersikan
				Saluran Rangkah
11	Pegirian	9.847.074	Saluran Pegirian	Saluran Bulak Banteng
				Saluran Bulak Banteng Tengah
				Saluran Sidotopo Lor
				Saluran Tenggumung Karya
				Saluran Wonosari Lor
				Saluran Simolawang
				Saluran Simokerto/Donokerto
				Saluran Sawah Pulo
				Saluran Wonosari Wetan
				Saluran Gembong III

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Gembong
				Saluran Kemuning
				Saluran Kalisari THR
				Saluran Kalisari Timur
				Saluran Jatisrono
				Saluran Mrutu - Kalianyar
12	Kenjeran	4.975.012	Saluran Kenjeran - Larangan	Saluran Kenjeran Utara I
				Saluran Lebak Arum
				Saluran Karang Empat
				Saluran Kalijudan
13	Tambak Wedi	7.223.897	Saluran Tambak Wedi	Saluran Bandar Rejo
				Saluran Tambak Wedi Utara
				Saluran Bulak Banteng Timur
				Saluran Tambak Wedi Barat
				Saluran Bulak Banteng Tengah Selatan
				Saluran Randu Barat
				Saluran Randu Timur
				Saluran Tanah Merah
				Saluran Kapas Madya Timur
				Saluran Kapas Madya
				Saluran Tambak Sari
14	Kali Kepiting (Kalisari)	7.400.810	Saluran Kalisari	Saluran Pacar Kembang
				Saluran Mulyorejo
				Saluran Sutorejo
				Saluran Prima
				Saluran Babatan Pantai
				Saluran Kenjeran Lama
				Saluran Mulyosari
15	Lebak Indah	5.131.741	Saluran Lebak Indah	Saluran Gading
				Saluran Lebak Jaya Utara
				Saluran Kenjeran
				Saluran Larangan Barat
				Saluran Komplek Kenjeran
				Saluran Pantai Ria
				Saluran Kyai Tambak Deres
				Saluran Bulak Setro
				Saluran Cumpat Kulon
16	Greges	14.608.194	Saluran Greges	Saluran Surabayan
				Saluran Tempel Sukorejo
				Saluran Kedung Anyar Wetan
				Saluran Kedung Anyar
				Saluran Margorukun
				Saluran Genie Pelajar
				Saluran Petemon V
				Saluran Petemon Sidomulya
				Saluran Petemon Kali
				Saluran Pacuan Kuda
				Saluran Asem Bagus

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Kedung Doro
				Saluran Tembok Gede
				Saluran Semarang
				Saluran Pasar Turi
				Saluran Dupak Timur
				Saluran Dupak
				Saluran Rembang
				Saluran Krembangan Baru
				Saluran Indrapura I
				Saluran Jepara
				Saluran Pesapen Kali
				Saluran Pesapen Selatan
				Saluran Moro Krembangan
				Saluran Ikan Mungsing
				Saluran Ikan Mungsing Selatan
				Saluran Johar
				Saluran Indrapura II
				Saluran Pasar Loak
				Saluran Asem Mulya
				Saluran Simo
17	Darmokali	2.754.455	Saluran Darmokali	Saluran Ciliwung
				Saluran Gajah Mada
				Saluran Hayam Wuruk
				Saluran Perwira
				Saluran Brawijaya
18	Dinoyo	2.612.612	Saluran Kupang	Saluran Dr Wahidin
				Saluran Dinoyo
				Saluran Ir Anwari
				Saluran Sriwijaya
				Saluran Kartini
				Saluran Kupang Panjaan
				Saluran Jenggolo
				Saluran Sambas-Untung Suropati
				Saluran Keputran
19	Kayun	1.550.764	-	Saluran Embong Sawo Barat
				Saluran Grahadi
				Saluran RRI
				Saluran Embong Ploso Barat
				Saluran Embong Tanjung Timur
				Saluran Kenongo Timur
				Saluran Embong Malang sisi Utara
				Saluran Embong Malang sisi Selatan
20	Balong	7.683.763	Saluran Kali Balong	Saluran Tengah Margomulyo
				Saluran Margomulyo Gendong
21	Kalianak	2.377.255	Saluran Kalianak	Saluran Kalianak Timur
22	Krembangan	10.292.349	Saluran Kali Krembangan	Saluran Tanjungsari
				Saluran Suko Manunggal Utara
				Saluran Tambak Mayor

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Tambak Mayor PJKA
23	Diversi Gunungsari	44.145.581	Saluran Diversi Gunungsari	Saluran Putat Jaya
				Saluran Simo Gunung
				Saluran Simo Mulyo Barat
				Saluran Simo Pomahan
				Saluran Kupang Jaya
				Saluran Darmo Satelit
				Saluran Darmo Harapan
				Saluran Darmo Indah
				Saluran Karangpoh
				Saluran Tubanan
				Saluran Balongsari
				Saluran Gadelsari
				Saluran Manukan Madya
				Saluran Manukan Kulon
				Saluran Manukan Kasman
				Saluran Manukan Mulyo
				Saluran Manukan Lor
				Saluran Sambikerep
				Saluran Sawo 1
				Saluran Sawo 2
				Saluran Made
				Saluran Citra Raya
				Saluran Sememi
				Saluran Kendung
				Saluran Babat Jerawat
				Saluran Mayjen Sungkono Utara
				Saluran Mayjen Sungkono Selatan
				Saluran Kencanasari
24	Kali Kandangan	8.391.999	Saluran Kali Kandangan	Saluran Grand Pakuwon Barat
25	Sememi	9.591.308	Saluran Sememi	Saluran Sememi Baru
				Saluran Babat Buran
26	Tambakdono	6.420.706	Saluran Tambakdono	Saluran Kauman
				Saluran Sumber Rejo 1
				Saluran Sukodono Tambakdono
27	Romo Kalisari	11.448.422	Saluran Romo Kalisari	Saluran Romo Kalisari
28	Sumberrejo	4.236.633	Saluran Sumberrejo	Saluran Beji
				Saluran Benowo
				Saluran Singgapur
				Saluran Sumber Rejo 2
				Saluran Jawu Kidul
29	Kalimakmur	38.088.100	Saluran Kalimakmur	Saluran Bukit Golf
				Saluran Jajar Tunggal
				Saluran Raya Menganti
				Saluran Kedurus Indah Tengah
				Saluran Kramat
				Saluran Bukit Golf Graha Family

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Wiyung/Kali Kendal
				Saluran Babatan Indah
				Saluran Babatan
				Saluran Babatan Mukti
				Saluran Lidah Harapan
				Saluran Lidah Wetan
				Saluran Lidah Kulon
				Saluran Raya Pakuwon
				Saluran Pakuwon
				Saluran Perum Lidah Kulon
				Saluran Banjar Mlati
				Saluran Banjar Mlati Tengah
				Saluran Banjar Mlati Barat
				Saluran Raya Lakarsantri
				Saluran Lakarsantri
				Saluran Bangkingan
				Saluran Pondok Manggala
				Saluran Pondok Maritim
				Saluran Pondok Bogangan
				Saluran Kebraon Manis Barat
				Saluran Kebraon Manis Selatan
				Saluran Kebraon Utara
				Saluran Kebraon Selatan
				Saluran Kemlaten Baru
				Saluran Kemlaten
				Saluran Pesapen
				Saluran Sumur Welut
				Saluran Pondok Maritim Indah Barat
30	Karangpilang	6.236.895	-	Saluran Ksatria
				Saluran Karangpilang Barat
				Saluran Karangpilang Bromo
				Saluran Karangpilang Bagong
				Saluran Karangpilang Pdam
				Saluran Warugunung Suparma
				Saluran Warugunung Makam
				Saluran Warugunung Perbatasan

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

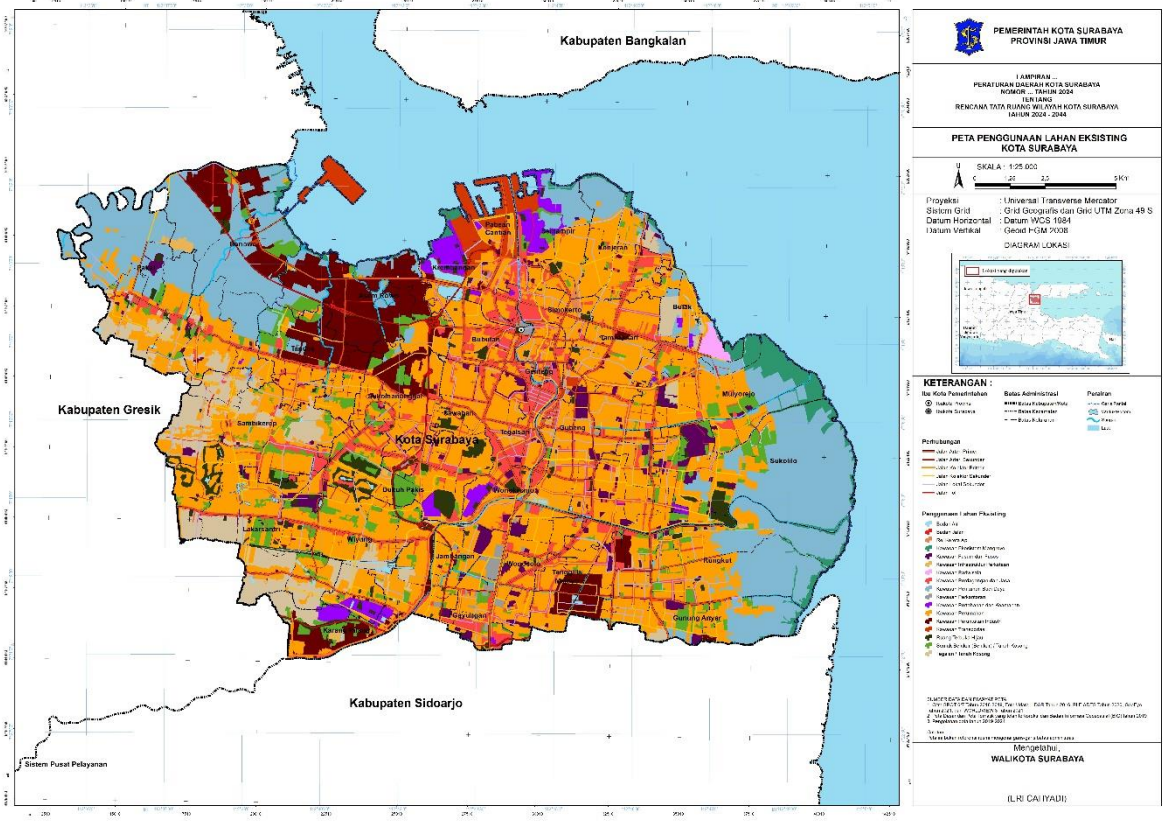
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan, 153 kelurahan, 1.361 rukun warga (RW) dan 9.155 rukun tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan yang secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Suroboyo yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya yang sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yang dikenal dengan sebutan Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya,

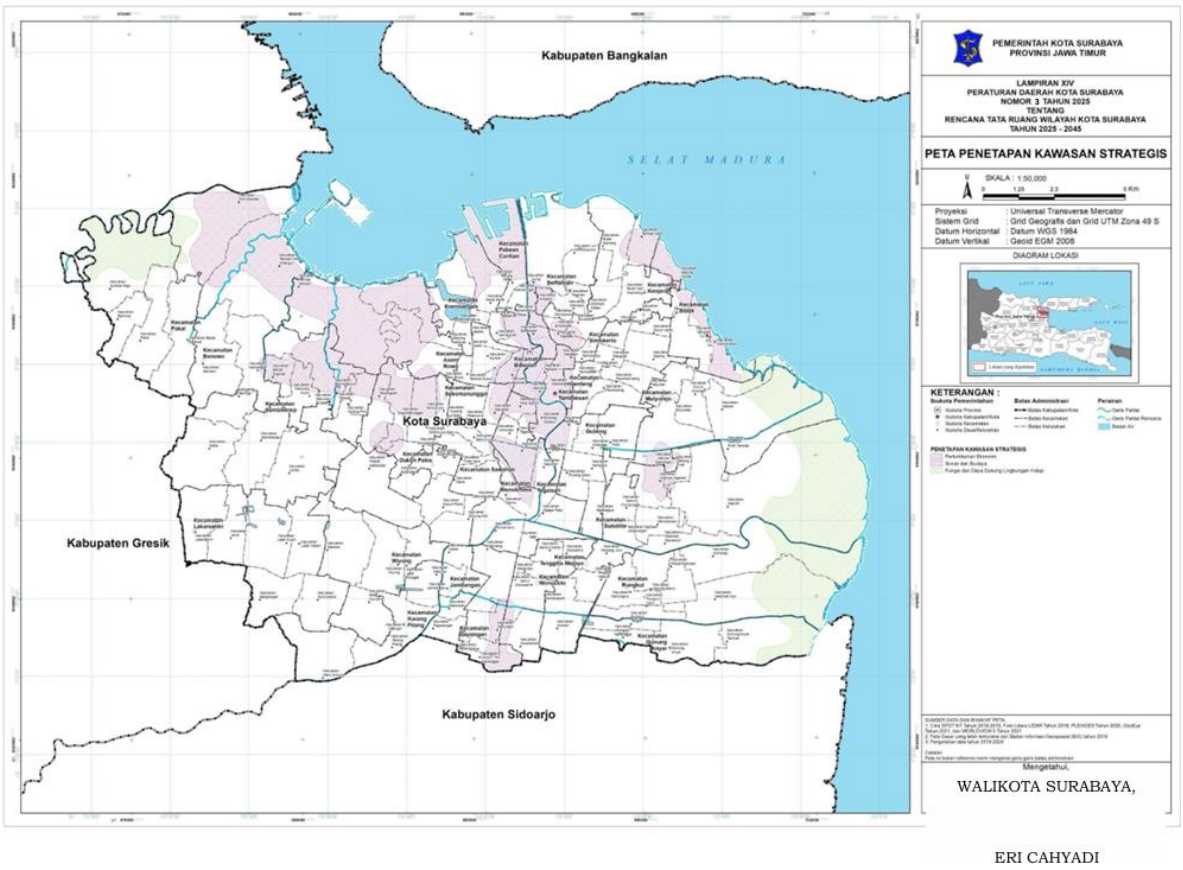
pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.



Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Sumber: RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, perumahan menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 48 persen atau 16.057 hektar. Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.3 menunjukkan Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.



Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Sumber: RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, di antaranya adalah:

a) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu area geografis yang memiliki potensi dalam pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dalam mempertimbangkan kawasan ekonomi maka dibutuhkan beberapa aspek yang mendukung dalam menetapkan kawasan ekonomi tersebut seperti Sumber daya alam, infrastruktur yang mendukung, SDM yang memiliki daya saing, akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah, keterbukaan dalam berinvestasi dan mengembangkan ekonomi. Kawasan yang memenuhi aspek tersebut dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Surabaya yakni :

- Kawasan Gerbang Kota Surabaya pada Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Wonocolo;
- Kawasan KKJS Kenjeran pada Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Mulyorejo;

- Kawasan Koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno – Jalan Kertajaya pada Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo;
- Kawasan perindustrian dan pergudangan Surabaya Barat terdapat di Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Tandes
- Kawasan Segi Delapan Darmo pada Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal;
- Kawasan Tanjung Perak dan sekitarnya pada Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian;
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Bubutan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonokromo.

b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya merupakan kawasan/area geografis yang memiliki potensi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui pengembangan sektor sosial budaya. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk meningkatkan nilai kawasan dengan tetap menekankan aspek perlindungan Cagar Budaya, dan pengembangan fungsi dan keunggulan cagar budaya untuk memberi nilai tambah bagi sosial budaya, serta aktivitas ekonomi kota yang produktif. Adapun kawasan strategis kepentingan sosial budaya tersebut terdapat di:

- Kecamatan Genteng;
- Kecamatan Gubeng;
- Kecamatan Sawahan;
- Kecamatan Tegalsari;
- Kecamatan Wonokromo;
- Kecamatan Krembangan;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kecamatan Sawahan;
- Kecamatan Semampir;
- Kecamatan Simokerto; dan
- Kecamatan Tegalsari.

Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota yang kaya dengan bangunan cagar budaya. Adapun sebaran bangunan dan/atau kawasan cagar budaya di Kota Surabaya sebagai berikut.

Tabel II.2
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Genteng	68
2	Krembangan	55
3	Pabean Cantian	31
4	Tegalsari	28
5	Wonokromo	24
6	Bubutan	24
7	Semampir	14
8	Gubeng	11
9	Sawahan	9
10	Tambaksari	7
11	Simokerto	8
12	Lakarsantri	2
13	Gayungan	1
14	Bulak	1
15	Dukuh Pakis	1
16	Wonocolo	1
Jumlah		**285**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

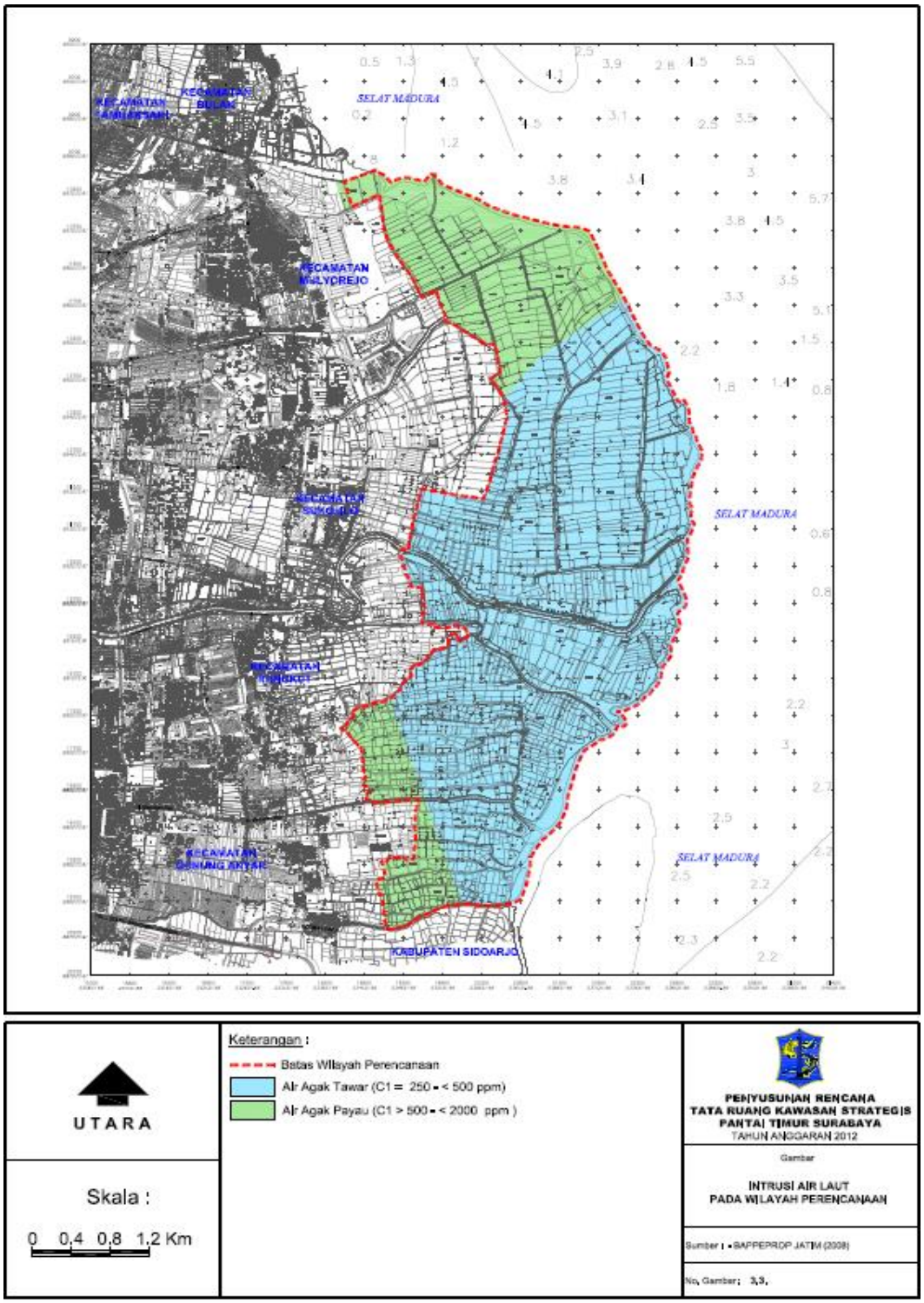
Kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki nilai ekologi tinggi atau memiliki potensi besar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kawasan ini dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya. Adapun kawasan yang masuk dalam kategori sebagai kawasan pelestarian lingkungan hidup yakni:

- Kawasan Muara Kali Lamong, terdapat di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal; dan
- Kawasan Pamurbaya di Kecamatan Bulak, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Sukolilo.

Tabel II.3
Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Jenis RTH	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.600,33	4.600,33	4.600,33
2	Hutan kota	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03
Total (Ha)		4.636,36	4.636,36	4.666,36	4.666,36	4.666,36

Sumber: Bappedalitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah, 2025



Gambar II.4 Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/ Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.

3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga "relatif aman" dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.5.



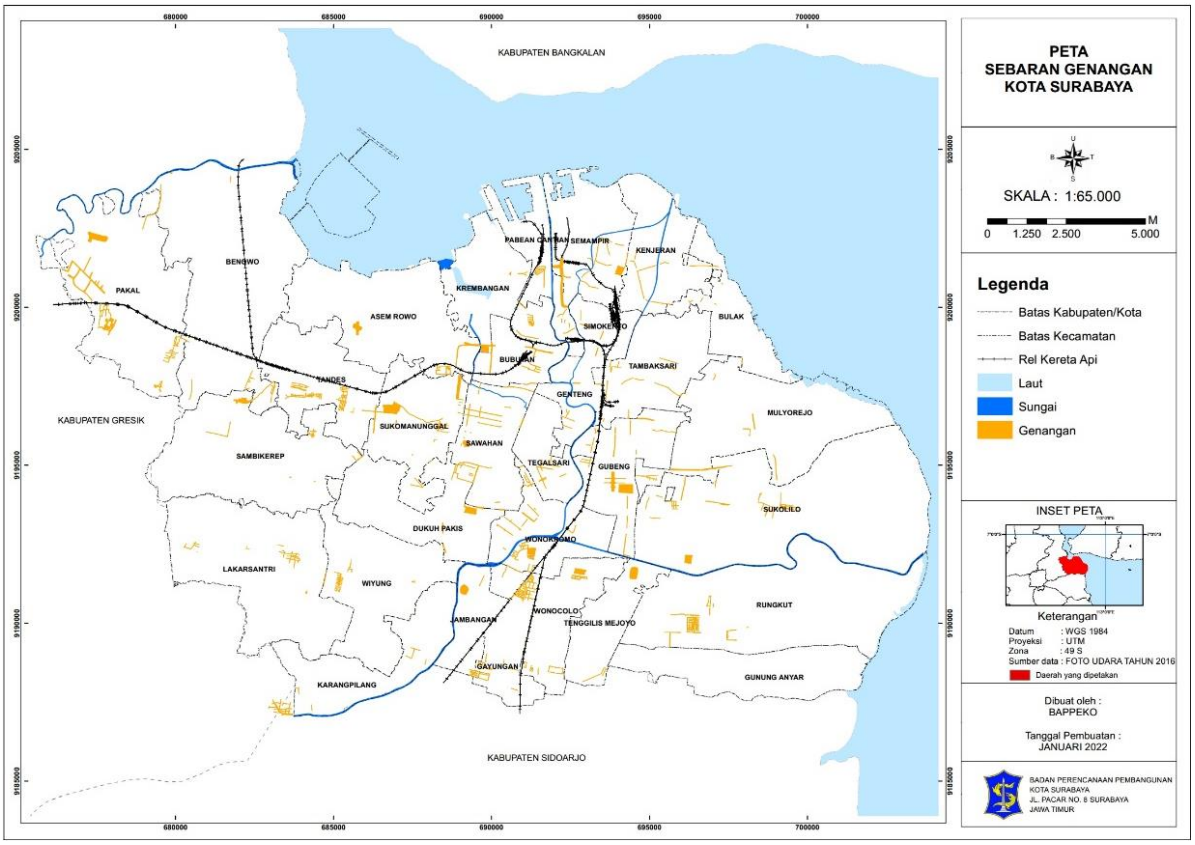
Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut.



Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara

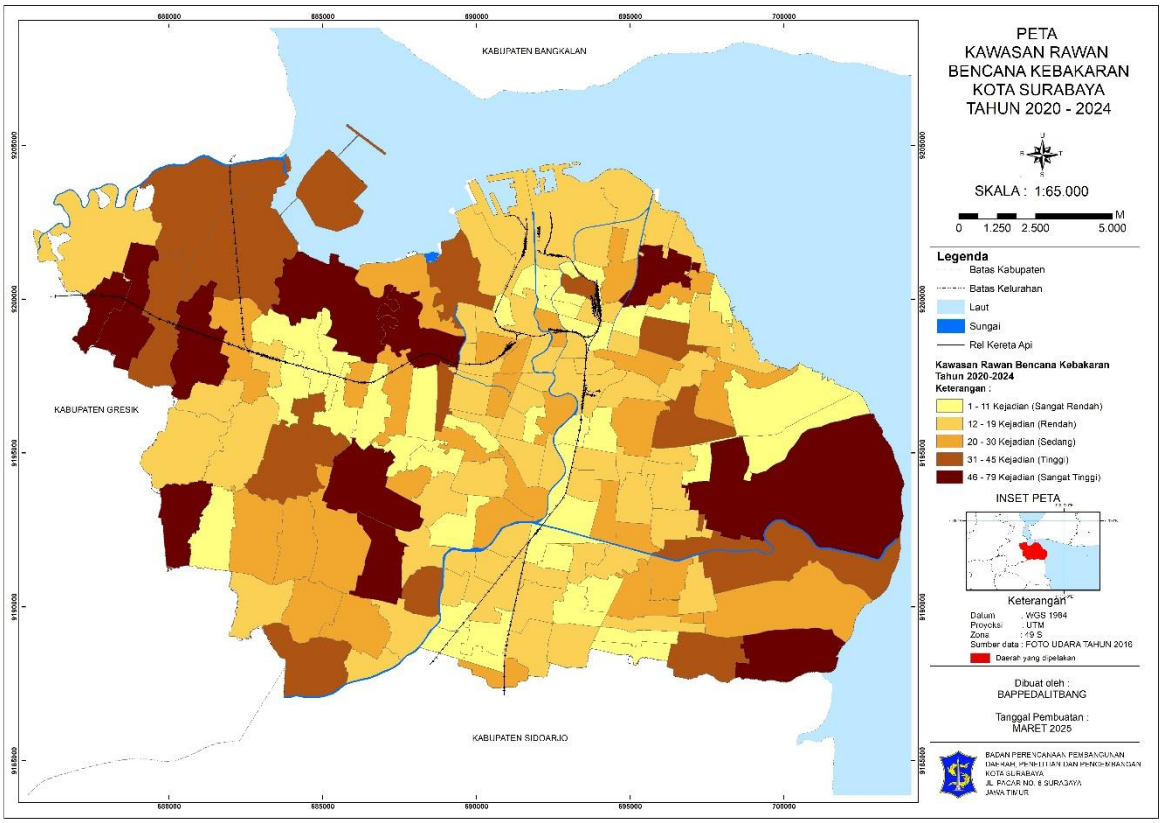


Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka

kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, baik milik

swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.4
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung	4	0	0	0	15
3	Kebakaran	705	589	771	112	40
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrim	0	0	0	0	0
7	Kekeringan	0	0	0	0	0
8	Tsunami	0	0	0	0	0
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	0
10	Likuifaksi	0	0	0	0	0
11	Kegagalan Teknologi	0	0	0	0	0
Total		**709**	**589**	**771**	**112**	**55**

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bencana gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuifaksi, serta kegagalan teknologi sepanjang tahun 2021-2025 Triwulan I belum pernah terjadi di Kota Surabaya. Sedangkan angin puting beliung pada tahun 2025 TW I terjadi sebanyak 15 kali diakibatkan pemanasan global yang tidak terhindarkan dan menyebabkan semakin tidak menentunya kondisi cuaca saat ini.

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk kelurahan tangguh bencana di seluruh kelurahan. Ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya, yakni mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Pada tahun 2023, jumlah kelurahan tangguh bencana berkurang disebabkan adanya penggabungan 2 kelurahan menjadi satu. Data kelurahan tangguh bencana tahun 2021 – 2025 (TW I) bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5
Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	154	154	153	153	153

Sumber: BPBD Kota Surabaya, 2025

Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan mitigasi bencana dengan melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada seluruh elemen masyarakat serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. Terkait dengan tanggap darurat bencana, Pemerintah Kota Surabaya

meningkatkan kapasitas Command Center 112 dan menyediakan 7 lokasi posko terpadu dan 22 lokasi pos pantau yang dapat memaksimalkan penanganan kejadian kedaruratan sampai dengan 7 menit, serta melakukan kegiatan pasca bencana dengan memberikan bantuan logistik kepada korban bencana yang membutuhkan. Jumlah pos pantau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 34 lokasi disebabkan sebagian pos pantau sudah tidak aktif lagi karena keterbatasan jumlah personil yang ada (pergeseran penugasan di balai RW). Sehingga pos pantau yang masih aktif merupakan pos pantau yang wilayahnya paling sering terjadi kedaruratan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi-hazard*) tersebut dengan tingkatan, seperti nilai 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Berikut adalah kondisi kinerja historis Pemerintah Kota Surabaya melalui IRB selama 5 tahun.

Tabel II.6
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB)	150,34	136,36	124,93	113,31	112,08*

Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur, 2025
**) nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan H&V tahun 2021*

IRB Kota Surabaya sejak tahun 2020 mengalami tren menurun, hingga tahun 2024 nilai IRB Kota Surabaya adalah 112,08 (masuk dalam klasifikasi sedang). Meski demikian, penyelenggaraan urusan kebencanaan pada periode mendatang akan memiliki tantangan yang cukup besar, terdapat potensi bencana akibat perubahan iklim, serta dampak dari pertambahan penduduk yang berpotensi besar menjadi penyebab bencana lingkungan. Di sisi lain permasalahan birokrasi dan tata kelola kebencanaan harus dapat terselesaikan, Perangkat Daerah belum sinkron serta sinergis dalam rangka mendukung ketahanan daerah, peralatan kebencanaan yang sesuai dengan standar masih belum tercukupi, aparatur serta perangkat kebencanaan yang belum merata memiliki kompetensi memadai dalam penanganan kedaruratan. Permasalahan dan tantangan tersebut selanjutnya menjadi isu yang perlu dioptimalkan dengan penyiapan dan penguatan ketangguhan serta ketahanan kota yang berkelanjutan. Upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi potensi bencana di Surabaya adalah melakukan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, penguatan kapasitas

petugas Kelurahan Tangguh Bencana, dan memonitoring secara berkala peralatan kesiapsiagaan bencana.

2.1.1.3 Kondisi Demografis

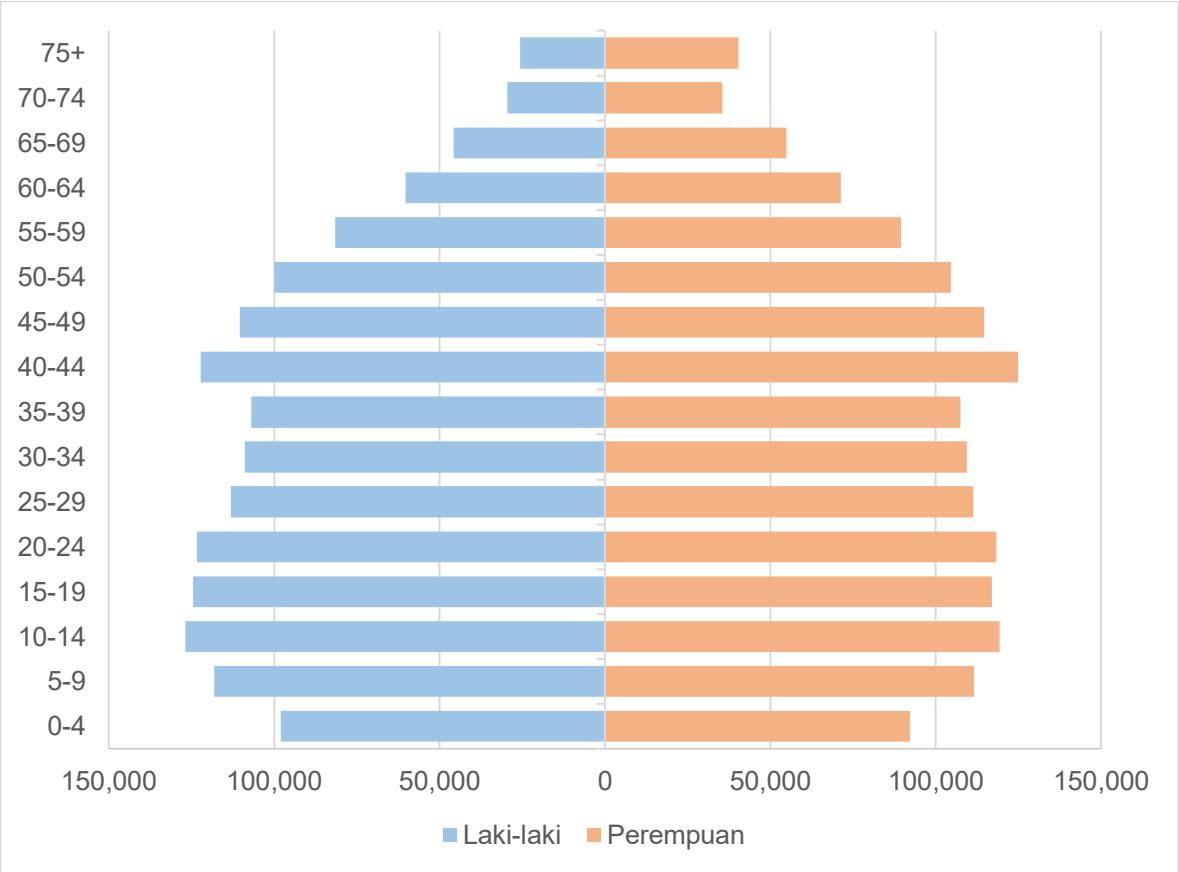
Keberadaan penduduk sangat penting dalam proses pembangunan, karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2024 sebesar 3.018.022 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Terdapat 7 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km^2 yaitu Kecamatan Bubutan, Kenjeran, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.7
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Asem Rowo	15,0083	48.841	3.254	17	Pakal	18,5756	64.515	3.473
2	Benowo	26,6462	74.933	2.812	18	Rungkut	22,9428	123.653	5.390
3	Bubutan	3,9060	96.704	24.758	19	Sambikerep	17,4166	69.076	3.966
4	Bulak	6,2363	47.839	7.671	20	Sawahan	7,1563	198.516	27.740
5	Dukuh Pakis	10,2708	59.345	5.778	21	Semampir	9,0671	183.295	20.215
6	Gayungan	5,9121	43.846	7.416	22	Simokerto	2,6300	92.057	35.003
7	Genteng	4,0919	58.216	14.227	23	Sukolilo	30,1774	115.913	3.841
8	Gubeng	7,9291	132.382	16.696	24	Sukomanunggal	9,4023	104.166	11.079
9	Gunung Anyar	10,1527	62.342	6.140	25	Tambaksari	8,9657	227.025	25.321
10	Jambangan	4,1191	54.212	13.161	26	Tandes	9,9805	91.784	9.196
11	Karang Pilang	9,3896	75.503	8.041	27	Tegalsari	4,3334	97.511	22.502
12	Kenjeran	8,5193	185.294	21.750	28	Tenggilis Mejoyo	5,8085	58.932	10.146
13	Krembangan	8,6046	114.866	13.349	29	Wiyung	12,3170	76.501	6.211
14	Lakarsantri	18,6939	65.013	3.478	30	Wonocolo	6,5445	80.034	12.229
15	Mulyorejo	17,3741	88.214	5.077	31	Wonokromo	8,2768	153.563	18.553
16	Pabean Cantian	5,4765	73.931	13.500	**Total**		**335,925**	**3.018.022**	**8.984**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1.523.288 jiwa atau 50,47% penduduk perempuan dan 1.494.734 jiwa atau 49,53% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II.9.



Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2024 yaitu usia 4-6 tahun sebanyak 135.798 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 286.240 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 147.342 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 146.363 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.8
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2024

No	Kecamatan	4-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	2.635	5.083	2.470	2.604
2	Benowo	3.449	7.372	3.882	3.828
3	Bubutan	4.281	8.978	4.659	4.763
4	Bulak	2.359	4.768	2.484	2.446
5	Dukuh Pakis	2.516	5.572	2.784	2.780

No	Kecamatan	4-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
6	Gayungan	1.838	4.079	2.060	2.166
7	Genteng	2.429	5.239	2.781	2.822
8	Gubeng	5.324	11.414	5.952	6.156
9	Gunung Anyar	2.844	5.993	3.019	2.852
10	Jambangan	2.453	5.289	2.763	2.635
11	Karangpilang	3.374	6.916	3.546	3.569
12	Kenjeran	9.774	19.517	9.692	9.431
13	Krembangan	5.417	11.038	5.725	5.596
14	Lakarsantri	3.004	6.188	3.177	3.291
15	Mulyorejo	3.694	7.843	4.010	4.089
16	Pabean Cantian	3.527	7.024	3.654	3.653
17	Pakal	2.994	6.277	3.176	3.250
18	Rungkut	5.502	11.811	5.912	5.636
19	Sambikerep	3.124	6.451	3.380	3.357
20	Sawahan	8.233	18.196	9.664	9.613
21	Semampir	9.592	19.394	9.743	9.555
22	Simokerto	4.237	8.867	4.521	4.339
23	Sukolilo	5.108	10.990	5.507	5.335
24	Sukomanunggal	4.688	9.913	4.956	4.887
25	Tambaksari	9.706	20.889	10.989	10.792
26	Tandes	3.944	8.881	4.674	4.625
27	Tegalsari	4.085	8.964	4.668	4.558
28	Tenggilis Mejoyo	2.575	5.434	2.836	2.829
29	Wiyung	3.240	6.929	3.591	3.583
30	Wonocolo	3.609	7.446	3.838	3.856
31	Wonokromo	6.243	13.485	7.229	7.467
Jumlah		**135.798**	**286.240**	**147.342**	**146.363**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025, diolah

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel II.9
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	2020	2021	2022	2023	2024
1. Islam	85,70%	85,83%	85,99%	86,05%	86,08%
2. Kristen	8,75%	8,68%	8,59%	8,56%	8,54%
3. Katholik	3,90%	3,87%	3,83%	3,83%	3,83%
4. Budha	1,40%	1,37%	1,34%	1,32%	1,30%
5. Hindu	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,21%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Agama	2020	2021	2022	2023	2024
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada tahun 2024, Kota Surabaya masih didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 86,08% sedangkan sisanya sebesar 13,92% adalah penduduk beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 81 jenis pekerjaan, yang paling banyak adalah Karyawan swasta, sebesar 56,13 persen. Posisi kedua ditempati oleh penduduk dengan status Mengurus rumah tangga yakni sebesar 14,09 persen, dan di posisi ketiga adalah Wiraswasta sebesar 11,79 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.10
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Karyawan Swasta	556.212	55,39717
2	Mengurus Rumah Tangga	142.972	14,23961
3	Wiraswasta	118.890	11,84111
4	Pelajar Mahasiswa	46.550	4,63625
5	Belum / Tidak Bekerja	38.270	3,81159
6	Pegawai Negeri Sipil	23.215	2,31215
7	Pensiunan	14.856	1,47962
8	Guru	9.837	0,97974
9	Tentara Nasional Indonesia	9.702	0,96629
10	Pedagang	5.767	0,57438
11	Buruh Harian Lepas	4.546	0,45277
12	Karyawan BUMN	4.247	0,42299
13	Dosen	3.806	0,37907
14	Kepolisian RI	3.729	0,37140
15	Dokter	3.153	0,31403
16	Petani/Pekebun	2.472	0,24620
17	Perdagangan	2.037	0,20288
18	Sopir	1.814	0,18067
19	Karyawan Honorer	1.403	0,13973
20	Tukang Batu	1.310	0,13047

No	Pekerjaan	Jumlah	%
21	Nelayan/Perikanan	995	0,09910
22	Perawat	793	0,07898
23	Karyawan BUMD	449	0,04472
24	Pendeta	400	0,03984
25	Mekanik	366	0,03645
26	Tukang Jahit	325	0,03237
27	Pelaut	318	0,03167
28	Industri	310	0,03088
29	Pembantu Rumah Tangga	291	0,02898
30	Buruh Tani/Perkebunan	257	0,02560
31	Tukang Kayu	249	0,02480
32	Transportasi	246	0,02450
33	Konstruksi	235	0,02341
34	Pengacara	233	0,02321
35	Wartawan	185	0,01843
36	Tukang Las/Pandai Besi	149	0,01484
37	Biarawati	136	0,01355
38	Seniman	133	0,01325
39	Konsultan	129	0,01285
40	Notaris	125	0,01245

No	Pekerjaan	Jumlah	%
41	Bidan	120	0,01195
42	Tukang Listrik	111	0,01106
43	Apoteker	105	0,01046
44	Arsitek	92	0,00916
45	Buruh Nelayan/Perikanan	79	0,00787
46	Ustadz/Mubaligh	57	0,00568
47	Juru Masak	55	0,00548
48	Tukang Sol Sepatu	48	0,00478
49	Tukang Cukur	41	0,00408
50	Peneliti	32	0,00319
51	Penata Rias	30	0,00299
52	Pastor	28	0,00279
53	Penata Rambut	26	0,00259
54	Akuntan	26	0,00259
55	Peternak	25	0,00249
56	Psikiater/Psikolog	21	0,00209
57	Pilot	16	0,00159
58	Imam Masjid	13	0,00129
59	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	12	0,00120
60	Tabib	10	0,00100
61	Buruh Peternakan	9	0,00090
62	Anggota DPRD Provinsi	7	0,00070
63	Penterjemah	7	0,00070
64	Perancang Busana	6	0,00060
65	Perangkat Desa	6	0,00060
66	Penyiar Radio	5	0,00050
67	Penata Busana	5	0,00050
68	Tukang Gigi	4	0,00040
69	Anggota DPR RI	4	0,00040
70	Pialang	2	0,00020
71	Penyiar Televisi	2	0,00020
72	Anggota Kabinet/ Kementerian	2	0,00020
73	Paranormal	2	0,00020
74	Promotor Acara	2	0,00020
75	Gubernur	2	0,00020
76	Kepala Desa	2	0,00020
77	Paraji	1	0,00010
78	Walikota	1	0,00010
79	Wakil Walikota	1	0,00010
80	Wakil Bupati	1	0,00010
81	Lainnya	1.914	0,19063

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (29,75 persen), merupakan penduduk lulusan SMA sederajat. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 19,70 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sederajat sebanyak 15,35 persen.

Tabel II.11
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	594.608	19,70
Belum Tamat SD/setara	241.676	8,01
Tamat SD/setara	463.240	15,35
SMP/setara	438.040	14,51
SMA/setara	897.840	29,75
D1/D2	16.341	0,54
D3/Sarjana Muda	41.259	1,37
D4/S1	301.325	9,98
S2	21.961	0,73
S3	1.732	0,06
Total	**3.018.022**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.12.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2024, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dengan kecepatan laju yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2024 dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya, terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih terkontraksi yakni lapangan usaha pertanian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2024 yakni administrasi pemerintahan, diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya. Lapangan usaha administrasi pemerintahan pada tahun 2024 mengalami laju pertumbuhan tertinggi di Kota Surabaya sebesar 9,88 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2024 yakni pertanian kehutanan, dan perikanan yang terkontraksi sebesar -6,06 persen. Lapangan usaha pertanian tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif disebabkan karena selain karena terbatasnya lahan untuk pertanian di Kota Surabaya juga karena faktor pola musiman.

Tabel II.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,90	1,11	3,46	0,51	-6,06
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,34	0,08	-1,98	-6,54	1,54
C	Industri Pengolahan	-1,15	3,90	6,55	3,34	5,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,25	6,10	8,03	30,84	5,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,02	5,63	2,13	2,41	2,17
F	Konstruksi	-5,39	4,38	6,40	5,02	7,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,57	7,37	6,95	5,48	4,13
H	Transportasi dan Pergudangan	-4,98	2,05	14,14	11,16	9,03

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,87	2,08	8,48	7,84	7,38
J	Informasi dan Komunikasi	7,19	6,00	3,14	6,76	6,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,23	0,49	1,68	4,05	3,73
L	Real Estate	2,00	1,63	4,07	2,42	2,38
M,N	Jasa Perusahaan	-7,11	1,97	5,75	8,30	7,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,33	-0,12	0,16	0,06	9,88
P	Jasa Pendidikan	2,75	0,59	0,08	4,47	5,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,75	5,17	1,62	3,97	5,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	-16,30	2,76	13,26	9,28	8,26
PDRB		**-4,85**	**4,29**	**6,51**	**5,70**	**5,76**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Namun seiring dengan melandainya jumlah kasus penularan yang terjadi di Surabaya Raya, dan didukung oleh kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kembalinya perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di normal yang baru dengan inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya *online marketplace* seperti ePeken.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya bergerak positif sehingga pada tahun 2022 tercapai pada angka 6,51 persen. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya tercapai pada angka 5,70 persen yang mengindikasikan bahwa ekonomi di Kota Surabaya tetap mengalami pertumbuhan namun lebih rendah dari target sebesar 5,90 persen. Kendati begitu, pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi tetap bertumbuh mencapai angka 5,76 persen dengan target yang berada pada range 5,6 hingga 6,1 persen. Kendati pertumbuhan diproyeksikan bergerak positif, upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan utamanya pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dan terlepas dari kontraksi sebagaimana terjadi di tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2024, Kota Surabaya mengalami peningkatan namun untuk Provinsi Jawa Timur dan Nasional sedikit mengalami penurunan. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.13
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020–2024 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024*

Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024*
Surabaya	-4,85	4,29	6,51	5,70	5,76
Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

*Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2025. *) data sementara*

2.1.2.1.1.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010, mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tabels* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024, sebesar Rp772.493.614,50 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, sebesar Rp715.294.707,23 juta. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2024 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp214.341.080,16 juta atau sebesar 27,75%. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp147.302.541,52 juta atau sebesar 19,07% sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.14.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp459.030.719,58 juta meningkat menjadi sebesar Rp485.448.887,46 juta di tahun 2024. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp134.133.559,71 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp92.182.283,14 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp71.889.162,06 juta seperti dapat dilihat pada Tabel II.15 berikut.

Tabel II.14
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	982.815,39	0,15	1.026.186,70	0,14	969.357,95	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	31.943,8	0,01	32.761,34	0,01	33.392,98	0,01	32.513,35	0,00	31.379,96	0,004
C	Industri Pengolahan	107.416.294,34	19,37	113.544.581,14	19,24	126.030.898,75	19,22	135.434.984,12	18,93	147.302.541,52	19,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.237.615,57	0,40	2.417.167,25	0,41	2.742.046,30	0,42	3.728.710,22	0,52	3.970.550,80	0,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	932.750,33	0,14	968.113,96	0,14	994.411,87	0,13
F	Konstruksi	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	61.408.502,94	9,37	64.940.579,25	9,08	70.335.981,63	9,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	184.610.467,40	28,16	201.432.925,47	28,16	214.341.080,16	27,75
H	Transportasi dan Pergudangan	29.794.090,41	5,37	30.520.260,56	5,17	36.260.418,47	5,53	42.834.312,86	5,99	47.529.709,19	6,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	102.248.698,97	15,60	114.627.560,20	16,03	126.222.540,64	16,34
J	Informasi dan Komunikasi	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	36.541.720,23	5,57	39.290.062,52	5,49	42.170.987,10	5,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	33.950.422,52	5,18	35.852.303,70	5,01	37.509.068,51	4,86
L	Real Estate	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	16.599.139,83	2,53	17.213.531,88	2,41	17.731.558,74	2,30
M,N	Jasa Perusahaan	14.116.912,06	2,55	14.543.157,97	2,46	15.772.593,51	2,41	17.530.932,18	2,45	19.268.197,54	2,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	8.486.026,22	1,29	8.533.021,21	1,19	9.788.000,22	1,27
P	Jasa Pendidikan	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	14.866.084,13	2,27	15.784.480,73	2,21	16.838.454,88	2,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	5.508.115,81	0,84	5.958.216,19	0,83	6.374.976,68	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	8.642.127,81	1,32	10.106.272,69	1,41	11.114.817,11	1,44
Produk Domestik Regional Bruto		**554.509.457,38**	**100**	**590.227.966,81**	**100**	**655.616.221,58**	**100**	**715.294.707,23**	**100**	**772.493.614,50**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Tabel II.15
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	547.994,9	0,14	554.054,70	0,14	573.236,82	0,13	1.026.186,70	0,14	541.237,84	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	19.094,55	0,01	32.513,35	0,00	18.120,26	0,004
C	Industri Pengolahan	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	84.567.579,11	19,47	135.434.984,12	18,93	92.182.283,14	18,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38	1.661.665,76	0,38	3.728.710,22	0,52	2.301.731,69	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	680.003,79	0,16	968.113,96	0,14	711.522,48	0,15
F	Konstruksi	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	42.633.575,68	9,82	64.940.579,25	9,08	47.910.218,85	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	122.122.627,45	28,12	201.432.925,47	28,16	134.133.559,71	27,63
H	Transportasi dan Pergudangan	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87	22.684.941,35	5,22	42.834.312,86	5,99	27.494.461,88	5,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	62.076.385,35	14,29	114.627.560,20	16,03	71.889.162,06	14,81
J	Informasi dan Komunikasi	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	32.264.418,48	7,43	39.290.062,52	5,49	36.698.243,72	7,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74	19.648.801,34	4,52	35.852.303,70	5,01	21.207.821,53	4,37
L	Real Estate	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	11.634.820,68	2,68	17.213.531,88	2,41	12.200.164,26	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	2,20	9.490.093,03	2,19	17.530.932,18	2,45	11.082.009,45	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	4.756.347,15	1,10	8.533.021,21	1,19	5.229.776,89	1,08
P	Jasa Pendidikan	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	10.001.195,71	2,30	15.784.480,73	2,21	10.983.874,40	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	3.782.452,79	0,87	5.958.216,19	0,83	4.155.684,76	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	5.671.102,07	1,31	10.106.272,69	1,41	6.709.014,54	1,38
Produk Domestik Regional Bruto		**390.936.424,98**	**100**	**407.726.799,20**	**100**	**434.268.341,12**	**100**	**715.294.707,23**	**100**	**485.448.887,46**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Tabel II.16
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13	0,14	0,13	0,13	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,004	0,004
C	Industri Pengolahan	19,37	19,54	19,24	19,47	19,22	19,47	18,93	19,04	19,07	18,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	0,37	0,41	0,38	0,42	0,38	0,52	0,47	0,51	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13	0,15
F	Konstruksi	9,37	9,82	9,36	9,83	9,37	9,82	9,08	9,75	9,11	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,92	27,20	27,70	28,00	28,16	28,12	28,16	28,06	27,75	27,63
H	Transportasi dan Pergudangan	5,37	4,98	5,17	4,87	5,53	5,22	5,99	5,49	6,15	5,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,44	14,34	15,49	14,03	15,60	14,29	16,03	14,58	16,34	14,81
J	Informasi dan Komunikasi	6,00	7,55	5,98	7,67	5,57	7,43	5,49	7,50	5,46	7,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,26	4,92	5,18	4,74	5,18	4,52	5,01	4,45	4,86	4,37
L	Real Estate	2,77	2,81	2,68	2,74	2,53	2,68	2,41	2,60	2,30	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	2,55	2,25	2,46	2,20	2,41	2,19	2,45	2,24	2,49	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,49	1,22	1,41	1,16	1,29	1,10	1,19	1,04	1,27	1,08
P	Jasa Pendidikan	2,62	2,54	2,49	2,45	2,27	2,30	2,21	2,28	2,18	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,91	0,88	0,91	0,84	0,87	0,83	0,86	0,83	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,25	1,25	1,24	1,23	1,32	1,31	1,41	1,35	1,44	1,38
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 yang banyak tantangan dan ketidakpastian selaras dengan perekonomian pusat dan global, membuat beberapa peran sektor lapangan usaha Kota Surabaya juga melambat. Kondisi itu ditunjukkan oleh dua

sektor terbesar Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2024 lapangan usaha ini memberikan peranan terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar 27,63 persen, sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 28,06 persen. Hal yang sama juga dialami oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 18,99 persen yang sebelumnya sebesar 19,04 persen. Artinya selama tahun 2024, peran Industri Pengolahan turun sebesar 0,05 persen. Melemahnya kinerja perdagangan besar maupun kecil tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki kecendurangan terus meningkat. Sejak tahun 2021 hingga 2024 lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 14,03 persen dan meningkat di tahun 2022 sebesar 14,29 persen. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar 14,81 persen. Tingginya peran lapangan usaha ini didorong oleh banyaknya aktivitas *event* maupun hiburan sehingga banyak hotel maupun restoran, cafe, rumah makan yang tumbuh di Kota Surabaya.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan kontribusi, yang pada tahun 2023 sebesar 5,49 persen menjadi 5,66 persen. Meningkatnya peran lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian Kota Surabaya selaras dengan Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi secara otomotis membuat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi. Hal itu dikarenakan transportasi menjadi moda penggerak aktivitas masyarakat dan perekonomian Kota Surabaya.

2.1.2.1.1.2 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2020 – 2024.

Tabel II.17
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

Tahun	2020	2021	2022	2023*	2024**
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Milyar Rp)	554.509,46	590.227,97	655.616,22	715.294,71	772.493,61
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	193,01	204,92	227,08	245,72	264,37
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Milyar Rp)	390.936,42	407.726,80	434.268,34	459.030,72	485.448,89
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	136,07	141,56	150,41	157,69	166,14
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)	2.873	2.880	2.887	2.911	2.922

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Pada tabel di atas, PDRB per kapita Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini karena dampak adanya pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.2 Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 1,38 persen menurun dibandingkan tahun 2023. Bahkan nilai inflasi pada tahun ini lebih rendah dari sasaran yang ditargetkan 2,5 ± 1 persen. Terkendalinya inflasi Kota Surabaya sejalan dengan masifnya aksi pengendalian harga sepanjang tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menstabilkan harga. Aksi pengendalian harga diwujudkan melalui monitoring harga secara berkala, operasi pasar serta kolaborasi kerjasama dengan daerah penghasil. Nilai inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 capaiannya juga lebih

rendah dibanding nilai inflasi pada tingkat provinsi yang tercatat sebesar 1,51 persen dan Nasional sebesar 1,57 persen.



	2021	2022	2023	2024	2025
Surabaya	2.71	6.59	3.03	1.38	0.04
Jawa Timur	2.45	6.52	2.92	1.51	0.3
Indonesia	1.87	5.51	2.61	1.57	0.39

Gambar II.10
Inflasi Kota Surabaya (*year-to-date*) Tahun 2021–2025 (TW I)
Sumber: BPS Kota Surabaya, April 2025

Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Sejak tahun 2021, rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional maupun provinsi, tingginya nilai inflasi tersebut berpotensi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

Peningkatan inflasi tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa peningkatan inflasi global akibat meningkatnya harga komoditas global yang selanjutnya kemudian berdampak terhadap harga-harga produk dalam negeri. Namun pada tahun 2023 dan berlanjut sampai akhir tahun 2024, angka tersebut berhasil dikendalikan, salah satunya karena upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta tetap menjaga komunikasi yang efektif bersama.

Sementara inflasi Kota Surabaya selama tahun 2025 secara kumulatif sebesar 0,04 persen. Nilai inflasi kumulatif tersebut tergolong rendah. Hal itu dikarenakan inflasi bulanan selama tahun 2025 Kota Surabaya mengalami deflasi 2 (dua) kali yakni pada bulan Januari dan Februari dengan deflasi masing-masing sebesar -0,72 persen dan -0,53 persen. Selanjutnya pada bulan Maret 2025 Kota Surabaya mengalami inflasi bulanan sebesar 1,30 persen. Inflasi bulan Maret

didorong oleh faktor inflasi musiman pada momen puasa Ramadhan sehingga mendorong tingginya permintaan yang akhirnya memicu inflasi. Berdasarkan jenis komoditasnya, 10 komoditas tertinggi penyumbang inflasi bulan maret 2025 yakni tarif listrik, cabai rawit, bawang merah, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, santan jadi, air kemasan, telur ayam ras dan daging sapi. Sebaliknya 10 (sepuluh) komoditas yang menyumbang deflasi pada bulan Maret 2025 yakni angkutan udara, cumi-cumi, tomat, kepiting, telepon seluler, kacang panjang, biskuit, makan hewan peliharaan, wortel dan ikan gurami.

2.1.2.1.3 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. bayBerdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang dirilis BPS, indeks gini Kota Surabaya memiliki angka yang cenderung lebih tinggi dibandingkan keduanya, kecuali kondisi pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2023, peningkatan indeks gini di Kota Surabaya cukup signifikan. Oleh sebab itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan selalu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

Tabel II.18
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya	0,344	0,351	0,388	0,423	0,381

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	0,366	0,374	0,371	0,387	0,372
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber data: BPS, 2025 (versi data Maret)

2.1.2.1.4 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Meski garis kemiskinan setiap tahun cenderung meningkat mengikuti inflasi, namun angka dan jumlah penduduk miskin harus semakin menurun. Pada periode pandemi Covid-19, tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin naik cukup signifikan sebagai dampak dari pembatasan sosial dalam skala besar. Namun di tahun 2022, angka kemiskinan berhasil diturunkan, hingga menjadi 3,96 di tahun 2024 sebagai dampak dari berbagai intervensi kemiskinan yang dilakukan secara masif oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selengkapnya angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Uraian	Lingkup	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan (persen)	Surabaya	5,02	5,23	4,72	4,65	3,96
	Jawa Timur	11,09	11,40	10,38	10,35	9,79
	Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	Surabaya	592.137	611.466	652.540	718.370	742.678
	Jawa Timur	416.001	429.133	460.909	507.286	536.122
	Nasional	454.652	472.525	505.469	550.458	582.932
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Surabaya	145,67	152,489	138,21	136,37	116,62
	Jawa Timur	4.419,10	4.572,73	4.181,29	4.188,81	3.982,69
	Nasional	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55	25.219,20

Sumber: BPS, 2025 (versi data Maret)

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi

intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity)* per hari. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 69.330 jiwa (2,39%), terus menurun di tahun 2021, sebanyak 35.020 jiwa (1,20%), tahun 2022 sebanyak 23.530 jiwa (0,80%), tahun 2023 sebanyak 7.572 jiwa (0,25%), hingga menjadi 0 jiwa di tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/103/436.1.2/2024. Salah satu kunci sukses pengentasan kemiskinan ekstrem adalah bentuk intervensi bagi mereka dengan mendorong pembukaan lapangan kerja padat karya untuk peningkatan kemandirian ekonomi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2023, angka IPM mengalami *update* data Umur Harapan Hidup, yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. *Update* angka umur harapan hidup tersebut mengakibatkan penyesuaian angka IPM sejak tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Kota Surabaya meningkat dari 82,76 pada tahun 2020 menjadi 84,69 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,58% per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, yang juga merupakan angka tertinggi untuk tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama 5 tahun terakhir, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.20
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Kota Surabaya	82,76	82,94	83,32	83,99	84,69
IPM Provinsi Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
IPM Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

2.1.2.2.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat dapat diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2023, data UHH yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, sehingga mengakibatkan perubahan angka UHH sejak tahun 2020 hingga tahun-tahun berikutnya. Perkembangan UHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.21
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Umur Harapan Hidup (UHH)	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya (tahun)	75,24	75,43	75,62	75,82	76,02
Provinsi Jawa Timur (tahun)	74,21	74,28	74,57	74,87	75,07
Nasional (tahun)	73,37	73,46	73,7	73,93	74,15

Sumber: BPS, 2025.

UHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar 75,24 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 75,43 tahun meski di tengah kondisi pandemi. Kemudian di tahun 2022, UHH penduduk Kota Surabaya kembali meningkat menjadi 75,62 tahun. Hingga pada tahun 2023 dan 2024 UHH penduduk Kota Surabaya terus meningkat menjadi berturut-turut 75,82 dan 76,02 tahun. Perkembangan yang positif ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya melalui UHC (*universal health coverage*), yang didukung oleh para pemangku kepentingan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan milik swasta lainnya.

2.1.2.2.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur melalui RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (mean years of schooling) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses

pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.22
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2020	2021	2022	2023	2024
RLS Kota Surabaya (tahun)	10,49	10,50	10,51	10,70	10,89
RLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	7,78	7,88	8,03	8,11	8,28
RLS Nasional (tahun)	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS, 2025

Harapan lama sekolah (*expected years of schooling)* menurut BPS adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020–2024

Harapan Lama Sekolah (HLS)	2020	2021	2022	2023	2024
HLS Kota Surabaya (tahun)	14,80	14,81	14,83	14,85	14,87
HLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	13,19	13,36	13,37	13,38	13,43
HLS Nasional (tahun)	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber: BPS, 2025

Tabel II.24
Proporsi Penduduk Kota Surabaya Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830	2.351.685
2	Jumlah penduduk berpendidikan tinggi (D1 hingga S3)	364.797	366.152	370.302	378.154	382.618
3	Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	14,83	15,95	16,09	16,22	16,27

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa peluang penduduk usia 7 tahun ke atas untuk terus bersekolah/ mengakses pendidikan sampai dengan melebihi jenjang

menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1). Adapun penyebab utama yang secara signifikan dapat mempengaruhi HLS dan RLS antara lain karena faktor penduduk yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dari Proporsi Penduduk Kota Surabaya Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024, masih berada di 16,27%. Penyebab anak tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi antara lain disebabkan 1) kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya pendidikan tinggi (merasa pendidikan cukup), 2) menikah/mengurus rumah tangga dan 3) telah bekerja.

Meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah masih belum dapat memenuhi harapan lama sekolah. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pemerataan dan pengembangan akses di bidang Pendidikan, melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP, penyelenggaraan Sekolah Inklusi pada 1 PAUD, 284 SD negeri dan 63 Unit SMPN, pengembangan PAUD Holistik Integratif, Kejar Paket dengan muatan pendidikan vokasi, Sinau dan Ngaji Bareng Arek Suroboyo yang diselenggarakan di 234 balai RW, serta Program Tebus Ijazah bagi 631 siswa jenjang SMA/SMK/MA dengan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong program Orang Tua Asuh, beasiswa bagi penghafal kitab suci sebanyak 1.456 siswa (meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 1.339 siswa), beasiswa SMA/SMK/MA untuk 21.000 siswa, beasiswa pemuda tangguh untuk 3.500 mahasiswa, serta Program Surabaya Mengajar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kota Surabaya.

2.1.2.2.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak didapat melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat di kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.25
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Pengeluaran Per Kapita	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya (Rp .000)	17.755	17.826	18.345	18.977	19.666
Provinsi Jawa Timur (Rp .000)	11.601	11.707	11.992	12.421	12.852
Nasional (Rp .000)	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai 19,666 juta rupiah per tahun. Tentu, angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional, karena tingginya kebutuhan hidup di kota besar yang selaras dengan perkembangan kemajuan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya.

2.1.2.2.2 Indeks Harmoni Sosial

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator baru dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menekankan pada keselarasan perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut. Indeks Budaya Lokal disusun oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (4) persentase rumah sehat. Kemudian, Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan dengan hasil survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan.

Nilai Indeks Budaya Lokal dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat

mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, beserta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel II.26
Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Harmoni Sosial	N/A	N/A	80,08	82,70	99,83
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	N/A	N/A	48,01	56,51	113,32
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	N/A	N/A	97,67	97,86	97,98
1.c	Indeks Budaya Lokal	88,56	89,67	89,97	89,99	90,11

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2024 sebesar 99,83 tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan ragam dan frekuensi event budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta penguatan karakter kebangsaan dan kerukunan antar masyarakat di Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut di antaranya merupakan hasil dari rutinnya pelaksanaan event, festival serta parade dengan tema seni dan budaya serta sejarah yang diadakan di Kota Surabaya, seperti Parade Juang, Festival Rujak Uleg, Peringatan Peristiwa Perobekan Bendera, Surabaya Heroic Track, Sekolah Kebangsaan, Surabaya Vaganza, Pemilihan Duta Wisata, Kya-Kya Festival, Cak dan Ning, Peringatan Hari Tari Sedunia serta Sedekah Bumi. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat, baik pelajar maupun pelaku usaha mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di antaranya pembinaan bank sampah di 470 lokasi dan 40 kampung zero waste, serta diadakannya perlombaan lingkungan seperti *Surabaya Smart City, ECO school,* ECO campus dan ECO pesantren. Kemudian, pencapaian Indeks Harmoni Sosial tersebut juga terwujud melalui upaya pemantapan karakter kebangsaan dan ideologi pancasila, serta penguatan kerukunan antar masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik umat beragama, serta sosialisasi anti narkotika dan koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Seiring dengan upaya dalam mengurangi potensi konflik, Pemerintah Kota Surabaya juga senantiasa berupaya penuh dalam meningkatkan nilai kesalehan sosial dalam bermasyarakat. Salah satu langkah strategis dalam meraih hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepedulian sosial di masyarakat yang diukur dalam Indeks Kepedulian Sosial. Indeks Kepedulian Sosial merupakan suatu

sinergi yang menggabungkan antara nilai sosial kemanusiaan, ketuhanan, budi pekerti serta kepatuhan terhadap peraturan negara.

2.1.2.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar.

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH penduduk Kota Surabaya sudah sebesar 100 persen sejak tahun 2016. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.27
Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bisa Membaca dan Menulis	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830	2.330.830
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830	2.330.830
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari data pada tabel di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. Perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.28
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	APM SD/MI (persen)	98,46	100,82	91,37	95,08	95,34
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang berusia 7-12 Tahun	295.357	299.814	269.289	277.858	272.908

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	299.966	297.369	294.723	292.229	286.240
2	APM SMP/MTs (persen)	87,58	87,34	80,77	96,17	96,27
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 Tahun	126.874	129.763	119.705	141.948	141.853
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	144.872	148.573	148.205	147.594	147.342

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dispendukcapil Kota Surabaya, 2025

Peningkatan APM SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2024 tersebut dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs serta menjadi tolak ukur keberhasilan atas penambahan daya tampung ruang kelas baru di beberapa sekolah. Sedangkan manfaat pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi siswa mampu membantu peningkatan perekonomian dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa itu sendiri.

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.29
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio APM SD/MI (persen)	92,73	99,80	94,04	100,15	100,25
2.	Rasio APM SMP/MTs (persen)	90,59	103,13	94,00	101,63	101,71

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (Triwulan I) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.30
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	APK PAUD (persen)	69,59	75,56	77,57	77,39	73,02
1.1	Jumlah Seluruh Siswa PAUD	123.269	102.666	105.998	105.090	135.798
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 4-6 Tahun	177.135*	135.876	136.632	135.798	99.156

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
2.	APK SD/MI (persen)	106,90	106,37	109,89	104,50	88,11
2.1	Jumlah Seluruh Siswa SD/MI	317.885	313.505	321.128	299.111	252.194
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	297.369	294.723	292.229	286.240	286.240
3.	APK SMP/MTs (persen)	110,64	108,47	110,53	105,89	79,04
3.1	Jumlah Seluruh Siswa SMP/MTs	164.376	160.764	163.134	156.024	116.456
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	148.573	148.205	147.594	147.342	147.342

*Sumber: Dinas Pendidikan, 2025. *)data menggunakan kelompok usia 3-6 tahun.*

Rendahnya APK SD/MI dan APK SMP/MTs di Triwulan I Tahun 2025 dikarenakan masih banyak satuan pendidikan yang sedang proses melakukan pembaruan data peserta didik di masing-masing jenjang baik SD/setara maupun SMP/setara. Sebagai kontrol dalam perhitungan APK, selain bersumber dari pelaporan pembaruan peserta didik, Dinas Pendidikan perlu melakukan sinkronisasi anak usia sekolah dengan data kependudukan dan bekerjasama dengan Kelurahan dan Kader Surabaya Hebat untuk mencegah adanya anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.

2.1.2.2.4 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan status gizi masyarakat. Utamanya pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2021 yang sebesar 0,10 persen, berhasil diturunkan menjadi 0,04 persen di triwulan I tahun 2025, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.31
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	148	123	118	109	47
2	Jumlah balita yang ditimbang	148.720	126.113	149.899	142.254	131.328
3	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0,10	0,10	0,08	0,08	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Tabel II.32
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Kecamatan	2021			2022			2023			2024			2025 (TW I)		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	12	3.257	0,37%	4	3.504	0,11%	0	3.523	0,00%	1	3.619	0,03%	0	3.453	0,00%
2	Kec. Benowo	1	3.475	0,03%	3	3.017	0,10%	6	5.112	0,02%	4	4.304	0,09%	3	3.912	0,08%
3	Kec. Bubutan	4	5.008	0,08%	5	4.212	0,12%	8	4.418	0,05%	2	5.191	0,04%	1	4.882	0,02%
4	Kec. Bulak	6	2.645	0,23%	4	2.458	0,16%	1	2.543	0,07%	2	2.196	0,09%	1	2.342	0,04%
5	Kec. Dukuh Pakis	6	2.167	0,28%	5	1.771	0,28%	3	2.505	0,05%	2	1.968	0,10%	3	1.794	0,17%
6	Kec. Gayungan	1	1.828	0,05%	3	1.501	0,20%	1	2.130	0,00%	1	2.244	0,04%	0	2.086	0,00%
7	Kec. Genteng	5	3.181	0,16%	1	2.850	0,04%	0	2.351	0,00%	2	2.051	0,10%	3	1.842	0,16%
8	Kec. Gubeng	1	6.056	0,02%	2	3.506	0,06%	3	5.950	0,04%	5	5.090	0,10%	0	4.739	0,00%
9	Kec. Gunung Anyar	0	3.383	0,00%	2	1.305	0,15%	2	2.543	0,00%	2	3.671	0,05%	0	3.415	0,00%
10	Kec. Jambangan	0	3.280	0,00%	0	1.838	0,00%	0	3.206	0,04%	1	2.705	0,04%	0	2.647	0,00%
11	Kec. Karang Pilang	0	4.552	0,00%	3	1.982	0,15%	3	4.050	0,49%	1	2.828	0,04%	0	1.885	0,00%
12	Kec. Kenjeran	8	10.635	0,08%	10	9.711	0,10%	8	10.884	0,03%	4	9.772	0,04%	1	9.969	0,01%
13	Kec. Krembangan	3	6.197	0,05%	11	6.068	0,18%	7	5.690	0,07%	4	5.854	0,07%	0	5.705	0,00%
14	Kec. Lakarsantri	5	2.857	0,18%	3	2.952	0,10%	3	3.722	0,09%	5	3.766	0,13%	2	3.374	0,06%
15	Kec. Mulyorejo	3	2.368	0,13%	1	2.158	0,05%	0	4.678	0,00%	4	4.363	0,09%	0	3.611	0,00%
16	Kec. Pabean Cantian	1	3.478	0,03%	2	3.980	0,05%	0	3.708	0,00%	1	3.323	0,03%	0	3.322	0,00%
17	Kec. Pakal	8	3.841	0,21%	2	3.793	0,05%	1	3.434	0,00%	2	3.608	0,06%	0	2.986	0,00%
18	Kec. Rungkut	2	5.186	0,04%	6	3.056	0,20%	12	5.146	0,16%	3	5.451	0,06%	2	5.323	0,04%

No	Kecamatan	2021			2022			2023			2024			2025 (TW I)		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
19	Kec. Sambikerep	4	3.317	0,12%	2	2.960	0,07%	4	3.995	0,1%	4	3.683	0,11%	4	3.232	0,12%
20	Kec. Sawahan	10	10.349	0,10%	3	10.046	0,03%	7	10.456	0,05%	5	8.459	0,06%	5	8.331	0,06%
21	Kec. Semampir	11	9.578	0,11%	12	8.537	0,14%	18	8.542	0,13%	7	9.195	0,08%	7	8.204	0,09%
22	Kec. Simokerto	7	4.887	0,14%	4	4.102	0,10%	5	4.254	0,1%	3	4.565	0,07%	4	4.202	0,10%
23	Kec. Sukolilo	1	4.759	0,02%	5	2.879	0,17%	1	5.190	0,03%	4	5.568	0,07%	0	3.779	0,00%
24	Kec. Sukomanunggal	22	5.558	0,40%	1	5.156	0,02%	0	5.340	0,02%	4	4.646	0,09%	0	4.402	0,00%
25	Kec. Tambaksari	6	10.767	0,06%	9	8.616	0,10%	8	10.103	0,05%	3	10.085	0,03%	4	9.044	0,04%
26	Kec. Tandes	2	5.864	0,03%	2	4.066	0,05%	0	4.951	0,00%	6	4.061	0,15%	1	4.205	0,02%
27	Kec. Tegalsari	12	3.960	0,30%	3	3.906	0,08%	1	5.187	0,00%	6	4.055	0,15%	0	3.009	0,00%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	2.714	0,00%	0	2.376	0,00%	6	2.827	0,41%	1	2.620	0,04%	0	2.413	0,00%
29	Kec. Wiyung	3	2.395	0,13%	6	3.132	0,19%	5	3.214	0,23%	4	2.918	0,14%	3	2.976	0,10%
30	Kec. Wonocolo	2	4.261	0,05%	1	4.262	0,02%	0	4.082	0,00%	5	4.200	0,12%	0	4.104	0,00%
31	Kec. Wonokromo	2	6.917	0,03%	8	6.413	0,12%	5	6.165	0,06%	11	6.195	0,18%	3	6.140	0,05%
Total		**148**	**148.720**	**0,10%**	**123**	**126.113**	**0,10%**	**118**	**149.899**	**0,08%**	**109**	**142.254**	**0,08%**	**47**	**131.328**	**0,04%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Selain itu prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 8,21, berhasil diturunkan menjadi 1,53 pada akhir tahun 2024, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.33
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita dengan status gizi kurang	6.200	2.501	2.332	2.178	2.902
2	Jumlah balita yang ditimbang	148.763	126.113	149.259	142.254	126.066
3	Prevalensi balita gizi kurang (%)	4,17	1,98	1,56	1,53	2,3

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Keberhasilan penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang ini didukung oleh pelaksanaan intervensi penurunan yang masif mulai dari penguatan skrining balita, optimalisasi pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk bayi dan balita melalui Sistem Aplikasi Sayang Warga, pemanfaatan alat antropometri untuk pemantauan tumbuh kembang balita, hingga pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus), sekolah orang tua hebat yang memuat bagaimana pola asuh anak termasuk penyusunan makan bergizi bagi anak dengan gizi buruk, gizi kurang dan stunting.

Tabel II.34
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	17	16	13	11	0
2	Kelahiran Hidup	40.158	40.012	39.891	36.208	35.849
3	AKI per 100.000 KH	42,33	39,99	32,59	30,38	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Usaha Pemerintah Kota Surabaya dalam menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan Angka Kematian Bayi (AKB) secara signifikan ini terjadi dikarenakan adanya penguatan intervensi yang tepat sasaran, antara lain terkait upaya 1 puskesmas 1 dokter spesialis obgyn (1P-1O), pendampingan calon pengantin dan ibu hamil oleh Kader Surabaya Hebat (KSH) hingga PMT Lokal untuk Ibu Hamil KEK Risiko Tinggi dan pemberian permakanan Ibu Hamil KEK. Sedangkan dalam kasus kematian bayi, penyebab terbanyaknya adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan.

Tabel II.35
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bayi lahir meninggal	199	174	161	146	10
2	Kelahiran Hidup	40.158	40.012	39.891	36.208	35.849

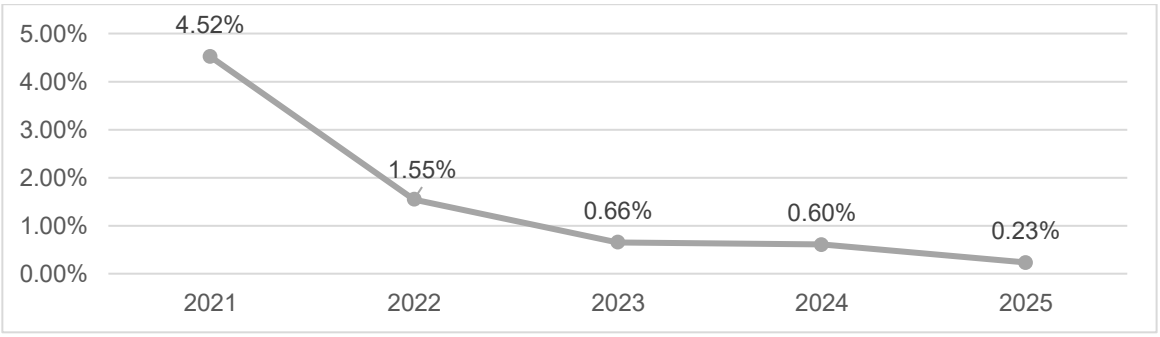
No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
3	AKB per 1.000 KH	4,96	4,35	4,04	4,03	0,28

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) di mana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2021 sebesar 4,52 persen menjadi hanya 0,23 persen pada tahun 2025 triwulan I. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Program pencegahan dan penanganan balita *stunting* termasuk balita gizi buruk dan gizi kurang di Kota Surabaya berjalan dengan baik, didukung dengan adanya pemanfaatan Kader Surabaya Hebat dalam melaksanakan monitoring dan pendampingan setiap balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, juga didukung dengan adanya sistem Aplikasi Sayang Warga yang memudahkan pendataan dan monitoring secara *realtime* perkembangan balita dari waktu ke waktu. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan *zero stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.11 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2021–2025 (TW I)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

2.1.2.2.5 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

Tabel II.36
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	154.933	152.273	125.276	106.120	79.767
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya, seperti pada tabel di atas, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 relatif tinggi di atas 9 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya TPT periode tersebut antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun kurang dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*) dan pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Meski demikian, TPT Kota Surabaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,91 persen, menunjukkan penurunan signifikan sebesar 1,85 persen poin dari tahun 2023. Penurunan TPT Kota Surabaya menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja dengan diiringi proporsi yang lebih besar pada peningkatan jumlah orang yang bekerja di tahun 2024. Sebaliknya, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan di saat jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan. Sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1,62 juta jiwa, bertambah 55,1 ribu orang dibanding tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi pengangguran akibat terjadinya pandemi Covid-19 dengan melakukan penguatan sektor UMKM, peningkatan kualitas SDM angkatan kerja melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kepemulihan sektor pariwisata, dan program padat karya.

Tabel II.37
TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020–2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber data: BPS, 2025 (versi data Agustus).

Seperti pada tabel di atas, dalam kurun 5 tahun terakhir angka TPT Kota Surabaya cenderung menurun, utamanya disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, meningkatkan jumlah pengangguran. Namun pada tahun 2022 dan 2023 angka TPT berhasil diturunkan cukup signifikan, meski belum mencapai di angka sebelum pandemi. Angka TPT di Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada periode yang sama juga mengalami hal serupa meski dengan derajat yang berbeda. Di tahun 2024, dengan fokus pada pemulihan ekonomi sebagai tema pembangunan, di antaranya melalui program padat karya dan penyelenggaraan *job fair*, ternyata dapat menurunkan kembali angka TPT di Kota Surabaya menjadi 4,91%, lebih rendah dari masa sebelum pandemi.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk bekerja yang berpendidikan SMA/sederajat atau lebih tinggi, kondisi seperti ini juga terjadi pada periode-periode sebelumnya di mana penduduk bekerja di Kota Surabaya mayoritas sudah berpendidikan tinggi. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan, pada tahun 2024, TPT tertinggi berada pada jenjang pendidikan yang ditamatkan yakni SMP sebesar 6,66 persen. Sementara TPT paling rendah berada pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Kemudian, jika dilihat dari jenis kelamin, penurunan terbesar berasal dari pengangguran laki-laki. TPT pada laki-laki turun yang mulanya sebesar 7,30 persen di tahun 2023 menjadi 4,85 persen pada tahun 2024, sedangkan TPT perempuan turun dari 6,04 persen pada tahun 2023 menjadi 4,99 persen pada tahun 2024.

Jika ditinjau dari kategori lapangan pekerjaan, secara nasional penyajian data hasil Sakernas yang berkenaan dengan pengelompokan sektor ekonomi mulai menggunakan 17 kategori lapangan pekerjaan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2015. Namun karena keterbatasan sampel pada level kabupaten/kota, maka penyajian lapangan usaha untuk Kota Surabaya dikategorikan ulang menjadi 3 kategori yakni pertanian, manufaktur dan jasa. Pada tahun 2024, struktur penduduk yang bekerja di Kota Surabaya pada tahun 2024 mayoritas di sektor jasa yakni sebesar 76,13 persen dari total jumlah pekerja di

Kota Surabaya. Sektor tertinggi selanjutnya yakni manufaktur sebesar 23,38 persen. Sementara tenaga kerja pada sektor pertanian sangat kecil selaras dengan kondisi eksisting wilayah Kota Surabaya yang hampir tidak memiliki lahan pertanian sebagaimana kontribusinya yang kurang dari 1 persen terhadap total perekonomian Kota Surabaya.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan di bidang seni, budaya, dan olahraga merupakan bagian integral dari proses pembangunan bangsa, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter yang berdisiplin, berjiwa sportif, dan memiliki kepribadian yang kuat. Di Kota Surabaya, pembangunan sektor ini terus didorong melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelestarian budaya, pengembangan seni kreatif, serta pembinaan olahraga secara menyeluruh, baik di tingkat rekreasi maupun prestasi. Seni dan budaya dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat identitas lokal dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan bangsa, sementara olahraga dimanfaatkan sebagai wahana untuk mengukir prestasi sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Lebih dari itu, pembangunan seni, budaya, dan olahraga juga menjadi cerminan eksistensi bangsa di mata dunia, dengan menunjukkan pencapaian prestasi, kekayaan tradisi, dan potensi kreatif masyarakat. Adapun data perkembangan seni, budaya, dan olahraga di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.38
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Capaian Pembangunan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Grup Kesenian	743	806	715	911	915
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	42	45	49	58	58
4	Jumlah Gedung Olahraga	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

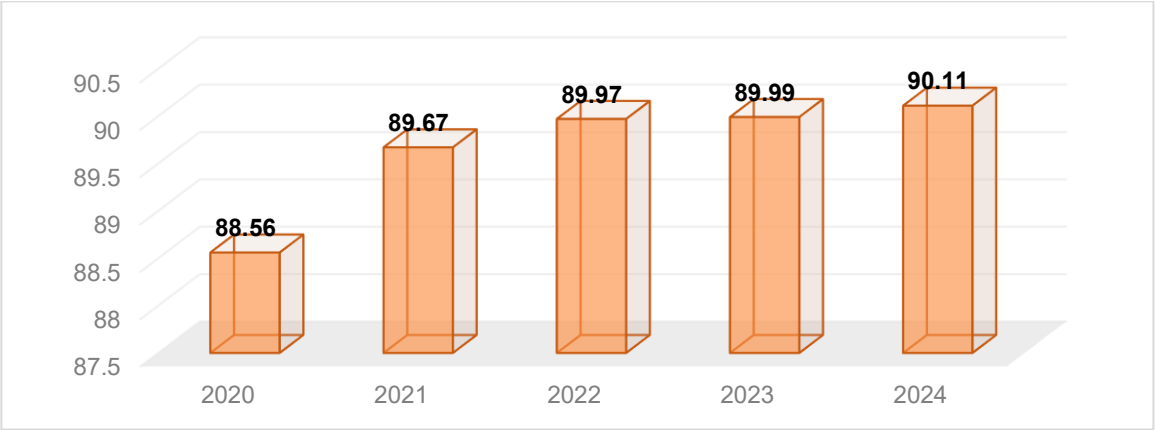
Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten mendorong pembinaan seni dan budaya sebagai bagian penting dalam penguatan identitas kota dan pelestarian warisan budaya lokal. Pembinaan ini tidak hanya dilakukan melalui

pelatihan kepada para pelaku seni, tetapi juga melalui penyelenggaraan berbagai pertunjukan dan penampilan seni yang terbuka bagi masyarakat.

Kegiatan seni dan budaya difasilitasi di ruang-ruang publik sebagai bentuk apresiasi terhadap karya seniman lokal sekaligus sarana edukasi budaya bagi masyarakat luas. Beragam *event* budaya diselenggarakan secara rutin, antara lain Festival Rujak Uleg, Parade Surabaya Juang, Sedekah Bumi, Festival Cipta Karya Tari, Festival Seni Lintas Budaya, Surabaya Vaganza, Night at The Museum, serta Surabaya Art & Culture Festival. Selain itu, Pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Suroboyo juga menjadi ajang penting dalam memperkuat peran generasi muda dalam promosi budaya daerah.

Pelestarian budaya lokal merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pemahaman dan kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan menjadi pondasi penting dalam menciptakan rasa memiliki terhadap warisan budaya yang dimiliki. Tanpa keterlibatan masyarakat, upaya pelestarian budaya akan kehilangan maknanya.

Sebagai bentuk pengukuran atas kesadaran budaya masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Indeks Budaya Lokal, yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari dua komponen utama, yakni: tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program pelestarian budaya yang telah dilaksanakan, serta sebagai dasar perumusan kebijakan budaya ke depan. Adapun pencapaian Indeks Budaya Lokal di Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.12 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2020–2024

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2024 sebesar 90,11%. Angka tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2020 sebesar 88,56%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

Pada aspek Olahraga, Pemerintah Kota Surabaya terus berkomitmen dalam membina dan mengembangkan olahraga sebagai salah satu pilar penting pembangunan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina sampai dengan tahun 2025 sebanyak 64 cabang olahraga. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 5 gedung olahraga antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, dan gedung indoor *Surabaya Sport Center* (SSC), serta Gelora Pancasila. Selain itu, lapangan olahraga juga tersebar di permukiman penduduk maupun sekolah-sekolah, baik yang dibangun pemerintah kota maupun milik swasta. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, lapangan olahraga yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota berjumlah 635 lapangan dari berbagai macam cabang olahraga termasuk olahraga renang dan panjat tebing.

Selain itu, pembinaan atlet juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemusatan latihan dan pelaksanaan *event* kejuaraan tingkat kota seperti Piala Walikota serta pengiriman atlet untuk kejuaraan skala regional dan nasional. Bagi atlet yang berprestasi diberikan juga penghargaan (*reward*) sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar terus berkontribusi dalam mengharumkan nama Surabaya. Dengan berbagai dukungan tersebut, diharapkan prestasi olahraga Kota Surabaya terus meningkat dan mampu melahirkan atlet-atlet unggul yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.39
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
URUSAN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA						**100,00%**
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Orang	91.826	91.826	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	2. Angka partisipasi murni	%	66,26	66,26	0	100,00%
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	49,53	49,53	0	100,00%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	83,78	83,78	0	100,00%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,42	0,42	0	100,00%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100,00%
	7. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100,00%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	31,24	31,24	0	100,00%
	9. Proporsi PTK penggerak	%	5,14	5,14	0	100,00%
2	**Pendidikan Dasar**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Orang	444.550	444.550	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian
	SD					
	1. Angka partisipasi kasar	%	104,2	104,2	0	100,00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	88,29	88,29	0	100,00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	77,12	77,12	0	100,00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	3,87	3,87	0	100,00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,81	1,81	0	100,00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	74,7	74,7	0	100,00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75,32	75,32	0	100,00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,46	57,46	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	82,41	82,41	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	85,79	85,79	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	52,72	52,72	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	8,97	8,97	0	100,00%
	SMP					100,00%
	1. Angka partisipasi kasar	%	105,79	105,79	0	100,00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	91,23	91,23	0	100,00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	88,29	88,29	0	100,00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	5,51	5,51	0	100,00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,37	3,37	0	100,00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	74,48	74,48	0	100,00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,92	76,92	0	100,00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,24	61,24	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	84,43	84,43	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	87,08	87,08	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	52,24	52,24	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	10,93	10,93	0	100,00%
3	**Pendidikan Kesetaraan**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	Orang	4.740	4.740	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100,00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	62,87	62,87	0	100,00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	58,57	58,57	0	100,00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	9,2	9,2	0	100,00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	6,34	6,34	0	100,00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	64,03	64,03	0	100,00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	60,59	60,59	0	100,00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54,02	54,02	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100,00%
URUSAN KESEHATAN KOTA SURABAYA						**100,00%**
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	37.187	37.506	-319	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	29.916	30.005	-89	100,00%
	2. Tablet tambah darah	Tablet	6.731.100	6.751.080	-19.980	100,00%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	37.395	37.506	-111	100,00%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	37.395	38.091	-696	100,00%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	37.395	37.506	-111	100,00%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	5.609	5.626	-17	100,00%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	37.395	37.437	-42	100,00%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	37.395	37.506	-111	100,00%
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	38.091	-696	100,00%
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	11. Gel USG	Botol	2.493	2.500	-7	100,00%
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	3.611	3.611	0	100,00%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	37.187	37.187	0	100,00%
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	37.187	37.295	-108	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Formulir partograf	Formulir	37.187	37.295	-108	100,00%
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	37.395	37.506	-111	100,00%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	38.091	-696	100,00%
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	3.611	3.611	0	100,00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	1.891	1.891	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	36.208	37.952	-1.744	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	36.208	37.952	-1744	100,00%
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	36.208	37.952	-1744	100,00%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	36.208	37.952	-1744	100,00%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	36.208	37.952	-1744	100,00%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	108.624	113.856	-5232	100,00%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	38.091	-696	100,00%
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3.619	3.619	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	84	84	0	100,00%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	14. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	152.252	152.609	-357	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	152.252	152.609	-357	100,00%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	152.252	152.609	-357	100,00%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	37.395	38.091	-696	100,00%
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	17.490	30.015	-12525	100,00%
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	152.252	154.847	-2595	100,00%
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.069	12.313	-244	100,00%
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	5.973	6.134	-161	100,00%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	8.959	9.194	-235	100,00%
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	8.959	9.152	-193	100,00%
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	8.959	9.253	-294	100,00%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	10.295	10.357	-62	100,00%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	10.295	10.302	-7	100,00%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	840	840	0	100,00%
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	63	63	0	100,00%
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	63	63	0	100,00%
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	20. Guru PAUD	Orang	11.595	11.595	0	100,00%
	21. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan		396.102	398.643	-2.541	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	396.102	398.643	-2541	100,00%
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	65	65	0	100,00%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	396.102	398.643	-2541	100,00%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	756	756	0	100,00%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	756	756	0	100,00%
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah	Tablet	6.814.288	6.814.288	0	100,00%
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat	63	63	0	100,00%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	21.920	21.920	0	100,00%
	9. Media promosi kesehatan	Paket	63	63	0	100,00%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	10.479	10.482	-3	100,00%
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	4.471	4.471	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	25.764	25.764	0	100,00%
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	1.923.364	2.161.327	-237.963	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	315	315	0	100,00%
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	63	63	0	100,00%
	3. Alat : Tensimeter	Unit	63	63	0	100,00%
	4. Alat : Glukometer	Unit	63	63	0	100,00%
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	63	63	0	100,00%
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	2.654.500	2.654.500	0	100,00%
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	63	63	0	100,00%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	1.923.364	2.154.168	-230.804	100,00%
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	63	63	0	100,00%
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	63	63	0	100,00%
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	130	130	0	100,00%
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	0	100,00%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	4.674	4.758	-84	100,00%
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	378.637	378.637	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	0	100,00%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	63	63	0	100,00%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	63	63	0	100,00%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	378.637	378.637	0	100,00%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	378.637	378.637	0	100,00%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	260	260	0	100,00%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani **:**		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		727.432	738.280	-10.848	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	126	126	0	100,00%
	2. Obat Hipertensi	Paket	727.423	738.280	-10.857	100,00%
	3. Tensimeter	Unit	63	63	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	63	63	0	100,00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	84	84	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	101.979	113.051	-11.072	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	101.797	113.051	0	100,00%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	63	63	0	100,00%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	2.654.500	2.654.500	0	100,00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	63	63	0	100,00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	189	189	0	100,00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	Orang	5.552	5.849	-297	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	Buku	63	63	0	100,00%
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	63	63	0	100,00%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	63	63	0	100,00%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	756	756	0	100,00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	63	63	0	100,00%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	189	189	0	100,00%
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	63	63	0	100,00%
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	63	63	0	100,00%
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	78.502	108.826	-30.324	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	2. Reagen Zn TB	Kit	1.570	2.177	-607	100,00%
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	78.502	108.826	-30.324	100,00%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	157.004	217.652	-60.648	100,00%
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	78.502	108.826	-30.324	100,00%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	756	756	0	100,00%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	63	63	0	100,00%
	8. Tuberkulin	Vial	280	280	0	100,00%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	3.491	3.491	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	0	100,00%
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	480	480	0	100,00%
	15. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	49.485	63.442	-13.957	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	49.485	63.442	-13.957	100,00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	49.485	63.442	-13.957	100,00%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	49.485	63.442	-13.957	100,00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3.537	3.537	0	100,00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	1.392	1.392	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	63	63	0	100,00%
URUSAN PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA						**100,00%**
1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari	Orang	3.017.382	3.017.382	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	JARINGAN PERPIPAAN					

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	618.436	618.436	0	100,00%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	618.436	618.436	0	100,00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100,00%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100,00%
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	20.440	20.440	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	577.832	577.832	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	5.110	5.110	0	100,00%
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	100,00%
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SURABAYA						**100,00%**
1	**Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota**					**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni		Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Pendataan					
	Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					100
	Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota					100
	Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)					100
	Form 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					100

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Perhitungan					
	Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota					100
	Form 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100
	Form 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					100
	3. Perencanaan					
	Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota					100
	Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					100
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Orang	243	243	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	201	201	0	100,00%
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	68	68	0	100,00%
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	68	68	0	100,00%
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	65	65	0	100,00%
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	2	5	-3	100,00%
URUSAN TRANTIBUM KOTA SURABAYA						**100,00%**
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	Orang	1.280	1.296	-16	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	423	423	0	100,00%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	12	12	0	100,00%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	978	1426	-448	100,00%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100,00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100,00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100,00%
2	**Pelayanan Informasi Rawan bencana**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	730.728	730.728	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	0	100,00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	730.728	730.728	0	100,00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	1.650	1.650	0	100,00%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	100	100	0	100,00%
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Orang	412	412	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	5	5	0	100,00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	412	412	0	100,00%
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	739	1.665	-926	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	8	8	0	100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1.000	1.665	-665	100,00%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	1	1	0	100,00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0	0	0	100,00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	10	10	0	100,00%
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	684	684	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	684	684	0	100,00%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	10	10	0	100,00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	845	845	0	100,00%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	10	15	-5	100,00%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	684	684	0	100,00%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	684	684	0	100,00%
URUSAN SOSIAL KOTA SURABAYA						**100,00%**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	40	40	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100,00%
	2. Penyediaan permakanan	Orang	40	40	0	100,00%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	6	6	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	40	40	0	100,00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	0	100,00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	40	40	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	40	0	100,00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	40	0	100,00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	40	40	0	100,00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	40	40	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	40	40	0	100,00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100,00%
	13. Layanan rujukan	Orang	6	6	0	100,00%
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	90	90	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100,00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	25	25	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	90	90	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	90	90	0	100,00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	90	90	0	100,00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	90	90	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	90	90	0	100,00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100,00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	90	90	0	100,00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	90	90	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100,00%
	12. Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100,00%
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	230	230	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	130	130	0	100,00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	100	100	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	230	230	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	230	230	0	100,00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	27	27	0	100,00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	230	230	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	230	230	0	100,00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	25	25	0	100,00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	7	7	0	100,00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	230	230	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	230	230	0	100,00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	105	105	0	100,00%
	13. Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100,00%
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	900	900	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	100	100	0	100,00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	650	650	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	900	900	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	900	900	0	100,00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	900	900	0	100,00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	900	900	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	150	150	0	100,00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	0	100,00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60	60	0	100,00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	400	400	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	800	800	0	100,00%
	12. Layanan rujukan	Orang	50	50	0	100,00%
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80,00%**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Orang	1.214	1.214	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Penyediaan permakanan	Orang	1.214	1.214	0	100,00%
	2. Penyediaan sandang	Orang	1.214	1.214	0	100,00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	120	8.503	-8.383	100,00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	95	148	-53	100,00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	71	87	-16	100,00%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Meski SPM Kota Surabaya Tahun 2024 secara rata-rata pada 6 urusan tercapai 100% (meningkat dari tahun 2023 yang tercapai 99,67%), namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, di antaranya masih diperlukannya perbaikan komunikasi dan kerjasama antar perangkat instansi pemerintahan, baik internal Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan instansi pemerintahan lainnya.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Pada tahun 2024, Kota Surabaya mencapai target 100% di semua indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota, tenaga pendidik dan kependidikan, serta berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga menunjukkan efektivitas program dan kebijakan serta inovasi yang telah diterapkan.

Tabel II.40
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021–2024

No.	Jenis Layanan SPM	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	97,15%	99,34%	100%
2	Pendidikan Dasar	100%	99,83%	99,69%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	98,65%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2025

Pada aspek standar partisipasi dan pemerataan Peserta Didik, diukur antara lain melalui Angka Partisipasi Peserta Didik. Melihat angka partisipasi anak usia 5-6 dalam pendidikan di tahun 2025 mencapai 82,93 yang meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 92,74, menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendorong partisipasi anak usia 5-6 tahun untuk mengikuti layanan pendidikan melalui kelembagaan.

Sedangkan dalam aspek Kualitas hasil belajar Peserta Didik, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Tahun 2025 mencapai 35,39% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 37,54%. Begitu pula untuk indikator Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum di mana tahun 2025 mencapai 27,05% dibandingkan tahun 2024 sebesar 24,54%. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan Peserta Didik di Kota Surabaya dalam mengaplikasikan konsep matematik yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, serta membuat interpretasi dari informasi implisit yang

ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.

Selain itu, kualitas dan pemerataan layanan pendidikan ditunjukkan antara lain dengan tingkat akreditasi sekolah, iklim keamanan, kebinekaan dan inklusivitas. Untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B pada tahun 2025 mencapai 78,21%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 78,18%. Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar tahun 2025 mencapai 74,57 dibandingkan tahun 2024 sebesar 74,48. Sedangkan nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar tahun 2025 mencapai 73,7 dibandingkan tahun 2024 sebesar 76,92. Dan untuk iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI (*Community-Based Instruction*), sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar, Pemerintah Kota Surabaya mencapai 63,4 di tahun 2025, yang meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar 61,24. Hal ini menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh stakeholder bidang pendidikan dan masyarakat memberi dampak yang positif bagi lingkungan pendidikan yang ramah dan membangun bagi karakter anak.

Pada aspek standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), Proporsi PTK bersertifikat di tahun 2025 mengalami peningkatan mencapai 45,2% dibandingkan Tahun 2024 sebesar 48,54%. Selain itu, Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di Kota Surabaya pada tahun 2025 mencapai 83,37% dibandingkan Tahun 2024 mencapai 63,77%. Hal ini menunjukkan mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD formal sangat baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif tinggi.

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data APM per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.41
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa SD/MI berusia 7-12 tahun	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa SMP/MTs berusia 13-15 tahun	APM
Asemrowo	5.083	4.111	80,88%	2.470	1.872	75,79%
Benowo	7.372	6.658	90,31%	3.882	3.759	96,83%
Bubutan	8.978	8.373	93,26%	4.659	2.107	45,22%
Bulak	4.768	6.349	133,16%	2.484	2.820	113,53%
Dukuh Pakis	5.572	5.776	103,66%	2.784	3.723	133,73%
Gayungan	4.079	5.069	124,27%	2.060	2.448	118,83%
Genteng	5.239	5.621	107,29%	2.781	5.536	199,07%
Gubeng	11.414	12.510	109,60%	5.952	4.873	81,87%
Gunung Anyar	5.993	4.777	79,71%	3.019	2.137	70,79%
Jambangan	5.289	5.049	95,46%	2.763	3.986	144,26%
Karangpilang	6.916	5.895	85,24%	3.546	3.287	92,70%
Kenjeran	19.517	17.853	91,47%	9.692	9.734	100,43%
Krembangan	11.038	12.129	109,88%	5.725	7.856	137,22%
Lakarsantri	6.188	8.510	137,52%	3.177	5.123	161,25%
Mulyorejo	7.843	10.131	129,17%	4.010	6.073	151,45%
Pabean Cantian	7.024	4.049	57,65%	3.654	1.597	43,71%
Pakal	6.277	7.386	117,67%	3.176	3.617	113,89%
Rungkut	11.811	10.811	91,53%	5.912	5.209	88,11%
Sambikerep	6.451	6.728	104,29%	3.380	4.733	140,03%
Sawahan	18.196	14.143	77,73%	9.664	4.959	51,31%
Semampir	19.394	18.471	95,24%	9.743	5.754	59,06%
Simokerto	8.867	6.637	74,85%	4.521	3.527	78,01%
Sukolilo	10.990	11.763	107,03%	5.507	7.857	142,67%
Sukomanunggal	9.913	9.647	97,32%	4.956	6.682	134,83%
Tambaksari	20.889	15.831	75,79%	10.989	6.722	61,17%
Tandes	8.881	10.614	119,51%	4.674	3.978	85,11%
Tegalsari	8.964	8.866	98,91%	4.668	2.757	59,06%
Tenggilis Mejoyo	5.434	4.928	90,69%	2.836	2.864	100,99%
Wiyung	6.929	6.558	94,65%	3.591	2.891	80,51%
Wonocolo	7.446	7.098	95,33%	3.838	5.120	133,40%
Wonokromo	13.485	10.567	78,36%	7.229	8.252	114,15%
Total	**286.240**	**272.908**	**95,34%**	**147.342**	**141.853**	**96,27%**

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun masih diperlukan pemerataan fasilitas layanan pendidikan.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu

terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data APK per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Dari data di bawah terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

Tabel II.42
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	2.635	1.729	49,69%	5.083	4.473	76,29%	2.470	2.015	58,73%
Benowo	3.449	3.015	67,66%	7.372	7.347	88,27%	3.882	4.071	83,54%
Bubutan	4.281	3.005	52,84%	8.978	9.220	87,19%	4.659	2.364	36,66%
Bulak	2.359	2.052	60,32%	4.768	6.949	121,13%	2.484	3.075	95,31%
Dukuh Pakis	2.516	2.502	70,80%	5.572	6.398	98,37%	2.784	4.279	114,39%
Gayungan	1.838	1.430	61,11%	4.079	5.613	123,96%	2.060	2.675	94,49%
Genteng	2.429	2.254	71,12%	5.239	6.223	101,95%	2.781	6.134	164,77%
Gubeng	5.324	4.488	62,16%	11.414	13.788	101,46%	5.952	5.376	62,70%
Gunung Anyar	2.844	2.808	73,72%	5.993	5.203	72,74%	3.019	2.321	59,15%
Jambangan	2.453	1.725	50,98%	5.289	5.495	86,81%	2.763	4.339	128,00%
Karangpilang	3.374	2.779	65,01%	6.916	6.488	81,84%	3.546	3.618	76,90%
Kenjeran	9.774	6.385	50,06%	19.517	19.407	88,37%	9.692	10.492	86,41%
Krembangan	5.417	3.829	53,81%	11.038	13.244	103,24%	5.725	8.645	117,81%
Lakarsantri	3.004	2.694	66,50%	6.188	9.337	130,04%	3.177	5.740	130,40%
Mulyorejo	3.694	4.149	85,73%	7.843	11.159	119,93%	4.010	6.890	128,64%
Pabean Cantian	3.527	1.833	40,59%	7.024	4.406	54,83%	3.654	1.760	37,22%
Pakal	2.994	2.903	72,07%	6.277	8.080	114,11%	3.176	3.938	94,99%
Rungkut	5.502	4.684	63,85%	11.811	11.832	87,63%	5.912	5.629	77,31%
Sambikerep	3.124	2.237	57,15%	6.451	7.296	93,61%	3.380	5.270	114,70%
Sawahan	8.233	5.151	49,77%	18.196	15.510	71,95%	9.664	5.481	40,69%
Semampir	9.592	5.463	43,05%	19.394	20.122	90,39%	9.743	6.252	50,29%

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Simokerto	4.237	3.453	68,45%	8.867	7.260	69,64%	4.521	3.851	65,33%
Sukolilo	5.108	4.252	60,78%	10.990	12.837	104,71%	5.507	8.607	114,95%
Sukomanunggal	4.688	4.267	62,57%	9.913	10.624	90,99%	4.956	7.276	110,22%
Tambaksari	9.706	7.138	52,95%	20.889	17.431	71,99%	10.989	7.408	49,59%
Tandes	3.944	4.116	80,66%	8.881	11.631	110,12%	4.674	4.308	65,76%
Tegalsari	4.085	2.793	51,70%	8.964	9.761	94,22%	4.668	3.063	52,02%
Tenggilis Mejoyo	2.575	2.190	61,72%	5.434	5.430	85,89%	2.836	3.137	84,80%
Wiyung	3.240	3.137	69,18%	6.929	7.221	91,70%	3.591	3.234	72,17%
Wonocolo	3.609	2.441	55,54%	7.446	7.754	88,98%	3.838	5.628	113,39%
Wonokromo	6.243	4.188	53,13%	13.485	11.572	70,78%	7.229	9.148	91,16%
Total	**135.798**	**105.090**	**77,39%**	**286.240**	**299.111**	**104,50%**	**147.342**	**156.024**	**105,89%**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025 diolah

2.1.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. AL untuk jenjang SD/MI tahun 2020 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2024. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2020 sebesar 100 persen, dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan akhir tahun 2024. Perkembangan Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.43
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2020–2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	41.677	41.182	44.039	44.930	45.929
1.2	Jumlah Siswa SD/MI Kelas 6	41.677	41.182	44.039	44.930	45.929
2.	AL SMP/MTs (persen)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	38.403	37.413	38.131	40.218	38.709
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	38.403	37.413	38.131	40.218	38.709

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah di jenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2021 APS di jenjang SD/MI sebesar 0% dan konsisten sampai

dengan triwulan pertama tahun 2025. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 0% dan konsisten sampai dengan triwulan pertama tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya yang tidak ditangani dengan menyekolahkan kembali dan mendampingi hingga tuntas masa pendidikannya. Namun demikian, untuk mencegah terjadinya adanya anak putus sekolah diperlukan sinkronisasi dengan data kependudukan di Kota Surabaya serta surveilance anak putus sekolah dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama Kelurahan dan Kader Surabaya Hebat. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.44
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
1.1.	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
1.2.	Jumlah Siswa SD/MI	317.885	313.505	321.128	292.229	221.696
2.	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0
2.1.	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0
2.2.	Jumlah Siswa SMP/MTs	156.083	160.764	163.134	147.594	287.488

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

2.1.3.1.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (Triwulan I) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.45
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Ketersediaan SD/MI	1:358	1:358	1:355	1:355	1:353
1.1.	Jumlah gedung sekolah	831	823	823	823	811
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	297.369	294.723	292.229	292.229	286.240
2.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	1:372	1:371	1:387	1:387	1:384
2.1.	Jumlah gedung sekolah	399	399	381	381	383
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	148.573	148.205	147.594	147.594	147.342

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

Tabel II.46
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2025 (TW I)

Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	7	9	15	5.083	1:339	3	3	6	2.470	1:412
Benowo	14	5	19	7.372	1:388	4	2	6	3.882	1:647
Bubutan	28	2	30	8.978	1:299	8	0	8	4.659	1:582
Bulak	12	6	18	4.768	1:265	4	2	6	2.484	1:414
Dukuh Pakis	20	1	22	5.572	1:253	11	1	12	2.784	1:232
Gayungan	14	1	15	4.079	1:272	5	1	6	2.060	1:343
Genteng	20	1	21	5.239	1:249	11	0	11	2.781	1:253
Gubeng	23	5	29	11.414	1:394	13	0	13	5.952	1:458
Gununganyar	15	1	16	5.993	1:375	9	1	10	3.019	1:302
Jambangan	7	5	12	5.289	1:441	6	3	9	2.763	1:307
Karangpilang	12	3	15	6.916	1:461	8	0	8	3.546	1:443
Kenjeran	18	22	39	19.517	1:500	12	7	19	9.692	1:510
Krembangan	31	7	38	11.038	1:290	17	2	19	5.725	1:301
Lakarsantri	21	6	28	6.188	1:221	10	5	15	3.177	1:212
Mulyorejo	21		24	7.843	1:327	15	0	15	4.010	1:267
Pabean Cantian	14	4	18	7.024	1:390	5	0	5	3.654	1:731
Pakal	15	6	21	6.277	1:299	7	3	10	3.176	1:318
Rungkut	23	5	29	11.811	1:407	10	2	12	5.912	1:493
Sambikerep	14	6	22	6.451	1:293	15	4	19	3.380	1:178
Sawahan	41		41	18.196	1:444	13	1	14	9.664	1:690
Semampir	34	30	62	19.394	1:313	15	10	25	9.743	1:390
Simokerto	18	6	24	8.867	1:369	9	3	12	4.521	1:377
Sukolilo	31	1	33	10.990	1:333	16	2	18	5.507	1:306
Sukomanunggal	25	1	28	9.913	1:354	15	2	17	4.956	1:292
Tambaksari	36	10	46	20.889	1:454	17	3	20	10.989	1:549
Tandes	20	10	31	8.881	1:286	12	2	14	4.674	1:334
Tegalsari	28	2	31	8.964	1:289	8	0	8	4.668	1:584
Tenggilis Mejoyo	17	1	19	5.434	1:286	7	0	7	2.836	1:405
Wiyung	14	1	17	6.929	1:408	10	0	10	3.591	1:359
Wonocolo	18	2	19	7.446	1:392	8	1	9	3.838	1:426
Wonokromo	33	8	41	13.485	1:329	18	2	20	7.229	1:361
Total	**644**	**167**	**823**	**286.240**	1:348	**321**	**62**	**383**	**147.342**	1:385

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah baik di jenjang SD dan di jenjang SMP semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun jika dilihat rasio ketersediaan

sekolah, ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Karangpilang dengan nilai rasio sebesar 1:461, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Lakarsantri dengan nilai rasio sebesar 1:221. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Pabean Cantian memiliki rasio tertinggi yaitu 1:731 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:178.

Kecamatan yang rasio ketersediaan sekolahnya tinggi menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya rendah perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2025 terdapat 347 sekolah SMP/sederajat yang telah terakreditasi, terdiri dari 230 sekolah yang terakreditasi A, 108 sekolah terakreditasi B dan terdapat 9 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/sederajat terdapat 770 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 230 sekolah yang terakreditasi A, 108 sekolah terakreditasi B dan 9 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2024, terdapat 332 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 72 lembaga, dan sebanyak 260 lembaga sisanya belum terakreditasi. Fakta bahwa masih adanya sekolah di jenjang SD maupun SMP yang terakreditasi C, kemudian masih adanya lembaga kursus/pelatihan yang belum terakreditasi ini penting untuk diperbaiki kembali guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan global seperti saat ini.

Di samping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2025 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 35 peserta. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 85 peserta dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 78 peserta, seluruh peserta akan mengikuti ujian di pertengahan tahun.

2.1.3.1.1.6 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II.47
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Guru SD/MI	1:24	1:23	1:23	1:23	1:23	1:19
1.1.	Guru SD/MI	12.806	13.725	13.340	14.024	11.437	13.185
1.2.	Murid SD/MI	312.873	317.885	313.505	321.128	258.667	252.194
2.	Rasio Guru SMP/MTs	1:23	1:23	1:25	1:22	1:21	1:17
2.1.	Guru SMP/MTs	6.250	6.862	6.512	7.346	6.347	7.044
2.2.	Murid SMP/MTs	143.329	156.083	160.764	163.134	135.327	116.456

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.48
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2025 (TW I)

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	2	-	2	-	-	55	13	-	72
SD	19	1	17	-	2	2.819	453	1	3.312
SMP	-	-	1	3	-	919	307	1	1.231
Total	**21**	**1**	**20**	**3**	**2**	**3.793**	**773**	**2**	**4.615**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel II.49
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2025 (TW I)

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	442	23	68	34	4	3.933	137	-	4.641
SD	118	3	26	14	6	9.292	412	4	9.871
SMP	12	-	3	10	3	5.321	458	3	5.810
Total	**572**	**26**	**97**	**58**	**13**	**18.546**	**1.007**	**7**	**20.322**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel II.50
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2025 (TW I)

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	3.085	4.369	7.454	3.312	9.873	13.185	227	5.504	5.731
2	SMP	1.163	2.877	4.040	1.231	5.813	7.044	68	2.936	3.004
Jumlah		**4.248**	**7.246**	**11.494**	**4.543**	**15.686**	**20.229**	**295**	**8.440**	**8.735**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 5.731 guru SD/MI/setara dan 3.004 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.1.7 Nilai Literasi dan Numerasi Asesmen Nasional

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi fundamental yang sangat penting untuk keberhasilan seseorang, tidak hanya dalam pendidikan, namun juga secara umum pada kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Literasi secara umum adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Numerasi lebih dari sekadar

berhitung, namun lebih melibatkan kemampuan bernalar dan mengaplikasikan konsep matematika dalam situasi nyata.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sangat menekankan peningkatan nilai literasi dan numerasi pada peserta didik. Ini tercermin dalam pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) yang mengukur kedua kompetensi ini sebagai indikator kualitas pendidikan sejak tahun 2022. Nilai literasi dan numerasi yang tinggi menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan berpikir kritis dan logis, memecahkan masalah dalam berbagai situasi, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dan data, serta beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan di era informasi. Adapun persentase satuan pendidikan di Kota Surabaya yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.51
Satuan Pendidikan memenuhi Standar Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi Nasional di Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase satuan pendidikan jenjang SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi (%)	N/A	73,52%	79,29%	87,44%	83,36%
2.	Persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi (%)	N/A	74,01%	79,75%	88,66%	93,58%
3.	Persentase satuan pendidikan jenjang SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi (%)	N/A	22,98%	74,54%	65,54%	74,20%
4.	Persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi (%)	N/A	56,27%	49,08%	83,58%	92,05%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 persentase satuan pendidikan baik jenjang SD maupun SMP di Kota Surabaya yang mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi termasuk dalam label **BAIK.** Pemerintah Kota Surabaya juga berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dituangkan dalam diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Indikator Kinerja

Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen tinggi Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan tenaga pendidik – kependidikan dan orang tua menghasilkan dampak yang positif, di mana sebagian besar peserta didik yang bersekolah di Kota Surabaya telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi.

Untuk meningkatkan kemampuan literasi, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengimplementasikan Program "wajib baca 15 menit sebelum pelajaran dimulai", penyediaan sudut baca di setiap kelas, dan penambahan koleksi buku di perpustakaan sekolah guna menciptakan budaya literasi sehari-hari di kalangan siswa. Selain itu juga mengadakan penguatan literasi dalam komunitas belajar yang mempertemukan para guru lintas lembaga untuk berbagi praktik baik dan refleksi pembelajaran. Pendampingan bibit pendongeng dan penulis serta Lomba Menulis Buku dan Cerpen juga diselenggarakan secara rutin.

Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan numerasi, diharapkan melalui Inovasi dan Diversifikasi Pembelajaran Numerasi, siswa dapat mengaplikasikan numerasi dalam kehidupan sehari-hari melalui integrasi numerasi dalam konteks pembelajaran nyata di semua mata pelajaran, tidak hanya matematika. Selain itu juga melalui penyelenggaraan simulasi asesmen numerasi, serta berbagai bentuk tantangan numerasi, siswa dipacu untuk tertantang dan semakin terlatih kemampuan numerasinya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga menguatkan Komunitas Belajar (Kombel) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan pelatihan khusus terkait pembelajaran numerasi, peningkatan keahlian menganalisis dan mengedukasi penggunaan strategi numerasi di kelas, serta refleksi dan berbagi praktik baik antar sekolah.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski

semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular covid-19, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.52
Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Penyakit	2021	2022	2023	2024	2025
1.	TBC	4.628	8.218	10.987	12.096	2.516
2.	COVID-19	67.073*	77.739	4.580	688	12
3.	HIV/AIDS	749	828	1.260	1.261	337
4.	Kusta	45	91	93	68	18
5.	DBD	111	195	191	231	114
6.	Hipertensi	737.258	740.719	761.441	738.280	69.418
7.	Diabetes Melitus	96.279	96.773	113.970	113.051	34.125

*Sumber: Dinas Kesehatan, 2025. Keterangan: *) dihitung berdasarkan estimasi.*

Jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular secara umum mengalami penurunan. Penurunan jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular secara umum didukung oleh adanya pelaksanaan skrining dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui 63 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kota Surabaya serta dengan diresmikannya 153 Integrasi Layanan Primer di Kota Surabaya.

Selain itu, data capaian penemuan kasus TBC pada tahun 2023 sebesar 93% yang artinya sudah mencapai target nasional (90%). Capaian target tersebut jika dibandingkan dengan data tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penetapan estimasi TBC tahun 2024 dari 11.206 menjadi 16.127 dengan target penemuan yang semula 10.085 menjadi 14.514. Akan tetapi secara angka absolut penemuan TBC di Kota Surabaya mengalami kenaikan sebesar 9% (dari 10,987 kasus menjadi 12.098 kasus).

Tabel II.53
Cakupan Penemuan, Pengobatan dan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	53,87%	62,16%	90,40%	92,60%	75%
2.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	90,23%	90,91%	95,90%	90,96%	90,79%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan UHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.54
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	154	154	153	153	153
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	154	154	153	153	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

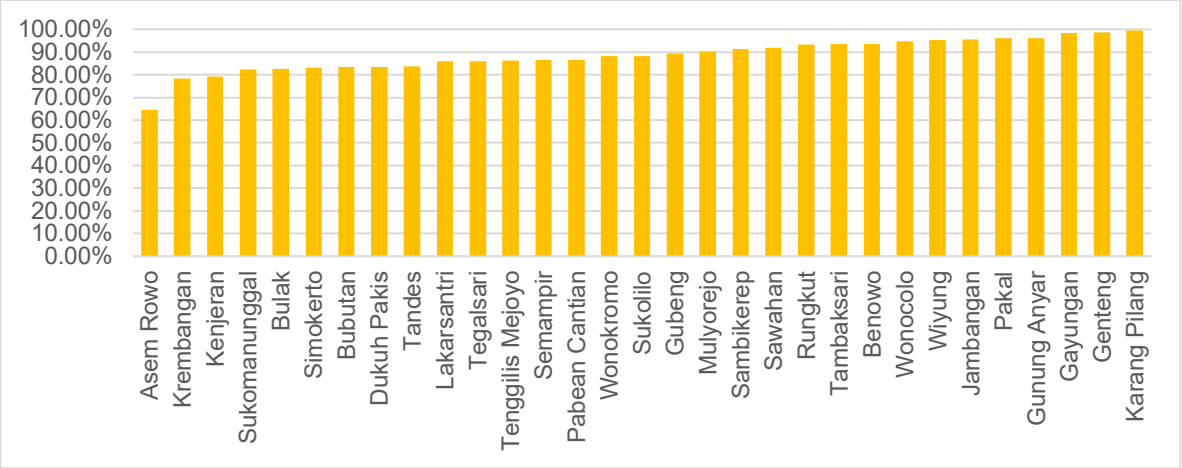
Kejadian Luar Biasa tahun 2020 dan 2021 adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Surabaya. Sedangkan Kejadian Luar Biasa pada tahun 2023 dan 2024 adalah kasus Demam Berdarah, HIV serta penyakit menular lainnya yang terjadi di 153 kelurahan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 sesuai Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Untuk kasus Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021, 31 Kecamatan di Kota Surabaya telah membentuk 1.298 Kampung Tangguh Wani Covid-19 di tiap RW sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m^2/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota

rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.



Gambar II.13
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2025 (TW I)
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2025

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2025 seluruh kelurahan memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.55
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	153	153	153
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	153	153	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Kelurahan siaga aktif mulai tahun 2020 hingga tahun 2025 konsisten terpenuhi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Hal ini didukung oleh adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan Kecamatan/Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, serta pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) oleh 63 Puskesmas di Kota Surabaya. Selain itu, integrasi layanan primer (ILP) terlah diterapkan di seluruh Puskesmas di Kota Surabaya.

Tabel II.56
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.100	42.019	41.893	37.295	4.692
2	Jumlah sasaran ibu nifas	42.164	42.014	41.885	37.187	36.818
3	Persentase (persen)	99,85	100,01	100,02	101,11	12,74

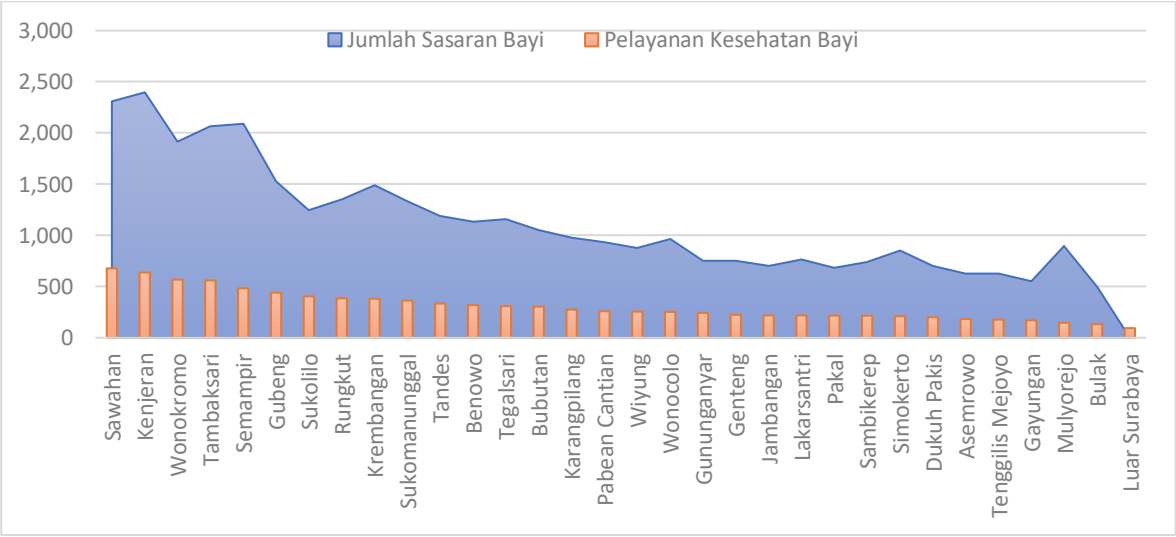
Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Cakupan pelayanan Ibu Nifas dari tahun 2021 sebesar 99,85 mengalami peningkatan hingga 100% pada tahun 2024 dan terus diupayakan cakupannya di 100%. Hal ini didukung oleh adanya pendampingan yang dilakukan oleh Kader Surabaya Hebat kepada sasaran ibu nifas yang ada di Surabaya, serta upaya 1 puskesmas 1 dokter spesialis *obgyn* yang berdampak pada terpantaunya secara rutin ibu-ibu hamil hingga melahirkan dan memasuki masa nifasnya.

Tabel II.57
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	42.248	41.931	37.349	37.952	3.267
2	Jumlah sasaran bayi	42.708	41.901	41.180	36.208	35.479
3	Cakupan kunjungan bayi (persen)	98,92	100,1	90,70	104,82	9,21

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025



Gambar II.14
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan Tahun 2025 (TW I)
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2025

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar di atas adalah di Kecamatan Sawahan. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Bulak.

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Sejak tahun 2018 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing. Di tahun 2021 jumlah posyandu balita sebanyak 2.734. Sedangkan pada tahun 202, jumlah posyandu balita sebanyak 2.731, dan pada tahun 2023 jumlah posyadu sebanyak 2.682. Pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 triwulan I jumlah posyandu sebanyak 2.676. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.58
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah posyandu	2.734	2.731	2.682	2.676	2.676
2	Jumlah sasaran balita	208.175	206.810	205.688	187.400	183.292
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,1	13,2	13,04	14,28	14,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1.000 penduduk berkisar angka 13-15. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 1, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 23 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 58 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2024 sejumlah 3.018.022 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 47.906 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2021 sampai tahun 2025 triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.59
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	358	442	352	519	519
3	Jumlah pustu	59	59	58	58	58

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kota Surabaya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.60
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
2.	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	5	5	5	5	5
3.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	3	3	3	3	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5.	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	3	3
6.	Rumah Sakit Swasta	43	43	43	48	48
Jumlah Rumah Sakit (Terakreditasi)		**60 (N/A)**	**60 (56)**	**60 (59)**	**66 (66)**	**66 (66)**
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		**0,0209**	**0,0209**	**0,0199**	**0,0219**	**0,0219**

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2021, jumlah dokter sebanyak 8.113, dengan rasio 2,73 per 1000 penduduk. Sedangkan pada Tahun 2022, jumlah dokter sebanyak 8.158, dengan rasio 2,73 per 1000 penduduk. Kemudian pada tahun 2023, jumlah dokter sebanyak 6.970, dengan rasio 2,32 per 1000 penduduk. Serta tahun 2024 jumlah dokter sebanyak 7.446, dengan rasio 2,47 per 1.000 penduduk. Selain kecukupan kuantitas, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.61
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022
2	Jumlah dokter	1.561	8.113	8.158	6.970	7.446
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,53	2,73	2,73	2,32	2,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.62
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2020–2024

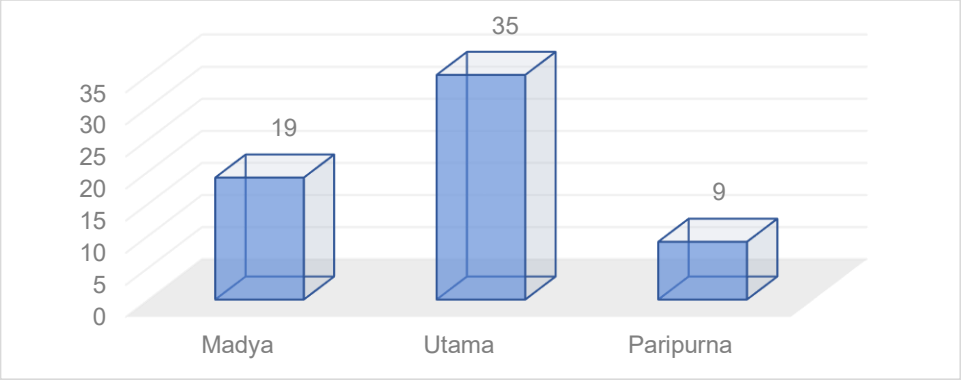
Instansi	2020	2021	2022	2023	2024
IKM RSUD Bhakti Dharma Husada	88,76	79,89	87,46	93,67	95,72
IKM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	83,48	88,85	87,49	91,89	94,49
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	81,55	86,39	86,87	92,59	95,96
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	82,83	84,85	91,57	86,87	88,89

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari tabel pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di atas, dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2024 seluruh puskesmas sejumlah 63 unit telah dilakukan akreditasi. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna. Serta adanya RSUD baru yakni RSUD Eka Candrarini juga telah mendapatkan akreditasi utama. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.15
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 diolah

Selain peningkatan mutu, aksesibilitas pelayanan kesehatan, juga diupayakan melalui pemberian jaminan kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) sejak tahun 2021 sebagai bentuk upaya untuk memastikan warga Kota Surabaya dilindungi oleh jaminan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kota Surabaya, pasal 3 yang mengamanatkan bahwa sasaran penerima jaminan kesehatan bagi penduduk daerah adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan dan berdomisili di daerah. Adapun pembiayaan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk daerah dilakukan dengan cara pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan yang telah dianggarkan pada Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya disebut dengan PBI-APBD (Penerima Bantuan Iuran APBD). Selengkapnya tentang data perkembangan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.63
Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
2	Jumlah penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	N/A	2.927.707	3.064.705	2.997.018	2.854.980
3	Cakupan kepesertaan JKN (%)	N/A	97,99	101,84	99,30	94,60

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2025

Sejak tahun 2022 hingga triwulan 1 tahun 2025, cakupan kepesertaan JKN cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan antara lain karena adanya kepesertaan dari warga yang sudah berakhir pembayaran iurannya oleh Pusat, kemudian adanya kepesertaan dari segmentasi pekerja penerima upah yang diputus hubungan kerja

sehingga tidak berkepesertaan lagi, maupun terkait adanya masyarakat yang belum memiliki kepesertaan BPJS karena telah memiki jaminan kesehatan swasta.

Dalam rangka mencapai Bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha meningkatkan capaian kelurahan yang bebas BABS. Peningkatan yang terjadi, dari tahun 2017 sebanyak 35 persen atau sejumlah 54 kelurahan, hingga tahun 2023 telah seluruhnya atau sejumlah 153 kelurahan bebas BABS. Tahun 2024 Kota Surabaya berhasil mendapatkan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terbaik 1 kategori Madya, yang artinya Surabaya diakui telah menerapkan 3 (tiga) dari 5 (lima) pilar STBM, yakni, Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Pengamanan Pangan Olahan Makanan Rumah Tangga.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk menjamin makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi syarat kebersihan (higienis sanitasi). Hasil pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.64
Tempat Pengolahan Makanan (TPM)/Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TPM	1.846	1.797	2.369	3.811	3.824
2	Jumlah TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	1.408	1.532	2.104	3.387	3.407
3	Persentase (%)	76,27	85,25	88,81	88,87	89,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Adapun capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2020 hingga 2024 pada tabel di bawah ini, secara umum, mengalami peningkatan. Meski demikian, masih terdapat kendala terkait masih adanya balita yang tidak terlaporkan pelayanan kesehatannya dikarenakan domisili penduduk ber-KTP Surabaya tersebut yang berada di luar Kota Surabaya. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi dan himbauan bagi warga tersebut untuk menyesuaikan lokasi dokumen administrasi kependudukannya dengan domisili tetapnya saat ini.

Tabel II.65
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2022–2024

No	Nama Indikator	2022			2023			2024		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	44.012	44.182	100,39	43.881	44.057	100,40	37.187	37.506	100,86
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	42.014	42.019	100,01	41.885	41.893	100,02	37.187	37.295	100,29
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	40.012	41.930	104,79	39.891	41.804	104,80	36.208	37.952	104,82
4	Pelayanan kesehatan balita	164.909	160.663	97,43	164.508	164.023	99,71	152.252	152.609	100,23
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	331.551	415.739	125,39	330.258	398.238	120,58	396.102	398.643	100,64
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2.042.586	2.081.701	101,91	2.041.119	2.155.512	105,60	1.923.364	2.161.327	112,37
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	303.328	313.027	103,20	314.690	326.681	103,81	378.637	378.637	100,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	740.719	708.121	95,60	744.436	761.441	102,28	727.432	738.280	101,49
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	96.732	106.860	110,47	104.362	113.970	109,21	101.979	113.051	110,86
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	7.320	6.226	85,05	5.580	5.766	103,33	5.552	5.849	105,35
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	60.804	83.577	137,45	63.879	89.139	139,15	78.502	108.826	138,63
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	51.607	61.726	119,61	52.741	66.001	125,14	49.485	63.442	128,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2025 (Triwulan I), rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 1.774,14, yang berarti setiap satu kilometer jalan melayani 1.774,14 penduduk.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada tahun 2021, akibat pandemi covid-19 maka tidak ada penambahan panjang jalan dari tahun 2020. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, penambahan jalan baru dapat terlaksana dengan persentase jalan kondisi baik berturut-turut sebesar 99,54% dan 99,55%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas jalan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	1.686,88	1.692,19	1.693,42	1.693,42	1.693,42
Panjang jalan (km)	1.697,39	1.699,95	1.701,12	1.701,12	1.701,12
Persentase jalan kondisi baik (%)	99,38	99,54	99,55	99,55	99,55

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pekerjaan umum juga dituntut untuk menyediakan layanan air bersih, sanitasi, dan air minum layak di kawasan permukiman penduduk. Untuk meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan air bersih, bekerjasama dengan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Cakupan penduduk dengan akses air bersih terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 98,27% sampai dengan 100% di tahun 2023. Program Sanitasi dan Kebersihan Kota Surabaya juga melibatkan pengembangan fasilitas umum seperti toilet umum yang bersih dan mudah diakses terutama di area publik. Upaya untuk meningkatkan sanitasi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih nyaman bagi warga kota, serta mengurangi risiko penyakit disebabkan sanitasi yang buruk. Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, sanitasi dan air minum layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.67
Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	98,27%	99,62%	100,0%	100,0%	100,0%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	99,12%	99,85%	100,0%	100,0%	100,0%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	99,46%	99,67%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: DSDABM dan PDAM Surya Sembada, 2025

Adapun pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Surabaya Tahun 2024 sebesar 100% dengan rincian Jenis Layanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100% dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik sebesar 100%. Secara umum, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan mutu minimal layanan di bidang urusan Pekerjaan Umum. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian terhadap aspek mutu yaitu 1) kuantitas kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan pemenuhan kebutuhan jaringan perpipaan air minum, serta 2) adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga telah terpenuhi 100%.

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2025 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2025-2045 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2024, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.68
Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2025 (TW I)

Uraian	Tahun Penyusunan
1. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana Induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017
10. Masterplan Air Limbah	2018
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2020
13. Masterplan Energi	2021
14. Masterplan Persampahan	*(belum disusun)*
15. Masterplan Industri	*(belum disusun)*
16. Strategi Sanitasi Kota	2022
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	2023
18. Masterplan Pemadam Kebakaran	2023
19. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	*(belum disusun)*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2025

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan *Surabaya Single Window* (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan

perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB/PBG yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB/PBG rumah tinggal, IMB/PBG non rumah tinggal serta IMB/PBG Reklame. Jumlah IMB/PBG yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.69
IMB/PBG yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Tinggal	6.615	5.983	5.687	2.200	1.854
2	Non Rumah Tinggal	1.572	1.616	1.881	4.844	625
3	Reklame	101	105	53	32	18
Total		**8.288**	**3.238**	**7.568**	**7.076**	**2.497**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Tabel II.70
Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB/PBG Tahun 2021 – 2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah bangunan yang dikenakan sanksi administratif	412 persil	150 persil	62 persil	92 persil	30 persil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan izin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana-prasarananya kurang. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/433/436.1.2/2019 tentang Hasil Penanganan Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya, bahwa total luas penanganan kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 145,89 Ha (nol kumuh).

Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kegiatan "Dandan Omah" yaitu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kota Surabaya. Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024, kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah menjadi layak huni, sehat dan aman dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan kegiatan pembangunan berdasarkan partisipasi warga (*community-based development*), yang pelaksanaan kegiatannya dioptimalkan melalui pemberdayaan warga setempat. Perbaikan rumah tidak layak huni ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dan pendampingan secara berkala oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), Kelurahan dan Dinas dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan perbaikan rutilahu. Mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 intervensi perbaikan rumah tidak layak huni terus meningkat dan telah dikerjakan sampai dengan akhir tahun 2024 sejumlah 7.668 unit, sehingga sisa yang belum dikerjakan yaitu 2.756 unit dan akan dikerjakan di tahun selanjutnya. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.71
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2020–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2.174	3.103	5.990	7.668	0
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	4.550	4.550	9.772	10.424	0
Persentase perbaikan rumah tidak layak huni (%)	47,78	68,20	61,30	73,56	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang sehat adalah melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang kurang atau *backlog* di Kota Surabaya pada tahun 2023 adalah sebanyak 87.259 unit, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi *backlog* adalah mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang dapat digunakan untuk

mendukung program rehabilitasi, peremajaan dan permukiman kembali serta pengadaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; mengembangkan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyediakan rumah susun milik atau sewa yang layak dan terjangkau, khususnya bagi keluarga miskin; dan mengaplikasikan prinsip subsidi silang untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan gedung Rusunawa melalui skema hunian campuran yang mana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) baru tidak hanya dapat dihuni oleh masyarakat miskin saja, melainkan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bahkan masyarakat berpenghasilan menengah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.72
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pemohon Rusun	1.234	363	10	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemohon rusun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah antrian dan ketersediaan unit hunian yang terbatas, sehingga pendaftaran permohonan pemakaian rumah susun sewa melalui aplikasi ditutup. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi, hingga pada tahun 2023, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 109 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 23 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.73
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
1	URIP SUMOHARJO	Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun 1983 (APBN)
2	DUPAK BANGUNREJO	Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun 1992 (APBN)
3	SOMBO	Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	18	8	± 41.044	Dibangun 1993 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
		Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	24	2		Dibangun 2020 (APBD)
4	PENJARINGANSARI	Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	18	3	± 32.350	Dibangun 1995 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	6		Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap III)	24	2		Dibangun 2009 (APBN)
		Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap IV)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	WARUGUNUNG	Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang	21	10	± 29.845	Dibangun 1996 (APBD)
6	WONOREJO	Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	21	2	± 5.466	Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	4		Dibangun 2006 (APBN)
7	TANAH MERAH	Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap I)	21	4	± 28.810	Dibangun 2007 (APBN)
		Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap II)	24	4		Dibangun 2009 (APBN)
8	RANDU	Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun 2007 (APBN)
9	GRUDO	Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	PESAPEN	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011 (APBN)
11	JAMBANGAN I	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1	± 2.977	Dibangun 2011 (APBN)
12	JAMBANGAN II	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1		Dibangun 2017 (APBD)
13	SIWALANKERTO	Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap I)	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap II)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14	ROMOKALISARI	Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap I)	24	4	± 25.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap II)	24	4		Dibangun 2013 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap III)	24	2		Dibangun 2014 (APBN)
15	BANDAREJO	Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
16	DUKUH MENANGGAL	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap I)	24	2	± 14.388	Dibangun 2016 (APBN)
		Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap II)	36	2		Dibangun 2020 (APBN)
17	KEPUTIH	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap I)	36	4	± 258.140	Dibangun 2016 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m^2)	Keterangan
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap II)	36	2		Dibangun 2017 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap III)	36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	TAMBAK WEDI	Jalan Tambak Wedi, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2017 (APBN)
19	TAMBAK WEDI II	Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2020 (APBN)
20	INDRAPURA	Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBD)
21	BABAT JERAWAT	Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBD)
22	GUNUNGANYAR SAWAH	Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar	24	2	± 14.150	Dibangun 2019 (APBD)
		Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar (Blok B)	36	2		Dibangun 2020 (APBD)
23	PAKAL BENOWO	Jalan Kauman Baru, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal	24	2	± 29.900	Dibangun 2022 (APBD)
JUMLAH				**109**		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Pada tahun 2024, Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebesar 100% melalui pemenuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan cakupan penduduk yang yang memperoleh fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebesar 100%, serta cakupan pemenuhan penyediaan rumah layak huni juga tercapai 100%.

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan

penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Pemerintah Kota berkomitmen tinggi dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Dalam hal ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman dan ketertiban umum menjadi salah satu pengendalian dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Melalui beberapa indikator kinerja dalam setiap layanannya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kualitas sarana dan prasarana layanan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penegakan peraturan daerah, pelaksanaan penanganan unjuk rasa serta pelaksanaan operasi kawasan yang memiliki potensi tinggi akan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Tabel II.38 di atas, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja SPM, antara lain:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani sebanyak 1.296 orang melalui aktivitas penegakan perda sesuai SOP menggunakan sarana prasarana serta SDM Satpol PP sesuai standar.
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan cara melakukan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana kepada sejumlah 56.328 orang dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada 820 orang.
3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kepada sebanyak 324 orang. Aktivitas yang mendukung pelayanan tersebut antara lain, pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana, melakukan respon cepat kejadian kedaruratan dan respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (*Command Center* 112), serta pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.
4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, antara lain melalui layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan

verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak sebanyak 38 orang. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan sebanyak 8 orang.

2.1.3.1.5.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.74
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	781	783	978	978	1.517
2	Jumlah penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,62	2,63	3,27	3,25	5,03

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Tabel II.75
Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	4.124	10.736	13.102	21.805	5.124
2	Jumlah pelanggaran K3	4.124	13.261	16.420	26.817	5.400
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	80,96	79,79	81,31	94,89

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan

demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2021, sebanyak 4.124 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah pelanggaran meningkat signifikan sebanyak 13.261 dan diselesaikan 80,96 persen. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024, jumlah pelanggaran kembali meningkat berturut-turut sebanyak 16.420 dan 26.817, yang dapat diselesaikan sebanyak 79,79 dan 81,31 persen. Kemudian di tahun 2025, sampai dengan triwulan I, jumlah pelanggaran dapat diselesaikan 94,89 persen dari 5.400 jumlah pelanggaran K3. Meningkatnya pelanggaran K3 di tahun 2022 dan 2023 disebabkan mulai normalnya aktivitas masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, sehingga mulai banyak pelanggaran yang terjadi di tempat umum seperti berjualan asongan, kaki lima, maupun pengamen jalanan.

Tabel II.76
Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	284	414	345	478	103
2	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa yang Mengarah Kejadian Anarkis	8	10	7	5	3

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis di sepanjang tahun 2021 hingga triwulan I tahun 2025. Namun, jumlah kejadian unjuk rasa yang mengarah pada anarkisme tersebut cenderung menurun. Hal ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dari para pemangku kepentingan, serta didukung dengan pendekatan persuasif dari petugas lapangan guna mencegah dan meminimalisasi kondisi unjuk rasa menjadi tidak terkendali. Selain itu, juga diperlukan kapasitas dan kesiagaan petugas Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.77
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Penyebab	2021	2022	2023	2024	2025
1	Hubungan Listrik	200	219	95	71	16
2	Api Terbuka	246	212	247	91	14
3	Api Mekanis	0	0	0	0	0
4	Dalam Penyelidikan	257	158	429	205	10
5	Tidak Ada Keterangan	2	0	0	1	0
Total		**705**	**589**	**771**	**368**	**40**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

Penyebab kebakaran di tahun 2024, dari total 368 kejadian, sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka sebanyak 91 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik sebanyak 71 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek. Sedangkan untuk tahun 2025 sampai dengan triwulan I, dari total 40 kejadian, penyebab kebakaran paling banyak disebabkan oleh sumber listrik sebanyak 16 kejadian, dan sebanyak 14 kejadian karena sumber api terbuka dari pembakaran alang-alang dan sampah.

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal, termasuk operasional *Command Center* 112 yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala kejadian kedaruratan sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Sampai dengan tahun 2025 triwulan I, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.78
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	705	589	771	368	40
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	705	589	771	368	40
3	Persentase penanganan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2025

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) rata-rata di atas 95%, dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit didesain untuk dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II.79
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	86	86	86	86	89
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	21	21	21	21	21
3	Jumlah Penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286	3.018.022
4	Cakupan Pelayanan WMK	95,6%	95,6%	96%	96%	96%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2025

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu

hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Bentuk penanganan yang diterima PPKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 3 (tiga) UPTD Dinas Sosial, yaitu 1) UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PPKS hasil penertiban; 2) UPTD Kampung Anak negeri yang ada di Wonorejo (untuk anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar) dan di Kalijudan (untuk anak dengan kedisabilitasan dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi); 3) UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, serta Liponsos Babat Jerawat yang melayani dan menangani eks penderita kusta.

Tabel II.80
Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PPKS yang ada	62.243	64.933	54.916	24.583	26.865
2	Jumlah PPKS yang ditangani	31.516	34.180	25.562	11.861	26.443
3	Persentase PPKS yang ditangani (%)	50,63	52,63	46,55	48,25	98,43

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2025

Secara umum, jumlah PPKS menurun dari tahun 2021 sebanyak 62.243 orang menjadi 24.583 orang di tahun 2024, dengan persentase penanganan sebesar 48,25 persen. Sementara sampai dengan triwulan I tahun 2025, sebanyak 26.443 orang PPKS yang ditangani, atau 98,43 persennya. PPKS yang ditangani yang dimaksud yakni PPKS yang ada di UPTD yang dimiliki Dinas Sosial dan mendapat penanganan mulai dari permakanan hingga penanganan sosial lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PPKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PPKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PPKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PPKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PPKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PPKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Tingginya mobilitas penduduk di sekitar Kota Surabaya menjadi salah satu penyebab banyaknya pendatang yang

rentan menjadi PPKS, serta kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait untuk melaksanakan reunifikasi atau pemulangan PPKS ke daerah asal. Jumlah PPKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.81
PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah PPKS non Surabaya	1.252	1.409	419	516	278

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2025

Secara umum, penanganan PPKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PPKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PPKS. PSKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PPKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.82
PSKS Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Total PSKS	1.159	3.855	2.160	1.977	549
PSKS Aktif	996	2.443	1.747	1.715	365

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Kota Surabaya telah mencapai keberhasilan signifikan dalam bidang sosial pada tahun 2024, dengan semua target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang urusan sosial mencapai 100%. Pencapaian ini mencakup berbagai program rehabilitasi sosial dasar yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan di luar panti sosial. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berhasil menjangkau seluruh penyandang disabilitas terlantar, memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial juga mencapai target 100%, memastikan bahwa semua anak terlantar menerima perawatan, pendidikan, dan dukungan sosial yang memadai. Upaya rehabilitasi bagi lanjut usia terlantar di luar panti sosial juga tidak ketinggalan, dengan pencapaian 100% yang menunjukkan bahwa setiap lanjut usia terlantar mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, juga

telah berhasil sepenuhnya, memastikan bahwa mereka menerima bantuan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan layanan sosial yang inklusif dan merata, serta memastikan bahwa semua warganya, terutama yang berada dalam kondisi paling rentan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja sempat menurun dari 1.582.564 pada tahun 2020 menjadi 1.572.888 pada tahun 2021, dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 1.643.314. Sementara itu, pada tahun 2023, rasio angkatan kerja berada pada angka sekitar 0,69 dengan komposisi jumlah angkatan kerja 15 tahun ke atas sebanyak 1.569.714 jiwa. Pada tahun 2024, rasio angkatan kerja berada pada angka sekitar 0,70 dengan komposisi jumlah angkatan kerja 15 tahun ke atas sebanyak 1.624.822 jiwa. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pekerja perempuan yang sebelumnya tidak bekerja karena mengurus rumah tangga, dsb.

Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Ke Atas	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.330.830	2.305.008
3	Rasio angkatan kerja	0,68	0,67	0,69	0,67	0,70

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2025

2.1.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.84
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	283	120	176	182	37
2	Jumlah Sengketa Selesai	117	120	116	118	22
3	Jumlah Perusahaan	12.782	10.592	10.592	10.592	10.592
4	Rasio sengketa	2,21	1,13	1,66	1,72	0,35

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2025

Pada tahun 2021 jumlah sengketa mengalami penurunan menjadi sebesar 283 sengketa. Kemudian pada tahun 2022 jumlah sengketa menurun kembali menjadi 120 sengketa. Namun pada akhir tahun 2023 dan 2024 jumlah sengketa meningkat menjadi masing-masing sebesar 176 sengketa dan 182 sengketa, dengan 116 dan 118 di antaranya dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama.

2.1.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK, sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.85
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2024
1	Tidak/belum pernah sekolah	11.134
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	13.785
5	SMA	44.107
6	SMK	
7	Diploma I/II/III/Akademi	10.741
8	Universitas	

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para

pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Tabel II.86
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	2.815	7.291	7.760	7.853	1.241
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	5.132	7.291	7.760	7.853	1.241

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2025

Relatif rendahnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 dan juga di tahun 2021 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Namun pada tahun 2022 hingga 2024, kegiatan fasilitasi pencari kerja terus ditingkatkan pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, pencari kerja diharapkan mampu dengan cepat menempati lowongan kerja yang ada, maupun membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal guna mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Data peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.87
Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja	441	732	1.117	752	112

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

2.1.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan

yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.88
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	12.746	8.573	7.560	3.032	801
2	Jumlah Perusahaan	12.780	10.592	10.592	10.592	10.592
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3	99,73	80,94	71,37	28,63	7,56

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

Pada tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 12.780 perusahaan atau 99,73% dari total perusahaan yang terdaftar. Untuk tahun 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 8.573 perusahaan atau 80,94% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 7.560 perusahaan atau 71,37% dari total perusahaan yang terdaftar. Dan pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menjadi 3.032 perusahaan atau 28,63% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, dan jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender sejatinya dapat dilihat dari nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, nilai IKG cenderung fluktuatif. Dari dimensi pendukung nilai IKG yang meliputi dimensi kesehatan reproduksi, pasar tenaga kerja dan pemberdayaan, di Kota Surabaya nilai IKG lebih banyak dipengaruhi oleh dimensi pasar tenaga kerja yaitu masih adanya kesenjangan persentase anggota legislatif antara perempuan dan laki-laki. Nilai IPG cenderung meningkat karena keterkaitannya dengan nilai IPM di Kota Surabaya yang semakin

meningkat. Sedangkan nilai IDG dari tahun ke tahun juga cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena IDG menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sejauh ini, di Kota Surabaya, pembentukan nilai IDG lebih banyak dipengaruhi faktor alami dari kemampuan individu. Karenanya masih diperlukan strategi-strategi khusus dalam percepatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan politik.

Tabel II.89
Indeks Ketimpangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,160	0,206	0,230	0,128	0,171
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,58	93,90	94,21	94,36	94,53
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,86	82,82	83,20	85,29	76,40

Sumber : BPS, 2025

2.1.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat. Meski demikian, jika dilihat dari partisipasinya dibanding jumlah pekerja perempuan di Kota Surabaya menurut BPS, terdapat sedikit penurunan partisipasi pekerja di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.90
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pekerja Perempuan	600.845	584.865	632.797	629.533	663.493
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	13.433	14.903	14.828	15.660	15.478
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	2,24	2,55	2,34	2,49	2,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2020 sebesar 600.845 orang. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 312.338 orang atau 53,43%. Salah satu

penyebabnya adalah dampak pandemi Covid-19 yang memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya sebesar 632.797 orang atau 95,38%. Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sekitar 1,42% menjadi 93,96%. Pada tahun 2024, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya meningkat menjadi sebesar 663.493 orang atau 95,01%. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.91
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	655.746	584.465	663.404	669.988	698.308
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	600.845	312.338	632.797	629.533	663.493
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	91,63	53,43	95,38	93,96	95,01

Sumber : BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

2.1.3.2.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.92
KDRT Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rumah Tangga	974.298	974.298	1.011.183	1.004.044	1.004.044
2	Jumlah KDRT	33	75	103	137	29
2a	Jumlah KDRT pada perempuan	7	34	63	72	13
2b	Jumlah KDRT pada anak	26	41	40	65	16
3	Rasio KDRT	1:29.524	1:12.991	1:9.817	1:7.329	1:34.622
3a	Rasio KDRT pada perempuan	1:139.185	1:28.656	1:16.051	1:13.945	1:77.234
3b	Rasio KDRT pada anak	1:37.473	1:23.763	1:25.280	1:15.447	1:62.753

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada tabel di atas jumlah KDRT pada tahun 2020 sebanyak 13 kejadian. Akan tetapi di tahun 2021 hingga

tahun 2024 jumlah kasusnya cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan kesadaran dan keberanian masyarakat yang meningkat untuk melaporkan tindak kekerasan di lingkungannya. Pada tahun 2023 resmi berdiri UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sehingga pelaksanaan penanganan kasus lebih masif, serta adanya peran aktif jejaring UPTD PPA dan Konselor untuk penanganan pengaduan yang masuk, serta masyarakat lebih mudah dalam mengakses pelayanan. Masyarakat juga telah mengenal adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW yang memfasilitasi untuk konseling dan pengaduan, sehingga jangkauan ke masyarakat lebih intens sampai dengan level RW.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.93
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan	13	38	82	100	16
2	Jumlah pengaduan perlindungan anak	87	123	144	195	40
3	Persentase penyelesaian pengaduan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan terhadap peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka permasalahan perempuan dan anak. Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak pada bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.94
Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak
Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak (lembaga)	70	75	662	672	716

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2020 terdapat 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 kelurahan ramah anak. Sampai dengan tahun 2024, seluruh 31 kecamatan sudah responsif gender dan 153 kelurahan ramah anak. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengarusutamaan gender adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usia produktif. Jumlah perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.95
Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi	0	50	14	68	80

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan daerah merupakan pilar fundamental dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi wilayah. Dengan tingkat ketahanan pangan yang baik, suatu daerah mampu menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketersediaan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung tumbuhnya kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Lebih dari sekadar aspek konsumsi, ketahanan pangan juga memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan sosial. Ketimpangan dalam distribusi atau kelangkaan pangan kerap menjadi pemicu ketegangan sosial.

Oleh karena itu, sistem pangan yang adil dan merata berkontribusi langsung dalam menciptakan harmoni sosial serta menurunkan potensi konflik yang berbasis pada ketidakadilan ekonomi. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek kecukupan pangan, tetapi juga menjadi pondasi utama

dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Investasi pada sistem pangan yang kuat dan inklusif adalah investasi jangka panjang dalam menciptakan daerah yang tangguh menghadapi berbagai tantangan global, termasuk perubahan iklim dan krisis ekonomi. Adapun capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.96
Indeks Ketahanan Pangan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	84,71	85,25	81,59	92,14	93,06

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah secara menyeluruh, mencakup tiga dimensi utama: *ketersediaan*, *akses*, dan *pemanfaatan pangan*. Indeks ini dibentuk berdasarkan berbagai indikator turunannya seperti ketersediaan produksi pangan lokal, distribusi pangan, daya beli masyarakat, serta kualitas konsumsi pangan dan sanitasi.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020, IKP berada pada angka 84,71 dan sempat naik menjadi 85,25 di tahun 2021. Namun, tren penurunan terjadi pada 2022 dengan nilai 81,59 sebelum melonjak signifikan menjadi 92,14 pada 2023 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 93,06. Pola ini menunjukkan adanya dinamika dalam ketahanan pangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial-ekonomi, kebijakan pertanian, serta distribusi pangan yang belum stabil setiap tahunnya.

Salah satu indikator penting dalam dimensi *akses pangan* adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*), yang menggambarkan seberapa banyak kelompok atau populasi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka secara optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah atau negara menghadapi masalah kekurangan pangan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan individu terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan lansia. Tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan lokal, memperbaiki distribusi pangan, dan mendorong pola makan yang sehat dan bergizi.

Tabel II.97
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	3,82	3,72	4,37	4,06	2,37

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Surabaya menunjukkan pola fluktuatif selama lima tahun terakhir. Tahun 2020 tercatat sebesar 3,82 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 3,72 persen di tahun 2021. Lonjakan terjadi pada tahun 2022 dengan angka 4,37 persen, namun kembali menurun menjadi 4,06 persen di 2023 dan mencapai titik terendah 2,37 persen pada 2024. Tren ini mencerminkan dinamika kondisi konsumsi pangan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk daya beli, distribusi pangan, dan dampak sosial-ekonomi dari pandemi.

Ketahanan pangan juga dapat diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 248,28 kg/kapita/th, kemudian pada tahun 2022 menjadi 210,75 kg/kapita/th, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 115,93 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun, dan ketersediaan pangan utama Kota Surabaya pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I adalah sebesar 109,48 kg/kapita/th.

Tabel II.98
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	737.617.453	629.700.570	348.867.348	607.346.940	330.413.100
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	248,28	210,75	115,93	201,24	109,48

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2025

Selain mengukur ketersediaan dan distribusi pangan, kualitas konsumsi pangan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang menyeluruh. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai aspek ini adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan alat ukur yang menggambarkan tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan

masyarakat berdasarkan prinsip gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor PPH, semakin mencerminkan bahwa masyarakat telah mengonsumsi berbagai jenis pangan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan anjuran gizi. Hal ini menunjukkan komposisi pangan yang lebih beragam, berkualitas, dan bergizi, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Dengan memantau dan meningkatkan skor PPH, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran, tidak hanya fokus pada ketersediaan, tetapi juga pada mutu konsumsi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang. Nilai skor PPH Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.99
Pola Pangan Harapan Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pola Pangan Harapan	96,25	94,48	94,16	94,34	95,53

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa PPH masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2020 berada pada angka 96,25. Namun, pada tahun 2021 kembali menurun menjadi menjadi 94,48 dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 94,16. Hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan Kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Sedangkan pada akhir tahun 2023, PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat menjadi 94,34, begitu pula pada akhir tahun 2024 juga terjadi peningkatan skor PPH menjadi 95,53. Artinya pola pangan masyarakat di tahun 2024 ini lebih bagus dari tahun sebelumnya.

Selain fokus pada ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian serius terhadap keamanan pangan, baik dari sisi pangan segar maupun makanan olahan, yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan konsumsi. Keamanan pangan menjadi aspek krusial dalam mendukung kesehatan masyarakat dan mencegah risiko gangguan kesehatan akibat konsumsi bahan pangan yang tercemar atau tidak layak konsumsi. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendekatan edukatif dan preventif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi pangan yang aman dan sehat, serta melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel pangan secara rutin setiap bulan dari berbagai lokasi di Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan segar yang beredar di pasar dan dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan

pangan yang telah ditetapkan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Melalui pengujian laboratorium, dilakukan pemantauan terhadap kandungan residu bahan kimia berbahaya seperti pestisida, formalin, boraks, dan zat aditif lainnya. Langkah ini penting untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal. Adapun hasil pengambilan dan pengujian sampel pangan segar di Kota Surabaya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.100
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah sampel pangan segar	2.061	1.500	1.668	1.500	130
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	149	60	12	0	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam urusan pemerintahan di bidang pangan. Salah satu isu penting adalah perlunya perluasan kerja sama antar daerah, khususnya dengan wilayah-wilayah penghasil bahan pangan. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat Surabaya sebagai kota besar memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Penguatan jejaring distribusi antarwilayah ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kota Surabaya secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan lokal, optimalisasi potensi urban farming menjadi salah satu fokus strategis. Meskipun memiliki keterbatasan lahan, Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya mendorong produksi pangan di dalam kota melalui pemanfaatan teknologi pertanian perkotaan dan pengelolaan lahan aset pemerintah yang belum produktif. Upaya ini juga diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda agar turut berperan aktif dalam gerakan pertanian urban sebagai bagian dari solusi keberlanjutan pangan kota.

Permasalahan lainnya adalah terkait keamanan pangan, baik dari sisi pangan segar maupun makanan olahan, yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan konsumsi. Untuk itu, pengawasan terhadap keamanan pangan menjadi prioritas yang terus dijalankan secara konsisten. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendekatan edukatif dan preventif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi pangan yang aman dan sehat, serta melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel pangan

secara rutin setiap bulan. Pengawasan ini dilakukan secara acak untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar memenuhi standar mutu dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk memperkuat sistem pangan daerah yang tangguh, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun terdapat keterbatasan ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada tahun 2021 tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 35,12 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Pada tahun 2022, tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 46,55 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran, serta terus mengalami peningkatan menjadi 50,16 persen di akhir tahun 2023. Pada akhir tahun 2024, tercatat 50,21 persen aset pemerintah selain jalan dan saluran yang telah tersertifikasi kemudian 52,61 persen hingga triwulan I tahun 2025. Pengamanan administrasi berupa pencatatan/inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi

pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain.

Tabel II.101
Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Aset Pemerintah yang telah bersertifikat*	1.408	1.889	2.255	2.257	2.391
Total aset pemerintah*	4.008	4.058	4.495	4.495	4.495
Persentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat (%)	35,12	46,55	50,16	50,21	53,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025
*Total aset adalah aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat sampai dengan tahun 2021, luas lahan aset yang bersertifikat mencapai 17.296.108 m^2. Kemudian pada tahun 2022, luas lahan aset yang bersertifikat bertambah menjadi seluas 18.905.062 m^2 dan sampai dengan akhir tahun 2023 bertambah lagi menjadi seluas 20.247.009 m^2 lahan aset yang bersertifikat. Pada tahun 2024, akumulasi luas lahan aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran yang telah bersertifikat seluas 20.913.708 m^2. Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 hingga Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.102
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Akumulasi Luas Lahan* Aset Bersertifikat (m^2)	17.296.108	18.905.062	20.247.009	20.913.708	21.699.774
Luas Lahan Aset (m^2)*	38.012.923	38.165.116	38.005.231	38.055.231	38.055.231
Persentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	45,50	49,53	53,20	54,95	57,02

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025
*Total aset adalah aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat ke depannya, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang atau barang di Kota Surabaya.

Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, TPA Benowo, serta Makam Waru Gunung.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 2,08 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 2,24 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu untuk infrastruktur dan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain. Berikut adalah tabel luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan non infrastruktur.

Tabel II.103
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur (Ha)	7,93	1,92	1,74	1,015	0
Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur (Ha)	1,41	0,78	0,82	1,263	0

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2025

Dari tabel di atas, realisasi luasan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur cenderung menurun karena menyesuaikan skala prioritas pembangunan kota. Sedangkan realisasi luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur cenderung fluktuatif, yang disebabkan adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan.

Tabel II.104
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	33	44	30	30	30	30
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	2	28	16	30	31	7
3.	Persentase Kasus yang Diselesaikan (%)	6,06	63,64	53,33	100	103,33	23,33

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2.1.3.2.5.1 Persampahan

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya sejak tahun 2021 hingga saat ini cenderung meningkat seiring bertambahnya penduduk dan aktivitasnya selepas pandemi Covid-19, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.105
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	1.752,50	1.792,72	1.800,04	1.810,43	1.810,81
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.585,26	1.601	1.536,76	1.540,97	1.704,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Peningkatan volume produksi sampah antara lain disebabkan karena belum optimalnya kegiatan pengurangan sampah dari sumber sampah Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Data terkait jumlah TPS tahun 2020 hingga Triwulan I 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.106
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
2	Jumlah TPS (unit)	190	190	190	190	190
3	Jumlah TPS 3R	9	9	10	12	12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Jumlah TPS sebanyak 190 unit telah merata di setiap kelurahan di Kota Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan pembangunan maupun peningkatan kualitas operasional TPS 3R secara bertahap sebagai bentuk optimalisasi reduksi volume sampah yang masuk ke TPA.

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya

peningkatan kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel II.107
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	909	1.113	818	1.645	615

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.3.2.5.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota. Selain itu, RTH memiliki berbagai manfaat antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup (pengurangan polusi); mendukung perekonomian daerah (penciptaan lapangan kerja); mendorong pembangunan berkelanjutan (penggunaan energi terbarukan); dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (peningkatan taraf hidup).

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2018 mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (TW II) luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 22,01 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.392,11 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.108
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2020–2024

No.	Jenis RTH Publik	2020	2021	2022	2023	2024
1	RTH makam	283,53	284,95	284,95	284,95	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	360,58	361,08	361,08	363,42	363,42
3	RTH telaga/ waduk/ boezem	198,23	198,23	198,23	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.600,33	4.600,33
6	RTH hutan	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.672,75	1.672,75	1.673,65	1.673,65	1.673,65
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		**7.356,96**	**7.358,87**	**7.359,77**	**7.392,11**	**7.392,11**
Luas Kota Surabaya		**33.451**	**33.451**	**33.451**	**33.592**	**33.592**
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		**21,99**	**22,00**	**22,00**	**22,01**	**22,01**

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih perlu untuk dimanfaatkan atau difungsikan secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.

2.1.3.2.5.3 Kepatuhan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan

Keberadaan industri dan tempat usaha yang semakin pesat di kota Surabaya berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, saluran drainase, polusi udara, dan kebisingan. Di Kota Surabaya kasus dugaan pencemaran lingkungan masih terjadi. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan sebanyak 59 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 43 kasus, dan sebanyak 43 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2021, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 51 kasus, dan sebanyak 51 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat

sebanyak 44 kasus, dan sebanyak 44 kasus dapat ditangani. Kemudian pada tahun 2023, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 24 kasus, dan sebanyak 24 kasus dapat ditangani. Kemudian pada tahun 2024 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 41 kasus, dan sebanyak 41 kasus dapat ditangani. Rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.109
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah permasalahan lingkungan	51	44	51	41	9
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	51	44	51	41	9
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah permasalahan lingkungan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Meskipun jumlah permasalahan lingkungan naik dan turun, tetapi dapat ditangani seluruhnya. Hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah kota dalam melakukan penanganan pengaduan lingkungan hidup dan koordinasi dengan instansi kewilayahan, Perangkat Daerah, dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di Kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.110
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	254	241	254	61
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	190	129	122	120	42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.3.2.5.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dan Persampahan)

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, *mall*, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian dan sistem kontrol bersama.

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan Kali Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di Kota Surabaya adalah 5.812,62 km^2.

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan

air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pada tahun 2020, perhitungan IKLH mengacu kepada:

1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara;
3) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan)

Kemudian pada tahun 2021, dilakukan pemutakhiran perhitungan IKLH dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 67,78 masih menggunakan metode lama. Sedangkan nilai IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang telah menggunakan metode baru, masing-masing sebesar 68,49 dan 71,45. Sedangkan di tahun 2022, IKLH Kota Surabaya telah menggunakan metode baru yang mencapai 55,97, lebih rendah dari capaian IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 69,92 dan 72,42. Nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.111
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH Kota Surabaya	60,96*	67,78*	55,97	54,52	60,76
IKLH Provinsi Jawa Timur	67,70*	68,49	69,92	69,59	71,23
IKLH Nasional	70,27*	71,45	72,42	72,54	73,55

*Sumber data: DLH Surabaya, 2025. *)hasil perhitungan KLHK metode lama*

Tabel II.112
Indikator Penyusun IKLH Kota Surabaya Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	56,05*	N/A*	49,15	49,02	49,26
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,31*	74,38	75,76	70,15	85,68
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,63*	22,56	35,06	35,06	34,39

*Sumber data: DLH Surabaya, 2025. *)hasil perhitungan KLHK metode lama*

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel II.113
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	56,05	58,18	57,91	58,50	57,65
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,31	90,28	90,55	86,61	83,72
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,63	42,63	42,64	42,65	42,68
Indeks Persampahan	75,84	76,62	82,91	83,79	83,84
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,71	70,82	70,35	69,53

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2025

Untuk perhitungan IKLHS Kota Surabaya, Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya. Sedangkan untuk perhitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH) merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan;
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2019 sampai 2022, di mana pada tahun 2019 IKLHS sebesar 64,97 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 IKLHS telah mencapai 70,35. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2022, IKLHS mengalami kenaikan yang signifikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara optimal terutama di TPA Benowo meliputi PSEL, *Buffer zone*, IPAL, dan penutupan membran pada area *landfill*. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024, IKLHS Kota Surabaya mengalami penurunan disebabkan oleh relatif menurunnya Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air. Pada tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 86,61 dan menurun menjadi 83,72 di tahun 2024. Penurunan nilai Indeks Kualitas Udara dikarenakan faktor iklim yaitu kemarau panjang yang menyebabkan suhu dan volume debu meningkat. Selain itu, emisi polutan dari sumber bergerak belum dapat dikendalikan, karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkatnya aktivitas perekonomian. Sedangkan untuk nilai indeks kualitas air pada tahun 2023 sebesar 58,50 dan menurun menjadi 57,65 di tahun 2024. Penurunan nilai indeks kualitas air disebabkan salah satunya menurunnya volume air akibat kemarau panjang yang menyebabkan konsentrat polutan lebih tinggi di badan air.

2.1.3.2.5.5 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perubahan iklim sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat dibandingkan adalah definisi perubahan iklim yang diberikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*/UNFCCC). Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang meliputi karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Pada dasarnya, Gas Rumah Kaca diperlukan untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan penebalan

atmosfer. Semakin banyak yang terperangkap di atmosfer bumi, menyebabkan kenaikan suhu bumi yang dikenal dengan pemanasan global.

Gas rumah kaca (GRK) adalah gas di atmosfer yang menyerap radiasi infra merah dan juga menentukan suhu atmosfer. Dampak aktivitas manusia terhadap emisi gas rumah kaca ke atmosfer telah meningkat secara signifikan, terutama sejak era pra-industri, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini menimbulkan masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Ada enam jenis yang dapat digolongkan sebagai gas rumah kaca, yaitu karbondioksida (CO_2), gas metan (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), sulfurheksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCS) dan hidrofluorokarbon (HFCS). Selain itu, beberapa gas yang juga dihitung sebagai gas rumah kaca, yaitu karbonmonoksida (CO), nitrogen oksida (NOX), klorofluorokarbon (CFC), dan gas organik volatil non logam. Gas rumah kaca yang paling berkontribusi terhadap gejala pemanasan global adalah CO_2, CH_4, N_2O, NOX, CO, PFC dan SF_6.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Inventarisasi GRK dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan data tentang aktivitas sumber emisi, kemudian melakukan perhitungan emisi dan serapan GRK untuk mendapatkan data *real-time* mengenai tingkat, status, dan tren perubahan emisi GRK dari berbagai sumber emisi dan sarapan, termasuk penyimpanan karbon. Dalam menjalankan amanat peraturan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pelaporan secara rutin melalui aplikasi Aksara Bappenas, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.114
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO_2 *eq*)	48.241,15	48.241,15	172.842,60	173.209,27	210.612,16

Sumber: Aksara Bappenas, 2025

2.1.3.2.5.6 Konservasi Energi

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup

seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan *solar cell*, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG (bahan bakar gas) untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Penerapan teknologi dan pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada gedung Pemerintah Kota Surabaya antara lain di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dan area Balai Kota Surabaya, sedangkan pada gedung swasta antara lain Intiland Tower, Esa Sampoerna Center, dan Graha Wonokoyo, sehingga masih diperlukan optimalisasi penerapan teknologi dan pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan baik pada sektor pemerintah maupun swasta.

Tabel II.115
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2021–2025 (TW I)

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah PJU LED	Unit	20.598	96.252	105.846	105.846	116.531
Solar cell di gedung pemerintah	Lokasi	40	40	40	40	40
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	8
Warning Light (APIL) *Solar Cell*	Unit	8	21	21	21	21
Traffic Light (APIL) *Solar Cell*	Unit	77	77	77	77	77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2025

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau

masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2023, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.116
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2021	2.217.423	2.181.345
2022	2.251.947	2.204.168
2023	2.280.865	2.033.593
2024	2.251.964	2.241.808
2025	2.244.850	2.233.364

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2025.

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.117
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	75.253	40.012	90.577	60.149	11.799
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	75.253	40.012	90.577	60.149	11.799
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	42.717	30.960	27.503	29.396	6.587
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	42.717	30.960	27.503	29.396	6.587

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025.

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas, menunjukkan bahwa seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK memperoleh akta kelahiran, di mana anak yang dilahirkan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya (yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Untuk anak yang dilahirkan di luar kota Surabaya dan selain rumah sakit, puskesmas, dan bidan di kota Surabaya, maka akta kelahiran anak tersebut diurus secara pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik di Siola dan mobil pelayanan keliling oleh Dispendukcapil yang beroperasi di beberapa titik lokasi, antara lain di RT, RW, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan taman kota (tempat publik). Hal yang sama juga berlaku pada penduduk yang meninggal, di mana penduduk meninggal dapat diurus di kantor kelurahan/kecamatan.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2021 yaitu 371.971 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 768.210 jiwa. Pada tahun 2022 kepemilikan KIA bertambah menjadi 407.572 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun sejumlah 775.167 jiwa. Pada tahun 2023, kepemilikan KIA menjadi 655.946 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 769.674 jiwa. Pada tahun 2024, kepemilikan KIA menjadi 671.796 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 766.134 Jiwa. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kepemilikan KIA bertambah menjadi 666.873 jiwa, atau 88,33% dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 754.966 jiwa.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran dan pendampingan keluarga.

2.1.3.2.7.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/ melahirkan. Akseptor KB di Kota Surabaya seluruhnya telah menggunakan alat kontrasepsi modern.

Secara umum, rasio akseptor KB di Kota Surabaya tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dengan rasio tertinggi dicapai pada tahun 2022 (93,41%). Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan cara perhitungan data PUS yang semula di tahun 2021 berupa sensus menjadi survei oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2022 dan seterusnya. Selain itu, naik dan turunnya rasio akseptor KB dipengaruhi oleh keadaan penduduk pada masa tersebut. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga memengaruhi keputusan pasangan untuk ber-KB. Sedangkan tahun 2024, peningkatan rasio akseptor KB tidak lepas dari keberhasilan peningkatan kesadaran ber-KB masyarakat melalui edukasi di berbagai media (*podcast*, media sosial dan cetak) termasuk *door-to-door* (Gropyokan KB), pelayanan KB (Bhakti Sosial KB), serta peran aktif kader. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.118
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	528.086	527.912	325.405	370.601	496.405
2	Jumlah Akseptor KB/ mCPR	434.983	429.350	303.968	307.610	417.081
3	Rasio Akseptor KB (persen)	82,37	81,33	93,41	83,00	84,02

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2025

Sedangkan angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) untuk tahun 2020, 2021 belum dapat disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya. Namun, sejak tahun 2022, angka ASFR mulai dirilis oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Angka mCPR dan ASFR secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.119
Angka ASFR Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka ASFR	N/A	N/A	18	8,7	5,8

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa TImur, 2025

2.1.3.2.7.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.120
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	528.086	527.912	325.405	370.601	496.405
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	434.983	429.350	306.896	307.610	417.081
3	Cakupan Peserta KB Aktif	82,37	81,33	94,31	83,03	84,02

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa TImur, 2025

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Cakupan peserta KB Aktif dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif.

Program KB bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan terciptanya keluarga sejahtera. Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari tingkat kepesertaan masyarakat pada program KB. Jika dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi, Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (*unmet need*), dan Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dengan banyak fasilitas kesehatan yang membatasi layanannya, sekaligus banyak peserta KB yang membatasi interaksi dengan orang lain.

Tabel II.121
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi	712	937	627	371	303
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	93.103	98.562	69.610	61.899	74.708
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia	12	14	204	29	26

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	istrinya kurang dari 20 tahun					

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.122
***Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2020–2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	1,70	1,73	1,83	1,70	1,68

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2025.

2.1.3.2.7.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu, secara mikro, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2019 terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Sedangkan sampai dengan tahun 2024 terdapat 620 BKB, 159 BKR, dan 196 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 14 terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota

(angkot). Jumlah angkutan darat di Kota Surabaya sendiri terus menurun sejak tahun tahun tahun 2020 menjadi 1.999 kendaraan, berlanjut ke tahun 2021 menjadi 1.870 kendaraan, kemudian pada tahun 2022 ini menjadi 1.051 kendaraan, sedangkan pada tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 373 kendaraan akibat banyaknya angkutan umum yang dinonaktifkan dan semakin menurun pada akhir tahun 2024 menjadi 176 kendaraan. Dalam rangka peningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi. Detil jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.123
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	1	1	0
2	Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	11	13	13	13	14
4	Jumlah Angkutan Darat	1.870	1.051	373	176	120

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian izin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian izin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.124
Rasio Izin Trayek Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	2.869	563	188	86	36
3	Rasio Izin Trayek	0,000966	0,000188	0,000062	0,000028	0,000012

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha. Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis

aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam.

Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek, Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum Suroboyo Bus dan Wira-Wiri serta memperpendek waktu tunggu kendaraan umum di terminal atau halte. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum di Kota Surabaya dari tahun ke tahun diharapkan semakin singkat. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 triwulan I terjadi peningkatan waktu tunggu angkutan kota karena banyak masyarakat pengguna angkutan umum eksisting dan kendaraan pribadi beralih menggunakan *trunk* dan *feeder* dikarenakan faktor kenyamanan dan ketepatan waktu. Rata-rata waktu tunggu kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.125
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	12,61	12,71	14	14	17
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	13	18,95	15	15	13,33

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan pada pengguna angkutan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan *load factor* angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk per satuan waktu tertentu. *Load factor* menggambarkan kebutuhan/*demand* dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka *load factor* kendaraan umum maka semakin efisien pula biaya operasionalnya. Pada tahun 2021 nilai *load factor* angkutan kota sebesar 33,02 dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 menjadi 44,86. Nilai *load factor* angkutan kota semakin meningkat di tahun 2024 menjadi 64,99 dan menjadi 67,79 di triwulan I tahun 2025. Begitu pula dengan nilai *load factor* bus, yang menunjukkan tren serupa. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.126
Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Load factor angkutan kota (persen)	33,02	33,92	44,86	64,99	65,61
Load factor bus (persen)	44,65	57,45	55,21	45,31	60,38

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Dari tahun 2021, jumlah kendaraan umum yang lulus uji terus menurun menjadi sebanyak 123.678 kendaraan sampai dengan akhir tahun 2024. Penurunan tersebut dikarenakan berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan uji KIR sebagai syarat kendaraan untuk beroperasional di jalan, serta banyak kendaraan angkutan umum yang beroperasi melebihi umur kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.127
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah uji kir angkutan umum	43.135	43.870	42.770	42.892	10.941
2	Jumlah kendaraan wajib uji kir	151.064	143.605	136.367	123.550	31.808
3	Jumlah kendaraan yang diuji kir	142.532	136.735	126.819	123.714	30.996
4	Jumlah kendaraan lulus uji kir	135.905	132.719	123.196	119.969	13.141

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.128
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	18.140	19.261	1.296	2.053	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Selain memberikan kenyamanan dan keselamatan transportasi darat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemasangan dan pemeliharaan peralatan

informasi cuaca (*Weather Information Display*) yang dapat digunakan oleh nelayan-nelayan di pesisir Kota Surabaya sebagai pertimbangan ketika akan berlayar. Peralatan tersebut telah bekerja sama dengan BMKG untuk memberikan data cuaca secara riil yang bertujuan untuk menunjang keselamatan kepada nelayan. Pemasangan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) telah dilaksanakan pada tahun 2018 dipasang sejumlah 3 unit, kemudian pada tahun 2019 sejumlah 3 unit lagi sehingga menjadi 6 unit dan sampai dengan akhir tahun 2025 jumlahnya masih tetap 6 unit. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada nelayan agar tetap menjaga keselamatan ketika berlayar.

Tabel II.129
***Weather Information Display* Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)**

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah *Weather Information Display*	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keselamatan perlintasan sebidang karena kondisi rel kereta api di Kota Surabaya akan menjadi jalur ganda (*Double Track*) secara keseluruhan yang akan meningkatkan frekuensi jadwal dari kereta api. Tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemeliharaan dan operasional perlintasan sebidang baru di wilayah Kecamatan Pakal. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada operator perlintasan sebidang serta masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan di perlintasan sebidang.

Tabel II.130
Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Lokasi Perlintasan Sebidang yang dioperasikan	5	6	6	6	6

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah jaringan fiber optik (FO) yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi HT (*handy talkie*) pada tiap SKPD. Selain menggunakan alat komunikasi berupa HT (*handy talkie*), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga

menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II.131
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Alat Komunikasi HT (unit)	2.838	2.938	2.978	2.978	2.978
Jaringan Fiber Optik (kilometer)	248,84	285,93	299,13	310,63	311,19

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Pemerintah Kota Surabaya sejak awal telah memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat *http://www.surabaya.go.id*. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain menggunakan *website* resmi, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan aplikasi/sistem pelayanan perizinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perizinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perizinan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2024, setiap tahunnya terdapat 10 sistem informasi pelayanan perizinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perizinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK.

Tabel II.132
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	10	10	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perizinan	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.1 Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi sejumlah 221.968 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan menjadi 256.946 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan karena menggunakan sumber data yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu *online data system* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM sehingga jumlah anggota koperasi aktif menjadi 153.809 dengan rincian jenis kelamin laki-laki sejumlah 88.038 orang dan perempuan sejumlah 65.771 orang. Sedangkan pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 150.327 orang. Kemudian pada tahun 2024 jumlah anggota koperasi aktif sejumlah 147.666. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.133
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota koperasi	221.968	256.946	153.809	150.327	147.666

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2025

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 1.817 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.554 koperasi. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah koperasi mengalami peningkatan menjadi 1.834 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.571 koperasi. Untuk tahun 2022 jumlah koperasi kembali meningkat menjadi sebanyak 2.002 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 598 koperasi. Kemudian pada tahun 2023 jumlah koperasi sedikit meningkat menjadi sebanyak

2.009 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 596 koperasi. Kemudian pada tahun 2024 jumlah koperasi meningkat kembali sebanyak 2.019 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 630 koperasi. Secara rinci persentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.134
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi	1.817	1.834	2.002	2.009	2.019
2	Jumlah koperasi aktif	1.554	1.571	598	596	630
3	Persentase koperasi aktif (%)	85,52	85,66	29,87	29,67	31,20

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2025

Distribusi jumlah koperasi di Tahun 2023 adalah 295 koperasi berjenis koperasi jasa, 1.396 koperasi berjenis koperasi konsumen, 31 koperasi berjenis koperasi pemasaran, 129 koperasi berjenis koperasi produsen dan 167 koperasi berjenis koperasi simpan pinjam. Distribusi jumlah koperasi di Tahun 2024 adalah 289 koperasi berjenis koperasi jasa, 1.407 koperasi berjenis koperasi konsumen, 31 koperasi berjenis koperasi pemasaran, 123 koperasi berjenis koperasi produsen dan 169 koperasi berjenis koperasi simpan pinjam. Sedangkan jumlah koperasi per jenis usaha di Kota Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.135
Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Angkutan Darat	13	13	17	17	16
Jasa Angkutan Laut	1	1	0	0	0
Jasa Lain-Lain	91	105	681	693	688
KJKS	23	23	18	16	16
Kopinkra	7	7	7	7	7
Kopkar	327	328	377	372	369
Kopma	21	21	22	22	23
Koppas	24	24	15	16	19
Koppontren	22	22	23	23	23
Kopwan	171	171	142	142	145
KPRI	185	186	183	182	180
KSP	108	110	114	113	117
KSU	666	665	238	238	250
KUD	5	5	5	5	5
Pemuda	4	4	6	6	6
Pertanian	4	4	5	5	5
PK 5	33	33	26	26	26
Primkopabri	12	12	12	12	12
Primkopad	18	18	18	18	17
Primkopal	17	17	17	17	17
Primkopau	1	1	1	1	1

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Primkoppol	11	11	11	11	11
Primkoptama	30	30	30	30	30
Profesi	18	18	26	27	26
Sekunder	1	1	1	1	0
Nelayan	4	4	5	5	5
Tenaga Kerja Bongkar	-	-	2	2	3
Koperasi Digital	-	-	-	-	1
Kopra	-	-	-	-	1
TOTAL	**1.817**	**1.834**	**2.002**	**2.007**	**2.019**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2025

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2020 adalah 1.864 milyar dari 1.554 koperasi dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi meningkat menjadi 2.147 Milyar Rupiah dari 1.571 koperasi. Pada tahun 2022 volume usaha koperasi turun menjadi 1.412 Milyar Rupiah karena jumlah koperasi aktif RAT mengalami penurunan menjadi 488 koperasi aktif namun secara rasio meningkat menjadi 2,89. Pada tahun 2023, rasio volume usaha koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 3,12 dengan nilai volume usaha koperasi aktif sebesar 1.419 Milyar Rupiah dari 455 koperasi aktif ber-RAT. Namun, pada tahun 2024 peningkatan volume usaha koperasi aktif tidak sebanding dengan banyaknya peningkatan jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2024 tercatat dari 630 koperasi aktif mampu menghasilkan volume usaha sebesar 1.421 Milyar Rupiah. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.136
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	1.554	1.571	598	596	630
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.864	2.147	1.412	1.419	1.421
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif	1,20	1,37	2,36	2,38	2,25

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2025

2.1.3.2.10.2 Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan fasilitasi pemasaran dan kemitraan terhadap 6.212 pelaku usaha mikro dengan berbagai macam intervensi di antaranya pendampingan pengurusan merek 250 usaha mikro,

pendampingan sertifikasi halal 550 usaha mikro, pelatihan 663 usaha mikro, fasilitasi kemitraan/kerjasama 139 usaha mikro, fasilitasi pemasaran berupa pameran/bazar/gelar produk 1.429 UMKM, dan pemasaran secara *online* melalui e-Peken 3.181 usaha mikro. Selengkapnya fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha mikro yang dilakukan tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.137
Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2020–2024

Intervensi	2020	2021	2022	2023	2024
Merek	140	200	125	156	250
Halal	70	165	100	265	550
Pelatihan UMKM	88	505	62	1.086	663
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama	187	260	136	136	139
Pameran/Bazar/Gelar Produk	9	346	2.188	2.012	1.429
Pemasaran Online Peken	-	-	2.752	2.945	3.181
Total	**494**	**1.476**	**5.363**	**6.600**	**6.212**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2025

Dengan upaya tersebut di atas maka sebanyak 6.212 UMKM binaan yang naik kelas sampai dengan akhir Desember 2024 omsetnya mencapai Rp 56.608.535.242. Detil upaya peningkatan UMKM naik kelas tersebut dilakukan dengan:

1. Penguatan produk yang dilakukan melalui fasilitasi pengurusan merek dan sertifikat halal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas UMKM atas kualitas sebuah produk yang dihasilkan;
2. Peningkatan manajemen kelembagaan melalui pelatihan, yang akan meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM;
3. Peningkatan permodalan dengan fasilitasi kemitraan dengan perbankan;
4. Peningkatan pemasaran dengan pameran/ bazar/ gelar produk dan pemasaran *online* e-Peken dan melaksanakan pelatihan pemasaran *online* dengan bekerjasama dengan *marketplace*/*platform* digital.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel II.138
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Proyek PMDN	1.310	63.360	147.254	90.136	1.786
Jumlah Proyek PMA	177	340	677	1.203	309
Total	**1.487**	**63.700**	**147.931**	**91.339**	**2.095**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2021 tercatat sejumlah 1.487 proyek. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 63.700 proyek. Kemudian pada akhir tahun 2023 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 147.931 proyek dan pada tahun 2024 mencapai 91.339 proyek. Hingga triwulan I 2025, terdapat 1.786 proyek PMDN dan 309 proyek PMA. Peningkatan signifikan jumlah proyek tersebut di antaranya disebabkan oleh mudahnya perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) dan didukung oleh adanya layanan Klinik Investasi yang diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi.

Sedangkan untuk nilai investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2021 sebesar Rp29.215,06 Miliar dan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.897,81 Miliar dan Rp37.573,89 Miliar. Pada tahun 2024, nilai investasi PMA dan PMDN mencapai Rp40.476,06 Miliar.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.139
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persetujuan (USD Juta)	6.337,45	-	-	-	-

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Jumlah Proyek	31.467	117.580	134.984	141.037	26.179
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	65.888,88	151.959,88	115.914,68	100.991,18	16.188,75
2	Realisasi (USD Juta)	2.810,02	-	-	-	-
2.1	Jumlah Proyek	1.487	63.700	147.931	91.339	2.095
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	29.215,06	34.897,81	37.573,89	40.476,06	7.709,46

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, yang dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel II.140
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PMA/PMDN	961	30.304	70.817	91.339	2.095
2	Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan PMA/PMDN	13.496	92.707	199.420	247.713	10.669
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	14,04	3,06	2,81	2,71	5,11

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi investasi, baik dari penanaman PMA dan PMDN, pada tahun 2021 menyerap sebanyak 13.496 tenaga kerja dari 961 proyek, dengan nilai rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,04. Untuk tahun 2022 kembali terdapat peningkatan baik jumlah proyek maupun jumlah tenaga kerja yang terserap masing-masing 30.304 proyek dan 92.707 tenaga kerja dengan rasio 3,06. Kemudian pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang terserap kembali meningkat sebanyak 199.420 orang dari 70.817 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 2,81. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan daya serap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN menjadi sebesar 247.713 orang pada 91.339 investor PMA/PMDN. Hingga triwulan I 2025, jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN mencapai 10.669 orang pada 2.095 investor PMA/PMDN.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Pemerintah Kota Surabaya menyadari pentingnya peran infrastruktur olahraga dalam mendukung proses pembinaan, pelatihan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah Kota telah menyediakan berbagai prasarana olahraga, baik yang bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*), yang tersebar di berbagai wilayah kota. Beberapa fasilitas olahraga yang menjadi andalan dan pusat aktivitas atlet antara lain Lapangan Atletik THOR, Gelanggang Remaja, GOR Pancasila, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, serta Kawasan Gelora Bung Tomo – yang dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat kegiatan olahraga yang representatif dan multifungsi.

Keberadaan kawasan-kawasan tersebut bukan hanya menjadi tempat penyelenggaraan berbagai event olahraga lokal, nasional, hingga internasional, namun juga berfungsi sebagai pusat pembinaan atlet sejak usia dini, berbagai cabang olahraga bermarkas di kawasan ini. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan program pembinaan yang berkesinambungan, kawasan olahraga ini berhasil melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Surabaya di berbagai ajang kejuaraan.

Tidak hanya itu, sentra olahraga ini juga menjadi ruang publik yang aktif digunakan oleh masyarakat dalam membangun budaya hidup sehat, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong tumbuhnya komunitas-komunitas olahraga yang dinamis.

Hingga tahun 2025, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mencapai 635 unit, yang tersebar di atas lahan fasilitas umum di kawasan perumahan, permukiman, sekolah serta di pusat perkotaan. Lapangan-lapangan ini melayani berbagai cabang olahraga dan digunakan secara aktif oleh masyarakat, komunitas olahraga, hingga lembaga pendidikan. Adapun rincian lengkap jumlah lapangan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.141
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lapangan olahraga	665	603	632	635	635
2	Jumlah penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
3	Rasio lapangan olahraga	1:4.467	1:4.955	1:4.762	1:4.753	1:4.753

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif dan produktif. Hal ini juga akan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan dapat menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

Namun demikian, masih terdapat fasilitas umum lapangan olahraga terbangun di lingkungan perumahan permukiman yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Masih rendahnya aktivitas masyarakat serta belum adanya pengelolaan lapangan olahraga masyarakat yang terstruktur menyebabkan kondisi lapangan olahraga yang mulai menurun dan berubah fungsi mengikuti kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu, dibutuhkan langkah lanjutan berupa aktivasi lapangan melalui kegiatan rutin dan pembinaan komunitas serta perbaikan sarana yang ada.

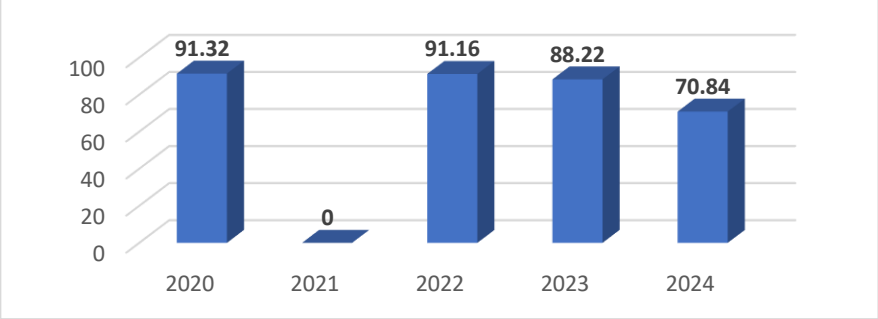
Tabel II.142
Cakupan Pembinaan Olahraga Prestasi di Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	59	59	59	59	59
2	Jumlah cabang olahraga yang terdaftar	59	59	59	59	59
3	Persentase cakupan pembinaan olahraga prestasi	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Cakupan pembinaan olahraga di Kota Surabaya dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh cabang olahraga prestasi, serta olahraga rekreasi dan tradisional, yang dilaksanakan melalui sinergi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Di bawah koordinasi kedua lembaga ini, Pemerintah Kota mendukung berbagai cabang olahraga melalui kegiatan pembibitan atlet, pelatihan rutin, pelatihan terpusat, pengiriman atlet ke berbagai kejuaraan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah Kota juga secara konsisten memberikan penghargaan kepada atlet-atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Proses pembibitan atlet muda dilakukan secara profesional di masing-masing cabang olahraga, dengan dukungan pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Untuk mendukung kualitas pembinaan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan pelatihan bagi para pelatih, guna meningkatkan kompetensi mereka dalam melatih dan membina atlet. Langkah ini diyakini akan memperkuat ekosistem olahraga daerah dan memastikan pembinaan

atlet berjalan secara efektif, berkualitas, dan berdaya saing di tingkat yang lebih tinggi. Berikut ini disajikan data atlet berprestasi, serta prestasi olahraga yang diraih oleh di Kota Surabaya.



Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Tabel II.143
Prestasi Olahraga Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah prestasi cabang olahraga	0	354	398	223	0

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Sejak tahun 2007 (Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur I) sampai dengan tahun 2025 (Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX), Pemerintah Kota Surabaya selalu menjadi juara umum di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim). Pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%. Pada tahun 2021 tidak ada agenda kejuaraan olahraga dikarenakan pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,16%. Pada tahun 2023, sejumlah 781 orang atlet mendapatkan pembinaan dari pemerintah kota, 689 orang atlet di antaranya berhasil menorehkan prestasi, sehingga nilai persentase atlet yang berprestasi menjadi 88,22%. Pada tahun 2024, dari total 1.430 atlet olahraga yang dibina, sejumlah 1.013 (70,84%) atlet berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan tingkat regional, nasional serta internasional. Jika dilihat capaian persentase atlet berprestasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 memang menurun, hal ini terjadi karena pada tahun 2024 tidak ada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

Selain dengan pembinaan atlet, peningkatan kompetensi dan pemberian penghargaan, keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan dan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Namun demikian, masih terdapat beberapa cabang olahraga yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar, contohnya voli pantai, panjat

tebing, balap motor dan renang. Hal ini menjadi kendala dalam proses latihan dan pembinaan atlet, serta membatasi potensi berkembangnya cabang-cabang olahraga tertentu di tingkat daerah. Untuk itu, ke depan dibutuhkan langkah lanjutan berupa pembangunan fasilitas olahraga yang sesuai standar untuk cabang-cabang olahraga yang selama ini belum mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai, melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan olahraga.

Dalam bidang kepemudaan, pembangunan kota tidak lepas dari pemuda dan organisasi kepemudaan yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, mitra pembangunan, dan wadah pembinaan generasi muda. Perkembangan organisasi kepemudaan di Kota Surabaya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II.144
Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah organisasi kepemudaan	21	21	21	21	21

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Dalam menjawab tantangan dan isu permasalahan generasi muda, Pemerintah Kota Surabaya juga memandang perlu adanya langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu bentuk intervensinya adalah pengembangan dan pemberdayaan kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS) di tingkat kewilayahan.

Kader anti kenakalan remaja merupakan agen perubahan dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat, pendidik, maupun relawan yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan generasi muda. Intervensi ini mencakup pelatihan literasi sosial, peningkatan kapasitas dalam deteksi dini perilaku berisiko, pendampingan psikososial, serta penyuluhan di lingkungan sekolah dan komunitas. Dengan adanya kader-kader yang terlatih dan aktif di lapangan, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang suportif dan responsif terhadap isu kenakalan remaja, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, perundungan (bullying), serta keterlibatan dalam aktivitas negatif lainnya. Selain itu, program ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara sekolah, keluarga, aparat keamanan, serta lembaga sosial untuk memperkuat sistem perlindungan dan pembinaan remaja secara menyeluruh.

Tabel II.145
Kader Anti Kenakalan Remaja Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kader Anti Kenakalan Remaja Kota Surabaya (orang)	799	1.000	1.170	777	823

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen dalam mendorong peran aktif pemuda untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membentuk karakter pemuda yang mandiri, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui Program Wirausaha Muda. Dengan berbagai program pelatihan, inkubasi bisnis, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran, para pemuda Surabaya didorong untuk menjadi pelaku usaha yang tidak hanya mampu bersaing secara ekonomi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi sosial di lingkungannya. Semangat kewirausahaan ini tumbuh seiring dengan munculnya komunitas-komunitas kreatif, startup digital, usaha berbasis kearifan lokal, hingga usaha sosial (sociopreneur) yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, wirausaha muda akan terus menjadi pilar penting dalam mewujudkan kota yang maju, kreatif, dan sejahtera.

Tabel II.146
Pelatihan Wirasusaha Pemuda Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha (orang)	200	282	567	472	698

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Pada tahun 2024, sebanyak 698 pemuda mendapatkan pelatihan wirausaha, 168 di antaranya berhasil menjadi wirausaha muda pemula. Pelatihan ini juga dilanjutkan dengan fasilitasi magang wirausaha. Pemuda terpilih yang telah mendapatkan pelatihan juga akan ditempatkan di beberapa perusahaan sebelum mereka benar-benar menjadi wirausahawan mandiri.

Pembangunan kepemudaan merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Pembangunan kepemudaan di Kota Surabaya, diarahkan selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya memberdayakan pemuda sebagai subyek pembangunan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pembangunan kepemudaan berkontribusi langsung terhadap beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain:

- **Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas)**: melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi bagi pemuda.
- **Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)**: dengan mendorong kewirausahaan pemuda, peningkatan keterampilan kerja, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif bagi generasi muda.
- **Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan)**: dengan memperluas partisipasi pemuda dari berbagai latar belakang sosial dalam proses pembangunan.
- **Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)**: melalui pembinaan karakter, kepemimpinan, dan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi pemuda melalui berbagai program seperti pelatihan kepemimpinan, pengembangan minat dan bakat, kewirausahaan sosial, serta pelibatan pemuda dalam forum-forum perencanaan pembangunan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif, pembangunan kepemudaan tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan menjadi bagian integral dari upaya pencapaian TPB di tingkat lokal, sekaligus membuka jalan bagi terbentuknya generasi muda yang berdaya saing, berintegritas, dan visioner dalam membangun masa depan bangsa.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja urusan statistik dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya antara lain melalui pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral di seluruh Perangkat Daerah yang dipublikasikan secara rutin setiap tahun. Data statistik sektoral yang dimaksud antara lain data sektor penduduk dan tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri dan sektor perdagangan Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku Statistik Sektoral Kota Surabaya sebagai bagian dari diseminasi dan informasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dapat menjadi bahan rujukan dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Tabel II.147
Hasil Analisis Data yang Terpublikasi Tahun 2022-2025 (TW I)

Uraian	2022	2023	2024	2025
Persentase hasil analisa data yang terpublikasi (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2025

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota, maka pada data yang dikumpulkan oleh Walidata, yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dilakukan analisis dan publikasi. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan analisis dan publikasi data sebesar 100% yang terdiri dari data sektor penduduk dan tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri, dan sektor perdagangan. Sebagai upaya mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing Perangkat Daerah, serta kebutuhan masyarakat akan informasi secara umum, Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengembangkan sistem terintegrasi antara *ePlanning* dan portal satu data (satudata.surabaya.go.id), yang di dalamnya mencakup *Open Data* dan Peta *Digital* serta Statistik Sektoral Kota Surabaya.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 maupun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

2.1.3.2.14 Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Persandian dilaksanakan utamanya untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik, serta seluruh proses pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya secara berkala melakukan pengawasan sistem keamanan informasi untuk melindungi sistem informasi yang ada.

Tabel II.148
Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah serangan	56	240	270	160	60
2	Jumlah penanganan serangan	56	240	270	160	60

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
3	Persentase penanganan serangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Dalam pelaksanaannya sistem keamanan informasi Kota Surabaya dapat menangani serangan siber dengan perangkat teknologi yang dimiliki, namun seiring perkembangan teknologi sistem keamanan informasi perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan infomasi.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Kebudayaan daerah merupakan identitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat serta menjadi warisan berharga yang mencerminkan nilai-nilai, norma, tradisi, dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebudayaan daerah menghadapi tantangan serius berupa pergeseran nilai dan menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal. Melestarikan kebudayaan daerah menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan jati diri daerah. Kebudayaan tidak hanya memiliki nilai historis dan estetis, tetapi juga berperan dalam memperkuat rasa kebersamaan, membentuk karakter masyarakat, serta memperkaya kehidupan sosial dan spiritual. Dengan melestarikan budaya lokal, kita turut menjaga keragaman budaya nasional yang menjadi salah satu kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

2.1.3.2.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu upaya strategis dalam pelestarian warisan budaya lokal sekaligus sarana untuk memperkenalkan kekayaan tradisi kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Melalui festival, berbagai bentuk ekspresi budaya seperti tarian, musik tradisional, kuliner khas, hingga kerajinan lokal dapat ditampilkan secara terbuka dan diapresiasi oleh publik. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap budayanya sendiri, tetapi juga menjadi media edukatif dan rekreatif yang efektif untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya di tengah arus modernisasi. Lebih dari itu, festival seni dan budaya juga berperan penting sebagai magnet bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Atraksi budaya yang autentik dan khas daerah mampu meningkatkan minat kunjungan wisata, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta mendorong

pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Adapun data penyelenggaran festival seni dan budaya di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.149
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	454	521	497	202

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Pada tahun 2021, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya hanya 4 festival dikarenakan pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 454 kali, dan pada tahun 2023 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 521 kali. Pada tahun 2024, sebanyak 497 festival seni budaya yang diselenggarakan dan sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah diselenggarakan 202 festival seni dan budaya. Promosi pelaksanaan festival seni dan budaya di Kota Surabaya dilakukan secara masif, baik di media cetak maupun melalui media elektronik, termasuk di dalamnya berbagai *platform* media sosial, seperti instagram sparklingsurabaya dan *website* tiketwisata.surabaya.go.id.

2.1.3.2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Dalam upaya mendukung perkembangan seni dan budaya, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana yang representatif sebagai ruang berekspresi bagi masyarakat. Ketersediaan tempat yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan seni merupakan bagian penting dari upaya pelestarian budaya sekaligus pengembangan kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai ruang publik dan gedung milik pemerintah kota telah dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan kesenian, antara lain di Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran, Wisata Perahu Kalimas, Balai Pemuda, Balai Kota Surabaya, Wisata Kota Lama, serta Tunjungan Romansa. Lokasi-lokasi ini tidak hanya menjadi panggung pertunjukan seni, tetapi juga ruang interaksi budaya yang inklusif, di mana masyarakat dapat menikmati dan mengapresiasi kekayaan seni tradisional maupun kontemporer. Dengan penyediaan sarana tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat menciptakan ekosistem budaya yang hidup dan partisipatif, di mana seni tidak hanya dilestarikan, tetapi juga terus tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas kota yang kreatif dan berbudaya.

2.1.3.2.15.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Kota Surabaya tidak hanya dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kota metropolitan modern, tetapi juga menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Salah satu wujud nyata dari kekayaan tersebut adalah banyaknya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang tersebar di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya secara aktif melakukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya tersebut, baik melalui penetapan status, revitalisasi bangunan, hingga pemanfaatan kawasan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Pelestarian ini merupakan bentuk tanggung jawab kolektif untuk merawat warisan leluhur sekaligus sebagai media pembelajaran bagi generasi mendatang.

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kota Surabaya, pemerintah kota melakukan pengawasan dan upaya pelestarian bekerjasama dengan tenaga ahli di bidang cagar budaya. Pada tahun 2023 terdapat 286 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2024 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya berkurang menjadi sejumlah 284 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Pada tahun 2024 terdapat 2 bangunan cagar budaya yang dievaluasi, dimana hasil dari evaluasi bersama Tim Ahli Cagar Budaya memutuskan status cagar budaya pada 2 bangunan tersebut dicabut. Pada tahun 2025, jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya berjumlah 285 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Saat ini seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini dalam kondisi baik. Dalam upaya pelestarian seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini rutin diawasi oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga aktif melakukan revitalisasi kawasan cagar budaya menjadi destinasi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Adapun kawasan yang sedang direvitalisasi antara lain kawasan kota lama terdiri dari zona eropa, zona pecinan dan zona arab. Dengan adanya revitalisasi ini tentu akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemilik bangunan cagar budaya. Tujuan akhir yang akan dituju adalah terlestarikannya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.150
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	288	289	286	284	285
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	288	289	286	284	285
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022, perpustakaan terdiri atas perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan khusus, taman baca, dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/l*eaflet*, spanduk, *banner, billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perpustakaan di Kota Surabaya milik Pemerintah Kota sampai dengan triwulan I tahun 2025 berjumlah 2 perpustakaan yang didukung dengan 530 taman

dan sudut baca masyarakat, serta 287 perpustakaan keliling. Selain itu terdapat 65 Perpustakaan milik non Pemda Kota Surabaya yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi, serta instansi pemerintahan lainnya. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.151
Jumlah Perpustakaan dan Pustakawan Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah Milik Pemda Kota Surabaya (unit)	2	2	2	2	2
1.a	Jumlah taman dan sudut baca (unit)	530	530	530	530	530
1.b	Jumlah titik perpustakaan keliling (lokasi)	N/A	153	147	172	287
2	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda Kota Surabaya (unit)	61	65	65	65	65
3	Jumlah Tenaga Perpustakaan di Perpustakaan Milik Pemda Kota Surabaya (orang)	N/A	502	506	511	261
4	Jumlah Pustakawan di Perpustakaan Milik Pemda Kota Surabaya (orang)	4	6	6	25	25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat Kota Surabaya, selain mengembangkan fasilitas perpustakaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya juga melakukan pembinaan serta sertifikasi pada tenaga perpustakaan di perpustakaan maupun TBM guna peningkatan kapasitas setiap tahunnya guna memberikan pelayanan yang lebih baik.

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2021, jumlah pengunjung layanan baca tercatat 13.504 per bulannya, dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 80.138 orang per bulannya. Peningkatan kunjungan tersebut tidak lepas dari terus bertambahnya koleksi buku yang dimiliki layanan baca milik Pemerintah Kota yang didukung oleh kegiatan-kegiatan literasi yang diselenggarakan di layanan baca. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Jumlah koleksi buku dan kunjungan di layanan baca milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.152
Jumlah Koleksi dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	N/A	534.439	499.859	510.367	510.367
Jumlah pengunjung layanan baca per bulan (orang)	13.504	87.515	73.690	80.138	37.544

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Mengacu kepada sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui peningkatan kualitas dan kuantitas even literasi, di antaranya Bercerita Surabaya, kegiatan mendongeng siswa SD, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Barometer keberhasilan perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat guna. Hal ini sangat dipengaruhi oleh prosedur di dalam perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Adapun hasil survei Bidang Perpustakaan dan Kearsipan pada triwulan I tahun 2025 adalah 98,05. Survei pelayanan kearsipan ini dilaksanakan secara langsung kepada responden melalu *Google Form*.

2.1.3.2.17 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Perangkat Daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.153
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	583	78	70	70	69
2.	Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	583	78	70	70	69
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Pada tahun 2021 hingga pada tahun 2024, seluruh Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang didampingi, 100 persen sistem tata kearsipannya telah sesuai ketentuan. Kemudian pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 1, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang didampingi sejumlah 69 instansi dan 100 persen sistem tata kearsipannya telah sesuai ketentuan.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2021, 100 persen arsip telah terakuisisi.

2.1.3.3 Urusan Pilihan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kota Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Kota Surabaya memiliki garis pantai yang cukup panjang dan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan transportasi laut di Indonesia. Uniknya terdapat 9 (sembilan) Kecamatan di Kota Surabaya yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yaitu

Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gununganyar dan. Kecamatan Rungkut. Terdapat sekitar 68 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan dan 90 Kelompok Pembudidaya Ikan yang berkontribusi untuk sektor kelautan dan perikanan di Kota Surabaya. Hasil produksi perikanan di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.154
Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perikanan Laut	8.057,63	7.805,50	8.057,49	8.295,33	8.526,00	3.805,6
2.	Perikanan Tambak	8.442,47	9.054,27	9.349,56	9.508,29	9.976,24	5.166,9
Jumlah		**15.670,22**	**16.500,11**	**17.407,05**	**17.803,62**	**18.502,24**	**8.972,5**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2025

Tabel di atas dapat dilihat jumlah produksi perikanan laut dan tambak yang mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan ini tidak lepas dari peran aktif Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pembinaan kepada para nelayan dan pembudidaya perikanan, melalui pelatihan teknis, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan dalam hal pemasaran hasil perikanan.

Di sektor perikanan tangkap, selain bergantung kepada kondisi cuaca, hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kondisi peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk memenuhi sarana perikanan tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan, mulai dari perahu, mesin perahu, alat tangkap serta alat pendukung lainnya seperti papan seluncur lumpur, tali, serta senter. Di sektor perikanan budidaya selain bantuan sarana dan prasarana, pembudiya perikanan juga rutin dibekali dengan pelatihan terkait penerapan teknologi tepat guna, agar hasil budidaya dapat maksimal. Masing-masing pembudidaya juga rutin mendapatkan pendampingan oleh penyuluh.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Kota Surabaya terus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata yang menarik dan berkarakter di Indonesia. Sebagai kota metropolitan dengan sejarah panjang dan kekayaan budaya yang kuat, Surabaya menawarkan beragam daya tarik wisata yang unik, mulai dari wisata sejarah dan budaya, wisata religi, serta wisata tematik lainnya. Sejak pulih dari Pandemi Covid-19 tren kunjungan

wisatawan di Kota Surabaya menunjukan angka positif. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan tercatat sejumlah 14.237.215 dengan perincian sejumlah 565.998 kunjungan wisatawan mancanegara dan sejumlah 13.671.217 kunjungan wisatawan nusantara. Pasa tahun 2023, kunjungan wisatawan meningkat sejumlah 17.425.476 dengan perincian sejumlah 1.285.905 kunjungan wisatawan mancanegara dan sejumlah 16.139.571 kunjungan wisatawan nusantara. Peningkatan kunjungan wisatawan juga terjadi pada tahun 2024, menjadi 21.004.639 kunjungan wisatawan dengan rincian 1.996.287 kunjungan wisatawan mancanegara dan 19.008.352 kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Surabaya. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sejumlah 375.441 kunjungan dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara tercatat sejumlah 5.613.395 kunjungan. Adapun rincian data jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya sebagai berikut.

Tabel II.155
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	100.767	565.998	1.285.905	1.996.287	375.441
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	9.235.074	13.671.217	16.139.571	19.008.352	5.613.395
Jumlah		**9.335.841**	**14.237.215**	**17.425.476**	**21.004.639**	**5.988.836**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2025

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di Surabaya.

Tabel II.156
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan	2	5	6	7	7

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2025

Pengembangan obyek daya tarik wisata pada tahun 2020 ke tahun 2021 tampak menurun karena pengertian pengembangan lebih spesifik yang semula hanya sebatas adanya penambahan wahana baru di ODTW yang dikelola pemerintah Kota Surabaya, kemudian menjadi ditingkatkan kualitasnya sesuai

standar berdasarkan kriteria yang ditetapkan (sapta pesona). Pada tahun 2021, terdapat 1 kampung dan 1 kawasan yang berhasil dikembangkan memenuhi kriteria sapta pesona, yakni Kampung Lawas Maspati dan Kawasan Tunjungan yang dikenal sekarang dengan Tunjungan Romansa. Pada tahun 2022, terdapat 3 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan antara lain, Kota Lama Pecinan, Kampung Pecinan WKP, serta THP Kenjeran. Pada tahun 2023 terdapat tambahan 1 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan dengan kriteria sapta pesona yakni Wisata Perahu Kalimas dan pada tahun 2024 terdapat 1 kampung yang berhasil dikembangkan yakni Kampung Wethan Wonderland. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 7 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan dengan standar kriteria sapta pesona. 7 destinasi wisata ini juga berhasil menarik kunjungan wisatawan dalam negeri maupun manca negara.

Untuk menggerakan roda perekonomian Kota Surabaya, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki perananan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat mengentaskan kemiskinan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya cukup besar, hal ini dapat dilihat dari nilai perolehan pajak hotel pada tahun 2024 yang nilainya mencapai Rp. 384.781.372.811,00 atau 6,29% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 yakni sebesar Rp6.114.378.521.533,49. Nilai perolehan pajak restoran pada tahun 2024 juga tinggi yakni mencapai Rp673.358.993.847,00 atau 11% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024. Selain itu perolehan pajak hiburan pada tahun 2024 juga mencapai Rp85.576.593.642,00 atau 1,39% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024. Jika digabungkan 3 jenis perolehan pajak ini, nilainya mencapai 18,7% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan industri ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berbagai program dan inisiatif telah disiapkan untuk memperkuat ekosistem kreatif di Kota Surabaya, mulai dari pendampingan pelaku usaha, fasilitasi kerja sama, penyediaan sarana dan prasarana, hingga kegiatan *branding* dan promosi. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kota juga menyediakan ruang-ruang kreatif yang dapat diakses

secara gratis oleh masyarakat, seperti di Balai Pemuda, *coworking-space* Koridor Siola, serta ruang-ruang terbuka kota yang tersebar di berbagai wilayah. Gedung Eks Hi-Tech Mall juga akan dipersiapkan untuk *creative hub* di Kota Surabaya. Selain itu, *event* pertunjukan dan pameran hasil karya pelaku ekonomi kreatif juga rutin diselenggarakan sebagai ajang promosi sekaligus apresiasi terhadap kreativitas anak muda Surabaya. Dari total 17 subsektor ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Surabaya memfokuskan pengembangan awal pada subsektor yang memiliki potensi tinggi dan daya saing kuat, yakni Film, Animasi, Video, Musik, Fashion, dan Aplikasi. Langkah ini diiringi dengan upaya membangun kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan pihak swasta, agar pelaku ekonomi kreatif di Surabaya semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dengan dukungan yang berkelanjutan, industri ekonomi kreatif diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang inklusif, inovatif, dan berbasis potensi lokal.

2.1.3.3.3 Pertanian

Pertanian Perkotaan merupakan bagian dari Ketahanan Pangan di Kota Surabaya. Meskipun dikenal sebagai kota metropolitan dan pusat aktivitas ekonomi, Kota Surabaya juga memiliki kontribusi nyata dalam sektor pertanian. Di tengah keterbatasan lahan, masyarakat Surabaya tetap aktif mengembangkan pertanian perkotaan (*urban farming*) yang tersebar di berbagai wilayah, baik di lahan milik pribadi, fasilitas umum, maupun aset milik pemerintah kota.

Berbagai komoditas pertanian seperti sayur-mayur, buah-buahan, tanaman, serta tanaman pangan berhasil dibudidayakan secara produktif dengan memanfaatkan teknologi sederhana dan ramah lingkungan. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil pertanian ini juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga serta sarana edukasi lingkungan dan gizi keluarga.

Pemerintah Kota Surabaya turut mendorong pengembangan sektor pertanian ini melalui pelatihan, pemberian bantuan sarana produksi, penyediaan lahan produktif, serta pembinaan kelompok tani perkotaan. Program ini menjadi bukti bahwa meskipun sebagai kota besar, Surabaya tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari level komunitas. Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari produktivitas serta hasil produksi pertanian di Kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.157
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	8.082,50	6.156,69	7.150,88	7.387,50	1.140,86
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.242,8	955,15	1.090,74	1.099,30	168,10
3.	Produktivitas (ton/ha)	6,51	6,45	6,56	6,72	6,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2025

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, cabai, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu jagung dan sayur, sedangkan produksi padi, cabai, dan buah mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2024 komoditi yang mengalami peningkatan produksi adalah padi, jagung, cabai, dan buah. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi tahun 2021 hingga triwulan I tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.158
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	8.076,12	8.156,78	7.150,88	7.387,50	1.140,86
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	162,219	154,95	158,35	281,65	77,5
3.	Jumlah Produksi Cabai (ton)	N/A	37,48	32,10	56,68	3,27
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	202,8	151,55	480,61	144,68	19,3
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	6.763,71	10.111,78	9.717,68	10.715,25	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2025

Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya membuka pelayanan untuk pengobatan hewan ternak di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memiliki Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) untuk pelayanan kesehatan bagi hewan peliharaan dan ternak. Berlokasi strategis di Jalan Ikan Dorang Nomor 15, Perak Barat. Fasilitas ini telah direvitalisasi dan dilengkapi dengan sarana modern sejak Februari 2025. Data intervensi pengobatan dan vaksin hewan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.159
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah ternak (ekor)	23.870	21.753	16.381	16.125	1.421
Jumlah ternak diintervensi (ekor)	21.128	19.509	14.666	14.606	1.109

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase ternak yang diintervensi (%)	88,51	89,68	89,53	90,58	78,04

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Di Kota Surabaya, kontribusi sektor pertanian memang relatif kecil, namun demikian sektor ini berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan penduduk dan menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan makanan di Kota Surabaya, sehingga di masa mendatang tetap dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memajukan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi *urban farming*, penguatan kelembagaan pertanian, serta pengembangan investasi industri pengolahan hasil pertanian.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.160
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Jenis Pasar Modern	2020	2021	2022	2023	2024
1	Toko Swalayan	792	792	663	663	592
2	Departement Store	13	13	16	16	170
3	Mall/Plaza	34	34	38	38	37
Total		**839**	**839**	**717**	**717**	**799**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2025

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (Usaha Mikro Kecil). Pada tahun 2024, berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terdapat perbedaan jumlah toko swalayan dan *departmen store* dari tahun sebelumnya dikarenakan perubahan izin usahanya. Toko swalayan adalah toko yang menjual berbagai barang secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri. Swalayan dapat berupa *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, atau grosir. *Department store* atau toserba adalah toko besar yang menjual berbagai macam barang dari berbagai departemen.

Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II.161
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	2021	2022	2023	2024	2025
1		Pasar Sememi	Pasar Kutisari (rehab)	Pasar Keputran (rehab)	-
2		Gunung Anyar	Pasar Gununganyar (rehab)	Pasar Pabean (rehab)	-
3		Pegirian	Pasar Nambangan (rehab)	Pasar Tembok (rehab)	-
4		Keputih	Pasar Keputih (rehab)	Pasar Kutisari (rehab)	-
5		Burung Dolly (lanjutan)	Pasar Dukh Menanggal (rehab)	Pasar Ikan Hias Gunungsari (rehab)	-
6		Jambangan	Pasar Sememi (rehab)	Pasar Dupak (rehab)	-
7	-	Gembong Asih	Pasar Raci (rehab)	Pasar Nambangan (rehab)	-
8		Penjaringan Sari	Pasar Jambangan (rehab)	Pasar Jambangan (rehab)	-
9		Dupak	Pasar Rakyat Jambangan (Rehab)	Pasar Ndeso Jeruk (rehab)	-
10		Kutisari	Pasar Simo (rehab)	Pasar Burung Dolly (rehab)	-
11		Nambangan (lanjutan)		Pasar Karah tahap 2	-
12				Pasar Ex Halte trem JMP (rehab)	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2025

Tabel II.162
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan izin usaha perdagangan dan industri, yang baru dimulai di tahun 2021 menggunakan OSS-RBA terpusat, sehingga data jumlah usaha menjadi lebih akurat. Sebagaimana pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa jumlah usaha sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel II.163
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

No	Jenis Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perdagangan	13.562	691	1.054	56.201	56.643
2	Industri	253	208	356	25.476	39.520
Total		**13.815**	**899**	**1.410**	**81.677**	**96.163**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.164
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	A	A	AA
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	75,13	75,34	80,31	83,92	90,24

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya selalu mendapatkan predikat kinerja tingkat BB. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan predikat kinerja tingkat A. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan predikat kinerja tingkat AA. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 hingga tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada tahun 2021 sebanyak 361 jenis pelayanan, dan 215 jenis pelayanan atau 59,56 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP). Kemudian pada tahun 2025 terdapat sebanyak 215 jenis pelayanan dan 150 jenis pelayanan atau 60,93 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.165
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah jenis pelayanan	361	215	215	215	215
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	215	131	143	150	150
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (%)	59,56	60,93	66,51	69,77	69,77

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Sedangkan untuk SOP yang dievaluasi tiap tahun bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.166
SOP Dievaluasi Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah SOP	906	1.446	1.536	1.536	567
SOP dievaluasi	68	123	556	550	255

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari keseluruhan 906 SOP yang ada, 68 di antaranya telah dilakukan evaluasi pada tahun 2021. Sedangkan di tahun 2024, sebanyak 550 SOP telah dievaluasi dari total 1.536 SOP yang ada. Sedangkan pada tahun 2025, sampai dengan triwulan I, dari 567 SOP yang ada, telah dievaluasi sebanyak 255 SOP.

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada

tahun 2021 hingga tahun 2025 (TW I) selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.167
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2020–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah rancangan produk hukum	149	155	30	67	15
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	149	155	30	67	15
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Rekap kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.168
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Nama BUMD	2020	2021	2022	2023	2024
PDAM Surya Sembada	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Pasar Surya	WDP	WDP	WDP	WDP	N/A
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	TMP
PD Rumah Potong Hewan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
PT Bank SAU (Surya Artha Utama)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PT Surya Karsa Utama	WDP	TMP	WDP	-	-

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. Beberapa BUMD yang telah memiiki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan tahun 2024 antara lain PDAM Surya Sembada dan PT Bank SAU (Surya Artha Utama).

2.1.3.4.1.2 Pelayanan Publik

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan

publik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.169
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	86,05	88,37	90,76	95,82	97,21

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit penyelenggara pelayanan adalah unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (31 Kecamatan, 153 Kelurahan, 63 Puskesmas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, PTSP Surabaya Timur, PTSP Surabaya Pusat (Siola), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Laboratorium Kesehatan Daerah). Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2024, mayoritas berada di atas nilai 90, yakni “Sangat Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.1.3.4.1.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2024 terdapat 20 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 11 MoU dan keseluruhan 11 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan pada triwulan I Tahun 2025 terdapat 5 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 MoU atau 100%

terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 3 MoU dan keseluruhan 3 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.170
MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2023–2025 (TW I)

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	20	20	5
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan	20	20	5
3.	Persentase bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Tabel II.171
MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023–2025 (TW I)

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	11	11	3
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri keseluruhan	11	11	3
3.	Persentase bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari beberapa Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel II.172
MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kerjasama dievaluasi	21	36	31	31	8

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

2.1.3.4.1.4 Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Di samping menjalankan bisnis secara profesional, BUMD juga dituntut untuk dapat berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa BUMD yang berkontribusi pada tahun 2020 – 2024, yakni:

1) PDAM Surya Sembada

   Pada tahun 2024, PDAM Surya Sembada berkomitmen secara bersama gotong royong membantu membangun Kota Surabaya, PDAM Surya Sembada turut memberikan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor sosial, lingkungan, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan dengan total biaya bantuan CSR sejumlah Rp3.564.519.554.

2) PT BPR Surya Artha Utama (SAU)

PT BPR Surya Artha Utama mendukung upaya penguatan UMKM di Kota Surabaya sebagai bagian dari langkah strategis pemberdayaan UMKM Kota Surabaya, melalui pembinaan dan pendampingan kepada UMKM. Pada tahun 2024, PT BPR SAU telah menyalurkan kredit mikro kepada masyarakat ber-KTP Surabaya sebanyak 2.414 orang dan pinjaman kepada pelaku UMKM Kota Surabaya melalui Program PUSPITA dan SIKUMIS sebanyak 250 orang. PT BPR-SAU juga turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan sarana prasarana pendidikan di 2 sekolah dasar melalui penyediaan CSR berupa LCD proyektor dan tripod. Di sektor pariwisata, PT BPR-SAU ikut berpartisipasi dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Kota Lama melalui bantuan CSR berupa *signage*. Total biaya bantuan CSR yang telah diberikan kepada masyarakat sejumlah Rp69.952.052.

3) PT YEKAPE

PT YEKAPE tetap berkomitmen melalui CSR untuk memberikan bantuan kemasyarakatan di Kota Surabaya melalui kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Bantuan kegiatan kemasyarakatan langsung yang diberikan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat mencapai Rp703.530.000. Selain itu, PT YEKAPE juga secara rutin memberikan beasiswa kepada 100 siswa SMA Kota Surabaya dari keluarga miskin dan memberikan bantuan kepada 1.000 anak yatim. PT YEKAPE juga secara konsisten mendukung ketahanan pangan melalui dukungan pembangunan kios TPID di Kota Surabaya yang berupaya menekan laju inflasi daerah.

4) PT BPD Jatim

Meski Pemerintah Kota Surabaya hanya memiliki 2,13% saham, PT BPD Jatim, secara rutin memberikan bantuan kepada usaha mikro kecil binaan Pemerintah Kota Surabaya berupa barang dan uang. PT BPD Jatim juga mendukung digitalisasi transaksi daerah melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam hal pembayaran ePeken melalui QRIS. Selain itu, PT BPD Jatim juga mendukung pengembangan pariwisata daerah melalui pemberian bantuan CSR berupa Wisata Perahu Kalimas senilai Rp1.745.000.000 dan bantuan CSR pada wisata rakyat sejumlah Rp790.000.000. Dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi, PT BPD Jatim aktif berpartisipasi dalam setiap

kegiatan *event* dan acara seremonial sektor pendidikan, budaya dan lingkungan di Pemerintah Kota Surabaya. PT BPD Jatim turut aktif bersama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya dalam menciptakan ekosistem olahraga yang mendukung munculnya atlet daerah melalui pelaksanaan *event* olahraga di antaranya turnamen sepak takraw, *event run*, dan jalan sehat.

5) PT SIER

Pada tahun 2024, PT SIER berkomitmen melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk memberikan bantuan dalam kegiatan sosial di Kota Surabaya melalui bantuan uang saku untuk 100 anak yatim-piatu, kegiatan Khitan Massal Surabaya sejumlah 102 orang anak, serta melaksanakan program pemeriksaan kesehatan untuk 100 lansia. Selain itu PT SIER turut serta memberi dukungan dalam pengembangan pariwisata daerah melalui pembuatan *video mapping* untuk mendukung peresmian Wisata Kota Lama Surabaya tahun 2024 dan bantuan 2 unit becak listrik untuk kendaraan Wisata Kota Lama Surabaya. PT SIER juga turut memberikan dukungan dalam pembangunan daerah melalui bantuan pembangunan infrastruktur. Total dukungan bantuan yang diberikan PT SIER kepada pemerintah dan masyarakat sejumlah Rp583.928.452.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan

diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya Tahun 2025-2045 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024. Sedangkan untuk RPJMD, telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021, sehingga Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.173
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Jenis Dokumen	2021	2022	2023	2024	2025
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2025, telah dilakukan *review* terhadap RPJMD 2021-2026 untuk digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 123 program.

Tabel II.174
Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	177	123	123	123	123
2	Jumlah Program RKPD	121	124	124	124	124
3	Persentase penjabaran Program RPJMD dalam RKPD (%)	100*	100*	100*	100*	100*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2025
*Keterangan: *) Jumlah program sejak RKPD 2021 menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020*

Sementara itu, tingkat capaian keberhasilan program mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024, tingkat capaian keberhasilan program sedikit menurun menjadi 99,04 persen. Sedangkan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I, tingkat capaian keberhasilan programnya baru mencapai 39,90 persen. Selengkapnya data tingkat capaian keberhasilan program pembangunan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.175
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (%)	98,13	99,21	99,43	99,04	39,90

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2025

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif menyesuaikan kebutuhan sehingga terdapat sisa. Sedangkan di tahun 2025, sampai dengan triwulan I, penyerapan anggarannya baru mencapai 14,85 persen.

Tabel II.176
Rata – Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan (%)	80,17	88,83	88,19	87,82	14,85

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah, 2025

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karir pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi konstribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. Data jumlah pegawai yang kompeten selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.177
Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pegawai kompeten	4.725	5.776	5.603	6.556	6.556
2	Jumlah pegawai belum kompeten	1.636	312	403	541	541

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Dari data di atas, pada periode tahun 2021 – 2022, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Namun pegawai yang belum kompeten masih relatif tinggi. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II.178
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pejabat struktural	1.414	1.197	1.233	1.169	1.169
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	944	624	642	507	507
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural (%)	66,76	52,13	52,07	43,37	43,37

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.1.3.5.3 Pengelolaan Perbatasan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016–2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan

peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun 2020 hingga akhir tahun 2024, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut.

Tabel II.179
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
Sudah dilakukan penegasan wilayah	10	16	22	25	27

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah. Karena itu, diperlukan pengawasan untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahunnya. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.180
Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi	19	0	0	0	0

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

Dapat dilihat pada tabel di atas, dari 19 pelanggaran di tahun 2021, menjadi nol pelanggaran di tahun 2022. Mulai di tahun 2022 hingga saat ini, jumlah pelanggaran dapat dicegah melalui pengawasan sebelum pelaporan tata kelola administrasi sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran tata kelola administrasi. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari sistem informasi elektronik yang membantu mengakselerasi dan mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan.

Selain itu, unsur pengawasan internal juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur, sebagaimana ditunjukkan pada

tabel berikut, cenderung meningkat, karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal untuk mengurangi jumlah pelanggaran.

Tabel II.181
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Jenis Hukuman Disiplin	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	13	2	5	4	0
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	1	2	19	11	1
Jumlah Hukuman Disiplin Berat	16	29	21	17	5
Total Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	30	33	45	32	6

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.7.1 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam

rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Adapun beberapa kegiatan untuk mendukung pembinaan politik dan organisasi masyarakat antara lain sosialisasi pendidikan politik, sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ormas, dialog interaktif dan rakor bersama Kapolsek dan Danramil. Jumlah Ormas Tahun 2021 – 2025 (Triwulan I) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.182
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ormas Aktif	38	27	26	10	0
2	Jumlah Ormas Tercatat	167	104	213	254	263

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat 263 ormas yang tercatat, dan akan mendapat pembinaan pada triwulan berikutnya.

2.1.3.7.2 Penanganan Potensi Konflik

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya pengawasan terhadap potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.183
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah potensi konflik	297	403	309	196	107
2	Jumlah konflik	8	5	5	2	3

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, pelibatan tim kewaspadaan dini penting dalam memetakan potensi konflik, dan didukung penuh oleh partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.184
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100%
2021	810.743	41,52	1.141.846	54,48	1.952.589	100%
2022	819.124	41,60	1.149.824	58,40	1.968.948	100%
2023	948.701	38,79	1.497.216	61,21	2.445.917	100%
2024	1.061.448	40,79	1.541.008	59,21	2.602.456	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel II.185
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (orang)	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
PDRB (Juta Rp)	554.509.457	590.227.116	655.616.222	715.294.707	772.493.614
Produktivitas (Juta Rp per orang)	350,39	375,25	398,96	455,68	475,43

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II.186
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan
Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	19.477,42	19.874,94	22.684,94	25.217,17	27.494,46
Laju Pertumbuhan (persen)	-4,98	2,04	14,14	11,16	9,03

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2025

2.1.4.2 Fokus Infrastruktur Kewilayahan

2.1.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota mengukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan antara tahun 2020-2021 dengan tahun 2022 berbeda, dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.

Tabel II.187
Indeks Infrastruktur Kota Surabaya Tahun 2022–2024

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	Indeks Infrastruktur Kota	0,67	0,75	0,81
1.a	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,78	0,81	0,83
1.b	Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,53	0,67	0,82
1.c	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,67	0,74	0,78

Sumber: Bappedalitbang, diolah, 2025

Pada tahun 2024 Realisasi Indeks Infrastruktur Kota Surabaya meningkat menjadi 0,81. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan

pelaksanaan *overlay* (pelapisan ulang aspal) pada tahun 2022 sebanyak 2.072 ruas jalan, sebanyak 2.780 ruas jalan di tahun 2023 dan sebanyak 3.537 ruas jalan di tahun 2024. Pemerintah Kota Surabaya juga terus berupaya dalam peningkatan konektivitas dan optimalisasi kinerja jalan melalui pembangunan jalan baru yakni, Jalan Lingkar Luar Barat di tahun 2022 dan *Radial Road* di tahun 2023 yang dilanjutkan pada tahun 2024 serta Pelebaran Jalan Wiyung di tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan hunian layak juga telah dilakukan melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin, dengan 105 blok rusunawa pada tahun 2022, yang meningkat menjadi 109 blok sampai dengan tahun 2024. Program Dandan Omah juga dilaksanakan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimulai dengan 929 unit rumah pada tahun 2022, meningkat menjadi 2.887 unit pada tahun 2023, dan 1.678 unit pada tahun 2024 yang dibiayai dari APBD. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang meningkat dari 22 lokasi pada tahun 2022 menjadi 35 lokasi pada tahun 2023, dan 63 lokasi pada tahun 2024. Upaya ini juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang lebih baik. Di bidang penataan ruang, pemerintah telah melakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Sedangkan dari aspek transportasi, keberhasilan tersebut didukung oleh penyediaan layanan angkutan umum perkotaan antara lain Suroboyo Bus sebanyak 28 unit yang melayani 2 rute layanan sejak tahun 2018 hingga tahun 2024, serta Program Teman Bus hasil kerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang mengoperasikan 17 unit bus di 1 rute. Selain itu, terdapat 12 unit Bus Listrik yang melayani 1 rute, serta 102 unit angkutan *feeder* yang melayani 11 rute sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Di sisi lain, capaian kinerja aspek transportasi juga diperkuat dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta koordinasi dengan berbagai untuk meningkatkan konektivitas antarmoda. Hal ini mencakup kerja sama dengan PT KAI DAOP VIII Surabaya dalam meningkatkan integrasi transportasi di tiga stasiun serta koordinasi dengan PT PELINDO untuk pengelolaan transportasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Di masa mendatang, kerjasama dengan Provinsi dan Wilayah Aglomerasi Surabaya Raya, utamanya dalam penyediaan transportasi publik perlu diintensifkan, karena setiap harinya rata-rata terdapat 390.777 perjalanan keluar-masuk Kota Surabaya yang sebagian besar berasal dari Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan

Lamongan, sehingga diperlukan kerjasama untuk menghadirkan transportasi publik untuk mengurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi.

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2024, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II.188
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (%)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2025

Tabel II.189
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (%)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2024 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II.190
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2025

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di

Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus menyediakan fasilitas jalan yang memadai dengan memperhatikan perkembangan volume lalu lintas harian pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Hal ini diukur melalui V/C ratio yaitu perhitungan volume per jam tertinggi untuk memperkirakan volume per jam desain (yaitu volume per jam tertinggi ke-n) untuk keperluan desain yang ideal. Pada tahun 2024, terdapat 92 jalan kewenangan kota, 1 jalan kewenangan provinsi, dan 1 jalan kewenangan pusat yang memiliki V/C Ratio ≤0,90 dari total 101 ruas jalan yang di-*sampling*. Semakin kecil nilai V/C ratio pada suatu ruas jalan maka semakin baik pula fungsi jalan tersebut. Rata-rata V/C ratio di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya terbukti semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya adalah 0,47 dan di tahun 2021 turun menjadi 0,42. Namun pada tahun 2022, rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya mengalami kenaikan menjadi 0,75, dan tetap bertahan hingga tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024, rata-rata V/C ratio berhasil diturunkan menjadi 0,72. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota antara lain dengan menyediakan alternatif rute perjalanan serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.191
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata V/C Ratio	0,47	0,42	0,75	0,75	0,72

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Tabel II.192
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jl. Adityawarman	kota	0,28	0,295	0,54	0,85	0,80
2	Jl. Bengawan	kota	0,13	0,155	0,69	0,70	0,47
3	Jl. Blauran	kota	0,72	0,57	0,71	0,51	0,71
4	Jl. Bubutan	kota	0,4	0,82	0,81	0,44	0,84
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,4	0,27	0,72	0,84	0,67
6	Jl. Darmo	kota	0,5	0,545	0,88	0,76	0,75
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,12	0,065	0,58	0,56	0,37
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,34	0,27	0,89	0,70	0,54

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2020	2021	2022	2023	2024
9	Jl. Dinoyo	kota	0,28	0,195	0,69	0,80	0,74
10	Jl. Diponegoro	kota	0,42	0,45	0,58	0,69	0,73
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,42	0,49	0,86	0,79	0,84
12	Jl. Dr.Soetomo	kota	0,42	0,3	0,61	0,62	0,84
13	Jl. Embong Malang	kota	0,44	0,55	0,65	0,46	0,50
14	Jl. Gemblongan	kota	0,48	0,53	0,95	0,95	0,83
16	Jl. Gubeng pojok	kota	0,47	0,28	0,65	0,55	0,78
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	0,67	0,32	0,69	0,60	0,68
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,17	0,14	0,52	0,86	0,74
19	Jl. Indragiri	kota	0,18	0,375	0,69	0,77	0,82
20	Jl. Indrapura	kota	0,83	0,8	0,76	0,74	0,61
21	Jl. Jagir Wonokromo	kota	0,18	0,315	0,61	0,60	0,72
22	Jl. Jakarta	kota	0,6	0,385	0,80	0,88	0,85
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,22	0,545	0,78	0,87	0,77
24	Jl. Kapuas	kota	0,01	0,035	0,64	0,43	0,51
25	Jl. Kayoon	kota	0,23	0,25	0,64	0,78	0,81
26	Jl. Kedungdoro	kota	0,27	0,41	0,82	0,76	0,79
27	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,27	0,2	0,71	0,70	0,57
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,57	0,55	0,74	0,77	0,67
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,45	0,53	0,74	0,73	0,86
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,49	0,47	0,75	0,76	0,67
31	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,22	0,25	0,67	0,63	0,49
32	Jl. Mayjend HR. Muhammad	kota	0,26	0,565	0,72	0,98	0,81
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,44	0,475	0,92	0,94	0,79
35	Jl. Ngagel	kota	0,5	0,27	0,70	0,70	0,81
36	Jl. Pahlawan	kota	1,11	0,53	0,80	0,82	0,83
37	Jl. Pemuda	kota	0,79	0,83	0,86	0,90	0,90
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,63	0,71	1,03	0,99	0,93
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,54	0,41	1,16	0,96	0,91
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,16	0,22	0,79	0,78	0,59
41	Jl. Prof. Dr. Moestopo	kota	0,72	0,565	0,88	0,72	0,46
42	Jl. Rajawali	kota	0,83	0,51	0,76	0,76	0,78
43	Jl. Raya ITS	kota	0,19	0,23	0,49	0,65	0,44
44	Jl. Stasiun Wonokromo	kota	0,5	0,42	0,77	0,63	0,75
45	Jl. Sumatra	kota	0,37	0,02	0,72	0,78	0,40
46	Jl. Tunjungan	kota	1,03	0,58	0,66	0,87	0,49
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,55	0,475	0,87	0,70	0,69
48	Jl. Jendral Basuki Rachmat	kota	1,38	1,2	0,82	0,76	0,78
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl. Veteran	kota	1,01	1,05	0,71	0,70	0,84
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,96	0,27	0,85	0,71	0,67
51	Jl. Keputran	kota	0,05	0,035	0,72	0,87	0,81
Rata-rata di jalan kewenangan kota			**0,48**	**0,43**	**0,73**	**0,71**	**0,71**
Rata-rata total			**0,47**	**0,42**	**0,75**	**0,74**	**0,72**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Pada tabel di atas, rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang relatif tinggi di angka 0,72. Masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,90 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan peningkatan penggunaan transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tertib saat berkendara, memasang rambu, dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.193
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	932	1.263	1.404	1.495	398

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3.018.022 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari kabupaten/kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar-masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya secara umum mengalami penurunan. Pada 2021 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,04 menit dapat diturunkan tiap tahunnya, hingga triwulan I tahun 2025 ini rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 18,68 menit, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.194
Rata-rata Lama Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	22,04	19,12	18,69	18,54	18,68

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021, rata-rata genangan setinggi 10,92 cm. Hingga triwulan I tahun 2025 ini, rata-rata tinggi genangan tersebut menjadi 10,01 centimeter sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.195
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	10,92	10,92	10,01	10,01	10,01

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, wilayah genangan Kota Surabaya seluas 452,57 hektar. Hingga triwulan I tahun 2025 ini, luas wilayah genangan terus menurun menjadi sebesar 365,61 hektar, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

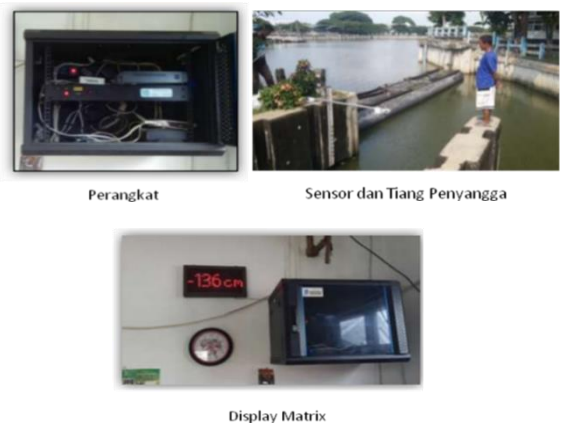
Tabel II.196
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Wilayah Genangan (ha)	452,57	432,09	400,74	378,17	365,61

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 67 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem

Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi.



Gambar II.17
Perangkat Smart Water Level

Optimalnya kinerja drainase secara umum pada tahun 2024 ini tidak lepas dari dilaksanakannya pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi drainase pada 159 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.

2.1.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 116.531 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.197
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	6.400	1.324	3.002	9.594	10.685	368

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah

Kota Surabaya, maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Baru di tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai A (80,14). Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan nilai A- (95,12), sementara pada tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya juga berhasil mendapatkan nilai A- (100,67). Meski mendapat A-, namun evaluasi terus dilakukan untuk mendorong perbaikan kinerja birokrasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi (RB) General Pemerintah Kota Surabaya antara lain perbaikan rencana aksi Reformasi Birokrasi, maturitas SPIP, penerapan Satu Data Indonesia, serta penguatan kembali sistem pencegahan korupsi. Sedangkan untuk RB Tematik, perbaikan yang perlu dilakukan antara lain,

penyempurnaan rencana aksi pada 4 tema serta perbaikan penerapan mekanisme evaluasi belanja SPBE di instansi.

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2021-2025 (Triwulan I) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.198
Jumlah Unjuk Rasa di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bidang Politik	64	97	67	144	17
2	Bidang Ekonomi	142	165	101	78	25
3	Bidang Sosial Budaya	78	152	177	256	61
Jumlah unjuk rasa		**284**	**414**	**345**	**478**	**103**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Jumlah unjuk rasa di Kota Surabaya dari tahun 2021 hingga saat ini cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa secara signifikan yang didominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi. Di tahun 2023, jumlah kejadian sedikit menurun, namun kembali meningkat di tahun 2024 yang merupakan tahun politik. Selain bidang politik, tingginya kejadian unjuk rasa di tahun 2024 juga didominasi bidang sosial budaya. Hal ini menunjukan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan bisa dikendalikan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban maka perlu adanya pemantauan CCTV pada lokasi-lokasi rawan kriminalitas serta penerangan jalan umum yang merata di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel di berikut ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perizinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya.

Tabel II.199
Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Perda Terkait Perizinan	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	1	0	0	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian Hukum dan Kerjasama menerbitkan Perda yang secara tidak langsung berkaitan dengan iklim usaha, salah satunya adalah Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perda ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi peredaran Narkotika, sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang kondusif.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.200
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan D4/S1	303.41	287.516	290.887	297.446	301.325
2	Jumlah lulusan S2	21.179	19.976	20.615	21.304	21.961
3	Jumlah lulusan S3	1.405	1.412	1.518	1.617	1.732
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	325.994	308.904	313.020	320.367	325.018
5	Jumlah penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,109	0,104	0,105	0,106	0,108

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Daya saing SDM salah satunya tercermin pada pemerataan gender dan tingkat pendidikan dalam angkatan kerja, yakni penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja Kota Surabaya pada tahun 2024 sejumlah

1.624.822 orang atau sebesar 70,49 persen sedikit meningkat dibanding tahun 2023 sejumlah 1.569.714 orang atau sebesar 68,73 persen. Peningkatan ini diperkirakan karena dua hal, yang pertama karena peningkatan jumlah penduduk 15 tahun ke atas umumnya ini akan diikuti dengan kenaikan angkatan kerja. Yang kedua, karena adanya pergeseran (utamanya dari perempuan yang mengurus rumah tangga) dari kelompok bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja.

Berdasarkan gender, partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat setiap tahunnya mencapai 59,48 persen pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar 57,61 persen. Sementara partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 81,92 persen pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yakni sebesar 80,25 persen. Semakin tinggi partisipasi perempuan untuk bekerja menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan antara peranan laki-laki dan perempuan yang berarti pengarusutamaan gender pada sektor ketenagakerjaan semakin baik.

Tabel II.201
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkatan kerja	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
2	Jumlah penduduk usia kerja	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.283.993	2.305.008
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,05	67,30	69,99	68,73	70,49
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki	81,23	81,69	85,07	80,25	81,92
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	55,35	53,44	55,46	57,61	59,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, angkatan kerja Kota Surabaya sejak tahun 2020 hingga 2024 didominasi oleh lulusan tingkat pendidikan menengah atas, diikuti dengan pendidikan tinggi (universitas dan diploma), kemudian pendidikan menengah pertama, dan paling sedikit adalah pendidikan dasar ke bawah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.202
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkatan kerja lulusan SD ke bawah	280.991	277.665	242.208	259.079	322.151
2	Jumlah angkatan kerja lulusan SMP	209.422	205.322	245.457	214.666	206.995
3	Jumlah angkatan kerja lulusan SMA Umum	364.391	361.454	446.306	375.281	745.186

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah angkatan kerja lulusan SMA Kejuruan	344.292	348.882	331.289	367.480	
5	Jumlah angkatan kerja lulusan Diploma I/II/III	59.030	56.790	47.937	47.479	350.490
6	Jumlah angkatan kerja lulusan Universitas	324.438	322.775	330.117	305.729	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, semakin tinggi nilai produktivitas. Sebesar 21,99 persen penduduk bekerja di Kota Surabaya berpendidikan perguruan tinggi, 45,38 persen berpendidikan menengah atas, dan sisanya tersebar pada lulusan SMP dan SD atau kurang sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.203
Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan SD ke bawah	287.732	268.174	255.077	238.468	245.250	311.017
2	Jumlah lulusan SMP	214.547	182.651	185.909	213.754	198.479	193.210
3	Jumlah lulusan SMA	330.195	322.011	319.721	392.352	342.080	368.673
4	Jumlah lulusan SMK	285.022	298.881	309.413	314.112	337.375	332.406
5	Jumlah lulusan perguruan tinggi	381.598	355.951	350.495	359.352	340.410	339.749

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya semakin menurun secara signifikan mencapai 4,91 persen pada tahun 2024 dibanding tahun 2022 yakni sebesar 7,62 persen. Penganggur terbuka yang dimaksud terdiri dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel II.204
Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengangguran	154.896	152.273	125.276	106.120	79.767
2	Tingkat pengganggguran terbuka	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91
3	Tingkat pengganggguran terbuka laki-laki	10,79	10,77	9,66	7,30	4,85
4	Tingkat pengganggguran terbuka perempuan	8,37	8,07	4,61	6,04	4,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari sisi lapangan usaha yang tersedia, secara nasional penyajian data hasil Sakernas yang berkenaan dengan pengelompokan sektor ekonomi mulai menggunakan 17 kategori lapangan pekerjaan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2015. Namun karena keterbatasan sampel pada level kabupaten/kota, maka penyajian lapangan usaha untuk Kota Surabaya dikategorikan ulang menjadi 3 kategori sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.205
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jasa	77,58	78,99	77,66	77,55	76,13
2	Manufaktur	21,75	20,07	21,79	21,81	23,38
3	Pertanian	0,67	0,94	0,55	0,63	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagaimana tabel di bawah, pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2024 pada seluruh tingkat Pendidikan. Namun perlu dicermati bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2024 adalah pada jenjang Pendidikan SMP dan SMA. Hal ini diperkirakan terjadi akibat belum optimalnya pasar kerja menyerap lulusan SMP dan SMA dan mereka juga tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara lulusan perguruan tinggi tercatat menurun dari 3,62 persen di tahun 2023 menjadi 3,06 persen di tahun 2024 menunjukkan tingginya kebutuhan pasar kerja terhadap tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel II.206
Tingkat Pengganggguran Terbuka Kota Surabaya Menurut
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengangguran terbuka lulusan SD ke bawah	4,56	8,13	1,54	5,34	3,46
2	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMP	12,78	9,45	12,92	7,54	6,66
3	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMA	11,63	11,55	12,09	8,85	6,28
4	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMK	13,19	11,31	5,18	8,19	5,52
5	Persentase pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi	7,18	7.66	4,95	3,62	3,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan tersebut, antara lain semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja dan meratanya gender dalam partisipasi angkatan kerja yang berdampak pada semakin turunnya tingkat pengangguran terbuka terutama pada tingkat pendidikan tinggi, daya saing daerah sektor ketenagakerjaan Kota Surabaya dapat diproyeksikan semakin baik dan

berkualitas pada periode ke depan. Kunci utama dalam daya saing sumber daya manusia adalah perbaikan kualitas pendidikan yang mampu membuka akses terhadap berbagai kesempatan dan potensi pekerjaan, bukan hanya pada pasar kerja formal melainkan juga informal yang justru mampu menciptakan lowongan pekerjaan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di Kota Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi berada pada tingkat pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. Tertinggi selanjutnya yakni berada pada tingkat pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Sebagaimana selayaknya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang semakin baik pula. Artinya, semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi nilai produktivitas yang bisa dihasilkan, begitu sebaliknya. Sehingga besarnya proporsi jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Kota Surabaya tersebut menjadi potensi tenaga kerja yang berdaya saing di pasar kerja. Ditambah lagi, untuk meningkatkan tenaga kerja di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk memenuhi tuntutan dan standar pasar tenaga kerja yang terus berkembang pesat.

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.207
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	688.478	675.558	686.916	678.456	666.337
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	186.272	193.749	208.815	220.805	231.656
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	874.750	869.307	895.731	899.261	897.993
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.095.980	2.101.645	2.092.132	2.110.025	2.120.029
6	Rasio ketergantungan	0,417	0,414	0,428	0,426	0,424

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada akhir tahun 2024, antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun sedikit menurun dari tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) meningkat dari tahun 2023. Sehingga rasio ketergantungan sedikit turun menjadi sebesar 0,424 yang artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif/bekerja mempunyai tanggungan sebanyak 42 hingga 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dengan demikian, program-program di tahun 2025 dan 2026 perlu dioptimalkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM pada kelompok usia produktif.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang berkolaborasi dengan kebijakan perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun capaian TPB di Kota Surabaya pada tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel II.208
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2023

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	25	17	7	-	1
2	Tanpa Kelaparan	10	6	1	-	3

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	33	22	7	-	4
4	Pendidikan Berkualitas	14	10	3	-	1
5	Kesetaraan Gender	14	7	5	-	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	12	1	-	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	-	-	-	-
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	11	-	-	7
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	11	8	2	-	1
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	3	1	-	3
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	12	9	1	-	2
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertangung Jawab	6	2	-	-	4
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	1	1	-	-
14	Ekosistem Lautan	0	-	-	-	-
15	Ekosistem Daratan	2	2	-	-	-
16	Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh	23	12	7	-	4
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	11	1	3	1
Total		**207**	**133**	**37**	**3**	**34**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, 2025

Mengacu tabel di atas, sebanyak 170 indikator dari 207 indikator atau sebesar 82,13% indikator TPB memiliki relevansi/kesesuaian dengan indikator kinerja RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan seluruhnya telah mencapai predikat Tercapai dan Akan Tercapai untuk target tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian TPB melalui program pembangunan dan kegiatan prioritas utamanya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi. Sebanyak 76 program dari 148 program pembangunan Kota Surabaya serta 109 kegiatan dari 1.666 kegiatan Pemerintah Kota Surabaya mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaksanaan TPB dengan dukungan APBD Tahun 2023 sebesar Rp4,129 triliun.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk menyediakan data realisasi/kondisi terkini atas 37 indikator lainnya, dan sebanyak 34 indikator di antaranya tidak tersedia data, disebabkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa data tersebut bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk penyediaannya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

Pada tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum rata-rata mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.

2.2.1.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mampu mencatat kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan ini mencapai 108,37% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Pendidikan sebesar 101,77%;
2) Kesehatan sebesar 102,92%;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 134,44%
4) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 112,64%
5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 102,94%
6) Sosial sebesar 95,51%.

2.2.1.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencapai 107,71% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Namun demikian, urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan perlu memperoleh perhatian khusus dengan rata-rata capaian sebesar 23,13%. Belum optimalnya capaian urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain disebabkan adanya permasalahan hukum terkait kepemilikan persil, nilai dan luasannya sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah yang akan dibebaskan sesuai prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Penyelesaian permasalahan tersebut diupayakan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan pihak-pihak terkait utamanya mengenai tahapan pengadaan tanah skala kecil; verifikasi status alas hak persil dan subyek kepemilikan yang akan dibebaskan serta kesiapan pelaksanaan konsinyasi sampai dengan eksekusi. Rincian capaian per Bidang Urusan sebagai berikut:

1) Tenaga Kerja sebesar 105,98%;
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 105,89%;
3) Pangan sebesar 154,48%;
4) Pertanahan sebesar 23,13%;
5) Lingkungan Hidup sebesar 108,21%;
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 122,58%;
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 100,00%;
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 169,40%;
9) Perhubungan sebesar 102,94%;
10) Komunikasi dan Informatika sebesar 106,38%;
11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar 102,71%;
12) Penanaman Modal sebesar 107,56%;
13) Kepemudaan dan Olahraga sebesar 104,92%;
14) Statistik sebesar 100,00%;
15) Persandian sebesar 102,19%;
16) Kebudayaan sebesar 101,67%;
17) Perpustakaan sebesar 117,78%;
18) Kearsipan sebesar 102,99%.

2.2.1.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 106,80% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Kelautan dan Perikanan sebesar 103,50%;
2) Pariwisata sebesar 127,74%;
3) Pertanian sebesar 101,89%;
4) Perdagangan sebesar 100,76%;
5) Perindustrian sebesar 100,10%.

2.2.1.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terlaksana dengan baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 102,92% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian Bidang Urusan Sekretariat Daerah sebesar 105,97% dan Bidang Urusan Sekretariat DPRD sebesar 99,86%.

2.2.1.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 108,60% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Perencanaan sebesar 100,64%;
2) Keuangan sebesar 140,82%;
3) Kepegawaian sebesar 98,80%;
4) Pendidikan dan Pelatihan sebesar 105,26%;
5) Penelitian dan Pengembangan sebesar 100,00%.

2.2.1.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 99,70% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 107,07% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 109,13% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 dan realisasi tahun keempat RPJMD 2021-2026 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program sampai dengan triwulan I tahun 2025, secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.209
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025 Triwulan I Kota Surabaya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.065.645.443		1.012.986.877		1.129.140.344		203.344.980		18.01%		1.216.331.858		114.14%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94.13 %		95.06 %		93.34 %		97.43 %		104.38 %		97.43 %		103.51%		Dinas Pendidikan	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.442.377		1.167.855		1.409.549		249.248		17.68%		1.417.103		31.90%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		1 kegiatan		33.33 %		1 kegiatan		33.33 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.442.377		1.167.855		1.409.549		249.248		17.68%		1.417.103		31.90 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		10 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.029.406.176		1.003.060.241		1.115.127.923		201.898.746		18.11%		1.204.958.987		117.05%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.029.406.176		1.003.060.241		1.115.127.923		201.898.746		18.11%		1.204.958.987		117.05 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5929 Orang/bulan		8672 Orang/bulan		8621 Orang/bulan		8451 Orang/bulan		98.03 %		8451 Orang/bulan		142.54 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.331.194		527.660		768.926		55.416		7.21%		583.076		43.80%		
			Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.331.194		527.660		768.926		55.416		7.21%		583.076		43.80 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket		12 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.870.126		1.180.578		4.284.298		42.936		1.00%		1.223.513		25.12%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.870.126		1.180.578		4.284.298		42.936		1.00%		1.223.513		25.12 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	768 Unit		636 Unit		1029 Unit		116 Unit		11.27 %		116 Unit		15.10 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.595.570		7.050.544		7.549.648		1.098.634		14.55%		8.149.178		31.84%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.477.487		1.927.166		2.280.371		138.300		6.06%		2.065.466		83.37 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			23.118.083		5.123.378		5.269.276		960.335		18.23%		6.083.713		26.32 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.278.141.505		938.158.205		1.179.620.098		98.078.953		8.31%		1.036.237.158		81.07%		
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pendidikan	-
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pendidikan	-
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	57%		29.01 %		48%		20.09 %		41.85 %		20.09 %		35.25%		Dinas Pendidikan	-
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84.85 %		89.90 %		84.47 %		27.14 %		32.13 %		27.14 %		31.99%		Dinas Pendidikan	-
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pendidikan	-
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		100.31 %		100%		99.5 %		99.50 %		99.5 %		99.50%		Dinas Pendidikan	-
			Persentase SD terakreditasi minimal B	95.04 %		91.89 %		94.59 %		92.24 %		97.52 %		92.24 %		97.05%		Dinas Pendidikan	-
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	91.43 %		100.00 %		90.45 %		113.16 %		125.11 %		113.16 %		123.77%		Dinas Pendidikan	-
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		100.00%		Dinas Pendidikan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	97.44 %		93.47 %		97.12 %		95.33 %		98.16 %		95.33 %		97.83%		Dinas Pendidikan	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			642.779.016		449.540.137		519.132.359		42.151.250		8.12%		491.691.387		76.49%		
			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga		N/A		692 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			102.209.068		15.605.660		78.963.401		8.200		0.01%		15.613.860		15.28 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19 Unit		7 Unit		17 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			188.257		129.432		165.472		5.600		3.38%		135.032		71.73 %		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan		259 Satuan Pendidikan		259 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			6.043.654		1.173.854		2.154.242		219.403		10.18%		1.393.258		23.05 %		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik		71409 Peserta Didik		73986 Peserta Didik		58906 Peserta Didik		79.62 %		58906 Peserta Didik		79.62 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			7.328.937		5.590.505		15.422.968		5.600		0.04%		5.596.105		76.36 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket		3 Paket		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			148.042.295		207.308.110		205.615.560		5.600		0.00%		207.313.710		140.04 %		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan		590 Satuan Pendidikan		587 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			30.802.004		957.578		931.055		42.227		4.54%		999.805		3.25 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi,	3135 Orang		4563 Orang		3135 Orang		3155 Orang		100.64 %		3155 Orang		100.64 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																
	1.01.02.2.01.0054	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**			320.687.503		201.244.127		200.768.139		40.573.829		20.21%		241.817.956		75.41 %		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik		38170 Peserta Didik		85997 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0050	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**			320.597		380.161		442.312		42.915		9.70%		423.076		131.97 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan		649 Satuan Pendidikan		649 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0048	**Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			27.156.702		14.118.909		14.669.210		1.247.876		8.51%		15.366.784		56.59 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	205 Unit		155 Unit		155 Unit		35 Unit		22.58 %		35 Unit		17.07 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			362.852.051		269.767.923		358.837.368		27.715.403		7.72%		297.483.326		81.98%		
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga		376 Lembaga		305 Lembaga		284 Lembaga		93.11 %		284 Lembaga		93.11 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0012	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			68.139.379		8.950.794		85.180.410		5.600		0.01%		8.956.394		13.14 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		3 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0041	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			441.521		115.350		204.123		38.200		18.71%		153.550		34.78 %		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	258 Satuan Pendidikan		323 Satuan Pendidikan		257 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0038	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**			4.584.334		1.858.329		3.804.208		293.925		7.73%		2.152.254		46.95 %		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2280 Peserta Didik		2283 Peserta Didik		2220 Peserta Didik		238 Peserta Didik		10.72 %		238 Peserta Didik		10.44 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0027	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			6.779.353		7.227.272		1.484.015		5.600		0.38%		7.232.872		106.69 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			80.429.498		122.890.065		125.412.830		5.600		0.00%		122.895.665		152.80 %		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan		272 Satuan Pendidikan		272 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			13.494.310		591.675		776.800		34.594		4.45%		626.270		4.64 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang		2061 Orang		1013 Orang		1019 Orang		100.59 %		1019 Orang		100.59 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			170.635.719		117.494.791		129.509.218		26.582.610		20.53%		144.077.402		84.44 %		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37574 Peserta Didik		16259 Peserta Didik		38574 Peserta Didik		3415 Peserta Didik		8.85 %		3415 Peserta Didik		9.09 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			243.465		357.050		484.900		19.600		4.04%		376.650		154.70 %		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	330 Satuan Pendidikan		38606 Satuan Pendidikan		330 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			18.104.473		10.282.595		11.980.865		729.673		6.09%		11.012.269		60.83 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit		22 Unit		18 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			155.588.380		121.707.959		163.796.533		11.289.890		6.89%		132.997.848		85.48%		
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan		12 laporan		4 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan		12 laporan		4 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			716.291		445.878		763.112		13.400		1.76%		459.278		64.12 %		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan		2355 Satuan Pendidikan		2355 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.02.2.03.0009	**Pengadaan Perlengkapan PAUD**			742.276		83.016		243.728		18.026		7.40%		101.043		13.61 %		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket		4 Paket		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0018	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**			69.014.400		60.265.082		58.642.480		0		0.00%		60.265.082		87.32 %		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan		2217 Satuan Pendidikan		2479 Satuan Pendidikan		2245 Satuan Pendidikan		90.56 %		2245 Satuan Pendidikan		90.56 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0016	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**			8.420.251		2.456.244		5.017.056		5.600		0.11%		2.461.844		29.24 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang		3176 Orang		3092 Orang		1197 Orang		38.71 %		1197 Orang		38.71 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0011	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**			161.215		4.317.893		5.165.801		795.404		15.40%		5.113.297		3,171.72 %		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik		349 Peserta Didik		209 Peserta Didik		209 Peserta Didik		100.00 %		209 Peserta Didik		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0047	**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**			76.002.570		53.360.624		93.362.428		10.457.460		11.20%		63.818.084		83.97 %		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88878 Satuan Pendidikan		88778 Peserta Didik		88878 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0045	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**			531.376		732.720		601.929		0		0.00%		732.720		137.89 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		6 Unit		3 Unit		2 Unit		66.67 %		2 Unit		66.67 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			116.922.057		97.142.187		137.853.838		16.922.410		12.28%		114.064.597		97.56%		
			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	5 hari		1.01 hari		5 hari		1 hari		180.00 %		1 hari		180.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan		12 laporan		4 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0016	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			135.748		70.200		101.830		5.600		5.50%		75.800		55.84 %		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	293 Satuan Pendidikan		162 Satuan Pendidikan		153 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.02.2.04.0040	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			297.779		29.117		749.813		0		0.00%		29.117		9.78 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket		2 Paket		1 Paket		50.00 %		1 Paket		50.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0017	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			6.791.865		4.463.004		5.272.910		0		0.00%		4.463.004		65.71 %		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan		25 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan		25 Satuan Pendidikan		92.59 %		25 Satuan Pendidikan		92.59 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0015	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			113.511		51.512		76.703		5.600		7.30%		57.112		50.31 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		253 Orang		250 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0010	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan**			849.600		4.752.198		7.698.602		879.160		11.42%		5.631.358		662.82 %		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45 Peserta Didik		35 Peserta Didik		40 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0046	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**			108.733.554		87.776.156		123.953.981		16.032.050		12.93%		103.808.206		95.47 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2822 Peserta Didik		34 Peserta Didik		2812 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
3	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			134.346.197		36.829.912		41.240.062		5.524.200		13.40%		42.354.112		31.53%		
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0.05		0.06		0.05		0.06		120.00 %		0.06		120.00%		Dinas Pendidikan	-
			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0.05		0.05		0.05		0.05		100.00 %		0.05		100.00%		Dinas Pendidikan	-
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			134.346.197		36.829.912		41.240.062		5.524.200		13.40%		42.354.112		31.53%		
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang		8856 orang		7725 orang		9928 orang		128.52 %		9928 orang		128.52 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang		N/A		12685 orang		13301 orang		104.86 %		13301 orang		104.86 %		Dinas Pendidikan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.04.2.01.0002	**Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			133.374.035		36.629.450		40.544.000		5.518.600		13.61%		42.148.050		31.60 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan		434 Laporan		350 Laporan		435 Laporan		124.29 %		435 Laporan		124.29 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.0001	**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			972.162		200.462		696.062		5.600		0.80%		206.062		21.20 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
4	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			1.104.548.933		1.206.071.060		1.682.447.600		143.911.802		8.55%		1.349.982.861		122.22%		
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	83%		88.89 %		82.95 %		88.89 %		107.16 %		88.89 %		107.10%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		92.21 %		89%		98.14 %		110.27 %		98.14 %		110.27%		RSUD Bhakti Dharma Husada	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		89.94 %		100%		91.3 %		91.30 %		91.3 %		91.30%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	84%		95.96 %		82%		92.93 %		113.33 %		92.93 %		110.63%		RSUD Bhakti Dharma Husada	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	%		0.00		85%		95.39 %		112.22 %		95.39 %		N/A		RSUD Eka Candrarini	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		91.22 %		87.95 %		91.44 %		103.97 %		91.44 %		103.91%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			374.216.829		462.685.411		868.528.585		119.030.070		13.70%		581.715.482		155.45%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			35.732.522		58.842.549		77.005.757		15.250.767		19.80%		74.093.316		207.36 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan		478 Orang/bulan		478 Orang/bulan		473 Orang/bulan		98.95 %		473 Orang/bulan		246.35 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			71.091.174		97.524.819		127.934.243		25.788.261		20.16%		123.313.081		173.46 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan		809 Orang/bulan		811 Orang/bulan		804 Orang/bulan		99.14 %		804 Orang/bulan		178.67 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			267.393.133		306.318.043		627.838.694		75.214.825		11.98%		381.532.868		142.69 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1174 Orang/bulan		2240 Orang/bulan		2253 Orang/bulan		2206 Orang/bulan		97.91 %		2206 Orang/bulan		187.90 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0		0		35.749.891		2.776.217		7.77%		2.776.217		N/A		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		127 Orang/bulan		35 Orang/bulan		27.56 %		35 Orang/bulan		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.082.258		10.301.570		8.236.810		35.560		0.43%		10.337.130		127.90%		
			Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini	
			Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.082.258		10.301.570		766.868		35.560		4.64%		10.337.130		127.90 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		9 Unit		4 Unit		1 Unit		25.00 %		1 Unit		25.00 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		0		7.469.942		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A		N/A		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249.831.229		127.430.411		165.368.027		24.846.171		15.02%		152.276.582		60.95%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.073.629		1.352.019		1.798.494		388.000		21.57%		1.740.019		2.41 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.112.416		1.102.000		1.210.000		232.000		19.17%		1.334.000		2.96 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			132.645.183		124.976.391		102.615.612		21.047.770		20.51%		146.024.162		110.09 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		2 Laporan		16.67 %		2 Laporan		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0		59.743.920		3.178.401		5.32%		3.178.401		N/A		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			472.418.617		605.653.668		640.314.179		0		0.00%		605.653.668		128.20%		
			Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100.00 %		3 jenis		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			304.879.739		274.658.191		295.816.172		0		0.00%		274.658.191		90.09 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			166.477.578		167.340.752		167.920.381		0		0.00%		167.340.752		100.52 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.061.298		163.654.725		174.827.622		0		0.00%		163.654.725		15420%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (63 Puskesmas)	63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		100.00 %		63 Unit Kerja		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			0		0		1.750.000		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	N/A		N/A		1 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0.00 %		0 Unit Kerja		N/A		Dinas Kesehatan	
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			717.960.756		1.065.252.803		1.035.267.081		125.040.747		12.08%		1.190.293.550		165.79%		
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%		100.00 %		100%		23.02 %		23.02 %		23.02 %		23.02%		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Rumah Sehat	88.22 %		88.42 %		88.21 %		88.51 %		100.34 %		88.51 %		100.33%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	60%		60.32 %		58%		25.4 %		43.79 %		25.4 %		42.33%		Dinas Kesehatan	-
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.100 %		0.08 %		0.101 %		0.04 %		160.40 %		0.04 %		160.00		Dinas Kesehatan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%		100.00 %		100%		10.74 %		10.74 %		10.74 %		10.74%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Eka Candrarini	%		0.00		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini	-
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Mutu di RSUD Eka Candrarini	%		0.00		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini	-
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	84.13 %		100.00 %		82.54 %		100%		121.15 %		100%		118.86%		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82.65 %		100.00 %		82.60 %		28.54 %		34.55 %		28.54 %		34.53%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan kelas rumah sakit	%		0.00		90%		99.23 %		110.26 %		99.23 %		N/A		RSUD Eka Candrarini	-
			Persentase Jaminan Kesehatan	98.00 %		99.30 %		97.60 %		94.6 %		96.93 %		94.6 %		96.53%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	100%		104.72 %		98%		104.7 %		106.84 %		104.7 %		104.70%		RSUD Bhakti Dharma Husada	-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98.08 %		100.00 %		98.08 %		100%		101.96 %		100%		101.96%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-
			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99.21 %		100.29 %		99.20 %		12.74 %		12.84 %		12.74 %		12.84%		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99.07 %		100.86 %		99.06 %		15.33 %		15.48 %		15.33 %		15.47%		Dinas Kesehatan	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			175.358.764		529.103.302		511.131.113		540.475		0.11%		529.643.777		302.03%		
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit		64 Unit		64 Unit		64 Unit		100.00 %		64 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		100%		0%		0.00 %		0%		N/A		RSUD Eka Candrarini	
			Jumlah Unit Layanan yang Terpenuhi Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		N/A		RSUD Eka Candrarini	
			Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit		64 Unit		64 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 unit		16 unit		14 unit		18 unit		128.57 %		18 unit		128.57 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		33.33 %		1 Dokumen		33.33 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0002	**Pembangunan Puskesmas**			0		11.179.738		10.000.000		0		0.00%		11.179.738		N/A		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	N/A		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0001	**Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya**			110.381.289		423.106.433		353.443.210		0		0.00%		423.106.433		383.31 %		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0020	**Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			20.455.226		3.329.056		4.194.182		5.600		0.13%		3.334.656		16.30 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit		33 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			8.332.225		1.307.811		12.865.629		8.400		0.07%		1.316.211		15.80 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit		16 Unit		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			1.772.987		49.642		1.432.448		8.400		0.59%		58.042		3.27 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			1.388.852		68.602.020		4.244.536		0		0.00%		68.602.020		4,939.48 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		88 Unit		30 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0014	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**			0		0		55.140.055		2.600		0.00%		2.600		N/A		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	N/A		N/A		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.02.2.01.0023	**Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan**			9.093.726		2.286.447		23.670.595		6.538		0.03%		2.292.985		25.22 %		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		6 Paket		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0023	**Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan**			0		0		9.830.144		500.737		5.09%		500.737		N/A		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	N/A		N/A		3 Paket		3 Paket		100.00 %		3 Paket		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.02.2.01.0007	**Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			101.369		41.000		71.200		8.200		11.52%		49.200		48.54 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		4 Unit		3 Unit		1 Unit		33.33 %		1 Unit		33.33 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			103.983		15.366.331		27.850.077		0		0.00%		15.366.331		14,777.80 %		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			926.120		317.573		250.000		0		0.00%		317.573		34.29 %		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			22.802.988		1.654.752		8.139.036		0		0.00%		1.654.752		7.26 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			484.382.171		534.537.125		519.502.232		124.471.214		23.96%		659.008.339		136.05%		
			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan		3 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		100.00 %		153 Kelurahan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan		6 kegiatan		4 kegiatan		2 kegiatan		50.00 %		2 kegiatan		50.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan		6 kegiatan		4 kegiatan		2 kegiatan		50.00 %		2 kegiatan		50.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		64 Puskesmas		101.59 %		64 Puskesmas		101.59 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		100.00 %		3 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	100 Dokumen		145 Dokumen		70 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi		N/A		700 Lokasi		271 Lokasi		38.71 %		271 Lokasi		38.71 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa		-83935 jiwa		105 jiwa		0 jiwa		0.00 %		0 jiwa		0%		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0034	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			0		76.198		131.944		7.981		6.05%		84.179		N/A		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0034	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			0		49.345		115.500		6.796		5.88%		56.140		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0034	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			0		168.892		153.755		0		0.00%		168.892		N/A		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (63 Puskesmas)	N/A		756 Dokumen		756 Dokumen		124 Dokumen		16,40%		124 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**			773.640		42.768.309		47.779.639		2.405.916		5.06%		45.174.230		5839,18%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen		756 Dokumen		130 Dokumen		17,20%		130 Dokumen		17,20%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0025	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			19.478.405		2.374.442		622.389		11.200		1.80%		2.385.642		12.25 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		20 Dokumen		12 Dokumen		5 Dokumen		41.67 %		5 Dokumen		41.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0025	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			973.287		950.160		6.487.611		0		0.00%		950.160		97,62%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen		756 Dokumen		129 Dokumen		17,06%		129 Dokumen		17,06%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0028	**Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional**			0		887.249		918.131		23.712		2.58%		910.961		N/A		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	N/A		2 Paket		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0026	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**			434.139.730		438.970.123		426.213.353		121.657.939		28.54%		560.628.062		129.14 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0047	**Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan**			0		0		227280		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (63 Puskesmas)	N/A		N/A		63 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0014	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana**			175.559		396.902		773.719		54.746		7.08%		451.648		257.26 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		dan/atau Berpotensi Bencana																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0		0		2.377.186		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A		N/A		152252 Orang		57960 Orang		38.07 %		57960 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0		385.176		387.650		0		0.00%		385.176		N/A		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A		40590 Orang		4401 Orang		4361 Orang		99.09 %		4361 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			25.123		164.789		301.789		0		0.00%		164.789		655,93%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen		756 Dokumen		128 Dokumen		16,93%		128 Dokumen		16,93%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			3.281.051		0		110.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41553 Orang		N/A		37187 Orang		6452 Orang		17.35 %		6452 Orang		15.53 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			9.146.714		2.409.272		4.358.980		51.921		1.19%		2.461.193		26.91 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43532 Orang		36837 Orang		43532 Orang		8383 Orang		19.26 %		8383 Orang		19.26 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.280		65.340		0		0.00%		14.280		426.31 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	739 Orang		1022 Orang		739 Orang		265 Orang		35.86 %		265 Orang		35.86 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		7.320		23.232		0		0.00%		7.320		218.53 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang		189 Orang		220 Orang		48 Orang		21.82 %		48 Orang		21.82 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang		412 Orang		540 Orang		113 Orang		20.93 %		113 Orang		20.93 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.640		46.464		0		0.00%		9.640		287.79 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang		188 Orang		217 Orang		50 Orang		23.04 %		50 Orang		23.04 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		4.880		46.464		0		0.00%		4.880		145.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	929 Orang		575 Orang		929 Orang		197 Orang		21.21 %		197 Orang		21.21 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		19.040		75.504		0		0.00%		19.040		568.41 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	825 Orang		786 Orang		825 Orang		187 Orang		22.67 %		187 Orang		22.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		19.520		23.232		0		0.00%		19.520		582.74 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang		562 Orang		673 Orang		148 Orang		21.99 %		148 Orang		21.99 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang		658 Orang		760 Orang		173 Orang		22.76 %		173 Orang		22.76 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		19.520		75.504		0		0.00%		19.520		582.74 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1029 Orang		540 Orang		1029 Orang		183 Orang		17.78 %		183 Orang		17.78 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		6.100		23.232		0		0.00%		6.100		182.11 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang		311 Orang		360 Orang		81 Orang		22.50 %		81 Orang		22.50 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.400		65.340		0		0.00%		9.400		280.62 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1286 Orang		964 Orang		1286 Orang		161 Orang		12.52 %		161 Orang		12.52 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		16.225		75.504		0		0.00%		16.225		484.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang		499 Orang		670 Orang		135 Orang		20.15 %		135 Orang		20.15 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang		715 Orang		595 Orang		104 Orang		17.48 %		104 Orang		17.48 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		13.680		75.504		0		0.00%		13.680		408.39 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	969 Orang		888 Orang		969 Orang		215 Orang		22.19 %		215 Orang		22.19 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		56.628		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	813 Orang		725 Orang		813 Orang		118 Orang		14.51 %		118 Orang		14.51 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		4.820		23.232		0		0.00%		4.820		143.89 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang		624 Orang		277 Orang		122 Orang		44.04 %		122 Orang		44.04 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		10.300		46.464		0		0.00%		10.300		307.49 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		282 Orang		295 Orang		67 Orang		22.71 %		67 Orang		22.71 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang		298 Orang		819 Orang		64 Orang		7.81 %		64 Orang		7.81 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		13.200		65.340		0		0.00%		13.200		394.07 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang		572 Orang		846 Orang		183 Orang		21.63 %		183 Orang		21.63 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		17.600		75.504		0		0.00%		17.600		525.42 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	853 Orang		806 Orang		853 Orang		70 Orang		8.21 %		70 Orang		8.21 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang		449 Orang		577 Orang		90 Orang		15.60 %		90 Orang		15.60 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		18.050		75.504		0		0.00%		18.050		538.85 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1109 Orang		970 Orang		1109 Orang		286 Orang		25.79 %		286 Orang		25.79 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		19.100		75.504		0		0.00%		19.100		570.20 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang		491 Orang		686 Orang		82 Orang		11.95 %		82 Orang		11.95 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		24.160		46.464		0		0.00%		24.160		721.26 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang		514 Orang		606 Orang		157 Orang		25.91 %		157 Orang		25.91 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang		242 Orang		292 Orang		64 Orang		21.92 %		64 Orang		21.92 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		19.520		46.464		0		0.00%		19.520		582.74 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	403 Orang		530 Orang		403 Orang		158 Orang		39.21 %		158 Orang		39.21 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.400		65.340		0		0.00%		14.400		429.89 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang		458 Orang		600 Orang		115 Orang		19.17 %		115 Orang		19.17 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		8.800		46.464		0		0.00%		8.800		262.71 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	399 Orang		228 Orang		399 Orang		64 Orang		16.04 %		64 Orang		16.04 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		17.325		46.464		0		0.00%		17.325		517.21 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang		608 Orang		698 Orang		101 Orang		14.47 %		101 Orang		14.47 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		387 Orang		261 Orang		77 Orang		29.50 %		77 Orang		29.50 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	848 Orang		763 Orang		848 Orang		200 Orang		23.58 %		200 Orang		23.58 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		18.300		65.340		0		0.00%		18.300		546.32 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	899 Orang		712 Orang		899 Orang		171 Orang		19.02 %		171 Orang		19.02 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		7.680		65.340		0		0.00%		7.680		229.27 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	459 Orang		275 Orang		459 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1158 Orang		973 Orang		1158 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		4.850		23.232		0		0.00%		4.850		144.79 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	821 Orang		727 Orang		821 Orang		189 Orang		23.02 %		189 Orang		23.02 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.060		65.340		0		0.00%		14.060		419.74 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang		350 Orang		616 Orang		52 Orang		8.44 %		52 Orang		8.44 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang		789 Orang		844 Orang		227 Orang		26.90 %		227 Orang		26.90 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.700		46.464		0		0.00%		9.700		289.58 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang		638 Orang		755 Orang		269 Orang		35.63 %		269 Orang		35.63 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		4.880		23.232		0		0.00%		4.880		145.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	533 Orang		393 Orang		533 Orang		111 Orang		20.83 %		111 Orang		20.83 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		4.880		23.232		0		0.00%		4.880		145.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	415 Orang		342 Orang		415 Orang		81 Orang		19.52 %		81 Orang		19.52 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610 Orang		544 Orang		610 Orang		114 Orang		18.69 %		114 Orang		18.69 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		19.280		75.504		0		0.00%		19.280		575.57 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1078 Orang		902 Orang		1078 Orang		208 Orang		19.29 %		208 Orang		19.29 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		13.200		65.340		0		0.00%		13.200		394.07 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	642 Orang		556 Orang		642 Orang		131 Orang		20.40 %		131 Orang		20.40 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		6.600		23.232		0		0.00%		6.600		197.03 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang		498 Orang		784 Orang		113 Orang		14.41 %		113 Orang		14.41 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.460		65.340		0		0.00%		14.460		431.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang		476 Orang		536 Orang		105 Orang		19.59 %		105 Orang		19.59 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang		552 Orang		703 Orang		139 Orang		19.77 %		139 Orang		30.55 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		4.880		23.232		0		0.00%		4.880		145.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	703 Orang		417 Orang		455 Orang		347 Orang		76.26 %		347 Orang		49.36 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		18.560		75.504		0		0.00%		18.560		554.08 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1347 Orang		974 Orang		1347 Orang		313 Orang		23.24 %		313 Orang		23.24 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang		986 Orang		618 Orang		143 Orang		23.14 %		143 Orang		23.14 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.550		46.464		0		0.00%		14.550		434.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	788 Orang		489 Orang		788 Orang		152 Orang		19.29 %		152 Orang		19.29 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		5.760		23.232		0		0.00%		5.760		171.96 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1051 Orang		1005 Orang		1051 Orang		110 Orang		10.47 %		110 Orang		10.47 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.610		46.464		0		0.00%		9.610		286.89 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604 Orang		454 Orang		604 Orang		106 Orang		17.55 %		106 Orang		17.55 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		13.200		65.340		0		0.00%		13.200		394.07 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1164 Orang		1216 Orang		1164 Orang		132 Orang		11.34 %		132 Orang		11.34 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		6.600		23.232		0		0.00%		6.600		197.03 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang		227 Orang		245 Orang		60 Orang		24.49 %		60 Orang		24.49 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang		378 Orang		586 Orang		47 Orang		8.02 %		47 Orang		15.77 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		18.680		23.232		0		0.00%		18.680		557.66 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang		219 Orang		298 Orang		67 Orang		22.48 %		67 Orang		11.43 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		26.136		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	942 Orang		575 Orang		942 Orang		162 Orang		17.20 %		162 Orang		17.20 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		21.960		65.340		0		0.00%		21.960		655.58 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang		329 Orang		354 Orang		57 Orang		16.10 %		57 Orang		16.10 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	719 Orang		549 Orang		719 Orang		141 Orang		19.61 %		141 Orang		19.61 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		17.600		75.504		0		0.00%		17.600		525.42 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang		666 Orang		732 Orang		184 Orang		25.14 %		184 Orang		25.14 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang		705 Orang		846 Orang		203 Orang		24.00 %		203 Orang		24.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		23.232		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613 Orang		458 Orang		613 Orang		111 Orang		18.11 %		111 Orang		18.11 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		11.280		23.232		0		0.00%		11.280		336.75 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1123 Orang		1049 Orang		1123 Orang		89 Orang		7.93 %		89 Orang		7.93 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0		0		41.970		0		0.00%		0		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0017	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**			2.942.877		777.031		397.000		12.904		3.25%		789.935		26.84 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0017	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**			2.743.398		0		67.750		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (63 Puskesmas)	N/A		N/A		756 Dokumen		126 Dokumen		16,67%		2 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0042	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria**			0		12.222		27.000		0		0.00%		12.222		N/A		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	N/A		10 Orang		10 Orang		1 Orang		10.00 %		1 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0		0		490.000		2.178		0.44%		2.178		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		5552 Orang		3129 Orang		56.36 %		3129 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0		0		5.040		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		88 Orang		105 Orang		119.32 %		105 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0		0		1.980		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		28 Orang		18 Orang		64.29 %		18 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0		0		3.600		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		52 Orang		34 Orang		65.38 %		34 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.800		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		28 Orang		9 Orang		32.14 %		9 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.240		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		115 Orang		84 Orang		73.04 %		84 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.520		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		115 Orang		53 Orang		46.09 %		53 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.600		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		68 Orang		33 Orang		48.53 %		33 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		4.500		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		105 Orang		49 Orang		46.67 %		49 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.160		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		110 Orang		21 Orang		19.09 %		21 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.340		0		0.00%		0		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		42 Orang		44 Orang		104.76 %		44 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.510		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		172 Orang		32 Orang		18.60 %		32 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.430		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		81 Orang		42 Orang		51.85 %		42 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.600		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		75 Orang		29 Orang		38.67 %		29 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.580		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		114 Orang		19 Orang		16.67 %		19 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.040		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		112 Orang		128 Orang		114.29 %		128 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.340		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	N/A		N/A		39 Orang		19 Orang		48.72 %		19 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar																
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.160		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		33 Orang		9 Orang		27.27 %		9 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.160		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		85 Orang		10 Orang		11.76 %		10 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.420		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		97 Orang		34 Orang		35.05 %		34 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.700		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		100 Orang		8 Orang		8.00 %		8 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.060		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		77 Orang		83 Orang		107.79 %		83 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		6.660		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		152 Orang		41 Orang		26.97 %		41 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.700		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		87 Orang		23 Orang		26.44 %		23 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		4.140		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		74 Orang		477 Orang		644.59 %		477 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.800		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		36 Orang		12 Orang		33.33 %		12 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.340		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		46 Orang		10 Orang		21.74 %		10 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.040		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		84 Orang		47 Orang		55.95 %		47 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.700		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		56 Orang		57 Orang		101.79 %		57 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.815		0		0.00%		0		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		97 Orang		8 Orang		8.25 %		8 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.800		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		28 Orang		33 Orang		117.86 %		33 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.880		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		105 Orang		15 Orang		14.29 %		15 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		7.020		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		128 Orang		46 Orang		35.94 %		46 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.960		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		92 Orang		55 Orang		59.78 %		55 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		6.660		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		148 Orang		63 Orang		42.57 %		63 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		4.500		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	N/A		N/A		87 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar																
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0	0			2.880		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		77 Orang		53 Orang		68.83 %		53 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0	0			3.960		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		101 Orang		31 Orang		30.69 %		31 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0	0			4.500		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		115 Orang		59 Orang		51.30 %		59 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0	0			3.060		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		66 Orang		40 Orang		60.61 %		40 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0	0			3.600		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		58 Orang		18 Orang		31.03 %		18 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			0	0			4.320		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		73 Orang		35 Orang		47.95 %		35 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.940		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		138 Orang		61 Orang		44.20 %		61 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.580		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		100 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		4.860		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		87 Orang		42 Orang		48.28 %		42 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		7.380		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		132 Orang		36 Orang		27.27 %		36 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.420		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		61 Orang		14 Orang		22.95 %		14 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		6.300		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		100 Orang		23 Orang		23.00 %		23 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		7.020		0		0.00%		0		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		135 Orang		55 Orang		40.74 %		55 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.710		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		77 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.040		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		91 Orang		32 Orang		35.16 %		32 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		6.660		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		115 Orang		161 Orang		140.00 %		161 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.060		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		69 Orang		33 Orang		47.83 %		33 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.240		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		143 Orang		139 Orang		97.20 %		139 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.980		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	N/A		N/A		32 Orang		33 Orang		103.13 %		33 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar																
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.980		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		37 Orang		17 Orang		45.95 %		17 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.760		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		102 Orang		38 Orang		37.25 %		38 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.960		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		113 Orang		41 Orang		36.28 %		41 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.440		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		50 Orang		163 Orang		326.00 %		163 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.940		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		105 Orang		55 Orang		52.38 %		55 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.940		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		109 Orang		46 Orang		42.20 %		46 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.060		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		111 Orang		50 Orang		45.05 %		50 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		4.140		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		73 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.400		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		126 Orang		51 Orang		40.48 %		51 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0		756.798		841.880		0		0.00%		756.798		N/A		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1477 Orang		205 Orang		534 Orang		260.49 %		534 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.350		1.057.352		455.082		66.008		14.50%		1.123.360		33,536.14 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1235 Orang		39500 Orang		52741 Orang		11761 Orang		22.30 %		11761 Orang		952.31 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0		710.160		977.288		0		0.00%		710.160		N/A		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2079 Orang		666 Orang		451 Orang		67.72 %		451 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		13.451.339		488.160		109.312		22.39%		13.560.650		404,831.78 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang		84039 Orang		60512 Orang		30293 Orang		50.06 %		30293 Orang		50.06 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		3.600		19.872		0		0.00%		3.600		107.47 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang		1604 Orang		949 Orang		219 Orang		23.08 %		219 Orang		23.08 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		600		16.872		0		0.00%		600		17.91 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang		428 Orang		283 Orang		28 Orang		9.89 %		28 Orang		9.89 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		2.640		18.432		0		0.00%		2.640		78.81 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 Orang		914 Orang		707 Orang		244 Orang		34.51 %		244 Orang		34.51 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		900		17.472		0		0.00%		900		26.87 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang		389 Orang		293 Orang		82 Orang		27.99 %		82 Orang		27.99 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		60		16.362		0		0.00%		60		1.79 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 Orang		1501 Orang		1293 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.512		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1179 Orang		1561 Orang		1179 Orang		7820 Orang		663.27 %		7820 Orang		663.27 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		1.980		17.472		0		0.00%		1.980		59.11 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 Orang		995 Orang		712 Orang		290 Orang		40.73 %		290 Orang		40.73 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		7.200		23.472		0		0.00%		7.200		214.94 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1164 Orang		1307 Orang		1164 Orang		264 Orang		22.68 %		264 Orang		22.68 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		9.450		17.712		0		0.00%		9.450		282.11 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 Orang		1552 Orang		1216 Orang		332 Orang		27.30 %		332 Orang		27.30 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		840		17.172		0		0.00%		840		25.08 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang		835 Orang		463 Orang		200 Orang		43.20 %		200 Orang		43.20 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		7.020		21.672		0		0.00%		7.020		209.57 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 Orang		3478 Orang		1879 Orang		363 Orang		19.32 %		363 Orang		19.32 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		17.712		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 Orang		1117 Orang		887 Orang		359 Orang		40.47 %		359 Orang		40.47 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		180		16.632		0		0.00%		180		5.37 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 Orang		1035 Orang		834 Orang		303 Orang		36.33 %		303 Orang		36.33 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		1.260		18.072		0		0.00%		1.260		37.62 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 Orang		1640 Orang		1203 Orang		211 Orang		17.54 %		211 Orang		17.54 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		720		18.672		0		0.00%		720		21.49 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	1273 Orang		1891 Orang		1273 Orang		413 Orang		32.44 %		413 Orang		32.44 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		2.580		17.712		0		0.00%		2.580		77.02 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang		539 Orang		423 Orang		193 Orang		45.63 %		193 Orang		45.63 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		1.560		19.872		0		0.00%		1.560		46.57 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang		616 Orang		354 Orang		479 Orang		135.31 %		479 Orang		135.31 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		720		17.712		0		0.00%		720		21.49 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang		1866 Orang		917 Orang		569 Orang		62.05 %		569 Orang		62.05 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		23.472		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 Orang		1778 Orang		1067 Orang		308 Orang		28.87 %		308 Orang		28.87 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		17.172		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang		1380 Orang		1065 Orang		263 Orang		24.69 %		263 Orang		24.69 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		420		17.172		0		0.00%		420		12.54 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang		1671 Orang		847 Orang		117 Orang		13.81 %		117 Orang		13.81 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		90		16.992		0		0.00%		90		2.69 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 Orang		2326 Orang		1514 Orang		561 Orang		37.05 %		561 Orang		37.05 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		240		16.632		0		0.00%		240		7.16 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang		1074 Orang		917 Orang		242 Orang		26.39 %		242 Orang		26.39 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.272		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 Orang		1687 Orang		750 Orang		716 Orang		95.47 %		716 Orang		95.47 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		2.520		17.532		0		0.00%		2.520		75.23 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 Orang		1186 Orang		391 Orang		711 Orang		181.84 %		711 Orang		181.84 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		2.160		18.432		0		0.00%		2.160		64.48 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang		540 Orang		496 Orang		183 Orang		36.90 %		183 Orang		36.90 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		600		17.352		0		0.00%		600		17.91 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang		1159 Orang		941 Orang		299 Orang		31.77 %		299 Orang		31.77 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		780		16.572		0		0.00%		780		23.29 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 Orang		681 Orang		593 Orang		3858 Orang		650.59 %		3858 Orang		650.59 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.272		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 Orang		1262 Orang		1029 Orang		393 Orang		38.19 %		393 Orang		38.19 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		6.840		23.472		0		0.00%		6.840		204.20 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 Orang		407 Orang		298 Orang		104 Orang		34.90 %		104 Orang		34.90 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.572		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 Orang		1536 Orang		1163 Orang		251 Orang		21.58 %		251 Orang		21.58 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		6.360		21.660		0		0.00%		6.360		189.87 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 Orang		1606 Orang		1323 Orang		1259 Orang		95.16 %		1259 Orang		95.16 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		1.500		17.772		0		0.00%		1.500		44.78 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 Orang		1081 Orang		1010 Orang		200 Orang		19.80 %		200 Orang		19.80 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		1.320		20.592		0		0.00%		1.320		39.41 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 Orang		2039 Orang		1649 Orang		536 Orang		32.50 %		536 Orang		32.50 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		19.872		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 Orang		1188 Orang		932 Orang		257 Orang		27.58 %		257 Orang		27.58 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		540		20.592		0		0.00%		540		16.12 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843 Orang		1105 Orang		843 Orang		362 Orang		42.94 %		362 Orang		42.94 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		6.420		21.072		0		0.00%		6.420		191.66 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	1137 Orang		1970 Orang		1137 Orang		412 Orang		36.24 %		412 Orang		36.24 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		6.930		22.872		0		0.00%		6.930		206.88 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang		1367 Orang		1268 Orang		76 Orang		5.99 %		76 Orang		5.99 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		1.110		17.172		0		0.00%		1.110		33.14 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 Orang		617 Orang		741 Orang		185 Orang		24.97 %		185 Orang		24.97 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		1.800		16.932		0		0.00%		1.800		53.74 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 Orang		935 Orang		630 Orang		111 Orang		17.62 %		111 Orang		17.62 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.872		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 Orang		1361 Orang		798 Orang		555 Orang		69.55 %		555 Orang		69.55 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		4.320		18.432		0		0.00%		4.320		128.97 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 Orang		1560 Orang		1535 Orang		710 Orang		46.25 %		710 Orang		46.25 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.632		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1115 Orang		1273 Orang		1115 Orang		103 Orang		9.24 %		103 Orang		9.24 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		360		16.992		0		0.00%		360		10.75 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	945 Orang		1200 Orang		945 Orang		101 Orang		10.69 %		101 Orang		10.69 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		870		18.072		0		0.00%		870		25.97 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 Orang		2756 Orang		1444 Orang		213 Orang		14.75 %		213 Orang		14.75 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		300		17.712		0		0.00%		300		8.96 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 Orang		1105 Orang		1127 Orang		400 Orang		35.49 %		400 Orang		58.82 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		360		17.352		0		0.00%		360		10.75 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1127 Orang		867 Orang		680 Orang		195 Orang		28.68 %		195 Orang		17.30 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.272		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 Orang		1376 Orang		1383 Orang		487 Orang		35.21 %		487 Orang		35.21 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		900		16.872		0		0.00%		900		26.87 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 Orang		1002 Orang		840 Orang		247 Orang		29.40 %		247 Orang		29.40 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		7.200		12.800		0		0.00%		7.200		214.94 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 Orang		1524 Orang		1018 Orang		329 Orang		32.32 %		329 Orang		32.32 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		6.300		17.712		0		0.00%		6.300		188.08 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 Orang		1251 Orang		1246 Orang		81 Orang		6.50 %		81 Orang		6.50 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		2.100		18.672		0		0.00%		2.100		62.69 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang		2033 Orang		779 Orang		416 Orang		53.40 %		416 Orang		53.40 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		840		9.220		0		0.00%		840		25.08 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 Orang		2884 Orang		1562 Orang		151 Orang		9.67 %		151 Orang		9.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		3.600		19.872		0		0.00%		3.600		107.47 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang		429 Orang		354 Orang		117 Orang		33.05 %		117 Orang		33.05 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		7.200		21.312		0		0.00%		7.200		214.94 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang		1078 Orang		1148 Orang		397 Orang		34.58 %		397 Orang		108.77 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		14.160		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang		1424 Orang		365 Orang		96 Orang		26.30 %		96 Orang		8.36 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		4.200		17.472		0		0.00%		4.200		125.38 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 Orang		1528 Orang		1194 Orang		313 Orang		26.21 %		313 Orang		26.21 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		540		16.572		0		0.00%		540		16.12 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang		647 Orang		552 Orang		73 Orang		13.22 %		73 Orang		13.22 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		18.192		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	1176 Orang		1483 Orang		1176 Orang		277 Orang		23.55 %		277 Orang		23.55 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		180		17.352		0		0.00%		180		5.37 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 Orang		1464 Orang		1186 Orang		261 Orang		22.01 %		261 Orang		22.01 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		480		16.362		0		0.00%		480		14.33 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 Orang		1966 Orang		1196 Orang		532 Orang		44.48 %		532 Orang		44.48 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		3.000		18.972		0		0.00%		3.000		89.56 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 Orang		968 Orang		829 Orang		193 Orang		23.28 %		193 Orang		23.28 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		3.570		17.772		0		0.00%		3.570		106.58 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 Orang		1765 Orang		1404 Orang		285 Orang		20.30 %		285 Orang		20.30 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			4.295.627		28.000		112.095		5.600		5.00%		33.600		0.78 %		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337268 Orang		367909 Orang		337268 Orang		99501 Orang		29.50 %		99501 Orang		29.50 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.380		1.200		0		0.00%		1.380		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3990 Orang		5706 Orang		1138 Orang		19.94 %		1138 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.850		1.050		0		0.00%		2.850		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1357 Orang		1656 Orang		152 Orang		9.18 %		152 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		6.210		1.260		0		0.00%		6.210		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1659 Orang		3874 Orang		281 Orang		7.25 %		281 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		3.960		1.320		0		0.00%		3.960		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1454 Orang		1608 Orang		431 Orang		26.80 %		431 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		3.420		1.140		0		0.00%		3.420		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2794 Orang		6988 Orang		729 Orang		10.43 %		729 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.850		3.600		0		0.00%		2.850		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5526 Orang		6896 Orang		1321 Orang		19.16 %		1321 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		3.450		1.350		0		0.00%		3.450		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		9593 Orang		4331 Orang		255 Orang		5.89 %		255 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		7.500		5.400		0		0.00%		7.500		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2657 Orang		5976 Orang		985 Orang		16.48 %		985 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.880		2.580		0		0.00%		2.880		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1144 Orang		6383 Orang		176 Orang		2.76 %		176 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.490		1.200		0		0.00%		2.490		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat	N/A		1114 Orang		3074 Orang		357 Orang		11.61 %		357 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pelayanan kesehatan sesuai standar																
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		3.330		1.140		0		0.00%		3.330		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		7158 Orang		10240 Orang		797 Orang		7.78 %		797 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		6.120		3.120		0		0.00%		6.120		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2083 Orang		4690 Orang		954 Orang		20.34 %		954 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.140		1.920		0		0.00%		1.140		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1491 Orang		4449 Orang		229 Orang		5.15 %		229 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.500		1.800		0		0.00%		1.500		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3579 Orang		6652 Orang		937 Orang		14.09 %		937 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		4.440		2.280		0		0.00%		4.440		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4324 Orang		6300 Orang		810 Orang		12.86 %		810 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.050		900		0		0.00%		1.050		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1809 Orang		2299 Orang		613 Orang		26.66 %		613 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.730		1.170		0		0.00%		2.730		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1940 Orang		2048 Orang		339 Orang		16.55 %		339 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		6.720		1.440		0		0.00%		6.720		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		8127 Orang		4565 Orang		1973 Orang		43.22 %		1973 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		780		1.620		0		0.00%		780		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4541 Orang		5505 Orang		1845 Orang		33.51 %		1845 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.020		2.610		0		0.00%		1.020		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3787 Orang		6006 Orang		1045 Orang		17.40 %		1045 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		840		660		0		0.00%		840		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1947 Orang		4530 Orang		497 Orang		10.97 %		497 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.410		1.620		0		0.00%		1.410		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		10378 Orang		7997 Orang		3999 Orang		50.01 %		3999 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		870		1.620		0		0.00%		870		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1605 Orang		5361 Orang		254 Orang		4.74 %		254 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		540		720		0		0.00%		540		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4490 Orang		6861 Orang		797 Orang		11.62 %		797 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		7.560		2.520		0		0.00%		7.560		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3399 Orang		2058 Orang		148 Orang		7.19 %		148 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.400		960		0		0.00%		2.400		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2165 Orang		2626 Orang		434 Orang		16.53 %		434 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		5.820		2.460		0		0.00%		5.820		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2749 Orang		4993 Orang		259 Orang		5.19 %		259 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		4.740		3.300		0		0.00%		4.740		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2357 Orang		3397 Orang		3 Orang		0.09 %		3 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		3.600		2.700		0		0.00%		3.600		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		6750 Orang		5718 Orang		772 Orang		13.50 %		772 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		9.480		1.260		0		0.00%		9.480		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2501 Orang		1631 Orang		432 Orang		26.49 %		432 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		0		1.680		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4704 Orang		6600 Orang		799 Orang		12.11 %		799 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.460		1.200		0		0.00%		2.460		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat	N/A		4082 Orang		7453 Orang		622 Orang		8.35 %		622 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pelayanan kesehatan sesuai standar																
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.250		3.600		0		0.00%		2.250		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4822 Orang		5331 Orang		250 Orang		4.69 %		250 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.340		4.350		0		0.00%		2.340		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1144 Orang		8294 Orang		284 Orang		3.42 %		284 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		150		1.020		0		0.00%		150		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		748 Orang		5274 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.320		2.520		0		0.00%		1.320		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		6252 Orang		4483 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		4.560		2.040		0		0.00%		4.560		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4941 Orang		5796 Orang		496 Orang		8.56 %		496 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		6.480		4.050		0		0.00%		6.480		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2979 Orang		6772 Orang		1240 Orang		18.31 %		1240 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.550		1.260		0		0.00%		2.550		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3572 Orang		3893 Orang		413 Orang		10.61 %		413 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.350		1.800		0		0.00%		1.350		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3798 Orang		3698 Orang		245 Orang		6.63 %		245 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.500		2.760		0		0.00%		1.500		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5253 Orang		4033 Orang		2960 Orang		73.39 %		2960 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.250		1.800		0		0.00%		2.250		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4761 Orang		8285 Orang		490 Orang		5.91 %		490 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.400		1.680		0		0.00%		2.400		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2474 Orang		5544 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		960		1.200		0		0.00%		960		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4669 Orang		5372 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.590		3.240		0		0.00%		1.590		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		6341 Orang		7599 Orang		325 Orang		4.28 %		325 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		11.280		4.680		0		0.00%		11.280		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3438 Orang		4170 Orang		1459 Orang		34.99 %		1459 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.980		2.160		0		0.00%		1.980		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1694 Orang		5640 Orang		681 Orang		12.07 %		681 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		8.100		4.350		0		0.00%		8.100		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		10624 Orang		8152 Orang		884 Orang		10.84 %		884 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		11.010		2.040		0		0.00%		11.010		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2451 Orang		4512 Orang		243 Orang		5.39 %		243 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		4.050		1.560		0		0.00%		4.050		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		14406 Orang		5973 Orang		6018 Orang		100.75 %		6018 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.650		1.890		0		0.00%		1.650		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5908 Orang		7354 Orang		631 Orang		8.58 %		631 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		9.060		3.960		0		0.00%		9.060		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5130 Orang		4285 Orang		1724 Orang		40.23 %		1724 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.470		300		0		0.00%		1.470		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		12202 Orang		8704 Orang		3677 Orang		42.24 %		3677 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		3.300		1.890		0		0.00%		3.300		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat	N/A		3380 Orang		1832 Orang		789 Orang		43.07 %		789 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pelayanan kesehatan sesuai standar																
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.800		1.320		0		0.00%		1.800		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1947 Orang		2402 Orang		96 Orang		4.00 %		96 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.190		1.500		0		0.00%		2.190		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5706 Orang		6072 Orang		412 Orang		6.79 %		412 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		5.790		1.800		0		0.00%		5.790		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		6227 Orang		7137 Orang		1511 Orang		21.17 %		1511 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.440		1.080		0		0.00%		1.440		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		499 Orang		2687 Orang		122 Orang		4.54 %		122 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.890		2.070		0		0.00%		1.890		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5855 Orang		6253 Orang		952 Orang		15.22 %		952 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		0		3.240		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4211 Orang		6257 Orang		1190 Orang		19.02 %		1190 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.400		3.600		0		0.00%		2.400		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2810 Orang		6172 Orang		501 Orang		8.12 %		501 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0005	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**			0		6.300		2.640		0		0.00%		6.300		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3814 Orang		4345 Orang		178 Orang		4.10 %		178 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**			0		4.770		3.060		0		0.00%		4.770		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3627 Orang		8525 Orang		187 Orang		2.19 %		187 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0006	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**			3.226.155		1.198.520		1.312.197		11.200		0.85%		1.209.720		37.50 %		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2034759 Orang		1427657 Orang		2034759 Orang		300867 Orang		14.79 %		300867 Orang		14.79 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0009	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**			0		1.300.365		55.000		0		0.00%		1.300.365		N/A		
			Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		91045 Orang		104362 Orang		23036 Orang		22.07 %		23036 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0008	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**			18.866		124.862		133.000		0		0.00%		124.862		661.84 %		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749560 Orang		612182 Orang		749560 Orang		73585 Orang		9.82 %		73585 Orang		9.82 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0044	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**			0		0		485.491		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (63 Puskesmas)	N/A		N/A		63 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0019	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya**			315.144		341.866		461.000		28.400		6.16%		370.266		117.49 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0018	**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**			0		353.169		184.850		0		0.00%		353.169		N/A		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0020	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			438.104		92.047		107.873		15.401		14.28%		107.448		24.53 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0020	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			422.037		6.361.948		425.178		0		0.00%		6.361.948		1507,44%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen		756 Dokumen		128 Dokumen		16,93%		128 Dokumen		16,93%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0046	**Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak**			0		243.375		38.400		0		0.00%		243.375		N/A		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			363.311		1.255.623		123.973		14.700		11.86%		1.270.323		349.65%		
			Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi		3 Aplikasi		3 Aplikasi		0 Aplikasi		0.00 %		0 Aplikasi		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03.0002	**Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**			363.311		1.255.623		123.973		14.700		11.86%		1.270.323		349.65 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		1 Dokumen		20.00 %		1 Dokumen		20.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			57.856.510		356.754		4.509.762		14.357		0.32%		371.111		0.64%		
			Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga		126 Lembaga		122 Lembaga		29 Lembaga		23.77 %		29 Lembaga		23.77 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Fasilitas kesehatan yang dipantau di RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.02.2.04.0003	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**			47.189.112		287.954		844.298		5.600		0.66%		293.554		0.62 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.0003	**Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**			0		0		3.476.799		3.157		0.09%		3.157		N/A		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	N/A		N/A		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		N/A		RSUD Eka Candrarini	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			10.667.398		68.800		188.666		5.600		2.97%		74.400		0.70 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
6	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			3.841.543		2.197.926		2.255.217		19.367		0.86%		2.217.293		57.72%		
			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53.52 %		53.72 %		53.51 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kesehatan	-
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			3.841.543		219.399		519.375		19.367		3.73%		238.766		6.22%		
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang		289 Orang		63 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			3.841.543		219.399		519.375		19.367		3.73%		238.766		6.22 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		1.978.527		1.735.842		0		0.00%		1.978.527		N/A		
			Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	N/A		4 Kegiatan		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		1.978.527		1.735.842		0		0.00%		1.978.527		N/A		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	N/A		289 Orang		189 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
7	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			2.790.371		159.921		476.543		5.600		1.18%		165.521		5.93%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kesehatan	-
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			2.790.371		159.921		476.543		5.600		1.18%		165.521		5.93%		
			Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT		217 PIRT		217 PIRT		34 PIRT		15.67 %		34 PIRT		15.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			2.790.371		159.921		476.543		5.600		1.18%		165.521		5.93 %		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit		157 Unit		150 Unit		34 Unit		22.67 %		34 Unit		22.67 %		Dinas Kesehatan	
8	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			66.842.725		188.642.062		1.178.720		22.400		1.90%		188.664.462		282.25%		
			Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	-
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.118.740		121.912		181.415		5.600		3.09%		127.512		1.26%		
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		153 Kelurahan		99.35 %		153 Kelurahan		99.35 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			10.118.740		121.912		181.415		5.600		3.09%		127.512		1.26 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			56.723.985		188.520.150		997.305		16.800		1.68%		188.536.950		332.38%		
			Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya	6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		3 Kegiatan		50.00 %		3 Kegiatan		50.00 %		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas																
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.0001	**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**			54.013.675		179.927.583		780.975		16.800		2.15%		179.944.383		333.15 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.0001	**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**			2.710.308		8.592.573		216.320		0		0.00%		8.592.573		317,03%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen		756 Dokumen		189 Dokumen		25.00 %		189 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
9	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			135.419.812		127.475.076		140.369.904		26.191.564		18.66%		153.666.640		113.47%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86.75 %		92.96 %		86.50 %		94.45 %		109.19 %		94.45 %		108.88%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%		99.13 %		95%		99.13 %		104.35 %		99.13 %		104.35%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			344.372		68.900		157.174		28.600		18.20%		97.500		28.31%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			344.372		68.900		157.174		28.600		18.20%		97.500		28.31 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.347.173		47.035.201		51.223.248		10.685.580		20.86%		57.720.781		98.93%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			58.347.173		47.035.201		51.223.248		10.685.580		20.86%		57.720.781		98.93 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan		202 Orang/bulan		202 Orang/bulan		199 Orang/bulan		98.51 %		199 Orang/bulan		101.02 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.691.809		4.996.415		5.756.463		790.072		13.72%		5.786.487		54.12%		
			Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.691.809		4.996.415		5.756.463		790.072		13.72%		5.786.487		54.12 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.036.458		75.374.560		83.233.019		14.687.312		17.65%		90.061.872		136.38%		
			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit		300 unit		300 unit		51 unit		17.00 %		51 unit		15.36 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34.268.991		47.245.936		51.848.762		13.259.814		25.57%		60.505.750		176.56 %		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		7 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			17.184.882		14.348.713		16.093.425		309.527		1.92%		14.658.240		85.30 %		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	76 Unit		73 Unit		73 Unit		13 Unit		17.81 %		13 Unit		17.11 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.582.585		13.779.911		15.290.832		1.117.971		7.31%		14.897.882		102.16 %		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	243 Unit		227 Unit		227 Unit		38 Unit		16.74 %		38 Unit		15.64 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
10	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			50.157.841		58.689.280		51.297.298		12.184.966		23.75%		70.874.246		141.30%		
			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.157.841		58.689.280		51.297.298		12.184.966		23.75%		70.874.246		141.30%		
			Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	64 unit		63 unit		70 unit		36 unit		51.43 %		36 unit		56.25 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			50.157.841		58.689.280		51.297.298		12.184.966		23.75%		70.874.246		141.30 %		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	285 Unit		270 Unit		290 Unit		52 Unit		17.93 %		52 Unit		18.25 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
11	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			9.306.760		8.310.266		7.140.326		1.338.419		18.74%		9.648.685		103.67%		
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	923 m3		913.00 m3		917 m3		227 m3		24.75 %		227 m3		24.59%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.306.760		8.310.266		7.140.326		1.338.419		18.74%		9.648.685		103.67%		
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		3 Jenis		75.00 %		3 Jenis		75.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan		1 kelurahan		2 kelurahan		121 kelurahan		6,050.00 %		121 kelurahan		6,050.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			7.156.794		6.437.102		5.676.666		1.327.289		23.38%		7.764.390		108.49 %		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit		96 Unit		96 Unit		24 Unit		25.00 %		24 Unit		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			2.149.966		1.107.264		1.463.660		11.131		0.76%		1.118.395		52.02 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga		200 Rumah Tangga		50 Rumah Tangga		361 Rumah Tangga		722.00 %		361 Rumah Tangga		722.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
12	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			582.830.777		399.243.503		881.484.794		286.592.173		32.51%		685.835.676		117.67%		
			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**			582.830.777		399.243.503		881.484.794		286.592.173		32.51%		685.835.676		117.67%		
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi		52 lokasi		200 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen		85 dokumen		80 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1223 lokasi		1299 lokasi		1000 lokasi		159 lokasi		15.90 %		159 lokasi		13.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0031	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan**			103.393.336		80.794.488		70.845.353		18.356.152		25.91%		99.150.640		95.90 %		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan		30 Sistem Drainase Perkotaan		30 Sistem Drainase Perkotaan		22 Sistem Drainase Perkotaan		73.33 %		22 Sistem Drainase Perkotaan		73.33 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0012	**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**			125.161.494		40.483.649		353.128.226		41.986.732		11.89%		82.470.380		65.89 %		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M		9685.02 M		10000 M		0 M		0.00 %		0 M		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0029	**Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan**			246.834.073		234.552.490		250.672.022		192.046.004		76.61%		426.598.494		172.83 %		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	15 Sistem Drainase Perkotaan		21 Sistem Drainase Perkotaan		15 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0025	**Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**			10.118.188		11.241.774		9.210.978		48.471		0.53%		11.290.246		111.58 %		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	15 Sistem Drainase Perkotaan		16 Sistem Drainase Perkotaan		15 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0030	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**			8.038.411		4.009.967		7.306.392		5.011.525		68.59%		9.021.492		112.23 %		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen		56 Dokumen		50 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			89.285.275		28.161.135		190.321.824		29.143.289		15.31%		57.304.424		64.18 %		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	15 Sistem Drainase Perkotaan		10 Sistem Drainase Perkotaan		15 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
13	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			3.183.407		1.693.033		2.193.756		214.012		9.76%		1.907.045		59.91%		
			Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	11%		10.03 %		9%		1.44 %		16.00 %		1.44 %		13.09%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			3.183.407		1.693.033		2.193.756		214.012		9.76%		1.907.045		59.91%		
			Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas		243 berkas		240 berkas		60 berkas		25.00 %		60 berkas		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	14 Dokumen		15 Dokumen		13 Dokumen		6 Dokumen		46.15 %		6 Dokumen		42.86 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			1.771.015		1.006.157		1.413.022		109.159		7.73%		1.115.316		62.98 %		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit		243 Unit		240 Unit		60 Unit		25.00 %		60 Unit		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			1.412.391		686.877		780.734		104.853		13.43%		791.729		56.06 %		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit		15 Unit		13 Unit		7 Unit		53.85 %		7 Unit		53.85 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
14	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			315.023.875		217.399.864		328.262.338		64.097.485		19.53%		281.497.349		89.36%		
			Persentase bangunan yang ber IMB	2.69 %		1.93 %		2.51 %		0.69 %		27.49 %		0.69 %		25.65%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	90%		58.91 %		87%		67.42 %		77.49 %		67.42 %		74.91%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	91.25 %		90.86 %		90.99 %		11.82 %		12.99 %		11.82 %		12.95%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			315.023.875		217.399.864		328.262.338		64.097.485		19.53%		281.497.349		89.36%		
			Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	248 Bangunan		256 Bangunan		246 Bangunan		38 Bangunan		15.45 %		38 Bangunan		15.32 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1768 Berkas		2503 Berkas		1756 Berkas		758 Berkas		43.17 %		758 Berkas		42.87 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1907 Lokasi		2108 Lokasi		1893 Lokasi		622 Lokasi		32.86 %		622 Lokasi		32.62 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0021	**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk**			8.725.773		5.573.497		6.135.320		3.042.002		49.58%		8.615.498		98.74 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	65 Dokumen		68 Dokumen		63 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0022	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**			3.517.554		1.337.490		1.790.467		162.221		9.06%		1.499.711		42.64 %		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1861 Orang		2124 Orang		1861 Orang		622 Orang		33.42 %		622 Orang		33.42 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0018	**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota**			38.016.233		39.029.058		30.200.143		3.409.555		11.29%		42.438.613		111.63 %		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	161 Bangunan Gedung		167 Bangunan Gedung		161 Bangunan Gedung		38 Bangunan Gedung		23.60 %		38 Bangunan Gedung		23.60 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0017	**Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			257.832.869		169.439.525		286.190.604		57.227.461		20.00%		226.666.987		87.91 %		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang D iubahsuaikan	140 Bangunan Gedung		142 Bangunan Gedung		140 Bangunan Gedung		0 Bangunan Gedung		0.00 %		0 Bangunan Gedung		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0023	**Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi**			6.187.321		1.771.494		3.348.039		247.846		7.40%		2.019.340		32.64 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			744.126		248.800		597.764		8.400		1.41%		257.200		34.56 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
15	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			604.516.934		468.777.911		711.160.967		140.262.609		19.72%		609.040.520		100.75%		
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	12.000 meter		53,290.07 meter		11700 meter		0 meter		0.00 %		0 meter		0.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
			Luas jalan yang diperbaiki	210000 m2		446,332.96 m2		190000 m2		62175.15 m2		32.72 %		62175.15 m2		29.61%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			604.516.934		468.777.911		711.160.967		140.262.609		19.72%		609.040.520		100.75%		
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1501 lokasi		3525 lokasi		1501 lokasi		1317 lokasi		87.74 %		1317 lokasi		87.74 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	338 lokasi		218 lokasi		325 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi		6 lokasi		2 lokasi		1 lokasi		50.00 %		1 lokasi		50.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen		146 dokumen		137 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			221.175.434		182.559.259		185.275.192		764.652		0.41%		183.323.912		82.89 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.6 KM		1.02 KM		0.6 KM		0.03 KM		5.00 %		0.03 KM		5.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0032	**Pembangunan Jalan**			273.886.986		204.002.703		414.412.327		116.238.693		28.05%		320.241.397		116.92 %		
			Panjang Jalan yang Dibangun	12 KM		53.29 KM		11.7 KM		0 KM		0.00 %		0 KM		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0046	**Pemeliharaan Rutin Jalan**			87.885.919		61.484.751		91.113.766		19.150.562		21.02%		80.635.313		91.75 %		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM		179.27 KM		40 KM		30.26 KM		75.65 %		30.26 KM		75.65 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0030	**Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa**			14.182.828		9.416.856		9.229.012		111.122		1.20%		9.527.978		67.18 %		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	11.7 KM		53.29 KM		11.7 KM		0 KM		0.00 %		0 KM		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0029	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**			7.385.767		6.572.291		11.130.669		3.997.580		35.91%		10.569.871		143.11 %		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen		77 Dokumen		70 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
16	1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			982.825		472.175		629.803		87.936		13.96%		560.111		56.99%		
			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	100%		100.00 %		97%		21.43 %		22.09 %		21.43 %		21.43%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**			982.825		472.175		629.803		87.936		13.96%		560.111		56.99%		
			Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis		5 jenis		5 jenis		1 jenis		20.00 %		1 jenis		20.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			982.825		472.175		629.803		87.936		13.96%		560.111		56.99 %		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Lembaga		12 Lembaga		14 Lembaga		3 Lembaga		21.43 %		3 Lembaga		21.43 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
17	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			14.227.131		4.836.772		4.512.080		575.206		12.75%		5.411.977		38.04%		
			Persentase pelayanan penataan ruang	96%		102.19 %		96%		35.36 %		36.83 %		35.36 %		36.83%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota			3.956.284		3.029.703		3.027.558		335.188		11.07%		3.364.892		85.05%		
			Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			3.956.284		3.029.703		3.027.558		335.188		11.07%		3.364.892		85.05 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			10.270.847		1.807.068		1.484.522		240.017		16.17%		2.047.086		19.93%		
			Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			2.713.270		740.720		659.149		128.660		19.52%		869.381		32.04 %		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			7.557.576		1.066.348		825.373		111.357		13.49%		1.177.705		15.58 %		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Dokumen		1 Sistem Informasi		0 Sistem Informasi		0.00 %		0 Sistem Informasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
18	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.352.356		30.288.848		41.298.546		6.608.839		16.00%		36.897.687		65.48%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.5 %		95.32 %		89%		96.01 %		107.88 %		96.01 %		107.27%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.425		41.600		78.582		11.700		14.89%		53.300		44.26%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.425		41.600		78.582		11.700		14.89%		53.300		44.26 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		1 Dokumen		14.29 %		1 Dokumen		12.50 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			43.233.748		26.633.975		31.250.731		6.100.518		19.52%		32.734.493		75.72%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			43.233.748		26.633.975		31.250.731		6.100.518		19.52%		32.734.493		75.72 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		100 Orang/bulan		100 Orang/bulan		98 Orang/bulan		98.00 %		98 Orang/bulan		120.99 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.664.298		2.935.398		7.074.258		426.838		6.03%		3.362.236		34.79%		
			Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100.00 %		3 Jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.664.298		2.935.398		7.074.258		426.838		6.03%		3.362.236		34.79 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket		15 Paket		5 Paket		33.33 %		5 Paket		33.33 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.333.885		677.875		2.894.974		69.782		2.41%		747.657		22.43%		
			Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100.00 %		2 Jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.333.885		677.875		2.894.974		69.782		2.41%		747.657		22.43 %		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit		89 Unit		98 Unit		33 Unit		33.67 %		33 Unit		33.67 %		Dinas Perumahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
19	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			40.719.101		14.764.802		20.266.176		3.274.006		16.16%		18.038.807		44.30%		
			Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%		85.70 %		100%		86.95 %		86.95 %		86.95 %		86.95%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.719.101		14.764.802		20.266.176		3.274.006		16.16%		18.038.807		44.30%		
			Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5157 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		100.00 %		5233 Unit Hunian		101.47 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.719.101		14.764.802		20.266.176		3.274.006		16.16%		18.038.807		44.30 %		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen		109 Dokumen		109 Dokumen		109 Dokumen		100.00 %		109 Dokumen		103.81 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
20	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			18.599.004		67.779.206		89.581.794		3.236.224		3.61%		71.015.430		381.82%		
			Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	100%		111.87 %		97%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			18.599.004		67.779.206		89.581.794		3.236.224		3.61%		71.015.430		381.82%		
			Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis		2 jenis		2 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			18.599.004		67.779.206		89.581.794		3.236.224		3.61%		71.015.430		381.82 %		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	405 Unit Rumah		1678 Unit Rumah		1000 Unit Rumah		0 Unit Rumah		0.00 %		0 Unit Rumah		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
21	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			96.664.080		18.485.100		21.192.044		1.250.689		5.90%		19.735.789		20.42%		
			Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			96.664.080		18.485.100		21.192.044		1.250.689		5.90%		19.735.789		20.42%		
			Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi		9 lokasi		8 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			96.664.080		18.485.100		21.192.044		1.250.689		5.90%		19.735.789		20.42 %		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah		9 Unit Rumah		10 Unit Rumah		0 Unit Rumah		0.00 %		0 Unit Rumah		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
22	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.260.047		1.251.052		1.156.286		279.508		24.17%		1.530.559		121.47%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	100%		91.23 %		80%		97.37 %		121.71 %		97.37 %		97.37%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**			1.260.047		1.251.052		1.156.286		279.508		24.17%		1.530.559		121.47%		
			Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen		22 dokumen		12 dokumen		5 dokumen		41.67 %		5 dokumen		41.67 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.05.2.01.0003	**Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**			1.260.047		1.251.052		1.156.286		279.508		24.17%		1.530.559		121.47 %		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan		62 Laporan		12 Laporan		7 Laporan		58.33 %		7 Laporan		58.33 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
23	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			96.085.239		75.642.490		84.857.398		16.557.950		19.51%		92.200.440		95.96%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%		96.14 %		94%		98.53 %		104.82 %		98.53 %		103.72%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%		97.65 %		88%		94.66 %		107.57 %		94.66 %		107.57%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%		96.79 %		97.5 %		98.85 %		101.38 %		98.85 %		100.87%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			79.722.492		64.615.020		71.326.178		14.554.223		20.41%		79.169.243		99.31%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.585.968		30.078.852		32.141.823		6.780.027		21.09%		36.858.879		98.07 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan		128 Orang/bulan		129 Orang/bulan		127 Orang/bulan		98.45 %		127 Orang/bulan		96.21 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.269.993		10.305.919		11.558.414		2.342.959		20.27%		12.648.878		103.09 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		34 Orang/bulan		35 Orang/bulan		33 Orang/bulan		94.29 %		33 Orang/bulan		132.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			29.866.532		24.230.249		27.625.941		5.431.237		19.66%		29.661.486		99.31 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan		103 Orang/bulan		103 Orang/bulan		101 Orang/bulan		98.06 %		101 Orang/bulan		90.99 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.872.334		4.050.898		6.015.098		806.288		13.40%		4.857.186		70.68%		
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			773.782		291.730		689.327		59.824		8.68%		351.554		45.43 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		100.00 %		2 Paket		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.659.697		1.986.388		2.083.448		310.575		14.91%		2.296.963		138.40 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		18 Paket		17 Paket		4 Paket		23.53 %		4 Paket		23.53 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.438.855		1.772.780		3.242.323		435.890		13.44%		2.208.670		49.76 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		4 Paket		23.53 %		4 Paket		23.53 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.490.413		6.976.572		7.516.123		1.197.440		15.93%		8.174.011		86.13%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket		3 paket		3 paket		3 paket		100.00 %		3 paket		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			1.935.520		1.376.075		1.514.056		229.202		15.14%		1.605.278		82.94 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			4.004.199		3.170.644		3.254.609		519.427		15.96%		3.690.071		92.16 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			3.550.694		2.429.853		2.747.457		448.810		16.34%		2.878.663		81.07 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
24	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			38.444.848		77.914.627		73.766.230		18.174.703		24.64%		96.089.330		249.94%		
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase PPNS yang dibina	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			34.779.392		72.841.318		66.376.003		17.278.237		26.03%		90.119.555		259.12%		
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1520 Orang		1296 Orang		1400 Orang		320 Orang		22.86 %		320 Orang		21.05 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali		210 Kali		192 Kali		47 Kali		24.48 %		47 Kali		24.48 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan	11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		100.00 %		11 Lembaga		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			ketentraman dan ketertiban umum																
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	116 Titik/Lokasi		104 Titik/Lokasi		110 Titik/Lokasi		110 Titik/Lokasi		100.00 %		110 Titik/Lokasi		94.83 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0006	**Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			527.904		983.297		1.363.390		130.061		9.54%		1.113.358		210.90 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0015	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**			31.434.907		66.895.116		59.931.094		16.142.179		26.93%		83.037.295		264.16 %		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0016	**Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**			2.167.280		2.088.405		2.176.670		520.984		23.93%		2.609.389		120.40 %		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0005	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**			464.625		2.578.166		2.476.254		441.925		17.85%		3.020.091		650.01 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang		1426 Orang		1279 Orang		379 Orang		29.63 %		379 Orang		38.75 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0017	**Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah**			124.031		195.609		265.413		32.200		12.13%		227.809		183.67 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.0008	**Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**			60.646		100.725		163.182		10.888		6.67%		111.613		184.04 %		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			3.550.376		4.930.420		7.180.572		880.202		12.26%		5.810.621		163.66%		
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek		96 Objek		94 Objek		29 Objek		30.85 %		29 Objek		30.85 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek		4975 Objek		4230 Objek		939 Objek		22.20 %		939 Objek		22.20 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.0011	**Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah**			1.865.433		3.769.190		4.955.041		731.184		14.76%		4.500.374		241.25 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.02.0012	**Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			417.432		741.855		958.019		149.018		15.55%		890.873		213.42 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
	1.05.02.2.02.0010	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			1.267.511		419.375		1.267.511		0		0.00%		419.375		33.09 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			115.079		142.890		209.655		16.264		7.76%		159.154		138.30%		
			Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	65 Orang		79 Orang		70 Orang		20 Orang		28.57 %		20 Orang		30.77 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03.0006	**Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**			115.079		142.890		209.655		16.264		7.76%		159.154		138.30 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
25	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			48.680.383		26.341.243		24.685.487		5.409.697		21.91%		31.750.940		65.22%		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%		99.82 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
			Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%		99.99 %		100%		99.72 %		99.72 %		99.72 %		99.72%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**			20.320.538		1.608.223		2.046.547		212.249		10.37%		1.820.472		8.96%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan		42 Kegiatan		42 Kegiatan		10 Kegiatan		23.81 %		10 Kegiatan		23.81 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0028	**Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**			3.318.289		1.050.752		1.442.097		168.774		11.70%		1.219.525		36.75 %		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan		1702 Kawasan		1650 Kawasan		160 Kawasan		9.70 %		160 Kawasan		9.70 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0020	**Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**			16.669.689		318.200		353.948		37.875		10.70%		356.075		2.14 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		7 Kawasan		22.58 %		7 Kawasan		22.58 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0015	**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota**			332.559		239.272		250.503		5.600		2.24%		244.872		73.63 %		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			28.359.846		24.733.020		22.638.940		5.197.448		22.96%		29.930.468		105.54%		
			Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		9 Jenis		90.00 %		9 Jenis		90.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.0003	**Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**			26.091.537		22.940.494		20.231.579		4.976.076		24.60%		27.916.570		106.99 %		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4497 Orang		19277 Orang		12500 Orang		6501 Orang		52.01 %		6501 Orang		144.56 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.0009	**Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota**			2.268.308		1.792.525		2.407.361		221.373		9.20%		2.013.898		88.78 %		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang		1082 Orang		467 Orang		1497 Orang		320.56 %		1497 Orang		320.56 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
26	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			64.034.041		51.380.649		52.989.440		9.525.582		17.98%		60.906.230		95.12%		
			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-
			Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	46		38.10		47		7.29		184.49 %		7.29		184.15		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			62.884.592		50.459.909		51.887.967		9.372.811		18.06%		59.832.720		95.15%		
			Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas		656 Petugas		656 Petugas		0 Petugas		0.00 %		0 Petugas		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			42.696.091		34.544.240		30.229.603		8.018.032		26.52%		42.562.271		99.69 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			1.006.458		1.388.662		831.482		97.772		11.76%		1.486.434		147.69 %		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang		15 Orang		10 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			10.493.247		7.256.045		12.518.433		25.600		0.20%		7.281.645		69.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	910 Unit		850 Unit		875 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			8.688.797		7.270.963		8.308.450		1.231.407		14.82%		8.502.370		97.85 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal																
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			550.836		497.674		558.744		84.367		15.10%		582.041		105.67%		
			Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	520 Berkas		480 Berkas		500 Berkas		110 Berkas		22.00 %		110 Berkas		21.15 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			550.836		497.674		558.744		84.367		15.10%		582.041		105.67 %		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		150.00 %		3 Dokumen		150.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			598.613		423.066		542.729		68.403		12.60%		491.469		82.10%		
			Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	110 Kegiatan		90 Kegiatan		100 Kegiatan		20 Kegiatan		20.00 %		20 Kegiatan		18.18 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			598.613		423.066		542.729		68.403		12.60%		491.469		82.10 %		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1100 Orang		1380 Orang		1000 Orang		330 Orang		33.00 %		330 Orang		30.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
27	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.100.497		18.155.767		21.167.206		3.807.772		17.99%		21.963.540		91.13%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		94.01 %		88%		95.92 %		109.00 %		95.92 %		109.00%		Dinas Sosial	-
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.227.230		15.852.407		18.012.806		3.380.045		18.76%		19.232.452		100.03%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.227.230		15.852.407		18.012.806		3.380.045		18.76%		19.232.452		100.03 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		47 Orang/bulan		48 Orang/bulan		44 Orang/bulan		91.67 %		44 Orang/bulan		97.78 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.354.427		801.071		1.886.980		117.873		6.25%		918.944		39.03%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			2.354.427		801.071		1.886.980		117.873		6.25%		918.944		39.03 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket		12 Paket		3 Paket		25.00 %		3 Paket		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			2.518.840		1.502.289		1.267.419		309.854		24.45%		1.812.144		71.94%		
			Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			2.518.840		1.502.289		1.267.419		309.854		24.45%		1.812.144		71.94 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
28	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			8.489.757		5.301.061		6.332.770		1.534.606		24.23%		6.835.667		80.52%		
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88.98 %		87.00 %		87.97 %		66.48 %		75.57 %		66.48 %		74.71%		Dinas Sosial	-
			Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%		100.00 %		94.12 %		54.55 %		57.96 %		54.55 %		54.55%		Dinas Sosial	-
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			8.489.757		5.301.061		6.332.770		1.534.606		24.23%		6.835.667		80.52%		
			Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	7 jenis		6 jenis		6 jenis		3 jenis		50.00 %		3 jenis		42.86 %		Dinas Sosial	
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	372 orang		1104 orang		367 orang		313 orang		85.29 %		313 orang		84.14 %		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0001	**Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**			6.940.781		4.578.716		5.501.695		1.448.781		26.33%		6.027.497		86.84 %		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	597 Orang		897 Orang		590 Orang		239 Orang		40.51 %		239 Orang		40.03 %		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0004	**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat**			1.548.976		722.345		831.076		85.826		10.33%		808.170		52.17 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		100.00 %		8 Lembaga		66.67 %		Dinas Sosial	
29	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			80.585.488		35.102.514		40.391.046		6.934.203		17.17%		42.036.718		52.16%		
			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			59.054.679		24.538.260		29.844.376		4.933.177		16.53%		29.471.438		49.91%		
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			5.917.303		6.809.880		6.856.459		1.239.436		18.08%		8.049.316		136.03 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang		99 Orang		300 Orang		233 Orang		77.67 %		233 Orang		179.23 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			37.558.454		8.447.788		8.386.630		1.022.020		12.19%		9.469.808		25.21 %		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	215 Orang		224 Orang		230 Orang		243 Orang		105.65 %		243 Orang		113.02 %		Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota																
	1.06.04.2.01.0012	**Pemberian Layanan Rujukan**			1.615.342		664.966		746.963		145.941		19.54%		810.906		50.20 %		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		50 Orang		40 Orang		44 Orang		110.00 %		44 Orang		110.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0004	**Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga**			476.574		103.070		367.320		20.260		5.52%		123.330		25.88 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang		1828 Orang		795 Orang		283 Orang		35.60 %		283 Orang		35.60 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0001	**Penyediaan Permakanan**			13.487.005		8.512.557		13.487.005		2.505.521		18.58%		11.018.077		81.69 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1470 Orang		2329 Orang		1470 Orang		1629 Orang		110.82 %		1629 Orang		110.82 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**			21.530.809		10.564.254		10.546.670		2.001.026		18.97%		12.565.280		58.36%		
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0007	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**			17.475.588		6.902.956		6.843.025		1.250.557		18.27%		8.153.512		46.66 %		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Orang		1877 Orang		900 Orang		1112 Orang		123.56 %		1112 Orang		101.09 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0002	**Pemberian Layanan Kedaruratan**			4.055.221		3.661.299		3.703.644		750.469		20.26%		4.411.768		108.79 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang		11095 Orang		4716 Orang		1642 Orang		34.82 %		1642 Orang		34.82 %		Dinas Sosial	
30	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			10.901.678		33.947.754		34.824.477		2.371.667		6.81%		36.319.421		333.15%		
			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%		98.07 %		87%		98.52 %		113.24 %		98.52 %		113.24%		Dinas Sosial	-
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			10.901.678		33.947.754		34.824.477		2.371.667		6.81%		36.319.421		333.15%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0004	**Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**			116.497		4.601.401		3.791.623		0		0.00%		4.601.401		3,949.81 %		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang		1071 Orang		2229 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0003	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**			5.865.631		23.966.299		26.291.553		1.433.965		5.45%		25.400.264		433.04 %		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83899 Keluarga		42407 Keluarga		33723 Keluarga		25414 Keluarga		75.36 %		25414 Keluarga		30.29 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0001	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			4.681.621		4.755.322		4.082.445		796.615		19.51%		5.551.937		118.59 %		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	534731 Orang		118222 Orang		92892 Orang		69515 Orang		74.83 %		69515 Orang		13.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0002	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			237.929		624.732		658.855		141.087		21.41%		765.819		321.87 %		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	264931 Keluarga		42408 Keluarga		33723 Keluarga		25414 Keluarga		75.36 %		25414 Keluarga		9.59 %		Dinas Sosial	
31	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			1.980.041		2.237.866		1.350.914		268.206		19.85%		2.506.072		126.57%		
			Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	-
	1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**			1.980.041		2.237.866		1.350.914		268.206		19.85%		2.506.072		126.57%		
			Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100.00 %		3 Jenis		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01.0002	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota**			1.980.041		2.237.866		1.350.914		268.206		19.85%		2.506.072		126.57 %		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam		7 Makam		7 Makam		7 Makam		100.00 %		7 Makam		100.00 %		Dinas Sosial	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
32	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.606.977		15.655.016		17.337.460		3.468.707		20.01%		19.123.723		130.92%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		95.60 %		94%		98.47 %		104.76 %		98.47 %		103.65%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.701.619		14.018.763		15.532.831		3.171.311		20.42%		17.190.075		135.34%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.701.619		14.018.763		15.532.831		3.171.311		20.42%		17.190.075		135.34 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		50 Orang/bulan		52 Orang/bulan		49 Orang/bulan		94.23 %		49 Orang/bulan		158.06 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.905.358		1.636.252		1.804.630		297.396		16.48%		1.933.648		101.48%		
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.596.618		1.495.614		1.603.417		280.423		17.49%		1.776.037		111.24 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			308.739		140.638		201.213		16.973		8.44%		157.611		51.05 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
33	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			11.303.582		7.930.603		9.137.009		541.055		5.92%		8.471.658		74.95%		
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	85.02 %		94.02 %		83.02 %		70.54 %		84.97 %		70.54 %		82.97%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
			Persentase Peserta pelatihan berbasis	91.7 %		99.60 %		90.7 %		100%		110.25 %		100%		109.05%		Dinas Perindustrian	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kompetensi yang lulus pelatihan															dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**			6.876.862		5.043.552		6.357.686		365.652		5.75%		5.409.204		78.66%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01.0002	**Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja**			434.813		220.415		520.963		58.550		11.24%		278.965		64.16 %		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga		14 Lembaga		12 Lembaga		1 Lembaga		8.33 %		1 Lembaga		8.33 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01.0001	**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**			6.442.049		4.823.137		5.836.722		307.102		5.26%		5.130.239		79.64 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang		752 Orang		720 Orang		112 Orang		15.56 %		112 Orang		15.56 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**			305.648		180.600		287.689		8.200		2.85%		188.800		61.77%		
			Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.04.0001	**Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**			305.648		180.600		287.689		8.200		2.85%		188.800		61.77 %		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan		53 Perusahaan		50 Perusahaan		10 Perusahaan		20.00 %		10 Perusahaan		20.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			4.121.071		2.706.451		2.491.634		167.203		6.71%		2.873.654		69.73%		
			Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		dan Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05.0001	**Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**			4.121.071		2.706.451		2.491.634		167.203		6.71%		2.873.654		69.73 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
34	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			3.690.000		1.626.716		2.553.785		290.086		11.36%		1.916.802		51.95%		
			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	5%		3.00 %		4%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**			2.280.264		1.114.098		1.749.005		221.975		12.69%		1.336.073		58.59%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan		9 laporan		9 laporan		2 laporan		22.22 %		2 laporan		22.22 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0002	**Pelayanan antar Kerja**			24.068		40.000		136.669		5.600		4.10%		45.600		189.46 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2150 Orang		2002 Orang		2050 Orang		204 Orang		9.95 %		204 Orang		9.49 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0003	**Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**			1.151.313		474.386		584.653		122.554		20.96%		596.941		51.85 %		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1500 Orang		1100 Orang		1200 Orang		205 Orang		17.08 %		205 Orang		13.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0005	**Perluasan Kesempatan Kerja**			1.104.883		599.711		1.027.683		93.821		9.13%		693.532		62.77 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang		274 Orang		250 Orang		65 Orang		26.00 %		65 Orang		26.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**			338.718		141.814		363.652		5.600		1.54%		147.414		43.52%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	7 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03.0003	**Job Fair /Bursa Kerja**			338.718		141.814		363.652		5.600		1.54%		147.414		43.52 %		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	350 Orang		324 Orang		250 Orang		50 Orang		20.00 %		50 Orang		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**			1.071.018		370.804		441.128		62.511		14.17%		433.315		40.46%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	7 Laporan		5 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04.0001	**Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)**			1.071.018		370.804		441.128		62.511		14.17%		433.315		40.46 %		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang		250 Orang		300 Orang		85 Orang		28.33 %		85 Orang		24.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
35	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			2.216.940		1.336.638		2.081.048		257.828		12.39%		1.594.466		71.92%		
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	15.04 %		14.37 %		14.41 %		14.57 %		101.11 %		14.57 %		96.88%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	60%		41.27 %		50%		43.16 %		86.32 %		43.16 %		71.93%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1.358.206		738.459		1.311.953		199.838		15.23%		938.296		69.08%		
			Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.0001	**Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**			62.206		30.600		56.869		5.600		9.85%		36.200		58.19 %		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan		294 Perusahaan		220 Perusahaan		74 Perusahaan		33.64 %		74 Perusahaan		33.64 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.0003	**Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**			1.296.000		707.859		1.255.084		194.238		15.48%		902.096		69.61 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**			858.734		598.180		769.095		57.990		7.54%		656.170		76.41%		
			Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0001	**Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			525.521		283.705		435.650		31.626		7.26%		315.331		60.00 %		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara		64 Perkara		50 Perkara		15 Perkara		30.00 %		15 Perkara		30.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0002	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			333.213		314.474		333.445		26.365		7.91%		340.839		102.29 %		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara		120 Perkara		110 Perkara		22 Perkara		20.00 %		22 Perkara		20.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																	
36	2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			17.557.497		14.512.482		16.216.842		3.208.925		19.79%		17.721.407		100.93%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		98.24 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			12.968.828		12.051.729		13.585.326		2.775.654		20.43%		14.827.383		114.33%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			12.968.828		12.051.729		13.585.326		2.775.654		20.43%		14.827.383		114.33 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		35 Orang/bulan		34 Orang/bulan		35 Orang/bulan		102.94 %		35 Orang/bulan		145.83 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			4.012.046		2.141.430		2.068.287		383.046		18.52%		2.524.476		62.92%		
			Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			4.012.046		2.141.430		2.068.287		383.046		18.52%		2.524.476		62.92 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		15 Paket		5 Paket		3 Paket		60.00 %		3 Paket		60.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			576.622		319.323		563.230		50.225		8.92%		369.548		64.09%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			576.622		319.323		563.230		50.225		8.92%		369.548		64.09 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		11 Laporan		6 Laporan		2 Laporan		33.33 %		2 Laporan		33.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
37	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			2.324.452		1.358.096		1.706.748		107.772		6.31%		1.465.868		63.06%		
			Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			782.126		494.938		719.570		48.035		6.68%		542.973		69.42%		
			Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.01.0006	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota**			782.126		494.938		719.570		48.035		6.68%		542.973		69.42 %		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	218 Orang		58 Perangkat Daerah		218 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**			467.797		306.975		418.236		42.365		10.13%		349.340		74.68%		
			Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		610 Orang		600 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.02.0002	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**			467.797		306.975		418.236		42.365		10.13%		349.340		74.68 %		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi		58 Organisasi		31 Organisasi		0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.074.529		556.183		568.942		17.372		3.05%		573.555		53.38%		
			Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	21 Kegiatan		N/A		21 Kegiatan		2 Kegiatan		9.52 %		2 Kegiatan		9.52 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.03.0002	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			1.074.529		556.183		568.942		17.372		3.05%		573.555		53.38 %		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang		745 Orang		740 Orang		83 Orang		11.22 %		83 Orang		11.22 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
38	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			738.393		923.295		1.638.502		224.822		13.72%		1.148.118		155.49%		
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	100%		64.52 %		80.64 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			58.810		0		36.212		0		0.00%		0		0.00%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.01.0001	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			58.810		0		36.212		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**			211.816		599.787		1.121.672		189.373		16.88%		789.160		372.57%		
			Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus		100 kasus		20 kasus		16 kasus		80.00 %		16 kasus		80.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.02.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**			106.288		0		92.110		6.284		6.82%		6.284		5.91 %		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		N/A		20 Layanan		16 Layanan		80.00 %		16 Layanan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.02.0001	**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**			105.528		599.787		1.029.562		183.090		17.78%		782.877		741.86 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang		100 Orang		20 Orang		16 Orang		80.00 %		16 Orang		80.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			467.767		323.508		480.617		35.449		7.38%		358.957		76.74%		
			Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	31 kecamatan		20 kecamatan		25 kecamatan		0 kecamatan		0.00 %		0 kecamatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03.0004	**Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			433.382		323.508		446.233		35.449		7.94%		358.957		82.83 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03.0002	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**			34.385		0		34.385		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang		N/A		50 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Keluarga Berencana	
39	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			619.665		1.163.659		1.242.451		204.257		16.44%		1.367.917		220.75%		
			Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	283		333.00		282		0		0.00 %		0		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			619.665		1.163.659		1.242.451		204.257		16.44%		1.367.917		220.75%		
			Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota			619.665		1.163.659		1.242.451		204.257		16.44%		1.367.917		220.75 %		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan		2 Layanan		2 Layanan		2 Layanan		100.00 %		2 Layanan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
40	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			468.442		242.548		297.128		35.542		11.96%		278.090		59.36%		
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			468.442		242.548		297.128		35.542		11.96%		278.090		59.36%		
			Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.05.2.01.0001	**Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota**			468.442		242.548		297.128		35.542		11.96%		278.090		59.36 %		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
41	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			3.918.987		2.632.804		3.730.559		436.375		11.70%		3.069.179		78.32%		
			Persentase Kelurahan Layak Anak	100%		100.00 %		92.85 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			911.497		529.635		836.318		27.013		3.23%		556.648		61.07%		
			Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.01.0001	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota**			911.497		529.635		836.318		27.013		3.23%		556.648		61.07 %		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	21 Organisasi		31 Organisasi		20 Organisasi		0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			3.007.491		2.103.169		2.894.241		409.363		14.14%		2.512.532		83.54%		
			Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02.0003	**Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**			1.431.215		691.734		1.161.548		102.635		8.84%		794.369		55.50 %		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.02.0001	**Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup**			1.576.276		1.411.435		1.732.693		306.728		17.70%		1.718.163		109.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		43 Orang		10 Orang		31 Orang		310.00 %		31 Orang		310.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
42	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			1.649.292		1.108.336		1.380.307		210.476		15.25%		1.318.812		79.96%		
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	100%		64.52 %		80.64 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			65.288		0		65.288		0		0.00%		0		0.00%		
			Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.01.0004	**Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA**			65.288		0		65.288		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan	184 Orang		N/A		184 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA															Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			1.549.369		1.108.336		1.280.384		210.476		16.44%		1.318.812		85.12%		
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		242 kasus		150 kasus		53 kasus		35.33 %		53 kasus		35.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	31 lembaga		20 lembaga		25 lembaga		0 lembaga		0.00 %		0 lembaga		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02.0007	**Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK**			192.248		52.527		219.415		14.340		6.54%		66.867		34.78 %		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Layanan		242 Orang		150 Layanan		53 Layanan		35.33 %		53 Layanan		35.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.02.0005	**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**			1.357.120		1.055.809		1.060.969		196.136		18.49%		1.251.945		92.25 %		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang		242 Orang		150 Orang		53 Orang		35.33 %		53 Orang		35.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			34.635		0		34.635		0		0.00%		0		0.00%		
			Jumlah kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	2 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.03.0006	**Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			34.635		0		34.635		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang		N/A		50 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																	
43	2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			26.817.816		22.038.025		28.322.648		4.583.454		16.18%		26.621.478		99.27%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		94.58 %		94.5 %		96.14 %		101.74 %		96.14 %		101.20%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			22.173.111		18.669.186		23.803.786		4.032.451		16.94%		22.701.637		102.38%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			22.173.111		18.669.186		23.803.786		4.032.451		16.94%		22.701.637		102.38 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		70 Orang/bulan		70 Orang/bulan		66 Orang/bulan		94.29 %		66 Orang/bulan		134.69 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			4.644.705		3.368.839		4.518.862		551.002		12.19%		3.919.841		84.39%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			3.681.649		2.767.524		3.209.727		487.510		15.19%		3.255.034		88.41 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			963.056		601.315		1.309.135		63.492		4.85%		664.807		69.03 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
44	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			2.185.139		1.143.927		1.834.836		138.171		7.53%		1.282.097		58.67%		
			Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1.26		3.18		1.25		6.29		503.20 %		6.29		499.21%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**			931.260		478.232		741.032		92.627		12.50%		570.858		61.30%		
			Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		1 Jenis		25.00 %		1 Jenis		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.01.0014	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis**			931.260		478.232		741.032		92.627		12.50%		570.858		61.30 %		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		3 Laporan		20.00 %		3 Laporan		20.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai**			1.253.879		665.695		1.093.803		45.544		4.16%		711.239		56.72%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		dengan Angka Kecukupan Gizi																	
			Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.253.879		665.695		1.093.803		45.544		4.16%		711.239		56.72 %		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
45	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			973.715		539.858		953.506		84.581		8.87%		624.440		64.13%		
			Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97.91 %		100.00 %		97.90 %		98.82 %		100.94 %		98.82 %		100.93%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			973.715		539.858		953.506		84.581		8.87%		624.440		64.13%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota			973.715		539.858		953.506		84.581		8.87%		624.440		64.13 %		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen		36 Dokumen		36 Dokumen		6 Dokumen		16.67 %		6 Dokumen		16.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
46	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			153.598.241		64.183.843		89.205.871		133.940		0.15%		64.317.782		41.87%		
			Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	55265.71 M2		10,151.30 M2		54207.76 M2		0 M2		0.00 %		0 M2		0.00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah			153.598.241		64.183.843		89.205.871		133.940		0.15%		64.317.782		41.87%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi		4 lokasi		1 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			153.598.241		64.183.843		89.205.871		133.940		0.15%		64.317.782		41.87 %		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
47	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			98.611.737		54.450.345		62.532.154		11.754.564		18.80%		66.204.909		67.14%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%		91.49 %		87%		94.67 %		108.82 %		94.67 %		108.82%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			81.736.755		45.569.920		51.157.844		10.051.027		19.65%		55.620.947		68.05%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			81.736.755		45.569.920		51.157.844		10.051.027		19.65%		55.620.947		68.05 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan		192 Orang/bulan		193 Orang/bulan		182 Orang/bulan		94.30 %		182 Orang/bulan		94.30 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.689.324		8.453.123		10.886.697		1.602.035		14.72%		10.055.157		64.09%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			15.689.324		8.453.123		10.886.697		1.602.035		14.72%		10.055.157		64.09 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.185.658		427.303		487.613		101.502		20.82%		528.805		44.60%		
			Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.185.658		427.303		487.613		101.502		20.82%		528.805		44.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		50 Unit		50 Unit		12 Unit		24.00 %		12 Unit		24.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
48	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			4.341.984		2.954.256		6.191.825		354.547		5.73%		3.308.803		76.20%		
			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	90%		93.44 %		88%		99.44 %		113.00 %		99.44 %		110.49%		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	50%		40.59 %		48%		50%		104.17 %		50%		100.00%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.963.234		1.855.710		2.723.080		316.316		11.62%		2.172.026		73.30%		
			umlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		1 kegiatan		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.002.892		770.176		1.248.523		85.821		6.87%		855.997		85.35 %		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			1.960.342		1.085.534		1.474.557		230.495		15.63%		1.316.029		67.13 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			1.378.750		1.098.545		3.468.745		38.232		1.10%		1.136.777		82.45%		
			Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	3 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		100.00 %		2 stasiun		66.67 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02.0001	**Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat**			1.378.750		1.098.545		3.468.745		38.232		1.10%		1.136.777		82.45 %		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
49	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			114.572.766		96.409.691		99.194.651		18.021.338		18.17%		114.431.029		99.88%		
			Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	100%		101.93 %		99.75 %		0.51 %		0.51 %		0.51 %		0.51%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**			114.572.766		96.409.691		99.194.651		18.021.338		18.17%		114.431.029		99.88%		
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.88 Ha		2.85 Ha		2.88 Ha		101.05 %		2.88 Ha		100.35 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.88 Ha		2.85 Ha		2.88 Ha		101.05 %		2.88 Ha		100.35 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0004	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**			88.616.171		74.980.745		75.449.385		14.322.256		18.98%		89.303.002		100.78 %		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.90 Ha		275.86 Ha		275.88 Ha		275.88 Ha		100.00 %		275.88 Ha		99.99 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0007	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati**			9.689.511		8.035.254		9.581.504		781.649		8.16%		8.816.903		90.99 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit		125 Unit		125 Unit		125 Unit		100.00 %		125 Unit		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0008	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**			15.911.738		13.117.977		13.659.965		2.891.056		21.16%		16.009.033		100.61 %		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	14 Unit		14 Unit		14 Unit		14 Unit		100.00 %		14 Unit		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0001	**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**			355.347		275.715		503.796		26.377		5.24%		302.092		85.01 %		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
50	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			5.250.677		2.307.911		2.677.847		372.715		13.92%		2.680.626		51.05%		
			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%		120.00 %		100%		120%		120.00 %		120%		120.00%		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%		100.00 %		80%		100%		125.00 %		100%		125.00%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**			779.119		227.913		448.987		36.875		8.21%		264.788		33.99%		
			Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas		273 berkas		250 berkas		71 berkas		28.40 %		71 berkas		28.40 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01.0001	**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**			779.119		227.913		448.987		36.875		8.21%		264.788		33.99 %		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen		304 Dokumen		255 Dokumen		61 Dokumen		23.92 %		61 Dokumen		23.92 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			4.471.557		2.079.998		2.228.860		335.840		15.07%		2.415.838		54.03%		
			Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		1 kegiatan		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan			4.471.557		2.079.998		2.228.860		335.840		15.07%		2.415.838		54.03 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
51	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			4.000.329		1.295.194		1.916.797		207.613		10.83%		1.502.807		37.57%		
			Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	95%		59.00 %		80%		21%		26.25 %		21%		22.11%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.000.329		1.295.194		1.916.797		207.613		10.83%		1.502.807		37.57%		
			Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek		432 obyek		254 obyek		61 obyek		24.02 %		61 obyek		14.12 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%		100%		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH			2.406.414		885.542		1.112.345		140.136		12.60%		1.025.678		42.62 %		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan	350 Dokumen		321 Dokumen		325 Dokumen		55 Dokumen		16.92 %		55 Dokumen		15.71 %		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan																
	2.11.06.2.01.0009	**Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**			1.593.914		409.652		804.452		67.477		8.39%		477.129		29.93 %		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha		254 Badan Usaha		254 Badan Usaha		61 Badan Usaha		24.02 %		61 Badan Usaha		24.02 %		Dinas Lingkungan Hidup	
52	2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			8.194.978		1.175.240		2.511.667		213.710		8.51%		1.388.950		16.95%		
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	71.81 %		129.77 %		66.43 %		150.74 %		226.92 %		150.74 %		209.92%		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	63.84 %		115.54 %		61.81 %		116.65 %		188.72 %		116.65 %		182.72%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			8.194.978		1.175.240		2.511.667		213.710		8.51%		1.388.950		16.95%		
			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali		13 kali		12 kali		1 kali		8.33 %		1 kali		8.33 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		100.00 %		1 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.0002	**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**			7.391.891		767.761		1.682.444		151.416		9.00%		919.178		12.43 %		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen		13 Dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		8.33 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.0003	**Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**			803.086		407.479		829.223		62.293		7.51%		469.772		58.50 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1725 Orang		1645 Orang		1670 Orang		615 Orang		36.83 %		615 Orang		35.65 %		Dinas Lingkungan Hidup	
53	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			687.892		663.391		5.157.182		5.600		0.11%		668.991		97.25%		
			Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	92.00 %		112.00 %		81.60 %		112%		137.25 %		112%		121.74%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			687.892		663.391		5.157.182		5.600		0.11%		668.991		97.25%		
			Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan		4 penghargaan		4 penghargaan		0 penghargaan		0.00 %		0 penghargaan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01.0001	**Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**			687.892		663.391		5.157.182		5.600		0.11%		668.991		97.25 %		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas		10 Entitas		10 Entitas		0 Entitas		0.00 %		0 Entitas		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
54	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			732.771		192.906		543.012		25.544		4.70%		218.450		29.81%		
			Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	46 obyek		41.00 obyek		47 obyek		9 obyek		180.85 %		9 obyek		180.43		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**			732.771		192.906		543.012		25.544		4.70%		218.450		29.81%		
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01.0004	**Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota**			732.771		192.906		543.012		25.544		4.70%		218.450		29.81 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	47 Pengaduan		41 Pengaduan		47 Pengaduan		9 Pengaduan		19.15 %		9 Pengaduan		19.15 %		Dinas Lingkungan Hidup	
55	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			486.436.550		435.442.673		389.506.752		78.259.233		20.09%		513.701.906		105.61%		
			Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5.12 %		5.13 %		5.12 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	52%		53.45 %		51.5 %		53.45 %		103.79 %		53.45 %		102.79%		Dinas Lingkungan Hidup	-
			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88.76 %		100.00 %		88.39 %		100%		113.13 %		100%		112.66%		Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**			486.436.550		435.442.673		389.506.752		78.259.233		20.09%		513.701.906		105.61%		
			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis		4 jenis		4 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100.00 %		3 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.0017	**Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan**			40.507.385		60.811.675		40.507.385		0		0.00%		60.811.675		150.12 %		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	305000 ton		290217.68 ton		305000 ton		28186961 ton		-9,041.63 %		28186961 ton		9,241.63 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.0020	**Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST**			222.633.644		143.498.839		159.679.775		38.812.589		24.31%		182.311.428		81.89 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton		562452.89 Ton		650430 Ton		153515.14 Ton		23.60 %		153515.14 Ton		23.60 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			182.639.754		174.775.084		171.376.695		38.351.348		22.38%		213.126.432		116.69 %		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	570129 Ton		503856.48 Ton		570129 Ton		124981.07 Ton		21.92 %		124981.07 Ton		21.92 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota			40.655.768		56.357.075		17.942.898		1.095.295		6.10%		57.452.370		141.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	226 Unit		230 Unit		231 Unit		230 Unit		99.57 %		230 Unit		101.77 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
56	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.618.623		48.143.961		54.443.312		9.779.983		17.96%		57.923.943		217.61%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87.58 %		92.85 %		87.13 %		96.55 %		110.81 %		96.55 %		110.24%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.846		13.000		15.995		5.200		32.51%		18.200		108.04%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.846		13.000		15.995		5.200		32.51%		18.200		108.04 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.703.038		39.975.916		45.103.257		8.644.163		19.17%		48.620.079		309.62%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.703.038		39.975.916		45.103.257		8.644.163		19.17%		48.620.079		309.62 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan		180 Orang/bulan		182 Orang/bulan		170 Orang/bulan		93.41 %		170 Orang/bulan		414.63 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			10.049.047		5.514.105		6.332.466		757.020		11.95%		6.271.125		62.41%		
			Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			10.049.047		5.514.105		6.332.466		757.020		11.95%		6.271.125		62.41 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket		3 Paket		1 Paket		33.33 %		1 Paket		33.33 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			849.692		2.640.940		2.991.594		373.600		12.49%		3.014.540		354.78%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			849.692		2.640.940		2.991.594		373.600		12.49%		3.014.540		354.78 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
57	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			3.481.298		3.751.874		3.330.272		606.724		18.22%		4.358.598		125.20%		
			Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		105.26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**			2.655.892		2.737.521		2.388.298		441.662		18.49%		3.179.183		119.70%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		209925 berkas		156000 berkas		49512 berkas		31.74 %		49512 berkas		31.74 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.01.0002	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk**			2.655.892		2.737.521		2.388.298		441.662		18.49%		3.179.183		119.70 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kependudukan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk															dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**			825.406		1.014.352		941.974		165.063		17.52%		1.179.415		142.89%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		209925 berkas		156000 berkas		49326 berkas		31.62 %		49326 berkas		31.62 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03.0002	**Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk**			825.406		1.014.352		941.974		165.063		17.52%		1.179.415		142.89 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
58	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			1.969.905		2.801.167		2.594.110		497.121		19.16%		3.298.288		167.43%		
			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		105.26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**			1.524.354		2.172.220		1.945.131		410.840		21.12%		2.583.060		169.45%		
			Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		40594 berkas		36000 berkas		9886 berkas		27.46 %		9886 berkas		27.46 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.0001	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting**			1.524.354		2.172.220		1.945.131		410.840		21.12%		2.583.060		169.45 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**			445.551		628.947		648.979		86.281		13.29%		715.228		160.53%		
			Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		83465 berkas		36000 berkas		16792 berkas		46.64 %		16792 berkas		46.64 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0004	**Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil**			445.551		628.947		648.979		86.281		13.29%		715.228		160.53 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
59	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			2.941.983		3.110.956		3.217.495		417.974		12.99%		3.528.930		119.95%		
			Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	77%		100.00 %		74%		100%		135.14 %		100%		129.87%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	100%		118.18 %		80%		168.18 %		210.23 %		168.18 %		168.18%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	99%		99.53 %		98%		99.94 %		101.98 %		99.94 %		100.95%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**			431.627		889.803		834.791		171.125		20.50%		1.060.928		245.80%		
			Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	48000 data		16737 data		48000 data		12579 data		26.21 %		12579 data		26.21 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.01.0001	**Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**			431.627		889.803		834.791		171.125		20.50%		1.060.928		245.80 %		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			653.293		733.192		799.064		119.838		15.00%		853.030		130.57%		
			Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga		10 Lembaga		5 Lembaga		11 Lembaga		220.00 %		11 Lembaga		220.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.0006	**Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi**			362.799		452.582		506.324		78.513		15.51%		531.095		146.39 %		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen		10 Dokumen		5 Dokumen		11 Dokumen		220.00 %		11 Dokumen		220.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.0004	**Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan**			290.494		280.611		292.740		41.325		14.12%		321.936		110.82 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		6 Dokumen		5 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			1.857.063		1.487.961		1.583.640		127.011		8.02%		1.614.972		86.96%		
			Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan		32 unit layanan		32 unit layanan		32 unit layanan		100.00 %		32 unit layanan		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04.0001	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			1.857.063		1.487.961		1.583.640		127.011		8.02%		1.614.972		86.96 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
60	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			89.414		101.165		118.497		16.000		13.50%		117.165		131.04%		
			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**			89.414		101.165		118.497		16.000		13.50%		117.165		131.04%		
			Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi		4 Informasi		4 Informasi		0 Informasi		0.00 %		0 Informasi		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.2.01.0002	**Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain**			89.414		101.165		118.497		16.000		13.50%		117.165		131.04 %		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
61	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			2.343.064		1.433.719		2.343.064		111.555		4.76%		1.545.275		65.95%		
			Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	0%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			2.343.064		1.433.719		2.343.064		111.555		4.76%		1.545.275		65.95%			
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6642 Kegiatan		57 Kegiatan		53 Kegiatan		7 Kegiatan		13.21 %		7 Kegiatan		0.11 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01.0009	**Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**			2.343.064		1.433.719		2.343.064		111.555		4.76%		1.545.275		65.95 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
62	2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			553.981		465.620		697.882		46.790		6.70%		512.410		92.50%		
			Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	100%		76.03 %		81.10 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			231.497		124.965		295.265		36.600		12.40%		161.565		69.79%		
			Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	178 Orang		400 Orang		170 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01.0009	**Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal**			231.497		124.965		295.265		36.600		12.40%		161.565		69.79 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	89 Satuan Pendidikan		275 Satuan Pendidikan		85 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			322.484		340.655		402.617		10.190		2.53%		350.845		108.79%		
			Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0.00 %		0 Perangkat Daerah		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.0009	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga**			41.486		62.455		60.000		0		0.00%		62.455		150.55 %		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga															Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.0012	**Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga**			132.700		179.200		212.700		4.590		2.16%		183.790		138.50 %		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.0013	**Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB**			148.298		99.000		129.917		5.600		4.31%		104.600		70.53 %		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
63	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			9.873.591		7.860.709		8.650.037		351.434		4.06%		8.212.143		83.17%		
			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.60 %		15.05 %		17.85 %		16.49 %		107.62 %		16.49 %		106.31		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	86%		84.02 %		85%		73.96 %		87.01 %		73.96 %		86.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			528.928		792.812		815.000		109.665		13.46%		902.477		170.62%		
			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		100.00 %		31 Kecamatan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			250.000		149.996		250.000		63.367		25.35%		213.363		85.35 %		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi		31 Organisasi		31 Organisasi		0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			178.928		463.494		465.000		46.298		9.96%		509.792		284.91 %		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			100.000		99.355		100.000		0		0.00%		99.355		99.35 %		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang															Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			2.657.552		1.013.060		1.598.015		88.851		5.56%		1.101.910		41.46%		
			Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali		12 Kali		12 Kali		0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)**			859.998		554.060		1.169.615		88.851		7.60%		642.910		74.76 %		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.0004	**Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**			1.797.554		459.000		428.400		0		0.00%		459.000		25.53 %		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang		1566 Orang		1566 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			4.116.934		5.686.592		5.872.222		152.918		2.60%		5.839.510		141.84%		
			Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417096 Orang		417081 Orang		417050 Orang		256318 Orang		61.46 %		256318 Orang		61.45 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			13.500		38.796		13.500		0		0.00%		38.796		287.38 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			2.353.459		580.354		689.017		24.864		3.61%		605.218		25.72 %		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.749.975		5.067.441		5.169.705		128.054		2.48%		5.195.495		296.89 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan	1950 Orang		1950 Orang		1950 Orang		354 Orang		18.15 %		354 Orang		18.15 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			2.570.177		368.245		364.800		0		0.00%		368.245		14.33%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04.0006	**Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas**			2.570.177		364.495		364.800		0		0.00%		364.495		14.18 %		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung		31 Kampung		31 Kampung		0 Kampung		0.00 %		0 Kampung		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
64	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			17.633.126		19.894.390		19.537.784		283.167		1.45%		20.177.557		114.43%		
			Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun		22.40 tahun		21 tahun		0 tahun		0.00 %		0 tahun		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	44%		100.00 %		43%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	55.76 %		104.23 %		51.63 %		31.11 %		60.26 %		31.11 %		55.79%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.58 %		117.91 %		41.57 %		48.31 %		116.21 %		48.31 %		116.19%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			3.684.926		11.384.160		5.589.584		283.167		5.07%		11.667.327		316.62%		
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok		0 Kelompok		0.00 %		0 Kelompok		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0019	**Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**			608.785		616.997		572.182		16.013		2.80%		633.010		103.98 %		
			Jumlah kader yang mengikuti O rientasi/ Pelatihan T eknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1136 Orang		930 Orang		966 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0028	**Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)**		1.202.795		3.366.498		3.909.520		223.956		5.73%		3.590.454		298.51 %		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	57 Kelompok		153 Kelompok		56 Kelompok		20 Kelompok		35.71 %		20 Kelompok		35.09 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0018	**Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**			412.985		474.810		120.000		0		0.00%		474.810		114.97 %		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	38 Unit		51 Unit		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemberdayaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia															Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0017	**Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))**			1.460.361		1.512.565		987.881		43.198		4.37%		1.555.763		106.53 %		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			13.948.200		8.510.230		13.948.200		0		0.00%		8.510.230		61.01%		
			jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6642 orang		6642 Orang		6642 orang		6642 orang		100.00 %		6642 orang		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.02.0005	**Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)**			6.642.000		4.101.100		6.642.000		0		0.00%		4.101.100		61.74 %		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.02.0006	**Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)**			7.306.200		4.409.130		7.306.200		0		0.00%		4.409.130		60.35 %		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																	
65	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			123.067.835		80.580.955		104.164.000		14.038.876		13.48%		94.619.831		76.88%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%		94.39 %		92%		94.94 %		103.20 %		94.94 %		103.20%		Dinas Perhubungan	-
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			73.040.321		55.271.334		61.276.734		11.925.816		19.46%		67.197.150		92.00%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			73.040.321		55.271.334		61.276.734		11.925.816		19.46%		67.197.150		92.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/bulan		256 Orang/bulan		258 Orang/bulan		242 Orang/bulan		93.80 %		242 Orang/bulan		84.32 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			5.949.269		3.782.483		5.647.613		616.133		10.91%		4.398.616		73.94%		
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			5.949.269		3.782.483		5.647.613		616.133		10.91%		4.398.616		73.94 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		14 Paket		23 Paket		4 Paket		17.39 %		4 Paket		17.39 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			14.725.751		8.556.744		7.887.159		1.496.927		18.98%		10.053.671		68.27%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			14.725.751		8.556.744		7.887.159		1.496.927		18.98%		10.053.671		68.27 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		5 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		100.00 %		3 Laporan		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**			29.352.493		12.970.394		29.352.493		0		0.00%		12.970.394		44.19%		
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	53 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		5.66 %		Dinas Perhubungan	
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**			13.392.600		6.534.114		13.392.600		0		0.00%		6.534.114		48.79 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10.0001	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**			15.959.893		6.436.280		15.959.893		0		0.00%		6.436.280		40.33 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		Dinas Perhubungan	
66	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			472.129.235		466.993.130		487.594.521		76.219.397		15.63%		543.212.527		115.06%		
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48.75 %		48.86 %		48.70 %		66.55 %		136.65 %		66.55 %		136.51%		Dinas Perhubungan	-
			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	50 km/jam		45.17 km/jam		48 km/jam		0 km/jam		0.00 %		0 km/jam		0.00%		Dinas Perhubungan	-
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%		92.54 %		80%		92.65 %		115.81 %		92.65 %		115.81%		Dinas Perhubungan	-
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%		81.28 %		80%		80%		100.00 %		80%		100.00%		Dinas Perhubungan	-
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			323.533.151		276.099.794		234.572.671		34.152.783		14.56%		310.252.577		95.90%		
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi		9 Lokasi		15 Lokasi		2 Lokasi		13.33 %		2 Lokasi		13.33 %		Dinas Perhubungan	
			Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		32 Kawasan		103.23 %		32 Kawasan		103.23 %		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			117.251.786		113.599.901		64.141.775		526.314		0.82%		114.126.215		97.33 %		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit		10685 Unit		3000 Unit		368 Unit		12.27 %		368 Unit		12.27 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			28.689.292		7.057.154		10.738.926		2.800		0.03%		7.059.954		24.61 %		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit		2051 Unit		2500 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			35.134.102		20.203.931		23.817.408		1.357.072		5.70%		21.561.004		61.37 %		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit		9000 Unit		9000 Unit		2250 Unit		25.00 %		2250 Unit		25.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			142.457.971		135.238.807		135.874.563		32.266.597		23.75%		167.505.404		117.58 %		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	105252 Unit		105846 Unit		102252 Unit		116531 Unit		113.96 %		116531 Unit		110.72 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			29.006.404		49.054.397		16.991.018		2.970.459		17.48%		52.024.856		179.36%		
			Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			29.006.404		49.054.397		16.991.018		2.970.459		17.48%		52.024.856		179.36 %		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit		14 Unit		12 Unit		14 Unit		116.67 %		14 Unit		116.67 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			20.323.724		16.612.602		16.785.982		3.036.912		18.09%		19.649.514		96.68%		
			Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas		94 Berkas		60 Berkas		27 Berkas		45.00 %		27 Berkas		45.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			20.323.724		16.612.602		16.785.982		3.036.912		18.09%		19.649.514		96.68 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371		8.614.417		7.637.808		1.208.553		15.82%		9.822.970		120.67%		
			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit		119969 Unit		134525 Unit		30511 Unit		22.68 %		30511 Unit		22.68 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8.140.371		8.614.417		7.637.808		1.208.553		15.82%		9.822.970		120.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit		34 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			21.001.558		32.582.293		30.804.537		6.297.198		20.44%		38.879.492		185.13%		
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		2 Lokasi		20.00 %		2 Lokasi		20.00 %		Dinas Perhubungan	
			Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		100.00 %		7 Jenis		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4.153.675		3.070.943		3.719.426		188.753		5.07%		3.259.696		78.48 %		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			16.847.884		29.511.350		27.085.111		6.108.445		22.55%		35.619.795		211.42 %		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.033.247		82.441.372		176.957.118		28.443.031		16.07%		110.884.403		170.50%		
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		75 Orang		75 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Perhubungan	
			Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor		18 Koridor		3 Koridor		14 Koridor		466.67 %		14 Koridor		466.67 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan			32.542.203		26.546.994		3.536.695		102.683		2.90%		26.649.677		81.89 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota			32.491.043		55.894.378		173.420.424		28.340.348		16.34%		84.234.726		259.26 %		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit		167 Unit		72 Unit		167 Unit		231.94 %		167 Unit		231.94 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.090.782		1.588.254		3.845.386		110.462		2.87%		1.698.716		33.37%		
			Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		0 Jaringan		0.00 %		0 Jaringan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.090.782		1.588.254		3.845.386		110.462		2.87%		1.698.716		33.37 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		6 Dokumen		10 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perhubungan	
67	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			3.518.992		1.336.776		1.472.330		3.550		0.24%		1.340.326		38.09%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perhubungan	-
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			3.518.992		1.336.776		1.472.330		3.550		0.24%		1.340.326		38.09%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.15.03.2.04.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota**			3.518.992		1.336.776		1.472.330		3.550		0.24%		1.340.326		38.09 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
68	2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**			5.874.008		4.941.921		5.679.967		879.795		15.49%		5.821.716		99.11%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perhubungan	-
	2.15.05.2.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**			5.874.008		4.941.921		5.679.967		879.795		15.49%		5.821.716		99.11%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.05.2.01.0002	**Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian**			5.874.008		4.941.921		5.679.967		879.795		15.49%		5.821.716		99.11 %		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
69	2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			18.550.501		16.278.761		19.513.000		3.630.224		18.60%		19.908.985		107.32%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.58 %		93.36 %		89.57 %		96.64 %		107.89 %		96.64 %		107.88%		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			15.330.201		14.431.722		16.951.182		3.350.673		19.77%		17.782.395		116.00%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.330.201		14.431.722		16.951.182		3.350.673		19.77%		17.782.395		116.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		55 Orang/bulan		56 Orang/bulan		55 Orang/bulan		98.21 %		55 Orang/bulan		148.65 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.996.579		1.486.245		1.674.171		267.435		15.97%		1.753.680		87.83%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.996.579		1.486.245		1.674.171		267.435		15.97%		1.753.680		87.83 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		100.00 %		4 Paket		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.223.721		360.794		887.647		12.117		1.37%		372.911		30.47%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.223.721		360.794		887.647		12.117		1.37%		372.911		30.47 %		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit		90 Unit		90 Unit		9 Unit		10.00 %		9 Unit		10.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
70	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			16.438.816		13.643.345		18.471.049		1.494.063		8.09%		15.137.408		92.08%		
			Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	89%		99.97 %		88%		100%		113.64 %		100%		112.36%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			16.438.816		13.643.345		18.471.049		1.494.063		8.09%		15.137.408		92.08%		
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100.00 %		4 Jenis		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			2.943.703		1.347.353		1.659.559		193.926		11.69%		1.541.279		52.36 %		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas		12 Dokumen		68 Komunitas		13 Komunitas		19.12 %		13 Komunitas		19.12 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			849.870		1.153.332		2.001.839		42.833		2.14%		1.196.165		140.75 %		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan		12 Dokumen		36 Permohonan		21 Permohonan		58.33 %		21 Permohonan		58.33 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.16.02.2.01.0021	**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**			12.645.244		11.142.660		14.809.651		1.257.304		8.49%		12.399.965		98.06 %		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	34 Media		12 Dokumen		34 Media		30 Media		88.24 %		30 Media		88.24 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
71	2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			74.293.471		59.843.599		83.478.406		1.358.815		1.63%		61.202.415		82.38%		
			Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			74.293.471		7.996.151		83.478.406		1.358.815		1.63%		9.354.966		12.59%		
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0015	**Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda**			498.811		357.765		370.879		61.033		16.46%		418.798		83.96 %		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan		58 Dokumen		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0028	**Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE**			31.760.170		2.470.682		2.458.129		435.629		17.72%		2.906.311		9.15 %		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	58 Dokumen		58 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		5.17 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0025	**Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi**			5.046.132		1.382.462		826.774		144.037		17.42%		1.526.499		30.25 %		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal	7 Layanan		190 Unit		7 Layanan		7 Layanan		100.00 %		7 Layanan		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional																
	2.16.03.2.02.0024	**Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**			31.347.122		0		70.258.841		607.280		0.86%		607.280		1.94 %		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	58 Perangkat Daerah		N/A		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100.00 %		58 Perangkat Daerah		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0016	**Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah**			5.641.236		3.785.242		9.563.783		110.837		1.16%		3.896.078		69.06 %		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen		2 Unit		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		8.33 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																	
72	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			40.889.705		28.667.161		32.457.832		6.394.545		19.70%		35.061.706		85.75%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		94.03 %		92%		94.89 %		103.14 %		94.89 %		102.03%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			34.133.950		26.005.087		28.587.198		5.903.590		20.65%		31.908.678		93.48%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			34.133.950		26.005.087		28.587.198		5.903.590		20.65%		31.908.678		93.48 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		97 Orang/bulan		99 Orang/bulan		96 Orang/bulan		96.97 %		96 Orang/bulan		114.29 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			6.755.756		2.662.073		3.870.635		490.955		12.68%		3.153.028		46.67%		
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			5.759.388		2.370.590		2.981.048		470.506		15.78%		2.841.096		49.33 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			996.368		291.483		889.586		20.449		2.30%		311.932		31.31 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
73	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			778.729		220.387		237.495		34.450		14.51%		254.837		32.72%		
			Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	44%		30.36 %		37%		31.81 %		85.97 %		31.81 %		72.30%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.729		220.387		237.495		34.450		14.51%		254.837		32.72%		
			Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi		30 koperasi		30 koperasi		6 koperasi		20.00 %		6 koperasi		20.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota			778.729		220.387		237.495		34.450		14.51%		254.837		32.72 %		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	30 Unit Usaha		30 Unit Usaha		30 Unit Usaha		6 Unit Usaha		20.00 %		6 Unit Usaha		20.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
74	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			1.063.751		756.455		758.927		124.093		16.35%		880.548		82.78%		
			Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	71%		85.54 %		70%		100%		142.86 %		100%		140.85%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1.063.751		756.455		758.927		124.093		16.35%		880.548		82.78%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi		415 koperasi		415 koperasi		80 koperasi		19.28 %		80 koperasi		19.28 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.03.2.01.0004	**Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota**			1.063.751		756.455		758.927		124.093		16.35%		880.548		82.78 %		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha		415 Unit Usaha		415 Unit Usaha		80 Unit Usaha		19.28 %		80 Unit Usaha		19.28 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
75	2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			565.398		202.360		1.739.668		0		0.00%		202.360		35.79%		
			Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	72%		44.26 %		57%		44.26 %		77.65 %		44.26 %		61.47%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			565.398		202.360		1.739.668		0		0.00%		202.360		35.79%		
			Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang		103 Orang		103 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.05.2.01.0001	**Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**			565.398		202.360		1.739.668		0		0.00%		202.360		35.79 %		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang		103 Orang		103 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
76	2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			559.292		453.329		656.135		60.640		9.24%		513.970		91.90%		
			Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	100%		60.00 %		80%		60%		75.00 %		60%		60.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			559.292		453.329		656.135		60.640		9.24%		513.970		91.90%		
			Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi		83 koperasi		83 koperasi		0 koperasi		0.00 %		0 koperasi		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			559.292		453.329		656.135		60.640		9.24%		513.970		91.90 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha		83 Unit Usaha		83 Unit Usaha		0 Unit Usaha		0.00 %		0 Unit Usaha		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
77	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			3.423.539		2.454.629		2.307.974		436.819		18.93%		2.891.447		84.46%		
			Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	50%		29.87 %		39.96 %		31.95 %		79.95 %		31.95 %		63.90%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%		87.76 %		100%		69.39 %		69.39 %		69.39 %		69.39%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			3.423.539		2.454.629		2.307.974		436.819		18.93%		2.891.447		84.46%		
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	9 sentra		11 sentra		10 sentra		2 sentra		20.00 %		2 sentra		22.22 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang		139 Orang		136 Orang		40 Orang		29.41 %		40 Orang		29.41 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			3.048.602		2.203.383		2.030.630		390.381		19.22%		2.593.764		85.08 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	9 Unit Usaha		11 Unit Usaha		10 Unit Usaha		2 Unit Usaha		20.00 %		2 Unit Usaha		22.22 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			374.936		251.246		277.344		46.438		16.74%		297.684		79.40 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha		139 Unit Usaha		136 Unit Usaha		40 Unit Usaha		29.41 %		40 Unit Usaha		29.41 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
78	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.548.127		1.662.015		1.927.336		123.818		6.42%		1.785.834		115.35%		
			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	100%		77.88 %		88%		23.72 %		26.95 %		23.72 %		23.72%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			1.548.127		1.662.015		1.927.336		123.818		6.42%		1.785.834		115.35%		
			Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang		500 orang		500 orang		150 orang		30.00 %		150 orang		30.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			1.548.127		1.662.015		1.927.336		123.818		6.42%		1.785.834		115.35 %		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha		500 Unit Usaha		500 Unit Usaha		150 Unit Usaha		30.00 %		150 Unit Usaha		30.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
79	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.852.455		13.674.891		16.776.984		2.785.043		16.60%		16.459.934		103.83%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		94.82 %		92%		97.65 %		106.14 %		97.65 %		105.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.545.528		10.399.359		12.196.868		2.281.246		18.70%		12.680.605		93.61%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.545.528		10.399.359		12.196.868		2.281.246		18.70%		12.680.605		93.61 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		37 Orang/bulan		37 Orang/bulan		36 Orang/bulan		97.30 %		36 Orang/bulan		133.33 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.306.927		3.275.532		4.580.116		503.797		11.00%		3.779.329		163.83%		
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.125.937		3.163.095		4.384.710		489.567		11.17%		3.652.662		171.81 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			180.990		112.437		195.406		14.230		7.28%		126.667		69.99 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
80	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			665.825		529.954		460.003		94.930		20.64%		624.884		93.85%		
			Jumlah Investor PMA/PMDN	230 Perusahaan		194.00 Perusahaan		210 Perusahaan		16 Perusahaan		7.62 %		16 Perusahaan		6.96%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			665.825		529.954		460.003		94.930		20.64%		624.884		93.85%		
			Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	78%		83.99 %		76%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			665.825		529.954		460.003		94.930		20.64%		624.884		93.85 %		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
81	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			738.216		649.578		645.143		46.868		7.26%		696.446		94.34%		
			Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%		58.36 %		60%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			738.216		649.578		645.143		46.868		7.26%		696.446		94.34%		
			Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor		293 Calon Investor / Investor		300 Calon Investor / Investor		0 Calon Investor / Investor		0.00 %		0 Calon Investor / Investor		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			738.216		649.578		645.143		46.868		7.26%		696.446		94.34 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
82	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			5.864.492		3.652.335		3.053.940		637.992		20.89%		4.290.328		73.16%		
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			5.864.492		3.652.335		3.053.940		637.992		20.89%		4.290.328		73.16%		
			jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	100000 berkas		117393 berkas		95000 berkas		31660 berkas		33.33 %		31660 berkas		31.66 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kegiatan usaha yang jin usahanya dilakukan pemantauan	12000 Kegiatan usaha		11602 Kegiatan usaha		12000 Kegiatan usaha		2791 Kegiatan usaha		23.26 %		2791 Kegiatan usaha		23.26 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.0008	**Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko**			1.092.027		747.110		622.579		118.503		19.03%		865.613		79.27 %		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12000 Kegiatan Usaha		11602 Kegiatan Usaha		12000 Kegiatan Usaha		2791 Kegiatan Usaha		23.26 %		2791 Kegiatan Usaha		23.26 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.0006	**Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**			4.772.465		2.905.225		2.431.361		519.489		21.37%		3.424.715		71.76 %		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	16.000 Pelaku Usaha		12174 Pelaku Usaha		14000 Pelaku Usaha		3420 Pelaku Usaha		24.43 %		3420 Pelaku Usaha		21,375.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
83	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			1.056.164		748.684		748.946		107.569		14.36%		856.253		81.07%		
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	46%		51.90 %		45%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			1.056.164		748.684		748.946		107.569		14.36%		856.253		81.07%		
			Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1500 perusahaan		1551 perusahaan		1400 perusahaan		449 perusahaan		32.07 %		449 perusahaan		29.93 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.0005	**Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**			283.670		159.323		182.077		0		0.00%		159.323		56.16 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha		289 Pelaku Usaha		280 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0.00 %		0 Pelaku Usaha		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.0006	**Pengawasan Penanaman Modal**			772.494		589.361		566.869		107.569		18.98%		696.930		90.22 %		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2960 Kegiatan Usaha		3047 Kegiatan Usaha		2930 Kegiatan Usaha		523 Kegiatan Usaha		17.85 %		523 Kegiatan Usaha		17.67 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
84	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			377.020		125.775		89.139		16.823		18.87%		142.598		37.82%		
			jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga		23.00 lembaga		20 lembaga		5 lembaga		25.00 %		5 lembaga		25.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			377.020		125.775		89.139		16.823		18.87%		142.598		37.82%		
			Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan		407 perusahaan		450 perusahaan		120 perusahaan		26.67 %		120 perusahaan		24.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01.0002	**Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**			377.020		125.775		89.139		16.823		18.87%		142.598		37.82 %		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
85	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			50.957.792		45.461.382		52.504.285		5.289.015		10.07%		50.750.396		99.59%		
			Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	28%		24.52 %		26%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47.98 %		47.99 %		47.60 %		10.03 %		21.07 %		10.03 %		20.90%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%		24.07 %		26%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			50.957.792		45.461.382		52.504.285		5.289.015		10.07%		50.750.396		99.59%		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100.00 %		1 laporan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis		2 jenis		2 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	24 jenis		22 jenis		19 jenis		1 jenis		5.26 %		1 jenis		4.17 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			2.475.234		1.470.789		2.006.323		189.997		9.47%		1.660.787		67.10 %		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari	810 Orang		925 Orang		859 Orang		62 Orang		7.22 %		62 Orang		7.65 %		Dinas Kebudayaan,	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda															Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.0013	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota**			1.715.027		405.964		457.168		45.895		10.04%		451.860		26.35 %		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan		825 Orang		10 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.0011	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota**			1.758.202		707.567		796.715		44.047		5.53%		751.614		42.75 %		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang		700 Orang		700 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01.0012	**Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda**			45.009.330		42.877.061		49.244.078		5.009.075		10.17%		47.886.136		106.39 %		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	15849 Orang		3515 Orang		3500 Orang		3142 Orang		89.77 %		3142 Orang		19.82 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
86	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			99.950.462		30.815.503		118.621.290		2.875.736		2.42%		33.691.239		33.71%		
			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	205 medali		223.00 medali		195 medali		0 medali		0.00 %		0 medali		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	28%		18.00 %		27%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi**			24.739.225		4.576.504		39.828.095		38.800		0.10%		4.615.304		18.66%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	9 kecamatan		5 kecamatan		7 kecamatan		0 kecamatan		0.00 %		0 kecamatan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			24.739.225		4.576.504		39.828.095		38.800		0.10%		4.615.304		18.66 %		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	84 Unit		24 Unit		78 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			41.576.316		10.959.947		52.787.143		194.037		0.37%		11.153.985		26.83%		
			Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga		47 cabang olahraga		50 cabang olahraga		0 cabang olahraga		0.00 %		0 cabang olahraga		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			41.576.316		10.959.947		52.787.143		194.037		0.37%		11.153.985		26.83 %		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	700 Orang		769 Orang		750 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			33.634.920		15.279.052		26.006.052		2.642.899		10.16%		17.921.951		53.28%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen		N/A		4 dokumen		1 dokumen		25.00 %		1 dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	166 lokasi		405 lokasi		393 lokasi		96 lokasi		24.43 %		96 lokasi		57.83 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.19.03.2.05.0007	**Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan**			5.784.896		1.991.118		6.952.697		88.750		1.28%		2.079.868		35.95 %		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	7 Laporan		7 Dokumen		7 Laporan		1 Laporan		14.29 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05.0009	**Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan**			27.850.024		13.287.934		19.053.356		2.554.149		13.41%		15.842.083		56.88 %		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	166 Unit		405 Unit		393 Unit		96 Unit		24.43 %		96 Unit		57.83 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																	
87	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			695.275		375.169		518.547		46.933		9.05%		422.102		60.71%		
			Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			695.275		375.169		518.547		46.933		9.05%		422.102		60.71%		
			Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		5 Sektor		100.00 %		5 Sektor		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.0010	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia**			695.275		375.169		518.547		46.933		9.05%		422.102		60.71 %		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																	
88	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			7.177.846		4.774.768		11.786.640		356.918		3.03%		5.131.686		71.49%		
			Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	41%		27.59 %		34%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.474.291		2.970.008		5.909.530		107.392		1.82%		3.077.400		68.78%		
			Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari		3 kali/per hari		3 kali/per hari		3.1 kali/per hari		103.33 %		3.1 kali/per hari		103.33 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			4.474.291		2.970.008		5.909.530		107.392		1.82%		3.077.400		68.78 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah		16 Perangkat Daerah		13 Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah		38.46 %		5 Perangkat Daerah		38.46 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			2.703.556		1.804.761		5.877.110		249.525		4.25%		2.054.286		75.98%		
			Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali		N/A		6 Kali		6 Kali		100.00 %		6 Kali		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.703.556		1.804.761		5.877.110		249.525		4.25%		2.054.286		75.98 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100.00 %		58 Perangkat Daerah		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
89	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			51.347.778		22.521.735		26.907.368		4.801.358		17.84%		27.323.093		53.21%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		94.35 %		92%		95.31 %		103.60 %		95.31 %		102.48%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.124.462		20.805.705		24.476.111		4.537.849		18.54%		25.343.554		78.89%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32.124.462		20.805.705		24.476.111		4.537.849		18.54%		25.343.554		78.89 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		79 Orang/bulan		79 Orang/bulan		76 Orang/bulan		96.20 %		76 Orang/bulan		105.56 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.223.316		1.716.030		2.431.257		263.509		10.84%		1.979.539		10.30%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17.544.444		1.426.098		1.723.899		227.318		13.19%		1.653.415		9.42 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.678.872		289.932		707.358		36.191		5.12%		326.124		19.43 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
90	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			6.343.173		4.036.199		9.124.877		135.312		1.48%		4.171.511		65.76%		
			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	100%		80.00 %		90%		20%		22.22 %		20%		20.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.343.173		4.036.199		9.124.877		135.312		1.48%		4.171.511		65.76%		
			Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	480 kali		408 kali		470 kali		65 kali		13.83 %		65 kali		13.54 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			6.343.173		4.036.199		9.124.877		135.312		1.48%		4.171.511		65.76 %		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		2 Objek		2 Objek		1 Objek		50.00 %		1 Objek		50.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
91	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.443.046		1.050.339		1.350.224		137.746		10.20%		1.188.085		48.63%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	62.00 %		60.56 %		61.00 %		60.56 %		99.28 %		60.56 %		97.68%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			2.443.046		1.050.339		1.350.224		137.746		10.20%		1.188.085		48.63%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		3 dokumen		25.00 %		3 dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.03.2.01.0001	**Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional**			2.443.046		1.050.339		1.350.224		137.746		10.20%		1.188.085		48.63 %		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	973 Orang		1436 Orang		934 Orang		851 Orang		91.11 %		851 Orang		87.46 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
92	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			1.292.538		887.474		1.063.588		19.600		1.84%		907.074		70.18%		
			Persentase siswa yang memahami materi sejarah	80%		77.55 %		78%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			1.292.538		887.474		1.063.588		19.600		1.84%		907.074		70.18%		
			Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali		10 kali		10 kali		0 kali		0.00 %		0 kali		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.04.2.01.0003	**Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah**			1.292.538		887.474		1.063.588		19.600		1.84%		907.074		70.18 %		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
93	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			1.514.094		946.717		1.176.501		210.508		17.89%		1.157.225		76.43%		
			Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92.04 %		95.11 %		92.04 %		29.7 %		32.27 %		29.7 %		32.27%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			1.514.094		946.717		1.176.501		210.508		17.89%		1.157.225		76.43%		
			Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	289 lokasi		275 lokasi		280 lokasi		80 lokasi		28.57 %		80 lokasi		27.68 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			1.514.094		946.717		1.176.501		210.508		17.89%		1.157.225		76.43 %		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	289 Objek		275 Objek		280 Objek		80 Objek		28.57 %		80 Objek		27.68 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
94	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			3.477.181		8.977.289		9.009.770		1.580.465		17.54%		10.557.754		303.63%		
			Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%		100.00 %		100%		22.22 %		22.22 %		22.22 %		22.22%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			3.477.181		8.977.289		9.009.770		1.580.465		17.54%		10.557.754		303.63%		
			Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	8 lokasi		9 lokasi		9 lokasi		9 lokasi		100.00 %		9 lokasi		112.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			223.926		422.046		450.849		29.900		6.63%		451.946		201.83 %		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit		730 Unit		730 Unit		200 Unit		27.40 %		200 Unit		27.40 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			433.529		799.291		813.648		6.864		0.84%		806.155		185.95 %		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			135.342		228.597		235.503		0		0.00%		228.597		168.90 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			2.684.384		7.527.355		7.509.770		1.543.701		20.56%		9.071.056		337.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	8 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		100.00 %		9 Unit		112.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
95	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.264.534		18.568.263		23.276.788		4.350.180		18.69%		22.918.443		118.97%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.02 %		98.28 %		98.03 %		98.88 %		100.87 %		98.88 %		99.86%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.905.797		16.309.505		20.772.128		3.899.377		18.77%		20.208.882		127.05%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.905.797		16.309.505		20.772.128		3.899.377		18.77%		20.208.882		127.05 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		69 Orang/bulan		70 Orang/bulan		69 Orang/bulan		98.57 %		69 Orang/bulan		153.33 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			227.838		87.013		105.522		6.410		6.07%		93.423		41.00%		
			Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			227.838		87.013		105.522		6.410		6.07%		93.423		41.00 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket		10 Paket		2 Paket		20.00 %		2 Paket		20.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			754.718		175.399		627.549		17.762		2.83%		193.160		25.59%		
			Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			754.718		175.399		627.549		17.762		2.83%		193.160		25.59 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		16 Unit		16 Unit		6 Unit		37.50 %		6 Unit		42.86 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.376.181		1.996.345		1.771.590		426.632		24.08%		2.422.978		101.97%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			214.853		287.270		320.280		42.751		13.35%		330.022		153.60 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.161.328		1.709.075		1.451.310		383.881		26.45%		2.092.956		96.84 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
96	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			32.318.230		16.464.349		15.512.437		2.943.319		18.97%		19.407.668		60.05%		
			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	100%		100.09 %		79.95 %		100.09 %		125.19 %		100.09 %		100.09%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100%		80.33 %		89.07 %		80.33 %		90.19 %		80.33 %		80.33%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
			Persentase event literasi yang diselenggarakan	100%		58.80 %		79.2 %		63.76 %		80.51 %		63.76 %		63.76%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31.664.882		16.112.399		15.015.943		2.899.002		19.31%		19.011.401		60.04%		
			Jenis buku yang disediakan	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Tingkat Kepuasan Pemustaka	83.5 nilai		97.03 nilai		83 nilai		98.74 nilai		118.96 %		98.74 nilai		118.25 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga		306 Lembaga		230 Lembaga		1482 Lembaga		644.35 %		1482 Lembaga		644.35 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			76.506		46.075		55.675		5.600		10.06%		51.675		67.54 %		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan		106 Perpustakaan		30 Perpustakaan		1058 Perpustakaan		3,526.67 %		1058 Perpustakaan		3,526.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			241.070		220.028		275.644		41.668		15.12%		261.696		108.56 %		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan		200 Perpustakaan		200 Perpustakaan		424 Perpustakaan		212.00 %		424 Perpustakaan		212.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			1.665.490		491.280		927.128		27.789		3.00%		519.069		31.17 %		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1505 Eksemplar		1500 Eksemplar		1502 Eksemplar		0 Eksemplar		0.00 %		0 Eksemplar		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.394.765		15.126.473		13.549.411		2.782.137		20.53%		17.908.610		60.92 %		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1505 Perpustakaan		1500 Perpustakaan		1502 Perpustakaan		686 Perpustakaan		45.67 %		686 Perpustakaan		45.58 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			287.051		228.543		208.085		41.808		20.09%		270.351		94.18 %		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang		511 Orang		500 Orang		547 Orang		109.40 %		547 Orang		109.40 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			653.349		351.950		496.494		44.317		8.93%		396.267		60.65%		
			Jumlah bibit penulis dan pendongeng	7429 orang		5461 orang		6445 orang		5657 orang		87.77 %		5657 orang		76.15 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			653.349		351.950		496.494		44.317		8.93%		396.267		60.65 %		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	260 Lokus		250 Lokus		255 Lokus		62 Lokus		24.31 %		62 Lokus		23.85 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
97	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			3.079.365		3.989.537		2.990.343		534.656		17.88%		4.524.193		146.92%		
			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	17.98 %		15.21 %		16.03 %		16.14 %		100.69 %		16.14 %		89.77%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30.01 %		29.38 %		29.42 %		30.14 %		102.45 %		30.14 %		100.43%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	100%		77.72 %		88.10 %		77.68 %		88.17 %		77.68 %		77.68%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			943.857		1.755.512		1.058.509		167.119		15.79%		1.922.630		203.70%		
			Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item		9000 item		9000 item		2250 item		25.00 %		2250 item		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	66 lembaga		57 lembaga		60 lembaga		0 lembaga		0.00 %		0 lembaga		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			783.408		1.497.009		813.765		119.904		14.73%		1.616.912		206.39 %		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas		471 Berkas		471 Berkas		117 Berkas		24.84 %		117 Berkas		24.84 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			160.449		258.503		244.744		47.215		19.29%		305.718		190.54 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan		66 Laporan		66 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			1.743.109		1.700.618		1.439.994		268.100		18.62%		1.968.718		112.94%		
			Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar		8640 Lembar		8640 Lembar		2160 Lembar		25.00 %		2160 Lembar		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			1.743.109		1.700.618		1.439.994		268.100		18.62%		1.968.718		112.94 %		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip		300 Arsip		300 Arsip		90 Arsip		30.00 %		90 Arsip		30.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			392.398		533.407		491.840		99.438		20.22%		632.845		161.28%		
			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga		70 Lembaga		69 Lembaga		69 Lembaga		100.00 %		69 Lembaga		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	9200 item		7783 item		8200 item		8260 item		100.73 %		8260 item		89.78 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.0002	**Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**			152.577		159.617		176.265		29.700		16.85%		189.317		124.08 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan		70 Laporan		69 Laporan		69 Laporan		100.00 %		69 Laporan		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.0001	**Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN**			239.821		373.790		315.575		69.738		22.10%		443.527		184.94 %		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna		9661 Pengguna		100 Pengguna		732 Pengguna		732.00 %		732 Pengguna		732.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
98	2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			178.274		52.700		90.209		10.800		11.97%		63.500		35.62%		
			Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	100%		59.98 %		79.98 %		20.48 %		25.61 %		20.48 %		20.48%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**			178.274		52.700		90.209		10.800		11.97%		63.500		35.62%		
			Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01.0001	**Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**			178.274		52.700		90.209		10.800		11.97%		63.500		35.62 %		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip		1016 Arsip		880 Arsip		347 Arsip		39.43 %		347 Arsip		39.43 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																	
99	3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			4.094.028		1.228.192		1.648.321		87.707		5.32%		1.315.899		32.14%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	50%		45.59 %		45%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			4.094.028		1.228.192		1.648.321		87.707		5.32%		1.315.899		32.14%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			4.094.028		1.228.192		1.648.321		87.707		5.32%		1.315.899		32.14 %		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	70 Unit		60 Unit		65 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
100	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.687.007		1.079.167		1.994.807		124.872		6.26%		1.204.039		71.37%		
			Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang/kelompok		30.00 orang/kelompok		35 orang/kelompok		30 orang/kelompok		85.71 %		30 orang/kelompok		75.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			379.056		289.530		437.839		33.960		7.76%		323.490		85.34%		
			Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	40 kali		36 kali		38 kali		4 kali		10.53 %		4 kali		10.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			379.056		289.530		437.839		33.960		7.76%		323.490		85.34 %		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok		31 Kelompok		35 Kelompok		4 Kelompok		11.43 %		4 Kelompok		10.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.307.951		789.637		1.556.968		90.912		5.84%		880.549		67.32%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.307.951		789.637		1.556.968		90.912		5.84%		880.549		67.32 %		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	68 Unit		58 Unit		63 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
101	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			45.590.707		157.109		207.018		18.866		9.11%		175.975		0.39%		
			Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus		0.00 kasus		0 kasus		0 kasus		100.00 %		0 kasus		N/A		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			45.590.707		157.109		207.018		18.866		9.11%		175.975		0.39%		
			Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali		12 Kali		12 Kali		2 Kali		16.67 %		2 Kali		16.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			45.590.707		157.109		207.018		18.866		9.11%		175.975		0.39 %		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha		12 Dokumen		1768 Pelaku Usaha		305 Pelaku Usaha		17.25 %		305 Pelaku Usaha		17.25 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
102	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			820.823		1.604.128		2.498.457		356.550		14.27%		1.960.679		238.87%		
			Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	80%		70.00 %		75%		75%		100.00 %		75%		93.75%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			820.823		1.604.128		2.498.457		356.550		14.27%		1.960.679		238.87%		
			Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra		2 sentra		2 sentra		2 sentra		100.00 %		2 sentra		66.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			820.823		1.604.128		2.498.457		356.550		14.27%		1.960.679		238.87 %		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	250 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		100.00 %		180 Pelaku Usaha		72.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
103	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			6.263.210		6.811.771		7.571.917		1.220.168		16.11%		8.031.939		128.24%		
			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	78.57 %		50.00 %		64.28 %		50%		77.78 %		50%		63.64%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			5.122.716		5.641.610		6.592.256		1.140.441		17.30%		6.782.052		132.39%		
			Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100.00 %		2 lokasi		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			5.122.716		5.641.610		6.592.256		1.140.441		17.30%		6.782.052		132.39 %		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		100.00 %		2 Lokasi		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.140.494		1.170.161		979.661		79.726		8.14%		1.249.887		109.59%		
			Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi		1 lokasi		2 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			150.212		121.826		174.761		11.200		6.41%		133.026		88.56 %		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		30 Laporan		50.00 %		30 Laporan		50.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			598.043		905.935		606.299		43.426		7.16%		949.361		158.74 %		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		1 Lokasi		2 Lokasi		0 Lokasi		0.00 %		0 Lokasi		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			392.238		142.400		198.600		25.100		12.64%		167.500		42.70 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
104	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			6.583.809		1.794.350		5.278.868		179.568		3.40%		1.973.918		29.98%		
			Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	47%		116.18 %		45%		0%		0.00 %		0%		0%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			6.583.809		1.794.350		5.278.868		179.568		3.40%		1.973.918		29.98%		
			Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			6.583.809		1.794.350		5.278.868		179.568		3.40%		1.973.918		29.98 %		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100.00 %		2 Kegiatan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
105	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			2.802.104		1.513.841		2.178.603		208.441		9.57%		1.722.282		61.46%		
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	100%		60.00 %		80%		5%		6.25 %		5%		5.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	28%		24.11 %		26%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			822.352		387.399		621.701		44.374		7.14%		431.773		52.50%		
			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis		2 jenis		2 jenis		3 jenis		150.00 %		3 jenis		150.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0009	**Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata**			424.235		185.535		294.368		19.758		6.71%		205.294		48.39 %		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	300 Orang		276 Orang		300 Orang		98 Orang		32.67 %		98 Orang		32.67 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0008	**Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI**			398.118		201.863		327.333		24.616		7.52%		226.479		56.89 %		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	80 Orang		60 Orang		80 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			1.979.752		1.126.442		1.556.902		164.067		10.54%		1.290.509		65.19%		
			Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk		4 Produk		5 Produk		0 Produk		0.00 %		0 Produk		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02.0001	**Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif**			1.979.752		1.126.442		1.556.902		164.067		10.54%		1.290.509		65.19 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang		220 Orang		220 Orang		17 Orang		7.73 %		17 Orang		6.80 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
106	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			7.660.760		4.155.520		6.157.166		464.717		7.55%		4.620.237		60.31%		
			Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	45 Orang		35.00 Orang		40 Orang		35 Orang		87.50 %		35 Orang		77.78%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			6.792.603		2.597.491		2.753.200		252.520		9.17%		2.850.011		41.96%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			6.792.603		2.081.176		2.753.200		252.520		9.17%		2.333.696		34.36 %		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			868.157		1.558.029		3.403.967		212.196		6.23%		1.770.226		203.91%		
			Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / T anaman Skala Kecil			868.157		1.558.029		3.403.967		212.196		6.23%		1.770.226		203.91 %		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
107	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			21.217.227		12.290.442		11.699.182		1.824.961		15.60%		14.115.403		66.53%		
			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola	2 Ha		2.00 Ha		2 Ha		0 Ha		0.00 %		0 Ha		0.00%		Dinas Ketahanan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat															Pangan dan Pertanian	
			Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	35 Lokasi		24.00 Lokasi		29 Lokasi		24 Lokasi		82.76 %		24 Lokasi		68.57%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**			1.309.313		6.043.590		4.629.593		1.015.750		21.94%		7.059.341		539.16%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01.0003	**Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya**			1.309.313		6.043.590		4.629.593		1.015.750		21.94%		7.059.341		539.16 %		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		11 Laporan		68.75 %		11 Laporan		183.33 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**			19.907.914		6.246.851		7.069.589		809.211		11.45%		7.056.062		35.44%		
			Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		15.38 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02.0009	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**			19.907.914		6.246.851		7.069.589		809.211		11.45%		7.056.062		35.44 %		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		15.38 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
108	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			1.140.798		1.668.710		2.346.040		215.467		9.18%		1.884.177		165.16%		
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89.5 %		90.58 %		89.5 %		78.04 %		87.20 %		78.04 %		87.20%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	8 kelompok		6.00 kelompok		7 kelompok		0 kelompok		0.00 %		0 kelompok		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			845.362		1.296.816		1.199.492		209.867		17.50%		1.506.683		178.23%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%		89.15 %		80%		88.62 %		110.78 %		88.62 %		110.78 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			845.362		1.296.816		1.199.492		209.867		17.50%		1.506.683		178.23 %		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			295.436		371.894		1.146.547		5.600		0.49%		377.494		127.78%		
			Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	45 Unit		36 Unit		40 Unit		9 Unit		22.50 %		9 Unit		20.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			295.436		371.894		1.146.547		5.600		0.49%		377.494		127.78 %		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	40 Unit Usaha		36 Unit Usaha		40 Unit Usaha		9 Unit Usaha		22.50 %		9 Unit Usaha		22.50 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
109	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			113.553		28.000		48.922		5.600		11.45%		33.600		29.59%		
			Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			113.553		28.000		48.922		5.600		11.45%		33.600		29.59%		
			Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%		100%		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			113.553		28.000		48.922		5.600		11.45%		33.600		29.59 %		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
110	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.709.423		2.058.457		2.784.192		256.894		9.23%		2.315.351		85.46%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
			Tingkat Produktivitas Pertanian	6.05 ton/ha		6.72 ton/ha		6 ton/ha		6.79 ton/ha		113.17 %		6.79 ton/ha		112.23%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			2.709.423		2.058.457		2.784.192		256.894		9.23%		2.315.351		85.46%		
			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang		25 orang		25 orang		0 orang		0.00 %		0 orang		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali		7 kali		7 kali		0 kali		0.00 %		0 kali		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.0002	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**			1.702.059		962.129		1.751.811		90.559		5.17%		1.052.688		61.85 %		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit		7 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.0001	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**			1.007.364		1.096.329		1.032.381		166.334		16.11%		1.262.663		125.34 %		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																	
111	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			1.879.526		899.481		904.619		146.730		16.22%		1.046.211		55.66%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan	96%		97.57 %		95%		100%		105.26 %		100%		104.17%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-
	3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**			501.503		255.482		271.654		43.344		15.96%		298.826		59.59%		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			501.503		255.482		271.654		43.344		15.96%		298.826		59.59 %		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen		616 Dokumen		450 Dokumen		132 Dokumen		29.33 %		132 Dokumen		29.33 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			585.879		250.280		221.052		37.641		17.03%		287.921		49.14%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			585.879		250.280		221.052		37.641		17.03%		287.921		49.14 %		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen		203 Dokumen		60 Dokumen		67 Dokumen		111.67 %		67 Dokumen		111.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			127.369		82.926		98.504		15.119		15.35%		98.045		76.98%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri			127.369		82.926		98.504		15.119		15.35%		98.045		76.98 %		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen		27 Dokumen		24 Dokumen		8 Dokumen		33.33 %		8 Dokumen		33.33 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba			127.369		28.000		52.197		5.600		10.73%		33.600		26.38%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri																	
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri			127.369		28.000		52.197		5.600		10.73%		33.600		26.38 %		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen		27 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			537.406		282.792		261.213		45.027		17.24%		327.819		61.00%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			537.406		282.792		261.213		45.027		17.24%		327.819		61.00 %		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen		45 Dokumen		40 Dokumen		18 Dokumen		45.00 %		18 Dokumen		45.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
112	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			4.968.209		4.532.608		4.295.244		1.046.938		24.37%		5.579.546		112.30%		
			Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			4.968.209		4.532.608		4.295.244		1.046.938		24.37%		5.579.546		112.30%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02.0001	**Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**			4.968.209		4.532.608		4.295.244		1.046.938		24.37%		5.579.546		112.30 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen		645 Dokumen		611 Dokumen		150 Dokumen		24.55 %		150 Dokumen		24.55 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
113	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			1.309.691		610.175		752.338		119.297		15.86%		729.472		55.70%		
			Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**			1.309.691		610.175		752.338		119.297		15.86%		729.472		55.70%		
			Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.0003	**Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota**			425.952		263.394		251.066		67.336		26.82%		330.730		77.64 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.0001	**Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**			883.738		346.781		501.272		51.961		10.37%		398.742		45.12 %		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
114	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			2.045.562		618.272		792.743		82.870		10.45%		701.142		34.28%		
			Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			2.045.562		618.272		792.743		82.870		10.45%		701.142		34.28%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			1.898.815		520.604		675.840		67.776		10.03%		588.379		30.99 %		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	24290 Unit		23358 Unit		23810 Unit		6354 Unit		26.69 %		6354 Unit		26.16 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			146.747		97.669		116.903		15.095		12.91%		112.763		76.84 %		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang		1222 Orang		1200 Orang		306 Orang		25.50 %		306 Orang		25.50 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
115	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			6.660.120		6.652.756		6.575.613		1.121.644		17.06%		7.774.400		116.73%		
			Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			6.660.120		6.652.756		6.575.613		1.121.644		17.06%		7.774.400		116.73%		
			Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota			6.660.120		6.652.756		6.575.613		1.121.644		17.06%		7.774.400		116.73 %		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan	5220 UMKM		5220 UMKM		5220 UMKM		1000 UMKM		19.16 %		1000 UMKM		19.16 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi																
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
116	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			726.718		495.562		958.755		36.033		3.76%		531.595		73.15%		
			Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	26%		20.01 %		22%		3.79 %		17.23 %		3.79 %		14.58%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			726.718		495.562		958.755		36.033		3.76%		531.595		73.15%		
			Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			136.965		113.075		136.965		0		0.00%		113.075		82.56 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			589.753		382.487		821.790		36.033		4.38%		418.520		70.97 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
117	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			331.422		295.539		375.278		29.050		7.74%		324.590		97.94%		
			Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	90%		85.21 %		87%		38.13 %		43.83 %		38.13 %		42.37%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			331.422		295.539		375.278		29.050		7.74%		324.590		97.94%		
			Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			331.422		295.539		375.278		29.050		7.74%		324.590		97.94 %		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
118	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			213.589		227.600		342.244		39.600		11.57%		267.200		125.10%		
			Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			213.589		227.600		342.244		39.600		11.57%		267.200		125.10%		
			Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			213.589		227.600		342.244		39.600		11.57%		267.200		125.10 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
119	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			262.195.831		261.375.376		278.995.000		43.351.880		15.54%		304.727.256		116.22%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%		95.45 %		100%		96.62 %		96.62 %		96.62 %		96.62%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%		100.00 %		98%		100%		102.04 %		100%		102.04%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	75%		100.00 %		72.22 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	98%		99.64 %		96%		100%		104.17 %		100%		102.04%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%		100.00 %		90%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	-
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91.628.677		66.560.269		81.928.394		14.725.052		17.97%		81.285.321		88.71%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			91.628.677		66.560.269		81.928.394		14.725.052		17.97%		81.285.321		88.71 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan		200 Orang/bulan		197 Orang/bulan		195 Orang/bulan		98.98 %		195 Orang/bulan		124.20 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.083.838		686.930		536.431		136.094		25.37%		823.024		20.15%		
			Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			4.083.838		686.930		536.431		136.094		25.37%		823.024		20.15 %		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket		5 Paket		5 Paket		1 Paket		20.00 %		1 Paket		20.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33.982.990		17.851.340		57.653.627		4.582.957		7.95%		22.434.297		66.02%		
			Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.982.990		17.851.340		57.653.627		4.582.957		7.95%		22.434.297		66.02 %		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1200 Unit		6366 Unit		1400 Unit		538 Unit		38.43 %		538 Unit		44.83 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.205.968		146.359.655		105.064.833		18.049.659		17.18%		164.409.314		260.12%		
			Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			52.008.578		140.288.508		99.873.042		17.173.270		17.20%		157.461.777		302.76 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.349.570		3.850.845		3.140.118		506.767		16.14%		4.357.612		68.63 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.847.821		2.220.303		2.051.673		369.622		18.02%		2.589.925		53.42 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			9.302.988		8.304.104		12.222.634		1.775.122		14.52%		10.079.226		108.34%		
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0004	**Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			8.072.880		8.129.478		12.036.469		1.725.000		14.33%		9.854.478		122.07 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		2 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			1.230.108		174.626		186.165		50.122		26.92%		224.749		18.27 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		2 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**			3.818.611		2.327.689		3.229.786		338.760		10.49%		2.666.448		69.83%		
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi		58 instansi		58 instansi		12 instansi		20.69 %		12 instansi		20.69 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi		58 instansi		58 instansi		12 instansi		20.69 %		12 instansi		20.69 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit		253 unit		253 unit		253 unit		100.00 %		253 unit		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0004	**Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana**			1.545.079		622.631		1.195.537		83.903		7.02%		706.534		45.73 %		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	4.01.01.2.13.0001	**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**			1.005.337		859.265		1.019.345		136.937		13.43%		996.202		99.09 %		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0003	**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**			1.268.196		845.793		1.014.904		117.920		11.62%		963.712		75.99 %		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			56.172.758		19.285.389		18.359.296		3.744.237		20.39%		23.029.626		41.00%		
			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0001	**Fasilitasi Keprotokolan**			54.169.994		18.617.037		17.923.137		3.666.282		20.46%		22.283.319		41.14 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0002	**Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**			2.002.763		668.352		436.159		77.955		17.87%		746.307		37.26 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
120	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			40.046.015		99.965.458		275.464.980		58.058.069		21.08%		158.023.528		394.60%		
			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	100%		100.00 %		99%		100%		101.01 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	100%		79.33 %		77.83 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	-
			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari		14.00 hari		14 hari		0 hari		200.00 %		0 hari		200.00		Sekretariat Daerah	-
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari		2.00 hari		2 hari		0 hari		200.00 %		0 hari		200.00		Sekretariat Daerah	-
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	100%		100.00 %		90%		100%		111.11 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	100%		87.10 %		90.32 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	100%		100.00 %		97%		100%		103.09 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			14.579.943		7.240.600		12.563.851		511.099		4.07%		7.751.699		53.17%		
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	31 Kecamatan		27 Kecamatan		28 Kecamatan		0 Kecamatan		0.00 %		0 Kecamatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	185 Lembaga		142 Lembaga		144 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.403.004		4.243.992		4.426.347		231.923		5.24%		4.475.916		82.84 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			4.813.183		1.910.130		4.410.785		94.681		2.15%		2.004.811		41.65 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			4.363.756		1.086.478		3.726.719		184.494		4.95%		1.270.972		29.13 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.931.081		86.966.500		252.264.437		56.641.347		22.45%		143.607.847		2,912.30%		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	4.01.02.2.02.0001	**Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**			3.101.912		33.502.844		32.633.395		5.602.518		17.17%		39.105.363		1,260.69 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.0003	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat**			104.165		52.626.891		61.453.965		12.126.250		19.73%		64.753.142		62,163.73 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.0002	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial**			1.725.003		836.764		158.177.077		38.912.578		24.60%		39.749.342		2,304.31 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			17.480.417		4.671.125		7.767.319		676.949		8.72%		5.348.075		30.59%		
			Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum		21 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		2 permasalahan hukum		10.00 %		2 permasalahan hukum		10.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum		67 rancangan produk hukum		60 rancangan produk hukum		15 rancangan produk hukum		25.00 %		15 rancangan produk hukum		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum		67 produk hukum		60 produk hukum		15 produk hukum		25.00 %		15 produk hukum		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.0002	**Fasilitasi Bantuan Hukum**			8.163.200		1.553.180		2.337.888		289.077		12.36%		1.842.256		22.57 %		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus		21 Kasus		20 Kasus		2 Kasus		10.00 %		2 Kasus		10.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.0001	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**			7.357.890		2.129.127		4.091.596		306.943		7.50%		2.436.070		33.11 %		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen		67 Dokumen		60 Dokumen		15 Dokumen		25.00 %		15 Dokumen		25.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	4.01.02.2.03.0003	**Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**			1.959.326		988.819		1.337.834		80.930		6.05%		1.069.749		54.60 %		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen		67 Dokumen		60 Dokumen		15 Dokumen		25.00 %		15 Dokumen		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			3.054.574		1.087.234		2.869.373		228.674		7.97%		1.315.908		43.08%		
			Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga		31 Lembaga		32 Lembaga		8 Lembaga		25.00 %		8 Lembaga		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga		11 Lembaga		12 Lembaga		3 Lembaga		25.00 %		3 Lembaga		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga		20 Lembaga		20 Lembaga		5 Lembaga		25.00 %		5 Lembaga		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0003	**Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama**			171.358		214.550		451.887		43.783		9.69%		258.333		150.76 %		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0001	**Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**			1.043.032		519.579		608.803		174.091		28.60%		693.670		66.51 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0002	**Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri**			1.840.185		353.105		1.808.683		10.800		0.60%		363.905		19.78 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
121	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			34.422.025		15.528.731		20.134.497		1.960.399		9.74%		17.489.130		50.81%		
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	100%		100.00 %		90%		33.33 %		37.03 %		33.33 %		33.33%		Sekretariat Daerah	-
			Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	-
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	86%		85.07 %		85.5 %		1.24 %		1.45 %		1.24 %		1.44%		Sekretariat Daerah	-
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			4.723.953		5.336.147		4.691.641		490.837		10.46%		5.826.984		123.35%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0001	**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**			2.272.753		936.290		1.221.798		135.400		11.08%		1.071.690		47.15 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1.863.337		3.808.798		2.840.033		228.936		8.06%		4.037.734		216.69 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			587.864		591.059		629.810		126.501		20.09%		717.561		122.06 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			16.052.307		6.678.176		10.532.329		874.751		8.31%		7.552.927		47.05%		
			Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			8.427.767		4.786.568		6.528.784		540.050		8.27%		5.326.618		63.20 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		2 Laporan		12.50 %		2 Laporan		12.50 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			7.624.540		1.891.608		4.003.546		334.701		8.36%		2.226.309		29.20 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			13.527.842		3.474.108		4.819.622		594.811		12.34%		4.068.919		30.08%		
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	98%		100%		96%		100%		104.17 %		100%		102.04 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			11.720.292		207.630		315.600		18.600		5.89%		226.230		1.93 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		308 Orang		300 Orang		75 Orang		25.00 %		75 Orang		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.807.550		3.266.478		4.504.022		576.211		12.79%		3.842.689		212.59 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen		102 Dokumen		20 Dokumen		7 Dokumen		35.00 %		7 Dokumen		35.00 %		Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			117.922		40.300		90.905		0		0.00%		40.300		34.18%		
			Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			117.922		40.300		90.905		0		0.00%		40.300		34.18 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD																	
122	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			211.561.797		117.381.352		198.903.813		24.456.333		12.30%		141.837.685		67.04%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		92.74 %		93.5 %		93.46 %		99.96 %		93.46 %		99.43%		Sekretariat DPRD	-
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.979.496		12.408.925		15.828.136		2.869.646		18.13%		15.278.571		95.61%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.979.496		12.408.925		15.828.136		2.869.646		18.13%		15.278.571		95.61 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan		50 Orang/bulan		98.04 %		50 Orang/bulan		86.21 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.164.551		28.968.549		35.621.377		5.175.915		14.53%		34.144.464		113.19%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.164.551		28.968.549		35.621.377		5.175.915		14.53%		34.144.464		113.19 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket		11 Paket		11 Paket		100.00 %		11 Paket		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.459.328		4.993.782		5.333.567		412.686		7.74%		5.406.468		99.03%		
			Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	1 Hari		1.02 Hari		1 Hari		1 Hari		100.00 %		1 Hari		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.459.328		4.993.782		5.333.567		412.686		7.74%		5.406.468		99.03 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit		206 Unit		204 Unit		39 Unit		19.12 %		39 Unit		19.12 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			96.495.857		28.445.816		85.215.578		2.991.074		3.51%		31.436.890		32.58%		
			Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		100.00 %		1 Hari		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14.0001	**Fasilitasi Keprotokolan**			96.495.857		28.445.816		85.215.578		2.991.074		3.51%		31.436.890		32.58 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan		97 Laporan		96 Laporan		24 Laporan		25.00 %		24 Laporan		25.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			59.974.263		42.022.087		54.522.057		12.967.543		23.78%		54.989.630		91.69%		
			Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**			59.974.263		42.022.087		54.522.057		12.967.543		23.78%		54.989.630		91.69 %		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan		50 Orang/Bulan		50 Orang/Bulan		50 Orang/Bulan		100.00 %		50 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**			3.488.302		542.193		2.383.099		39.468		1.66%		581.661		16.67%		
			Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	2 Hari		1.27 Hari		2 Hari		1 Hari		150.00 %		1 Hari		150.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	**Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**			3.488.302		542.193		2.383.099		39.468		1.66%		581.661		16.67 %		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan		11 Laporan		36 Laporan		2 Laporan		5.56 %		2 Laporan		5.56 %		Sekretariat DPRD	
123	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			50.604.084		61.989.027		77.104.891		21.901.382		28.40%		83.890.410		165.78%		
			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat DPRD	-
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			5.204.429		901.494		3.966.580		42.335		1.07%		943.830		18.14%		
			Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	**Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**			5.204.429		901.494		3.966.580		42.335		1.07%		943.830		18.14 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**			23.981.751		27.315.122		27.781.433		6.405.506		23.06%		33.720.628		140.61%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang		28 Orang		50 Orang		19 Orang		38.00 %		19 Orang		38.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			1.976.169		546.000		1.876.347		109.000		5.81%		655.000		33.14 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen		6 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		150.00 %		3 Dokumen		150.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			22.005.582		26.769.122		25.905.086		6.296.506		24.31%		33.065.628		150.26 %		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100.00 %		4 Dokumen		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			16.446.120		30.361.680		40.676.058		15.083.833		37.08%		45.445.512		276.33%		
			Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		33.33 %		1 Dokumen		33.33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			16.446.120		30.361.680		40.676.058		15.083.833		37.08%		45.445.512		276.33 %		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen		100 Dokumen		150 Dokumen		50 Dokumen		33.33 %		50 Dokumen		33.33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			4.971.784		3.410.732		4.680.819		369.708		7.90%		3.780.440		76.04%		
			Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	2 Hari		1 Hari		2 Hari		1 Hari		150.00 %		1 Hari		150.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			4.971.784		3.410.732		4.680.819		369.708		7.90%		3.780.440		76.04 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen		55 Dokumen		36 Dokumen		11 Dokumen		30.56 %		11 Dokumen		30.56 %		Sekretariat DPRD	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5.01	PERENCANAAN																	
124	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.308.369		26.611.544		30.021.852		5.658.837		18.85%		32.270.381		91.40%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.69 %		97.47 %		95.62 %		97.98 %		102.47 %		97.98 %		102.39%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			210.672		238.160		282.328		37.700		13.35%		275.860		130.94%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			210.672		238.160		282.328		37.700		13.35%		275.860		130.94 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			31.185.574		23.367.636		25.544.049		5.047.562		19.76%		28.415.198		91.12%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			31.185.574		23.367.636		25.544.049		5.047.562		19.76%		28.415.198		91.12 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		69 Orang/bulan		69 Orang/bulan		66 Orang/bulan		95.65 %		66 Orang/bulan		143.48 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			3.912.122		3.005.748		4.195.475		573.575		13.67%		3.579.323		91.49%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			3.386.893		2.689.987		3.376.030		524.325		15.53%		3.214.312		94.90 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			525.229		315.761		819.445		49.250		6.01%		365.011		69.50 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
125	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			3.929.602		2.461.307		2.469.109		431.385		17.47%		2.892.692		73.61%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah															Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			1.402.991		1.203.410		1.202.234		314.742		26.18%		1.518.153		108.21%		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen		6 dokumen		7 dokumen		2 dokumen		28.57 %		2 dokumen		33.33 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01.0007	**Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**			1.402.991		1.203.410		1.202.234		314.742		26.18%		1.518.153		108.21 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.519.411		747.116		724.979		50.842		7.01%		797.958		52.52%		
			Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD		58 PD		58 PD		58 PD		100.00 %		58 PD		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.02.0001	**Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.519.411		747.116		724.979		50.842		7.01%		797.958		52.52 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)															Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			1.007.199		510.781		541.896		65.800		12.14%		576.581		57.25%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD		58 PD		58 PD		58 PD		100.00 %		58 PD		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03.0003	**Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**			1.007.199		510.781		541.896		65.800		12.14%		576.581		57.25 %		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
126	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			10.791.670		5.008.346		5.427.802		789.725		14.55%		5.798.072		53.73%		
			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98.63 %		98.82 %		98.56 %		99.41 %		100.86 %		99.41 %		100.79%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			3.064.620		1.791.118		2.009.006		330.143		16.43%		2.121.261		69.22%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01.0008	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**			1.742.848		1.037.762		1.238.209		193.328		15.61%		1.231.091		70.64 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.01.03.2.01.0004	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**			1.321.772		753.356		770.797		136.814		17.75%		890.170		67.35 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			3.728.973		1.475.183		1.863.646		233.563		12.53%		1.708.747		45.82%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.0004	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**			2.300.253		764.062		953.567		132.918		13.94%		896.980		38.99 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.0008	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**			1.428.720		711.121		910.079		100.646		11.06%		811.767		56.82 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			3.998.078		1.742.045		1.555.150		226.019		14.53%		1.968.064		49.23%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.0004	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi**			2.288.163		902.102		681.139		118.173		17.35%		1.020.276		44.59 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1.709.914		839.943		874.011		107.846		12.34%		947.788		55.43 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.02	KEUANGAN																	
127	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			158.554.798		81.246.134		300.720.459		16.949.247		5.64%		98.195.381		61.93%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		93.83 %		93%		95.83 %		103.04 %		95.83 %		101.95%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		95.94 %		93%		96.2 %		103.44 %		96.2 %		102.34%		Badan Pendapatan Daerah	-
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			138.590.122		67.071.373		284.322.210		14.898.476		5.24%		81.969.849		59.15%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.513.641		28.792.537		243.658.664		6.474.524		2.66%		35.267.061		105.23 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		89 Orang/bulan		89 Orang/bulan		88 Orang/bulan		98.88 %		88 Orang/bulan		106.02 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			105.076.481		38.278.835		40.663.546		8.423.952		20.72%		46.702.787		44.45 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan		119 Orang/bulan		118 Orang/bulan		118 Orang/bulan		100.00 %		118 Orang/bulan		103.51 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			302.277		237.417		237.515		38.532		16.22%		275.949		91.29%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.04.0002	**Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah**			302.277		237.417		237.515		38.532		16.22%		275.949		91.29 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			2.257.261		50.949		140.224		0		0.00%		50.949		2.26%		
			Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.0010	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			2.257.261		50.949		140.224		0		0.00%		50.949		2.26 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit		200 Unit		200 Unit		200 Unit		100.00 %		200 Unit		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			8.380.438		10.635.122		11.823.419		1.690.349		14.30%		12.325.471		147.07%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			2.381.130		2.514.281		2.460.965		397.027		16.13%		2.911.307		122.27 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			5.702.468		5.660.728		5.911.788		908.904		15.37%		6.569.631		115.21 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			52.856		405.354		419.918		96.735		23.04%		502.089		949.92 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			243.984		2.054.759		3.030.748		287.684		9.49%		2.342.444		960.08 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			9.024.700		3.251.273		4.197.092		321.890		7.67%		3.573.164		39.59%		
			Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			9.024.700		3.251.273		4.197.092		321.890		7.67%		3.573.164		39.59 %		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.240 Unit		1821 Unit		2380 Unit		230 Unit		9.66 %		230 Unit		10,267.86 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
128	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			22.253.236		7.098.338		44.708.860		1.120.914		2.51%		8.219.252		36.94%		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Pendapatan Daerah	-
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**			2.377.973		3.488.952		3.580.704		553.117		15.45%		4.042.070		169.98%		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun																
	5.02.02.2.01.0001	**Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**			570.265		1.134.049		1.230.976		298.262		24.23%		1.432.311		251.17 %		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**			595.726		801.567		759.023		88.700		11.69%		890.266		149.44 %		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0008	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD**			637.253		1.270.075		1.269.578		118.256		9.31%		1.388.331		217.86 %		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**			574.729		283.262		321.126		47.900		14.92%		331.162		57.62 %		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			3.181.881		1.883.392		2.300.704		335.509		14.58%		2.218.901		69.74%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		1 dokumen		25.00 %		1 dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	104440 berkas		108992 berkas		99464 berkas		19785 berkas		19.89 %		19785 berkas		18.94 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen		N/A		244 Dokumen		60 Dokumen		24.59 %		60 Dokumen		24.59 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.0001	**Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**			625.752		607.156		541.828		105.945		19.55%		713.101		113.96 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		60 Dokumen		24.59 %		60 Dokumen		24.59 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.0005	**Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**			376.596		382.730		368.299		69.943		18.99%		452.673		120.20 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.2.02.0009	**Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait**			2.179.533		893.506		1.390.578		159.621		11.48%		1.053.127		48.32 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	104440 Dokumen		108992 Dokumen		99464 Dokumen		19785 Dokumen		19.89 %		19785 Dokumen		18.94 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			1.193.382		1.128.467		1.327.453		189.987		14.31%		1.318.454		110.48%		
			Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		9 Dokumen		37.50 %		9 Dokumen		37.50 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.0008	**Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**			1.193.382		1.128.467		1.327.453		189.987		14.31%		1.318.454		110.48 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		9 Dokumen		37.50 %		9 Dokumen		37.50 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			15.500.000		597.526		37.500.000		42.301		0.11%		639.827		4.13%		
			Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%		25%		25%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			500.000		0		500.000		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			15.000.000		597.526		37.000.000		42.301		0.11%		639.827		4.27 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
129	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			50.448.426		26.107.014		26.855.210		5.436.539		20.24%		31.543.553		62.53%		
			Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33.3 %		34.00 %		33.3 %		8.33 %		25.02 %		8.33 %		25.02%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			50.448.426		26.107.014		26.855.210		5.436.539		20.24%		31.543.553		62.53%		
			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen		31 Dokumen		30 Dokumen		7 Dokumen		23.33 %		7 Dokumen		23.33 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			10.102.386		17.623.128		17.652.981		3.828.264		21.69%		21.451.391		212.34 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	7679 Dokumen		8554 Dokumen		7679 Dokumen		1916 Dokumen		24.95 %		1916 Dokumen		24.95 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Penghapusan Barang Milik Daerah																
	5.02.03.2.01.0013	**Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota**			3.138.336		1.361.816		1.388.350		283.594		20.43%		1.645.410		52.43 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		100.00 %		60 Orang		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0007	**Pengamanan Barang Milik Daerah**			9.289.359		5.488.063		6.207.685		1.005.311		16.19%		6.493.374		69.90 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0009	**Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**			27.918.345		1.634.007		1.606.194		319.370		19.88%		1.953.377		7.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan		31 Laporan		30 Laporan		7 Laporan		23.33 %		7 Laporan		23.33 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
130	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			37.665.666		17.639.782		15.853.354		2.929.097		18.48%		20.568.879		54.61%		
			Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	85%		99.96 %		84%		100%		119.05 %		100%		117.65%		Badan Pendapatan Daerah	-
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%		77.37 %		60%		52.69 %		87.82 %		52.69 %		87.82%		Badan Pendapatan Daerah	-
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	73%		69.06 %		71%		19.5 %		27.46 %		19.5 %		26.71%		Badan Pendapatan Daerah	-
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			37.665.666		17.639.782		15.853.354		2.929.097		18.48%		20.568.879		54.61%		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Objek Pajak		22318 Objek Pajak		20211 Objek Pajak		8451 Objek Pajak		41.81 %		8451 Objek Pajak		40.99 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0014	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**			697.318		302.730		311.809		74.538		23.90%		377.267		54.10 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0011	**Penagihan Pajak Daerah**			4.872.361		3.221.236		2.771.775		528.871		19.08%		3.750.107		76.97 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0005	**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**			17.564.766		6.526.269		5.841.163		1.206.581		20.66%		7.732.851		44.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0013	**Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**			1.397.431		2.880.014		2.887.838		426.310		14.76%		3.306.323		236.60 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0007	**Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**			13.133.790		4.709.533		4.040.768		692.798		17.15%		5.402.331		41.13 %		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20.615 Obyek Pajak		22318 Obyek Pajak		20211 Obyek Pajak		8451 Obyek Pajak		41.81 %		8451 Obyek Pajak		40,994.42 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**																	
131	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			19.003.190		16.252.694		19.138.517		3.839.582		20.06%		20.092.277		105.73%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		94.18 %		89%		95.28 %		107.06 %		95.28 %		107.06%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			16.673.062		15.060.771		17.235.803		3.632.783		21.08%		18.693.553		112.12%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.673.062		15.060.771		17.235.803		3.632.783		21.08%		18.693.553		112.12 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		44 Orang/bulan		45 Orang/bulan		43 Orang/bulan		95.56 %		43 Orang/bulan		107.50 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.624.599		677.650		1.309.162		106.016		8.10%		783.665		48.24%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.624.599		677.650		1.309.162		106.016		8.10%		783.665		48.24 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		15 Paket		28 Paket		14 Paket		50.00 %		14 Paket		50.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			705.530		514.274		593.552		100.784		16.98%		615.058		87.18%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			705.530		514.274		593.552		100.784		16.98%		615.058		87.18 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
132	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			7.304.388		5.046.593		7.600.053		735.485		9.68%		5.782.079		79.16%		
			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	37.94 %		26.19 %		35.25 %		26.19 %		74.30 %		26.19 %		69.03%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase pegawai yang disiplin	96.99 %		97.33 %		96.80 %		97.33 %		100.55 %		97.33 %		100.35%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	95%		99.88 %		94%		99.88 %		106.26 %		99.88 %		105.14%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
			Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		94.83 %		94.83 %		94.83 %		94.83%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			2.823.680		939.000		3.511.375		255.768		7.28%		1.194.768		42.31%		
			Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	94%		100%		93%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0003	**Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**			2.014.416		453.986		3.014.521		158.942		5.27%		612.928		30.43 %		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0011	**Pengelolaan Data Kepegawaian**			483.991		228.199		220.420		43.900		19.92%		272.099		56.22 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0002	**Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**			325.274		256.815		276.434		52.925		19.15%		309.740		95.22 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN															Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.935.060		1.091.638		1.482.417		198.652		13.40%		1.290.290		66.68%		
			Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas		11789 berkas		8555 berkas		1863 berkas		21.78 %		1863 berkas		21.78 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			695.225		275.282		449.718		77.113		17.15%		352.395		50.69 %		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			649.787		463.256		488.581		83.740		17.14%		546.995		84.18 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			590.048		353.100		544.119		37.800		6.95%		390.900		66.25 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2.545.648		3.015.955		2.606.261		281.065		10.78%		3.297.021		129.52%		
			Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis		2 jenis		2 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis		5 jenis		5 jenis		3 jenis		60.00 %		3 jenis		60.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis		1 jenis		1 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.03.02.2.04.0003	**Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			933.164		1.948.400		1.143.002		50.300		4.40%		1.998.700		214.19 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			684.603		602.563		707.279		111.564		15.77%		714.128		104.31 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5199 Dokumen		5939 Dokumen		5502 Dokumen		7660 Dokumen		139.22 %		7660 Dokumen		147.34 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0008	**Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**			927.881		464.992		755.980		119.201		15.77%		584.193		62.96 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																	
133	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			9.535.107		4.875.131		4.813.488		242.558		5.04%		5.117.689		53.67%		
			Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	96%		100.00 %		95.5 %		100%		104.71 %		100%		104.17%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**			2.027.793		3.735.836		1.946.145		115.050		5.91%		3.850.885		189.91%		
			Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang		2232 orang		2232 orang		200 orang		8.96 %		200 orang		8.96 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.01.0003	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**			2.027.793		3.735.836		1.946.145		115.050		5.91%		3.850.885		189.91 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang		2232 Orang		2232 Orang		200 Orang		8.96 %		200 Orang		8.96 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			7.507.314		1.139.295		2.867.343		127.508		4.45%		1.266.803		16.87%		
			Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang		176 orang		168 orang		42 orang		25.00 %		42 orang		25.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02.0007	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**			7.507.314		1.139.295		2.867.343		127.508		4.45%		1.266.803		16.87 %		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan		5 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																	
134	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			689.355		1.418.350		5.555.833		330.737		5.95%		1.749.087		253.73%		
			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-
	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			689.355		1.418.350		5.555.833		330.737		5.95%		1.749.087		253.73%		
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0003	**Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan**			292.621		782.759		1.095.410		126.599		11.56%		909.358		310.76 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			396.735		635.591		4.460.423		204.138		4.58%		839.729		211.66 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH																	
135	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.555.889		23.228.932		27.047.087		5.070.227		18.75%		28.299.159		89.68%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		97.88 %		100%		98.38 %		98.38 %		98.38 %		98.38%		Inspektorat	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.567.135		21.762.950		24.441.630		4.774.577		19.53%		26.537.527		96.27%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.567.135		21.762.950		24.441.630		4.774.577		19.53%		26.537.527		96.27 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan		40 Orang/bulan		42 Orang/bulan		105.00 %		42 Orang/bulan		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			802.437		180.048		712.327		25.324		3.56%		205.372		25.59%		
			Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			802.437		180.048		712.327		25.324		3.56%		205.372		25.59 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket		2 Paket		2 Paket		100.00 %		2 Paket		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.186.316		1.285.934		1.893.130		270.325		14.28%		1.556.260		48.84%		
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.186.316		1.285.934		1.893.130		270.325		14.28%		1.556.260		48.84 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Inspektorat	
136	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			2.764.043		1.360.300		2.418.017		295.800		12.23%		1.656.100		59.92%		
			Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Inspektorat	-
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	-
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	-
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**			2.115.113		847.300		1.526.862		175.800		11.51%		1.023.100		48.37%		
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi		147 Rekomendasi		20 Rekomendasi		0 Rekomendasi		0.00 %		0 Rekomendasi		0.00 %		Inspektorat	
			Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen		N/A		17 Dokumen		2 Dokumen		11.76 %		2 Dokumen		11.76 %		Inspektorat	
			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga		60 lembaga		65 lembaga		17 lembaga		26.15 %		17 lembaga		26.15 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.0007	**Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**			1.440.287		237.000		379.895		55.500		14.61%		292.500		20.31 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen		147 Dokumen		20 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.0002	**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**			598.536		227.700		384.379		39.900		10.38%		267.600		44.71 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan		60 Laporan		65 Laporan		17 Laporan		26.15 %		17 Laporan		26.15 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.0004	**Reviu Laporan Keuangan**			36.351		193.600		422.240		40.500		9.59%		234.100		643.99 %		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan		7 Laporan		7 Laporan		1 Laporan		14.29 %		1 Laporan		14.29 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.01.0003	**Reviu Laporan Kinerja**			39.940		189.000		340.348		39.900		11.72%		228.900		573.11 %		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		1 Laporan		10.00 %		1 Laporan		10.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**			648.930		513.000		891.155		120.000		13.47%		633.000		97.55%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga		20 lembaga		20 lembaga		4 lembaga		20.00 %		4 lembaga		20.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			35.956		250.700		314.326		62.300		19.82%		313.000		870.50 %		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian N egara / D aerah yang Ditangani	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		20.00 %		Inspektorat	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			612.973		262.300		576.829		57.700		10.00%		320.000		52.20 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan		20 Laporan		20 Laporan		4 Laporan		20.00 %		4 Laporan		20.00 %		Inspektorat	
137	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1.127.801		1.297.800		2.321.071		274.300		11.82%		1.572.100		139.40%		
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Inspektorat	-
			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	-
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%		100.00 %		100%		11.48 %		11.48 %		11.48 %		11.48%		Inspektorat	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			522.100		454.800		532.418		83.800		15.74%		538.600		103.16%		
			Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen		8 dokumen		4 dokumen		2 dokumen		50.00 %		2 dokumen		50.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			78.860		213.300		266.209		39.900		14.99%		253.200		321.08 %		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		1 Rekomendasi		25.00 %		1 Rekomendasi		25.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			443.240		241.500		266.209		43.900		16.49%		285.400		64.39 %		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		1 Rekomendasi		25.00 %		1 Rekomendasi		25.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			605.701		843.000		1.788.654		190.500		10.65%		1.033.500		170.63%		
			Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi	49 Kali		95 Kali		47 Kali		11 Kali		23.40 %		11 Kali		22.45 %		Inspektorat	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas																
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan		60 Laporan		65 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0003	**Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**			56.261		198.800		632.823		41.900		6.62%		240.700		427.83 %		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan		25 Kegiatan		25 Kegiatan		5 Kegiatan		20.00 %		5 Kegiatan		20.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0004	**Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas**			36.045		204.700		339.181		41.900		12.35%		246.600		684.14 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 perangkat daerah		10 perangkat daerah		12 perangkat daerah		6 perangkat daerah		50.00 %		6 perangkat daerah		42.86 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0002	**Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi**			70.353		195.300		471.641		45.200		9.58%		240.500		341.85 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah		60 perangkat daerah		10 perangkat daerah		0 perangkat daerah		0.00 %		0 perangkat daerah		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0001	**Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**			443.042		244.200		345.009		61.500		17.83%		305.700		69.00 %		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah		60 perangkat daerah		65 perangkat daerah		0 perangkat daerah		0.00 %		0 perangkat daerah		0.00 %		Inspektorat	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7.01	**KECAMATAN**																	
138	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			627.261.662		712.759.083		759.524.278		149.779.309		19.72%		862.538.392		137.51%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.04 %		96.94 %		96.01 %		97.1 %		101.14 %		97.1 %		101.10%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.15 %		97.37 %		97.91 %		97.12 %		99.19 %		97.12 %		98.95%		Kec. Tambaksari	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.08 %		96.51 %		97.02 %		96.75 %		99.72 %		96.75 %		99.66%		Kec. Gubeng	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.99 %		96.84 %		96.98 %		96.93 %		99.95 %		96.93 %		99.94%		Kec. Mulyorejo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.45 %		96.00 %		97.26 %		96.33 %		99.04 %		96.33 %		98.85%		Kec. Rungkut	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		96.11 %		98.06 %		96.61 %		98.52 %		96.61 %		98.49%		Kec. Gunung Anyar	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		94.16 %		98.00 %		94.21 %		96.13 %		94.21 %		96.04%		Kec. Benowo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.19 %		96.58 %		96.12 %		98.7 %		102.68 %		98.7 %		102.61%		Kec. Bubutan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.10 %		97.45 %		99.02 %		98.73 %		99.71 %		98.73 %		99.63%		Kec. Sambikerep	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.48 %		96.23 %		97.44 %		96.59 %		99.13 %		96.59 %		99.09%		Kec. Pakal	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.58 %		97.08 %		98.49 %		96.87 %		98.36 %		96.87 %		98.27%		Kec. Jambangan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.29 %		96.41 %		97.79 %		96.85 %		99.04 %		96.85 %		98.53%		Kec. Dukuh Pakis	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.92 %		97.29 %		97.90 %		96.28 %		98.35 %		96.28 %		98.33%		Kec. Sukomanunggal	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.36 %		95.80 %		97.12 %		96.16 %		99.01 %		96.16 %		98.77%		Kec. Tandes	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.65 %		96.49 %		99.23 %		96.76 %		97.51 %		96.76 %		97.10%		Kec. Gayungan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100.6 %		97.06 %		100%		96.86 %		96.86 %		96.86 %		96.28%		Kec. Asemrowo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.05 %		95.72 %		97.93 %		97.48 %		99.54 %		97.48 %		99.42%		Kec. Pabean Cantian	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.43 %		96.30 %		97.36 %		96.22 %		98.83 %		96.22 %		98.76%		Kec. Wonocolo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.92 %		97.15 %		95.67 %		96.75 %		101.13 %		96.75 %		100.87%		Kec. Semampir	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.76 %		97.29 %		98.74 %		98.77 %		100.03 %		98.77 %		100.01%		Kec. Kenjeran	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %		97.59 %		97.25 %		97.78 %		100.54 %		97.78 %		100.53%		Kec. Lakarsantri	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %		96.15 %		97.18 %		95.04 %		97.80 %		95.04 %		97.72%		Kec. Sukolilo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44 %		95.90 %		97.39 %		96.93 %		99.53 %		96.93 %		99.48%		Kec. Krembangan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.36 %		98.06 %		98.23 %		99.68 %		101.48 %		99.68 %		101.34%		Kec. Wonokromo	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.35 %		95.40 %		98.25 %		96.11 %		97.82 %		96.11 %		97.72%		Kec. Tegalsari	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.81 %		95.81 %		96.80 %		96.31 %		99.49 %		96.31 %		99.48%		Kec. Karangpilang	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.93 %		96.19 %		96.82 %		96.64 %		99.81 %		96.64 %		99.70%		Kec. Sawahan	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.56 %		97.30 %		97.53 %		97.02 %		99.48 %		97.02 %		99.45%		Kec. Simokerto	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.70 %		97.88 %		97.60 %		98.41 %		100.83 %		98.41 %		100.73%		Kec. Genteng	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.46 %		98.04 %		98.43 %		99.07 %		100.65 %		99.07 %		100.62%		Kec. Wiyung	-
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.82 %		97.73 %		99.36 %		99.11 %		99.75 %		99.11 %		99.29%		Kec. Bulak	-
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			546.130.426		568.818.729		617.471.671		122.672.725		19.87%		691.491.454		126.62%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bulak	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.940.971		17.637.417		19.543.176		3.974.786		20.34%		21.612.202		135.58 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		55 Orang/bulan		54 Orang/bulan		54 Orang/bulan		100.00 %		54 Orang/bulan		79.41 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			16.781.899		15.196.002		16.754.413		3.302.228		19.71%		18.498.231		110.23 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		47 Orang/bulan		45 Orang/bulan		44 Orang/bulan		97.78 %		44 Orang/bulan		73.33 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			15.603.917		15.460.057		17.078.146		3.175.837		18.60%		18.635.894		119.43 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		50 Orang/bulan		46 Orang/bulan		42 Orang/bulan		91.30 %		42 Orang/bulan		65.63 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			17.790.611		16.305.354		17.858.151		3.395.079		19.01%		19.700.433		110.73 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		47 Orang/bulan		47 Orang/bulan		42 Orang/bulan		89.36 %		42 Orang/bulan		72.41 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.118.818		19.366.852		21.235.793		4.035.836		19.00%		23.402.688		122.41 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		62 Orang/bulan		59 Orang/bulan		54 Orang/bulan		91.53 %		54 Orang/bulan		67.50 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			19.428.208		20.024.120		21.971.096		4.649.593		21.16%		24.673.712		127.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		60 Orang/bulan		58 Orang/bulan		58 Orang/bulan		100.00 %		58 Orang/bulan		71.60 %		Kec. Gubeng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.296.819		22.170.937		23.755.933		4.861.729		20.47%		27.032.666		133.19 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		71 Orang/bulan		70 Orang/bulan		69 Orang/bulan		98.57 %		69 Orang/bulan		85.19 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.809.979		15.685.841		17.340.089		3.238.845		18.68%		18.924.685		119.70 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		48 Orang/bulan		48 Orang/bulan		43 Orang/bulan		89.58 %		43 Orang/bulan		71.67 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.154.579		15.144.785		16.386.932		3.271.373		19.96%		18.416.158		121.52 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		44 Orang/bulan		44 Orang/bulan		43 Orang/bulan		97.73 %		43 Orang/bulan		71.67 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.969.408		21.294.419		22.638.377		4.662.963		20.60%		25.957.381		129.99 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		66 Orang/bulan		64 Orang/bulan		62 Orang/bulan		96.88 %		62 Orang/bulan		81.58 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.775.782		23.733.828		25.578.226		5.106.617		19.96%		28.840.445		132.44 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan		75 Orang/bulan		75 Orang/bulan		71 Orang/bulan		94.67 %		71 Orang/bulan		79.78 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.215.176		20.786.590		22.305.572		4.593.632		20.59%		25.380.222		125.55 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		65 Orang/bulan		62 Orang/bulan		63 Orang/bulan		101.61 %		63 Orang/bulan		82.89 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.466.465		16.089.982		17.325.190		3.549.141		20.49%		19.639.123		112.44 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan		49 Orang/bulan		98.00 %		49 Orang/bulan		77.78 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.466.930		18.803.207		20.186.620		4.025.226		19.94%		22.828.433		138.63 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		59 Orang/bulan		58 Orang/bulan		55 Orang/bulan		94.83 %		55 Orang/bulan		80.88 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.169.150		17.989.852		19.895.993		3.874.608		19.47%		21.864.460		120.34 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		58 Orang/bulan		55 Orang/bulan		53 Orang/bulan		96.36 %		53 Orang/bulan		75.71 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.997.087		14.719.761		16.071.543		3.081.313		19.17%		17.801.074		127.18 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		52 Orang/bulan		50 Orang/bulan		46 Orang/bulan		92.00 %		46 Orang/bulan		79.31 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.192.561		18.362.796		19.968.301		3.941.023		19.74%		22.303.818		137.74 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		64 Orang/bulan		62 Orang/bulan		57 Orang/bulan		91.94 %		57 Orang/bulan		78.08 %		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.035.256		17.674.196		19.226.460		3.802.620		19.78%		21.476.815		142.84 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		59 Orang/bulan		58 Orang/bulan		57 Orang/bulan		98.28 %		57 Orang/bulan		78.08 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.950.603		17.046.845		18.773.262		3.601.286		19.18%		20.648.131		121.81 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		53 Orang/bulan		51 Orang/bulan		49 Orang/bulan		96.08 %		49 Orang/bulan		73.13 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.653.687		21.389.261		23.353.270		4.594.556		19.67%		25.983.817		120.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan		71 Orang/bulan		65 Orang/bulan		64 Orang/bulan		98.46 %		64 Orang/bulan		72.73 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.766.279		16.221.678		17.569.083		3.536.028		20.13%		19.757.707		125.32 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		51 Orang/bulan		49 Orang/bulan		48 Orang/bulan		97.96 %		48 Orang/bulan		76.19 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.739.285		15.846.381		16.918.846		3.418.684		20.21%		19.265.065		122.40 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan		50 Orang/bulan		48 Orang/bulan		47 Orang/bulan		97.92 %		47 Orang/bulan		79.66 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.615.151		17.116.190		18.392.610		3.645.277		19.82%		20.761.468		132.96 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		55 Orang/bulan		55 Orang/bulan		52 Orang/bulan		94.55 %		52 Orang/bulan		82.54 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.957.215		17.772.838		19.752.595		3.557.592		18.01%		21.330.430		133.67 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		60 Orang/bulan		55 Orang/bulan		47 Orang/bulan		85.45 %		47 Orang/bulan		65.28 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.279.561		21.534.976		23.106.872		4.725.345		20.45%		26.260.321		129.49 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		67 Orang/bulan		66 Orang/bulan		66 Orang/bulan		100.00 %		66 Orang/bulan		75.86 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.925.618		16.783.991		18.066.147		3.719.967		20.59%		20.503.959		128.75 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		53 Orang/bulan		53 Orang/bulan		51 Orang/bulan		96.23 %		51 Orang/bulan		79.69 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.595.265		18.947.342		20.535.769		4.071.377		19.83%		23.018.719		130.82 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		60 Orang/bulan		60 Orang/bulan		58 Orang/bulan		96.67 %		58 Orang/bulan		77.33 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.063.586		22.232.865		23.644.595		4.762.653		20.14%		26.995.518		149.45 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		72 Orang/bulan		71 Orang/bulan		67 Orang/bulan		94.37 %		67 Orang/bulan		77.01 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.822.509		16.186.321		17.676.993		3.650.658		20.65%		19.836.979		117.92 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan		50 Orang/bulan		98.04 %		50 Orang/bulan		76.92 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.104.845		15.368.590		16.623.922		3.232.524		19.45%		18.601.114		123.15 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		46 Orang/bulan		44 Orang/bulan		42 Orang/bulan		95.45 %		42 Orang/bulan		76.36 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.443.205		25.925.456		27.937.694		5.614.330		20.10%		31.539.786		123.96 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		82 Orang/bulan		80 Orang/bulan		76 Orang/bulan		95.00 %		76 Orang/bulan		80.00 %		Kec. Tambaksari	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.007.353		141.279.723		137.920.505		26.710.770		19.37%		167.990.493		221.02%		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		24 Paket		19 Paket		13 Paket		68.42 %		13 Paket		68.42 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket		N/A		29 Paket		11 Paket		37.93 %		11 Paket		37.93 %		Kec. Sambikerep	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	31 Paket		29 Paket		30 Paket		5 Paket		16.67 %		5 Paket		16.13 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket		23 paket		24 paket		9 paket		37.50 %		9 paket		37.50 %		Kec. Bulak	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			2.643.376		6.031.353		5.874.745		1.142.242		19.44%		7.173.595		271.38 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket		15 Paket		5 Paket		33.33 %		5 Paket		33.33 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			1.909.831		3.686.572		3.837.982		685.341		17.86%		4.371.912		228.92 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		100.00 %		9 Paket		100.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.885.216		5.572.325		5.145.506		1.069.064		20.78%		6.641.389		352.29 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket		20 Paket		8 Paket		40.00 %		8 Paket		40.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			816.940		2.667.874		2.558.279		540.230		21.12%		3.208.105		392.70 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		8 Paket		47.06 %		8 Paket		47.06 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.142.237		5.070.135		4.926.365		958.293		19.45%		6.028.428		281.41 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket		24 Paket		14 Paket		58.33 %		14 Paket		58.33 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.172.553		3.774.455		4.521.311		687.898		15.21%		4.462.353		205.40 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		19 Paket		19 Paket		11 Paket		57.89 %		11 Paket		57.89 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.029.400		4.867.624		6.826.911		878.192		12.86%		5.745.816		189.67 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		27 Paket		22 Paket		15 Paket		68.18 %		15 Paket		68.18 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.723.479		4.306.078		4.498.946		856.026		19.03%		5.162.104		189.54 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket		15 Paket		11 Paket		73.33 %		11 Paket		73.33 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.734.121		3.942.381		4.063.821		741.064		18.24%		4.683.445		270.08 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		8 Paket		8 Paket		100.00 %		8 Paket		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.462.248		3.374.698		3.424.369		595.132		17.38%		3.969.829		271.49 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		24 Paket		19 Paket		13 Paket		68.42 %		13 Paket		68.42 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.775.956		5.298.165		5.254.067		1.051.230		20.01%		6.349.396		168.15 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		20 Paket		15 Paket		14 Paket		93.33 %		14 Paket		93.33 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.448.920		4.322.416		3.573.363		817.845		22.89%		5.140.261		354.76 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		29 Paket		36 Paket		15 Paket		41.67 %		15 Paket		41.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.786.799		4.426.757		4.011.035		878.849		21.91%		5.305.606		140.11 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		23 Paket		24 Paket		9 Paket		37.50 %		9 Paket		37.50 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			847.284		5.874.853		5.131.489		1.117.553		21.78%		6.992.406		825.27 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		27 Paket		23 Paket		7 Paket		30.43 %		7 Paket		30.43 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.920.502		4.331.537		4.617.237		795.482		17.23%		5.127.019		175.55 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket		30 Paket		27 Paket		11 Paket		40.74 %		11 Paket		40.74 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.755.199		4.078.429		3.842.086		771.910		20.09%		4.850.340		176.04 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		8 Paket		8 Paket		100.00 %		8 Paket		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.729.368		4.930.117		4.662.320		933.769		20.03%		5.863.886		339.08 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		7 Paket		6 Paket		6 Paket		100.00 %		6 Paket		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.098.006		7.523.535		6.860.142		1.313.455		19.15%		8.836.990		173.34 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket		20 Paket		10 Paket		50.00 %		10 Paket		50.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.367.996		3.462.573		3.027.235		651.709		21.53%		4.114.281		94.19 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		100.00 %		1 Paket		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.448.980		5.955.966		5.811.964		1.102.627		18.97%		7.058.593		288.23 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		34 Paket		19 Paket		15 Paket		78.95 %		15 Paket		78.95 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.807.210		3.191.803		3.213.762		620.883		19.32%		3.812.686		210.97 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		27 Paket		22 Paket		11 Paket		50.00 %		11 Paket		50.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			724.460		3.059.115		2.546.916		574.374		22.55%		3.633.489		501.54 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		7 Paket		41.18 %		7 Paket		41.18 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.840.899		6.007.287		5.571.069		1.153.036		20.70%		7.160.323		388.96 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		17 Paket		15 Paket		11 Paket		73.33 %		11 Paket		73.33 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.181.219		4.422.619		4.461.339		833.530		18.68%		5.256.149		444.98 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket		501 Paket		501 Paket		60 Paket		11.98 %		60 Paket		11.98 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.415.085		4.664.104		5.788.816		894.155		15.45%		5.558.259		86.64 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket		29 Paket		30 Paket		5 Paket		16.67 %		5 Paket		16.13 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.007.331		2.936.219		2.627.476		587.958		22.38%		3.524.177		349.85 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		105 Paket		100 Paket		18 Paket		18.00 %		18 Paket		18.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.832.212		5.129.297		4.759.836		959.892		20.17%		6.089.189		332.34 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		100.00 %		10 Paket		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.827.863		4.495.372		3.977.959		848.094		21.32%		5.343.465		292.33 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		124 Paket		100 Paket		23 Paket		23.00 %		23 Paket		23.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			964.089		5.288.742		4.881.002		999.848		20.48%		6.288.590		652.28 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		11 Paket		10 Paket		8 Paket		80.00 %		8 Paket		80.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.109.517		4.548.580		3.905.891		844.075		21.61%		5.392.655		486.04 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		27 Paket		12 Paket		11 Paket		91.67 %		11 Paket		91.67 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.599.059		4.038.742		3.717.266		807.013		21.71%		4.845.755		63.77 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		22 Paket		29 Paket		11 Paket		37.93 %		11 Paket		37.93 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.123.883		2.660.631		4.132.102		395.815		9.58%		3.056.446		59.65%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		18 Unit		30 Unit		4 Unit		13.33 %		4 Unit		13.33 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		100.00 %		2 unit		100.00 %		Kec. Bulak	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit		20 Unit		20 Unit		6 Unit		30.00 %		6 Unit		30.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			200.239		86.162		139.580		13.662		9.79%		99.824		49.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		8 Unit		36 Unit		5 Unit		13.89 %		5 Unit		13.89 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			170.767		81.107		145.628		12.769		8.77%		93.876		54.97 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		7 Unit		50 Unit		6 Unit		12.00 %		6 Unit		12.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			211.392		115.973		124.316		19.725		15.87%		135.698		64.19 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit		10 Unit		34 Unit		7 Unit		20.59 %		7 Unit		20.59 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.09.0010	**Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			140.091		65.451		103.693		11.400		10.99%		76.851		54.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit		15 Unit		65 Unit		4 Unit		6.15 %		4 Unit		6.15 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			148.255		55.345		142.625		11.778		8.26%		67.123		45.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		18 Unit		35 Unit		4 Unit		11.43 %		4 Unit		11.43 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			126.396		83.430		123.515		11.458		9.28%		94.888		75.07 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit		29 Unit		29 Unit		10 Unit		34.48 %		10 Unit		34.48 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			198.810		95.567		198.810		9.005		4.53%		104.571		52.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit		3 Unit		4 Unit		133.33 %		4 Unit		133.33 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			164.611		48.680		96.462		4.643		4.81%		53.323		32.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			110.587		99.681		97.036		15.446		15.92%		115.127		104.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		4 Unit		80.00 %		4 Unit		80.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			301.827		160.755		273.296		14.423		5.28%		175.178		58.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		11 Unit		6 Unit		10 Unit		166.67 %		10 Unit		166.67 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			156.241		61.989		110.834		8.547		7.71%		70.536		45.15 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		6 Unit		5 Unit		2 Unit		40.00 %		2 Unit		40.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			190.228		86.082		103.557		14.989		14.47%		101.071		53.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		100.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			194.913		73.822		135.728		11.340		8.36%		85.163		43.69 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit		7 Unit		5 Unit		71.43 %		5 Unit		71.43 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			161.471		69.236		99.218		10.035		10.11%		79.270		49.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit		3 Unit		6 Unit		200.00 %		6 Unit		200.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			175.905		80.963		111.416		10.472		9.40%		91.436		51.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit		4 Unit		2 Unit		50.00 %		2 Unit		50.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			232.980		140.957		200.498		22.478		11.21%		163.435		70.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		17 Unit		50 Unit		4 Unit		8.00 %		4 Unit		8.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			96.413		86.213		122.958		13.563		11.03%		99.776		103.49 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		100.00 %		4 Unit		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			168.090		89.106		91.312		14.386		15.75%		103.491		61.57 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			139.792		63.489		110.532		9.548		8.64%		73.037		52.25 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		8 Unit		6 Unit		5 Unit		83.33 %		5 Unit		83.33 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			141.228		130.889		163.886		19.431		11.86%		150.319		106.44 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit		19 Unit		19 Unit		6 Unit		31.58 %		6 Unit		31.58 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.600		48.564		101.456		9.123		8.99%		57.687		54.63 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		20 Unit		20 Unit		6 Unit		30.00 %		6 Unit		30.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			117.333		77.652		118.339		19.200		16.22%		96.852		82.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		96 Unit		100 Unit		9 Unit		9.00 %		9 Unit		9.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			305.712		69.575		252.377		10.620		4.21%		80.195		26.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		100.00 %		7 Unit		100.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			223.592		96.854		68.765		9.400		13.67%		106.254		47.52 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		78 Unit		100 Unit		15 Unit		15.00 %		15 Unit		15.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.863		97.646		174.641		15.348		8.79%		112.994		103.80 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		8 Unit		60 Unit		6 Unit		10.00 %		6 Unit		10.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			160.370		70.910		106.960		10.349		9.68%		81.260		50.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		6 Unit		5 Unit		4 Unit		80.00 %		4 Unit		80.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			95.506		84.117		87.867		11.628		13.23%		95.745		100.25 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		32 Unit		50 Unit		5 Unit		10.00 %		5 Unit		10.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132.288		83.062		150.125		12.731		8.48%		95.793		72.41 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit		4 Unit		3 Unit		75.00 %		3 Unit		75.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			162.335		84.542		153.202		11.726		7.65%		96.267		59.30 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		60 Unit		60 Unit		6 Unit		10.00 %		6 Unit		10.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			133.688		78.538		99.792		11.640		11.66%		90.179		67.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		5 Unit		3 Unit		3 Unit		100.00 %		3 Unit		100.00 %		Kec. Sawahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			148.363		94.274		123.679		14.954		12.09%		109.228		73.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		4 Unit		80.00 %		4 Unit		80.00 %		Kec. Gayungan	
139	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.265.386		535.762		672.768		57.053		8.48%		592.815		46.85%		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.265.386		535.762		672.768		57.053		8.48%		592.815		46.85%		
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus		150 Kasus		150 Kasus		30 Kasus		20.00 %		30 Kasus		20.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		3 Kasus		15.00 %		3 Kasus		15.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		N/A		12 Kasus		3 Kasus		25.00 %		3 Kasus		25.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		12 Kasus		12 Kasus		3 Kasus		25.00 %		3 Kasus		25.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		25.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Laporan		12 Laporan		7 Laporan		2 Laporan		28.57 %		2 Laporan		28.57 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	4 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		150.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus		44 Kasus		44 Kasus		8 Kasus		18.18 %		8 Kasus		18.18 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	37 Kasus		37 Kasus		37 Kasus		9 Kasus		24.32 %		9 Kasus		24.32 %		Kec. Sambikerep	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			bersama Babinsa/Babinkamtibmas																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus		20 kasus		24 kasus		0 kasus		0.00 %		0 kasus		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus		12 Kasus		9 Kasus		3 Kasus		33.33 %		3 Kasus		33.33 %		Kec. Genteng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus		13 Kasus		7 Kasus		3 Kasus		42.86 %		3 Kasus		42.86 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		24 Kasus		20 Kasus		6 Kasus		30.00 %		6 Kasus		30.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Pakal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus		36 Kasus		36 Kasus		9 Kasus		25.00 %		9 Kasus		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang		35 Orang		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus		5 Kasus		2 Kasus		1 Kasus		50.00 %		1 Kasus		50.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	28 Kasus		35 Kasus		30 Kasus		6 Kasus		20.00 %		6 Kasus		21.43 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus		88 Kasus		88 Kasus		21 Kasus		23.86 %		21 Kasus		23.86 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	19 Kasus		30 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		31.58 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang		46 Orang		33 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		4 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus		73 Kasus		73 Kasus		18 Kasus		24.66 %		18 Kasus		24.66 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik		2 topik		2 topik		0 topik		0.00 %		0 topik		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional																
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus		21 Kasus		21 Kasus		5 Kasus		23.81 %		5 Kasus		2.38 %		Kec. Semampir	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus		45 Kasus		45 Kasus		9 Kasus		20.00 %		9 Kasus		20.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		25.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus		N/A		2 kasus		3 kasus		150.00 %		3 kasus		150.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		23 Kasus		20 Kasus		6 Kasus		30.00 %		6 Kasus		30.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus		N/A		62 Kasus		16 Kasus		25.81 %		16 Kasus		25.81 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus		144 Kasus		144 Kasus		36 Kasus		25.00 %		36 Kasus		25.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,**			16.079		1.200		13.256		0		0.00%		1.200		7.46 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		20 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			18.011		6.560		7.600		0		0.00%		6.560		36.42 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang		35 Orang		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			11.883		5.000		11.475		0		0.00%		5.000		42.08 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	77 Orang		68 Orang		64 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			13.399		5.420		2.830		0		0.00%		5.420		40.45 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang		110 Orang		61 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			30.147		5.700		7.600		0		0.00%		5.700		18.91 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	120 Orang		120 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		5.890		4.300		0		0.00%		5.890		58.61 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang		92 Orang		100 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			9.379		1.750		8.900		0		0.00%		1.750		18.66 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		160 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		6.900		7.800		0		0.00%		6.900		68.66 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang		166 Orang		166 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		4.480		9.430		0		0.00%		4.480		44.58 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		116 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			22.510		8.200		22.019		0		0.00%		8.200		36.43 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang		30 Orang		4 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			6.699		2.800		2.800		0		0.00%		2.800		41.79 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang		51 Orang		187 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.079		6.600		6.900		0		0.00%		6.600		41.05 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang		80 Orang		80 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			8.039		9.980		15.400		0		0.00%		9.980		124.14 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang		418 Orang		418 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.749		8.757		5.433		0		0.00%		8.757		52.29 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang		457 Orang		561 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,**			51.920		1.350		4.820		0		0.00%		1.350		2.60 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang		45 Orang		94 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		5.000		9.692		0		0.00%		5.000		49.76 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43 Orang		47 Orang		43 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			23.898		4.700		5.120		0		0.00%		4.700		19.67 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		110 Orang		55 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			18.011		10.400		10.400		0		0.00%		10.400		57.74 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		160 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			7.933		3.590		3.410		0		0.00%		3.590		45.25 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	80 Orang		53 Orang		47 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		5.200		9.830		0		0.00%		5.200		51.75 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52 Orang		80 Orang		136 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			24.610		4.190		21.842		0		0.00%		4.190		17.03 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	123 Orang		93 Orang		64 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			10.049		6.200		9.830		0		0.00%		6.200		61.70 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		120 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			32.616		1.200		10.900		0		0.00%		1.200		3.68 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang		40 Orang		230 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			29.707		5.600		7.600		0		0.00%		5.600		18.85 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		120 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16.079		12.360		11.875		0		0.00%		12.360		76.87 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		212 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			2.512		1.990		1.990		0		0.00%		1.990		79.21 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang		46 Orang		33 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			23.766		3.050		3.500		0		0.00%		3.050		12.83 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang		35 Orang		39 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			33.671		20.560		20.560		0		0.00%		20.560		61.06 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang		310 Orang		663 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,			16.414		5.720		3.650		0		0.00%		5.720		34.85 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		124 Orang		55 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			5.025		4.460		3.200		0		0.00%		4.460		88.76 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	164 Orang		82 Orang		40 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.0002	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**			16.414		3.080		7.100		0		0.00%		3.080		18.77 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang		12 Orang		12 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			8.039		6.439		7.691		1.610		20.93%		8.048		100.11 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			29.778		6.439		6.439		1.073		16.67%		7.512		25.23 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan		12 Laporan		7 Laporan		2 Laporan		28.57 %		2 Laporan		28.57 %		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			13.399		8.227		13.106		1.073		8.19%		9.300		69.41 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			13.260		10.731		10.731		2.683		25.00%		13.414		101.16 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			53.595		8.585		8.585		1.431		16.67%		10.016		18.69 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			10.049		9.300		9.830		3.219		32.75%		12.520		124.58 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			8.039		6.439		7.864		1.073		13.65%		7.512		93.44 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			8.039		7.154		7.864		1.789		22.74%		8.943		111.24 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan		37 Laporan		37 Laporan		9 Laporan		24.32 %		9 Laporan		24.32 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			10.049		9.300		9.658		0		0.00%		9.300		92.55 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			10.049		0		4.292		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			22.510		17.170		17.170		4.292		25.00%		21.462		95.34 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28 Laporan		33 Laporan		30 Laporan		6 Laporan		20.00 %		6 Laporan		21.43 %		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan			103.841		32.193		32.193		7.154		22.22%		39.347		37.89 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan			8.039		8.585		8.585		1.431		16.67%		10.016		124.58 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan			25.917		23.251		24.608		3.756		15.26%		27.006		104.20 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan			103.841		7.154		17.885		0		0.00%		7.154		6.89 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan			100.121		25.754		25.754		4.292		16.67%		30.047		30.01 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan			29.778		16.275		28.437		2.325		8.18%		18.600		62.46 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan			2.103		1.789		2.248		0		0.00%		1.789		85.06 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Peraturan Perundang-Undangan																
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			13.399		18.435		17.170		2.862		16.67%		21.297		158.94 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			10.049		4.292		8.585		715		8.33%		5.008		49.83 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			21.770		19.316		25.754		0		0.00%		19.316		88.73 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			10.049		8.943		9.830		0		0.00%		8.943		88.99 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		20.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			6.763		6.975		12.877		2.146		16.67%		9.121		134.87 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			7.149		4.292		6.807		715		10.51%		5.008		70.05 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			8.039		8.585		8.585		1.431		16.67%		10.016		124.58 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			3.350		2.862		1.431		358		25.00%		3.219		96.11 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			16.308		12.877		4.350		715		16.45%		13.593		83.35 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan		88 Laporan		24 Laporan		6 Laporan		25.00 %		6 Laporan		6.82 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			27.844		25.200		22.065		5.366		24.32%		30.566		109.78 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			16.414		15.560		15.918		1.431		8.99%		16.991		103.52 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			15.550		10.731		10.731		1.789		16.67%		12.520		80.51 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.0005	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan**			16.414		15.023		14.666		2.325		15.85%		17.348		105.70 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
140	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			638.675.286		432.322.507		515.025.074		22.737.156		4.41%		455.059.662		71.25%		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Jambangan	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bubutan	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Asemrowo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Rungkut	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bulak	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonokromo	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Semampir	-
			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wiyung	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sambikerep	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tegalsari	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonocolo	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tambaksari	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	-
			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pakal	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	-
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Krembangan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Karangpilang	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Kenjeran	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tandes	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukolilo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Simokerto	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Benowo	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gayungan	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gubeng	-
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Genteng	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			632.376.540		427.063.377		510.095.354		22.701.829		4.45%		449.765.205		71.12%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Krembangan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sawahan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan		8 kelurahan		8 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas		2 Pokmas/Ormas		1 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		0.00 %		0 Pokmas/Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bubutan	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sambikerep	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan		2 kelurahan		2 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gayungan	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gayungan	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		34 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Simokerto	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga		8 Lembaga		5 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Benowo	
			umlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gubeng	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan		7 kelurahan		7 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wiyung	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wiyung	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Semampir	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		6 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			3.544.639		2.324.057		2.545.645		0		0.00%		2.324.057		65.57 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			2.767.659		1.130.211		2.021.934		0		0.00%		1.130.211		40.84 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0002	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**			1.520.370		1.995.598		2.308.022		0		0.00%		1.995.598		131.26 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit		9 Unit		66 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			984.989		1.171.481		1.467.927		0		0.00%		1.171.481		118.93 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit		3 Unit		24 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.551.881		1.970.596		1.923.736		0		0.00%		1.970.596		126.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		10 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.348.168		1.191.825		1.456.501		0		0.00%		1.191.825		22.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		5 Unit		27 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.777.698		847.899		1.680.174		0		0.00%		847.899		47.70 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		4 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.658.766		1.624.209		1.611.278		0		0.00%		1.624.209		44.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		11 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.787.980		2.536.815		3.876.389		0		0.00%		2.536.815		90.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		11 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.459.209		2.015.200		2.415.206		0		0.00%		2.015.200		45.19 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.505.701		353.675		2.751.399		0		0.00%		353.675		10.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.436.054		1.529.017		2.907.926		0		0.00%		1.529.017		106.47 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.675.411		1.036.258		1.396.161		0		0.00%		1.036.258		61.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			998.221		2.212.763		2.334.726		0		0.00%		2.212.763		221.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		6 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.667.236		1.355.346		2.912.279		0		0.00%		1.355.346		81.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		11 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.166.718		1.836.247		2.067.627		0		0.00%		1.836.247		84.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.474.407		1.645.150		3.148.875		0		0.00%		1.645.150		47.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		9 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.545.939		2.889.949		3.229.850		0		0.00%		2.889.949		81.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		11 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.577.259		3.751.898		3.569.923		0		0.00%		3.751.898		104.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.776.235		2.616.497		2.140.286		0		0.00%		2.616.497		69.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		11 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.611.036		2.757.321		3.266.060		0		0.00%		2.757.321		76.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		18 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.934.527		1.193.574		1.578.696		0		0.00%		1.193.574		40.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.157.876		2.362.183		3.793.717		0		0.00%		2.362.183		204.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		12 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			914.917		1.225.811		1.813.286		0		0.00%		1.225.811		133.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		8 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.059.580		1.691.006		2.341.327		0		0.00%		1.691.006		159.59 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			716.396		1.248.368		1.445.344		0		0.00%		1.248.368		174.26 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		10 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			510.519		904.703		1.379.692		0		0.00%		904.703		177.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		6 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			497.724		2.575.745		3.402.929		0		0.00%		2.575.745		517.50 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		11 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.697.312		1.107.328		3.029.659		0		0.00%		1.107.328		65.24 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		3 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.393.201		1.175.871		1.732.552		0		0.00%		1.175.871		84.40 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		15 Unit		15 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.567.015		1.151.201		1.659.501		0		0.00%		1.151.201		73.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		11 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			743.626		1.760.205		1.785.442		0		0.00%		1.760.205		236.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		5 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			393.697		2.139.247		2.346.014		0		0.00%		2.139.247		543.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.587.513		1.363.996		1.382.993		0		0.00%		1.363.996		85.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.786.345		1.630.533		2.381.060		0		0.00%		1.630.533		91.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.283.835		847.903		972.422		0		0.00%		847.903		37.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.790.793		1.012.871		2.797.578		0		0.00%		1.012.871		36.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.277.356		1.784.017		1.776.803		0		0.00%		1.784.017		78.34 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.398.685		3.328.575		4.060.819		0		0.00%		3.328.575		97.94 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.392.974		1.678.681		1.707.996		0		0.00%		1.678.681		120.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.453.097		1.660.907		1.956.760		0		0.00%		1.660.907		48.10 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		4 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.998.712		594.332		825.825		0		0.00%		594.332		14.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		2 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.172.837		1.863.952		2.198.090		0		0.00%		1.863.952		58.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.234.239		1.135.812		3.118.094		0		0.00%		1.135.812		35.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		2 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.703.650		2.168.672		2.158.333		0		0.00%		2.168.672		58.55 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.064.205		856.118		1.687.983		0		0.00%		856.118		27.94 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.894.195		1.634.051		1.846.331		0		0.00%		1.634.051		56.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.125.820		1.706.545		1.561.743		0		0.00%		1.706.545		54.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.986.633		2.135.312		1.694.606		0		0.00%		2.135.312		71.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.931.648		1.158.239		1.115.259		0		0.00%		1.158.239		39.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		9 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.084.961		1.292.105		2.190.921		0		0.00%		1.292.105		61.97 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		7 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.995.477		1.468.451		1.485.174		0		0.00%		1.468.451		36.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.855.743		1.077.716		2.616.481		0		0.00%		1.077.716		37.74 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		12 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.787.091		2.877.114		3.482.668		0		0.00%		2.877.114		60.10 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		3 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.839.386		3.088.758		3.071.180		0		0.00%		3.088.758		80.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		8 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.937.372		3.145.242		3.605.692		0		0.00%		3.145.242		63.70 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		5 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.906.513		3.266.716		3.189.641		0		0.00%		3.266.716		83.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit		14 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.822.107		3.096.036		3.100.330		0		0.00%		3.096.036		81.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.019.165		1.817.447		2.068.866		0		0.00%		1.817.447		90.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.446.203		1.753.904		1.714.822		0		0.00%		1.753.904		32.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.947.833		1.026.131		1.701.464		0		0.00%		1.026.131		34.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.902.278		1.481.474		1.767.177		0		0.00%		1.481.474		77.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.902.278		2.104.962		2.604.846		0		0.00%		2.104.962		110.65 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		14 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			951.139		1.241.090		1.595.161		0		0.00%		1.241.090		130.48 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.377.848		1.230.969		2.220.735		0		0.00%		1.230.969		51.77 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.377.848		2.698.949		3.577.849		0		0.00%		2.698.949		113.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		12 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.114.697		1.912.659		2.386.491		0		0.00%		1.912.659		61.41 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			343.974		1.055.676		1.689.697		0		0.00%		1.055.676		306.91 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			675.134		1.055.667		1.263.419		0		0.00%		1.055.667		156.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			949.596		1.650.062		1.706.563		0		0.00%		1.650.062		173.76 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.294.288		2.436.686		2.965.831		0		0.00%		2.436.686		56.74 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		1 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			560.418		943.265		1.516.066		0		0.00%		943.265		168.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		1 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			733.449		866.504		1.488.108		0		0.00%		866.504		118.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		1 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.314.486		1.435.949		1.689.811		0		0.00%		1.435.949		62.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.268.395		2.644.723		2.902.166		0		0.00%		2.644.723		116.59 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.343.308		1.746.191		1.990.935		0		0.00%		1.746.191		129.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.055.456		1.137.104		1.529.802		0		0.00%		1.137.104		107.74 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.764.212		2.278.490		2.487.178		0		0.00%		2.278.490		47.83 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.458.343		2.180.950		2.718.210		0		0.00%		2.180.950		88.72 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.774.678		1.839.772		1.830.202		0		0.00%		1.839.772		66.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.714.272		2.388.483		2.005.843		0		0.00%		2.388.483		64.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		4 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.508.587		2.226.068		2.321.336		0		0.00%		2.226.068		49.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.937.215		948.193		1.328.259		0		0.00%		948.193		32.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.591.799		2.066.612		2.381.206		0		0.00%		2.066.612		129.83 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.876.228		1.783.585		2.299.563		0		0.00%		1.783.585		62.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.405.262		2.523.591		1.174.559		0		0.00%		2.523.591		104.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		6 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.011.356		2.358.510		1.979.781		0		0.00%		2.358.510		233.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		6 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.155.850		2.179.642		2.230.029		0		0.00%		2.179.642		69.07 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		5 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.405.315		2.183.779		2.072.281		0		0.00%		2.183.779		64.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		5 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			563.929		782.781		1.213.519		0		0.00%		782.781		138.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.184.566		1.817.479		1.819.862		0		0.00%		1.817.479		83.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.952.311		1.445.278		1.772.973		0		0.00%		1.445.278		74.03 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.310.806		1.527.611		2.328.581		0		0.00%		1.527.611		66.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		7 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			934.257		1.747.512		1.824.568		0		0.00%		1.747.512		187.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		11 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.560.404		537.792		2.363.793		0		0.00%		537.792		34.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.101.652		1.664.426		1.653.855		0		0.00%		1.664.426		151.08 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.258.246		1.378.240		1.576.549		0		0.00%		1.378.240		109.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.267.520		2.510.682		2.778.836		0		0.00%		2.510.682		58.83 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.368.380		2.916.965		2.959.583		0		0.00%		2.916.965		123.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		9 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.066.352		2.770.567		3.530.560		0		0.00%		2.770.567		134.08 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		5 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.923.694		2.368.856		2.130.052		0		0.00%		2.368.856		123.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		20 Unit		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.011.339		2.168.638		2.104.868		0		0.00%		2.168.638		54.06 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		9 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.869.453		1.808.647		1.398.771		0		0.00%		1.808.647		37.14 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.861.720		2.361.925		2.578.174		0		0.00%		2.361.925		48.58 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			793.506		1.244.633		1.465.931		0		0.00%		1.244.633		156.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.875.658		1.840.999		1.831.137		0		0.00%		1.840.999		47.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		8 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.423.557		2.119.001		2.404.977		0		0.00%		2.119.001		47.90 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.481.058		1.495.150		1.730.912		0		0.00%		1.495.150		100.95 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		9 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			642.099		2.853.979		3.164.776		0		0.00%		2.853.979		444.48 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.176.870		3.222.179		3.399.689		0		0.00%		3.222.179		62.24 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.656.137		2.749.596		2.577.157		0		0.00%		2.749.596		59.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.738.431		2.125.766		2.190.424		0		0.00%		2.125.766		56.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		1 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.339.186		3.518.627		3.736.783		0		0.00%		3.518.627		81.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.144.651		2.301.885		2.002.310		0		0.00%		2.301.885		107.33 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		10 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.382.471		2.244.737		2.837.236		0		0.00%		2.244.737		94.22 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		10 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.382.471		1.702.369		1.403.707		0		0.00%		1.702.369		71.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.144.651		2.020.836		1.941.379		0		0.00%		2.020.836		94.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		10 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.249.664		1.740.932		2.144.390		0		0.00%		1.740.932		77.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.392.343		1.181.898		2.320.563		0		0.00%		1.181.898		49.40 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		11 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.020.102		3.250.998		2.509.886		0		0.00%		3.250.998		107.65 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		6 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.020.102		2.366.748		2.256.618		0		0.00%		2.366.748		78.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		8 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.298.312		118.636		1.406.383		0		0.00%		118.636		3.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.761.470		1.491.664		1.145.019		0		0.00%		1.491.664		84.68 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		18 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.046.368		1.878.679		1.744.465		0		0.00%		1.878.679		91.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		9 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.422.669		2.679.521		3.310.057		0		0.00%		2.679.521		188.34 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			499.855		2.132.753		2.304.606		0		0.00%		2.132.753		426.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.412.480		971.900		1.004.357		0		0.00%		971.900		68.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		9 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			307.061		2.979.804		3.253.508		0		0.00%		2.979.804		970.43 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.570.614		1.316.215		1.281.848		0		0.00%		1.316.215		83.80 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		3 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			588.445		1.089.397		1.206.425		0		0.00%		1.089.397		185.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			718.802		1.623.454		1.354.170		0		0.00%		1.623.454		225.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		6 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.449.825		1.234.746		1.147.350		0		0.00%		1.234.746		85.17 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		6 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.311.429		1.570.322		2.217.399		0		0.00%		1.570.322		47.42 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.829.275		635.158		1.925.191		0		0.00%		635.158		22.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		9 Unit		36 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.281.862		1.898.322		1.944.205		0		0.00%		1.898.322		57.84 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		12 Unit		18 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.679.181		3.024.388		3.816.926		0		0.00%		3.024.388		180.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		14 Unit		29 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.720.121		1.467.526		2.062.777		0		0.00%		1.467.526		53.95 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		10 Unit		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.966.850		1.801.025		2.556.932		0		0.00%		1.801.025		91.57 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.875.774		2.061.015		2.736.488		0		0.00%		2.061.015		109.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.417.269		1.591.842		1.783.021		0		0.00%		1.591.842		65.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit		25 Unit		40 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.170.973		2.088.442		1.030.947		0		0.00%		2.088.442		96.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit		10 Unit		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.775.556		1.744.517		931.200		0		0.00%		1.744.517		62.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.823.588		1.769.528		2.447.128		0		0.00%		1.769.528		36.68 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		7 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.410.138		1.288.292		2.034.985		0		0.00%		1.288.292		29.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		6 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.422.502		2.078.078		3.069.815		0		0.00%		2.078.078		46.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		9 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.650.489		1.827.656		2.046.040		0		0.00%		1.827.656		32.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		8 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.961.405		1.091.181		1.360.244		0		0.00%		1.091.181		21.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.537.320		1.727.524		2.923.788		0		0.00%		1.727.524		112.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.119.392		1.334.356		1.406.816		0		0.00%		1.334.356		119.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		11 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.123.349		3.179.151		3.507.962		0		0.00%		3.179.151		149.72 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		14 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.848.309		850.363		1.567.901		0		0.00%		850.363		29.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.143.111		1.373.567		1.131.898		0		0.00%		1.373.567		120.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.477.931		1.704.579		2.486.097		0		0.00%		1.704.579		31.12 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.166.147		731.168		602.509		79.109		13.13%		810.276		69.48 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.805.410		1.127.492		1.070.300		151.149		14.12%		1.278.640		70.82 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			918.505		920.948		903.032		116.947		12.95%		1.037.895		113.00 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.104.769		1.111.149		1.190.321		162.642		13.66%		1.273.792		60.52 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.467.127		1.003.634		958.968		145.017		15.12%		1.148.651		78.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.250.584		1.803.922		1.354.728		203.919		15.05%		2.007.841		89.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.272.583		833.177		2.451.376		141.333		5.77%		974.510		42.88 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.479.471		1.211.395		1.341.540		205.562		15.32%		1.416.957		57.15 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.407.099		1.317.000		1.356.600		219.500		16.18%		1.536.500		63.83 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.574.386		1.368.644		2.053.817		230.126		11.20%		1.598.770		44.73 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			947.958		659.878		957.400		109.873		11.48%		769.751		81.20 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.837.092		1.018.136		1.135.407		170.409		15.01%		1.188.546		64.70 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			842.672		523.058		1.130.208		70.318		6.22%		593.375		70.42 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			962.895		643.119		793.621		109.816		13.84%		752.935		78.19 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.320.793		931.532		713.500		104.950		14.71%		1.036.482		78.47 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.216.778		1.367.757		1.996.572		219.026		10.97%		1.586.783		49.33 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.103.167		897.988		1.204.935		152.917		12.69%		1.050.905		49.97 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.435.573		1.310.357		1.710.988		220.310		12.88%		1.530.667		62.85 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.160.036		1.647.751		1.822.782		276.328		15.16%		1.924.080		60.89 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.820.535		1.095.354		1.107.622		167.172		15.09%		1.262.526		69.35 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.271.557		1.953.699		2.569.680		301.767		11.74%		2.255.465		99.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.071.524		581.388		628.995		97.833		15.55%		679.221		63.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.141.471		682.604		655.965		100.414		15.31%		783.018		68.60 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.099.598		1.275.738		761.360		112.987		14.84%		1.388.725		126.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.067.306		651.221		782.292		109.783		14.03%		761.004		71.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.271.723		515.669		561.344		85.613		15.25%		601.282		47.28 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.248.122		612.633		842.257		89.700		10.65%		702.333		56.27 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.394.393		943.512		1.279.407		112.548		8.80%		1.056.060		75.74 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			965.059		449.401		517.560		75.468		14.58%		524.869		54.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			986.245		681.891		396.049		53.821		13.59%		735.713		74.60 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			979.817		397.224		479.295		46.731		9.75%		443.955		45.31 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.643.893		1.156.212		1.335.763		144.395		10.81%		1.300.607		79.12 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			703.767		483.928		496.488		81.499		16.42%		565.427		80.34 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			628.210		376.937		314.245		42.867		13.64%		419.804		66.83 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.131.939		799.182		910.757		134.016		14.71%		933.197		82.44 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.735.397		1.477.049		1.860.295		171.195		9.20%		1.648.244		60.26 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.181.764		878.967		1.205.761		144.884		12.02%		1.023.851		86.64 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.982.423		1.056.034		1.156.140		176.903		15.30%		1.232.938		62.19 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.432.113		1.228.226		1.344.440		171.480		12.75%		1.399.706		57.55 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.373.294		1.214.296		1.416.341		171.087		12.08%		1.385.383		100.88 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.164.376		391.524		341.320		37.677		11.04%		429.201		36.86 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.050.663		1.987.962		1.027.963		161.640		15.72%		2.149.602		204.59 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.332.172		1.622.178		2.788.849		228.023		8.18%		1.850.201		79.33 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.948.824		1.304.810		1.465.329		219.720		14.99%		1.524.530		78.23 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.625.380		1.023.442		1.043.098		151.622		14.54%		1.175.064		72.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.668.532		772.637		910.377		130.256		14.31%		902.893		54.11 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.574.842		1.004.257		1.358.134		159.698		11.76%		1.163.955		73.91 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.668.143		1.703.537		1.661.671		266.600		16.04%		1.970.137		118.10 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas		15 Pokmas / Ormas		15 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.313.211		848.180		899.014		142.918		15.90%		991.098		75.47 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.115.318		1.405.402		1.340.161		201.384		15.03%		1.606.786		75.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.963.261		1.049.168		1.484.187		175.777		11.84%		1.224.945		62.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.297.476		573.457		622.348		95.608		15.36%		669.065		51.57 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.772.012		1.720.072		1.813.132		288.187		15.89%		2.008.260		72.45 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.091.174		1.263.672		1.646.249		211.505		12.85%		1.475.177		70.54 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.025.727		1.459.693		1.443.756		217.705		15.08%		1.677.398		55.44 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.025.849		2.016.878		2.183.777		337.784		15.47%		2.354.662		77.82 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.239.302		1.950.516		2.036.400		326.766		16.05%		2.277.282		70.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.871.745		1.108.632		1.166.413		168.398		14.44%		1.277.030		68.23 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.323.475		753.586		787.200		126.305		16.04%		879.891		66.48 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.101.041		969.713		1.376.788		165.293		12.01%		1.135.005		103.08 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.127.615		800.358		1.220.592		134.668		11.03%		935.026		82.92 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.027.721		1.039.665		1.354.361		148.340		10.95%		1.188.005		115.60 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			558.633		426.356		744.071		58.496		7.86%		484.852		86.79 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.669.712		848.989		958.011		141.626		14.78%		990.615		59.33 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			850.264		582.507		602.400		98.786		16.40%		681.293		80.13 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.466.004		1.036.873		1.051.757		174.561		16.60%		1.211.434		82.64 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.071.548		1.145.343		1.299.065		192.125		14.79%		1.337.467		64.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			874.932		272.046		369.073		45.402		12.30%		317.448		36.28 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.768.963		1.262.155		871.200		140.484		16.13%		1.402.639		79.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			772.531		405.283		412.268		58.565		14.21%		463.848		60.04 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.497.398		449.604		505.915		62.502		12.35%		512.106		34.20 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.901.301		701.856		855.964		104.447		12.20%		806.302		42.41 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.911.965		842.557		1.363.523		134.585		9.87%		977.142		51.11 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			911.900		599.151		687.745		101.768		14.80%		700.920		76.86 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.727.658		836.867		867.320		140.814		16.24%		977.681		56.59 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			885.745		704.847		1.195.188		95.775		8.01%		800.622		90.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			962.207		543.745		568.200		91.637		16.13%		635.382		66.03 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.815.890		1.780.488		1.876.200		301.070		16.05%		2.081.558		73.92 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			810.766		819.995		577.120		78.614		13.62%		898.609		110.83 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.312.079		718.870		714.685		107.960		15.11%		826.830		63.02 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.783.596		1.162.179		1.866.477		195.303		10.46%		1.357.483		76.11 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.662.868		1.810.512		1.849.242		278.922		15.08%		2.089.434		78.47 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.341.718		1.156.913		804.853		128.757		16.00%		1.285.670		95.82 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.470.002		932.461		905.400		145.074		16.02%		1.077.535		73.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			413.413		327.381		727.011		45.117		6.21%		372.498		90.10 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.986.677		1.238.270		1.338.311		201.623		15.07%		1.439.892		72.48 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			557.717		373.582		482.054		38.671		8.02%		412.253		73.92 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			407.201		458.647		553.780		50.701		9.16%		509.348		125.09 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.209.682		745.164		2.300.727		124.944		5.43%		870.108		71.93 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.187.055		1.351.099		1.461.024		226.718		15.52%		1.577.817		72.14 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			626.804		645.714		1.092.143		91.439		8.37%		737.153		117.61 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.133.491		646.928		622.811		82.543		13.25%		729.471		64.36 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.043.949		766.852		670.800		108.510		16.18%		875.361		83.85 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.756.326		938.669		965.016		144.487		14.97%		1.083.155		61.67 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.486.122		496.846		1.773.939		85.367		4.81%		582.213		39.18 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.547.999		407.808		439.900		69.092		15.71%		476.900		30.81 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.080.816		409.521		459.104		68.692		14.96%		478.213		44.25 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.066.891		1.386.247		1.451.025		230.351		15.88%		1.616.598		78.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			930.189		461.666		501.825		74.473		14.84%		536.139		57.64 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			129.030		572.752		618.225		94.593		15.30%		667.345		517.20 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.169.320		533.953		943.047		88.425		9.38%		622.378		53.23 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			648.488		401.723		411.600		64.931		15.78%		466.654		71.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			667.913		1.194.824		1.789.701		191.763		10.71%		1.386.588		207.60 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			877.868		1.083.931		1.082.160		170.471		15.75%		1.254.401		142.89 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.241.199		394.461		286.200		45.621		15.94%		440.081		13.58 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.062.865		928.735		977.914		156.287		15.98%		1.085.022		102.08 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.224.080		1.324.293		1.554.119		222.691		14.33%		1.546.984		69.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.456.023		1.261.199		1.338.560		210.334		15.71%		1.471.533		59.92 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.675.032		1.460.135		1.335.100		195.076		14.61%		1.655.211		98.82 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.427.230		1.538.966		1.585.483		257.780		16.26%		1.796.745		74.02 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.685.781		1.347.355		1.409.061		225.722		16.02%		1.573.077		58.57 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.357.204		770.571		821.181		129.313		15.75%		899.884		66.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.667.073		1.471.945		1.160.960		184.040		15.85%		1.655.985		62.09 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			702.840		530.338		1.827.660		88.395		4.84%		618.734		88.03 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.184.061		838.575		959.099		119.492		12.46%		958.067		80.91 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			748.403		687.344		1.048.199		115.360		11.01%		802.705		107.26 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			699.380		732.683		924.136		95.862		10.37%		828.545		118.47 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			780.674		426.850		756.492		71.379		9.44%		498.229		63.82 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.033.519		730.373		1.004.852		121.383		12.08%		851.756		82.41 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.470.386		847.239		1.093.017		127.736		11.69%		974.974		66.31 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.167.111		877.188		935.400		146.232		15.63%		1.023.420		87.69 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.403.731		858.411		896.080		144.571		16.13%		1.002.982		71.45 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.206.980		1.304.971		947.200		154.106		16.27%		1.459.077		120.89 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.198.532		1.063.090		1.143.254		179.509		15.70%		1.242.599		103.68 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.518.871		1.357.403		1.432.800		225.402		15.73%		1.582.805		104.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.418.571		1.189.213		1.221.600		198.028		16.21%		1.387.241		97.79 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			833.579		479.327		536.810		80.144		14.93%		559.471		67.12 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			587.694		284.629		324.558		46.500		14.33%		331.129		56.34 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.878.070		905.483		901.200		148.299		16.46%		1.053.782		56.11 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			655.157		788.416		771.768		112.344		14.56%		900.760		137.49 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.088.790		757.481		992.569		119.824		12.07%		877.305		80.58 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.460.828		564.549		966.464		81.347		8.42%		645.896		44.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.835.583		1.075.604		844.889		128.399		15.20%		1.204.003		65.59 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.452.106		683.623		1.599.999		116.307		7.27%		799.930		55.09 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.809.622		1.273.591		1.505.697		181.227		12.04%		1.454.818		80.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			949.789		1.021.542		1.094.600		172.219		15.73%		1.193.762		125.69 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.614.622		1.097.687		2.394.487		183.603		7.67%		1.281.290		79.36 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.728.681		795.398		981.894		132.724		13.52%		928.122		53.69 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.596.717		910.207		2.352.423		150.447		6.40%		1.060.655		66.43 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.446.145		687.000		731.400		114.500		15.65%		801.500		32.77 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.158.529		1.235.510		2.227.157		203.517		9.14%		1.439.027		66.67 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.177.498		1.081.033		1.562.289		151.067		9.67%		1.232.100		38.78 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.445.420		1.761.950		1.708.493		271.285		15.88%		2.033.235		59.01 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			2.894.153		2.285.827		2.450.889		383.599		15.65%		2.669.426		92.24 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.445.420		1.350.618		1.951.831		219.055		11.22%		1.569.674		45.56 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.445.420		1.434.801		1.568.260		226.870		14.47%		1.661.671		48.23 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.833.928		1.552.307		1.640.608		222.537		13.56%		1.774.845		96.78 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			709.961		625.477		879.734		102.265		11.62%		727.742		102.50 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.975.407		914.795		949.200		152.716		16.09%		1.067.511		54.04 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			846.811		1.078.071		1.310.740		156.547		11.94%		1.234.618		145.80 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.505.548		732.400		1.070.128		95.103		8.89%		827.503		54.96 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			1.004.486		568.067		874.155		96.440		11.03%		664.507		66.15 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			3.821.171		1.976.470		2.378.520		331.154		13.92%		2.307.623		60.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			37.564		5.340		10.800		0		0.00%		5.340		14.22 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			1.340		1.260		1.311		0		0.00%		1.260		94.04 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wiyung	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			2.010		7.200		7.200		0		0.00%		7.200		358.24 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			6.389		4.920		6.000		0		0.00%		4.920		77.00 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			26.673		6.300		7.200		0		0.00%		6.300		23.62 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			10.853		10.200		10.616		0		0.00%		10.200		93.98 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			6.699		7.200		6.540		0		0.00%		7.200		107.47 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			13.399		3.600		3.600		0		0.00%		3.600		26.87 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			33.497		3.300		4.500		0		0.00%		3.300		9.85 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.072		2.640		1.740		0		0.00%		2.640		246.29 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		9.750		13.700		0		0.00%		9.750		32.34 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.029		2.580		5.550		0		0.00%		2.580		42.79 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			16.528		7.500		17.319		0		0.00%		7.500		45.38 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum			10.049		4.680		5.340		0		0.00%		4.680		46.57 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			1.675		6.060		6.060		0		0.00%		6.060		361.82 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			40.196		22.000		36.000		0		0.00%		22.000		54.73 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			1.675		1.500		1.638		0		0.00%		1.500		89.56 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			30.147		0		2.520		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			30.147		4.800		4.800		0		0.00%		4.800		15.92 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Benowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		6.000		7.000		0		0.00%		6.000		358.24 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		9.000		9.000		0		0.00%		9.000		29.85 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2.680		7.200		7.200		0		0.00%		7.200		268.68 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			26.798		4.050		6.000		0		0.00%		4.050		15.11 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			23.448		10.500		7.770		0		0.00%		10.500		44.78 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.163		3.000		3.000		0		0.00%		3.000		48.67 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Kenjeran	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			5.025		4.800		5.400		0		0.00%		4.800		95.53 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			23.448		1.980		17.920		0		0.00%		1.980		8.44 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			8.374		7.500		8.192		0		0.00%		7.500		89.56 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			46.839		10.800		4.800		0		0.00%		10.800		23.06 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			27.783		9.000		26.860		0		0.00%		9.000		32.39 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**			18.318		17.400		7.500		0		0.00%		17.400		94.99 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			6.298.746		5.259.130		4.929.720		35.327		0.72%		5.294.457		84.06%		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		62 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga		70 Lembaga		70 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		48 Lembaga		48 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha		140 Unit Usaha		140 Unit Usaha		35 Unit Usaha		25.00 %		35 Unit Usaha		25.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga		5 Lembaga		20.00 %		5 Lembaga		20.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga		116 Lembaga		116 Lembaga		30 Lembaga		25.86 %		30 Lembaga		25.86 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha		150 pelaku usaha		150 pelaku usaha		53 pelaku usaha		35.33 %		53 pelaku usaha		35.33 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha		174 Unit Usaha		62 Unit Usaha		15 Unit Usaha		24.19 %		15 Unit Usaha		24.19 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja		90 Unit Kerja		90 Unit Kerja		22 Unit Kerja		24.44 %		22 Unit Kerja		24.44 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga		192 Lembaga		192 Lembaga		42 Lembaga		21.88 %		42 Lembaga		21.88 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		12 Lembaga		24.00 %		12 Lembaga		24.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga		N/A		34 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga		124 Lembaga		124 Lembaga		33 Lembaga		26.61 %		33 Lembaga		26.61 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		24 Pelaku Usaha		24.00 %		24 Pelaku Usaha		24.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga		N/A		53 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk	50 Lembaga		N/A		52 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan dapat disediakan																
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		100 pelaku usaha		100 pelaku usaha		15 pelaku usaha		15.00 %		15 pelaku usaha		15.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		29 Lembaga		29 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga		109 Lembaga		100 Lembaga		26 Lembaga		26.00 %		26 Lembaga		26.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga		67 Lembaga		67 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		12 Lembaga		24.00 %		12 Lembaga		24.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		N/A		44 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga		N/A		78 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	480 Lembaga		440 Lembaga		460 Lembaga		114 Lembaga		24.78 %		114 Lembaga		23.75 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga		N/A		51 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha		110 Unit Usaha		110 Unit Usaha		22 Unit Usaha		20.00 %		22 Unit Usaha		20.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		120 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha		30.00 %		30 Pelaku Usaha		30.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		26 Lembaga		26 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha		117 Unit Usaha		116 Unit Usaha		30 Unit Usaha		25.86 %		30 Unit Usaha		25.86 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga		N/A		21 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		N/A		26 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga		36 Lembaga		36 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga		38 Lembaga		38 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga		N/A		58 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga		17 Lembaga		17 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga		288 Lembaga		288 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga		156 Lembaga		156 Lembaga		10 Lembaga		6.41 %		10 Lembaga		6.41 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga		32 Lembaga		32 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga		149 Lembaga		148 Lembaga		36 Lembaga		24.32 %		36 Lembaga		24.32 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		29 Lembaga		29 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	37 Lembaga		N/A		38 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga		N/A		72 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		48 Lembaga		48 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga		N/A		74 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga		34 Lembaga		34 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga		52 Lembaga		52 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga		61 Lembaga		61 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		24 Pelaku Usaha		24.00 %		24 Pelaku Usaha		24.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	480 Lembaga		440 Lembaga		460 Lembaga		76 Lembaga		16.52 %		76 Lembaga		15.83 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		120 pelaku usaha		100 pelaku usaha		30 pelaku usaha		30.00 %		30 pelaku usaha		30.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha		20.00 %		10 Pelaku Usaha		20.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga		120 Lembaga		120 Lembaga		30 Lembaga		25.00 %		30 Lembaga		25.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	29 Lembaga		15 Lembaga		23 Lembaga		5 Lembaga		21.74 %		5 Lembaga		17.24 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		12 Potensi usaha		24.00 %		12 Potensi usaha		24.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha		20 unit usaha		20 unit usaha		5 unit usaha		25.00 %		5 unit usaha		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			16.079		1.200		15.720		0		0.00%		1.200		7.46 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			8.039		6.500		9.000		0		0.00%		6.500		80.85 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			9.179		4.320		8.640		0		0.00%		4.320		47.06 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		49 Laporan		48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			15.000		4.500		15.000		0		0.00%		4.500		30.00 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			51.641		3.600		3.600		0		0.00%		3.600		6.97 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			15.312		10.800		14.978		2.400		16.02%		13.200		86.21 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			19.294		22.000		22.800		3.800		16.67%		25.800		133.72 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.854		16.100		23.110		0		0.00%		16.100		67.49 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			25.324		9.900		23.456		900		3.84%		10.800		42.65 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		55 Laporan		48 Laporan		10 Laporan		20.83 %		10 Laporan		20.83 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			10.049		5.760		46.064		0		0.00%		5.760		57.32 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			42.599		16.800		16.800		0		0.00%		16.800		39.44 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			73.733		3.600		10.500		0		0.00%		3.600		4.88 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12.863		11.520		12.582		1.920		15.26%		13.440		104.49 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			10.049		9.000		9.830		1.800		18.31%		10.800		107.47 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.647		6.120		9.437		0		0.00%		6.120		63.44 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12.059		4.800		11.796		0		0.00%		4.800		39.80 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.350		8.640		7.200		0		0.00%		8.640		257.93 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			19.294		10.660		18.873		0		0.00%		10.660		55.25 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		12 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			17.824		2.050		17.212		0		0.00%		2.050		11.50 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.182		2.400		2.760		0		0.00%		2.400		75.42 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			3.350		23.401		32.378		0		0.00%		23.401		698.59 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		4 Laporan		8.33 %		4 Laporan		8.33 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			31.822		12.150		31.128		3.300		10.60%		15.450		48.55 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.854		7.440		20.400		0		0.00%		7.440		31.19 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			16.414		10.260		14.700		3.900		26.53%		14.160		86.27 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			9.647		2.880		8.640		0		0.00%		2.880		29.85 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			16.414		15.660		16.055		2.640		16.44%		18.300		111.49 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			28.539		3.000		9.200		0		0.00%		3.000		10.51 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			14.999		6.500		14.490		1.500		10.35%		8.000		53.34 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			50.246		12.160		32.000		0		0.00%		12.160		24.20 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			23.448		8.800		22.900		0		0.00%		8.800		37.53 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.0004	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**			23.113		21.030		20.400		3.360		16.47%		24.390		105.53 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			71.766		62.045		54.264		0		0.00%		62.045		86.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit		17 Unit		17 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			281.439		244.529		213.864		0		0.00%		244.529		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit		67 Unit		67 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			302.442		262.777		229.824		0		0.00%		262.777		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit		72 Unit		72 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			98.701		94.892		82.992		0		0.00%		94.892		96.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		26 Unit		26 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			79.720		79.720		67.032		0		0.00%		79.720		100.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit		21 Unit		21 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			134.419		116.790		118.742		9.807		8.26%		126.597		94.18 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit		32 Unit		32 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			130.218		113.140		98.952		0		0.00%		113.140		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit		31 Unit		31 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			218.430		182.484		159.600		0		0.00%		182.484		83.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit		50 Unit		52 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		160.586		140.448		0		0.00%		160.586		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		44 Unit		44 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142.820		124.089		108.528		0		0.00%		124.089		86.89 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		34 Unit		34 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			121.817		105.841		111.082		0		0.00%		105.841		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		29 Unit		29 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			294.041		255.478		221.445		0		0.00%		255.478		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit		70 Unit		70 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			201.628		175.185		153.216		0		0.00%		175.185		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		48 Unit		48 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		160.586		140.448		0		0.00%		160.586		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		44 Unit		44 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			159.622		138.688		121.296		0		0.00%		138.688		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit		38 Unit		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			105.015		91.242		79.800		0		0.00%		91.242		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit		25 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			310.843		270.076		236.208		0		0.00%		270.076		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit		74 Unit		74 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			222.631		193.433		203.011		0		0.00%		193.433		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit		53 Unit		53 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			218.430		189.783		165.984		0		0.00%		189.783		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		52 Unit		52 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			193.827		186.134		162.792		0		0.00%		186.134		96.03 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit		51 Unit		51 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		160.586		140.448		0		0.00%		160.586		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		44 Unit		44 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			256.236		231.568		194.712		0		0.00%		231.568		90.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		61 Unit		61 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			182.218		175.185		153.216		0		0.00%		175.185		96.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		48 Unit		48 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			109.215		94.892		82.992		0		0.00%		94.892		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		26 Unit		26 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			121.817		105.841		92.568		0		0.00%		105.841		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		29 Unit		29 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			243.634		211.681		185.136		0		0.00%		211.681		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit		58 Unit		58 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			126.017		109.490		95.760		0		0.00%		109.490		86.89 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit		30 Unit		30 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			155.422		138.688		121.296		0		0.00%		138.688		89.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	37 Unit		38 Unit		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			142.820		124.089		108.528		0		0.00%		124.089		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		34 Unit		34 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			151.221		131.388		114.912		0		0.00%		131.388		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit		36 Unit		36 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.0003	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan**			327.645		284.675		248.976		0		0.00%		284.675		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit		78 Unit		78 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
141	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			5.087.451		4.435.308		4.788.765		779.741		16.28%		5.215.049		102.51%		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	-
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	-
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			5.087.451		4.435.308		4.788.765		779.741		16.28%		5.215.049		102.51%		
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi		21 Lokasi		21 Lokasi		21 Lokasi		100.00 %		21 Lokasi		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %		15 lokasi		100.00 %		Kec. Tandes	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		100.00 %		20 Lokasi		100.00 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Pakal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		100.00 %		22 Lokasi		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		13 Lokasi		108.33 %		13 Lokasi		108.33 %		Kec. Pabean Cantian	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		100.00 %		10 Lokasi		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		26 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		26 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi		14 lokasi		14 lokasi		14 lokasi		100.00 %		14 lokasi		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Benowo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %		15 lokasi		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan	82 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		9.76 %		Kec. Jambangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan																
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi		16 Lokasi		16 Lokasi		16 Lokasi		100.00 %		16 Lokasi		100.00 %		Kec. Semampir	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		100.00 %		26 Lokasi		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi		11 Lokasi		11 Lokasi		13 Lokasi		118.18 %		13 Lokasi		118.18 %		Kec. Sukolilo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		100.00 %		5 Lokasi		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		100.00 %		17 lokasi		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik**			155.275		113.336		143.153		19.384		13.54%		132.720		85.47 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			177.759		140.755		146.115		24.353		16.67%		165.107		92.88 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			262.249		121.627		133.986		28.897		21.57%		150.524		57.40 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			154.683		123.704		154.683		10.993		7.11%		134.697		87.08 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			169.641		103.177		118.183		17.589		14.88%		120.766		71.19 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			88.039		113.353		106.420		26.585		24.98%		139.938		158.95 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			145.639		179.405		185.668		30.719		16.55%		210.124		144.28 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			199.767		150.101		147.515		24.567		16.65%		174.668		87.44 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		90 Laporan		25.00 %		90 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			167.097		179.593		156.997		44.654		28.44%		224.247		134.20 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		88 Laporan		24.44 %		88 Laporan		24.44 %		Kec. Jambangan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			120.295		120.165		138.571		21.913		15.81%		142.078		118.11 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			194.561		131.204		152.554		22.948		15.04%		154.151		79.23 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			157.159		143.792		241.441		23.323		9.66%		167.115		106.34 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			171.867		135.049		137.939		22.914		16.61%		157.963		91.91 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik**			142.826		148.866		138.445		23.074		16.67%		171.940		120.38 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			309.309		213.306		297.509		35.226		11.84%		248.532		80.35 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			146.260		222.737		202.733		35.831		17.67%		258.568		176.79 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			188.612		166.729		130.686		26.639		20.38%		193.368		102.52 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			154.049		89.276		149.742		24.957		16.67%		114.233		74.15 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			131.678		129.240		126.985		19.511		15.36%		148.751		112.97 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			152.729		143.445		146.262		18.308		12.52%		161.752		105.91 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			152.234		124.453		146.262		21.942		15.00%		146.395		96.16 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			154.049		149.763		153.830		24.900		16.19%		174.663		113.38 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			151.735		142.253		141.514		23.575		16.66%		165.828		109.29 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			157.866		157.008		121.414		18.832		15.51%		175.840		111.39 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			165.164		119.396		115.681		17.726		15.32%		137.122		83.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			31.844		88.063		109.900		18.272		16.63%		106.335		333.93 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik**			165.173		128.000		121.104		22.377		18.48%		150.377		91.04 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		88 Laporan		24.44 %		88 Laporan		24.44 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			316.157		246.407		285.407		61.984		21.72%		308.391		97.54 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			156.952		138.135		147.423		23.779		16.13%		161.914		103.16 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			129.511		122.138		131.427		20.191		15.36%		142.329		109.90 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			117.273		150.834		159.217		23.779		14.94%		174.613		148.89 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
142	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			145.220.138		1.180.640		4.186.003		394.927		9.43%		1.575.567		1.08%		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.72 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77 %		52.94 %		30.77 %		91.18 %		296.33 %		91.18 %		296.33%		Kec. Gubeng	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.71 %		100%		99.76 %		99.76 %		99.76 %		99.76%		Kec. Jambangan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20%		32.79 %		18%		87.5 %		486.11 %		87.5 %		437.50%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %		52.50 %		50.51 %		89.56 %		177.31 %		89.56 %		177.31%		Kec. Tandes	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.87 %		54.39 %		31.15 %		73.58 %		236.21 %		73.58 %		223.85%		Kec. Gayungan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Semampir	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pakal	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		33.33 %		24.37 %		85.29 %		349.98 %		85.29 %		349.98%		Kec. Bubutan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %		45.45 %		26.32 %		92.86 %		352.81 %		92.86 %		352.81%		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Kenjeran	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	65.01 %		69.64 %		50.15 %		90.77 %		181.00 %		90.77 %		139.62%		Kec. Wonokromo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.30 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonokromo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		43.12 %		24.45 %		92.86 %		379.80 %		92.86 %		371.44%		Kec. Semampir	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %		57.86 %		53.19 %		90.36 %		169.88 %		90.36 %		169.88%		Kec. Pakal	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%		48.81 %		51%		86.42 %		169.45 %		86.42 %		169.45%		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		93.94 %		93.94 %		93.94 %		93.94%		Kec. Rungkut	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Jambangan	-
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24.73 %		74.36 %		24.73 %		96.41 %		389.85 %		96.41 %		389.85%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.53 %		100%		99.95 %		99.95 %		99.95 %		99.95%		Kec. Tegalsari	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.93 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		54.08 %		24.37 %		94.03 %		385.84 %		94.03 %		385.84%		Kec. Sambikerep	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %		51.22 %		33.33 %		88.59 %		265.80 %		88.59 %		265.80%		Kec. Kenjeran	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.94 %		57.50 %		35.14 %		87.5 %		249.00 %		87.5 %		230.63%		Kec. Wonocolo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %		26.12 %		34.45 %		90.55 %		262.84 %		90.55 %		262.84%		Kec. Benowo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Krembangan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukolilo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55.81 %		39.58 %		55.81 %		92.21 %		165.22 %		92.21 %		165.22%		Kec. Wiyung	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.41 %		100%		99.64 %		99.64 %		99.64 %		99.64%		Kec. Tambaksari	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%		62.37 %		50%		98.06 %		196.12 %		98.06 %		196.12%		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Genteng	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gunung Anyar	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Simokerto	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89.61 %		51.72 %		74.03 %		99.3 %		134.13 %		99.3 %		110.81%		Kec. Sawahan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Rungkut	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wiyung	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		97.83 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Benowo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bulak	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gayungan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		85.77 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gubeng	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Karangpilang	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%		49.61 %		100%		56.6 %		56.60 %		56.6 %		56.60%		Kec. Karangpilang	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukomanunggal	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tambaksari	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tandes	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tegalsari	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.98 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonocolo	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.41 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		44.71 %		24.45 %		86.64 %		354.36 %		86.64 %		346.56%		Kec. Lakarsantri	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %		58.18 %		23.25 %		95.83 %		412.17 %		95.83 %		412.17%		Kec. Tegalsari	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		51.85 %		24.45 %		70.59 %		288.71 %		70.59 %		282.36%		Kec. Bulak	-
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %		63.56 %		23.38 %		88.46 %		378.36 %		88.46 %		378.36%		Kec. Genteng	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.71 %		50.89 %		26.71 %		97.12 %		363.61 %		97.12 %		363.61%		Kec. Sukolilo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.3 %		52.85 %		29.53 %		91.06 %		308.36 %		91.06 %		290.93%		Kec. Jambangan	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.27 %		44.44 %		27.27 %		84%		308.03 %		84%		308.03%		Kec. Asemrowo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.11 %		31.72 %		37.11 %		97.12 %		261.71 %		97.12 %		261.71%		Kec. Krembangan	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.16 %		81.08 %		37.16 %		94.65 %		254.71 %		94.65 %		254.71%		Kec. Rungkut	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.51 %		55.56 %		40.51 %		86.43 %		213.35 %		86.43 %		213.35%		Kec. Mulyorejo	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47.02 %		78.63 %		47.02 %		98.23 %		208.91 %		98.23 %		208.91%		Kec. Tambaksari	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81.7 %		53.66 %		81.7 %		97.06 %		118.80 %		97.06 %		118.80%		Kec. Simokerto	-
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			267.325		92.340		157.525		106.830		67.82%		199.170		74.50%		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sambikerep	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116.67 %		7 Lembaga		116.67 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Bulak	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		100.00 %		2 laporan		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		100.00 %		5 lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Gubeng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.786		1.470		2.250		840		37.33%		2.310		21.42 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		100.00 %		6 Laporan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.843		4.200		8.650		8.640		99.88%		12.840		145.20 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.374		3.000		3.000		3.000		100.00%		6.000		71.65 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			2.512		2.220		2.250		2.250		100.00%		4.470		177.93 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			6.699		3.600		4.500		4.500		100.00%		8.100		120.91 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			14.739		6.300		6.300		6.300		100.00%		12.600		85.49 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			3.752		1.740		1.740		1.740		100.00%		3.480		92.76 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			5.108		3.000		4.997		4.950		99.06%		7.950		155.63 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			6.967		2.250		6.815		2.250		33.01%		4.500		64.59 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.374		3.600		3.600		3.600		100.00%		7.200		85.98 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			3.048		2.910		2.982		2.280		76.47%		5.190		170.26 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			12.729		1.950		1.950		1.050		53.85%		3.000		23.57 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			5.025		1.050		4.500		4.500		100.00%		5.550		110.46 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			5.694		5.400		5.400		5.400		100.00%		10.800		189.66 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			6.699		1.650		3.000		3.000		100.00%		4.650		69.41 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			4.020		2.100		1.500		1.500		100.00%		3.600		89.56 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			12.394		1.050		1.050		1.050		100.00%		2.100		16.94 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			15.779		4.500		5.820		5.820		100.00%		10.320		65.40 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.049		0		6.540		390		5.96%		390		3.88 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			3.852		3.450		3.450		2.460		71.30%		5.910		153.42 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.887		2.700		2.700		2.700		100.00%		5.400		49.60 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.049		6.000		9.830		2.250		22.89%		8.250		82.10 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan		125 Laporan		125 Laporan		125 Laporan		100.00 %		125 Laporan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			5.427		5.190		5.308		2.700		50.87%		7.890		145.40 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			15.375		3.000		15.040		10.500		69.82%		13.500		87.80 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			3.350		1.020		3.277		750		22.89%		1.770		52.84 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan		178 Laporan		178 Laporan		178 Laporan		100.00 %		178 Laporan		100.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			16.079		4.200		4.200		3.540		84.29%		7.740		48.14 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.441		990		2.520		0		0.00%		990		11.73 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			8.910		1.800		1.800		1.800		100.00%		3.600		40.40 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			19.294		6.600		18.840		11.400		60.51%		18.000		93.29 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			3.350		3.000		3.232		3.000		92.83%		6.000		179.12 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**			10.719		2.400		10.485		2.670		25.46%		5.070		47.30 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			138.837.194		698.746		3.149.353		288.097		9.15%		986.843		0.71%		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	280 Lembaga		281 Lembaga		281 Lembaga		281 Lembaga		100.00 %		281 Lembaga		100.36 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		100.00 %		323 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		100.00 %		185 Lembaga		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		100.00 %		414 Lembaga		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 Lembaga		371 Lembaga		376 Lembaga		371 Lembaga		98.67 %		371 Lembaga		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga		219 Lembaga		219 Lembaga		219 Lembaga		100.00 %		219 Lembaga		100.92 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		100.00 %		627 lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		100.00 %		364 Lembaga		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		100.00 %		364 Lembaga		99.73 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		100.00 %		346 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		100.00 %		568 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga		193 lembaga		188 lembaga		198 lembaga		105.32 %		198 lembaga		105.32 %		Kec. Benowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga		751 Lembaga		751 Lembaga		751 Lembaga		100.00 %		751 Lembaga		100.27 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		100.00 %		636 Lembaga		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		100.00 %		480 Lembaga		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		100.00 %		431 Lembaga		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		100.00 %		460 Lembaga		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga		211 lembaga		211 lembaga		211 lembaga		100.00 %		211 lembaga		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		100.00 %		197 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		100.00 %		158 Lembaga		100.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		100.00 %		139 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		100.00 %		220 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		100.00 %		371 lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga		441 Lembaga		439 Lembaga		441 Lembaga		100.46 %		441 Lembaga		100.46 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga		497 Lembaga		488 Lembaga		497 Lembaga		101.84 %		497 Lembaga		101.84 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		262 Lembaga		100.38 %		262 Lembaga		100.77 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		100.00 %		196 Lembaga		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		100.00 %		356 lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		100.00 %		229 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga		214 Lembaga		168 Lembaga		168 Lembaga		100.00 %		168 Lembaga		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	200 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		100.00 %		205 Lembaga		102.50 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.454.403		12.701		71.652		6.954		9.71%		19.655		0.80 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.200.886		31.104		113.648		7.776		6.84%		38.880		0.63 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.594.402		27.929		99.508		6.982		7.02%		34.911		0.62 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.798.635		29.803		132.933		4.979		3.75%		34.781		0.60 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			5.890.578		28.577		121.038		7.144		5.90%		35.721		0.61 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		15 Laporan		25.00 %		15 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.708.920		23.069		104.627		3.845		3.67%		26.914		0.57 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.745.070		13.014		130.324		15.520		11.91%		28.534		1.04 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.852.656		23.587		74.038		12.655		17.09%		36.242		0.75 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			6.686.608		22.421		80.437		5.605		6.97%		28.026		0.42 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.876.732		13.673		60.982		3.418		5.61%		17.091		0.59 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.280.353		40.597		218.038		10.157		4.66%		50.755		0.55 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.483.134		11.988		26.895		2.997		11.14%		14.985		0.60 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.437.744		26.827		167.706		6.707		4.00%		33.534		0.76 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.917.046		24.041		73.136		15.567		21.29%		39.608		0.81 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.427.372		32.206		120.916		22.800		18.86%		55.006		1.01 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.108.477		10.238		66.849		1.706		2.55%		11.945		0.57 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			1.881.581		9.007		45.659		5.162		11.31%		14.169		0.75 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.761.646		14.839		69.666		12.827		18.41%		27.666		1.00 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			8.285.543		42.345		214.062		6.869		3.21%		49.214		0.59 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan		30 Laporan		30 Laporan		6 Laporan		20.00 %		6 Laporan		20.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			9.569.468		48.665		184.246		22.374		12.14%		71.039		0.74 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.436.619		12.506		55.750		3.208		5.75%		15.714		0.64 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			2.411.844		14.191		37.106		3.548		9.56%		17.739		0.74 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.001.019		23.587		83.650		5.897		7.05%		29.484		0.59 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.680.000		10.886		52.466		7.342		13.99%		18.228		1.09 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.152.648		20.930		103.782		5.233		5.04%		26.163		0.63 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		63 Laporan		60 Laporan		15 Laporan		25.00 %		15 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.859.088		14.256		86.636		9.566		11.04%		23.822		0.83 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.600.212		12.766		44.859		5.428		12.10%		18.193		0.70 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.782.123		36.796		183.722		30.616		16.66%		67.412		0.99 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.684.744		25.832		90.219		10.994		12.19%		36.826		1.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			3.422.884		16.913		79.745		9.815		12.31%		26.728		0.78 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.02.0003	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**			4.844.760		23.452		155.056		14.408		9.29%		37.860		0.78 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			6.115.619		389.554		879.125		0		0.00%		389.554		6.37%		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			usaha yang dilimpahkan kepada Camat																
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat																
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50.00 %		3 Bidang Urusan		50.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan		12 Layanan		11 Layanan		12 Layanan		109.09 %		12 Layanan		109.09 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		66.67 %		4 Bidang Urusan		66.67 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan		N/A		4 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		100.00 %		4 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		9 Bidang Urusan		150.00 %		9 Bidang Urusan		150.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			usaha yang dilimpahkan kepada Camat																
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		33 Dokumen		30 Dokumen		9 Dokumen		30.00 %		9 Dokumen		30.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	635 Dokumen		362 Dokumen		630 Dokumen		82 Dokumen		13.02 %		82 Dokumen		12.91 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50.00 %		3 Bidang Urusan		50.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan		N/A		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat																
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		0		7.738		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		3.140		7.864		0		0.00%		3.140		39.06 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			4.020		0		3.932		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		746		28.743		0		0.00%		746		7.42 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3.753		1.614		3.652		0		0.00%		1.614		43.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		4.691		9.259		0		0.00%		4.691		46.68 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1.102		6.444		10.170		0		0.00%		6.444		584.96 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			912		366		854		0		0.00%		366		40.17 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13.399		4.884		5.404		0		0.00%		4.884		36.45 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			16.079		7.076		9.349		0		0.00%		7.076		44.01 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		971		9.830		0		0.00%		971		9.66 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			18.591		3.923		18.069		0		0.00%		3.923		21.10 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		7.143		1.957		0		0.00%		7.143		88.85 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		0		9.830		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait			21.494		666		8.163		0		0.00%		666		3.10 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		2.271		4.508		0		0.00%		2.271		28.25 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.594		5.495		10.363		0		0.00%		5.495		51.87 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.597		2.381		2.444		0		0.00%		2.381		27.69 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.863		4.973		12.161		0		0.00%		4.973		38.66 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2.043		860		1.999		0		0.00%		860		42.09 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			128.628		7.390		16.436		0		0.00%		7.390		5.75 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.059		826		10.800		0		0.00%		826		6.85 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		7.565		7.864		0		0.00%		7.565		94.10 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.652		7.146		10.420		0		0.00%		7.146		67.08 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			32.500		12.246		32.500		0		0.00%		12.246		37.68 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		0		11.598		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			402		9.828		20.374		0		0.00%		9.828		2,445.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6.699		585		1.680		0		0.00%		585		8.73 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		0		7.864		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.374		6.546		10.167		0		0.00%		6.546		78.16 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			24.118		9.602		23.592		0		0.00%		9.602		39.81 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		9.237		10.023		0		0.00%		9.237		64.78 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		1.110		12.288		0		0.00%		1.110		7.78 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.020		3.793		3.932		0		0.00%		3.793		94.36 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			3.753		2.620		2.284		0		0.00%		2.620		69.79 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		9.196		9.273		0		0.00%		9.196		91.51 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.039		5.661		5.712		0		0.00%		5.661		70.42 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		3.791		9.830		0		0.00%		3.791		37.72 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			13.399		5.095		13.023		0		0.00%		5.095		38.03 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		1.415		11.701		0		0.00%		1.415		9.93 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		4.405		4.495		0		0.00%		4.405		43.84 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			18.591		9.774		17.942		0		0.00%		9.774		52.57 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			9.171		11.049		7.997		0		0.00%		11.049		120.47 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		4.445		13.705		0		0.00%		4.445		31.17 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan		3039 Laporan		2923 Laporan		793 Laporan		27.13 %		793 Laporan		27.13 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			21.494		4.440		10.765		0		0.00%		4.440		20.66 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.809.279		9.935		21.369		0		0.00%		9.935		0.21 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			19.438		3.905		9.000		0		0.00%		3.905		20.09 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			4.913		1.530		4.755		0		0.00%		1.530		31.14 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		0		11.661		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			12.075		4.873		11.749		0		0.00%		4.873		40.35 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			20.098		7.417		5.729		0		0.00%		7.417		36.90 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan		4210 Laporan		4140 Laporan		1077 Laporan		26.01 %		1077 Laporan		26.01 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			12.059		4.782		11.778		0		0.00%		4.782		39.65 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.039		4.905		7.123		0		0.00%		4.905		61.01 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.652		9.768		10.419		0		0.00%		9.768		91.70 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			72.000		0		23.819		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan		4277 Laporan		4277 Laporan		1068 Laporan		24.97 %		1068 Laporan		24.97 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		3.170		9.596		0		0.00%		3.170		31.55 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			402		283		1.142		0		0.00%		283		70.40 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		765		5.342		0		0.00%		765		7.61 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			2.010		1.008		1.966		0		0.00%		1.008		50.15 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.374		17.771		8.060		0		0.00%		17.771		212.21 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			24.118		17.231		19.353		0		0.00%		17.231		71.45 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			3.350		3.034		16.539		0		0.00%		3.034		90.56 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		1.620		1.132		0		0.00%		1.620		10.08 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen		102 Dokumen		40 Dokumen		31 Dokumen		77.50 %		31 Dokumen		77.50 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		1.154		13.584		0		0.00%		1.154		7.18 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		35 Dokumen		35 Dokumen		9 Dokumen		25.71 %		9 Dokumen		25.71 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.675		2.008		453		0		0.00%		2.008		119.89 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.016		8.888		14.150		0		0.00%		8.888		88.74 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen		36 Dokumen		50 Dokumen		43 Dokumen		86.00 %		43 Dokumen		86.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		2.897		10.831		0		0.00%		2.897		18.02 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen		142 Dokumen		100 Dokumen		37 Dokumen		37.00 %		37 Dokumen		37.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			3.753		2.997		406		0		0.00%		2.997		79.85 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen		74 Dokumen		20 Dokumen		33 Dokumen		165.00 %		33 Dokumen		165.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		3.552		9.273		0		0.00%		3.552		35.35 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			13.399		593		13.106		0		0.00%		593		4.42 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		230 Dokumen		30 Dokumen		38 Dokumen		126.67 %		38 Dokumen		126.67 %		Kec. Mulyorejo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		346		9.526		0		0.00%		346		3.45 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		3.128		3.256		0		0.00%		3.128		19.45 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.059		10.656		11.796		0		0.00%		10.656		88.37 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		9.481		5.332		0		0.00%		9.481		94.34 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.591		2.922		5.889		0		0.00%		2.922		15.72 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		0		2.159		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen		42 Dokumen		42 Dokumen		12 Dokumen		28.57 %		12 Dokumen		28.57 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.340		3.350		8.879		0		0.00%		3.350		250.02 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		48 Dokumen		48 Dokumen		16 Dokumen		33.33 %		16 Dokumen		33.33 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait			21.494		844		8.871		0		0.00%		844		3.92 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			2.456		1.035		3.447		0		0.00%		1.035		42.14 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.142		12.600		2.831		0		0.00%		12.600		69.45 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		12 Dokumen		10 Dokumen		3 Dokumen		30.00 %		3 Dokumen		30.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.647		2.635		9.189		0		0.00%		2.635		27.31 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		87 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			13.834		0		6.058		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		12 Dokumen		10 Dokumen		3 Dokumen		30.00 %		3 Dokumen		30.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.513		2.953		8.991		0		0.00%		2.953		31.04 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen		230 Dokumen		38 Dokumen		61 Dokumen		160.53 %		61 Dokumen		160.53 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			24.118		7.516		5.061		0		0.00%		7.516		31.16 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			8.039		888		7.864		0		0.00%		888		11.05 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen		4 Dokumen		26.67 %		4 Dokumen		26.67 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.059		3.000		6.434		0		0.00%		3.000		24.88 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		192 Dokumen		48 Dokumen		47 Dokumen		97.92 %		47 Dokumen		97.92 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.652		3.336		10.420		0		0.00%		3.336		31.31 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	635 Dokumen		362 Dokumen		630 Dokumen		82 Dokumen		13.02 %		82 Dokumen		12.91 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.005		470		983		0		0.00%		470		46.77 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen		32 Dokumen		16 Dokumen		12 Dokumen		75.00 %		12 Dokumen		75.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12.863		5.197		7.392		0		0.00%		5.197		40.40 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		66 Dokumen		48 Dokumen		30 Dokumen		62.50 %		30 Dokumen		62.50 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			10.049		0		33.870		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		51 Dokumen		30 Dokumen		7 Dokumen		23.33 %		7 Dokumen		23.33 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			108.004		1.133		1.500		0		0.00%		1.133		1.05 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		95 Dokumen		48 Dokumen		23 Dokumen		47.92 %		23 Dokumen		47.92 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		750		900		0		0.00%		750		4.66 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		33 Dokumen		30 Dokumen		9 Dokumen		30.00 %		9 Dokumen		30.00 %		Kec. Rungkut	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			24.118		7.824		23.592		0		0.00%		7.824		32.44 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		35 Dokumen		35 Dokumen		9 Dokumen		25.71 %		9 Dokumen		25.71 %		Kec. Tandes	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
143	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.375.109		12.429.718		13.951.229		2.493.144		17.87%		14.922.862		103.81%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		97.90 %		100%		98.66 %		98.66 %		98.66 %		98.66%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.120.103		9.815.129		11.114.909		2.039.952		18.35%		11.855.081		129.99%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.120.103		9.815.129		11.114.909		2.039.952		18.35%		11.855.081		129.99 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		28 Orang/bulan		28 Orang/bulan		24 Orang/bulan		85.71 %		24 Orang/bulan		96.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			191.802		82.118		128.788		8.825		6.85%		90.943		47.41%		
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			191.802		82.118		128.788		8.825		6.85%		90.943		47.41 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket		5 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.063.203		2.532.472		2.707.532		444.367		16.41%		2.976.838		58.79%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.063.203		2.532.472		2.707.532		444.367		16.41%		2.976.838		58.79 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
144	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			846.659		3.407.210		5.906.877		89.212		1.51%		3.496.422		412.97%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	94%		92.78 %		93%		93.33 %		100.35 %		93.33 %		99.29%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			846.659		3.407.210		5.906.877		89.212		1.51%		3.496.422		412.97%		
			Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga		291 Lembaga		293 Lembaga		45 Lembaga		15.36 %		45 Lembaga		15.46 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**			846.659		3.407.210		5.906.877		89.212		1.51%		3.496.422		412.97 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang		291 Orang		293 Orang		45 Orang		15.36 %		45 Orang		15.46 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
145	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			8.317.287		122.734.960		17.524.830		7.100		0.04%		122.742.060		1,475.75%		
			Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%		54.23 %		77%		34.23 %		44.45 %		34.23 %		34.23%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			8.317.287		122.734.960		17.524.830		7.100		0.04%		122.742.060		1,475.75%		
			Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan	70 Lembaga		30 Lembaga		70 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik															
	8.01.03.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			8.317.287		122.734.960		17.524.830		7.100		0.04%		122.742.060		1,475.75 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang		60 Orang		140 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
146	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			59.370		60.078		84.368		2.500		2.96%		62.578		105.40%		
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	100%		100.00 %		81%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			59.370		60.078		84.368		2.500		2.96%		62.578		105.40%		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	30 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01.0005	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi**			59.370		60.078		84.368		2.500		2.96%		62.578		105.40 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
147	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			823.293		686.028		806.743		77.082		9.55%		763.110		92.69%		
			Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			823.293		686.028		806.743		77.082		9.55%		763.110		92.69%		
			Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	8 Lembaga		N/A		8 Lembaga		8 Lembaga		100.00 %		8 Lembaga		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**			823.293		686.028		806.743		77.082		9.55%		763.110		92.69 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang		702 Orang		690 Orang		140 Orang		20.29 %		140 Orang		20.29 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
148	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			12.624.896		11.907.791		12.803.112		2.972.819		23.22%		14.880.611		117.87%		
			Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			12.624.896		11.907.791		12.803.112		2.972.819		23.22%		14.880.611		117.87%		
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	12 Lembaga		14 Lembaga		14 Lembaga		13 Lembaga		92.86 %		13 Lembaga		108.33 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	18 Lembaga		17 Lembaga		17 Lembaga		19 Lembaga		111.76 %		19 Lembaga		105.56 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			11.875.472		11.402.763		12.083.834		2.923.241		24.19%		14.326.004		120.64 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Orang		24 Orang		17 Orang		19 Orang		111.76 %		19 Orang		105.56 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di			749.424		505.028		719.278		49.579		6.89%		554.606		74.00 %		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan		45 Laporan		44 Laporan		4 Laporan		9.09 %		4 Laporan		9.09 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)												**39.90%**	**14.85%**						
Predikat Kinerja												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						

Hasil penelaahan terhadap monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dilakukan pada 10 (sepuluh) indikator tujuan, 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran, 511 (lima ratus sebelas) indikator program, 890 (delapan ratus sembilan puluh) indikator kegiatan dan 2.158 (dua ribu seratus lima puluh delapan) indikator sub kegiatan. Berdasarkan target tahun 2025 diperoleh capaian rata-rata sebesar 46,86% dengan predikat capaian Sangat Rendah. Namun demikian, capaian ini meningkat dibandingkan rata-rata capaian Tahun 2024 Triwulan I sebesar 41,66%.

Perangkat Daerah dengan capaian tertinggi sebagai berikut:

1) Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan capaian 76,24%;
2) RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dengan capaian 74,92%;
3) RSUD Eka Candrarini, dengan capaian 72,03%;
4) Sekretariat DPRD, dengan capaian 68,82%;
5) RSUD Bhakti Dharma Husada, dengan capaian 68,66%.

Tingginya capaian Perangkat Daerah tersebut didorong oleh:

1) Tersedianya alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung serta sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah;
2) Tersedianya SOP yang jelas serta sistem informasi yang terintegrasi sehingga pelayanan dan intervensi dapat berjalan secara optimal;
3) Komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk memastikan program dan kegiatan terlaksana sesuai perencanaan;
4) Komitmen RSUD dalam pelaksanaan akreditasi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5) Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

Perangkat Daerah dengan capaian terendah sebagai berikut :

1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan capaian 25,71%;
2) Dinas Kesehatan, dengan capaian 26,71%;
3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, dengan capaian 33,33%;
4) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan capaian 33,85%;

5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan capaian 34,43%.

Rendahnya capaian Perangkat Daerah tersebut disebabkan oleh:

1) Triwulan I merupakan tahapan persiapan atau adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan, dan hasil kinerja berkaitan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di triwulan-triwulan selanjutnya;
2) Belum banyaknya masyarakat yang melakukan pengajuan pelayanan perizinan/non-perizinan di triwulan I;
3) Masih terdapat beberapa puskesmas yang belum melaksanakan pelaporan data pelayanan dan data kunjungan tepat waktu;
4) Pengukuran data penyusun realisasi indikator dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan di triwulan III/IV.

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan selanjutnya adalah:

1) Pemantauan dan penyesuaian timeline target kinerja dengan mengedepankan kondisi terkini, alokasi kebutuhan dan proyeksi capaian target kinerja;
2) Dinas Kesehatan mendorong dan melakukan monitoring secara rutin kepada puskesmas untuk secara aktif melakukan outreach atas target sasaran intervensi untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan;
3) Intensif melakukan koordinasi dengan pemangku kegiatan/sub kegiatan dan melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan capaian target sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan;
4) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan/non-perizinan dan reformasi birokrasi.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan 2025 hingga triwulan I, serta analisis isu pada media sosial menggunakan *big data*, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perlunya percepatan penanganan kemiskinan;
2. Perlunya penanganan terhadap pengangguran terbuka;
3. Perlunya penanganan inflasi;

4. Perlunya penurunan kesenjangan pendapatan;
5. Perlunya menjaga ketahanan pangan;
6. Masih perlunya optimalisasi peningkatan keamanan dan ketertiban Masyarakat;
7. Perlunya penguatan kerjasama antar daerah dan lembaga untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan;
8. Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase untuk mengatasi titik genangan dan pencegahan terjadinya banjir;
9. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
10. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting serta ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
11. Masih perlunya percepatan pelaksanaan eliminasi penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/Aids dan Kusta;
12. Masih perlunya optimalisasi pelayanan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan sarana-prasarana kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan stunting;
13. Masih perlunya peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah;
14. Perlunya peningkatan kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata;
15. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
16. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
17. Perlunya upaya peningkatan pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
18. Masih perlunya pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih belum optimalnya kualitas tenaga pendidik sesuai standar, sehingga diperlukan fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru bagi pendidik untuk meningkatkan standarisasi tenaga pendidik;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga diperlukan optimalisasi pemenuhan kebutuhan buku bacaan teks dan nonteks penunjang literasi dan numerasi serta melakukan rehabilitasi terhadap prasarana sekolah;
3. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan kualitas lembaga PAUD (TK), melalui melalui pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital bagi pendidik PAUD dan Forum Komunikasi PAUD-SD untuk pengembangan kualitas lembaga PAUD;
4. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi, maka diperlukan fasilitasi pendampingan akreditasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) ke BAN (Badan Akreditasi Nasional).

2.3.2.2 Kesehatan

1. Masih belum optimalnya pencegahan dan penanganan penderita penyakit menular, antara lain HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, serta obesitas, sehingga diperlukan upaya peningkatan cakupan skrining penyakit menular dan tidak menular, serta optimalisasi inisiasi pengobatan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar. Upaya yang dilakukan yakni pelaksanaan pembangunan/ relokasi dan rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu, peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah melalui pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.
3. Masih belum meratanya fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kota Surabaya. Upaya yang dilakukan dengan adanya Pembangunan Rumah Sakit di wilayah Surabaya Selatan sebagai wujud pemerataan cakupan rumah sakit milik pemerintah di setiap wilayah kota.

4. Masih belum meratanya kualitas layanan Rumah Sakit milik Pemerintah maupun Swasta. Permasalahan mencakup keterbatasan fasilitas, layanan unggulan yang belum merata, dan mutu pelayanan yang perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan dilakukan melalui modernisasi sarana, peningkatan kapasitas tenaga medis, digitalisasi sistem layanan, dan pemenuhan standar akreditasi pada Rumah Sakit milik Pemerintah serta mendorong Rumah Sakit Swasta untuk meningkatkan kualitas layanannya. Sebagai inovasi, Surabaya mendorong pengembangan *medical tourism* dengan memperkuat layanan kesehatan unggulan yang terintegrasi dengan fasilitas perhotelan dan pariwisata, menjadikan kota sebagai destinasi layanan medis berkualitas.
5. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dengan meningkatan pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan produk makanan-minuman industri rumah tangga (PIRT).
6. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan. Upaya yang akan dilaksanakan yakni pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, *workshop* dan seminar.
7. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan yakni optimalisasi sistem informasi kesehatan yang ada, seperti e-Health, Aplikasi Sayang Warga (ASW), Pemantauan Wilayah Sekitar (PWS) dan integrasi lainnya dengan sistem pemerintah kota.
8. Masih belum optimalnya rujukan berjenjang, sehingga diperlukan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dan penyiapan perumusan serta pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan bersama mitra layanan kesehatan di Kota Surabaya.
9. Masih belum optimalnya pemanfaatan jaminan kesehatan semesta dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan. Upaya yang dilaksanakan yakni mempertahankan bantuan pembiayaan kesehatan yakni *Universal Health Coverage* (UHC) Kota Surabaya melalui pembiayaan bantuan dan iuran PBPU Pemda.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan survei di jalan arteri, lokal, dan lingkungan untuk melakukan *monitoring* terkait adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB;
2. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya telah membuat rencana konektivitas saluran pada sistem drainase di Kota Surabaya sebagai bentuk upaya optimalisasi sistem drainase dan penanganan genangan yang disebabkan oleh curah hujan tinggi;
3. Masih belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan/atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta, sehingga diperlukan upaya, salah satunya melalui audiensi terkait Proyek *Sustainable Energy Transition in Indonesia* (SETI), yang merupakan kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dengan *International Climate Initiative*;
4. Terdapat kendala dalam penyediaan layanan air bersih akibat lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi intens dengan PDAM Surya Sembada dalam penyediaan master meter untuk penanganan terhadap penyediaan layanan air bersih yang terkendala masalah lahan;
5. Adanya jaringan jalan yang kapasitas atau v/c rasionya masih kurang optimal. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan.

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman, dengan rutin melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman setiap tahunnya,

mulai dari rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana permukiman;

2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni, melalui perbaikan rumah tidak layak huni;
3. Masih diperlukannya optimalisasi dan peningkatan kualitas rumah susun sebagai upaya penyediaan permukiman yang layak melalui pembangunan, perbaikan/rehabilitas, serta melakukan verifikasi identitas dan status penghuni rumah susun;
4. Masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya dalam penyediaan sanitasi layak melalui kerjasama CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan pihak swasta. Sedangkan dalam upaya penyediaan air layak minum, Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi dengan PDAM Surya Sembada dalam melaksanakan pekerjaan peremajaan pipa distribusi yang berusia ratusan tahun;
5. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk penyediaan perumahan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan penggunaan aset tanah untuk pembangunan rumah susun di Kota Surabaya.

2.3.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan yang mengakibatkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk itu diperlukan sosialisasi melalui *platform* media informasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat;
2. Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk ini diperlukan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara rutin kepada masyarakat.

2.3.2.6 Sosial

1. Masih belum optimalnya kualitas pemutakhiran data Keluarga Miskin, sehingga diperlukan integrasi data pekerjaan dan pendapatan warga miskin secara berkala pada Sistem Padat Karya, serta secara rutin melaksanakan musyawarah kelurahan setiap bulan bersama seluruh pemangku kepentingan di kelurahan;

2. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, dilakukan melalui pelatihan berkala untuk PSKS, serta pemberian penghargaan kepada PSKS yang berperan serta aktif dalam membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, partisipasi PSKS juga ditingkatkan melalui pembentukan jaringan atau forum komunikasi antara PSKS untuk saling berbagi informasi dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan jumlah dan partisipasi relawan baru.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

1. Masih diperlukannya perluasan kesempatan bekerja dan fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memiliki program kegiatan perluasan kesempatan kerja yang meliputi bimtek perluasan kesempatan kerja dalam rangka menciptakan wirausaha baru melalui bimtek menjahit, kuliner makanan, sablon, cuci kendaraan, membatik, cuci helm, pembuatan sabun, cuci AC, dan sebagainya yang juga mendukung program padat karya Pemkot dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran dari warga miskin;
2. Perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial belum optimal. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan terkait hubungan industrial, syarat kerja, dan jamsostek baik kepada perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja/serikat buruh.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan. Untuk itu dilakukan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang melibatkan semua Perangkat Daerah serta adanya pembinaan kecamatan, kelurahan, dan RW responsif gender;
2. Belum optimalnya pemahaman dan pelaksanaan terkait pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan, sehingga diperlukan pelatihan Pengarusutamaan Gender yang melibatkan semua

Perangkat Daerah serta adanya pembinaan kecamatan, kelurahan, dan RW responsif gender;

3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator kelurahan/kampung layak anak, sehingga diperlukan penjaringan aspirasi pada saat musrenbang kota, kecamatan, dan kelurahan dengan melibatkan Forum Anak Surabaya, LSM Pemerhati Anak, dan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) serta peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) dalam proses pembangunan di Kota Surabaya;
4. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak utamanya dalam pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Upaya yang dilakukan antara lain melalui fasilitasi konseling dan pengaduan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sudah menyebar hingga tingkat RW.

2.3.2.9 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan karena rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Surabaya melalui Program Pengawasan Keamanan Pangan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang layak dan aman di masyarakat, serta menjaga keamanan pangan segar mulai dari proses produksi sampai ke tahapan konsumsi. Selain sosialisasi, juga dilakukan secara rutin dan berkala pemeriksaan bahan pangan yang beredar di masyarakat, pengambilan sampel ini dilakukan secara acak di pasar tradisional, toko swalayan maupun di pasar modern;
2. Masih kurangnya kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan guna mendukung stabilitas harga pangan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat rutin melaksanakan survei terkait ketersedian stok dan harga pangan pokok

di masyarakat. Selain itu, juga diupayakan stabilnya pasokan komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penjajakan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan yang ada di Jawa Timur;

3. Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi *urban farming* baik di masyarakat maupun di lokasi aset milik Pemerintah Kota sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Untuk itu, di sisi produksi, melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pemerintah Kota Surabaya memaksimalkan kemampuan produksi komoditas pangan dengan memanfaatkan lahan aset sebagai lahan produktif budidaya pertanian, peternakan serta perikanan. Gerakan *urban farming* juga dilakukan di lingkungan warga kota, didukung oleh Pemerintah Kota yang memberikan bantuan berupa sarana/prasarana dan pendampingan.

2.3.2.10 Pertanahan

1. Masih belum optimalnya pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan penggunaan aset tanah untuk penyediaan perumahan, pada tahun 2024 telah direncanakan perbaikan rumah susun di 9 lokasi;
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan percepatan proses sertifikasi mulai dari permohonan peta bidang, permohonan hak, hingga pendaftaran hak, serta memperkuat sinergi dengan pihak terkait seperti Kejaksaan serta Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sertifikasi aset;
3. Masih belum optimalnya pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan, sehingga diperlukan percepatan proses sertifikasi serta sinergi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian sertifikasi aset.

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

1. Masih belum optimalnya penataan Ruang Terbuka Hijau, sehingga diperlukan diversifikasi jenis pohon/tanaman untuk meningkatkan efektivitas penyerapan polutan;

2. Masih belum optimalnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R, sehingga diperlukan penambahan kapasitas maupun penambahan lokasi baru;
3. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, sehingga diperlukan peningkatan pembinaan kepada masyarakat;
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan. Ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kegiatan/usaha terkait kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan serta mempermudah pelaporan melalui portal Sistem Pelaporan Elektronik (e-simpel);
5. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi. Ini dilakukan dengan melakukan sinergi bersama pelaku usaha untuk melaksanakan program-program pelestarian lingkungan serta kompetisi lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya pelaksanaan penerbitan persetujuan lingkungan dikarenakan adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perizinan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari.

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih belum optimalnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang merata bagi seluruh warga, sehingga diperlukan optimalisasi aplikasi Mobile Klampid dan Takon Klampid. Selain itu juga membentuk SPP (Sentra Pelayanan Publik) yang tersebar di berbagai wilayah kota, antara lain di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) di Surabaya Selatan, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) di Surabaya Timur, Taman Cahaya Pakal di Surabaya Barat dan Wisata Rakyat Nambangan di Surabaya Utara.

2.3.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih belum optimalnya cakupan jumlah peserta KB baru, sehingga diperlukan kampanye dan edukasi tentang perencanaan keluarga dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB;
2. Masih belum optimalnya akses Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui kampanye dan edukasi tentang perencanaan keluarga dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan MKJP;
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun. Untuk itu dilakukan pemberdayaan pusat informasi dan konseling Remaja (PIK-R), pembinaan terhadap keluarga yg mempunyai remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), dan kampanye program Bangga Kencana melalui Generasi Berencana (Duta Genre);
4. Masih belum optimalnya penguatan dan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam mendukung tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB di tingkat desa/kelurahan. Untuk itu diperlukan peningkatan upaya melalui kegiatan seperti Posyandu, Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS), Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

2.3.2.14 Perhubungan

1. Masih belum optimalnya pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitar Surabaya, sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi penyelenggara transportasi lainnya di dalam maupun sekitar wilayah Kota Surabaya, untuk saling mendukung dan membangun konektivitas wilayah yang lebih baik;
2. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Untuk itu, diperlukan penyediaan layanan angkutan umum perkotaan Surabaya dengan menambah jumlah koridor dan jumlah armada angkutan dengan skema *Buy The Service* (BTS);
3. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan keselamatan lalu

lintas kepada masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas serta menerapkan pengembangan teknologi untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas.

2.3.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Masih belum optimalnya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan, sehingga diperlukan pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana dan jaringan utilitas TIK secara rutin dan berkala serta peningkatan kompetensi teknis SDM TIK dalam pengelolaan sarana prasarana TIK.

2.3.2.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Adanya Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang kurang strategis, sehingga perlu dilakukan optimalisasi melalui revitalisasi sentra, melakukan rebranding beberapa sentra, melaksanakan pelatihan-pelatihan baik cita rasa, penyajian dan pemasaran online, melaksanakan program bapak asuh untuk pengelolaan SWK, serta perlu dilakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berada di sekitar lokasi Sentra Wisata Kuliner;
2. Adanya koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif, sehingga Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan kemitraan berkelanjutan untuk mendorong dan memelihara koperasi tetap aktif secara kelembagaan dan usaha. Selain itu, diberikan juga pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi, serta didukung melalui kebijakan yang mendorong iklim berkoperasi yang sehat dan produktif untuk menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi;
3. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta masuknya produk-produk import dari luar negeri membuat produk lokal UMKM kalah bersaing. Untuk itu Pemerintah kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional, salah satunya melalui kemitraan dengan universitas dan *stakeholder* terkait memberikan berbagai macam pelatihan baik tentang manajemen produk sampai pemasaran *digital*, serta memfasilitasi promosi produk UMKM melalui ePeken, *event* pameran, gelar produk, dan pemasaran melalui SKG (Sentra Kriya Galeri), meningkatkan kualitas dan *branding* produk

UMKM dengan menggencarkan program sertifikasi halal, baik itu secara regular maupun *self-declare* dan fasilitasi sertifikasi merk BPPOM dan PIRT.

2.3.2.17 Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi untuk semua cabang olahraga. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga terstandar terus diupayakan sebagai prioritas yang mendukung peningkatan daya saing atlet daerah dengan memperhatikan kebutuhan kesiapan atlet dan juga event olahraga nasional terutama pada cabang olahraga yang diperlombakan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan lapangan olahraga di kawasan pemukiman salah satunya dengan melakukan pemeliharaan/revitalisasi dan mendorong giat aktivitas dan lomba olahraga di tingkat kecamatan;
3. Masih belum tersedianya sistem untuk *database* atlet dan pelatih olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
4. Belum tersusunnya Dokumen Desain Olahraga Daerah dengan melibatkan akademisi dan praktisi yang ada di daerah.

2.3.2.18 Statistik

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta yang tervalidasi dan terintegrasi, sehingga diperlukan, salah satunya, melalui peningkatan layanan portal satu data tentang Kota Surabaya yang terbuka sehingga memberikan kemudahan akses untuk publik maupun instansi pemerintahan lainnya;
2. Belum optimalnya penyusunan standar data dan data prioritas sebagai pedoman pelaksanaan statistik, sehingga masih diperlukan koordinasi dalam Forum Satu Data.

2.3.2.19 Persandian

1. Belum optimalnya integrasi sistem antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga masih diperlukan penerapan sistem keamanan informasi yang secara berkala dilakukan evaluasi mandiri dalam penerapannya;
2. Belum optimalnya perlindungan keamanaan data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga diperlukan peningkatan

pengelolaan dan dukungan sumber daya persandian yang memadai dan berkompeten sesuai bidang IT dan keamanan informasi.

2.3.2.20 Kebudayaan

1. Masih terbatasnya kesempatan bagi pelaku seni dan budaya untuk tampil di ruang publik, yang diupayakan antara lain dengan mendorong partisipasi pelaku seni dan budaya dalam setiap kegiatan seremonial, seni dan budaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu juga melalui penyediaan dan pengembangan ruang-ruang publik seperti taman dan tempat wisata yang menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya. Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong pihak-pihak swasta dalam pelibatan pelaku seni lokal untuk tampil pada event yang dilaksanakan di hotel, restoran dan tempat publik lainnya;
2. Belum optimalnya pemanfaatan obyek dan situs cagar budaya, sehingga perlu dilakukan antara lain pengembangan dan revitalisasi kawasan wisata serta melakukan pendekatan kepada potensi pemodal/pengusaha untuk memanfaatkan bangunan cagar budaya;
3. Masih belum ditetapkannya Dokumen Pokok Pikir Kebudayaan Daerah.

2.3.2.21 Perpustakaan

1. Belum optimalnya pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga masih diperlukan pengembangan sistem layanan perpustakaan yang modern dan terintegrasi.

2.3.2.22 Kearsipan

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan, sehingga masih diperlukan sertifikasi kompetensi;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal, sehingga pemerintah kota mengembangkan sistem layanan kearsipan yang modern dan terintegrasi, serta menyempurnakan regulasi dan SOP pengelolaan kearsipan.

2.3.2.23 Kelautan dan Perikanan

1. Masih adanya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang belum optimal dalam memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah

disediakan, sehingga masih diperlukan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yang tidak hanya sebatas pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya namun juga sekaligus pendampingan dari tenaga penyuluh;

2. Belum optimalnya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, sehingga masih diperlukan pemberian bantuan intervensi kepada keluarga nelayan untuk dapat mengolah hasil perikanan menjadi produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Keluarga nelayan yang dibina menjadi pelaku usaha UMKM tersebut juga mendapatkan fasilitas pemasaran di Sentra Ikan Bulak dan Romokalisari (Romokalisari *Adventure Land*).

2.3.2.24 Pariwisata

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kunjungan di objek wisata, sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta integrasi dengan kawasan wisata lain;
2. Belum optimalnya kawasan wisata dan integrasi antar kawasan wisata, sehingga masih diperlukan penambahan destinasi wisata baru di kawasan kota lama yang pengembangan dan pengintegrasian antar zonanya masih akan terus dilakukan hingga 5 tahun ke depan;
3. Belum optimalnya kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata, sehingga diperlukan kerjasama dengan kelompok sadar wisata dan komunitas lokal seperti Bersukaria *Walk* dan Surabaya *Walking Tour by Roodebrug*, serta perusahaan, melalui *creating shared value* (CSV) untuk mengembangkan wisata rakyat yang dapat dijangkau masyarakat.

2.3.2.25 Pertanian

1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian *(urban farming),* peternakan dan perikanan, sehingga masih diperlukan Program Penyuluhan Pertanian untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya, tenaga pendamping maupun penyuluh;
2. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan. Untuk itu, dilakukan optimalisasi klinik hewan yang beroperasi untuk menangani kesehatan hewan ternak di masyarakat;

3. Perlunya pencegahan dan penanganan terhadap dampak munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, melalui peran aktif veteriner pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang didukung juga oleh klinik hewan.

2.3.2.26 Perdagangan

1. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta masuknya produk-produk impor dari luar negeri yang berpengaruh pada sektor perdagangan lokal. Untuk itu Pemerintah kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional, salah satunya melalui kemitraan dengan universitas dan *stakeholder* terkait memberikan berbagai macam pelatihan baik tentang produk sampai pemasaran *digital*, serta memfasilitasi promosi produk UMKM melalui ePeken, *event* pameran, gelar produk, dan pemasaran melalui SKG (Sentra Kriya Galeri), meningkatkan kualitas dan *branding* produk UMKM dengan menggencarkan program sertifikasi halal, baik itu secara regular maupun *self-declare* bagi UMKM dan fasilitasi sertifikasi merk BPPOM dan PIRT;
2. Belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional, sehingga masih diperlukan pemenuhan sarana prasarana di beberapa pasar untuk menuju pasar ber-SNI Pasar Rakyat, serta pasar pangan aman berbasis komunitas;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk memantau fluktuasi harga dan ketersediaan terutama bahan pokok penting untuk mencegah *panic buying* di masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi.

2.3.2.27 Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat;
2. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah. Untuk itu, dilakukan penegasan batas pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wiyung dan Kecamatan Karang Pilang yang kemudian akan

disahkan melalui perwali hasil penegasan batas kecamatan. Sedangkan 4 kecamatan yang belum ditegaskan, yakni Kecamatan Krembangan, Tandes, Sukomanunggal, dan Asemrowo akan diselesaikan pada tahun 2026;

3. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat, melalui evaluasi secara bertahap terhadap produk hukum yang telah ditetapkan maupun diundangkan.

2.3.2.28 Perencanaan

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, sehingga masih diperlukan pengembangan aplikasi ePlanning;
2. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi, sehingga diperlukan evaluasi atas penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, yang ditindaklanjuti dengan penyempurnaan SOP sesuai standar penyelenggaraan statistik sektoral dan pengajuan rekomendasi statistik untuk penyelenggaraan data dan informasi tahun berikutnya.

2.3.2.29 Keuangan

1. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah. Untuk itu, dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, khususnya untuk pajak dan retribusi daerah dengan menggalakkan pembayaran melalui kanal-kanal *digital*, yaitu pembayaran retribusi parkir melalui QRIS serta pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui *internet banking* dan *virtual account* serta kanal-kanal pembayaran *digital* lainnya;
2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, dilakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan menggali potensi yang ada melalui pemasangan alat pemantauan pajak secara elektronik;
3. Belum validnya pendataan obyek pajak/retribusi yang dinamis. Untuk itu, dilakukan pendataan ulang *database* pajak daerah dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Belum optimalnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dikarenakan petunjuk teknis yang terlambat dan perubahan petunjuk teknis atau kebijakan pada tahun berjalan. Untuk itu, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pendapatan dan belanja transfer.

2.3.2.30 Kepegawaian

1. Masih belum optimalnya sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, sehingga diperlukan pengembangan evaluasi kinerja dan karir ASN berbasis *talent pool* elektronik, *awarding*, serta absensi *online*;
2. Belum optimalnya penyusunan analisis beban kerja dan analisis jabatan secara berkala, sehingga masih diperlukan pengembangan *talent pool* elektronik.

2.3.2.31 Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi pegawai, sehingga diperlukan pengembangan e-learning, balai diklat terakreditasi, serta aplikasi perencanaan dan dampak diklat.

2.3.2.32 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya hasil penelitian dan pengembangan yang belum dimanfaatkan/ditindaklanjuti. Untuk itu, dilakukan finalisasi *longlist* dan *shortlist* permasalahan yang dapat menjadi topik penelitian oleh PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan/atau PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Kota Surabaya, serta dibangun basis data/direktori penelitian terkait Kota Surabaya yang bersumber dari hasil penelitian yang masih relevan;
2. Belum optimalnya penguatan kelembagaan bidang urusan penelitian dan pengembangan, sehingga masih diperlukan upaya antara lain melalui:
   a. koordinasi untuk segera menindaklanjuti MoU dengan PTN dan/atau PTS pada ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Perjanjian Kerjasama terkait kolaborasi penelitian.
   b. pengembangan sistem informasi sehingga siap terintegrasi dengan sistem informasi lainnya dalam rangka merintis iklim berbagi-pakai infrastruktur, sumber daya, maupun hasil riset dan inovasi antar pemangku kepentingan.

2.3.2.33 Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, selain dilakukan pengembangan WBS (*whistleblowing system*) yang melibatkan aduan masyarakat, juga dibentuk sekretariat bersama penyuluh anti KKN;
2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan e-consulting sebagai kanal bagi Perangkat Daerah untuk berkonsultasi pada APIP terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi peraturan terkait kedisiplinan secara rutin yang bekerja sama dengan PD Kepegawaian sebagai upaya penanganan pelaku tindak indisipliner.

2.3.2.34 Kecamatan

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas baik tenaga ASN maupun non-ASN;
2. Masih belum optimalnya kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan, sehingga diperlukan optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi yang dapat memudahkan dalam melaksanakan koordinasi antara personil di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Belum optimalnya pelaksanaan Dana Kelurahan, sehingga masih diperlukan perlibatan segala unsur masyarakat, baik perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan maupun perwakilan masyarakat rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan difabel.

2.3.2.35 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk itu diperlukan adanya Tim Kewaspadaan Dini untuk memetakan potensi konflik, serta perlu didukung pemenuhan kebutuhan dan koordinasi dari para petugas pengamanan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan dinamika geopolitik yang cepat disertai ketidakpastian ekonomi yang tinggi masih menjadi tantangan perekonomian global hingga kini. Sejak terpilihnya kembali presiden Amerika Serikat, Donald Trump membawa perubahan besar terhadap perekonomian Amerika Serikat dan berimbas terhadap perekenomian dunia ke depan yang disebabkan kebijakan baru yang diberlakukan presiden baru Amerika Serikat yang diperkirakan akan menciptakan gejolak perekonomian yang telah berjalan baik sebelumnya. Kebijakan yang diterapkan Donald Trump tentunya yang memberikan keuntungan besar terhadap perekonomian Amerika Serikat antara lain penetapan kenaikan tarif biaya barang impor, kebijakan imigrasi melalui pengetatan pasar tenaga kerja melalui pengurangan tenaga kerja ilegal, perpanjangan kebijakan *tax cut* untuk meningkatkan permintaan domestik, kebijakan terkait geopolitik seperti konflik timur tengah.

Kebijakan baru yang diterapkan Presiden Donald Trump menimbulkan terganggunya stabilitas perekonomian global, khususnya dari sisi perdagangan. Tarif yang tinggi pada akhirnya menciptakan perang dagang terdampak terhadap rantai pasok perdagangan selanjutnya berimbas terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan. Perang dagang merupakan respons terhadap penerapan kebijakan yang dirasa merugikan mitra dagangnya. Jika pengenaan tarif impor tersebut tidak ditangani, akan berdampak terhadap penurunan daya saing produk dan tekanan terhadap industri dalam negeri yang beroritasi ekspor. Pada akhirnya, inflasi global akan terus meningkat dan sebaliknya juga, pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat. Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 terhadap 145 negara mitra dagang menandai kembalinya proteksionisme ekstrem, serupa dengan praktik dagang Amerika Serikat 125 tahun lalu dan mencerminkan semangat merkantilisme abad ke-16 hingga ke-18. Dalam dua pekan pertama Mei 2025, tercapai kesepakatan dagang antara AS dan Inggris, serta dimulainya negosiasi AS–Tiongkok yang

menghasilkan jeda dalam perang tarif. Respons negara-negara beragam, mulai dari pendekatan bilateral hingga tindakan retaliasi. Sementara itu, peran lembaga multilateral dalam menyelesaikan sengketa perdagangan terbukti belum efektif. Kondisi ini menunjukkan ketidakpastian global yang berkelanjutan, dipicu oleh rivalitas dalam sektor ekonomi, perdagangan, keuangan, dan potensi konflik antarnegara.

Perlambatan ekonomi global diindikasi dari beberapa asesmen yakni pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun pada tahun 2025 dan 2026, ditandai beberapa negara maju mengalami perlambatan; penurunan inflasi yang melambat akibat terganggunya rantai pasok akibat perang dagang; suku bunga yang lebih tinggi; dolar Amerika menguat menyebabkan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah; pelarian modal (investasi) dari negara berkembang ke Amerika akibat naiknya suku bunga dan kuatnya dolar. Berdasarkan data lembaga ekonomi *International Monetary Fund* (IMF), pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh cenderung stagnan di kisaran 3%. Bahkan, IMF melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 turun menjadi 2,8% di tahun 2025.

Ketidakstabil ekonomi global juga berdampak terhadap perekonomian negara-negara di dunia, tidak terkecuali juga Indonesia. Sebagai negara penganut perekonomian terbuka, ketidakstabilan faktor eksternal tidak dapat dihindari. Hal itu dikonfirmasi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan capaian yang moderat. Berdasarkan data BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Meskipun kondisi ekonomi global sangat bergejolak, perekonomian nasional tetap berdaya tahan. Hal itu ditunjukkan oleh keberhasilan pemerintah mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Peran konsumsi domestik masih menjadi kunci utama kuatnya ekonomi nasional disertai investasi yang terus tumbuh ditengah ekonomi yang tidak stabil. Peran sektor dominan juga terus menunjukkan menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah menyusun kerangka perekonomian tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan (RKP) tahun 2026 dengan tema RKP ***"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"***. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menargetkan perekonomian nasional pada tahun 2026 tumbuh pada kisaran 5,8 – 6,3% dan

GNI per Kapita pada kisaran 5.870 dolar US. Dari sisi pengeluaran, peluang besarnya investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif. Sementara dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh sektor-sektor potensial yang mengalami pertumbuhan positif.

Bappenas juga menargetkan sasaran indikator pembangunan lainnya di tahun 2026. Indikator ketenagakerjaan yang diwakilkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan di kisaran 4,44 – 4,96%. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan ditargetkan turun di kisaran 6,5 – 7,5% dan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,0 – 0,5%. Sementara indikator Indeks Gini yang mencerminkan pemerataan pendapatan ditargetkan di kisaran 0,377 – 0,380. Indeks modal manusia ditargetkan sebesar 0,57. Selain itu, Penurunan Intensitas Emisi GRK ditargetkan menurun di kisaran 37,14% sedangkan Indeks Kulitas Lingkungan Hidup ditargetnya meningkat di kisaran 76,67. Target-target tersebut diwujudkan melalui program-program kerja Pemerintah disertai arah kebijakan srategis yang tertuang dalam Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2026.

Selain itu, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2026 yang merupakan dokumen negara yang memiliki peran strategis dalam memberikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal. Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan **"Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan melalui 8 (delapan) strategi untuk mendukung agenda pembangunan: (i)ketahanan pangan; (ii)ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh perekonomian Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93% (yoy). Sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan partanian. Dari sisi pengeluaran,

kinerja perekonomian Jawa Timur ditopang peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan net ekspor antar daerah.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara batas bawah 4,9% hingga 5,70%. Perhitungan perkiraan tersebut merupakan hasil proyeksi yang tertuang dalam dokuman Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025. Selanjutnya arah kebijakan makro Jawa Timur ke depan dilaksanakan melalui pemerataan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimalisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditargetkan dilaksanakan melalui perciptaan stabilitas makro ekonomi yang didukung investasi. Selanjutnya juga dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sektor primer dan sekunder serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Searah dengan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya melakukan penyelarasan prioritas pembangunan di tahun 2026, dimana arah kebijakan ekonomi berfokus pada tema pembangunan”***Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur”*** dengan prioritas sebagai berikut : (a) Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan yang adil dan inklusif, (b) Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif, (c) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, (d) Reformasi birokrasi berbasis digital, dan (e) Harmonisasi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, selama 5 (lima) tahun ke depan pemerintah Kota Surabaya berusaha melakukan transformasi pengembangan sektor ekonomi unggulan. Tahun 2026 menjadi tahun pijakan untuk transformasi yang dilakukan melalui peningkatan efisiensi investasi daerah melalui promosi, peta investasi serta kemudahan pengurusan perizinan yang dapat dilakukan secara daring dilengkapi mall dan sentra pelayanan publik. Selain itu untuk mendukung daya beli masyarakat serta mencukupi kebutuhan pangan masyarakat maka dilakukan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat yang difokuskan pada terjaminnya ketersediaan pangan untuk pemenuhan pangan. Pemerintah Kota Surabaya menyusun langkah-langkah

yang dilakukan melalui peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, peningkatan sarana distribusi perdagangan serta stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang berkolaborasi dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID). Kebijakan selanjutnya adala peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja, fasilitasi sertifikasi dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta *link and match* kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan kompetensi pencari kerja. Sasaran arah kebijakan ekonomi lainnya adalah peningkatan produktivitas PDRB sektor unggulan yang difokuskan pada sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dan PDRB Industri Pengolahan. Sebagai kota perdagangan dan jasa dengan ketersediaan infrastruktur maupun teknologi yang menunjang, terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan guna menambah sektor-sektor ekonomi baru untuk mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, yakni antara lain sepeti industri kreatif maupun industri berbasis teknologi hijau. Industri kreatif menjadi salah satu fokus pengembangan yang memiliki potensi besar karena secara eksisting Kota Surabaya telah memiliki komonitas kreatif, *coworking space*, program serta akses infrastruktur digital dan teknologi yang mendukung. Selain itu banyaknya warisan budaya dan kreativitas lokal yang dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku industri kreatif diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Surabaya. Dari sisi pasar, besarnya populasi penduduk Kota Surabaya membuka pasar yang lebih luas bagi industri kreatif. Ditambah lagi, peran serta dukungan Pemerintah Kota Surabaya yang besar untuk industri kreatif semakin mendorong berkembangnya menjadi sektor baru yang potensial untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara industri berbasis teknologi hijau guna menjaga sistem ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh positif sebesar 5,76%. Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2024 ini masih tumbuh kuat meski kenaikannya lamban, bahkan pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur yang mengalami kontraksi. Kinerja konsumsi yang dibarengi tingginya daya beli masih menjadi fundamental ekonomi Kota Surabaya hingga saat ini.

Hampir 60% komponen konsumsi manyarakat menjadi kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Kota Surabaya dengan karakteristik kota perdagangan jasa dengan daya tarik pariwisata perkotaan yang menawarkan berbagai pusat hiburan, perbelanjaan, objek wisata alam maupun sejarah yang luas untuk rekreasi dan bisnis. Potensi-potensi yang dimiliki tersebut masih memperkuat peran konsumsi masyarakat sebagai fundamental ekonomi Kota Surabaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil tinggi. Selanjutnya konsistensi daya tarik investasi di Kota Surabaya juga menjadi daya dukung yang turut mengakselerasi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi selama ini juga merefleksikan besarnya produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial di Kota Surabaya yang terus menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Kinerja investasi berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 mencapai 40,48 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 37,57 triliun.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, optimisme juga ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya yakni kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Untuk kinerja pembangunan manusia, pada tahun 2024 nilai IPM Kota Surabaya sebesar 84,69 atau meningkat 0,7 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 83,99. Selain itu, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surabaya. Jumlah penduduk miskin semakin berkurang menjadi 3,96% di tahun 2024 yang mulanya mencapai 4,65% di tahun 2023. Perbaikan juga ditunjukkan oleh kinerja tingkat pengangguran Kota Surabaya yang mengalami penurunan yang mulanya sebesar 6,76% pada tahun 2023 menjadi 4,91% di tahun 2024.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Surabaya

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan ekonomi yang terus berlanjut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah hampir seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam juta)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	889.331,91	917.595,42	982.815,39	1.026.186,70	969.357,95
B	Pertambangan dan Penggalian	31.943,80	32.761,34	33.392,98	32.513,35	31.379,96
C	Industri Pengolahan	107.416.294,34	113.535.139,44	126.030.898,75	135.434.984,12	147.302.541,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.237.615,57	2.417.167,25	2.742.046,30	3.728.710,22	3.970.550,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	824.951,94	872.320,90	932.750,33	968.113,96	994.411,87
F	Konstruksi	51.969.408,77	55.273.538,87	61.408.502,94	64.940.579,25	70.335.981,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.246.755,05	163.509.913,19	184.610.467,40	201.432.925,47	214.341.080,16
H	Transportasi dan Pergudangan	29.794.090,41	30.518.851,24	36.260.418,47	42.834.312,86	47.529.709,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.618.582,64	91.418.079,71	102.248.698,97	114.627.560,20	126.222.540,64
J	Informasi dan Komunikasi	33.247.669,54	35.273.340,84	36.541.720,23	39.290.062,52	42.170.987,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.183.377,44	30.560.741,63	33.950.422,52	35.852.303,70	37.509.068,51
L	Real Estate	15.354.350,85	15.790.323,11	16.599.139,83	17.213.531,88	17.731.558,74
M,N	Jasa Perusahaan	14.116.912,06	14.543.157,97	15.772.593,51	17.530.932,18	19.268.197,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.238.304,23	8.310.975,30	8.486.026,22	8.533.021,21	9.788.000,22
P	Jasa Pendidikan	14.540.365,94	14.692.371,72	14.866.084,13	15.784.480,73	16.838.454,88

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.880.587,79	5.220.638,17	5.508.115,81	5.958.216,19	6.374.976,68
R,S,T, U	Jasa lainnya	6.918.915,11	7.340.199,70	8.642.127,81	10.106.272,69	11.114.817,11
	Produk Domestik Regional Bruto	**554.509.457,38**	**590.227.115,79**	**655.616.221,58**	**715.294.707,23**	**772.493.614,49**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025
*Catatan: *) data sementara*

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh positif. Seperti yang terangkum pada Tabel III.1. Pertumbuhan yang positif ditunjukkan oleh capaian realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB Kota Surabaya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp554.509.457,38 juta dan hingga akhir tahun 2024 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp772.493.614,49 juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Surabaya dikontribusi oleh peningkatan dari semua lapangan usaha pembentuknya terkecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati tiga terbesar pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kota Surabaya hingga saat ini. Terkait pekembangan terkini, pada tahun 2024, PDRB ADHB untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai sektor yang merupakan sektor terbesar menghasilkan nilai tambah sebesar Rp214.341.080,16 juta. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Industri Pengolahan dan diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2024 masing masing sebesar Rp147.302.541,52 juta dan sebesar Rp126.222.540,64 juta.

Selaras dengan realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel III.2, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK Kota Surbaya sebesar Rp390.936.424,98 juta meningkat menjadi sebesar Rp485.448.887,46 juta di tahun 2024. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan nilai tambah sebesar Rp134.133.559,71 juta pada tahun 2024. Jumlah ini mewakili kontribusi sebesar 27% dari seluruh lapangan usaha penyumbang PDRB Kota Surabaya. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp92.182.283,14 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	547.994,90	554.054,69	573.236,82	576.177,55	541.237,84
B	Pertambangan dan Penggalian	19.464,04	19.479,83	19.094,55	17.844,90	18.120,26
C	Industri Pengolahan	76.384.521,77	79.366.597,57	84.567.579,11	87.392.236,59	92.182.283,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.449.668,99	1.538.145,94	1.661.665,76	2.174.083,24	2.301.731,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	630.336,37	665.833,73	680.003,79	696.386,15	711.522,48
F	Konstruksi	38.387.739,29	40.070.071,57	42.633.575,68	44.772.953,53	47.910.218,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	106.340.867,71	114.183.332,32	122.122.627,45	128.814.587,77	134.133.559,71
H	Transportasi dan Pergudangan	19.477.422,82	19.874.938,33	22.684.941,35	25.217.168,98	27.494.461,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.053.239,21	57.221.633,11	62.076.385,35	66.946.110,99	71.889.162,06
J	Informasi dan Komunikasi	29.511.280,46	31.281.790,23	32.264.418,48	34.446.030,83	36.698.243,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.231.210,98	19.324.709,68	19.648.801,34	20.445.326,71	21.207.821,53
L	Real Estate	11.000.304,15	11.179.684,13	11.634.820,68	11.916.338,17	12.200.164,26
M,N	Jasa Perusahaan	8.801.216,28	8.974.255,48	9.490.093,03	10.278.169,10	11.082.009,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.754.525,35	4.748.920,17	4.756.347,15	4.759.414,54	5.229.776,89
P	Jasa Pendidikan	9.934.443,75	9.993.042,98	10.001.195,71	10.447.847,60	10.983.874,40

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.539.299,11	3.722.145,29	3.782.452,79	3.932.734,49	4.155.684,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.872.889,81	5.007.190,09	5.671.102,07	6.197.308,43	6.709.014,54
	Produk Domestik Regional Bruto	**390.936.424,98**	**407.725.825,13**	**434.268.341,12**	**459.030.719,58**	**485.448.887,46**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah,2025
*Catatan: *) data sementara*

Berdasarkan kontribusi sektor pembentuk perekonomian Kota Surabaya, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 yang banyak tantangan dan ketidakpastian selaras dengan perekonomian pusat dan global, membuat beberapa peran sektor lapangan usaha Kota Surabaya juga melambat. Kondisi itu ditunjukkan oleh dua sektor terbesar Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2024 lapangan usaha ini memberikan peranan terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar 27,63%, sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 28,06%. Hal yang sama juga dialami oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 18,99% yang sebelumnya sebesar 19,04%. Artinya selama tahun 2024, peran Industri Pengolahan turun sebesar 0,05%. Melemahnya kinerja perdagangan besar maupun kecil tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki kecendurangan terus meningkat. Sejak tahun 2021 hingga 2024 lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 14,03% dan meningkat di tahun 2022 sebesar 14,29%. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar 14,81%. Tingginya peran lapangan usaha ini didorong oleh banyaknya aktivitas event maupun hiburan sehingga banyak hotel maupun restoran, cafe, rumah makan yang tumbuh di Kota Surabaya.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan kontribusi, yang pada tahun 2023 sebesar 5,49% menjadi 5,66%. Meningkatnya peran lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian Kota Surabaya selaras dengan Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi secara otomotis membuat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi. Hal itu dikarenakan transportasi menjadi moda penggerak aktivitas masyarakat dan perekonomian Kota Surabaya.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 s/d Tahun 2024*(dalam %)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	0,14	0,13	0,13	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10
C	Industri Pengolahan	19,54	19,47	19,47	19,04	18,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	0,38	0,38	0,47	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
F	Konstruksi	9,82	9,83	9,82	9,75	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,2	28	28,12	28,06	27,63
H	Transportasi dan Pergudangan	4,98	4,87	5,22	5,49	5,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,34	14,03	14,29	14,58	14,81
J	Informasi dan Komunikasi	7,55	7,67	7,43	7,50	7,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,92	4,74	4,52	4,45	4,37
L	Real Estate	2,81	2,74	2,68	2,60	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	2,25	2,2	2,19	2,24	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,22	1,16	1,10	1,04	1,08
P	Jasa Pendidikan	2,54	2,45	2,30	2,28	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	0,91	0,87	0,86	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,25	1,23	1,31	1,35	1,38
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2025
*Catatan: *) data sementara*

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir tumbuh positif pada kisaran rata-rata di 5 hingga 6%. Kondisi yang berbeda terjadi ketika masa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian terkontraksi yakni hingga -4,85% di tahun 2020. Namun selanjutnya, perekonomian Kota Surabaya kembali tumbuh positif seiring kebijakan pelonggaran pembatasan masyarakat diterapkan sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,29% dan meningkat menjadi 6,51% di akhir tahun 2022. Pada tahun 2023 perekonomian Kota Surabaya tumbuh positif sebesar sebesar 5,70%. Meskipun capaian pada tahun ini lebih lamban dibanding tahun 2022 yang mencapai 6,51%, namun perekonomian Kota Surabaya terjaga tumbuh stabil

di atas angka 5%. Terkontraksinya perekonomian disebabkan oleh perubahan ekonomi yang sangat dinamis disertai ketidakpastian berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara global selama tahun 2023.

Kondisi yang sama dirasakan di tahun 2024, dimana ekonomi tumbuh positif namun cenderung stagnan sama seperti kondisi ekonomi di tahun 2023. Meski demikian, ekonomi Kota Surabaya menunjukkan ketahanan yang kuat ditengah kondisi global yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Hal itu ditunjukkan oleh capaian kinerja ekonomi secara kumulatif yang tumbuh positif mencapai 5,76% atau tumbuh lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 perlu diapresiasi mengingat kinerja global yang melamban serta kinerja domestik yakni pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Timur yang turut terkontraksi dibanding tahun 2023.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2020 - 2024*

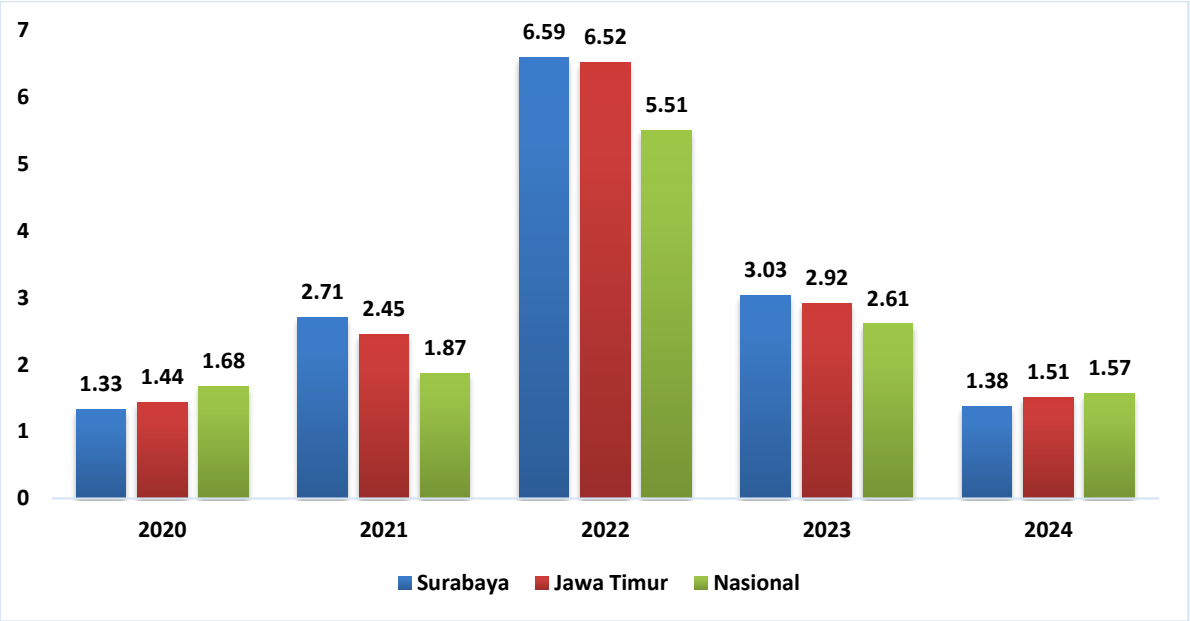
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-4,85
2021	4,29
2022	6,51
2023*	5,70
2024**	5,76

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2025
**) data sementara*
***) data sangat sementara*

c. Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 nilainya lebih rendah dibandingkan realisasi di tahun 2023. Capaian tersebut sedikit di bawah rentang sasaran target yakni pada kisaran 2,5 ± 1%. Berdasarkan data perkembangan harga, nilai inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 1,38%. Capaian inflasi Kota Surabaya memuaskan karena selain stabil rendah, inflasi Kota Surabaya tahun ini nilainya lebih rendah dibanding nilai inflasi Jawa Timur (1,51%) dan Nasional (1,57%) dibanding tahun 2023 yang nilainya lebih tinggi dari nasional dan Provinsi.

Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020 – 2024 (persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2025, diolah

d.

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2024 secara *year on year* disebabkan oleh 9 kelompok pengeluaran mengalami inflasi sisanya 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi tertinggi menyumbang inflasi Kota Surabaya year on year tahun 2024 secara berurutan yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya (6,69%); kelompok makanan, minuman dan tembakau (2,54%); penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,48%); kesehatan (1,83%); pendidikan (1,30%).

Perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok penyumbang utama inflasi selama tahun 2024. Emas perhiasan konsisten menjadi komoditas dengan andil terbesar (0,36%) dengan tingkat inflasi (y-on-y) mencapai 37,42% pada November 2024. Komoditas emas perhiasan senantiasa mengalami kenaikan harga dalam 11 bulan terakhir. Peningkatan permintaan akan komoditas ini merupakan respon dari masyarakat khususnya investor untuk mencari perlindungan pada logam *safe haven* di tengah ketidakstabilan ekonomi sehingga emas perhiasan dianggap sebagai *saving asset* yang paling aman.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kelompok tertinggi selanjutnya yang menyumbang inflasi Kota Surabaya secara yoy di tahun 2024. Komoditas utama yang menyumbang inflasi yoy tahun 2024 dari

kelompok ini yakni daging ayam ras, nasi dengan lauk, beras, minyak goreng, kopi bubuk, telur ayam ras, dan bawang merah. Kelompok makanan, minuman dan tembakau dikontribusi oleh komoditas-komoditas bahan pagan yang disebabkan selain karena periode musiman yang tidak menentu yang menyebabkan ketersediaan stok di pasaran terbatas, juga dikarenakan banyak sedikitnya permintaan. Meningkatnya harga beras didorong oleh tingginya permintaan beras di Kota Surabaya yang tidak diiringi ketersediaan yang memadai (terbatas) akibat produksi yang menurun dibanding periode sebelumnya di wilayah sentra penghasil beras. Selain itu kenaikan harga beras di pasaran masih berlanjut sebagai dampak dari penerapan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan nilai HET beras yang diberlakukan sejak 31 Mei 2024. Sementara untuk komodtas kopi bubuk mengalami inflasi sejalan dengan kenaikan harga biji kopi dunia yang meningkat dari 228,24 USD/Lbs pada triwulan II menjadi 270,80 USD/Lbs.

Sementara komoditas nasi dengan lauk kembali mengalami kenaikan harga sebagai dampak lanjutan dari kenaikan bahan baku. Komoditas minyak goreng selama tahun 2024 mengalami kenaikan harga secara berturut-turut selama 6 bulan terakhir. Beberapa faktor penyebabnya selain peningkatan permintaan konsumsi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan secara domestik maupun internasional, juga kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit dan proses pengangkutan. Kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional dibandingkan bulan sebelumnya berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng serta rantai distribusi yang panjang menyebabkan pasokan minyak goreng tidak dapat mengimbangi lonjakan permintaan konsumen pada momen tertentu. Sementara komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang terjadi umumnya disebabkan kenaikan permintaan menjelang pada momen tertentu seperti perayaan dan hari raya yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai, ditambah lagi proses distribusi pasokan yang terhambat oleh cuaca buruk.

Selanjutnya kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi year on year 1,83% di tahun 2024. Kelompok ini merupakan sejalan dengan meningkatnya inflasi kelompok bahan makanan yang merupakan komponen dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Berdasarkan data BPS, sektor penyediaan makanan dan

minuman/restoran menjadi sektor kedua terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Secara otomatis, kebutuhan bahan pangan baku sebagai pasokan menjadi faktor penentu yang berpengaruh terhadap dampak lanjutan dari kenaikan bahan baku.

Pada tahun 2024 kelompok kesehatan turut berkontribusi cukup tinggi terhadap inflasi Kota Surabaya. Komoditas yang dominan memberikan andil yakni obat dengan resep, vitamin, obat gosok, masker, biaya jasa dokter spesialis, dan tarif *check up*. Banyaknya rumah sakit besar baik milik pemerintah maupun swasta serta fasilitas kesehatan yang lainnya menjadikan Kota Surabaya sebagai tujuan berobat/rujukan masyarakat di luar Kota Surabaya membuat sektor kesehatan tumbuh. Sementara sektor Pendidikan turut andil berkontribusi inflasi setiap tahunnya yang umumnya terjadi pada momen tahun ajaran baru khususnya kenaikan tarif harga sekolah yang dikelola oleh swasta. Selama tahun 2024 inflasi terjadi pada jenjang pendidikan wajib yakni kenaikan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

e. Investasi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tetap kuat. Salah satunya dikontribusi oleh komponen investasi. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kota Surabaya sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki faktor pengganda yang tinggi.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel III.5
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2020 –Tahun 2024

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2020	Rp 16.356.162.161.751	Rp 1.258.527.150.916
2021	Rp 26.367.999.200.000	Rp 2.847.062.089.924
2022	Rp 32.360.553.538.640	Rp 2.537.261.412.162
2023	Rp 34.810.311.974.810	Rp 2.525.167.120.000
2024	Rp 37.127.067.019.449	Rp 3.348.565.052.145

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, 2025

. Nilai investasi Kota Surabaya tahun 2024 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp37.127.067.019.449,-, sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 3.348.565.052.145,- sehingga total realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar Rp 40.475.632.071.954,-. Sektor yang mendominasi PMA Kota Surabaya pada tahun 2024 terbesar pada sektor perdagangan dan reparasi; industri makanan dan minuman; hotel dan restoran; transportasi, gudang dan telekomunikasi; jasa lainnya; serta sektor bidang usaha lainnya. Sementara sektor yang mendominasi PMDN Kota Surabaya pada tahun 2024 terbesar pada sektor perdagangan dan reparasi; industri makanan dan minuman; hotel dan restoran; jasa lainnya; dan kontruksi.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir yakni 2020 hingga tahun 2024 memiliki tren yang terus menurun. Pada tahun 2020 nilai TPT Kota Surabaya cukup tinggi hampir mencapai angka 10% tepatnya 9,79%. TingginyaTPT Kota Surabaya kala itu disebabkan oleh banyak pemutusan hubungan kerja imbas pembatasan aktivitas masyarakat dimasa pandemic Covis-19. Selanjutnya pada tahun 2021 TPT terus mengalami penurunan menjadi seiring adanya kebijakan pelonggaran dari pembatasan aktivitas masyarakat sehingga perlahan pengangguran menurun. Penurunan tersebut terus berangsur seiring juga fokus pemerintah Kota Surabaya mengurangi pengangguran khususnya difokuskan pada pengangguran akibat Covid-19. Penurunan ini merupakan sinyal efektivitas kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya sehingga membuat penduduk angkatan kerja yang sebelumnya terdorong keluar dari pasar kerja, dapat

kembali terserap menjadi penduduk bekerja. Sehingga pada akhir tahun 2023 TPT Kota Surabaya turun menjadi sebesar 6,76%,

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 4,91%. Nilai tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan yakni sebesar 1,5% dibanding nilai TPT di tahun 2023. Capaian penurunan yang cukup drastis pada tahun 2024 dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja diiringi proporsi yang lebih besar pada peningkatan jumlah orang yang bekerja di tahun 2024. Sebaliknya, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan di saat jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,49% di tahun 2024, naik 1,76% poin dibandingkan TPAK Agustus 2023, sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1,62 juta jiwa, bertambah 55,1 ribu orang dibanding Agustus 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, penurunan terbesar berasal dari pengangguran laki-laki. TPT pada laki-laki turun dari 7,30% pada Agustus 2023 menjadi 4,85% pada Agustus 2024, sedangkan TPT perempuan turun dari 6,04% pada Agustus 2023 menjadi 4,99% pada Agustus 2024. Jika ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan, TPT Kota Surabaya tertinggi terjadi pada tingkat pendidikan yang ditamatkan sekolah menengah pertama, sementara TPT paling rendah berada pada tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Tabel III.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020	9,79%
2021	9,68%
2022	7,62%
2023	6,76%
2024	4,91%

Sumber data: BPS Jawa Timur, 2025

3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2025 dan 2026

Perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih berat dibandingkan kondisi perekonomian tahun 2024. Berdasarkan perkembangan perekonomian terkini, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan lebih rendah dari ekspektasinya. Bahkan IMF

melakukan revisi terkait prediksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mulanya sebesar 3,3% turun menjadi 2,8% di 2025 dan pada angka 3% di tahun 2026. Artinya, kondisi ekonomi global hingga saat ini menunjukkan . Perubahan estimasi tersebut sebagai dampak penyesuaian imbas dari kebijakan amerika Serikat yang membuat ekonomi global lebih bergejolak yang selanjutnya memicu perang dagang dan berimbas terhadap negara-negara lainnya, utamanya negara mitra dagangnya, salah satunya yang berlangsung saat ini yakni perang tarif antara Amerika dan Cina. Oleh karena itu IMF juga merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Pada tahun 2025 IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulanya sebesar 5,1% turun menjadi pada angka 4,7%. Meskipun demikian, penurunan estimasi prediksi pertumbuhan Indonesia lebih rendah dari perkiraan negara-negara lainnya seperti Vietnam, Thailand dan Meksiko mengingat negara tersebut memiliki porsi perdagangan lebih besar terhadap Amerika Serikat.

Meskipun kondisi ekonomi global sedang bergejolak, pemerintah pusat tetap meyakini pertumbuhan ekonomi Nasional mampu berdaya tahan. Pemerintah meyakini melalui sinergitas yang kuat, ancaman dari luar mampu dihadapi. Pemerintah nasional juga optimis pertumbuhan nasional masih mampu tumbuh pada kisaran 5%. Tentunya rasa optimis tersebut didukung oleh kemampuan konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor yang cukup baik, ditengah perlambatan ekonomi global. Inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026. Konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nilai tukar Rupiah tahun 2025 akan dijaga stabil melalui fundamental yang baik yakni inflasi rendah, imbal hasil investasi menarik, dan pertumbuhan tinggi.

Melihat perkembangan terkini, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya juga diperkirakan masih tumbuh kuat, yakni dikisaran 5,5-6,1%. secara kumulatif pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,76%. Masih kuatnya kinerja ekonomi Kota Surabaya selama ini dipengaruhi faktor fundamental Kota Surabaya seperti kuatnya tingkat konsumsi yang menjadi komponer terbesar yang berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diikuti oleh investasi dan ekspor. Dari sisi sektoral, lapangan usaha dominan Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih diperkirakan

menjadi sektor yang berkontribusi besar menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada akhir tahun 2024 berdasarkan rilis BPS Kota Surabaya secara year on year (y-on-y) sebesar 1,38%. Jika dibandingkan pada tahun 2023, Kota Surabaya mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 3,03%. Sementara untuk tahun 2025 dan 2026, inflasi Kota Surabaya diperkirakan diperkirakan pada kisaran 2,5 ± 1%. Perkiraan tersebut juga telah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 dan 2026.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2026 mengacu pada:

A. Reformasi Struktural yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah reformasi regulasi pada tingkat undang-undang meliputi :
   1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)
   2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

B. Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Pusat telah menerbitkan :
   1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas dasar Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mulai dari Perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan
   4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan oleh daerah yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi

C. Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan :
   1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur
   2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

D. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prestasi kerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusuan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah berpedoman pada :
   1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
   3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
   4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
   5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900..1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
   6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   7. Peraturan Walikota Nomor Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
   8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya

Tahun 2025-2045

E. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan :
   1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah
   2. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah
   3. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Perizinan Tertentu
   4. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha
   5. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum

F. Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan diversifikasi pembiayaan daerah untuk pembangunan dengan berpedoman pada:
   1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
   2. Paraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
   3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2026 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

   a. Kebijakan Pajak Daerah:

      1) Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan :

         - Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah
         - Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor S-141/PK.5/2024, Perihal : Penjelasan Terkait Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk Rumah Kos dengan penjelasan :
    1. Pasal 1 angka 47 UU HPKD mengatur bahwa definisi dari Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya
    2. Pasal 53 UU HPKD ayat (1) mangatur bahwa Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang/pertemuan pada penyedian jasa hotel seperti :
        3.2.1.1. Hotel
        3.2.1.2. Hostel
        3.2.1.3. Vila
        3.2.1.4. Pondok wisata
        3.2.1.5. Motel
        3.2.1.6. Losmen
        3.2.1.7. Wisma
        3.2.1.8. Pesanggrahan
        3.2.1.9. Rumah penginapan / guesthouse / bungalo / resort / cottage
        3.2.1.10. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan
        3.2.1.11. glamping
    3. Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih satu bulan)
    4. Berdasarkan pengaturan di atas, indekos/rumah kos dapat menjadi objek PBJT atas Jasa Perhotelan sepanjang memenuhi kriteria pada penjelasan pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD

5. Pasal 1 angka 47 UU HPKD yang memuat frasa “dapat dilengkapi” memiliki maksud bahwa jasa perhotelan dapat maupun tidak dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya sehingga cenderung menitikberatkan pada penyediaan akomodasi saja
6. Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD, dapat dimaknai jika terdapat kontrak yang menyatakan bahwa persewaan dilakukan untuk masa kontrak di atas 1 bulan, transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam maksud dari frasa “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel”

i. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen (BBNKB)

ii. Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBB-P2 sebagai berikut:

1. Nilai NJOP 0 – 100 juta semula 0,10% menjadi 0,00%
2. Nilai NJOP 100 – 200 juta semula 0,10% menjadi 0,05%
3. Nilai NJOP 200 juta – 1 milyar semula tidak ada perubahan yaitu 0,10%
4. Nilai NJOP 1 milyar – 2 milyar semula 0,20% menjadi 0,15%
5. Nilai NJOP 2 milyar – 10 milyar tidak ada perubahan yaitu 0,20%
6. Nilai NJOP 10 milyar – 50 milyar semula 0,20% menjadi 0,25 %
7. Nilai NJOP 50 milyar ke atas semula 0,20% menjadi 0,30%

iii. Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada perubahan untuk tarif

BPHTB yaitu sebesar 5%

iv. Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Peneranga Jalan, Parkir, Hiburan sebagai berikut :

1. PBJT Jasa Perhotelan meliputi hotel tetap sebesar sebesar 10% dan rumah kos semula 5% menjadi tidak dipungut pajak.
2. PBJT Jasa Makanan dan Minuman meliputi restoran dan katering serta jasa boga tetap sebesar 10%
3. PBJT Tenaga Listrik (PPJ) meliputi PLN rumah tangga semula 8% menjadi10%, PLN Industri Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi tetap sebesar 3%, PLN selain Golongan Industri Pertambangan, Minyak Bumi, dan Gas Alam selain Rumah Tangga semula 5% menjadi 10%, Non PLN tetap sebesar 1,5%
4. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Hiburan) meliputi Tontonan Film tetap sebesar 10%; Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, Busana semula 20% menjadi 10%; Pagelaran Kesenian, Musik, Tari yang bersifat Tradisional semula 5% menjadi 10%; Kontes Kecantikan dan Sejenisnya semula 35% menjadi 10%; Kontes Binaraga tetap 10%; Pameran Seni Budaya, Seni Ukir, Barang Seni, Tumbuhan, Satwa, Hasil Produksi tetap 10%; Pameran Busana, Komputer, Elektronik, Otomotif, Properti semula 20% menjadi 10%; Diskotik, Karaoke Dewasa, Klub Malam, dan Sejenisnya tetap 50%; Sirkus, Akrobat, Sulap tetap 10%; Permainan, Bilyard, Golf, Bowling semula 35% menjadi 10%; Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor semula 20% menjadi 10%; Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Spa tetap 50%; Pusat Kebugaran tetap 10%; Pertandingan Olahraga 15% menjadi 10%; Karaoke Keluarga semula 35% menjadi 40%; Permainan Ketangkasan tetap 10%; Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Argo

Wisata, Kebun Binatang yang semula tidak ada menjadi 10%.

v. Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Reklame tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 25%

vi. Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 20%

vii. Pasal 44 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengakomodasi opsen, yakni tambahan pajak menurut%tase tertentu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tarif sebesar 66%, mengubah ketentuan yaitu Pasal 94 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;

2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi meliputi:
   a) Evaluasi dan Penilaian NJOP Bumi dan Bangunan
   b) Perbaikan peta PBB
   c) Perhitungan target sesuai potensi PBB dan BPHTB dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
   d) Membangun sistem terintegrasi antara pengelola usaha dengan Pemerintah Kota Surabaya
   e) Memperbarui Nilai Sewa Reklame secara berkala mengikuti nilai uang (*time value of money*) setiap tahunnya
3) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak
4) Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital

5) Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk peningkatan PAD dari Pajak Daerah antara lain melalui pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dalam bidang perpajakan
6) Sinergi pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk *role sharing* dan *cost sharing*
7) Meningkatkan sistem keuangan khususnya pendapatan dari sektor pajak daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

b. Kebijakan Retribusi Daerah:
1) Retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
3) Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas dan Kecamatan/Kelurahan supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4) Penyesuaian indeks bangunan gedung pada komponen perhitungan retribusi IMB agar tidak memberatkan wajib retribusi khususnya pada rumah tinggal
5) Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi terutama pemanfaatan aset daerah

6) Optimalisasi pemungutan retribusi parkir, baik di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir dengan cara antara lain:
   a) Peningkatan pengawasan pada pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan juru parkir
   b) Penggunaan pembayaran non-tunai
   c) pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pemantauan pemungutan retribusi parkir
7) Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengupayakan kerja sama dengan pengelola parkir swasta
8) Meningkatkan kerja sama Rumah Sakit Umum Daerah dengan lembaga lain antara lain:
   a) asuransi kesehatan swasta untuk memperluas jangkauan pelayanan RSUD
   b) Perguruan Tinggi untuk praktik klinik
   c) Perusahaan-perusahaan swasta untuk *medical check-up*
9) Optimalisasi layanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan dan alat kesehatan yang baru dan mutakhir

c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD:
   1) Kebijakan pengganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain:
      a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
      b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah
      c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
      d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang

bersangkutan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah

2) Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN
3) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi program serta kegiatan BUMN untuk menghasilkan inovasi dalam rangka peningkatan pendapatan, pelayanan kepada masyarakat dan kemanfaatan umum melalui diversifikasi usaha dan investasi
4) Restrukturasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM dan struktur bisnis. Restrukturasi meliputi restrukturasi regulasi dan/atau restrukturasi perusahaan dilaksanakan melalui restrukturasi internal mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur serta penataam hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik
5) Menetapkan prinsip Good Corporate Governance khususnya melalui digitalisasi dan transparasi transaksi keuangan

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
   a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
   b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
   c) Hasil kerja sama daerah
   d) Jasa giro
   e) Hasil pengelolaan dana bergulir
   f) Pendapatan bunga
   g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
   h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah

i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
k) Pendapatan denda pajak daerah
l) Pendapatan denda retribusi daerah
m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
n) Pendapatan dari pengembalian
o) Pendapatan dari BLUD berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD. Pendapatan dari BLUD tersebut terdiri dari :
    1. Pendapatan BLUD pada Dinas Kesehatan, termasuk BLUD Labaratorium Kesehatan Masyarakat
    2. Pendapatan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie
    3. Pendapatan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada
    4. Pendapatan BLUD pada RSUD Eka Candrarini berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/281/436.1.2/2024 terkait Penetapan BLUD RSUD Eka Candrarini yang dilaksanakan pada Perubahan APBD 2025 yang mulai beroperasi pada bulan Desember 2024.
    5. Pendapatan BLUD jasa layanan parkir pada Dinas Perhubungan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya
p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan

Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya.
4) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota

2. Kebijakan Pendapatan Transfer

a) Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut;
c) Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir;
d) Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer;
e) Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan data pendapatan daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Uraian	Realisasi TA. 2023 (Audited)	Realisasi TA. 2024 (Audited)	APBD TA. 2025	Proyeksi/Target TA. 2026	Proyeksi/Target TA. 2027
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**5,771,818,530,453**	**6,114,385,907,599**	**8,796,337,167,735**	**7,997,220,556,726**	**8,336,573,207,369**
1.1.1	Pajak Daerah	4,562,879,779,487	4,784,138,321,218	7,307,751,999,326	6,536,968,649,361	6,810,078,318,630
1.1.2	Retribusi Daerah	289,382,181,469	349,581,167,459	486,207,862,705	383,745,531,123	401,153,793,316
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	152,380,733,841	195,348,090,465	210,074,787,736	214,439,345,444	224,167,188,629
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	767,175,835,656	785,318,328,456	792,302,517,968	862,067,030,798	901,173,906,794
1.2	**Pendapatan Transfer**	**3,832,961,233,953**	**3,920,062,347,953**	**3,340,769,908,463**	**3,518,953,765,776**	**3,678,587,858,762**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2,595,300,604,262	2,856,076,818,326	2,891,048,679,000	3,085,199,540,477	3,277,424,976,867
1.2.2	Transfer Antar - Daerah Lainnya	1,237,660,629,691	1,063,985,529,627	449,721,229,463	433,754,225,299	401,162,881,895
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan		**9,604,779,764,406**	**10,034,448,255,551**	**12,137,107,076,198**	**11,516,174,322,502**	**12,015,161,066,131**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan PD Penghasil Pendapatan, 2025

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya Per Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel III.8

Tabel III.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Per PD Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Realisasi TA. 2023 (Audited)	Realisasi TA. 2024 (Audited)	APBD TA. 2025	Proyeksi/Target TA. 2026	Proyeksi/Target TA. 2027
1	Badan Pendapatan Daerah	4.573.798.966.702	4.795.260.275.199	7.307.751.999.326	6.536.968.649.361	6.815.608.025.610
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.157.105.095.160	4.254.119.499.024	3.701.528.492.263	3.869.342.950.358	4.040.574.987.870
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	112.508.222.727	81.235.816.770	124.390.533.646	114.563.003.611	119.632.819.542
4	Dinas Perhubungan	53.146.932.313	49.678.698.624	102.425.491.692	82.754.701.298	86.416.887.953
5	Dinas Lingkungan Hidup	84.916.831.126	143.865.269.849	122.455.080.145	104.528.171.339	109.153.910.640
6	Dinas Kesehatan	162.772.987.076	220.298.008.264	176.577.625.200	202.812.239.180	211.787.394.237
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	720.894.000	741.960.000	834.269.110	675.691.727	705.593.463
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.722.815.600	8.024.126.200	8.055.636.555	6.487.195.194	6.774.276.403
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	2.479.038.640	12.577.600	0	0	0
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	11.751.091.061	15.575.893.771	19.180.134.244	15.445.740.858	16.129.269.228
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	586.749.000	1.760.249.880	3.289.961.178	2.649.402.092	2.766.647.455
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	597.510.000	525.500.000	360.000.000	423.606.802	442.352.893

No	Perangkat Daerah	Realisasi TA. 2023 (Audited)	Realisasi TA. 2024 (Audited)	APBD TA. 2025	Proyeksi/Target TA. 2026	Proyeksi/Target TA. 2027
13	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	270.202.075.903	288.035.149.456	295.816.171.975	344.139.724.119	359.369.117.560
14	RSUD Bhakti Dharma Husada	166.541.999.598	174.175.281.713	167.920.381.475	195.283.145.851	203.925.112.041
15	RSUD Eka Candrarini	0	0	105.000.000.000	38.875.000.000	40.595.355.508
16	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	928.555.500	1.139.949.200	1.521.299.389	1.225.100.712	1.279.315.728
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	-	-
JUMLAH		**9.604.779.764.406**	**10.034.448.255.551**	**12.137.107.076.198**	**11.516.174.322.502**	**12.015.161.066.131**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan PD Penghasil Pendapatan, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2024 terealisasi sebesar Rp10.034.448.255.552 atau 88,78% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp4.784.138.321.218,- atau 92,55%; retribusi daerah sebesar Rp349.581.167.459,- atau 84,54%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp195.348.090.465,- atau 102,79%; dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah sebesar Rp785.318.328.456,- atau 96,46% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.784.138.321.218,- atau 92,55%. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2024, namun Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan pajak daerah, dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke 731;
2. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 731;
3. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/317/436.1.2/2024 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Menyambut Tahun Baru 2025;
4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/164/436.1.2/2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/Atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlamabatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79

Selain memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Pajak Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah:

1. Lokasi objek pajak PBJT Jasa Parkir belum seluruhnya terpasang alat perekam pajak daring sehingga proses pengawasan dan integrasi pelaporan pajak parkir belum terlaksana secara optimal;

2. Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) relatif besar belum terbayarkan karena data Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak jelas atau tidak ditemukan;
3. Pergeseran minat masyarakat dalam melakukan pengiklanan via media sosial karena dirasa lebih efektif dan lebih masif sehingga menurunkan potensi pemasangan reklame;
4. Pemungutan pajak PBJT Tenaga Listrik yang dilakukan oleh penyedia listrik (PLN) belum maksimal karena pemungutan pajak berdasarkan pembayaran langganan listrik oleh konsumen bukan dari jumlah konsumsi tenaga listrik sebenarnya.
5. Pemutakhiran data untuk mengatasi tingginya dinamika perubahan terhadap objek pajak dan wajib pajak yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana.
6. Wajib Pajak cenderung kurang memanfaatkan layanan dan fasilitas pembayaran pajak secara daring melalui beragam kanal mengakibatkan pelaksanaan pemungutan pajak masih belum dapat optimal
7. Ketentuan dasar pengenaan pajak reklame masih menggunakan regulasi lama (2010) dan sampai dengan saai ini belum dilakukan pembaruan regulasi sehingga pendapatan pajak reklame masih belum optimal.

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp349.581.167.459,- atau 84,54% dari target Rp413.533.091.681,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp181.169.533.083,- atau 116,82%; retribusi jasa usaha sebesar Rp124.215.032.924,- atau 88,72%; dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp44.196.601.453,- atau 37,32%.

Pada tahun 2024, selain kebijakan pengurangan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kartini;
2. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kebun Raya Mangrove, Adventure Land Romokalisari, dan

Hutan Kota pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Retribusi Daerah, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan tercapai 45,52% dikarenakan belum optimalnya pengawasan dan berkurangnya titik parkir;
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapai 49,47%, meningkat 17,72% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 31,75% dikarenakan adanya penambahan lokasi titik parkir baru yang dikelola Dinas Perhubungan semula 44 lokasi menjadi 53 titik pada tahun 2024;
3. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercapai 32,45% dikarenakan adanya regulasi pengurangan, pembebasan, atau pengurangan denda, salah satunya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-730. Selain itu, pembangunan bangunan tinggi yang semakin sedikit dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan PBG sebelum membangun rumah tinggal sehingga mengurangi pendapatan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp195.348.090.465,- atau 102,79%. Bagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan *output* pendapatan BUMD dan BUMN di tahun 2024.

Secara rinci Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER) tercapai Rp16.585.784.987,- atau 119,36% dari target;
2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tercapai Rp166.389.166.111 atau 101,60% dari target Rp163.774.035.051,- meliputi:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai Rp19.671.336.512,- atau 100% dari target terdiri dari:
   - PT BPR Surya Artha Utama Perseroda tercapai Rp2.302.504.886 atau 100% dari target
   - PT BPD Jawa Timur tercapai Rp17.363.651.626,- atau 100% dari target
   - PT BPR Jawa Timur tercapai Rp5.180.000,- atau 100% dari target

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp5.768.350.525,- atau 175,11% dari target Rp3.294.219.466,- terdiri dari:
   - Perusahaan Daerah Pasar Surya tercapai Rp379.707.689,- atau 148,56% dari target Rp255.564.102,- dengan rincian :
     - Realisasi dividen tahun 2019 sebesar Rp41.000.000,-
     - Realisasi dividen tahun 2022 sebesar Rp114.564.102,- tanggal 4 Januari 2024
     - Realisasi dividen tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,- tanggal 13 Juni 2024
     - Realisasi dividen tahun 2023 sebesar Rp123.143.587,- tanggal 31 Desember 2024
   - Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan tercapai sebesar Rp246.800.714 atau 100% dari target dengan rincian :
     - Angsuran pertama sebesar Rp64.553.594,-
     - Angsuran kedua sebesar Rp35.000.000,-
     - Angsuran ketiga sebesar Rp5.000.000,-
     - Angsuran keempat sebesar Rp5.000.000,-
     - Angsuran kelima sebesar Rp137.247.120,-

     Berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/84/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp564.553.594,-, terdapat selisih Rp317.752.880,- akan dibayarkan secara bertahap kepada Pemerintah Kota Surabaya dan diakui sebagai utang

dividen

- PT Surya Karsa Utama tidak ada realisasi dividen karena akan dilakukan pembubaran melalui likuidasi sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Desember 2023
- Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tercapai sebesar Rp5.141.842.122,- atau 194,63% dari target Rp2.641.854.650,- berdasarkan:
  1) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/118/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Kota Surabaya, telah disetorkan sebesar Rp3.051.078.415,-;
  2) Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/315/436.1.2/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tahun 2022, telah disetorkan sebesar Rp2.590.763.707,- di tahun 2023 dan tahun 2024

c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (PDAM Surya Sembada) tercapai Rp140.949.479.074,- atau 100,10% dari target Rp140.808.479.073,- berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/79/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.

d. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu PT YEKAPE Surabaya tercapai Rp12.373.164.367,- atau 100% dari target berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2024 yang telah disahkan Akta Notaris tanggal 6 Mei Tahun 2024.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar Rp785.318.328.456,- atau 96,46% dari target yang telah ditetapkan.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2024 sebesar Rp3.920.062.347.953,- atau 83,13% dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan transfer Tahun 2024 meliputi:

1. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai Rp6.123.511.688,- atau 90,51% dari target Rp6.765.509.000,- dikarenakan penyalurannya memperhitungkan nilai kontrak pekerjaan masing-masing bidang.
2. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercapai Rp772.097.523.568,- atau 97,63% dari target Rp790.857.390.000,- dikarenakan penyalurannya memperhitungkan SILPA tahun sebelumnya
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp1.060.948.129.627,- atau 53,46% dari target Rp1.984.543.201.137,- berdasarkan:
   a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/635/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur berdasarkan Target Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
   b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
   c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/218/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2023;
   d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024;
   e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024;
   f. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota

di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024;

g. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024;
h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/219/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2024;
i. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/391/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2024;
j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/600/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2024;
k. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/780/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024

4. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tercapai Rp3.037.400.000,- atau 79,03% dari target Rp3.843.313.779,- berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor

pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung ***"Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur"*** serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026**.** Secara umum kebijakan belanja Daerah tahun 2026 yaitu :

1. Menyusun belanja nonprioritas secara efektif dan efisien khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi sosial ekonomi;
3. Pemanfaatan belanja operasi dan modal sesuai dengan tema dan arah kebijakan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2026;
4. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
5. Penguatan mekanisme sewa dan Kerjasama Operasi (KSO);
6. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui sinkronisasi dengan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026;
7. Mengarahkan alokasi belanja untuk mendukung pencapaian *output* yang terukur;
8. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan pendanaan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
9. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;

10. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri, terutama dalam pengadaan barang/jasa dalam negeri

Selain itu, belanja daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal Pasal 146 Ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh%) dari total belanja APBD. Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja bertujuan untuk mendorong struktur belanja daerah semakin efisien dan produktif. Pada RKPD Tahun 2026, total belanja pegawai sebesar Rp3.640.632.345.710,- dan Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp276.428.650.000,- sehingga belanja Pegawai setelah dikurangi Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp3.364.203.695.710,- atau 23,24%;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh%) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Pemenuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 adalah sebesar Rp 2.731.836.931.377,-. Besaran anggaran fungsi pendidikan tahun 2026 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp 2.522.147.740.981,-.
3. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 147 ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh%) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, jumlah belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp 6.592.565.358.912,- atau 45,53%.

4. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal.

Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan. Penyusunan struktur belanja daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Adapun kebijakan belanja Daerah tersebut diimplementasikan dengan:

1. Penguatan Kapasitas Surabaya dilakukan dengan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah Kota secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diupayakan dapat

mencapai sebesar minimal 20 % dari APBD yang diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Di bidang kesehatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mewujudkan ***"health for all",*** belanja yang ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk mencegah dan/atau mengurangi balita stunting, kematian Ibu serta kematian Bayi dan Balita;

2. Untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah Kota juga mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan ***mengurangi*** kesenjangan;
3. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, ***reformasi*** birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2026 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas;
4. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2026 akan difokuskan pada ***penghematan*** atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran serta optimalisasi penggunaan tingkat komponen

dalam negeri (TKDN);

5. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, ***dan*** peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi tinggi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*);
6. Pengalihan Belanja dari APBD kepada opsi pembiayaan selain APBD dengan kerjasama melalui *creating shared value* (CSV) dengan Perusahaan, KPBU maupun *Corporate Social Responsibility (*CSR) serta Kerjasama Operasi (KSO);
7. Sebagai bagian dari *penyelarasan* dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026, kebijakan belanja daerah diarahkan pada :
   a. Pemanfaatan belanja sesuai dengan dengan tema dan arah kebijakan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 yaitu ***"Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur"***
   b. Pemenuhan kebutuhan minimum pemerintahan (antara lain gaji dan tunjangan, belanja barang dan operasional kantor, belanja wajib yang bersifat mandatory antara lain anggaran pendidikan dan infrastruktur)
   c. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri, terutama dalam pengadaan barang/jasa dalam negeri
   d. Pengalokasikan belanja untuk melaksanakan fokus pembangunan yaitu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi AKI dan AKB, mengurangi stunting, meningkatkan pembangunan manusia, menurunkan kesenjangan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
8. Sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam penyusunan alokasi belanja pada RKPD Tahun 2026 Pemerintah Daerah juga melakukan :

a. Pengalokasian belanja secara selektif, efektif, dan efisien untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar/*focus group discussion*, dan belanja perjalanan dinas.
b. Memfokuskan alokasi belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pad atahun anggaran sebelumnya
c. Mengarahkan belanja untuk mendukung pencapaian output yang terukur

9. Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.
10. Guna menjamin kelancaran penyelesaian kegiatan/proyek prioritas yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran serta mencegah risiko terjadinya proyek mangkrak akibat keterbatasan waktu atau anggaran tahunan, maka pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran atau pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, dapat dilaksanakan melalui metode kegiatan tahun jamak/*multiyears.* Selanjutnya kegiatan tahun jamak dianggarkan berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS serta perlu memperhatikan ketentuan bahwa jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak/*multiyears* tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali kegiatan yang merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2023, target Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dan Tahun 2027, maka belanja daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.9.

Tabel III.9
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya
Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Proyeksi/Target	Proyeksi/Target	Proyeksi/Target
		TA. 2023 (Audited)	TA. 2024 (Audited)	TA. 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
2	**BELANJA**					
2.1	**Belanja Operasi**					
2.1.1	Belanja pegawai	2,540,673,580,810	2,871,477,429,285	3,764,318,412,108	3,640,632,345,710	3,715,317,065,571
2.1.2	Belanja barang dan jasa	4,835,931,638,916	4,768,556,407,351	5,215,155,800,507	5,416,453,159,436	5,716,532,059,339
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	46,445,117,720	73,990,836,640
2.1.4	Belanja Subsidi	0	23,212,862,862	99,880,607,558	132,428,989,564	132,428,989,564
2.1.5	Belanja hibah	404,050,361,625	432,667,414,836	338,348,048,378	350,218,296,378	350,218,296,378
2.1.6	Belanja bantuan sosial	78,223,729,100	4,287,200,000	6,763,200,000	1200000000	1,200,000,000
	Jumlah Belanja Operasi	**7,858,879,310,451**	**8,100,201,314,334**	**9,424,466,068,551**	**9,587,377,908,808**	**9,989,687,247,492**
2.2	**Belanja Modal**					
2.2.1	Belanja tanah	90,286,694,348	243,584,204,453	267,796,713,386	452,222,363,825	120,220,216,441
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	285,845,343,961	226,624,123,848	289,485,651,409	378,218,858,563	425,298,855,404
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	365,424,112,763	657,767,071,308	859,160,887,944	751,488,185,321	459,113,725,115
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	921,720,212,895	762,164,782,711	1,461,074,880,757	3,296,440,838,131	2,336,186,629,743
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	8,619,452,218	679,876,173	1,656,398,645	3,532,612,900	3,607,531,128
2.2.6	Belanja aset lainnya	-	6,421,936,175	10603115268	8065637148	8,200,765,693
	Jumlah Belanja Modal	**1,671,895,816,185**	**1,897,241,994,668**	**2,889,777,647,409**	**4,889,968,495,888**	**3,352,627,723,524**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**					
2.3.1	Belanja tidak terduga	12,815,776,299	597,526,380	37,000,000,000	47,000,000,000	57,000,000,000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**12,815,776,299**	**597,526,380**	**37,000,000,000**	**47,000,000,000**	**57,000,000,000**
2.4	**Belanja Transfer**					
2.4.1	Belanja bagi hasil	0	0	0	0	0

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Proyeksi/Target	Proyeksi/Target	Proyeksi/Target
		TA. 2023 (Audited)	TA. 2024 (Audited)	TA. 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
2.4.2	Belanja bantuan keuangan	0	0	500,000,000	500,000,000	500000000
	Jumlah Transfer	**0**	**0**	**500,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**
	Jumlah Belanja	**9,543,590,902,935**	**9,998,040,835,382**	**12,351,743,715,960**	**14,524,846,404,696**	**13,399,814,971,016**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappedalitbang, diolah tahun 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan :.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Paraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 163, Pasal 166, Pasal 168 dan Pasal 180 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Arah kebijakan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 meliputi :

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*;
2. Optimalisasi peran BUMN, *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU) dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok rentan dan UMKM;
5. Alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur produktif, yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Pembayaran utang pokok pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyertaan modal bagi BUMD.

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk

pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya;
2. Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tahun anggaran berkenaan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk dapat memperkuat posisi sebagai *superhub* yang berkelanjutan sehingga memanfaatkan diversifikasi pembiayaan daerah, dengan alternatif sebagai berikut:

1. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN
2. Pinjaman Daerah yang bersumber dari :
   a. Pemerintah
   b. Pemerintah Daerah Lainnya
   c. Lembaga Keuangan bank; dan atau
   d. Lembaga keuangan bukan bank

3. Obligasi Daerah, yakni surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Sukuk Daerah, yakni surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, untuk:
   a. pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah
   b. pengelolaan portofolio utang Daerah
   c. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah kota Surabaya tahun 2026 diarahkan sebesar sebesar Rp 10.000.000.000,- untuk penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama dan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 184.154.368.661,-. Sedangkan bunga atas pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan alternatif berada pada pos belanja bunga yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Penatausaahan Pembiayaan Daerah.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2023 – 2027) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.10.

Tabel III.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Uraian	Realisasi TA. 2023 (Audited)	Realisasi TA. 2024 (Audited)	APBD TA. 2025	Proyeksi/Target TA. 2026	Proyeksi/Target TA. 2027
3	**PENERIMAAN**					
3.1	**Penerimaan Daerah**					
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	156,690,767,646	207,879,629,117	224,636,639,762	263,996,494,318	254,393,362,137
3.1.2	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	2,938,829,956,537	1,839,025,121,533
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**156,690,767,646**	**207,879,629,117**	**224,636,639,762**	**3,202,826,450,855**	**2,093,418,483,670**
3.2	**Pengeluaran Daerah**					
3.2	Penyertaan modal	10,000,000,000	9,929,481,387	10,000,000,000	10,000,000,000	18,825,515,000
3.2.2	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0	0	0	184,154,368,661	689,939,063,786
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10,000,000,000**	**9,929,481,387**	**10,000,000,000**	**194,154,368,661**	**708,764,578,786**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur, anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*; (2) *creative financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema kerja sama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerja sama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
   a. Peningkatan kerja sama swasta dan pemerintah melalui kerja sama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerja sama KPS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerja sama seperti *Build-Operate-Transfer* (BOT), *Build-Transfer-Operate* (BTO), maupun bentuk lainnya.
   b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR),

kerjasama dengan perusahaan dalam intervensi program dengan menawarkan value bagi Perusahaan atau dikenal dengan *Creating Shared Value (*CSV). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR mapun CSV dipandang potensial untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan yang merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Forum CSR Kota Surabaya telah dibentuk sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Pengembangan kerja sama antar daerah. Kerja sama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerja sama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerja sama kemitraan dengan lembaga non pemerintah baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung program prioritas daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerja sama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.
5. Pembiayaan lain dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mendukung pencapaian visi dan misi Presiden-Wakil Presiden dan program strategis nasional sebagaimana telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada Tahun 2024, telah diselenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak yang selanjutnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka sesuai dengan ketentuan ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan disahkan maksimal 6 (enam) bulan sejak pelantikan tersebut. Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, sehingga RKPD 2026 disusun berdasarkan sinkronisasi pada tahapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 mengacu pada Rancangan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 berpedoman pada visi, misi dan program Wali kota dan Wakil Wali kota Surabaya. Visi dan Misi Wali kota dan Wakil Wali kota Surabaya terpilih ***“Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”.***

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang dikenal dengan Panca Darma Karya Surabaya, sebagai berikut :

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan;
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter;
3. Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
4. Memantapkan Ketahanan Daerah Melalui Infrastruktur yang Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Transformasi Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Misi 1 : Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan	Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,80%	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	ICOR	4,71%
		PDRB Per Kapita	289,29 juta rupiah		Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,20%
		Indeks Akses Keuangan Daerah	7,40	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	16,67%
					Rasio PDRB Industri Pengolahan	18,44%
					Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,13%
				Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	85
				Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Tingkat Inflasi	2,5%
				Meningkatnya Kontribusi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47%
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	61,02%
Misi 2 : Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	85,77	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,50 Tahun
				Meratanya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01 Tahun
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,34 Tahun

Visi : Transformasi Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
				Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Keolahragaan	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0,95
Misi 3 : Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi	105,21	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	94,50
				Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	1,8
				Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	81,78
				Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	28,49%
				Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Nilai SAKIP Kota Surabaya	90,39
					Indeks Pelayanan Publik	4,61
					Indeks Kepuasan Masyarakat	97,25%
				Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Survey Penilaian Integritas	75,71
Misi 4 : Memantapkan Ketahanan Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya Keseimbangan dan Kesinambungan Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	67,94	Meningkatnya Kuliatas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,53 poin
					Penurunan Emisi GRK Kumulatif	245.816,22 Ton CO_2 eq
				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	0,69
				Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	107,65
Misi 5 : Harmonisasi Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	3,85%	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,70

Visi : Transformasi Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator**	**Target**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
		Gini Rasio	0,375	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	361
	Terciptanya Masyarakat Maju dan Berbudaya dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah	Indeks Harmonis Indonesia (IHal)	7,33		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,111
				Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Toleransi Umat Beragama	0,968
					Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas	80,71
				Terwujudnya Mayarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,40%

Sumber : Ranperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, strategi dan penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, Rancangan RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional serta strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga prioritas dan sasaran pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 diselaraskan dengan prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya serta visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada dokumen Rancangan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pada rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Nawa Bhakti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Ketimpangan Sosial Ekonomi antar Kelas Pendapatan dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing;
3. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi berbasis Sektor Padat Karya yang Inklusif dan Mempertimbangkan Prinsip Adil dan Merata;
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kolaboratif untuk Mewujudkan Masyarakat yang Resilien;

5. Optimalisasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Transportasi Terintegrasi Antar Wilayah untuk Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi;
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel dan Efisien Fokus pada Pelayanan Publik yang Ramah, Inklusif dan Terjangkau.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026, memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Visi pembangunan "**Bersama Indonesia Maju Menju Indonesia Emas 2045**", dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai Asta Cita.



Gambar IV.1
Visi dan Misi dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025

Delapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan Asta Cita sebagai prioritas pembangunan nasional memuat 17 (tujuh belas) program prioritas pembangunan Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor, sebagai berikut :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang merupakan tahun kedua pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2026 adalah "***Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif***" dengan sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, GNI per kapita, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Modal Manusia, dan menurunkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Ekstrem.

Sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,8 – 6,3%
2. GNI per kapita 5.870 dolar US
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK 37,14%
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67
5. Indeks Modal Manusia 0,57
6. Tingkat Kemiskinan 6,5 – 7,5%
7. Rasio Gini 0,377 – 0,380
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,44 – 4,96%
9. Kemiskinan Ekstrem 0,0 – 0,5%

Untuk membangun dasar yang kokoh guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan tahun 2026, prioritas nasional yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah melakukan pembangunan kewilayahan guna mengurangi ketimpangan pembangunan antara kawasan timur Indoensia dan kawasan barat Indonesia. Fokus pembangunan kewialyaah pada tahun 2026 yaitu pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah seperti penuntasan rencana tata ruang, perluasan pendaftaran dan sertifikasi tanah, penataab otonomi daerah, penyediaan data dan informasi geospasial dasar, dan penguatan fondasi keuangan daerah.

Pembangunan wilayah Jawa pada tahun 2026 diarahkan menjadi “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan” melalui :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa Bagian Utara sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, serta penghasil produk berorientasi ekspor;

2. akselerasi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa Bagian Selatan sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas pertanian dan pariwisata inklusif;
3. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan berdaya saing didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan sistem infrastruktur transportasi yang terintegrasi;
4. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan ketahanan bencana.

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Pulau Jawa Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DK Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Jawa, antara lain melalui lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan *hub* utama Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak), serta pengembangan konektivitas udara melalui peningkatan infrastruktur dan layanan bandara *hub* dan *feeder* di Wilayah Jawa;
4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green, gray, dan social infrastructure*), terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, dan banjir;

7. Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
8. Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
9. Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
10. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
11. Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
12. Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir

Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 meliputi :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,90% – 5,40%;
2. PDRB Per Kapita (Rp juta) sebesar 80,10 – 90,71;
3. Kontribusi PDRB Provinsi (%) sebesar 14,20;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,70% - 4,48%;
5. Rasio Gini sebesar 0,370 - 0,380;
6. Indeks Modal Manusia sebesar 0,64 - 0,65;
7. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,80 – 76,40;
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,95% - 9,10%;
9. Penurunan intensitas emisi GRK sebesar 1,00% - 2,17%;
10. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Kumulatif sebesar 5,95%;
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,08 – 74,25;

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 memperhatikan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu *"**Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045***". Visi pembangunan tersebut dicapai

melalui misi pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang disebut sebagai Nawa Bhakti Satya, yaitu :

1. Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
2. Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas
3. Jatim Akses, Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
4. Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan
5. Jatim Cerdas, Memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
6. Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan
7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efeketif, berdaya guna dan partisipatif
8. Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif
9. Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam milestone di bawah ini :



Gambar IV.**2**
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 diarahkan sesuai dengan tema sesuai dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**".

Tema dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dijabarkan pada prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Jatim Sejahtera : Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
2. Jatim Kerja : Memperluas lapangan kerja yang berkualitas
3. Jatim Akses : Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
4. Jatim Agro : Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan
5. Jatim Cerdas : Memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
6. Jatim Sehat : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan
7. Jatim Berkah-Amanah : Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif
8. Jatim Harmoni : Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif
9. Jatim Lestari : Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang ingin dicapai di Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu tingkat kemiskinan 7,95 – 9,10 dan Rasio Gini 0,370 – 0,380
2. Terwujudnya ketahanan ekonomi yang berkualitas, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka 3,70 – 4,48 dan Pertumbuhan Ekonomi 4,90% - 5,40%
3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu Indeks Pembangunan Manusia 75,80 – 76,40
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 85,80 – 86,40
5. Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran dan inklusif, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 76,40 – 77,90

6. Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, dengan indikator yang ingin dicapai yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 74,08 – 74,25

Sedangkan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur yang ingin dicapai di Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya perlindungan sosial yang adapatif
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian perdesaan
3. Meningkatnya kesemapatan kerja dan kewirausahaan daerah
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah
5. Meningkatnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan
6. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan
7. Meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas
8. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintaan yang melayani dan berintegritas
9. Terwujudnya masyarakat yang harmonis dan toleran
10. Terwujudnya masyarakat yang inklusif
11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
12. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana

Target indikator makro yang ingin dicapai Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi 4,90% - 5,40%
2. PDRB per Kapita 80,10 juta - 90,71 juta
3. Kontribusi PDRB Provinsi 14,2
4. Tingkat kemiskinan 7,95% - 9,10%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,70% - 4,48%
6. Rasio gini 0,370 - 0,380
7. Indeks Modal Manusia 0,64 – 0,65
8. Penurunan Intensitas Emisi GRK 1% - 2,17%
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dearah 74,08 – 74,25

Arahan pembangungan wilayah Kota Surabaya Tahun 2026 mempedomani RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu :

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi serta jasa perusahaan) berdaya saing tinggi dan mendorong investasi pada sektor potensial (pengadaan air, pengelolaan

sampah, limbah dan daur ulang, jasa keuangan dan asuransi, real estate, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial)

2. Perluasan *coverage* jaringan transportasi melalui penyediaan feeder dan penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi serta didukung dengan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda, dan penguatan integrasi perencanaan penggunaan lahan dan sistem transportasi publik massal di kawasan GKS+
3. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis pariwisata, kawasan industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
4. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, akses rumah tangga terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta tetap memastikan pemenuhan akses sanitasi layak terhadap masyarakat, dan penanganan terhadap kawasan kumuh
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon merupakan strategi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki peran startegis dalam medukung kebijakan nasional dan provinsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan katahanan terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor prioritas yang berkontribusi terhadap emisi GRK yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diantaranya pertanian, transportasi, energi, serta pengelolaan sampah dan air limbah. Pelaksanaan aksi pembangunan karbon perlu diiringi dengan penguatan kerjasama pentahelix sebagai bentuk kolaborasi berbagao sektor dalam rangka mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana gelombang pasang, banjir, kebakaran hutand an lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi,

kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, dan lekuefaksi.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya

Tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan dan tema arah kebijakan pada rencana fokus pembangunan yang tertuang dalam Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, memperhatikan tema pembangunan tahun 2026 nasional dan Provinsi Jawa Timur serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2026, serta Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Tahunan Kota Surabaya Tahun 2026-2030 yang termuat pada Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 *yaitu "**Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur***". Adapun Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026, diarahkan sebagai berikut :

1. ***Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan yang adil dan inklusif***

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan. Di bidang kesehatan, pendekatan dilakukan secara menyeluruh melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, serta stunting. Sementara itu, di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu untuk menghasilkan generasi berkarakter dan berdaya saing tinggi

2. ***Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif***

   Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan efisiensi investasi untuk mendorong penyediaan lapangan kerja yang layak dan pengurangan pengangguran, penguatan sektor unggulan Surabaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat serta terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat

3. ***Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan***

   Infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan kota, yang tidak hanya difokuskan pada peningkatan konektivitas dan mobilitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur

diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjadi modal jangka panjang dalam memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik sekaligus menjaga keseimbangan ekologis serta ketahanan atas risiko bencana.

4. ***Reformasi birokrasi berbasis digital***

   Pemerintah Kota Surabaya menempatkan reformasi birokrasi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi birokrasi diarahkan melalui digitalisasi sistem pemerintahan untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Digitalisasi bukan hanya alat bantu, melainkan menjadi roh dari pelayanan publik yang adaptif dan modern

5. ***Harmonisasi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat***

   Pembangunan sosial diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kesenjangan, baik dalam bentuk sosial maupun ekonomi, diatasi melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta layanan sosial yang inklusif. Dengan membangun solidaritas dan rasa keadilan, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang rukun, inklusif, dan sejahtera. Selanjutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ruang hidup yang nyaman dan produktif. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas lembaga keamanan, serta sinergi antara aparat dan masyarakat terus diperkuat. Pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dikedepankan guna mencegah potensi konflik sosial dan meningkatkan ketanggapan terhadap gangguan kamtibmas. Penerapan teknologi informasi dalam sistem keamanan lingkungan juga didorong sebagai bagian dari tata kelola kota yang adaptif dan partisipatif.

Tema dan prioritas pembangunan Kota Surabaya diselaraskan dengan tema dan prioritas dalam RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026



Gambar IV.3
Penyelarasan Tema Pembangunan Tahun 2026

Selain penyelarasan tema dengan arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, penyelarasan prioritas juga dilakukan dengan astacita Presiden serta Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel IV.2
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1)	**Jatim Berkah Amanah**, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. (PP 7)	Reformasi Birokrasi Berbasis Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan Akses Internet	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD
		Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)	**Jatim Agro**, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan (PP 4)	Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Ekstraksi Garam	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (PP 9)	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup
					Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup
					Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup
					Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dinas Lingkungan Hidup
				Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
					Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	**Jatim Kerja**, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas (PP 2)	Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN3)			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			LATIHAN PERKOPERASIAN	Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Menengah dan Perdagangan
	Jatim Akses, Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan (PP 3)	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Memperkuat pembangunan	**Jatim Cerdas**, Memperkuat	Peningkatan Kualitas			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4)	Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan (PP 5)	Kesehatan dan Pendidikan yang Adil dan Inklusif	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Dinas Pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	Sekretariat Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			KESEJAHTERAAN RAKYAT		Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan (PP 6)	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan yang Adil dan Inklusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Eka Candrarini

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Eka Candrarini
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Eka Candrarini
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Eka Candrarini

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan (PP 1)	Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif (PP 8)	Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)	**Jatim Agro**, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan (PP 4)	Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Dinas Kebudayaan,

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)	**Jatim Sejahtera**, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan (PP 1)	Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)	**Jatim Berkah Amanah**, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif (PP 7)	Reformasi Birokrasi Berbasis Digital	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat
		Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 8)	**Jatim Harmoni,** Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif (PP 8)	Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (PP9)	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup

Penyelarasan Subkegiatan Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 dengan Astacita Presiden disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.3
Penyelarasan Subkegiatan Kota Surabaya dengan Astacita Presiden Tahun 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	-	1	
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	37574	16362	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
3	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	-	450	
4	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	-	-	Pembangunan unit sekolah baru (USB) di jenjang PAUD direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
5	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	45	90	
6	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur	Unit	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p				
7	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	1	
8	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur	Unit	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p				
9	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	5	
10	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	5	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					Fasilitas Kesehatan					
11	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	768	768	
12	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
13	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	12	
14	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	-	1632	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
15	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki jaringan irigasi permukaan, karena saluran berfungsi sebagai sistem drainase perkotaan
16	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki jaringan irigasi permukaan, karena saluran berfungsi sebagai sistem drainase perkotaan
17	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki jaringan irigasi permukaan, karena saluran berfungsi sebagai sistem drainase perkotaan

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
18	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki jaringan irigasi permukaan, karena saluran berfungsi sebagai sistem drainase perkotaan
19	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	-	-	Penyediaan dan pengembangan sistem air minum telah ditangani dan dilaksanakan oleh BUMD (PDAM Surya Sembada)
20	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	-	-	Penyediaan dan pengembangan sistem air minum telah ditangani dan dilaksanakan oleh BUMD (PDAM Surya Sembada)
21	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk	Meningkatnya ketahanan	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan	Jumlah Sambungan Rumah yang	SR	-	-	Perluasan sistem air minum telah ditangani dan dilaksanakan oleh

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air		PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				BUMD (PDAM Surya Sembada)
22	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	-	-	Perluasan sistem air minum telah ditangani dan dilaksanakan oleh BUMD (PDAM Surya Sembada)
23	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	
24	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
25	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2025 tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045 di tahun 2025
26	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2025 tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045 di tahun 2025
27	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	10	1190	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
								dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
28	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	-	10	
29	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	-	-	Terkait dengan perbaikan PSU di perumahan diarahkan untuk dilaksanakan oleh pengembang
30	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	-	12	
31	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkokoh ideologi Pancasila,	Terwujudnya manajemen	1.05.03	PROGRAM PENANGGUL	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggula	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan	Dokumen	-	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		ANGAN BENCANA		ngan Bencana Kabupaten/ Kota	Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				
32	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-	1	
33	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	-	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
34	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	-	12	
35	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	12	12	
36	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi,	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	laporan	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		KETERTIBAN UMUM		Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				
37	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	
38	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindunga	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		GAN MASYARAKAT	antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	n Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
39	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	-	1	
40	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	-	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
				sesuai standar									
41	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	459	
42	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	459	
43	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahtera	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial	Orang	-	486	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					an Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				
44	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	486	
45	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2229	680	
46	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	Orang	2229	680	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
47	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	25574	
48	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	25574	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
49	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	720	720	
50	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	720	720	
51	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah	Meningkatnya kinerja pembangun	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan	Perusahaan	220	230	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		BIDANG TENAGA KERJA	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	an ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja				bagi Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				
52	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	220	230	
53	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempata	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	-	25650	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
				n kerja dan perlindungan pekerja									
54	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	-	25650	
55	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	58	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			dan penyandang disabilitas.										
56	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	-	610	
57	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	-	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			dan penyandang disabilitas.										
58	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	150	
59	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	;-	-	Berkaitan dengan ketahanan pangan keluarga ini telah diakomodir dalam subkegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Bentuk kegiatannya yaitu mengedepankan pengembangan kapasitas keluarga dalam kreasi pangan
60	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKA	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	laporan	;-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		BIDANG PANGAN	negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			SI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
61	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	;-	-	Akan dilaksanakan oleh BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya
62	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	-	15	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
63	2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	-		Berdasarkan SK Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/202/436.1.2/ 2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Surabaya, ketua pelaksana harian adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya
64	2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	-	1	
65	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup	Lokasi	-	3	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		LINGKUNGAN HIDUP	negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	(Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				
66	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	-	3	
67	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	-	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
68	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	-	1	
69	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	570129	568047	
70	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	570129	568047	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
71	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	-	85	
72	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	-	85	
73	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi	Ton	-	14600	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengompos an, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
74	2.11	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG LINGKUNGA N HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLA AN PERSAMPAH AN	2.11.11.2.0 1.0017	Penangana n sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTS a, RDF, pusat pengompos an, biodigester, Bank Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	-	14600	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
								dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					
75	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	650430	568047	
76	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	650430	568047	
77	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-	Laporan		40	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		ASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital				Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
78	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	-	1	
79	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggaraka	Laporan	-	-	Pada Program Pencatatan Sipil tidak dilaksanakan Koordinasi dangan Kementrian bidang

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		ASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital				Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	n Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d				Agama dengan pertimbangan : 1. Berdasar Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Pasal 2 ayat (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 2. Sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Bidang Pencatatan Sipil hanya melaksanakan pencatatan perkawinan untuk yang non muslim dan

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
													tidak pernah berkoordinasi dengan Kementrian bidang agama di tingkat kota/kabupaten. 3. Dalam pencatatan perkawinan non muslim tidak dipersyaratkan koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang agama
80	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	-	3050	
81	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki desa

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		AT DAN DESA	pemberantasan kemiskinan.	yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa									
82	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki desa
83	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki desa
84	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan	Dokumen	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki desa

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		YAAN MASYARAKAT DAN DESA	lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa				Lembaga Kerja Sama antar Desa	Lembaga Kerja Sama antar Desa				
85	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	
86	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	;-	3	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		BERENCANA	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
87	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	;-	1	
88	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Kelompok	57	153	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		BERENCANA	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan				
89	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2500	2500	
90	2.15	URUSAN PEMERINTA	Melanjutkan pengembangan	Terwujudnya	2.15.02	PROGRAM PENYELENG	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkap	Jumlah Perlengkapan	Unit	2500	2500	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		HAN BIDANG PERHUBUNGAN	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		an Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				
91	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	12	14	
92	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	12	14	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									
93	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	-	-	Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas pelabuhan sungai dan danau
94	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	-	-	Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas pelabuhan sungai dan danau

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									
95	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	-	-	Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan
96	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	-	-	Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			melalui peran aktif koperasi.										
97	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	-	1	
98	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	-	1	
99	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	36	30	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			narkoba, judi, dan penyeludupan.										
100	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	36	30	
101	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	12	
102	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	12	
103	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar	Media	34	17	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						sesuai kriteria/juknis				
104	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	34	17	
105	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	7	7	
106	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	7	7	
107	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum	Terakselerasinya transformas	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan	Aplikasi	-	10	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	i pemerintah digital di daerah		INFORMATIKA		Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				
108	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	10	
109	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-	58	
110	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-	58	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
111	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	-	6	
112	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	-	6	
113	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	-	20	
114	2.17	URUSAN PEMERINTA	Melanjutkan pengembangan	Peningkatan	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAY	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan	Koperasi dengan Keanggotaan	Unit Usaha	-	85	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		HAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Produktivitas Koperasi dan UMKM		AAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/Kota				
115	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	9	10	
116	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	-	160	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		KECIL, DAN MENENGAH	yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			USAHA MIKRO (UMKM)		serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					
117	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	-	5	
118	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	Kegiatan Usaha	2960	3060	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
									Perizinan Berusaha				
119	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	500	700	
120	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa yang menjadi sasaran intervensi adalah perorangan pemuda, bukan organisasi pemuda

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			penyandang disabilitas.										
121	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan kepada atlet yang terdaftar di KONI dan KORMI, bukan melakukan seleksi atlet
122	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	700	2214	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			penyandang disabilitas.										
123	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
124	2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	-	62	
125	2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	-	81	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)									
126	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	-	58	
127	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	-	58	
128	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur,	Dokumen	-	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar				
129	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen	-	1	
130	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
131	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	2	
132	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	-	20	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
133	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	-	20	
134	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	-	-	Kota Surabaya telah memiliki tim ahli cagar budaya dan dalam menetapkan sebagai cagar budaya tidak dilakukan setiap tahun. Untuk penetapan cagar budaya telah diakomodir dalam subkegiatan Pelindungan Cagar Budaya
135	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	-	-	Kota Surabaya telah memiliki tim ahli cagar budaya dan dalam menetapkan sebagai cagar budaya tidak dilakukan setiap tahun. Untuk

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										penetapan cagar budaya telah diakomodir dalam subkegiatan Pelindungan Cagar Budaya
136	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	-	4	
137	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	-	4	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			masyarakat yang adil dan makmur.										
138	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	200	307	
139	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	200	307	
140	2.23	URUSAN PEMERINTA	Memperkuat pembangunan	Meningkatnya	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi	Jumlah koleksi perpustakaan	Eksemplar	-	17305	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		HAN BIDANG PERPUSTAKAAN	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat		PERPUSTAKAAN		Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	(cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				
141	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	-	17305	
142	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan,	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan	Orang	-	6	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	pendaftaran naskah kuno				
143	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	-	6	
144	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	-	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					dan Didayagunakan					
145	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	-	2	
146	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	66	68	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
147	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	100	1200	
148	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
149	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
150	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	-	65	
151	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
152	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					kewenangan kabupaten/ kota					
153	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	1768	1768	
154	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	-	105	
155	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuh	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung prioritas percepatan pembangunan

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	an Ekonomi Nasional									destinasi pariwisata prioritas borobudur Yogyakarta Prambanan (bukan di kota Surabaya)
156	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung kegiatan prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok Gili Tramena (bukan di Kota Surabaya)
157	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	-	60	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
158	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung kegiatan prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba (bukan di Kota Surabaya)
159	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			melalui peran aktif koperasi.										
160	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	-	2	
161	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	-	-	Pengembangan dari prasarana ekonomi kreatif memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Kota Surabaya yang pemeliharaan dan pengelolaannya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung kegiatan prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan.

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
162	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung kegiatan prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok Gili Tramena
163	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	-	-	Master plan terkait ekonomi kreatif sedang dalam proses penyusunan di Tahun 2025
164	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	344,00 - Meningkatnya Kontribusi	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan	Lembaga	-	-	Master plan terkait ekonomi kreatif sedang dalam proses

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		PARIWISATA	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Kreatif Daerah	kelembagaan ekonomi kreatif daerah				penyusunan di Tahun 2025
165	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	-	-	Master plan terkait ekonomi kreatif sedang dalam proses penyusunan di Tahun 2025
166	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif,	Produk	-	4	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				
167	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	-	-	Kota Surabaya bukan merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan dikarenakan Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk disebut sebagai lumbung pangan
168	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	-	-	Kota Surabaya bukan merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan dikarenakan Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk disebut sebagai lumbung pangan

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
169	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	6	-	Kota Surabaya bukan merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan dikarenakan Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk disebut sebagai lumbung pangan
170	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	-	35.975	
171	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	-	-	Berdasarkan pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan bahan berbahaya dilakukan dengan

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
								Produsen B2 (P-B2)					dikoordinasikan oleh Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan
172	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	-	2	
173	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	-	50	
174	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	-	-	Pemerintah Kota Surabaya mengikuti/menjadi peserta pada misi dagang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
175	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	-	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			nilai tambah di dalam negeri.										
176	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	12	12	
177	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	12	1	
178	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang	Dokumen	-	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
								berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,				
179	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	-	-	Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang transmigrasi
180	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	-	-	Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang transmigrasi
181	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	-	-	Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang transmigrasi

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi									
182	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	-	118	
183	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Orang	-	118	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
				ideologi Pancasila		POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		n Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan				
184	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	-	118	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
								Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
185	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	30	
186	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	30	
187	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Orang	-	30	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
			lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila		ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				

Asta Cita Presiden mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Dalam mendukung Asta Cita, Presiden telah menetapkan Program Strategis Nasional memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Strategis Nasional menjadi acuan dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Berikut disampaikan penyelarasan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 dengan Program Strategis Nasional dapat dilihat pada tabel IV.4

Tabel IV.4
Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dengan Program Strategis Nasional Tahun 2026

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
Pengentasan Kemiskinan	*Penanggulangan Kemiskinan*	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	
	Sekolah Rakyat	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
	Pembangunan 3 Juta Rumah	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
Ketahanan Pangan	***Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)***			Di Surabaya tidak ada wilayah irigasi
Ketahanan Pangan	***Pendayagunaan Penyuluh Pertanian***	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Ketahanan Pangan	***Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah***	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	
Ketahanan Pangan	***Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)***	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
		Pengembangan Prasarana Pertanian		
		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Kesehatan untuk semua	***Stunting***	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	63 Puskesmas	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63 Puskesmas	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
			Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
			Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	
	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
		Peningkatan Pelayanan BLUD		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	63 Puskesmas	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63 Puskesmas	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	
	Jaminan Kesehatan Nasional	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
	Penuntasan TBC	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
Perluasan Akses Pendidikan	***Pembangunan dan Revitalisasi PAUD***	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
Perluasan Akses Pendidikan	*Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah*	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
Perluasan Akses Pendidikan	*Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran*			SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Perluasan Akses Pendidikan	*Makan Bergizi Gratis*	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	
Pertumbuhan Ekonomi	*Pengendalian Inflasi*	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
Pertumbuhan Ekonomi	***Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih***	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
Pertumbuhan Ekonomi	***Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)***	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	
		Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Pertumbuhan Ekonomi	***Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)***	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
		Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
		Job Fair/Bursa Kerja		
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	RKPD 2026		KETERANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
		Pengelolaan Sampah		
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Kota Surabaya melakukan kolaborasi lintas perangkat daerah dengan mengoordinasikan peran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam pendataan lembaga pendidikan, fasilitasi koordinasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, serta melakukan pemantauan pelaksanaan program di lapangan. Dinas Kesehatan melaksanakan pelatihan bagi penyedia makanan, skrining kesehatan siswa, pengujian kandungan gizi makanan, dan pemberian rekomendasi menu yang seimbang dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup memastikan pengelolaan dan pengangkutan limbah makanan dari sekolah berlangsung dengan baik dan ramah lingkungan.

Pemerintah Kota memastikan pelaksanaan program dilakukan secara terstandar melalui penetapan dokumen keputusan tim pelaksana, pedoman operasional pelaksanaan di sekolah, serta pemanfaatan sistem pendataan pendidikan yang terintegrasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Menu makanan yang disajikan telah memenuhi prinsip makanan sehat dan bergizi, mendukung pembentukan kebiasaan positif anak-anak dalam kerangka 7 (tujuh) kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, gemar belajar, dan tidur tepat waktu.

Program ini tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga menjangkau kelompok rentan lainnya seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah Kota Surabaya siap menjadi percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang mencakup peningkatan gizi, pembentukan karakter, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu proyek strategis nasional melalui fasilitasi pembentukan 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih sampai dengan berbadan hukum. Koperasi yang difasilitasi tersebut dapat berupa pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, ataupun revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi potensi sumber daya tiap wilayah, identifikasi koperasi eksting dan potensial, koordinasi

dengan pemangku wilayah dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persiapan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya, pengembangan usaha koperasi tersebut terutama difokuskan pada perdagangan sembako untuk dapat menjadi operator Kios TPID, padat karya jahit dan paving, serta pemasok barang toko kelontong. Diharapkan dengan terbentuknya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di 153 kelurahan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian pada level *grassroot* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara makro.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membentuk arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025. Dalam upaya menciptakan daerah yang maju dan berkelanjutan, sektor ekonomi kreatif. menjadi salah satu pilar penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ekonomi kreatif tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga menjadi wadah ekspresi budaya, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif ke dalam program prioritas daerah. Hal ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang adaptif, penguatan ekosistem kreatif, serta penyediaan infrastruktur dan dukungan pembiayaan yang memadai. Fokus pembangunan diarahkan pada subsektor unggulan yang memiliki potensi lokal, seperti kuliner, fesyen, kriya, musik, film, seni pertunjukan, dan aplikasi digital.

Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha kreatif, komunitas, akademisi, dan sektor swasta, dalam menciptakan ruang kreatif (*creative hub*), inkubator bisnis, serta platform pemasaran digital yang dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk kreatif lokal. Inisiatif ini turut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya bagi generasi muda. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendekatan ekonomi kreatif juga diharapkan mampu mendorong pelestarian budaya lokal dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Pengembangan produk kreatif yang berakar pada

kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi.

4.2.3 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026

Pencapaian sasaran pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 dijabarkan dalam tabel IV.5 di bawah ini yang memuat indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2025 dari setiap indikator sasaran tersebut.

Tabel IV.5
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran
Misi 1 : Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan	Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	ICOR	4,71%
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,20%
		Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	16,67%
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	18,44%
			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,13%
		Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	85
		Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Tingkat Inflasi	2,50%
		Meningkatnya Kontribusi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47%
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	61,02%
Misi 2 : Mempercepat Transformasi	Terwujudnya Sumber Daya	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,50 Tahun

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran
Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter	Manusia yang Berkualitas	Meratanya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01 Tahun
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,34 Tahun
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Keolahragaan	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0,95
Misi 3 : Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	94,5
		Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	1,8
		Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	81,78
		Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	28,49%
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Nilai SAKIP Kota Surabaya	90,39
			Indeks Pelayanan Publik	4,61
			Indeks Kepuasan Masyarakat	97,25%
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Survey Penilaian Integritas	75,71
Misi 4 : Memantapkan Ketahanan Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya Keseimbangan dan Kesinambungan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,53 poin
			Penurunan Emisi GRK Kumulatif	245.816,22 Ton CO_2 eq
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	0,69
		Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	107,65
Misi 5 : Harmonisasi Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,7

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran
		Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	361
	Terciptanya Masyarakat Maju dan Berbudaya dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,111
		Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Toleransi Umat Beragama	0,968
			Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas	80,71
		Terwujudnya Mayarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,40%

Sumber : Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029

4.2.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026 telah diserahkan melalui surat pengantar Sekretariat DPRD Kota Surabaya kepada Wali kota Surabaya Nomor 000.7.2/1283/436.5/2025 atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Selanjutnya Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam RKPD Kota Surabaya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.6
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026

No		Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
1	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**					
	1	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	750 m	JL Barat Kampung Dk.KUKUN RT 01 RW 05 Kel Babat Jerawat ,Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
	2	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	80 meter	Jalan UTAMA Dk.KUKUN RT 01 RW 05 Kel Babat Jerawat Kec Pakal	Teralokasi TA. 2026
	3	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	400 meter	Jalan Rejosari Gang Pesantren,RT 04 RW 03 Kel Benowo ,kec Pakal	Teralokasi TA. 2026
	4	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	300 meter	Kandangan Rejo Gang 8 , RT 06 RW 01 Kel Kandangan, Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026
	5	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	285 meter	Kandangan Rejo Gang Raya, RT 06 RW 01, Kel Kandangan Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026
	6	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	300 M	JL. GADUKAN TIMUR BARU RT 05 RW 04 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
	7	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	150 M	JL. KALIBUTUH BARAT 3 NO. 81-89 RT 01 RW 06 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
	8	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	135 M	JL. GRESIK PPI 7 RT 09 RW 04 KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
	9	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	145 M	JL. GRESIK PPI 7 RT 09 RW 04 KELURAHAN KEMAYORAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				KECAMATAN KREMBANGAN	
10	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	50 M	JL. GRESIK PPI BUNTU RT 04 RW 04 KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN KREMBANGAN	Teralokasi TA. 2026
11	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	135 M	JL. GRESIK PPI 4 RT 08 RW 04 KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
12	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	135 M	JL. GRESIK PPI 5 RT 09 RW 04 KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
13	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	300 M	JL. JEPARA PPI DEPAN GUFPALRAH RW 04 KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN KREMBANGAN	Teralokasi TA. 2026
14	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	400 M	JL. JEPARA GANG 1 RT 01 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN	Teralokasi TA. 2026
15	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	400 M	JL. JEPARA GANG 8 RT 08 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
16	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	600 M	JL. JEPARA GANG 9 RT 09 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
17	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	200 M	JL. JEPARA GANG 10 RT 09 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
18	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	500 M	SEPANJANG JALAN JEPARA RW 01 KELURAHAN JEPARA	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				KECAMATAN BUBUTAN.	
19	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	125 M	JL. TEMBOK LOR GANG KALIMIR RT 05 RW 03 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
20	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	188 M	JL. TEMBOK LOR GANG KALIMIR RT 05 RW 03 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN	Teralokasi TA. 2026
21	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	188 M	JL. TEMBOK LOR GANG GAMBUHAN RT 05 RW 03 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN	Teralokasi TA. 2026
22	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	125 M	JL. TEMBOK LOR MBAILA RT 05 RW 03 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
23	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	188 M	JL. TEMBOK LOR GANG MBAILA RT 05 RW 03 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
24	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 M	JL. TEMBOK LOR GANG FAROHA TEMBUSAN GANG GAMBUHAN RT 05 RW 03 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
25	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	160 M	JL. KREMBANGAN MESIGIT GANG 1 RT 03 RW 06 KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
26	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	110 M	JL. KREMBANGAN MESIGIT GANG 1 RT 04 RW 06 KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
27	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	50 M	JL. KREMBANGAN MESIGIT GANG 1 RT 01 RW 06 KELURAHAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				KEMAYORAN KECAMATAN KREMBANGAN.	
28	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	80 M	JL. SEMARANG 128 RT 01 RT 05 RW 03 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
29	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	20 M	JL. SEMARANG 128 RT 02 RW 08 KELURAHAN BUBUTAN KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
30	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	20 M	JL. SEMARANG 128 RT 03 RW 08 KELURAHAN BUBUTAN KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
31	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	30 M	JL. SEMARANG 128 RT 04 RW 08 KELURAHAN BUBUTAN KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
32	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	12 M	JL. ASEM JAYA RT 02 RW 04 LAPANGAN ASEM JAYA KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
33	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	70 M	JL. MARGORUKUN GANG 3 RT 05 RW 02 KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
34	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	78 M	JL. MARGORUKUN GANG 2 RT 05 RW 02 KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
35	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	125 M	JL. MARGORUKUN GANG LEBAR RT 05 RW 02 KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
36	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	360 M	JL. KEBALEN KULON 6 NO. 28 RT 06 RW 06 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN.	Teralokasi TA. 2026
37	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	88 M	JL. KEBALEN KULON 6 NO. 28 RT 06 RW 06 KELURAHAN KREMBANGAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN	
38	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	360 M	JL. KEBALEN KULOJN 5 RT 05 RW 06 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN	Teralokasi TA. 2026
39	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	105 M	JL. KEBALEN KULON 5 RT 05 RW 06 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN	Teralokasi TA. 2026
40	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	360 M	JL. KEBALEN KULON 2 RT 02 RW 06 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN	Teralokasi TA. 2026
41	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	133 M	JL. KEBALEN KULON 2 RT 02 RW 06 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN.	Teralokasi TA. 2026
42	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	360 M	JL. KALIMAS BARAT 4 NO. 17 RT 05 RW 09 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN.	Teralokasi TA. 2026
43	Pembangunan Jalan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	120 M	JL. KALIMAS BARAT 1B RT 02 RW 09 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN	Teralokasi TA. 2026
44	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	360 M	JL. KALIMAS BARAT 1B RT 02 RW 09 KELURAHAN KREMBANGAN UTARA KECAMATAN PABEAN CANTIAN.	Teralokasi TA. 2026
45	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	210 M	JL. JEPARA GANG 10 RT 09 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
46	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	800 M	JL. TUBAN RW 03 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
47	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	95 M	JL. PANDEGILING 2 NO. 19 RT 02 RW 07 KELURAHAN TEGALSARI	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				KECAMATAN TEGALSARI.	
48	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Si	100 Meter	Jl. Sumbersari RT 01 RW O2 Kel.Sumberrejo Kec.Pakal.	Teralokasi TA. 2026
49	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 10 ton	220 Meter	JL.Dukuh Jawu Kidul, RT 02 RW 03 Kel Sumberrejo, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
50	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	100 meter	Jl.Dk.Kauman RT 03 RW 02 , Kel Sumberrejo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
51	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	130 meter	Sumbersari Baru Gang 1. RT 01 RW 02, Kel Sumberrejo Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
52	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	90 meter	Sumbersari Baru Gang 2 RT01 RW 02, Kel Sumberrejo Kec, Pakal	Teralokasi TA. 2026
53	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	81 M	WONOKUSUMO JAYA GG 2, RT2 RW 11, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
54	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	130 meter	Sumbersari Baru Gang 3. RT 01 RW 02, Kel Sumberrejo, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
55	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m	TENGGUMUNG WETAN GANG 03, RT/RW: 003/08, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
56	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	150 m	WONOSARI WETAN 1D ,RT/RW: 13/08, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
57	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	250 meter	Kendung Rejo Gang 1A, RT 01 RW 08, Kel Sememi Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
58	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	250 meter	Kendung Rejo Gang 1C RT 01 RW 08, Kel, Sememi Kec, Benow,	Teralokasi TA. 2026
59	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	250 meter	Kendung Rejo Gang 1D RT 01 RW 08, Kel Sememi Kec Benowo	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		40/60 dengan Cover Gandar 5 ton			
60	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	250 meter	JL.Beji PDAM 4, RT 04 RW 04 Kel Pakal Kec Pakal	Teralokasi TA. 2026
61	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	600 meter	JL.Beji PDAM 5 RT 04 RW 04 Kel Pakal Kec Pakal	Teralokasi TA. 2026
62	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	400 meter	JL.Beji PDAM 6 RT 04 RW 04 Kel Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
63	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	110 meter	JL.Beji PDAM 7 RT 04 RW 04 Kel Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
64	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 6 m	24 m2	Sumbersari RT 01 RW 02, Kel Sumberrejo ,Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
65	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	50 meter	Dk.Kauman Gang Balai RW, RT 03 RW 04, Kel Sumberrejo Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
66	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	100 M	Kauman Madya RT 03 RW 02 Kel Sumberrejo Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
67	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	130 meter	Sumbersari RT 02 RW 03 , Kel Sumberrejo Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
68	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	75 meter	JL.Pesarehan Behji, RT 02 rw 04 Kel Pakal, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
69	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	50 meter	Jl.Pesantren. RT 02 RW 03 Kel.Pakal Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026
70	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	240 meter	Gang MASJID Beji , RT03 RW 04 Kel. Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
71	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	280 M	Jl. Kalilom Lor Indah Gg Dahlia RT 07 RW 10 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
72	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	500 M	Jl. Kalilom Lor Indah Gg Palem RT 07 RW 10 Kelurahan Tanah Kali	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		30/40 dengan Cover Gandar 5 ton		Kedinding Kecamatan Kenjeran.	
73	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	75 Meter	Jalan Pakal Barat 2A Kluwung, RT 02 RW 03, Kel Pakal. Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026
74	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	75 Meter	Jl. Dukuh Jerawat Gang 3 RT 03 RW 03 , Kel Babat Jerawat, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
75	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	100 Meter	Jl.Dukuh Jerawat Gang 1 , RT 01 RW 03, Kel Babat Jerawat, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
76	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	130 Meter	Jl.Dukuh Jerawat Gang 4, RT 04 RW 03, Kel Babat Jerawat, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
77	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	330 Meter	Pakal Barat RT 03 RW 04, Kel.Pakal 2 Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026
78	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	100 Meter	Rejosari Makmur Gg 2B, RT 09 RW 03, Kel Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
79	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	178 Meter	Rejosari Makmur Gg 2C, RT 09 RW 03, Kel Benowo, Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
80	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	140 meter	Dk.KUKUN Jalan Sendang Bulu Asri ,RT 01 RW 05 Kel Babat Jerawat Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
81	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	75 meter	DK.KUKUN Gang Makam , RT 01 RW 05 Kel Babat Jerawat, Kec. Pakal	Teralokasi TA. 2026
82	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	100 meter	DK.KUKUN, Gang Telaga, RT01 RW 05 Kel Babat Jerawat Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026
83	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	60 Meter	DK.KUKUN Gang Timur POS Kamling. RT 01 RW 05 , Kel Babat Jerawat. Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026
84	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	130 meter	DK.KUKUN, Jalan puncak Palma2, RT 01 RW 05 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026
85	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	440 Meter	JL.Beji Rahayu RT 02 RW 04, Kel. Pakal Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		40/60 dengan Cover Gandar 5 ton			
86	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	50 meter	JL.Beji Rahayu Kavling 3, RT 02 RW 04, Kel Pakal Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
87	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	50 meter	JL.Beji Rahayu Kavling 1, RT 02 RW 03 Kel Pakal Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
88	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	600 meter	Jalan Makam BEJI, RT 03 RW 04 Kel Pakal Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
89	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	250 Meter	Dk. Kawal Kalikendal, Gang Blimbing, RT 05 RW 02. Kel.Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis.	Teralokasi TA. 2026
90	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	250 Meter	Dk.Kawal Kalikendal, Gang Klengkeng, RT 05 RW 02. Kel.Pradah Kalikendal. Kec Dukuh Pakis.	Teralokasi TA. 2026
91	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	230 Meter	Dk. Kawal Kalikendal, Gang Gereja. RT 05 RW 02 , Kel. Pradah Kalikendal. Kec.Dukuh Pakis.	Teralokasi TA. 2026
92	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	80 Meter	Beji Rahayu 6B, RT 02 RW 04, Kel Pakal. Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
93	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 120/120 dengan Cover Gandar 5 ton	2000 Meter	JL.Sumberrejo Makmur ,Gang 6.7.8.9.10 dan 11. RT 06 RW 01, Kel Sumberrejo, Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
94	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	400 meter	JL.Sumberrejo Makmur Gang 10, RT 06 RW 01, Kel Sumberrejo, Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
95	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	400 Meter	JL.Sumberrejo Makmur 11, RT 06 RW 01, Kel Sumberrejo, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
96	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	60 Meter	JL.Sumberrejo Gang 6, RT 06 RW 01, Kel Sumberrejo Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
97	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 15 ton	500 meter	JL.Raya Kendung RW 03, Kel Sememi, Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026
98	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	200 Meter	Kendung Gang 7 RT 05 RW 03, Kel Sememi, Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		40/60 dengan Cover Gandar 5 ton			
99	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	40 meter	Kendung Gang 4A, RT 04 RW 03 Kel Sememi Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
100	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	250 meter	JL. Bandarejo Gang 6 RT 11 RW 05 Kel Sememi Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
101	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	100 meter	Bandarrejo Gang 5, RT 11 RW 05 Kel Sememi Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
102	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	240 meter	Bandarrejo Gang Candi 3, RT 11 RW 05 Kel Sememi Kel Benowo,	Teralokasi TA. 2026
103	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	86 meter	Dukuh Buntaran RT 02 RW 04 Kel Manukan Wetan , Kec Tandes,	Teralokasi TA. 2026
104	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	180 M	BULAK RUKEM 3, RT/RW: 005/05 ,Kel. wonokusumo, Kec. semampir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
105	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	15 M	KALIMAS BARU 3 LEBAR BARAT 45,RT/RW:007/07, Kel. Tanjung perak, Kec. Pabean cantian, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
106	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	400 meter	JL.Raya BEJI RT 0 1 RW 04, Kel Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
107	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	600 meter	JL,Sumberrejo 1, RT 01 RW 01 Kel Sumberrejo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
108	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	141 meter	Jalan Wiyung Gg4 pertolongan, RT 02 RW 06, Kel Wiyung Kec Wiyung,	Teralokasi TA. 2026
109	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	310 meter	Jl,Wiyung 1, RT 02 RW 01 Kel Wiyung Kec Wiyung,	Teralokasi TA. 2026
110	Pembangunan Jalan	Pembangunan Lantai Atas Pedestrian	600 meter	JL.Sumberrejo1, RT 01 RW 01 Kel Sumberrejo, Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
111	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	900 m2	Jl. Dukuh Bulak Banteng Suropati 3, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
112	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	900 m2	Dukuh Bulak Banteng Suropati 3 , Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
113	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 15 ton	220 Meter	Dk.Jawu Kidul RT 02 RW 03, Kel Sumberrejo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
114	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	120 meter	Klakah Rejo Gang 3C RT 04 RW 08, Kel Kandangan Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026
115	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 120/120 Gandar 15 ton	200 Meter	Klakah Rejo RT 02 RW 08, Kel Kandangan Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
116	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	425 M	Jl. Mustika Baru 63	Teralokasi TA. 2026
117	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	400 m	JL. WONOKITRI BESAR kel. Pakis kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
118	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 10 ton	4 m	Jambangan I-A dan Jambangan I	Teralokasi TA. 2026
119	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	286 m	JL. BANYU URIP LOR 1 RT 1, RW 6 kel. Kupang Krajan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
120	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	233 m	JL. PAKIS 2 RT 13, RW 6 kel. Pakis kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
121	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	420 m	JL. PAKIS 2 RT 13, RW 6 kel. Pakis kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
122	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	80 m	JL. KEMBANG KUNING KRAMAT 2 RT 14, RW 6 kel. Pakis kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
123	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	515 m	JL. PAKIS GUNUNG 1 RT 10, RW 4 kel. Pakis kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
124	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	120 m	JL. PATTIMURA RT 5, RW 3 (MAKAM) kel. Sonokwijenan kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
125	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	600 m	JL. KEDUNG ANYAR 7 RT 6, RW 3 Kel. Sawahan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
126	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	740 m	JL. DONOWATI 2 RT 4, RW 1 kel.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		40/60 dengan Cover Gandar 5 ton		Sukomanunggal kec. Sukomanunggal	
127	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	360 m	SEPANJANG JALAN DONOWATI kel. Sukomanunggal kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
128	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	142 M	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN1A, RT/RW:05/06, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
129	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	125 M	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN1A, RT/RW:05/07, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
130	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	150 M	TANAH MERAH SAYUR 9/5, RT/RW: 023/004, Kel. Tanah kalikedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
131	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	250 meter	Lidah Kulon RT 01 RW 05. Kel Lidah Kulon Kec Lakarsantri.	Teralokasi TA. 2026
132	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	600 M	Kalimas baru 3 GG 1/6, RT/RW: 001/006, Kel. Tanjung perak, Kec. Pabean cantian	Teralokasi TA. 2026
133	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	275 M	DUKUH BULAK BANTENG PERINTIS UTAMA GANG III, RT/RW:002/07, Kel. Bulak banteng, Kec. Kenjeran, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
134	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	115 meter	Bandarrejo Gang Asri 6, RT 10 RW05 Kel Sememi Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026
135	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	72 meter	Bandarrejo Gang Asri 8 RT 10 RW05, Kel Sememi Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026
136	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	40 meter	Bandarrejo Gang Asri Jaya 1, RT 10 RW 05 Kel Sememi Kel Benowo,	Teralokasi TA. 2026
137	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	37 meter	Bandarrejo Gang Asri Jaya 2 RT 10 RW 05, Kel Sememi Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
138	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	40 meter	Bandarrejo Gang Asri Jaya 4, RT 10 RW 05 Kel Sememi Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
139	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	137 meter	Bandarrejo Gang Musholla, RT 10 RW05 Kel Sememi Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
140	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	317 meter	Kendung Gang1 Blok.H. RT01 RW 03, Kel Sememi Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
141	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	450 meter	Kendung Gang 7 RT 05 RW 03, Kel Sememi Kec Benowo,	Teralokasi TA. 2026
142	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	50 meter	JL.Tambak Dono Gang Delima, RT 02 RW 03 Kel Sumberrejo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
143	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 12 m	36 m2	Dk.Jawu Kidul RT 02 RW 03 Kel Sumberrejo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
144	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	80 meter	Pakal Barat Lapangan Gang 2A, RT 04 RW 03 Kel Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
145	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	80 meter	Pakal Barat Lapangan Gang 5, RT 04 RW 03 Kel Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
146	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	119 METER	KEJAWAN LOR GANG 5A RT 5 RW 2 KEL KENJERAN KEC	Teralokasi TA. 2026
147	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	400 METER	BULAK KALITINJANG BARU RT 4 RW 6 KEL BULAK KEC BULAK,	Teralokasi TA. 2026
148	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	125 M	Tenggumung karya lor Gg tengah 2 RT 007/RW 009, Kelurahan Wonokusumo, kec semampir	Teralokasi TA. 2026
149	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	310 meter	Jl. Banyu Urip Kidul VI Surabaya	Teralokasi TA. 2026
150	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	100 METER	TAMBAK WEDI BARU GANG 17 SELATAN RT 11 RW 4 KELURAHAN TAMBAK	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				WEDI , KECAMATAN KENJERAN	
151	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	105 METER	TAMBAK WEDI BARU 18 UTARA RT 9 RW 4 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
152	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	170 METER	TAMBAK WEDI BARU BARAT 8 . RT 9 RW 4 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
153	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	327 METER	TAMBAK WEDI BARU GG 16 UTARA RT 4 RW 4 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
154	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	345 METER	TAMBAK WEDI BARU GANG 14 RT 2 RW 4 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
155	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	210 METER	TAMBAK WEDI GANG LEBAR RT 2 RW 1KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
156	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	235 METER	TAMBAK WEDI LEBAR BLOK M RT 15 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
157	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	161 METER	JALAN TAMBAK WEDI TENGAH UTARA RT 18 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
158	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	315 METER	TAMBAK WEDI TENGAH SELATAN 3 RT 18 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
159	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	174 METER	TAMBAK WEDI BARU BARAT 8 RT 18 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
160	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	175 METER	TAMBAK WEDI GANG LANGGAR RT 2 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
161	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	190 METER	TAMBAK WEDI GANG SEJAHTERA RT 8 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
162	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	468 METER	TAMBAK WEDI JAYA 3 RT 5 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
163	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	25 METER	TAMBAK WEDI LAMA GANG 6B RT 3 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
164	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	30 METER	TAMBAK WEDI LAMA GANG 6C RT 3 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
165	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	255 METER	TAMBAK WEDI TENGAH GANG 7 RT 7 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
166	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	180 METER	TAMABAK WEDI MASJID GANG 2 RT 4 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
167	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	180 METER	TAMBAK WEDI MASJID GANG 4 RT 4 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
168	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	102 METER	TAMBAK WEDI GANG 4 RT 2 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
169	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	110 METER	TAMBAK WEDI GANG 1 RT 1 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
170	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	50 METER	TAMBAK WEDI LAMA GANG 2 RT 1 RW 2 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
171	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40	50 METER	DUKUH BULAK BANTENG GANG 2C BUNTU RT 2 RW 6	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi		KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	
172	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	50 METER	DUKUH BULAK BANTENG GANG 2 BUNTU RT 2 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
173	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	70 METER	DUKUH BULAK BANTENG GANG 2 RT 2 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
174	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	267 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN 5 RT 1 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
175	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 5 ton	8 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN 3 RT 3 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
176	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	220 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN GANG 1 BUNTU RT 2 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
177	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	30 METER	DUKUH BULAK BANTENG PANDU 1 RT 4 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
178	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	310 METER	DUKUH BULAK BNATENG PATRIOT 3A RT 5 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
179	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 150/200 dengan	8 METER	DUKUH BULAK BANTENG PANDU 4 RT 6 RW 1	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		Cover, Gandar 20 ton		KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	
180	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	550 METER	DUKUH BULAK BANTENG GANG ENCAP RT 7 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
181	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	155 METER	DUKUH BULAK BANTENG PATRIOT 4 RT 8 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
182	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	175 METER	DUKUH BULAK BANTENG PATRIOT 7 RT 9 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
183	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	272 METER	DUKUH BULAK BANTENG PANDU 3 RT 10 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
184	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	110 METER	DUKUH BULAK BANTENG TIMUR 4 RT 3 RW 4 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
185	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	177 METER	DUKUH BULAK BANTENG TIMUR 8 RT 4 RW 4 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
186	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	177 METER	DUKUH BULAK BANTENG TIMUR 9 RT 4 RW 4 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
187	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	121 METER	DUKUH BULAK BANTENG TIMUR 7 RT 4 RW 4 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
188	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	176 METER	DUKUH BULAK BANTENG TIMUR 10 RT 4 RW 4 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
189	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	150 Meter Persegi	Jl. Semarang No. 57, RT 01, RW 03, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
190	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	120 Meter Persegi	Jl. Lamongan No. 5, RT 01, RW 03, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
191	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	121 meter	Benowo Tegal Gang 5, RT 06 RW 02 Kel Benowo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
192	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	59 meter	Benowo Tegal Gang 6, RT 06 RW 02 Kel Benowo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
193	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	229 m	WILAYAH RT.01 RW. 08 KEL. SIMBAR	Teralokasi TA. 2026
194	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 20 ton	450 M	WILAYAH RT.01 RW. 08 KEL. SIMOMULYO BARU	Teralokasi TA. 2026
195	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 5 ton	205 meter	Jl. Jambangan 50 RT. 05 RW. 02	Teralokasi TA. 2026
196	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	195 M	SEPANJANG JL. SIMO GUNUNG BARAT TOL 3, SIMOMULYO, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
197	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	100 meter	Jl. Jambangan V RT. 05 RW. 02	Teralokasi TA. 2026
198	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 20 ton	200 M	SEPANJANG JL. SIMO GUNUNG BARAT TOL 3, SIMOMULYO, SUKOMANUNGGAL	Teralokasi TA. 2026
199	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom	35 M	JL. RAYA SIMOREJO	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		200/200 Gandar 15 ton			
200	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	220 M	SIMO MAGEREJO BARAT NO. 12, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
201	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	15 meter	Jl. Kendangsari No. 133	Teralokasi TA. 2026
202	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	210 M	Putat Gede Timur 4 RT 04 RW 02 Kelurahan Putat Gede	Teralokasi TA. 2026
203	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	142 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN 1A , RT 5 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
204	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	125 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN 2A , RT 5 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
205	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	288 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN 5A , RT 6 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
206	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	70 METER	DUKUH BULAK BANTENG GANG 2 RT 1 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
207	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	58 METER	DUKUH BULAK BNATENG GANG 1 . RT 1 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
208	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	50 METER	DUKUH BULAK BANTENG GANG 1 MAKAM RT 1 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
209	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	152 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN GANG 3A . RT 3 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
210	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	188 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN GANG 11A . RT 7 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
211	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	195 METER	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN GANG 13A , RT 7 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
212	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm)	800 METER	JL RAYA BULAK BANTENG BANDAREJO . RT 1 RW 3 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
213	Pembangunan Jalan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 100/100 Gandar 15 ton	800 METER	JL RAYA BULAK BANTENG BANDAREJO . RT 1 RW 3 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
214	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	85 METER	BULAK BANTENG BANDAREJO , RT 2 RW 3 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
215	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	105 METER	BULAK BANTENG BANDAREJO 4, RT 3 RW 3 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
216	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	165 METER	JL BULAK BANTENG RAYA MASJID . RT 1 RW 2 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
217	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	81 METER	BULAK BANTENG LOR GANG BOZEM . RT 3 RW 2 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
218	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	128 METER	BULAK BANTENG LOR GANG BHINEKA E . RT 5 RW 8 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
219	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	350 METER	BULAK BNATENG LOR 1 GANG BAROKAH . RT 13 RW 8 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
220	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	170 METER	DUKUH BULAK BANTENG GANG PRATAMA RAYA . RT 11 RW 8 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
221	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	455 METER	BULAK BANTENG LOR GANG BHINEKA 3 BARAT . RT 9 RW 8 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
222	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	200 METER	BULAK BANTENG LOR GANG BHINEKA 4 TIMUR . RT9 RW 8 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
223	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	450 METER	DUKUH BULAK BANTENG PERINTIS UTAMA . RT 3 RW 7 . KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
224	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	300 METER	DUKUH BULAK BANTENG PERINTIS GANG LEBAR RT 15 RW 7 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
225	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60	440 METER	DUKUH BULAK BANTENG PERINTIS UTAMA 3 . RT 2 RW 7	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi		KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	
226	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	185 METER	DUKUH BULAK BANTENG PERINTIS UTAMA 3A. RT 2 RW 7 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
227	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	400 METER	DUKUH BULAK BANTENG PERINTIS UTAMA 1 RT 7 RW 7 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
228	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	385 METER	TAMBAK WEDI GANG 6 . RT 3 RW 3 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
229	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	355 METER	TAMBAK WEDI BARU GANG 3 . RT 5 RW 3 . KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
230	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	335 METER	TAMBAK WEDI BARU GANG 4 . RT 5 RW 3 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
231	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	2 METER	JALAN TAMBAK WEDI BARU . RT 2 RW 3 . KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
232	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	405 METER	TAMBAK WEDI BARU GANG 7 . RT 2 RW 3 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
233	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	345 METER	TAMBAK WEDI BARU TEMBUS TAMBAK WEDI TENGAH RT 10 RW 3 KELURAHAN TAMBAK WEDI KWCAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
234	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	55 Meter persegi	Kupang praupan pasar gang 3, RT 03, RW 06, Kel. DR. Soetomo	Teralokasi TA. 2026
235	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3	152 m2	Jl. Dukuh Bulak Banteng Patriot 6	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi			
236	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	130 m	Jl. Kebonsari LVK 1 - RT 04 RW 03 (082140882938 - Pak Suhadi)	Teralokasi TA. 2026
237	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	60 M	LEMPUNG PERDANA 31-A GG.III RT.3 RW.5, MANUKAN KULON, TANDES, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
238	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	65 M	PULO TEGAL SARI GANG 5B NO. 51, KEL. WONOKROMO, KEC. WONOKROMO, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
239	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	460 M	SIMO GUNUNG BARAT TOL DI PEMASANGAN PAVING RT.01-08, SIMOMULYO, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
240	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	68 M	SIMOREJOSARI A GG.XI RT. 07 RW. 06, SIMOMULYO, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
241	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 15 ton	200 M	SIMOREJOSARI A GG.XI RT.07 RW.06, SIMOMULYO, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
242	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover, Gandar 5 ton	160 Meter	Jl. Kendangsari Gg 12 RT 06/RW 05 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Teralokasi TA. 2026
243	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	275 M	Jl.KarangTembok V, RT. 05/RW. 04 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir.	Teralokasi TA. 2026
244	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	300 M	Kedung Mangu Selatan 1A RT 014/Rw 003 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran.	Teralokasi TA. 2026
245	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	66 M2	KALIANAK GANG RAHMAT 4 RT 10 RW 07 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN	Teralokasi TA. 2026
246	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40	112 M2	KALIANAK GANG RAHMAT 5 RT 10 RW 07 KELURAHAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi		MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN,	
247	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	95 M2	KALIANAK GANG RAHMAT 6 RT 10 RW 07 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN,	Teralokasi TA. 2026
248	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	84 M2	KALIANAK GANG RAHMAT 7 RT 10 RW 07 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN,	Teralokasi TA. 2026
249	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	120 M2	KALIANAK GANG RAHMAT 8 RT 10 RW 07 KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN,	Teralokasi TA. 2026
250	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	125 M	SIMO PRONAJAYA I/1-D VIII, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
251	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	395 m	sidosermo 3 RT 01 RW 05	Teralokasi TA. 2026
252	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 120/120 Gandar 20 ton	8 m	sidosermo v rt 02 rw 05	Teralokasi TA. 2026
253	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m2	gunung anyar gang I sebelah barat jembatan hingga musholla RT 05 RW 2	Teralokasi TA. 2026
254	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m2	gunung anyar gang II sebelah utara RT 05 RW 2	Teralokasi TA. 2026
255	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	140 m	Sidotopo wetan RT.04 RW.1 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
256	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	75 m	SIDOTOPO WETAN RT.11 RW.01 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
257	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	160 m	BULAK BANTENG BARU FLAMBOYAN 1 RT.3 RW.7 SIDOTOPO KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
258	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 20 ton	350 M	SIMO PRONAJAYA I/1-D, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
259	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	280 M	SIMO PRONAJAYA I/1-D GG.IV	Teralokasi TA. 2026
260	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 15 ton	160 M	SIMO PRONAJAYA I/1-D GG. V, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
261	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	160 M	SIMO PRONAJAYA I/1-D GG. VI, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
262	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	120 m	BULAK BANTENG MADYA GG.4 (SISI TIMUR) RT.4 RW.9 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
263	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	250 m	BULAK BANTENG MADYA GG.5 RT.5 RW.09 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
264	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m	PLATUK KARYA BAKTI RT.3 RW.2 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
265	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m	PLATUK KARYA BAKTI RT.05 RW.02 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
266	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m	PLATUK KARYA BAKTI RT.06 RW.02 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
267	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m	PALTUK KARYA BAKTI RT.06 RW.02 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
268	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	160 m	Jl.Tambak Asri Sedap Malam RT.18 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
269	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	157 m	Jl.Tambak Asri Gg.25 RT19 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
270	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	180 m	RANDU BARAT GG 3(SISI TENGAH) RT.4 RW.12 SIDOTOPO KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
271	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	150 m	Jalan Ngagelrejo utara GG VII RT 9 RW 1 Kel. Ngagelrejo / Kec. Wonokromo / Kota Surabaya / Prov. Jawa TImur	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
272	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 100/100 Gandar 15 ton	6 METER	Jl Kalijudan HKSN 1 RT 01 RW 01 Kel kalijudan kec mulyorejo	Teralokasi TA. 2026
273	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	90 METER	Jln. Bulak Cumpat Timur Gg. 1 RT 01 RW 02	Teralokasi TA. 2026
274	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	375 METER	Jln. Bulak Cumpat Timur Gg. 2 RT 1 RW 2	Teralokasi TA. 2026
275	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	500 METER	Jln. Bulak Cumpat Timur Gg. 3 RT 01 RW 02	Teralokasi TA. 2026
276	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	500 METER	Jln. Bulak Cumpat Timur Gg. 4 RT 01 RW 02	Teralokasi TA. 2026
277	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	300 METER	Jln. Bulak Cumpat Barat RW 02 KEL BULAK KEC BULAK,	Teralokasi TA. 2026
278	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	1500 METER	Jln. Bulak Rukem Timur II-F RT 5 RW 7	Teralokasi TA. 2026
279	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	135 METER	BULAK RUKEM TIMUR RW 01 (LANGSUNG HUB CONTACT	Teralokasi TA. 2026
280	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	180 m	DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN GG.9A RT.4 RW.6 BULAK BANTENG KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
281	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	202 m	Jl.Tambak Asri Mawar RT.21 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
282	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	110 m	BULAK SARI,BERSEBELAH DENGAN WONOSARI GG KB RT.01 RW.06 WONOKUSUMU SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
283	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	147 m	Jl.Tambak Asri RT.01 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
284	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40	152 m	Jl.Tambak Asri Kembang Turi RT.26 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi			
285	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	446 m	Jl.Tambak Asri Dahlia RT.32 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
286	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	214 m	TENGGUMUNG WETAN GG.4 RT.04 RW.08 WONOKUSUMO SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
287	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	188 m	Jl.Tambak Asri Gading RT.29 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
288	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	75 m	Jl.Tambak Asri Melati RT.04 Rw.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
289	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	131 m	Jl.Tambak Asri Wijaya Kusuma RT.24 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
290	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	102 m	Jl,Tambak Asri Cempaka 2,3,4 RT.06 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
291	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	121 m	KOMPLEK SIDOTOPO DIPO GG.3 RT..4 RW.3 SIDOTOPO SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
292	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	393 m	Jl.Tambak Asri Gg,13,15,16 RT07 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
293	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	80 m	Jl.Tambak Asri Kedung Turi RT.26 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
294	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	345 meter	Jalan Bibis - Jalan Benowo	Teralokasi TA. 2026
295	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	150 M	RANDU TIMUR LEBAR 1A, RT/RW:006/10, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
296	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40	151 M	RANDU TIMUR AGUNG GG MAWAR, RT/RW:015/10, Kel.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi		Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, surabay	
297	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	120 M	Bulak rukem gg 1 Masjid, RT/RW:001/005, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
298	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	50 M	Bulak rukem gg 1 Buntu depan Masjid, RT/RW:001/005, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
299	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	50 M	Bulak rukem gg 1 Buntu No 14, RT/RW: 001/005, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya,	Teralokasi TA. 2026
300	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	600 meter	Kendangsari Gang III RW03 RT03, Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Teralokasi TA. 2026
301	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	250 Meter	Manukan Thohirin Gg 1 RT 08 RW 10 Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
302	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	120 Meter	Manukan Thohirin RT 08 RW 10, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
303	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	40 meter	Jl. Babadan 3A RT Gundih Kec Bubutan	Teralokasi TA. 2026
304	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 Meter	Manukan Wasono 2 RT 09 RW 08. Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
305	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	340 Meter	Manukan Tirta 5 RT 08 RW 8, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
306	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	270 Meter	Lokasi 1: Manukan Wasono Gg 6	Teralokasi TA. 2026
307	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	150 Meter	Manukan Tirta RW 08 Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
308	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	120 Meter	Jl. Bandarejo 1 (Gg Sumur Asin RT 08 RW 05) Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
309	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3	37 Meter	Jl. Bandarejo Gg 1 (Gg Kelinci) RT 08 RW 05	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi		Kel. Sememi, Kec. Benowo	
310	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	272 Meter	Jl. Semi Gg 8 RT 01 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
311	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	75 Meter	Balongsari Tama Brat Gg 7 (Sisi Sebelah Utara) RT 03 RW 02 Kel. Balongsari, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
312	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 5 ton	330 M	Pakis Wetan Gang 6 RT.12 RW.03 Kel. Pakis Kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
313	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	330 M	Simorejo Timur 1 No 81 RT.01 RW.01 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
314	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	930 Meter	Jl. Raya Sambisari RT 01 RW 03 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep	Teralokasi TA. 2026
315	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	95 Meter	Jl. Sambisari 2A RT 01 RW 03 Kel. Lontar, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
316	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 5 ton	200 Meter	Jl. Sambisari Ujung Kulon RT 06 RW 03 Kel. Lontar Kec. Sambikerep	Teralokasi TA. 2026
317	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	120 m	Jl. Kupang Gn Jaya 9A, kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
318	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 120/120 dengan Cover Gandar 15 ton	900 m	Jl Demak, Kec. Bubutan	Teralokasi TA. 2026
319	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	86 Meter	Jl. Pondok Benowo Indah Blok DI - DJ (sisi kanan), Blok DK-DJ (Sisi kiri) RT 04 RW 14 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal	Teralokasi TA. 2026
320	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	163 m	Jl. Bratang Wetan IV, Kec. Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
321	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	78 Meter	Jl. Pondok Benowo Indah Blok DK-DL (Sisi Kanan), Blok DL (Sisi Kiri)	Teralokasi TA. 2026
322	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	105 Meter	Jl. Pondok Benowo Indah Blok CS RT 04	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		40/60 dengan Cover Gandar 10 ton		RW 14 Kel. Babat Jerawat, Kec. Tandes	
323	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 120/120 dengan Cover Gandar 5 ton	240 Meter	Pondok Benowo Indah Blok CS-CR RT 04 RW 14 Kel. Babat Jerawat, Kec Pakal	Teralokasi TA. 2026
324	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	450 Meter	Pondok Benowo Indah Blok FD, FG, FH, RT 04 RW 12 KEl. Babat Jerawat, Kec. Pakal	Teralokasi TA. 2026
325	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	165 M	Jl Tambak Mayor VI-C No 1-34 RT 11 RW 04 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo	Teralokasi TA. 2026
326	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	56 M	Jl Tambak Mayor VI-C 34-46 RT 11 RW 04 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo	Teralokasi TA. 2026
327	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	115 Meter	Jl. Bumi Sari Praja Selatan Gg 4 Blok H RT 12 RW 05 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep	Teralokasi TA. 2026
328	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	500 Meter	Jl. Bumi Sari Praja Gg 7 RT 08 RW 05 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep	Teralokasi TA. 2026
329	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	300 M	Jojoran blok 3A	Teralokasi TA. 2026
330	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 15 ton	120 M	SIMO PRONAJAYA I/1-D GG. VII, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
331	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 15 ton	140 M	SIMO PRONAJAYA I/1-D GG. VIII, SUKOMANUNGGAL, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
332	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	375 M	Perbatasan RW 5,8,13 Mojo	Teralokasi TA. 2026
333	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	320 METER	kapas madya 2a RT2 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
334	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	320 METER	kapas madya 2b RT 4 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
335	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	300 METER	kapas madya 2d RT 5 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
336	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	250 METER	kapas madya 2e1 RT 7 RW 1 kelurahan	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		30/40 dengan Cover Gandar 5 ton		kapas madya baru kecamatan tambak sari	
337	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	125 METER	kapas madya 2f RT 7 & RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
338	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	125 METER	kapas madya 2g RT 7 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
339	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	400 METER	kapas madya 3e RT 12 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
340	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	200 METER	kapas madya 3f RT 12 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
341	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	400 METER	kapas maya baru 3g RT 12 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
342	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	400 METER	kapas madya 1 RT 9 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
343	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	500 METER	sidotopo wetan baru 1 RT 1 RW 6 kelurahan sidotopo wetan kecamatan kenjeran	Teralokasi TA. 2026
344	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	1350 METER	sidotopo wetan baru gg 2 RT 2 RW 6 kelurahan sidotopo wetan kecamatan kenjeran	Teralokasi TA. 2026
345	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	300 METER	sidotopo wetan baru rt 6 rw 6 kelurahan sidotopo wetan kecamatan kenjeran	Teralokasi TA. 2026
346	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	64 METER	JL. TENGGILIS MULYA IB NO. 10H RT 01 RW 06	Teralokasi TA. 2026
347	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 15 ton	455 m	Perempetan barat dan timur wilayah RT 02 RW 14, Medayu Utara Gang 3, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
348	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	210 m	Medayu Utara Gg 13B, RT 01 RW 14 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
349	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	280 m	Jl Bulak Setro Utara RT 03 RW 04, Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
350	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	350 m	Jl Bulak Setro 1, RT 01 RW 04, Kel. Bulak, Kec Bulak	Teralokasi TA. 2026
351	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	529 m	Tambak Wedi Barat Gang 2, 3, dan 4, RT 05 RW 01	Teralokasi TA. 2026
352	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	75 m	Bulak Cumpat Srono III, RW 02 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
353	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	89 m	Bulak Cumpat Barat Gang 8, RT 09 RW 02 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
354	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	63 Meter Persegi	Krembangan Jaya Selatan Gang 2D RT 07, RW 07, Kel. Kemayoran	Teralokasi TA. 2026
355	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	800 m	Bulak Setro Gang 1, Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
356	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	331 m	Jl. Bulak Cumpat utara Gang IV, Jl. Bulak Cumpat utara Gang VII, Jl. Bulak Cumpat utara Gang VIII, RT 10 RW 02 Kel Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
357	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	255 m	Bulak Setro 4, Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
358	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	300 m	Bulak Setro 3A, Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
359	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	450 m	Jl Keputih Tegal Timur, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
360	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	198 m	Jl Bulak Rukem Timur II G, Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
361	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	70 m	Wonorejo Gang Dalam RT 03 RT 02 RW 01 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
362	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	240 m	Jl Raya Wonorejo dari perbatasn RW 2 sampai	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		150/200 dengan Cover, Gandar 20 ton		dengan dekat fasum parkir kebun bibit, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	
363	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	136 m	Jl Amir Mahmud Gg 4D, RT 10 RW 02 Kel. Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar	Teralokasi TA. 2026
364	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m	Jl Gunung Anyar Tengah 7B RT10 RW 02 Kel Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar	Teralokasi TA. 2026
365	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	105 m	Jl Siwalankerto Timur 1 Gg Insperasi RW 05 Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo	Teralokasi TA. 2026
366	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	650 m	Jl Raya Menur - Semolowaru	Teralokasi TA. 2026
367	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	380 m	Jl Semolowaru Selatan 1, RW 03 Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
368	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	50 m	dari Jl Bulak Cumpat Timur ke Jl Kyai Tambak Deres, Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
369	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	89 m	Bulak Cumpat Barat Gg 8, RT 09 RW 02 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
370	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	600 m	Jl Nginden Semolo, Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
371	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	500 m	Jl Nambangan Perak (utara lapangan futsal), Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
372	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	295 m	Jl Medayu Utara Gg 30C, RW 14 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
373	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	1800 m	Jl Medayu Utara Gg 30D, Jl Medayu Utara Gg 30D1, Jl Medayu Utara Gg 30D2, RT 09 RW 14 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
374	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	56 m	Jl Kyai Tambak Deres, Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
375	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	151 m	Bulak Setro 2, Kel. Bulak, Kec, Bulak	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		60/80 dengan Cover Gandar 5 ton			
376	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	186 m	Jalan Keputih Timur Jaya Blok L, RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
377	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	1100 m	Jl Raya Tambak Medokan Ayu, RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
378	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	1300 m	Wonorejo Selatan II RT 05 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
379	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	950 m	Wonorejo Selatan 6 RT 10 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
380	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	700 m	RW 1 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
381	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	465 m	Wonorejo Indah Timur Gg 8, RW 08 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
382	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	260 m	Wonorejo Indah Timur Gg 9, RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
383	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	550 m	Wonorejo Indah Timur Gg 6, RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
384	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	460 m	Wonorejo Indah Timur Gg 3 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
385	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	680 m	Wonorejo Indah Timur Gg IX, RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
386	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	700 m	RT 2 RW 7 Medokan Asri Tengah (Jl Medokan Asri Tengah II & III), Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
387	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	880 m	RT 3 RW 7 Medokan Asri Tengah (Jl Medokan Asri Tengah IV & V), Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
388	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	810 m	RT 1 RW 7 Medokan Asri Tengah (Jl Medokan Asri Tengah I & taman), Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
389	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	140 m	Medayu Utara Gg 30A, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
390	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	260 m	RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu Blok F, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
391	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	255 m	RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu Blok G, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
392	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	1310 m	Wonorejo Selatan 1, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
393	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	1142 m	Wisma Kedung Asem Indah Blok G, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
394	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	1040 m	Jl Wonorejo Selatan IV, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
395	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	480 m	Jl Tambak Medokan Ayu Gang 9, RT 08 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
396	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	20 m	Jl Siwalankerto Timur 1, Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo	Teralokasi TA. 2026
397	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	140 m	RT 01 RW 14 Kel Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
398	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	364 METER	KEDINDING LOR GG NUSA INDAH RT 15 RW 1 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAM KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
399	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	426 METER	SIDOTOPO WETAN BARU 5a RT 10 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
400	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	500 METER	SIDOTOPO WETAN BARU 5b RT 10 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
401	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4	251 METER	SIDOTOPO WETAN BARU 4a RT 11 RW 6	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		m dan Saluran 40/60 dengan Cover		KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	
402	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	243 METER	SIDOTOPO WETAN MULIA 2 RT 12 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
403	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	245 METER	SIDOTOPO WETAN MULIA 4 RT 14 RW 6 KELURAHAN SIDOTPO KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
404	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	250 METER	SIDOTOPO WETAN MULIA 5 RT 15 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
405	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	400 m	Jl Medayu Utara Gg 30, RT 04 RW 14 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut,	Teralokasi TA. 2026
406	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	50 m	RT 03 RW 13 Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
407	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	85 m	Jl. Bulak Kali Tinjang 2 Buntu, RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
408	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	55 m	Makam Bulak Kali Tinjang Lama, RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
409	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	146 m	Bulak Kali Tinjang Baru Gg III, RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
410	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	200 m	Wonorejo Selatan VI, RT 10 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
411	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	50 m	Tambak Medokan Ayu 1A-1, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
412	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	40 m	Tambak Medokan Ayu 1A-2, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
413	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	32 m	Tambak Medokan Ayu 1A, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
414	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	140 m	Tambak Medokan Ayu 1A-1, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
415	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	366 m	Tambak Medokan Ayu 1A-2, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
416	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	168 METER	KEDINDING TENGAH GG 2 RT 3 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
417	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	300 m	Tambak Medokan Ayu 1A, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
418	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	87 METER	KEDINDING TENGAH GG PANDAN RT 2 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
419	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	340 m	Tambak Medokan Ayu 3B, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
420	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	1380 m	Tambak Medokan Ayu 3B, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
421	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	275 METER	KEDINDING TENGAH GG NANAS RT2 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
422	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	1361 m	Raya Barat Tambak Medokan Ayu, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
423	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	640 m	Tambak Medokan Ayu 1C, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
424	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	105 METER	KEDINDING TENGAH 4 TEMBUSAN GG 3 RT 2 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
425	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	360 m	Tambak Medokan Ayu 1D, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
426	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	70 METER	KEDIMDING TENGAH 4 BUNTU RT 2 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
427	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	690 m	Tambak Medokan Ayu 3A, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
428	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	1630 m	Tambak Medokan Ayu 2, RT 07 RW 02 Kel. Medokan AYu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
429	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	1340 m	Tambak Medokan Ayu 5, RT 07 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
430	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	190 METER	KEDINDING TENGAH 1 SWADAYA B RT 4 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
431	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	68 METER	KEDINDING TENGAH 1C RT 4 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
432	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 100/100 Gandar 15 ton	800 METER	KEDINDING TENGAH 1 RT 4 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
433	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	400 METER	KEDINDING TENGAH 1 RT 4 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
434	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	130 METER	KEDINDING TENGAH GG 4B RT 5 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
435	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	200 METER	KEDINDING TENGAH GG 4C RT5 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
436	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	500 METER	SEPANJANG KEDINDING TENGAH	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		100/100 dengan Cover Gandar 15 ton		BARU SISI TIMUR RT 7 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	
437	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	365 METER	JL KEDINDING TENGAH RT 10 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
438	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	281 METER	TANAH MERAH UTARA 5 RT 8 RW 9 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
439	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	300 METER	TANAH MERAH UTARA GG 7 RT 7 RW 9 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
440	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	168 METER	JL POGOT BARU RT 1 RW 6 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
441	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	200 METER	POGOT BARU KARYA BAKTI RT 3 RW 6 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
442	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	163 METER	JL POGOT BARU RT 2 RW 6 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
443	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	200 METER	AMBENGAN BATU RT 8 RW 4 KELURAHAN TAMBAK SARI KECAMATAN TAMBAK SARI	Teralokasi TA. 2026
444	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	185 METER	AMBENGAN BATU GG 6 RT 6 RW 4 KELURAHAN TAMBAK SARI KECAMATAN TAMBAK SARI	Teralokasi TA. 2026
445	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 120/120 dengan Cover Gandar 10 ton	285 METER	JALAN AMBENGAN TENGAH RT 5 RW 4 KELURAHAN TAMBAK SARI KECAMATAN TAMBAK SARI	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
446	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	120 m	Bogorami Timur II sisi barat, RW 03 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
447	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	880 m	Medokan Sawah Timur Gg 4D dan Medokan Sawah Timur Gg 3, RW 01 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
448	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	500 m	Jalan tembusan RW I ke RW II, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
449	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	185 m	Taman Rivera Regency Blok C/sebelah barat dinding perumahan bagian depan, RT 08 RW 01 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
450	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	550 m	Wonorejo Selatan Baru, RT 10 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
451	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm)	245 m	Jalan Raya Keputih Permai, RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
452	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm)	140 m	Keputih Timur Jaya Blok A-L dan Keputih Timur Jaya Blok E-F, RT 04 RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
453	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 10 ton	250 m	Jl Keputih Tegal Timur sisi barat 200m dari Simpang Lima Keputih, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
454	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	105 m	Jl Bulak Setro Utara 2, RT 06 RW 04 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
455	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	65 m	Bulak Setro 3A sisi timur, RT 05 RW 04 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
456	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	375 m	RT 02 RW 05 Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo	Teralokasi TA. 2026
457	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	6 m	RT 02 RW 05 Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo	Teralokasi TA. 2026
458	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	90 m	Jl Mulyorejo RT 02 RW 03 Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo	Teralokasi TA. 2026
459	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3	233 M	PETUKANGAN BARU KAMPUNG TENGAH,	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi		Kel. Ampel, Kec. Semampir.	
460	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	65 M	PETUKANGAN BARU KAMUNG UTAMA, Kel. Ampel, Kec. Semampir	Teralokasi TA. 2026
461	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	122 M	PETUKANGAN BARU GANG KECIL, Kel. Ampel, Kec. Semampir	Teralokasi TA. 2026
462	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	50 Meter	Jl. Jagir Wonokromo Wetan Gang 4 RT 05 RW 06, Jagir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
463	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	60 Meter	Jl. Jagir Wonokromo Wetan Gang 1 (Sebelah DTC) RT 05 RW 06, Jagir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
464	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	60 Meter	Jl. Darmorejo Gang VI RT 06 RW 04, DARMO, SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
465	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 10 ton	230 Meter	Jl. Pulo Wonokromo RT 01 RW 07	Teralokasi TA. 2026
466	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	190 M	TAMBAK WEDI LEBAR BLOK GH, RT/RW : 15/01, Kel. Tambak wedi, Kec. Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
467	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 15 ton	180 M	TAMBAK WEDI LEBAR BLOK K-L, RT/RW : 15/01, Kel. Tambak wedi, Kec. Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
468	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	120 M	TAMBAK WEDI LEBAR BLOK M, RT/RW : 15/01, Kel. Tambak wedi, Kec. Kenejran	Teralokasi TA. 2026
469	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	120 M	TAMBAK WEDI LEBAR BLOK M, RT/RW : 15/01, Kel. Tambak wedi, Kec. Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
470	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	425 METER	SIDOTOPO WETAN INDAH 1 RT 3 RW 5 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
471	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	338 m	Jl. Ngagel Baru 1 RT 2 RW 2 Kelurahan Ngagel / Kecamatan Wonokromo	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
472	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	102 METER	KEDUNG MANGU GG 9 RT 12 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
473	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	100 M	Bulak Banteng lor garuda tembusan, RT/RW:012:008, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
474	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	220 METER	KEDUNG MANGU RT 12 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
475	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	310 METER	KEDUNG MANGU SELATAN 5A RT 15 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
476	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	328 METER	KEDUNG MANGU SELATAN TENGAH TEMBUS JALAN RANDU RT 8 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
477	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	120 METER	KEDUNG MANGU SELATAN RT 8 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
478	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	480 METER	KEDUNGB MANGU UTARA RT 10 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
479	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	125 m	KEDUNG MANGU UTARA RT 10 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
480	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	70 METER	KEDUNG MANGU SELATAN 5B RT 9 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
481	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40	228 METER	KEDUNG MANGU SELATAN 5C RT 9 RW 3 KELURAHAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi		SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	
482	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	400 METER	RANDU BARAT 1 RT 6 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
483	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	460 METER	RANDU BARAT 1A RT 6 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
484	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	586 METER	RANDU BARAT 1B RT 20 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN . BUSTANUL ARIFIN	Teralokasi TA. 2026
485	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	90 M	Kedinding Tengah baru gang 7	Teralokasi TA. 2026
486	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	100 METER	KEDUNG MANGU GG RELA RT 1RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
487	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	100 METER	KEDUNG MANGU GG 3 RT 2 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
488	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	120 METER	KEDUNG MANGU GG 5 RT 2 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
489	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	220 METER	KALILOM LOR BARU 3 RT 4 RW 8 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
490	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	350 METER	KALILOM LOR BARU 3 RT 3 RW 8 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
491	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	80 METER	ENDROSONO GG 1 RT 1 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				KECAMATAN SEMAMPIR	
492	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	80 METER	ENDROSONO GG 3 RT 2 RW 2 KELURAHAN WOMOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
493	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	100 m	ENDROSONO GG 2 RT2 RW2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
494	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	50 TITIK	ENDROSONO GG 3 RT 3 RW 3 KELRAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
495	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	125 m	ENDROSONO GG3 RT 3 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
496	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	180 METER	ENDROSONO GG 4 RT 4 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
497	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	125 m	ENDROSONO GG 4 RT4 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
498	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	180 METER	ENDROSOO GG 6 RT 6 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
499	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	105 METER	WONOSARI TEGAL GG 1 RT 7 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
500	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	200 METER	WONOSARI TEGAL 2 RT 8 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
501	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m	WONOSARI TEGAL GG 2 RT 8 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				KECAMATAN SEMAMPIR	
502	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	210 m	WONOSARI TEGAL GG 3 RT 9 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
503	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	160 METER	WONOSARI TEGAL 4 RT 10 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
504	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	210 m	WONOSARI TEGAL GG 3 RT10 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
505	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	250 METER	WONOSARI LOR GG BUNTU RT 11 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
506	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	50 m	WONOSARI LOR GG BUNTU RT 11 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
507	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	150 METER	WONOSARI TEGAL GG 2 RT 12 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
508	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m	WONOSARI TEGAL GG 2 RT 12 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
509	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	300 m	Alamat : sidokapasan 6 RT 9 RW 1	Teralokasi TA. 2026
510	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 5 ton	275 m	Jl. Sidodadi 4 sisi selatan, RT. 03 / RW. 04	Teralokasi TA. 2026
511	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	225 m	Simolawang 2/80 C Rw 01 Simokerto/Simolawang	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
512	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	50 m2	Simolawang 2/80 C rw 01 Simokerto/Simolawang	Teralokasi TA. 2026
513	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	3600 m2	Jl. Tambaksari Selatan	Teralokasi TA. 2026
514	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 15 ton	300 M	RW 06 Gubeng/Mojo	Teralokasi TA. 2026
515	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	200 Meter	Jl. Banjarsugihan II RT 03 RW 04 Kelurahan Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur 60185.	Teralokasi TA. 2026
516	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 120/120 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m2	alamat selokan 1 : Jl. Baratajaya XII	Teralokasi TA. 2026
517	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	18 m	SAWAHAN TEMPLEK 7 RT 3 RW 9 kec. Sawahan kel. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
518	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	300 m	JL. RAYA SIMOREJO SARI B gg. 10 RT 6, RW 7 kel. SIMOMULYO BARU kec. SUKOMANUNGGAL	Teralokasi TA. 2026
519	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	120 m	JL. RAYA SIMOREJO SARI B GG. 16 RT 5, RW 7 Kel. SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
520	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 5 ton	210 Meter	Jl. Sambisari (Telaga) RT 01 RW 03 Kel.Lontar Kec. Sambikerep	Teralokasi TA. 2026
521	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	110 m	JL. RAYA SIMOREJO SARI B GG. 6 RT 2, RW 7 Kel. SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
522	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	295 M	JL. RAYA SIMOREJO SARI B GG. 18 RT 4, RW 7 Kel. SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
523	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	170 M	JL. SIMO POMAHAN RT 8, RW 2 Kel. SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
524	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60	88 M	JL. SIMO GUNUNG BARAT TOL II NO. 14 RT 6, RW 8 Kel.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi		SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	
525	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	140 m	JL. SIMO GUNUNG BARAT TOL III RT 7, RW 8 Kel. SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
526	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	160 M	JL. SIMO TAMBAKAN gg 1 RT 2, RW 9 Kel. SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
527	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	250 M	JL. SIMO TAMBAKAN gg 1 belakang RT 3, RW 9 Kel. SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
528	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	280 M	JL. SIMO JAWAR V RW 10 Kel. SIMOMULYO BARU kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
529	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	240 M	JL. SIMO POMAHAN 2 Kel. Simomulyo kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
530	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	60 m	Jl.Tambak Asri Seroja,Kenanga,Mawar, Melati RT.12 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
531	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	160 m	JL. PUTAT GEDE BARU gg. 2 RT 3, RW 4 kel. Putat Gede kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
532	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	90 m	JL. PETEMON BARAT 46 RT 1, RW 12 kel. Petemon kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
533	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	216 Meter	Kendung G7 RT 05 RW 03 Kel. Sememi, Kec. Benwowo	Teralokasi TA. 2026
534	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	58 Meter	Sememi Jaya Selatan Sektor D Gg Menur RT 08 RW 01 Kel. Sememi Kec Benowo	Teralokasi TA. 2026
535	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	92 Meter	Sememi Jaya Selatan Sektor D Gg Dahlia RT 08 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
536	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4	75 Meter	Sememi Jaya Selatan Sektor D Gg Anggrek	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi		RT 08 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	
537	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	115 Meter	Sememi Jaya Selatan 2BB No. 44 RT 08 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
538	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	160 m	JL. PUTAT GEDE BARAT 3-B RW 1 kel. Putat Gede kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
539	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	58 Meter	Sememi Jaya Selatan 2BB No. 25 RT 08 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
540	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	57 Meter	Sememi Jaya Selatan 2B Gg Makam RT 08 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo Hp: 085748236867 (Ivan)	Teralokasi TA. 2026
541	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	320 Meter	Jl. Bumi Sari Praja Selatan Gg 1 RT 08 RW 05 Kel. Lontar Kec. Sambikerep	Teralokasi TA. 2026
542	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	600 m	Bulak Setro Utara 5, RW 04 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
543	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	112 Meter	Sememi Jaya Selatan 1D RT 10 RW 01 Kel Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
544	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	113 Meter	Sememi Jaya Selatan 1A RT 10 RW 01 Kel Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
545	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	182 Meter	Sememi Jaya Selatan 1 GG Mushola RT 10 RW 01 Kel Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
546	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	83 Meter	Sememi Jaya Gg 3 RT 03 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
547	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	113 Meter	Sememi Jaya Gg 3 Masjid RT 03 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
548	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	400 m	Manyar Tirtoyoso Selatan V dan VI, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
549	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 10 ton	400 m	RT 08 RW 04, Nginden Jangkungan, Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
550	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 15 ton	300 m	RT 07 RW 06, Kutisari, Tenggilis Mejoyo	Teralokasi TA. 2026
551	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	100 M	SIMO MAGEREJO TENGAH 1/10, SIMOMULYO, SUKOMANUNGGAL	Teralokasi TA. 2026
552	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	273 Meter	Sememi Jaya 5C Blok 3 RT 02 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
553	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	100 M	PULO TEGAL SARI GANG 5B NO. 51, WONOKROMO, WONOKROMO	Teralokasi TA. 2026
554	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	537 M	SIMO GUNUNG BARAT TOL , SIMOMULYO, SUKOMANUNGGAL	Teralokasi TA. 2026
555	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	150 M	Hangtuah 5	Teralokasi TA. 2026
556	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	274 Meter	Sememi Jaya 5C Blok 2 RT 02 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
557	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	374 Meter	Sememi Jaya 5 Utara Blok 3 RT 02 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
558	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 15 ton	100 m	RT 01 RW 10, Semolowaru, Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
559	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	20 m	RT 01 RW 09, Klampis Ngasem, Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
560	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	9 Meter	Jl. Balongsari Tama Barat Gg 8 (Ke Arah Sungai) RT 03 RW 02 Kel. Balongsari, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
561	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	130 Meter	Jl. Balongsari Tama Barat Gg 9 RT 03 RW 02 Kel. Balongsari, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
562	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	60 Meter	Pondok Benowo Indah Depan Balai RW 11 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal	Teralokasi TA. 2026
563	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	220 M	JL PRAPAT KURUNG TEGAL RT 003 / RW 010, KELURAHAN TANJUNG PERAK, KECAMATAN PABEAN CANTIKAN.	Teralokasi TA. 2026
564	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	100 M	GAYUNGAN 1 no 26, GAYUNGAN, WONOKROMO	Teralokasi TA. 2026
565	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	33 Meter	Jl. Manukan Tembus RT 01 RW 10 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
566	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	100 M	DK JERAWAT GG 1, RT 1 RW 3 KELURAHAN BABAT JERAWAT KECAMATAN PAKAL	Teralokasi TA. 2026
567	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	100 M	DK JERAWAT RT 3 RW 4 KELURAHAN BABAT JERAWAT	Teralokasi TA. 2026
568	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	426 M	PONDOK BENOWO INDAH RT 02 RW 09, KELURAHAN BABAT JERAWAT	Teralokasi TA. 2026
569	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	125 m	WONOKUSUMO TENGAH RT 003 / RW 013, KELURAHAN WONOKUSUMO, KECAMATAN SEMAMPIR.	Teralokasi TA. 2026
570	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	250 M	WONOKUSUMO WETAN GG1 RT 003 / RW 013, KELURAHAN WONOKUSUMO, KECAMATAN SEMAMPIR.	Teralokasi TA. 2026
571	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	415 M	Sememi Baru Gang 6 RT 4 RW 9 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
572	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	170 M	PAKAL RT 02 RW 02 PAKAL TIMUR II, KELURAHAN PAKAL	Teralokasi TA. 2026
573	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 10 ton	180 M	Sememi Baru Gang 12 RT 5 RW 9 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
574	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	160 Meter	PAKAL MULYO RT 4 RW 1, KEL PAKAL	Teralokasi TA. 2026
575	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	250 Meter	Jl. Manukan Ranu RT 02 RW 08 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur	Teralokasi TA. 2026
576	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	225 Meter	Jalan Banjar Melati gang 3 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri	Teralokasi TA. 2026
577	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	130 Meter	Jl. Manukan Ranu II RT 02 RW 08, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur	Teralokasi TA. 2026
578	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	325 Meter	Jl. Manukan Wasono IV RT 10 RW 08, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes	Teralokasi TA. 2026
579	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	175 M	JL KEDINDING LOR GG JAMBU RT 006/RW 001, KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING, KECAMATAN KENJERAN.	Teralokasi TA. 2026
580	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	200 Meter	Jl. Karangpoh Pak RT 01 RW 02, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes	Teralokasi TA. 2026
581	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	140 m	Bulak Kali Tinjang Baru Gg 1B, RT 03 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
582	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	70 m	Bulak Kali Tinjang Baru Gg 2A, RT 03 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
583	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 Meter	Jl. Manukan Rejo RT 06 RW 06, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes	Teralokasi TA. 2026
584	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	110 M	KEDINDING TENGAH BARU 8	Teralokasi TA. 2026
585	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	70 M	TANAH MERAH 3 BUNTU	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
586	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	150 M	TANAH MERAH 3 BARU	Teralokasi TA. 2026
587	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	125 M	KEDINDING TENGH 8A	Teralokasi TA. 2026
588	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	260 METER	BULAK BANTENG WETAN GG 5 RT 4 RW 8 KELURAHAN BULAK BANTENG WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
589	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 150/150 Gandar 20 ton	100 METER	KALILOM LOR BARU GG DEPAN BALAI RW . RT 2 RW 8 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
590	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	234 m	Jalan Bratang Wetan GG II Kelurahan Ngagelrejo , Kecamatan wonokromo	Teralokasi TA. 2026
591	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	384 M	TANAH MERAH 2	Teralokasi TA. 2026
592	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	305 m	Krukah Selatan GG XI B RW 05 Kel. Ngagelrejo , Kec Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
593	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	150 m	Jl.kedinding lor I	Teralokasi TA. 2026
594	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	150 m	Jl. Kedinding Lor II	Teralokasi TA. 2026
595	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	25 Meter	Jala Pradah Kalikendal Gang 2C RT 02 RW 01 Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis	Teralokasi TA. 2026
596	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	194 M	Tambak wedi Lebar Blok GH	Teralokasi TA. 2026
597	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3	130 M	jln irawati 3	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi			
598	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover, Gandar 5 ton	150 m	Mrutu Kalianyar 1	Teralokasi TA. 2026
599	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	372 M	Kalimas Baru 2	Teralokasi TA. 2026
600	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	200 Meter	Jl. Jagir Wonokromo No 30 RT 04 RW 06, Jagir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
601	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	200 m2	Keputran Kejambon 3	Teralokasi TA. 2026
602	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m2	08/013 Genteng/Embong Kaliasin	Teralokasi TA. 2026
603	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	380 m	08/013 Genteng/Embong Kaliasin	Teralokasi TA. 2026
604	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	50 m2	Jln Dinoyo sekolahan 4 dan Dinoyo sekolahan 5	Teralokasi TA. 2026
605	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	150 M	Jl.Dharmawangsa Gang.3	Teralokasi TA. 2026
606	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	150 m2	Sepanjang keputran pasar kecil gang 02	Teralokasi TA. 2026
607	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	120 m2	Sepanjang jalan batas rt 03 dinoyo sekolahan gang 1	Teralokasi TA. 2026
608	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	102 m2	Jl.dinoyo sekolahan 1 sepanjang RT 05	Teralokasi TA. 2026
609	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	40 m2	Wilayah rt 3 jalan dinoyo sekolahan 1	Teralokasi TA. 2026
610	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	190 m2	granting baru 3 no 19	Teralokasi TA. 2026
611	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	100 m	Donorejo wetan buntu 90-0	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		60/80 dengan Cover Gandar 5 ton			
612	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	250 m	SEPANJANG JALAN JUWINGAN 1	Teralokasi TA. 2026
613	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	150 M	Kalibokor Gg. 2 No. 46	Teralokasi TA. 2026
614	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	100 M	RT/RW: 02/03 Kec./Kel.: Gubeng/Gubeng	Teralokasi TA. 2026
615	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	250 m	Gubeng Airlangga 5 belakang	Teralokasi TA. 2026
616	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m2	Jl.Lapangan Dharmawangsa	Teralokasi TA. 2026
617	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	55 m	Sepanjang Jalan Gubeng Kertajaya 3-B, kurang lebih 50 Meter.	Teralokasi TA. 2026
618	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	200 m2	Kec./Kel.: Gubeng/Baratajaya rw3	Teralokasi TA. 2026
619	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	12 M	JL. IKAN LUMBA-LUMBA RT 04 RW 02 KELURAHAN PERAK BARAT KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
620	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	12 M	JL. IKAN LUMBA - LUMBA RT 04 RW 02 KELURAHAN PERAK BARAT KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
621	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	400 M	JL. JATISARI 1 SISI KANAN KIRI RT 01 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
622	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	80 M	JL. JATISARI 1 GANG BUNTU BARAT 2 GANG SISI KANAN KIRI RT 01 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
623	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	40 M	JL. JATISARI GANG BARU BARAT 2 GANG RT 01 RW 06 KELURAHAN JEPARA	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				KECAMATAN BUBUTAN.	
624	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	130 M	JL. JATISARI 3 SISI KANAN KIRI RT 01 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
625	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	124 m	jalan ngagelrejo utara gg V, (Balai RW 01) kel ngagelrejo / Kec wonokromo	Teralokasi TA. 2026
626	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 15 ton	300 m	Jagir SIdomukti VIII Pojok, RT 06 RW 03 kel. Jagir Kec Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
627	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 ton	15 meter	Jl. Bibis Karah No. 6 Surabaya	Teralokasi TA. 2026
628	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	250 m2	06 Simokerto/Simolawang	Teralokasi TA. 2026
629	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	170 m1	Jl. Dukuh bulak banteng suropati 4a, Kelurahan Bulak Banteng - Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
630	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	50 M	PAKAL MADYA 2 RT 03 RW 02 KELURAHAN PAKAL	Teralokasi TA. 2026
631	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	200 M	PBI RT 11 RW 7 KELURAHAN BABAT JERAWAT	Teralokasi TA. 2026
632	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	60 m	jl dukuh kupang barat 1 no 11 (Balai RW 08 Putat Jaya) kel. putat jaya kec sawahan	Teralokasi TA. 2026
633	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	250 m	rw 2 Gubeng/Airlangga	Teralokasi TA. 2026
634	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	120 m	Bulak Kali Tinjang Baru Blok D dan E, RT 05 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
635	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	160 m	Bulak Kali Tinjang Baru Blok E, RT 05 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
636	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	260 m	Bulak Kali Tiinjang Baru Blok F, RT 05 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
637	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	120 m1	RT/RW: 04/04 Kec./Kel.: Simokerto/Simolawang	Teralokasi TA. 2026
638	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	110 m	Bulak Kali Tinjang Baru Gg 3, RT 04 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
639	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	150 m	Bulak Kali Tinjang Baru 1a, RT 04 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
640	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	85 m	Bulak Kali Tinjang Baru Gg 1, RT 04 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
641	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	20 m	Medokan Ayu Gg TK1 (Raya), RT 05 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
642	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	1050 m	Perumahan Tira Medayu, RW 01 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
643	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	370 m	Jl. Wonorejo Selatan IIIA, RT 02 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
644	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 20 ton	90 m	Jl. Wonorejo Selatan Gg 7, RT 04 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
645	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	243 M2	kedurus gang IA RT 5 RW 01 kelurahan kedurus,kecamatan karangpilang	Teralokasi TA. 2026
646	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	36 m	Jl. Jemur Ngawinan No 16-08, RT 05 RW 02 Kel. Jemurwonosari, Kec. Wonocolo	Teralokasi TA. 2026
647	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	105 M	kedurus gang 1B rt 5 rw 1 kelurahan kedurus kec,karangpilang	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
648	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 6 cm)	105 M	kedurus gang 2 rt 05 rw 01 kelurahan kedurus	Teralokasi TA. 2026
649	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	300 meter	RT 01 rw 01 keduurus karangpilang	Teralokasi TA. 2026
650	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	200 M	JL. DUPAK BARU RT 10 RW 05 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
651	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	100 m2	Jalan gersikan No. 39 kel. Morokrembangan kec. Krembangan	Teralokasi TA. 2026
652	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 120/120 dengan Cover Gandar 10 ton	350 meter	kedurus gang tembusan (pujasera ETC)	Teralokasi TA. 2026
653	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	170 M	Kedurus gang anggur RT 09 RW 03 keluranahan kedurus	Teralokasi TA. 2026
654	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	230 M	Tambak Lumpang RT.01 RW.04 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
655	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	93 M	JL. DUPAK MAGERSARI GANG 3 RT 03 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
656	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	121 M	JL. DUPAK MAGERSARI GANG 1 RT 04 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
657	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	100 M	JL. DUPAK MAGERSARI GANG 2 RT 04 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
658	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	105 M	JL. DUPAK MAGERSARI GANG 3 RT 03 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
659	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	210 M	JL. DUPAK MAGERSARI GANG 4 RT 03 RW 09 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
660	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	140 M	kedurus gang 1b rt 7 rw 01 kelurahan kedurus	Teralokasi TA. 2026
661	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 15 ton	400 M	JL. DEMAK SISI TIMUR KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
662	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	175 M	DKA TEGAL NO. 37 KEL. SAWUNGGALING KEC. WONOKROMO	Teralokasi TA. 2026
663	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	103 Meter	JL JAGIR WONOKROMO WETAN GANG 4 RT 05 RW 06 (SEKITAR RUMAH ALM. PAK JO) JAGIR SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
664	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	100 Meter	Jl. Manukan Langgar RT 01 RW 10 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes	Teralokasi TA. 2026
665	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	300 m	Jl Gubeng Kertajaya 6 C	Teralokasi TA. 2026
666	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 10 ton	53 Meter	Jl. Manukan Zein Ke Jalan Raya Manukan Kulon RT 01 RW 10 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes	Teralokasi TA. 2026
667	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	190 M	kedurus gang 4D kelurahan kedurus	Teralokasi TA. 2026
668	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	200 meter	Simo Pomahan Baru II, RT. 01 RW. 05	Teralokasi TA. 2026
669	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover	190 M2	RT 3 RW 1 kelurahan kedurus	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
670	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	72 M	sepanjang jalan depan sekolan negri kedurus	Teralokasi TA. 2026
671	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	80 m1	(Jl. CUMPAT GANG 5 RT 02 RW 02) - Kelurahan Kedung Cowek - Kecamatan Bulak	Teralokasi TA. 2026
672	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	250 m1	Dukuh Bulak Banteng Perintis Utama I, Kelurahan Bulak Banteng- Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
673	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	105 M	kedurus gang 2 RT 6 Rw 1 kelurahan kedurus	Teralokasi TA. 2026
674	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm)	105 M2	karangpilang gang Bromo RT 2 rw 3	Teralokasi TA. 2026
675	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	100 M	JL. DUPAK BARU RT 01 RW 05 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
676	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	80 buah	(Jl. CUMPAT GANG 5 RT 02 RW 02) - Kelurahan Kedung Cowek - Kecamatan Bulak	Teralokasi TA. 2026
677	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	100 M	JL. DUPAK BARU RT 02 RW 05 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
678	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	50 M2	karangpilang gan melati RT 7 Rw 1 HP.bp, Yongki 081213311011	Teralokasi TA. 2026
679	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	100 M	JL. DUPAK BARU RT 07 RW 05 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
680	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	58 M	Gayungan Manggis 2, GAYUNGAN, WONOKROMO	Teralokasi TA. 2026
681	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 15 ton	200 meter	sepanjang RT 3 samapai dengan RT 6 RW 1 karangpilang	Teralokasi TA. 2026
682	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	80 meter	Jl. CUMPAT GANG 6 RT 02 RW 02) - Kelurahan Kedung	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				Cowek - Kecamatan Bulak	
683	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	80 meter	Jl. CUMPAT GANG 6 RT 02 RW 02) - Kelurahan Kedung Cowek - Kecamatan Bulak	Teralokasi TA. 2026
684	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	80 meter	Jl. CUMPAT GANG 7 RT 03 RW 02) - Kelurahan Kedung Cowek - Kecamatan Bulak	Teralokasi TA. 2026
685	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	100 meter	Jl. CUMPAT GANG 8 RT 03 RW 02) - Kelurahan Kedung Cowek - Kecamatan Bulak	Teralokasi TA. 2026
686	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi	250 Meter	Jl Ketintang Baru Gang X RT 03 RW 04 Surabaya	Teralokasi TA. 2026
687	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	250 m2	Jl. Kedung Cowek Gang Permata RT 01 RW 03	Teralokasi TA. 2026
688	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	100 meter	Jl. Rungkut Tengah Gg. 6 A RT 03 RW 01	Teralokasi TA. 2026
689	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 dengan Cover Gandar 5 ton	200 Meter	Jl. Asem Jaya RT 04/Gundih/Bubutan - Indra/Erwin - 081231577602	Teralokasi TA. 2026
690	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover, Gandar 5 ton	175 meter	Bangkingan timur gang 1	Teralokasi TA. 2026
691	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/120 dengan Cover Gandar 10 ton	100 m	Sidonipah 22 Surabaya	Teralokasi TA. 2026
692	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m (Tebal 6 cm)	320 M2	kemlaten baru	Teralokasi TA. 2026
693	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	60 m	Jl.tambak Asri Gg.Melati,Gg.Mawar,Gg.Kenanga RT.12 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
694	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	400 m	Jl. Mendul Merisi Gg 1 Selatan, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
695	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	108 m	Gayungan Gang. 5, Gayungan Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
696	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m (Tebal 6 cm)	190 M2	kedurus gang buyut	Teralokasi TA. 2026
697	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	159 M	Gayungan PTT 30, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
698	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton	100 M	Gayungan PTT 30, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
699	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	190 M	Gayungan 3-A No. 7, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
700	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	140 M	Jl. Pacar Kembang V/41 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari.	Teralokasi TA. 2026
701	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	454 M	Gayungan 3, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
702	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	600 M	DK. BABAT JERAWAT GG 3 KELURAHAN BABAT JERAWAT	Teralokasi TA. 2026
703	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	98 M	Gayung Kebonsari Dalam no. 11, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
704	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jembatan Bentang 12 m	14 meter	Jalan Medokan Semampir 1 RT 04 RW 07	Teralokasi TA. 2026
705	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover	58 M	Gayungan PTT 51, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
706	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40	180 m	Jl.Tambak Asri GG.Seroja RT.12	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi		RW.06 Morokrembangan	
707	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	100 M	Gayungan PTT 51, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
708	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	110 M	Gayung Kebonsari Graha Indah, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
709	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 15 ton	300 M	Gayung Kebonsari Graha Indah, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
710	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	60 M	Gayungan Manggis 2, Gayungan, Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
711	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	40 Meter persegi	Jl. Tanjung 3 No. 1, RT 25, RW 06, Kel. Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
712	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	60 Meter	Jl. Wonorejo 4 No. 99-101, RT 04, RW 06, Kel. Wonorejo	Teralokasi TA. 2026
713	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	60 Meter	Jl. Wonorejo 4 No. 102, RT 04, RW 06, Kel. Wonorejo	Teralokasi TA. 2026
714	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	80 Meter	Jl. Wonorejo 4 No. 109 - 111, RT 04, RW 06, Kel. Wonorejo	Teralokasi TA. 2026
715	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	305 M	Kandangan RT 1 RW 1 Gang 1G Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
716	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40	49 m	Jl Kedung Mangu Gang Langgar no 4 RT 003 RW 003 Kelurahan	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		dengan Cover Dua Sisi		Sidotopo Wetan Kecamatan Semampir	
717	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	100 m	Jl Sidotopo Jaya 2 No 11 RT 002 RW 012	Teralokasi TA. 2026
718	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	480 M	Sememi Jaya 5 Utara Blok 4 RT 02 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
719	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	1200 M	Sememi Jaya 5 Utara Blok 2 RT 2 RW 1 Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
720	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	115 M	Sememi Jaya Selatan 1 RT 10 RW 01 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya	Teralokasi TA. 2026
721	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	181 M	Sememi Jaya 10 RT 09 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
722	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	258 M	Sememi Jaya 10A RT 09 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
723	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	40 M	Sememi Jaya 10A Tembusan RT 09 RW 01 Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
724	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton	100 M	Kendung Rejo Gang 7 RT 04 RW 08 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya	Teralokasi TA. 2026
725	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	70 M	Sememi Baru Gang 1 belakang masjid RT 01 RW 09 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya	Teralokasi TA. 2026
726	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch	400 M	Kendung Jaya Gang 8 RT 06 RW 06 Kelurahan Sememi	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		40/60 dengan Cover Gandar 5 ton		Kecamatan Benowo Kota Surabaya	
727	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	30 Meter	Jl. Tempel sukorejo No. 107, RT 01, RW 8, Kel.Wonorejo	Teralokasi TA. 2026
728	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 5 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi	45 M	Kendung Jaya 8B RT 06 RW 06 Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
729	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton	100 M	Kendung Jaya Gang 7 RT 04 RW 06 Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
730	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi	64 M	Bandarejo III RT 07 RW 05 Kel. Sememi Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
731	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	600 Meter persegi	Jl. Tempel sukorejo No. 94, 96, 113, RT 2, RW 8, Kel.Wonorejo	Teralokasi TA. 2026
732	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 10 ton	150 Meter persegi	Jl. Tempel sukorejo No. 129, RT 4, RW 8, Kel.Wonorejo	Teralokasi TA. 2026
733	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover	81 M	Sememi Kidul Gang 1B RT 1 RW 4 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya	Teralokasi TA. 2026
734	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 20 ton	200 Meter persegi	Jl. Asem Jaya Asri, RW 04, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026
735	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Top-Bottom 200/200 Gandar 20 ton	200 Meter persegi	Jl. Asem Jaya Asri, RW 04, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026
736	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 20 ton	150 M	Jl. Mojo Kidul 145, RT 09, RW 05, Kel. Mojo	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
2	**Dinas Perhubungan**				
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	12 TITIK	JL. DUPAK MASIGIT GANG 12 RT 12 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
2	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	12 TITIK	JL. DUPAK MASIGIT GANG 15 RT 15 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
3	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	12 TITIK	JL. DUPAK MASIGIT GANG 16 RT 16 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
4	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	12 TITIK	JL. DUPAK MASIGIT GANG 19 RT 19 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
5	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 TITIK	JL. JEPARA GANG 9 RT 09 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
6	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	JL. ASEM JAYA RT 02 RW 04 KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 set	Jalan Rejosari Gang Pesantren RT 04 RW 03 ,Kel Benowo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
8	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 Titik	JL.Makam Beji, RT 03 RW 04 Kel.Pakal Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026
9	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	35 Titik	Jl.Dukuh Jerawat Gang 3, RT 03 RW 03, Kel. Babat Jerawat , Kec. Pakal.	Teralokasi TA. 2026
10	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 Titik	Beji Rahayu 6C, RT 02 RW 04. Kel Pakal. Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
11	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Meter	Beji Selatan 1 RT 02 RW 04, Kel Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
12	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 Titik	Jl. Makam Beji, RT 03 RW 04. Kel Pakal, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
13	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 Meter	Jl. Makam Beji , Gang Buntu. RT 03 RW 04 Kel Pakal, Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
14	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 Titik	Jl.Pergudangan Mutiara Tambak Langon, RT 03 RW 05, Kel Tambak Sarioso, Kec Asemrowo,	Teralokasi TA. 2026
15	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 Titik	ALIMAS BARU 3 LEBAR BARAT 15,RT/RW:007/06, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Surabaya.	Teralokasi TA. 2026
16	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Titik	JL.Beji PDAM 2A, RT 04 RW 04, Kel Pakal Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
17	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Titik	JL.Beji PDAM 5A RT 04 RW 04, Kel Pakal Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
18	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 titik	Jl. Ratna II-A	Teralokasi TA. 2026
19	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 Titik	Jl Jambangan No. 59 / stren kali	Teralokasi TA. 2026
20	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	JL. SIMO GUNUNG BARAT 3-A RT 5 RW 5 kel. Simomulyo kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026
21	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	JL. PETEMON BARAT 1 RT 8, RW 2 kel. Kupang Krajan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
22	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	JL. PETEMON BARAT 3 RT 8, RW 2 kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
23	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	JL. PETEMON BARAT 5 RT 8, RW 2 kel. Kupang Krajan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
24	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	JL. PETEMON BARAT 11 RT 8, RW 2 kel. Kupang Krajan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
25	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	15 titik	JL. KEDUNG ANYAR 7 RT 6, RW 3 kel. Sawahan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 Titik	Kedung Mangu selatan gang 7/1, RT/RW: 018/003, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
27	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Titik	KEDUNG MANGU GANG 4A dan GANG 4D, RT/RW: 17/003, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
28	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Titik	Pakal Barat Lapangan Gang 1 dan 2, RT 04 RW 03 Kel Pakal Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
29	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 Unit	Jl. Sidotopo Wetan Baru Gang 5E RT. 10/RW. 06 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran.	Teralokasi TA. 2026
30	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	1 unit	Menur 3 Komplek KMS	Teralokasi TA. 2026
31	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Balai RW JL. Wonosari Kidul III No 8 RT 03 RW 03 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
32	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 titik	Jl. Putat Gede Barat V (Depan Halaman Balai RT 05 - RW 01) Kel. Putat Gede Kec. Sukomanunggal	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
33	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	12 titik	Jl. Jambangan No. 50	Teralokasi TA. 2026
34	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 TITIK	TAMBAK WEDI GANG SUROSO 1 DAN TAMBAK WEDI GG SEJAHTERA RT 8 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
35	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 TITIK	TAMBAK WEDI GANG ROHMAH 3 RT 9 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
36	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	TAMBAK WEDI KOMPLEK JL NELAYAN RT 1 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
37	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	JALAN TAMBAK WEDI TENGAH UTARA RT 18 RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
38	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	1 TITIK	DK BULAK BANTENG GANG 2 B RT 2 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
39	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	1 TITIK	DUKUH BULAK BANTENG GANG 2C RT 2 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
40	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 TITIK	DUKUH BULAK BANTENG GANG 2 RT 2 RW 6 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
41	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 TITIK	DUKUH BULAK BANTENG PATRIOT 7 RT 9 RW 1 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
42	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Titik	Jl. Lamongan No. 48 C RT 02, RW 03, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
43	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Titik	Jl. Lamongan No. 20 Lapangan, RT 02, RW 03, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
44	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 Titik	Jalan Tambak Dono, Gang Delima. RT 02 RW 03, Kel Sumberrejo Kec Pakal,	Teralokasi TA. 2026
45	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Titik	Jalan Tambak Dono, Gang Nanas RT 02 RW 03 Kel Sumberrejo Kec Pakal.	Teralokasi TA. 2026
46	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 unit	Bronggalan 2G dan pacarkembang 5/115, Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari	Teralokasi TA. 2026
47	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 unit	Jl ngagel timur 5 no 58	Teralokasi TA. 2026
48	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 unit	Jl. ngagel timur 5 no 75	Teralokasi TA. 2026
49	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	4 Unit	Wonosari Wetan 2B NO 30, RT/RW:009/007, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya,	Teralokasi TA. 2026
50	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 UNIT	PULO TEGAL SARI GANG 5B NO. 51, KEL. WONOKROMO, KEC. WONOKROMO	Teralokasi TA. 2026
51	Pembangunan Prasarana Jalan di	Pemasangan Jaringan PJU	1 UNIT	PULO TEGALSARI GG MAHASISWA NO.3,	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	Jalan Kabupaten/Kota			KEL. WONOKROMO, KEC. WONOKROMO	
52	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 titik	Jl. Ketintang Baru VII	Teralokasi TA. 2026
53	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	PEREMPATAN BULAK BANTENG LOR GANG 1 RT 2 RW 2 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
54	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	BULAK BANTENG LOR GANG BHINEKA 9 RT 10 RW 8 KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
55	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	20 TITIK	JL TAMBAK WEDI BARU TEMBUSAN KE JL TAMBAK WEDI TENGAH . RT 2 RW 3 . KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
56	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 TITIK	TAMBAK WEDI BARU GANG 12 . RT 2 RW 3 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
57	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	Jl. lempung Perdana RT 02 RW 05 Kelurahan Lontar Sambikerep- Lapangan Futsal depan SMPN 47	Teralokasi TA. 2026
58	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 titik	jl. Lempung Perdana RT 02 RW 05 Kel. Lontar Sambikerep - Depan SMPN 47	Teralokasi TA. 2026
59	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 Titik	Jl. Kendangsari Gang 13 RT 05 RW 04 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Teralokasi TA. 2026
60	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	1 titik	Jl. Kendangsari Gang 13 RT 05 RW 04 Kelurahan Kendangsari	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	di Jalan Kabupaten/Kota			Kecamatan Tenggilis Mejoyo	
61	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 Titik	Jl. Kendangsari Gang 13 RT 05 RW 04 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Teralokasi TA. 2026
62	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 Titik	Jl. Semampir Gg Masjid RT 01/ RW 04	Teralokasi TA. 2026
63	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Kendung Adi RT 7 RW 2 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
64	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 titik	Pakal Pejuang Barat Gang 2 RT 5 RW 5 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal	Teralokasi TA. 2026
65	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 titik	Pakal Pejuang Barat Gang 3 RT 5 RW 5 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal	Teralokasi TA. 2026
66	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 titik	Jalan Protokol Sememi Kidul RW 4 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
67	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 titik	Makam Mbah Ali Sememi Kidul RT 2 RW 4 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
68	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 titik	sidosermo V RT 02 RW 05	Teralokasi TA. 2026
69	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 Titik	Kampung Kali Bakri, RT 03 RW 03 Kel.Tambak Osowilangon Kec Benowo.	Teralokasi TA. 2026
70	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 TITIK	SIDOTOPO WETAN GG.2 RT.5 RW.01 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
71	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 TITIK	JALAN PLATUK, RT.04 RW.2 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
72	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	JALAN RANDU GG.2 RT.8 RW.2 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
73	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	BULAK BANTENG GAMBOJA RT.4 RW.7 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
74	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 TITIK	BULAK BANTENG MADYA GG 1 RT.1 RW.9 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
75	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 TITIK	BULAK BANTENG MADYA GG 2 RT.2 RW.9 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
76	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 TITIK	RANDU BARAT GG LEBAR RW.12 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
77	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 TITIK	RANDU BARAT GG.6 RT.1 RW.12 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
78	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	RANDU BARAT GG.7 RT.2 RW.12 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
79	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 TITIK	RANDU BARAT GG.8 RT.2 RW,12 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
80	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	RANDU GG.5 RT.3 RW.12 SIDOTOPO WETAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
81	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Jalan kutai no.34 (gang samping rm rawon nguling) kel. Darmo /Kec Wonokromo / Kota Surabaya/ Prov. Jawa Timur	Teralokasi TA. 2026
82	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	RANDU BARAT GG 4 RT 4 RW 12 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
83	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	RANDU BARAT GG 2 RT 5 RW 12 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
84	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 TITIK	BULAK SARI GG TENGAH RT 1 RW 06 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
85	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 TITIK	BULAK SARI GG TENGAH DAN BUNTU SEBELAH BARAT RT 2 RW 6 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
86	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 TITIK	BULAK SARI GG BUNTU SEBELAH BARAT RT 3 RW 6 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
87	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 TITIK	JALAN BULAK SARI RT 7 RW 06 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
88	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 TITIK	JALAN BULAK SARI RT 8 RW 06 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
89	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	KEBALEN WETAN GG.6 RT.06 RW.07 KREMBANGAN UTARA PABEAN CANTIKAN	Teralokasi TA. 2026
90	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	Jl Margomulyo	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
91	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	JKI Menanggal, Menanggal, Kec. Gayungan	Teralokasi TA. 2026
92	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 Unit	Wonosari Wetan 2B NO 30, RT/RW:009/007, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
93	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 Unit	KALIMAS BARU 3 LEBAR BARAT 2A, 10, 22, 38, 54, 58 dan 64 RT/RW:011/06, Kel. Tanjung perak, Kec. Pabean Cantian, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
94	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 titik	Jl. Babadan 3A RT Gundih Kec Bubutan	Teralokasi TA. 2026
95	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	15 unit	Lokasi 1: Manukan Tirta 6 (Sisi Telaga Utara) RT 07	Teralokasi TA. 2026
96	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	17 unit	Lok1: Manukan Wasono	Teralokasi TA. 2026
97	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 unit	Manukan Tirta RW 08 Kel Manukan Kulon, Kec Tandes	Teralokasi TA. 2026
98	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Type 2 + Solar Cell	2 unit	Jl. Raya Manukan Tirta Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
99	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 Titik	Dukuh Kupang Utara I/1 RT.05 RW.08 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
100	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	9 unit	Lok1: Balongsari Tama Barat Gg 7 (2 titik)	Teralokasi TA. 2026
101	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	Pakis Wetan Gang 6 RT.12 RW.03 Kel. Pakis Kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
102	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Balai RW 1 Wonokitri 2 RT 04 RW 01 Kelurahan Pakis	Teralokasi TA. 2026
103	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Depan Balai RT Pakis Tirtosari GG 13 RT 04 RW 05 Kel. Pakis Kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
104	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 unit	Jl. Sambisari 1 (Telaga) RT 03 RW 03 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep	Teralokasi TA. 2026
105	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 unit	Lok1: Gadel Sari Gg Anggrek (2 PJU)	Teralokasi TA. 2026
106	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	15 unit	Pondok Benowo Indah Blok DI, DJ, DK, DL, CS RT 04 RW 014 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal	Teralokasi TA. 2026
107	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	12 unit	Pondok Benowo Indah DI-DJ, DK-DJ, DK-DL, DL, CS, RT 04 RW 14 Kel. Babat Jerawat, Kec Pakal	Teralokasi TA. 2026
108	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 unit	Lok1: Pondok Benowo Indah Blok CS 18 (Belakang Balai RT 04)	Teralokasi TA. 2026
109	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 unit	Jl. Bumi Sari Praja Selatan Gg 3 RT 08 RW 05 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep	Teralokasi TA. 2026
110	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 UNIT	1. JL KEDUNG COWEK 153	Teralokasi TA. 2026
111	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	16 UNIT	JL BULAK KENJERAN RT3 RW3 KEL KENJERAN KEC BULAK,	Teralokasi TA. 2026
112	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	kapas madya indah , RT ! RW 1 . kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
113	Pembangunan Prasarana Jalan di	Pemasangan Jaringan PJU	3 TITIK	kapas madya indah RT 1 RW 1 kelurahan	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	Jalan Kabupaten/Kota			kapas madya baru kecamatan tambak sari	
114	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 TITIK	kapas madya indah RT 1 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
115	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 titik	Masjid Miftahul Rahman Perumahan Uka RT 1 RW 2 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
116	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	kapas madya 2d RT 5 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
117	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Rejosari Gang Apel Blok C RT 2 RW 3 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal	Teralokasi TA. 2026
118	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 TITIK	kaps madya 2d RT 5 RW1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
119	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Rejosari Gang Apel Blok D RT 2 RW 3 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal	Teralokasi TA. 2026
120	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Rejosari RT 3 RW 3 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal	Teralokasi TA. 2026
121	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	Jalan Tengger Raya Gang 2 RT 1 RW 2 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
122	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	Jalan Tengger Raya Gang 4 RT 3 RW 2 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
123	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 titik	Jalan Bukit Tengger RT 5 RW 2 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
124	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	kapas madya 3a RT 10 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
125	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 titik	Jalan Tengger Raya Gang 6 RT 6 RW 2 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
126	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Jalan Tengger Rejo Mulyo RT 10 RW 2 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
127	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	kapas madya 3h RT 12 RW 1 kelurahan kapas madya bary kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
128	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 TITIK	kapas madya barat RT 14 RW 1 kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari	Teralokasi TA. 2026
129	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	sidotopo wetan baru gang 2 RT 2 RW 6 kelurahan sidotopo wetan kecamatan kenjeran	Teralokasi TA. 2026
130	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	sidotopo wetan baru gg 2 RT 2 RW 6 kelurahan sidotopo wetan kecamatan kenjeran	Teralokasi TA. 2026
131	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 TITIK	sidotopo wetan baru rt 6 rw 6 kelurahan sidotopo wetan kecamatan kenjeran	Teralokasi TA. 2026
132	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 TITIK	sidotopo wetan mulia 1 rt 7 rw 6 kelurahan sidotopo wetan kecamatan kenjeran	Teralokasi TA. 2026
133	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	sidotopo wetan mulia 1 a rt 7 rw 6 kelurahan sidotopo wetan kecamatan kenjeran	Teralokasi TA. 2026
134	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	17 titik	Tengger Rejo Mulyo RT 11 RW 2 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
135	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 Titik	Krembangan Jaya Selatan Gang 2C dan 2D RT 07, RW 07, Kel. Kemayoran	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
136	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	15 titik	Jl Gading Indah Utara Gg 1 - Gg 10, RT 03 RW 03 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
137	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	17 titik	RT 5 RW 4 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
138	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	Banyu Urip Jaya V	Teralokasi TA. 2026
139	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	Jl Raya TK, Gg TK2, Gg TK3, Gg Makam1, dan Gg Makam2, RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
140	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 unit	Wonorejo Selatan Gg 3A, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
141	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	15 titik	Jl Putra Bangsa III Blok A, Blok F, Blok G, dan pinggir kali, RT 09 RW 02 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
142	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 titik	Jl Wonorejo Rungkut RT 02 RW 01 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
143	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Jl Wonorejo Rungkut RT 02 RW 01 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
144	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Medokan Ayu Tambak Gang VII, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
145	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 titik	Panjang Jiwo Gg Masjid, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
146	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	JL RANDU BRANTI RT 8 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
147	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	SIDOTOPO WETAN MULIA 2 RT 12 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
148	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 TITIK	SIDOTOPO WETAN MULYA 4 RT 14 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
149	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 TITIK	SIDOTOPO WETAN MULIA 5 RT 15 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
150	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 TITIK	SIDOTOPO WETAN BARU 5D RT 16 RW 6 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
151	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	30 titik	Wisma Tirta Agung Tahap 4 dan Tahap 5, RW 07 Kel. Gunung Anyar Tambak, Kec. Gunung Anyar	Teralokasi TA. 2026
152	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	RT 03 RW 13 Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut,	Teralokasi TA. 2026
153	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	30 titik	RT 04 RW 13 Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut,	Teralokasi TA. 2026
154	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	Jl Modern 1, Jl Modern 2, dan di Jl Modern VII barat, RW 08 Kel. Gunung Anyar Tambak, Kec. Gunung Anyar	Teralokasi TA. 2026
155	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 TITIK	KEDINDING TENGAH 1 RT 4 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
156	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	KEDINDING TENGAH 1 RT 4 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
157	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	11 TITIK	KEDINDING TENGAH 1 RT 4 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
158	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	8 TITIK	KEDINDING TENGAH BARU RT7 RW 2 KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
159	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	JALAN AMBENGAN TENGAH RT 5 RW 4 KELURAHAN TAMBAK SARI KECAMATAN TAMBAK SARI	Teralokasi TA. 2026
160	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	AMBENGAN BATU 4 RT 4 RW 4 KELURAHAN TAMBAK SARI	Teralokasi TA. 2026
161	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	AMBENGAN BATU 3 RT 3 RW 4 KELURAHAN TAMBAK SARI KECAMATAN TAMBAK SARI	Teralokasi TA. 2026
162	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 titik	Pertigaan Pandugo Timur I & II dan Pertigaan Pandugo Timur II & III, RW 05 Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
163	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Bogorami Timur Raya sisi utara, RW 03 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
164	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Wonorejo Selatan 3A, RT 02 RW 08 Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut	Teralokasi TA. 2026
165	Pembangunan Prasarana Jalan di	Pemasangan Jaringan PJU	2 titik	Jl. Wonorejo Selatan IV, RT 09 RW 08 Kel.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	Jalan Kabupaten/Kota			Wonorejo, Kec. Rungkut	
166	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 titik	Perumahan Keputih Permai, RW 02 Kel. Keputih, Kec. Sukolilo	Teralokasi TA. 2026
167	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 Titik	TAMBAK WEDI LEBAR BLOK GH, RT/RW : 15/01, Kel. Tambak wedi, Kec. Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
168	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG MELATI RT 2 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
169	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG MELATI RT 2 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
170	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG DAHLIA RT 3 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
171	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	16 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG DAHLIA RT 3 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
172	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG GADING RT 4 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
173	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 titik	dukuh kupang utara 2B & 2C Kelurahan Putat Jaya , Kec Sawahan	Teralokasi TA. 2026
174	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG GADING RT 4 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
175	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG GADING RT 4 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
				KECAMATAN KENJERAN	
176	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG ANGGREK RT 5 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
177	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	3 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG ANGGREK RT 5 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
178	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG CEMPAKA RT 7 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
179	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 TITIK	BULAK BANTENG BARU GG CEMPAKA RT 7 RW 14 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
180	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	12 TITIK	KEDUNG MANGU GG RELA RT 1 RW 3 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
181	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 TITIK	ENDROSONO GG 3 RT 3 RW 2 KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR	Teralokasi TA. 2026
182	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 Titik	KALISARI SAYANGAN GANG 2 I, RW 10, KEL. KAPASARI, KEC. GENTENG	Teralokasi TA. 2026
183	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	15 Titik	KALISARI SAYANGAN GANG 1, RW 10, KEL. KAPASARI, KEC. GENTENG	Teralokasi TA. 2026
184	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 titik	Jl. Bronggalan sawah timur 3 RT. 6 RW.10, Kelurahan Pacarkembang - Tambaksari	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
185	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	20 Unit	Sepanjang Jl. Gubeng Jaya 1	Teralokasi TA. 2026
186	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	38 TITIK	JL.SEMUT GG.6 RT.03 RW.08 BONGKARAN PABEAN CANTIKAN	Teralokasi TA. 2026
187	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	32 TITIK	JL.PENGAMPON 3 RT.3 RW.10 PABEAN CANTIKAN	Teralokasi TA. 2026
188	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 TITIK	JL. TENGGER 2 RT 3, RW 4 kel. Sawahan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
189	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	JL. PETEMON KALI BUNTU RT 1, RW 4 kel. Sawahan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
190	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 titik	JL. TENGGER 3 RT 2, RW 4 kel. Sawahan kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
191	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	Jl.Tambak Asri Sedap Malam RT.18 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
192	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	Jl.Tambak Asri Tengah Gg.13,15 dan 16 RW.06 Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
193	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	JL. PAKIS 2 RT 13, RW 6 kel. Pakis kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
194	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 titik	JL. PETEMON BARAT 97 RT 3 RW 12 kel. Petemon kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
195	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	5 unit	lok1: Sememi Jaya Gg 5 Utara Blok 2	Teralokasi TA. 2026
196	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pemasangan Cermin Tikungan	1 unit	Sememi Jaya Gg Utara Blok 2 RT 02 RW 01	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	di Jalan Kabupaten/Kota			Kel. Sememi, Kec. Benowo	
197	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 unit	Sememi Jaya Gg 5 Utara Blok 2 RT 02 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
198	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 unit	Sememi Jaya 5C Blok 3 RT 02 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
199	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 unit	Sememi Jaya 5C Blok 2 RT 02 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
200	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	14 titik	Jl. Gubeng Kertajaya 2A No. 3 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng	Teralokasi TA. 2026
201	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 titik	Jojoran 1 Perintis 1 dan Perintis 2, RT 02 RW 13, Mojo, Gubeng	Teralokasi TA. 2026
202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 unit	Sememi Jaya 5 Utara Blok 3 RT 02 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
203	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 unit	Sememi Jaya 5 Utara Blok 3 RT 02 RW 01 Kel. Sememi, Kec. Benowo	Teralokasi TA. 2026
204	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 UNIT	GAYUNGAN 1 NO 26, GAYUNGAN, WONOKROMO	Teralokasi TA. 2026
205	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 unit	Balongsaari Tama (Bantaran Sungai) RT 03 RW 02 Kel. Balongsari, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
206	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 unit	Balongsaari Tama Gg 7 RT 03 RW 02 Kel. Balongsari, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
207	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 unit	Balongsaari Tama Gg 8 RT 03 RW 02 Kel. Balongsari, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
208	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	2 unit	Balongsaari Tama Gg 9 RT 03 RW 02 Kel. Balongsari, Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
209	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 unit	Pondok Benowo Indah Depan Mushola Hidayatullah RT 03 RW 11	Teralokasi TA. 2026
210	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Petunjuk	1 UNIT	GAYUNGAN 1 NO 26, GAYUNGAN, WONOKROMO	Teralokasi TA. 2026
211	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	4 unit	Jl. Manukan Kasman RT 01 RW 10 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
212	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	11 unit	Lokasi 1 : Jl. Manukan Kasman I RT 01 RW 10 (7 Titik)	Teralokasi TA. 2026
213	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	9 TITIK	WONOKUSUMO KULON 1 RT 001 / RW 0013 KELURAHAN WONOKUSUMO, KECAMATAN SEMAMPIR.	Teralokasi TA. 2026
214	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 TITIK	WONOKUSUMO KULON GG 2 DAN 3, RT 002 / RW 013, KELURAHAN WONOKUSUMO, KECAMATAN SEMAMPIR.	Teralokasi TA. 2026
215	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	20 titik	Samping Fly Over JLLB sisi barat 15 titik, 5 titik Sememi Baru 3,4,5 RT 3 RW 9 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo	Teralokasi TA. 2026
216	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 TITIK	MAKAM PAKAL SUMBERAN & SIDOREJO	Teralokasi TA. 2026
217	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	KEDINDING LOR GG JAMBU RT 006/RW 001, KELURAHAN TANAH KALI KKEDINDING, KECAMATAN KENJERAN.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
218	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	4 titik	Bratang Binangun IV RT 6 RW 8 Kelurahan Baratajaya	Teralokasi TA. 2026
219	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	16 Titik	Kupang Gunung Jaya 7 RT.07 RW.07 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
220	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	4 titik	Pandegiling tengah RT 8 RW 7 Kelurahan Tegalsari	Teralokasi TA. 2026
221	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 unit	Jl. Manukan Thohirin I RT 08 RW 10, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes	Teralokasi TA. 2026
222	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 Titik	KEDINDING TENGAH 9	Teralokasi TA. 2026
223	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 TITIK	BULAK BANTENG WETAN GG 5 RT 4 RW 8 KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN	Teralokasi TA. 2026
224	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	krukah utara VII A no.20 RT 02 RW 05 Kel. Ngagelrejo / Kec. Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
225	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Krukah Utara VII B , RW 05 Kel. Ngagelrejo, Kec Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
226	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Krukah Utara No.128 , RW 05 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
227	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	1 titik	jl ngagel jaya selatan no 86, Kel. Ngagelrejo , Kec. Wonokromo	Teralokasi TA. 2026
228	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Krukah Selatan GG XI B RW 05 Kel. Ngagelrejo , Kec Wonokromo,	Teralokasi TA. 2026
229	Pembangunan Prasarana Jalan di	Pemasangan Jaringan PJU	41 titik	jl. kapas lor gang Ie, If, Ic, gang bedak, gang II,	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	Jalan Kabupaten/Kota			gangIIa, gang ID,gang Ia,gang Ib	
230	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 titik	Jalan Kedunganyar VII / Kel. Sawahan / Kec. Sawahan	Teralokasi TA. 2026
231	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 Titik	Jalan Pradah Kalikendal Gang 2A (Gang Pertolongan dan Gang Manunggal) RT 2 RW 1 Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis	Teralokasi TA. 2026
232	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 Titik	Makam RW 1 kelurahan Dukuh Setro	Teralokasi TA. 2026
233	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Jl. Jagir Wonokromo Wetan RT 03 RW 06, Jagir, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
234	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	30 Unit	08/013 Genteng/Embong Kaliasin	Teralokasi TA. 2026
235	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 Unit	RT/RW: 05/013 Kec./Kel.: Genteng/Embong Kaliasin	Teralokasi TA. 2026
236	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 Unit	Sepanjang jalan batas rt 03 jalan dinoyo sekolahan gang 1	Teralokasi TA. 2026
237	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 Unit	Dinoyo sekolahan 1/64A	Teralokasi TA. 2026
238	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	20 Unit	sepanjang jalan granting baru 3	Teralokasi TA. 2026
239	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 Unit	Pertigaan : Gubeng Jaya Langgar dengan Gubeng Jaya 4 dan pertigaan Gubeng Jaya Langgar dengan Gubeng Jaya 3	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
240	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 Unit	Disepanjang jl gubeng jaya gang 2 no. 1 sampai 2	Teralokasi TA. 2026
241	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 Unit	RT/RW: 06/02 Kec./Kel.: Gubeng/Gubeng	Teralokasi TA. 2026
242	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	11 Unit	Sepanjang gubeng jaya gang 2 RT 15 , 7 titik, gang pertolongan 4 titik	Teralokasi TA. 2026
243	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 Unit	Jl Baratajaya 12/19	Teralokasi TA. 2026
244	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 Unit	Sepanjang jalan gubeng airlangga 7.	Teralokasi TA. 2026
245	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 Unit	Pemasangan papan	Teralokasi TA. 2026
246	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 Unit	Jl.Bratang Binangun Vll	Teralokasi TA. 2026
247	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	3 Unit	pemasangan papan	Teralokasi TA. 2026
248	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 Unit	RT/RW: 09/02 Kec./Kel.: Gubeng/Airlangga	Teralokasi TA. 2026
249	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 Unit	sepanjang jl gubeng jaya 1	Teralokasi TA. 2026
250	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	2 Unit	Sepanjang jalan Banowati gang 4	Teralokasi TA. 2026
251	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pemasangan Cermin Tikungan	3 Unit	pemasangan kaca cembung gg 12, ikut RW 3,5 dan 6	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	di Jalan Kabupaten/Kota				
252	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	20 Unit	Kec./Kel.: Gubeng/Baratajaya	Teralokasi TA. 2026
253	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	JL. DUPAK GANG 1 RT 04 RT 05 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
254	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	JL. DUPAK GANG 2 RT 04 RT 05 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
255	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	JL. DUPAK GANG 3 RT 04 RT 05 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
256	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 TITIK	JL. DUPAK GANG 5 RT 10 RW 06 DEPAN RUMAH NO. 25 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
257	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 TITIK	JL. DUPAK GANG 5 RT 11 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
258	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	JL. IKAN LUMBA - LUMBA RT 04 RW 02 KELURAHAN PERAK BARAT KECAMATAN KREMBANGAN.	Teralokasi TA. 2026
259	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 TITIK	KEDINDING LOR GG JAMBU SELATAN RT 006/RW 001, KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING, KECAMATAN KENJERAN.	Teralokasi TA. 2026
260	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	Jl. Dukuh bulak banteng suropati 4a, Kelurahan Bulak Banteng - Kenjeran	Teralokasi TA. 2026
261	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	Bulak Kali Tinjang Baru Blok A, RT 05 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
262	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	Bulak Kali Tinjang Baru Blok C, RT 05 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
263	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	Bulak Kali Tinjang Baru Blok D, RT 05 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
264	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 titik	Bulak Kali Tinjang Baru Blok E, RT 05 RW 06 Kel. Bulak, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
265	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 TITIK	JL. JEPARA GANG 3 RT 03 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
266	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	6 TITIK	JL. JEPARA GANG 8 RT 08 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
267	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 TITIK	JL. JEPARA GANG 10 RT 09 RW 01 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
268	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	14 TITIK	JL. DUPAK MASIGIT GANG 5 RT 03 RW 02 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
269	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 TITIK	karangpilang gang melati RT 01 RW 07	Teralokasi TA. 2026
270	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 TITIK	JL. PURWODADI RAYA RT 12 RW 04 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
271	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	3 Unit	rw 02 Gubeng/Gubeng	Teralokasi TA. 2026
272	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 TITIK	JL. PURWODADI UTARA RT 02 RW 04 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
273	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pemasangan Cermin Tikungan	1 TITIK	JL. DEMAK NO. 370 - 374 RT 01 RW 04	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	di Jalan Kabupaten/Kota			KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	
274	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 TITIK	JL. PURWODADI RAYA RT 12 RW 04 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
275	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Jl Jemur Ngawinan Gg Pondok Ijo, RT 05 RW 02 Kel. Jemurwonosari, Kec. Wonocolo	Teralokasi TA. 2026
276	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 TITIK	JL. PURWODADI GANG 2 RT 06 RW 04 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
277	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	15 Titik	Jalan Kalimas Baru 2	Teralokasi TA. 2026
278	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	JL. DUPAK RT 09 RW 06 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
279	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	RT 5 RW 1 kelurahan kedurus	Teralokasi TA. 2026
280	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	Simo Pomahan Baru II / RT. 1 RW 5	Teralokasi TA. 2026
281	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 TITIK	JL. DUPAK TIMUR 3 RT 03 RW 08 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
282	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 TITIK	JL. DUPAK TIMUR 3 RT 04 RW 08 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
283	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 TITIK	JL. DUPAK TIMUR 3 RT 05 RW 08 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
284	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 TITIK	JL. DUPAK TIMUR 2 RT 07 RW 08 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
285	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 TITIK	JL. DUPAK TIMUR 2 RT 08 RW 08 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
286	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	7 TITIK	JL. DUPAK TIMUR 2 RT 12 RW 08 KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN.	Teralokasi TA. 2026
287	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 TITIK	bangkingan gang makam mbah wongso	Teralokasi TA. 2026
288	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	20 titik	Mbendungan kelurahan sumurwelut/081216669 172	Teralokasi TA. 2026
289	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 titik	KEMBANG KUNING KRAMAT JAYA III SURABAYA	Teralokasi TA. 2026
290	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	2 UNIT	Jl. Semampir tengah Pertigaan jalan RT 11 RW 07	Teralokasi TA. 2026
291	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 Unit	Jl. Teluk Nibung Timur V RT. 05/RW. 08 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian.	Teralokasi TA. 2026
292	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	6 Titik	Jl. Tambak Asri 158, RT 12, RW 06, Kel. Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
293	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	6 Titik	Jl. Tambak asri mawar 3 No. 6, RT 21, RW 06, Kel. Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
294	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	6 Titik	Jl. Tanjung 3 No. 1, RT 25, RW 06, Kel. Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026

No	Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
295	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	4 Titik	Jl. Tambak Asri Gading 6 No. 21, RT 30, RW 06, Kel. Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
296	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 Titik	Jl. Tambak Asri Gading 6 No. 21, RT 30, RW 06, Kel. Morokrembangan	Teralokasi TA. 2026
297	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 Titik	Jl. Tempel Sukorejo 1 Timur, RT 03, RW 08, Kel. Wonorejo	Teralokasi TA. 2026
298	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	10 titik	Jl Sumbo 5/2 RT 004 RW 009 , Kelurahan Sidotopo , Kecamatan Semampir	Teralokasi TA. 2026
299	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	12 titik	Jl Dukuh Setro Rawasan RT 010 RW 002 Kelurahan Dukuh Setro kecamatan Tambaksari	Teralokasi TA. 2026
300	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 titik	Jl. Semampir Tengah gang pasar RT 11 RW 07	Teralokasi TA. 2026
301	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	Jl. Tembok Dukuh No. 28, RT 05, RW 08, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026
302	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Papan Nama Jalan - Plat Alumunium	1 Titik	Jl. Tembok Dukuh No. 26, RT 05, RW 08, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026
303	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	16 Titik	Jl. Tembok Dukuh No. 26, RT 05, RW 08, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026
304	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 Titik	Jl. Asem Jaya gang lebar, RW 04, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026
305	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	8 Titik	Jl. Asem Jaya gang 7, RT 07, RW 04, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026
306	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pemasangan Cermin Tikungan	5 Titik	Jl. Asem Jaya, RT 05, RW 04, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026

No		Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		di Jalan Kabupaten/Kota				
	307	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	4 Titik	Jl. Demak Timur 7, RT 07, RW 06 Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
	308	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	Jl. Demak Timur 7, RT 07, RW 06 Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
	309	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	5 Titik	Jl. Demak Timur 5, RT 5, RW 6, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
	310	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	Jl. Demak Timur 5, RT 5, RW 6, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
	311	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	Jl. Demak Timur 9, RT 11, RW 06, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
	312	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	1 Titik	Jl. Demak Timur 10, RT 10, RW 06, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
	313	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Jaringan PJU	3 Titik	Jl. Demak Timur 10, RT 10, RW 06, Kel. Gundih	Teralokasi TA. 2026
	314	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Cermin Tikungan	3 TITIK	AMBENGAN BATU DKA RT 9 RW 4 KELURAHAN TAMBAK SARI KECAMATAN TAMBAK SARI	Teralokasi TA. 2026
3	**Dinas Pendidikan**					
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Paket Pendaftaran Kejar Paket C	1 orang	Jl. Kalimas Baru 3 Langgar 3, Kelurahan Perak Utara - Pabean Cantian	Teralokasi TA. 2026
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Paket Pendaftaran Kejar Paket C	1 orang	Jl. Kalimas Baru 3 Langgar 3	Teralokasi TA. 2026
4	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**					

No		Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Paket Perikanan Tangkap (Perahu dan Mesin Perahu)	1 Paket	BULAK SETRO UTARA 5/27, RT/RW, 007/004, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Surabaya	Teralokasi TA. 2026
	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Paket Mesin Perahu 13 PK (Mesin Perahu 13 PK, As Ketinting, Propeler dan Oli Mesin)	1 Paket	sukolilo 1-A/3-B, RT:RW:001/002, Kel. Sukolilo Baru, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Paket Perikanan Tangkap (Perahu dan Mesin Perahu)	2 paket	Jl. Kalisari Timur RT 02 RW 05, Kalisari, Mulyorejo	Teralokasi TA. 2026
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Paket Mesin Perahu 9 PK (Mesin Perahu 9 PK, As Ketinting, Propeler dan Oli Mesin)	1 Paket	sukolilo 1-A/3-B, RT:RW:001/002, Kel. Sukolilo Baru, Kec. Bulak	Teralokasi TA. 2026
5	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**					
	1	Perluasan Kesempatan Kerja	Bimbingan Teknis Pembuatan Kue	20 Orang	rw 06 Gubeng/Mojo	Teralokasi TA. 2026
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	Bimbingan Teknis Pembuatan Batik	1 paket	Banyu Urip Kidul 10-E / 6 Surabaya	Teralokasi TA. 2026
	3	Perluasan Kesempatan Kerja	Bimbingan Teknis Cuci Kendaraan	1 Unit	Kec./Kel.: Gubeng/Baratajaya	Teralokasi TA. 2026
	4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Las FCAW	1 Orang	Kec./Kel.: Gubeng/Baratajaya RW3	Teralokasi TA. 2026
	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Bimbingan Teknis Sablon	15 orang	PDM Muhammadiyah Jl.Wuni no.9 Surabaya	Teralokasi TA. 2026
	6	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Desain Grafis	3 orang	PDM Muhammadiyah Jl.Wuni No.9 Surabaya	Teralokasi TA. 2026

No		Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
	7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Pastry Cook	5 orang	PD Muhammadiyah Jl.Wuni No.9 Surabaya	Teralokasi TA. 2026
	8	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Jasa Boga	3 orang	PD Muhammadiyah Jl.Wuni No.9 Surabaya	Teralokasi TA. 2026
	9	Perluasan Kesempatan Kerja	Bimbingan Teknis Cuci Kendaraan	6 Orang	Jl. Asem Jaya, RW 04, Kel. Tembok Dukuh	Teralokasi TA. 2026
6	**Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata**					
	1	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Perbaikan Lapangan Olahraga Tennis dan Pagar	300 m2	Jl. Ketintang Baru VIII / 12	Teralokasi TA. 2026
	2	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Perbaikan Lapangan Futsal	540 m2	Jl. Lempung Perdana RT 02 RW 05 Kel. Lontar Sambikerep - Depan SMPN 47	Teralokasi TA. 2026
	3	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Perbaikan Lapangan Futsal	300 m2	sidosermo 2 no 30 RW 04	Teralokasi TA. 2026
	4	Penyediaan prasarana dan	Perbaikan Lapangan Bulutangkis	300 m2	sidosermo 2 blok G RW 04	Teralokasi TA. 2026

No		Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				
	5	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Perbaikan Lapangan Bola Volley	250 Meter persegi	Pondok Benowo Indah Lapangan RT 01 RW 12 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal	Teralokasi TA. 2026
	6	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Perbaikan Lapangan Futsal	540 M2	Lapangan Futsal Rusun Sombo	Teralokasi TA. 2026
	7	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Perbaikan Lapangan Bola Volley	540 M2	Jl. Manukan Kasman (Lapangan Volley) RT 01 RW 10 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes	Teralokasi TA. 2026
	8	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Perbaikan Lapangan Bola Volley	280 M2	PBI RT 3 RW 12 KELURAHAN BABAT JERAWAT	Teralokasi TA. 2026
7	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**					
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Pembuatan Jaringan Hydrant Kering	600 Meter	08/013 Genteng/Embong Kaliasin	Teralokasi TA. 2026

No		Sub Kegiatan	Usulan	Volume	Alamat Lokasi	Keterangan
		Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				

4.2.5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan menjaga mutu pelayanan dasar melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pembentukan tim penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Keputusan Wali kota Surabaya Nomor 188.45/169/436.1.2/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Surabaya. Tim dimaksud memiliki tugas salah satunya yaitu menyusun rencana aksi penerapan SPM serta melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Kota Surabaya. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2024-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali kota Surabaya Nomor 120 Tahun 2024. Sedangkan untuk Rencana Aksi Penerapan SPM di Kota Surabaya Tahun 2026 saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh Tim Penerapan SPM.

Selain itu, SPM juga diintegrasikan sejak penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, baik di tingkat kota maupun Perangkat Daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemenuhan belanja wajib dan pemenuhan alokasi belanja minimal pada urusan wajib pelayanan dasar (*mandatory spending*) yang meningkat di bandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, maka diharapkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas di Kota Surabaya dapat terpenuhi.

4.2.6 Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan

kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk mendukung pencapaian target TPB dengan menyelaraskan indikator utama pembangunan daerah Kota Surabaya di Tahun 2026 dengan Indikator Capaian TPB beserta strategi dan program yang akan dilaksanakan di Tahun 2026, yang dapat dilihat pada tabel IV.7 di bawah ini

Tabel IV. 7
Penyelarasan Indikator Capaian TPB dengan Program RKPD Tahun 2026

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
Angka Harapan Hidup	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan: Implementasi teknologi pengolahan air, peningkatan efisiensi penggunaan air, dan perlindungan sumber daya air. 2. Pengembangan Infrastruktur Air: Investasi dalam infrastruktur air, seperti pembangunan reservoir dan jaringan distribusi air bersih. 3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Kampanye kesadaran untuk penggunaan air yang efisien dan upaya konservasi air. 4. Kebijakan dan Regulasi: Pembuatan kebijakan yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan dan adil. 1. Peningkatan Produksi Pangan Lokal • Pengembangan Pertanian Perkotaan: Promosikan pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong dan teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan akuaponik untuk meningkatkan produksi pangan lokal. • Dukungan untuk Petani: Berikan insentif dan bantuan teknis kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pangan. • Penggunaan Teknologi Pertanian: Adopsi teknologi modern dalam pertanian seperti penggunaan benih unggul, irigasi cerdas, dan pertanian presisi untuk meningkatkan hasil panen. 2. Penguatan Jaringan Distribusi dan Logistik • Penguatan Infrastruktur Logistik: Investasi dalam infrastruktur logistik untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dan tepat waktu ke seluruh kecamatan.	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	• Pemantauan Ketersediaan Pangan: Implementasi sistem pemantauan ketersediaan dan harga pangan secara real-time untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan pangan dengan cepat. 3. Diversifikasi Sumber Pangan • Promosi Konsumsi Pangan Alternatif: Edukasi masyarakat tentang manfaat dan cara mengonsumsi sumber pangan alternatif selain beras, seperti umbi- umbian, jagung, dan lainya. • Pengembangan Produk Pangan Lokal: Dorong pengembangan dan konsumsi produk pangan lokal yang beragam untuk mengurangi ketergantungan pada beras. 4. Peningkatan Ketahanan Pangan • Program Lumbung Pangan: Mengembangkan dan memperkuat lumbung pangan komunitas untuk menyimpan cadangan pangan yang dapat digunakan saat terjadi kekurangan. • Sistem Perlindungan Sosial: Program bantuan sosial dan subsidi pangan untuk kelompok rentan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai. 5. Kolaborasi dan Kemitraan • Kemitraan dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pangan melalui investasi dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). • Kerjasama Antar Daerah: Bangun kerjasama dengan daerah lain yang memiliki surplus pangan untuk mengatasi defisit pangan di Surabaya. 1. Pengembangan Transportasi Umum Terintegrasi Pengembangan transportasi umum terintegrasi bertujuan untuk mengurangi polusi udara dari sektor transportasi, sehingga hal	Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 8. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 9. Program Penanganan Kerawanan Pangan

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan essensial. 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan. 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. 8.1.1.(a) PDB per kapita. 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.	tersebut dapat secara signifikan meningkatkan indeks kualitas udara. 2. Penyediaan RTH Perkotaan Penyediaan RTH Perkotaan berupa taman, median jalan, RTH vertikal, dan RTH bangunan Gedung (green building), hal ini untuk menyerap polutan udara. 3. Kolaborasi Pemerintah dengan Badan Usaha Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam rangka pengurangan polutan udara melalui kemitraan pembangunan infrastruktur hijau, penerapan kebijakan green and low carbon city, dan upaya pengurangan polutan udara lainnya. 4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kualitas Udara Monitoring dan evaluasi indekas kualitas udara dengan melakukan pengukuran indeks kualitas udara rutin dan uji emisi kendaraan secara berkala. 5. Melakukan Upaya Daur Ulang Sampah Melakukan upaya daur ulang sampah di tiap tingkatan untuk mengurangi emisi akibat pembakaran sampah. 6. Koordinasi Antar Instansi Koordinasi antar instansi baik pemerintah dan swasta untuk peningkatan indeks kualitas udara. 7. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas udara seperti menanam vegetasi di lingkungan rumah, penggunaan transportasi umum, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dsb. 1. Restorasi Kualitas Air Sungai Restorasi kualitas air sungai melalui metode peningkatan kualitas	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 10.1.1* Koefisien Gini. 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	air sungai berbasis teknologi, ekologi, ekologi engineering, dan sosial ekologi engineering. 2. Perhitungan Daya Tampung Pencemaran Sungai Perlu dilakukan perhitungan daya tamping beban pencemaran sungai berdasarkan peruntukan air sungai per segmen sehingga dapat ditentukan beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan bagi masing-masing sumber pencemar. Daya tamping sungai dapat digunakan sebagai dasar penetapan izin lokasi dan izin lingkunagn bagi usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari air sungai. 3. Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Daerah Aliran Sungai Penyusunan rencana induk pengelolaan sumber daya air berbasis DAS digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir khususnya terkait pengelolaan sumber daya air. 4. Pemantauan Kualitas Limbah Air Sungai Pemantauan berkala kualitas limbah dan air sungai untuk menentukan arah kebijakan pengendaliaan dan penanggulangan pencemaran air sungai. 5. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Peningkatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air. Peningkatan koordinasi antar instansi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip pengendalian pencemaran air terhadap rencana usaha/kegiatan yang mengajukan perizinan. 6. Pengetatan Perijinan Pembuangan Air Limbah Pengetatan perijinan pembuangan air limbah melalui penetapan	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		kriteria baku lingkungan dan pengenaan pajak pembuangan limbah terhadap jenis limbah tertentu. 7. Penerapan Kuota Air Limbah Industri dan Usaha Penerapan kuota pembuangan air limbah industry berdasarkan lokasi izin usaha dan daya tampung pencemaran sungai. 8. Penetapan Kelas Air Sungai Penetapan kelas air sungai dengan tujuan penentuan aktivitas yang sesuai dengan kualitas dan daya tampung pencemaran sungai. 9. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas air melalui upaya sederhana seperti penggunaan air dengan bijak, tidak mencemari sungai dengan polutan/limbah rumah tangga, penggunaan detergen ramah lingkungan, dsb.	
		1. Pengembangan Sistem Trasnportasi Umum Yang Terintegrasi Pegurangan penggunaan kendaraan bermotor dengan menciptakan sistem transportasi umum yang terintegrasi serta jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman untuk mendukung pengembangan sistem transportasi umum. 2. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 3. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 4. Penguatan Kerjasama Antar Pemerintah/Swasta Penguatan kerjasama antar pemerintah/swasta dalam mendukung pemenuhan RTH dan penyediaan transportasi umum, baik antar pemerintah daerah kota dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, pemerintah daerah kota dengan pemerintah	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		pusat/pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kota dengan pihak swasta. 5. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	
		1. Pengembangan Sistem Trasnportasi Umum Yang Terintegrasi Pegurangan penggunaan kendaraan bermotor dengan menciptakan sistem transportasi umum yang terintegrasi serta jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman untuk mendukung pengembangan sistem transportasi umum. 2. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 3. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 4. Penguatan Kerjasama Antar Pemerintah/Swasta Penguatan kerjasama antar pemerintah/swasta dalam mendukung pemenuhan RTH dan penyediaan transportasi umum, baik antar pemerintah daerah kota dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, pemerintah daerah kota dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kota dengan pihak swasta. 5. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Secara Rutin Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara untuk perumusan kebijakan. 6. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1. Pengaturan Kebijakan: Menetapkan peraturan dan kebijakan yang ketat terkait penggunaan lahan, termasuk peraturan zonasi, perizinan, dan insentif-disinsentif untuk praktik-praktik ramah lingkungan. 2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan insentif bagi praktik-praktik berkelanjutan seperti agroforestri, pelestarian flora dan fauna, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 3. Pengembangan Alternatif Ekonomi: Membantu komunitas lokal untuk mengembangkan sumber penghidupan alternatif yang tidak merusak ekosistem, seperti pariwisata berkelanjutan atau produksi pertanian organik. 4. Pemantauan dan Penegakan Hukum: Menerapkan sistem pemantauan yang efektif dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar. 5. Pendidikan dan Kampanye Kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi ekosistem dan dampak negatif dari alih fungsi lahan, pembuangan sampah sembarangan, dan penggunaan alat dan bahan berbahaya untuk pertanian & perikanan, serta mendorong partisipasi dalam upaya konservasi. 6. Kolaborasi Antarstakeholder: Mendorong kerjasama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merancang dan melaksanakan program-program konservasi ekosistem dan perlindungan terhadap kehidupan flora dan fauna yang holistik dan berkelanjutan.	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 3. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	1. Pengembangan Transportasi Umum Terintegrasi Pengembangan transportasi umum terintegrasi bertujuan untuk mengurangi polusi udara dari sektor transportasi, sehingga hal tersebut dapat secara signifikan meningkatkan indeks kualitas udara. 2. Penyediaan RTH Perkotaan Penyediaan RTH Perkotaan berupa taman, median jalan, RTH vertikal, dan RTH bangunan Gedung (green building), hal ini untuk menyerap polutan udara. 3. Kolaborasi Pemerintah dengan Badan Usaha Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam rangka pengurangan polutan udara melalui kemitraan pembangunan infrastruktur hijau, penerapan kebijakan green and low carbon city, dan upaya pengurangan polutan udara lainnya. 4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kualitas Udara Monitoring dan evaluasi indekas kualitas udara dengan melakukan pengukuran indeks kualitas udara rutin dan uji emisi kendaraan secara berkala. 5. Melakukan Upaya Daur Ulang Sampah Melakukan upaya daur ulang sampah di tiap tingkatan untuk mengurangi emisi akibat pembakaran sampah. 6. Koordinasi Antar Instansi Koordinasi antar instansi baik pemerintah dan swasta untuk peningkatan indeks kualitas udara. 7. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas udara seperti menanam vegetasi di lingkungan rumah, penggunaan transportasi umum, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dsb.	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 5. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		1. Restorasi Kualitas Air Sungai Restorasi kualitas air sungai melalui metode peningkatan kualitas air sungai berbasis teknologi, ekologi, ekologi engineering, dan sosial ekologi engineering. 2. Perhitungan Daya Tampung Pencemaran Sungai Perlu dilakukan perhitungan daya tamping beban pencemaran sungai berdasarkan peruntukan air sungai per segmen sehingga dapat ditentukan beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan bagi masing-masing sumber pencemar. Daya tamping sungai dapat digunakan sebagai dasar penetapan izin lokasi dan izin lingkunagn bagi usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari air sungai. 3. Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Daerah Aliran Sungai Penyusunan rencana induk pengelolaan sumber daya air berbasis DAS digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir khususnya terkait pengelolaan sumber daya air. 4. Pemantauan Kualitas Limbah Air Sungai Pemantauan berkala kualitas limbah dan air sungai untuk menentukan arah kebijakan pengendaliaan dan penanggulangan pencemaran air sungai. 5. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Peningkatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air. Peningkatan koordinasi antar instansi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip pengendalian pencemaran air terhadap rencana usaha/kegiatan yang mengajukan perizinan. 6. Pengetatan Perijinan Pembuangan Air Limbah Pengetatan perijinan pembuangan air limbah melalui penetapan	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		kriteria baku lingkungan dan pengenaan pajak pembuangan limbah terhadap jenis limbah tertentu. 7. Penerapan Kuota Air Limbah Industri dan Usaha Penerapan kuota pembuangan air limbah industry berdasarkan lokasi izin usaha dan daya tampung pencemaran sungai. 8. Penetapan Kelas Air Sungai Penetapan kelas air sungai dengan tujuan penentuan aktivitas yang sesuai dengan kualitas dan daya tampung pencemaran sungai. 9. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas air melalui upaya sederhana seperti penggunaan air dengan bijak, tidak mencemari sungai dengan polutan/limbah rumah tangga, penggunaan detergen ramah lingkungan, dsb.	
		1. Melakukan Reboisasi dan Pelestarian Kawasan Lindung Melakukan upaya reboisasi pada lahan kritis dan kurang bervegetasi di tanah aset pemerintah kota serta melakukan upaya pelestarian (khususnya reboisasi dan penataan) pada Kawasan lindung seperti sempadan sungai, sempadan pantai, Kawasan mangrove, pemakaman, dsb) **2.** Melakukan Upaya Pelestarian Flora dan Fauna Langka di Kota Surabaya Melakukan upaya pelestarian flora dan fauna langka di Kota Surabaya dengan pelestarian habitat bagi flora dan fauna seperti Buaya Muara, Kucing Bakau, dsb) **3.** Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Khususnya Hutan Kota Pengadaan ruang terbuka hijau khususnya hutan kota di sekitar Kawasan budidaya padat untuk mendukung fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi.	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		4. Memberlakukan AMDAL Pemberlakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) seperti pembangunan infrastruktur untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. **5.** Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Meningkatkan koordinasi antar instansi baik pemerintah dan swasta dalam rangka peningkatan indeks kualitas lahan. **6.** Meningkatan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas lahan melalui upaya sederhana seperti penanaman vegetasi di lingkungan rumah, penerapan program pekerangan rumah lestari, penataan lingkungan dengan konsep penanaman vegetasi, dsb.	
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki	**1.** Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Program seperti USAID IUWASH Tangguh berupaya memperkuat tata kelola dan pembiayaan sektor WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air), yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses sanitasi. **2.** Meningkatkan Akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Fokus pada peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang aman dan berketahanan iklim bagi masyarakat berpenghasilan rendah di area perkotaan adalah prioritas **3.** Pengembangan Infrastruktur yang Sesuai Pengembangan infrastruktur sanitasi seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	akses terhadap layanan sanitasi layak 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	**4.** Perubahan Perilaku Masyarakat Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung pencapaian akses sanitasi yang aman. **5.** Kerjasama dan Pendanaan Pengembangan kerjasama antar lembaga dan pola pendanaan yang inovatif juga menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pembangunan sanitasi. **6.** Peningkatan Kapasitas Institusi Meningkatkan keterampilan dan kapasitas petugas di sektor WASH dan PSDA untuk mendukung layanan pengelolaan sanitasi yang efektif. **7.** Pemantauan kualitas lingkungan Melakukan pemantauan kualitas dan pengukuran air tanah dan permukaan untuk melihat Tingkat pencemaran. Hal ini untuk menilai Tingkat pencemaran akibat sampah dan sanitasi perkotaan. **8.** Implementasi SSK (Stategi Sanitasi Kota) Surabaya tahun 2022-2026	
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1. Masterplan Persampahan Menyusun masterplan persampahan yang menjadi acuan pengelolaan sampah bagi berbagai komponen terkait. 2. Peningkatan Tata Kelola: Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, memperkuat partisipasi publik serta produsen dalam implementasi bisnis hijau. 3. Menambah fasilitas pengolahan sampah menambah jumlah fasilitas persampahan meliputi TPST dan TPS3R untuk meningkatkan jumlah sampah yang dikelola per hari. 4. Pelibatan Masyarakat dan Swasta Mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta secara	1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		terpadu untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Baik terlibat langsung seperti di bank sampah maupun dalam hal pendanaan melalui investasi bidang persampahan. 5. Insentif Pengelolaan Sampah Menerapkan insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk praktik daur ulang. 6. Edukasi masyarakat Mengubah mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan melalui sosialisasi dan kampanye pengurangan sampah dari Tingkat rumah tangga. 7. Mengembangkan potensi ekonomi sirkular bidang persampahan dari lingkup rumah tangga. 8. Penegakan Hukum Memastikan regulasi terkait pengelolaan sampah dipatuhi dan ditegakkan oleh semua pihak	
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1. Masterplan Persampahan: Menyusun masterplan persampahan yang menjadi acuan pengelolaan sampah bagi berbagai komponen terkait. 2. Peningkatan Tata Kelola: Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, memperkuat partisipasi publik serta produsen dalam implementasi bisnis hijau. 3. Menambah fasilitas pengolahan sampah menambah jumlah fasilitas persampahan meliputi TPST dan TPS3R untuk meningkatkan jumlah sampah yang dikelola per hari. 4. Pelibatan Masyarakat dan Swasta: Mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta secara	1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHA 2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		terpadu untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Baik terlibat langsung seperti di bank sampah maupun dalam hal pendanaan melalui investasi bidang persampahan.Insentif Pengelolaan Sampah Menerapkan insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk praktik daur ulang. 5. Edukasi masyarakat Mengubah mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan melalui sosialisasi dan kampanye pengurangan sampah dari Tingkat rumah tangga. 6. Mengembangkan potensi ekonomi sirkular bidang persampahan dari lingkup rumah tangga. 7. Penegakan Hukum Memastikan regulasi terkait pengelolaan sampah dipatuhi dan ditegakkan oleh semua pihak	
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi	1. Peningkatan Produksi Pangan Lokal • Pengembangan Pertanian Perkotaan: Promosikan pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong dan teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan akuaponik untuk meningkatkan produksi pangan lokal. • Dukungan untuk Petani: Berikan insentif dan bantuan teknis kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pangan. • Penggunaan Teknologi Pertanian: Adopsi teknologi modern dalam pertanian seperti penggunaan benih unggul, irigasi cerdas, dan pertanian presisi untuk meningkatkan hasil panen. 2. Penguatan Jaringan Distribusi dan Logistik • Penguatan Infrastruktur Logistik: Investasi dalam infrastruktur logistik untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dan tepat waktu ke seluruh kecamatan.	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 3. PROGRAM PENANGANAN

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	• Pemantauan Ketersediaan Pangan: Implementasi sistem pemantauan ketersediaan dan harga pangan secara real-time untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan pangan dengan cepat. 3. Diversifikasi Sumber Pangan • Promosi Konsumsi Pangan Alternatif: Edukasi masyarakat tentang manfaat dan cara mengonsumsi sumber pangan alternatif selain beras, seperti umbi- umbian, jagung, dan lainya. • Pengembangan Produk Pangan Lokal: Dorong pengembangan dan konsumsi produk pangan lokal yang beragam untuk mengurangi ketergantungan pada beras. 4. Peningkatan Ketahanan Pangan • Program Lumbung Pangan: Mengembangkan dan memperkuat lumbung pangan komunitas untuk menyimpan cadangan pangan yang dapat digunakan saat terjadi kekurangan. • Sistem Perlindungan Sosial: Program bantuan sosial dan subsidi pangan untuk kelompok rentan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai. 5. Kolaborasi dan Kemitraan • Kemitraan dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pangan melalui investasi dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). • Kerjasama Antar Daerah: Bangun kerjasama dengan daerah lain yang memiliki surplus pangan untuk mengatasi defisit pangan di Surabaya.	KERAWANAN PANGAN
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1. Pengembangan Sumber Air: Melakukan investasi dalam pengembangan sumber-sumber air baru seperti peningkatan kapasitas penyediaan air dari sumber alami, pengembangan	8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
Minum Perpipaan (%)	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	infrastruktur penyimpanan air, dan peningkatan efisiensi penggunaan air. 2. **Promosi Konservasi Air**: Melakukan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan penggunaan yang efisien. Ini dapat melibatkan penyuluhan tentang praktik-praktik hemat air di rumah tangga, industri, dan sektor-sektor lainnya. 3. **Peningkatan Infrastruktur Sanitasi**: Meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet dan fasilitas cuci tangan. Infrastruktur sanitasi yang memadai dapat membantu mencegah penyebaran penyakit terkait air dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 4. **Peningkatan Akses Terhadap Teknologi**: Mengembangkan dan memperluas akses terhadap teknologi untuk mengatasi masalah air seperti sistem pengolahan air bersih, teknologi hemat air, dan sistem monitoring untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan air. 5. **Kemitraan dan Kolaborasi**: Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah air secara bersama-sama. Kolaborasi ini dapat meliputi pembagian sumber daya, pendanaan proyek- proyek infrastruktur, dan pembangunan kapasitas. 6. **Pendidikan dan Pelatihan**: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang praktik- praktik kebersihan, kesehatan, dan konservasi air. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal di sekolah-sekolah dan pelatihan-pelatihan komunitas. 7. **Kebijakan dan Regulasi**: Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung	(SDA) 9. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 10. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 11. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 12. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk regulasi tentang penggunaan air, standar sanitasi, dan perlindungan sumber air. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak dari ketidakcapaian indikator TPB terkait akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan di Kota Surabaya, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.	
		1. Restorasi Kualitas Air Sungai Restorasi kualitas air sungai melalui metode peningkatan kualitas air sungai berbasis teknologi, ekologi, ekologi engineering, dan sosial ekologi engineering. 2. Perhitungan Daya Tampung Pencemaran Sungai Perlu dilakukan perhitungan daya tamping beban pencemaran sungai berdasarkan peruntukan air sungai per segmen sehingga dapat ditentukan beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan bagi masing-masing sumber pencemar. Daya tamping sungai dapat digunakan sebagai dasar penetapan izin lokasi dan izin lingkunagn bagi usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari air sungai. 3. Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Daerah Aliran Sungai Penyusunan rencana induk pengelolaan sumber daya air berbasis DAS digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir khususnya terkait pengelolaan sumber daya air. 4. Pemantauan Kualitas Limbah Air Sungai Pemantauan berkala kualitas limbah dan air sungai untuk menentukan arah kebijakan pengendaliaan dan penanggulangan pencemaran air Sungai.	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		5. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Peningkatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air. Peningkatan koordinasi antar instansi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip pengendalian pencemaran air terhadap rencana usaha/kegiatan yang mengajukan perizinan. 6. Pengetatan Perijinan Pembuangan Air Limbah Pengetatan perijinan pembuangan air limbah melalui penetapan kriteria baku lingkungan dan pengenaan pajak pembuangan limbah terhadap jenis limbah tertentu. 7. Penerapan Kuota Air Limbah Industri dan Usaha Penerapan kuota pembuangan air limbah industry berdasarkan lokasi izin usaha dan daya tampung pencemaran sungai. 8. Penetapan Kelas Air Sungai Penetapan kelas air sungai dengan tujuan penentuan aktivitas yang sesuai dengan kualitas dan daya tampung pencemaran sungai. 9. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas air melalui upaya sederhana seperti penggunaan air dengan bijak, tidak mencemari sungai dengan polutan/limbah rumah tangga, penggunaan detergen ramah lingkungan, dsb.	
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	1. Pengembangan Sumber Air: Melakukan investasi dalam pengembangan sumber-sumber air baru seperti peningkatan kapasitas penyediaan air dari sumber alami, pengembangan infrastruktur penyimpanan air, dan peningkatan efisiensi penggunaan air. 2. **Promosi Konservasi Air**: Melakukan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan penggunaan yang efisien. Ini dapat melibatkan penyuluhan tentang praktik-	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	praktik hemat air di rumah tangga, industri, dan sektor-sektor lainnya. 3. **Peningkatan Infrastruktur Sanitasi**: Meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet dan fasilitas cuci tangan. Infrastruktur sanitasi yang memadai dapat membantu mencegah penyebaran penyakit terkait air dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 4. **Peningkatan Akses Terhadap Teknologi**: Mengembangkan dan memperluas akses terhadap teknologi untuk mengatasi masalah air seperti sistem pengolahan air bersih, teknologi hemat air, dan sistem monitoring untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan air. 5. **Kemitraan dan Kolaborasi**: Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah air secara bersama-sama. Kolaborasi ini dapat meliputi pembagian sumber daya, pendanaan proyek- proyek infrastruktur, dan pembangunan kapasitas. 6. **Pendidikan dan Pelatihan**: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang praktik- praktik kebersihan, kesehatan, dan konservasi air. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal di sekolah-sekolah dan pelatihan-pelatihan komunitas. 7. **Kebijakan dan Regulasi**: Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk regulasi tentang penggunaan air, standar sanitasi, dan perlindungan sumber air. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak dari ketidakcapaian indikator TPB terkait akses terhadap air minum	3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		layak dan berkelanjutan di Kota Surabaya, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.	
Indeks Risiko Bencana	1.5.1* Jumlah korban mening gal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Telah tertuang dalam Dokumen Penanggulangan Bencana Kota Surabaya	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penanganan Bencana

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		
Persentase penurunan intensitas emisi GRK	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	1. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 2. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 3. Penguatan Kerjasama Antar Pemerintah/Swasta Penguatan kerjasama antar pemerintah/swasta dalam mendukung pemenuhan RTH dan penyediaan transportasi umum, baik antar pemerintah daerah kota dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, pemerintah daerah kota dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kota dengan pihak swasta 4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Secara Rutin Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara untuk perumusan kebijakan. 5. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	1. Program Penanganan Bencana 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	11.6.1 Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan 11.7.1 Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) 12.5.1 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 14.5.1 Jumlah luas kawasan konservasi perairan 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan 15.2.1.(d) Jumlah kesatuan pengelolaan hutan 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan	1. Menambah fasilitas pengolahan sampah menambah jumlah fasilitas persampahan meliputi TPST dan TPS3R untuk meningkatkan jumlah sampah yang dikelola per hari. 2. Insentif Pengelolaan Sampah Menerapkan insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk praktik daur ulang. 3. Edukasi masyarakat Mengubah mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan melalui sosialisasi dan kampanye pengurangan sampah dari Tingkat rumah tangga. 4. Mengembangkan potensi ekonomi sirkular bidang persampahan dari lingkup rumah tangga. 1. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 2. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 3. Dukungan Kebijakan Perubahan Iklim Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan kota. 4. Memperkuat Edukasi Terkait Perubahan Iklim Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim 5. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	
	13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	1. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 2. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 3. Penguatan Kerjasama Antar Pemerintah/Swasta Penguatan kerjasama antar pemerintah/swasta dalam mendukung pemenuhan RTH dan penyediaan transportasi umum, baik antar pemerintah daerah kota dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, pemerintah daerah kota dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kota dengan pihak swasta. 4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Secara Rutin Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara untuk perumusan kebijakan 5. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	

4.2.7 Inovasi Pembangunan Tahun 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peranan inovasi daerah ini sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi, melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Sesuai dengan tema RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 ***"Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur",*** pada tahun 2026 dilaksanakan beberapa inovasi unggulan guna mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2026, antara lain :

1. ***Surabaya Medical Tourism*** **(SMS)** sebagai upaya memperkuat transformasi Kota Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan serta merupakan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Wisata Medis di Rumah Sakit. Upaya ini tidak hanya mendukung transformasi sektor kesehatan dan pariwisata, tetapi juga sejalan dengan misi pembangunan inklusif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan *Medical Tourism* juga diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja layak, dan pembangunan ekonomi inklusif. Melalui penguatan integrasi layanan kesehatan dan pariwisata, *Medical Tourism* diharapkan menjadi lokomotif baru pembangunan ekonomi Surabaya, serta memperkuat citra kota ini sebagai destinasi unggulan di tingkat regional.

2. **1 Balai RW 1 Tenaga Kesehatan** merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan akses layanan kesehatan bagi warga dengan menempatkan satu tenaga kesehatan di setiap Balai RW. Program ini mencakup 1.179 Balai RW di seluruh Surabaya dan menyediakan layanan kesehatan dasar seperti konsultasi, skrining, dan pengobatan. Untuk pemenuhan tenaga kesehatan, Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Civitas Akademika juga organisasi profesi seperti, Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Program ini juga bertujuan untuk mengurangi antrean di Puskesmas dengan memberikan pemeriksaan rutin di tingkat komunitas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan cepat, mudah serta dekat dengan tempat tinggal masing-masing warga.
3. **1 Kelurahan 1 Ambulans** merupakan program yang bertujuan untuk memastikan setiap kelurahan di Surabaya memiliki minimal satu ambulans yang siap siaga untuk memberikan layanan kesehatan darurat dengan cepat dan tepat. Ambulans ini tersedia untuk kebutuhan antar-jemput pasien secara gratis, dengan waktu tanggap darurat yang ditargetkan sekitar 15 menit, yang diharapkan akan terus ditingkatkan kedepannya.
4. **1P1P (*One Puskesmas One Pediatrician*)** merupakan inovasi yang menugaskan minimal satu dokter spesialis anak (*pediatrician*) untuk menjadi pendamping setiap puskesmas di Kota Surabaya. Inovasi ini memastikan bahwa setiap anak, khususnya balita dengan risiko atau status stunting, mendapatkan pemeriksaan dan pendampingan yang lebih terarah dan profesional. Dengan keberadaan dokter spesialis anak di tingkat pelayanan primer, proses deteksi dini, diagnosis, serta intervensi medis terhadap balita stunting menjadi lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan. Ini juga mempermudah rujukan apabila anak memerlukan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
5. **1P1O (*One Puskesmas One Obgyn*)** merupakan inovasi yang menugaskan satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk mendampingi setiap puskesmas guna memberikan pelayanan khusus bagi ibu hamil, terutama yang berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan kekurangan energi kronis (KEK). Hal ini penting karena kondisi kesehatan ibu selama hamil sangat menentukan kualitas tumbuh kembang janin. Melalui 1P1O, ibu hamil

mendapatkan pemeriksaan rutin, pemantauan status gizi, serta edukasi menyeluruh seputar kehamilan sehat.

6. **Integrasi Layanan Primer (ILP)** melalui 1 Kelurahan 1 Pustu ILP dan Posyandu Keluarga. Program Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mendekatkan dan menyatukan berbagai layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Melalui ILP, pelayanan kesehatan tidak lagi terfragmentasi berdasarkan program, melainkan terintegrasi berdasarkan siklus kehidupan individu, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan 1 Puskesmas Pembantu ILP di tiap-tiap kelurahan dan Posyandu Keluarga. Selain itu, dilakukan juga optimalisasi peran Kader Surabaya Hebat yang telah dibekali dengan pelatihan Kompetensi Dasar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar di posyandu keluarga serta home visit. Tujuan utama dari inisiatif ini antara lain adalah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas di tingkat Balai RW serta menekankan pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan untuk mengurangi beban penyakit.
7. ***Sinau dan Ngaji Bareng*** di Balai RW. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk menyediakan ruang belajar dan kegiatan keagamaan bagi anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Dengan memanfaatkan Balai RW sebagai pusat kegiatan, program ini mendekatkan akses pendidikan informal dan spiritual kepada anak-anak Kota Surabaya. Kegiatan ini meliputi pendampingan belajar untuk siswa SD dan SMP serta pengajaran agama melalui kegiatan mengaji. Program ini juga bertujuan untuk menyediakan ruang aman dan produktif bagi anak-anak. Pelaksanaan program ini melibatkan mahasiswa yang berkolaborasi dengan tutor dan guru serta masyarakat. Program ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda.
8. Optimalisasi ***Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*** di Balai RW. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini menyediakan layanan konseling dan edukasi keluarga

langsung di tingkat RW, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan relawan. Mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya dilibatkan sebagai fasilitator setelah mengikuti pelatihan khusus. Kelas parenting rutin diadakan setiap hari Selasa pukul 15.00 WIB. Dengan pendekatan yang berbasis komunitas, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan, anak-anak dan keluarga di Kota Surabaya.

9. ***Surabaya Creative hub***, merupakan salah satu rencana pengembangan ekonomi kreatif Kota Surabaya dengan memanfaatkan bangunan ex Hi Tech Mall Surabaya, dan nantinya akan dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sektor sehingga menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan memiliki nilai keberlanjutan.
10. Pengembangan 17 kampung tematik wisata. Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Surabaya yang berdampak pada perputaran uang di masyarakat dan menciptakan peluang bertambahnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
11. Pengembangan kawasan wisata Kota Lama Surabaya akan terus berlanjut di tahun 2026 sebagai bagian dari upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi historis, budaya, dan ekonomi yang dimilikinya. Kawasan ini menyimpan jejak sejarah kota Surabaya yang sangat berharga dan memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun berbagai penataan telah dilakukan, kawasan Kota Lama masih memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan, baik dari sisi pelestarian bangunan cagar budaya, penguatan narasi sejarah, hingga pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan kreatif dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya akan difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur pendukung wisata, aktivasi ruang-ruang interaktif, serta kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan Kota Lama sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Surabaya, mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif bagi pelaku UMKM, komunitas seni, serta sektor jasa dan kuliner.

12. ***Surabaya Experience Hub,*** merupakan pariwisata yang terintegrasi yang bertujuan menghadirkan pengalaman pariwisata perkotaan yang lengkap dengan memadukan kampung wisata tematik dan destinasi wisata serta mengoptimalkan layanan wisata yang telah tersedia seperti pembuatan narasi di Museum sepuluh Nopember dengan huruf *braille* untuk pengunjung disabilitas, kerjasama dengan pihak *cruise* dan travel biro untuk mendatangkan kapal *cruise* yang merupakan salah satu perwujudan sinergi dengan pihak swasta sehingga dapat menyajikan tampilan wisatanya dan jadwal event, serta menjadikan Gelora Bung Tomo sebagai destinasi wisata baru (*sport tourism*) bekerjasama dengan Persebaya.
13. Pengembangan 153 Kampung Sayur binaan merupakan inovasi baru yang sebelumnya belum terimplementasi secara merata di seluruh kelurahan. Program ini diadakan dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan daerah sehingga diharapkan akan terjadi pemenuhan pangan alternatif dan dengan didukung diversifikasi pangan di kewilayahan, dapat memberikan efek ketercukupan pangan berbasis kewilayahan.
14. Kampung Pancasila dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Surabaya. Dengan berbasis Rukun Warga, Kampung Pancasila diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, kegiatan sosial dan ekonomi, pengelolaan lingkungan dan sampah, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kampung Pancasila merupakan fase akhir dari Kampung Madani dimana Kampung tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mengedepankan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan kemandirian warga yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, Kampung Pancasila akan didukung oleh satuan tugas yang beranggotakan unsur masyarakat sebagai ujung tombak agen perwujudan Kampung Pancasila yang Aman, Sehat, Madani, Ramah Anak dan Perempuan, serta Tangguh Bencana.
15. Digitalisasi pemetaan kawasan rawan keamanan kota dalam upaya penekanan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, serta mencegah adanya gangguan keamanan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan tingkat kerawanan ganguan ketentraman dan ketertiban di kawasan

Kota Surabaya. Proses bisnisnya dimulai dari petugas Satpol PP melakukan input data gangguan kemamanan berdasarkan jenis, waktu, lokasi, kronologi, pelaku serta korban berdasarkan kasus yang telah terjadi selama ini. Kemudian sistem akan menyimpan data dan melakukan analisis tingkat gangguan keamanan di masing-masing wilayah serta menyajikan informasi tingkat gangguan keamanan dalam bentuk peta digital. Dari peta digital tersebutlah akan dijadikan sebagai dasar Satpol PP menyusun rencana penanganan serta sebagai dasar dalam menentukan prioritas operasi pengendalian dan penertiban.

16. Surabaya *investment week*, merupakan kegiatan promosi investasi strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan, atau asosiasi untuk memperkenalkan berbagai peluang investasi kepada calon investor. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik minat investor dengan menyajikan informasi mendalam terkait proyek investasi unggulan, sektor prioritas, serta kebijakan pendukung yang ditawarkan oleh pemerintah daerah secara tatap muka.
17. Call center siaga perizinan, merupakan jalur pelayanan perizinan untuk Mall Pelayanan Publik (MPP) maupun seluruh Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kota Surabaya melalui satu panggilan telepon.
18. Pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penapisan jenis perizinan kegiatan usaha yang bertujuan memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk menguraikan jenis perizinan yang perlu dilengkapi beserta persyaratan dasar perizinannya dengan memanfaatkan AI.
19. Program bapak asuh di Sentra Wisata Kuliner (SWK) merupakan upaya untuk meningkatkan transaksi usaha di SWK. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan bimbingan dalam mengelola usaha meliputi manajemen keuangan, promosi, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk yang ditawarkan, cara meningkatkan daya tarik bagi pelanggan, cara meningkatkan pendapatan bagi pedagang SWK sehingga usaha dapat bertahan dan berkelanjutan.
20. Pemanfaatan Lahan Aset yang dikembangkan menjadi eduwisata Pertanian/Perikanan. Inovasi ini dilakukan dengan memanfaatkan aset *idle* yang selanjutnya menyediakan obyek eduwisata baru yang mendukung adanya kecukupan pangan daerah. Eduwisata juga menjadi potensi daerah yang akan

menjadi solusi pendukung dalam edukasi kepada Masyarakat dan wisata alternatif.

21. SITARUBOYO adalah Sistem Informasi Tata Ruang Suroboyo yang bertujuan untuk menyediakan informasi tata ruang, peruntukkan lahan dan persebaran fasilitas publik. Aplikasi ini merupakan platform digital yang memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi tertentu dengan mudah dan cepat guna memperoleh informasi peruntukan lahan. Selain itu, SITARUBOYO juga menyediakan data terkait bangunan di Kota Surabaya, baik yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun yang belum. Akses ke SITARUBOYO sangat praktis, yaitu pengguna cukup membuka internet browser pada perangkat PC atau laptop, tanpa perlu instalasi tambahan. Dengan tampilan yang *user-friendly* dan fitur pencarian yang responsif, SITARUBOYO menjadi pilihan utama dalam mendapatkan informasi tata ruang dan bangunan di Surabaya.
22. Aplikasi Wargaku merupakan inovasi layanan publik dari Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Aplikasi Wargaku memungkinkan warga untuk mengajukan pengaduan, memperoleh layanan, menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya.
23. Aplikasi Kantorku adalah sebuah platform *Single Sign On* (SSO) yang merupakan portal untuk mengakses berbagai aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut dengan sekali login. Secara keseluruhan, aplikasi Kantorku terus berupaya untuk menjadi solusi perkantoran yang inovatif dan efektif, dengan terus mengembangkan fitur-fitur baru dan meningkatkan integrasi dengan berbagai layanan publik.
24. Portal Satu Data Surabaya merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data di tingkat daerah. Sebuah platform terintegrasi yang menyatukan, mengelola, dan mendistribusikan data dari berbagai Perangkat Daerah dalam satu sistem yang terstandarisasi. Portal ini memungkinkan pemerintah, akademisi, masyarakat, serta sektor swasta untuk mengakses data yang valid, terkini, dan dapat

digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, penelitian, maupun pengambilan keputusan strategis.

25. Pengembangan aplikasi angkutan umum berupa integrasi aplikasi pembayaran pada transportasi umum yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan Provinsi Jawa Timur dengan sistem pembayaran transportasi umum di Kota Surabaya untuk memudahkan penumpang mengetahui rute angkutan umum di Kota Surabaya tanpa perlu berganti-ganti aplikasi.
26. Pembuatan ***Ducting Utilitas*** merupakan upaya penataan jaringan infrastruktur bawah tanah untuk menampung kabel listrik, telekomunikasi, pipa air, dan utilitas lainnya secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan estetika kota, keselamatan publik, serta efisiensi pemeliharaan infrastruktur. Dengan sistem ducting, jaringan utilitas menjadi lebih rapi, terlindungi, dan mudah diakses tanpa perlu penggalian berulang. Proyek ini membutuhkan perencanaan matang, koordinasi antar instansi, serta dukungan regulasi agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.
27. Pembuatan ***Road Long Storage*** merupakan strategi penanganan banjir dan pengelolaan air permukaan di kawasan jalan dengan membangun ruang penyimpanan air jangka panjang di bawah badan jalan atau di sisi jalur lalu lintas. Sistem ini berfungsi menampung limpasan air hujan agar tidak langsung masuk ke saluran kota, sehingga mengurangi risiko genangan dan mendukung pengendalian debit puncak saat hujan lebat. Selain itu, *Road Long Storage* juga dapat dimanfaatkan untuk konservasi air dan mendukung infiltrasi air ke tanah. Penerapannya memerlukan perencanaan teknis yang matang dan integrasi dengan sistem drainase eksisting.
28. Peningkatan jalan dengan *Rigid Pavement*, *Overlay*, dan Pavingisasi merupakan upaya strategis dalam memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Rigid pavement* digunakan pada ruas jalan dengan beban lalu lintas tinggi untuk ketahanan jangka panjang. *Overlay* diterapkan pada jalan aspal yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dengan menambahkan lapisan baru di atas permukaan lama untuk memperpanjang umur layanan. Sementara itu, pavingisasi digunakan pada jalan lingkungan atau permukiman untuk meningkatkan aksesibilitas serta mengurangi debu dan genangan air. Kombinasi

ketiga metode ini disesuaikan dengan kondisi eksisting dan kebutuhan teknis masing-masing ruas jalan, guna menciptakan jaringan jalan yang lebih kuat, aman, dan nyaman.

29. **Pedang Lilin** merupakan pengembangan pelayanan administrasi kependudukan berupa pengiriman dokumen adminduk melalui ojek online. Layanan ini bertujuan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk pengambilan dokumen adminduknya (KTP/KIA)
30. Pengembangan Sistem Peringatan Dini berupa pemasangan alat *Early Warning System* /EWS di wilayah aliran sungai Kali Surabaya, sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program

Rencana Program Tahun 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026, yang mempertimbangkan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, Ranperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, serta penelaahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026 beserta tolok ukur Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.1 tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel V.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2026

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9,885,806,597,963**	**8,822,371,239,417**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**2,245,925,651,556**	**2,317,188,336,352**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,063,368,345,821**	**1,087,293,391,303**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pendidikan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,11 %	**1,063,368,345,821**	**1,087,293,391,303**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**999,379,940**	**1,002,106,136**	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Pendidikan	3 Kegiatan	**999,379,940**	**1,002,106,136**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	999,379,940	1,002,106,136	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1,050,446,784,381**	**1,074,923,075,432**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**1,050,446,784,381**	**1,074,923,075,432**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8172 Orang/bulan	1,050,446,784,381	1,074,923,075,432	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,193,566,640**	**951,972,341**	
	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**1,193,566,640**	**951,972,341**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,193,566,640	951,972,341	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**3,183,457,941**	**2,738,248,083**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**3,183,457,941**	**2,738,248,083**	
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	504 Unit	3,183,457,941	2,738,248,083	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7,545,156,919**	**7,677,989,311**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**7,545,156,919**	**7,677,989,311**	
1.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,154,875,881	2,222,231,510	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,390,281,038	5,455,757,801	Dinas Pendidikan
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**1,142,640,207 ,151**	**1,189,972,036 ,969**	
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Persentase anak usia 4-18 tahun	56.91%	**879,333,313,5 23**	**883,919,971,4 97**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus				
			Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%			
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	91.88%			
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	99.93%			
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	100%			
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**407,295,802,706**	**410,523,979,765**	
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan gratis bagi anak usia sekolah jenjang SD		Jumlah lembaga SD yang menerima biaya pendidikan daerah	671 lembaga	**407,295,802,706**	**410,523,979,765**	
			Persentase pelayanan perizinan bidang pendidikan yang ditangani	100%			
1.01.02.2.01 .0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	592 Satuan Pendidikan	205,606,560,000	211,217,068,200	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1,632,369,760	1,633,011,520	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32513 Peserta Didik	200,056,872,946	197,673,900,045	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**255,237,739,553**	**257,992,956,553**	
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan gratis bagi anak usia jenjang SMP		Jumlah lembaga SMP yang menerima biaya pendidikan daerah	287 lembaga	**255,237,739,553**	**257,992,956,553**	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang	16362 Peserta Didik	129,104,909,553	131,380,126,554	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pertama Diterima oleh Peserta Didik		Menerima Biaya Personil Peserta Didik				
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	126,132,830,000	126,612,829,999	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**122,534,828,837**	**118,809,198,951**	
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia jenjang PAUD		Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	12 laporan	**122,534,828,837**	**118,809,198,951**	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						
	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	219 Peserta Didik	4,648,989,152	4,563,139,727	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	58,642,480,000	58,642,480,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						
	Sekolah Baru yang Terbangun	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0	89,700,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	84669 Satuan Pendidikan	59,243,359,685	55,513,879,224	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**94,264,942,427**	**96,593,836,228**	
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan bagi anak rentan putus sekolah dan putus sekolah		Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3 - 5 hari hari	**94,264,942,427**	**96,593,836,228**	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						
	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90 Peserta Didik	7,686,120,327	7,693,773,080	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	5,272,910,000	5,272,910,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	40 Peserta Didik	81,305,912,100	83,627,153,148	Dinas Pendidikan
			Iklim Inklusivitas SD	66.07 Nilai	**258,695,334,707**	**301,274,826,507**	
			Iklim Inklusivitas SMP	68.21 Nilai			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas lingkungan pembelajaran di satuan pendidikan		Iklim Keamanan SD	78.8 Nilai			
			Iklim Keamanan SMP	77.58 Nilai			
			Iklim Kebinekaan SD	77.77 Nilai			
			Iklim Kebinekaan SMP	75.71 Nilai			
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	79.04%			
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%			
			Persentase SD terakreditasi minimal B	92.37%			
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	96.22%			
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	89.93%			
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	100%			
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**45,705,874,710**	**46,989,081,651**	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Dasar		Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu [421]	652 Lembaga	**45,705,874,710**	**46,989,081,651**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	24,984,911,889	25,276,352,846	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	5,036,432,000	5,563,095,704	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	951,463,760	954,985,097	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	652 Satuan Pendidikan	214,665,808	215,179,216	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	14,518,401,253	14,979,468,788	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**207,918,177,269**	**249,193,722,075**	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama		Jumlah lembaga pendidikan menengah yang mendapatkan peningkatan mutu [223]	330 Lembaga	**207,918,177,269**	**249,193,722,075**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	195,279,597,624	227,124,081,460	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	10,282,595,374	10,475,613,327	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1,475,015,107	10,639,022,757	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	691,772,772	694,767,744	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	330 Satuan Pendidikan	151,400,000	222,151,603	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	450 Orang	37,796,392	38,085,184	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**4,181,627,263**	**4,193,434,126**	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	79,04 %	**4,181,627,263**	**4,193,434,126**	
1.01.02.2.03 .0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Dinas Pendidikan	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	83,366,173	83,604,050	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03 .0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2600 Orang	2,908,475,874	2,910,615,842	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03 .0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	449,794,230	450,969,198	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	739,990,986	748,245,036	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**889,655,465**	**898,588,655**	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Nonformal		Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan [323]	12 Laporan	**889,655,465**	**898,588,655**	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	64,475,000	64,620,273	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						
	Terlaksananya Pembinaan	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa	40 Satuan Pendidikan	72,702,440	72,862,880	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		n yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Dinas Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	752,478,025	761,105,502	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas kompetensi siswa		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00%	**772,268,560**	**922,829,120**	
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%			
			Skor Kemampuan Literasi SD	74.37 Nilai			
			Skor Kemampuan Literasi SMP	86.21 Nilai			
			Skor Kemampuan Numerasi SD	63.79 Nilai			
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	74.68 Nilai			
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**415,218,560**	**419,069,120**	
	Meningkatnya penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik jenjang SD		Jumlah Siswa yang mengikuti Proses Belajar	214621 orang	**415,218,560**	**419,069,120**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang	652 Satuan Pendidikan	415,218,560	419,069,120	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Menyelenggarakan Proses Belajar				
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**357,050,000**	**503,760,000**	
	Meningkatnya penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik jenjang SMP		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	321 Satuan Pendidikan	**357,050,000**	**503,760,000**	
1.01.02.2.02 .0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34579 Satuan Pendidikan	357,050,000	503,760,000	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya minat dan bakat siswa		Persentase siswa SD SMP yang berprestasi TK provinsi	0.60%	**3,839,290,361**	**3,854,409,845**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**2,059,717,701**	**2,072,270,145**	
	Meningkatnya prestasi siswa jenjang SD di tingkat Kota		Persentase siswa SD yang berprestasi TK Kota	0.58%	**2,059,717,701**	**2,072,270,145**	
1.01.02.2.01 .0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	51050 Peserta Didik	2,059,717,701	2,072,270,145	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**1,779,572,660**	**1,782,139,700**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya prestasi siswa jenjang SMP di tingkat Kota		Persentase siswa SMP yang berprestasi TK Kota [905]	0.89%	**1,779,572,660**	**1,782,139,700**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	1,779,572,660	1,782,139,700	Dinas Pendidikan
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**39,917,098,584**	**39,922,908,080**	
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	87.82%	**39,917,098,584**	**39,922,908,080**	
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	35%			
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%			
			Prosentase jumlah guru yang mendapat jumlah jam mengajar di sekolah	100%			
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**39,917,098,584**	**39,922,908,080**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya minimal Pendidik SD dan SMP		Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 Orang	**39,917,098,584**	**39,922,908,080**	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 Orang			
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	563,098,584	568,908,080	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian	1 Laporan	39,354,000,000	39,354,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,953,444,497,348**	**2,735,757,982,204**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**742,334,462,088**	**737,840,307,484**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89,96 %	**742,334,462,088**	**737,840,307,484**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**47,651,520**	**50,251,520**	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Kesehatan	100%	**47,651,520**	**50,251,520**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	47,651,520	50,251,520	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**542,011,331,076**	**546,351,538,905**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**542,011,331,076**	**546,351,538,905**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2191 Orang/bulan	542,011,331,076	546,351,538,905	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**10,899,152,532**	**1,478,619,280**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**10,899,152,532**	**1,478,619,280**	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	10,899,152,532	1,478,619,280	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**10,298,701,760**	**10,339,618,712**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**10,298,701,760**	**10,339,618,712**	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,298,701,760	10,339,618,712	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**179,077,625,200**	**179,620,279,067**	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,038,075,310**	**2,080,729,177**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Labkesda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,038,075,310	2,080,729,177	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Asemrowo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,751,992,053**	**2,759,760,927**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,751,992,053	2,759,760,927	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Balasklumprik		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,018,414,524**	**1,021,289,509**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,018,414,524	1,021,289,509	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Balongsari		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,614,323,809**	**2,621,704,045**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Balongsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,614,323,809	2,621,704,045	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Bangkingan		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,050,866,179**	**1,053,832,774**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,050,866,179	1,053,832,774	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Banyuurip		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,733,144,161**	**3,743,682,827**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Banyuurip	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,733,144,161	3,743,682,827	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Benowo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,427,312,736**	**3,436,988,040**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Benowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,427,312,736	3,436,988,040	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Bulak Banteng		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,419,384,132**	**2,426,214,053**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,419,384,132	2,426,214,053	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dr. Soetomo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,594,486,536**	**2,601,810,771**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,594,486,536	2,601,810,771	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dukuh Kupang		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,619,069,865**	**3,629,286,499**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,619,069,865	3,629,286,499	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dupak		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,072,994,165**	**2,078,846,228**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Dupak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,072,994,165	2,078,846,228	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gading		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**4,128,609,353**	**4,140,264,417**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Gading	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,128,609,353	4,140,264,417	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gayungan		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,743,139,491**	**2,750,883,374**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Gayungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,743,139,491	2,750,883,374	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gundih		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,960,676,882**	**1,966,211,872**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Gundih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,960,676,882	1,966,211,872	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gunung Anyar		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,718,665,232**	**2,726,340,024**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,718,665,232	2,726,340,024	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jagir		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**4,087,616,375**	**4,099,155,716**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Jagir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,087,616,375	4,099,155,716	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jemursari		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,473,950,676**	**1,478,111,639**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Jemursari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,473,950,676	1,478,111,639	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jeruk		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,446,369,379**	**1,450,452,480**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Jeruk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,446,369,379	1,450,452,480	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kalijudan		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,208,207,303**	**2,214,441,072**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,208,207,303	2,214,441,072	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kalirungkut		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,591,505,809**	**2,598,821,630**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,591,505,809	2,598,821,630	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kebonsari		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,313,536,022**	**3,322,890,134**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Kebonsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,313,536,022	3,322,890,134	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kedungdoro		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,629,973,832**	**2,637,398,248**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,629,973,832	2,637,398,248	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kedurus		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,701,761,048**	**3,712,211,119**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Kedurus	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,701,761,048	3,712,211,119	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kenjeran		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,460,237,993**	**2,467,183,245**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,460,237,993	2,467,183,245	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Keputih		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,193,493,449**	**2,199,685,681**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Keputih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,193,493,449	2,199,685,681	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Ketabang		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,684,867,232**	**1,689,623,612**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Ketabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,684,867,232	1,689,623,612	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Klampis Ngasem		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,736,448,738**	**1,741,350,733**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,736,448,738	1,741,350,733	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Krembangan Selatan		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,029,658,879**	**3,038,211,606**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,029,658,879	3,038,211,606	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Lidah Kulon		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,952,465,814**	**1,957,977,625**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,952,465,814	1,957,977,625	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Lontar		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,335,618,950**	**2,342,212,402**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Lontar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,335,618,950	2,342,212,402	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Made		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,449,797,418**	**1,453,890,196**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Made	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,449,797,418	1,453,890,196	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Manukan Kulon		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**4,137,238,747**	**4,148,918,172**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,137,238,747	4,148,918,172	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Medokan Ayu		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,949,414,874**	**3,960,564,072**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,949,414,874	3,960,564,072	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Menur		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,541,747,789**	**2,548,923,143**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Menur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,541,747,789	2,548,923,143	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Mojo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,804,516,553**	**3,815,256,704**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Mojo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,804,516,553	3,815,256,704	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Morokrembangan		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,536,655,578**	**2,543,816,557**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,536,655,578	2,543,816,557	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Mulyorejo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,216,429,047**	**3,225,509,026**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,216,429,047	3,225,509,026	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Ngagel Rejo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,597,666,959**	**2,605,000,172**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,597,666,959	2,605,000,172	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pacar Keling		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,043,890,319**	**3,052,483,222**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,043,890,319	3,052,483,222	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pakis		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,258,408,288**	**2,264,783,775**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Pakis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,258,408,288	2,264,783,775	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pegirian		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,704,897,160**	**2,712,533,084**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Pegirian	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,704,897,160	2,712,533,084	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Peneleh		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,367,518,166**	**2,374,201,670**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Peneleh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,367,518,166	2,374,201,670	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Perak Timur		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,944,081,819**	**3,955,215,962**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,944,081,819	3,955,215,962	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pucang Sewu		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,245,182,160**	**3,254,343,310**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,245,182,160	3,254,343,310	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Putat Jaya		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,535,887,745**	**2,543,046,556**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,535,887,745	2,543,046,556	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Rangkah		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,561,700,562**	**3,571,755,242**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Rangkah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,561,700,562	3,571,755,242	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sawahan		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,044,546,170**	**3,053,140,924**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sawahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,044,546,170	3,053,140,924	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sawahpulo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,888,996,459**	**1,894,329,096**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,888,996,459	1,894,329,096	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sememi		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,807,599,102**	**3,818,347,955**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sememi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,807,599,102	3,818,347,955	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidosermo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,967,429,424**	**1,972,983,477**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,967,429,424	1,972,983,477	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidotopo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,762,859,091**	**2,770,658,642**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,762,859,091	2,770,658,642	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidotopo Wetan		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**5,792,156,661**	**5,808,507,919**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5,792,156,661	5,808,507,919	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Simolawang		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,521,214,244**	**2,528,331,632**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Simolawang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,521,214,244	2,528,331,632	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Simomulyo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**4,668,015,156**	**4,681,192,962**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,668,015,156	4,681,192,962	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Siwalankerto		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,686,136,580**	**1,690,896,543**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,686,136,580	1,690,896,543	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tambakrejo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,223,572,779**	**3,232,672,925**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,223,572,779	3,232,672,925	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tambakwedi		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**1,407,788,276**	**1,411,762,462**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,407,788,276	1,411,762,462	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**4,701,005,879**	**4,714,276,819**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,701,005,879	4,714,276,819	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tanjungsari		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,038,706,205**	**2,044,461,473**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,038,706,205	2,044,461,473	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tembok Dukuh		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,200,383,115**	**3,209,417,796**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,200,383,115	3,209,417,796	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tenggilis		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,855,352,787**	**2,863,413,448**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,855,352,787	2,863,413,448	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wiyung		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**3,528,517,190**	**3,538,478,194**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Wiyung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,528,517,190	3,538,478,194	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wonokromo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**2,310,349,435**	**2,316,871,551**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,310,349,435	2,316,871,551	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wonokusumo		Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	2 Jenis	**4,041,097,536**	**4,052,722,907**	
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,041,097,536	4,052,722,907	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**1,121,906,914 ,069**	**894,169,650,8 81**	
	Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular		Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)	90,9 %	**16,929,145,52 2**	**18,105,715,15 3**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,7 %			
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	38%			
			Persentase Merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	12,2 %			
			Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,59 %			
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	79%			
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**16,929,145,522**	**18,105,715,153**	
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**2,409,483,011**	**2,578,146,822**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02 .0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan/atau Berpotensi Bencana						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	710,178,985	759,891,514	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	151,376,110	161,972,438	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	665,956,118	712,573,046	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke	2 Paket	849,292,387	908,742,854	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Laboratorium Rujukan/Nasional		Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	32,679,411	34,966,970	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu)		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,659,579,897**	**1,769,543,661**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1926446 Orang	1,404,050,897	1,502,334,460	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	131,944,000	134,973,251	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	IFK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	123,585,000	132,235,950	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif		Persentase Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	100%	**3,156,939,127**	**3,377,924,866**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%			
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%			
			Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02 .0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246184 Orang	142,310,000	152,271,700	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111482 Orang	58,850,000	62,969,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66739 Orang	522,331,200	558,894,384	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49728 Orang	486,938,273	521,023,952	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	1647 Orang	1,045,698,588	1,118,897,489	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	900,811,066	963,867,841	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**524,300,000**	**561,001,000**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5823 Orang	524,300,000	561,001,000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Asemrowo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**5,367,600**	**5,743,332**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	5,367,600	5,743,332	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Balasklumprik		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,108,700**	**2,256,309**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	2,108,700	2,256,309	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Balongsari		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,834,000**	**4,102,380**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Balongsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	55 Orang	3,834,000	4,102,380	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Bangkingan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**1,917,000**	**2,051,190**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	1,917,000	2,051,190	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Banyuurip		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,450,600**	**3,692,142**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120 Orang	3,450,600	3,692,142	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**2,683,800**	**2,871,666**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	masalah kesehatan pada Puskesmas Benowo		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120 Orang	2,683,800	2,871,666	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Bulak Banteng		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,834,000**	**4,102,380**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	3,834,000	4,102,380	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Dr. Soetomo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**4,792,500**	**5,127,975**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	110 Orang	4,792,500	5,127,975	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Dukuh Kupang		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,300,400**	**2,461,428**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	2,300,400	2,461,428	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Dupak		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,492,100**	**2,666,547**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	44 Orang	2,492,100	2,666,547	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Gading		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,738,150**	**3,999,821**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Gading	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	179 Orang	3,738,150	3,999,821	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Gayungan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,587,950**	**2,769,107**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	2,587,950	2,769,107	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**3,834,000**	**4,102,380**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	masalah kesehatan pada Puskesmas Gundih		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang	3,834,000	4,102,380	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Gunung Anyar		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**5,942,700**	**6,358,689**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	119 Orang	5,942,700	6,358,689	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Jagir		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**5,367,600**	**5,743,332**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	117 Orang	5,367,600	5,743,332	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Jemursari		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,492,100**	**2,666,547**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	41 Orang	2,492,100	2,666,547	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Jeruk		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,300,400**	**2,461,428**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	35 Orang	2,300,400	2,461,428	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Kalijudan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,300,400**	**2,461,428**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	88 Orang	2,300,400	2,461,428	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Kalirungkut		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,642,300**	**3,897,261**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	3,642,300	3,897,261	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**2,875,500**	**3,076,785**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	masalah kesehatan pada Puskesmas Kebonsari		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	104 Orang	2,875,500	3,076,785	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Kedungdoro		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,258,900**	**3,487,023**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	3,258,900	3,487,023	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Kedurus		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**7,092,900**	**7,589,403**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	159 Orang	7,092,900	7,589,403	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Kenjeran		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,875,500**	**3,076,785**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	2,875,500	3,076,785	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Keputih		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**4,409,100**	**4,717,737**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	77 Orang	4,409,100	4,717,737	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Ketabang		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**1,917,000**	**2,051,190**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	1,917,000	2,051,190	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Klampis Ngasem		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,492,100**	**2,666,547**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	2,492,100	2,666,547	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**5,367,600**	**5,743,332**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Puskesmas Krembangan Selatan		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	88 Orang	5,367,600	5,743,332	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Lidah Kulon		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,875,500**	**3,076,785**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	59 Orang	2,875,500	3,076,785	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Lontar		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,137,850**	**3,357,500**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	3,137,850	3,357,500	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Made		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**1,917,000**	**2,051,190**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Made	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	1,917,000	2,051,190	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Manukan Kulon		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,067,200**	**3,281,904**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	110 Orang	3,067,200	3,281,904	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Medokan Ayu		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**7,476,300**	**7,999,641**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	134 Orang	7,476,300	7,999,641	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Menur		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**4,217,400**	**4,512,618**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Menur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang	4,217,400	4,512,618	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**7,092,900**	**7,589,403**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	masalah kesehatan pada Puskesmas Mojo		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	154 Orang	7,092,900	7,589,403	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Morokrembangan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**4,792,500**	**5,127,975**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	4,792,500	5,127,975	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Mulyorejo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,067,200**	**3,281,904**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	3,067,200	3,281,904	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Ngagel Rejo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**4,217,400**	**4,512,618**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	106 Orang	4,217,400	4,512,618	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Pacar Keling		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**4,792,500**	**5,127,975**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	120 Orang	4,792,500	5,127,975	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Pakis		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,258,900**	**3,487,023**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Pakis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	69 Orang	3,258,900	3,487,023	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Pegirian		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,834,000**	**4,102,380**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	3,834,000	4,102,380	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**4,600,800**	**4,922,856**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	masalah kesehatan pada Puskesmas Peneleh		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	76 Orang	4,600,800	4,922,856	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Perak Timur		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**6,326,100**	**6,768,927**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	144 Orang	6,326,100	6,768,927	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Pucang Sewu		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**5,942,700**	**6,358,689**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	104 Orang	5,942,700	6,358,689	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Putat Jaya		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**5,175,900**	**5,538,213**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	5,175,900	5,538,213	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Rangkah		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**7,859,700**	**8,409,879**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	138 Orang	7,859,700	8,409,879	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Sawahan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**6,709,500**	**7,179,165**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	104 Orang	6,709,500	7,179,165	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Sawahpulo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,642,300**	**3,897,261**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	64 Orang	3,642,300	3,897,261	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**7,476,300**	**7,999,641**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	masalah kesehatan pada Puskesmas Sememi		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	141 Orang	7,476,300	7,999,641	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Sidosermo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**1,821,150**	**1,948,631**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	1,821,150	1,948,631	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Sidotopo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**5,367,600**	**5,743,332**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	5,367,600	5,743,332	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Sidotopo Wetan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**7,092,900**	**7,589,403**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120 Orang	7,092,900	7,589,403	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Simolawang		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,258,900**	**3,487,023**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	72 Orang	3,258,900	3,487,023	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Simomulyo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,450,600**	**3,692,142**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	149 Orang	3,450,600	3,692,142	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Siwalankerto		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,108,700**	**2,256,309**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	2,108,700	2,256,309	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**6,134,400**	**6,563,808**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	masalah kesehatan pada Puskesmas Tambakrejo		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	6,134,400	6,563,808	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Tambakwedi		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**2,108,700**	**2,256,309**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	2,108,700	2,256,309	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**4,217,400**	**4,512,618**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	4,217,400	4,512,618	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Tanjungsari		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**1,533,600**	**1,640,952**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	1,533,600	1,640,952	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Tembok Dukuh		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**6,326,100**	**6,768,927**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	110 Orang	6,326,100	6,768,927	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Tenggilis		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**6,326,100**	**6,768,927**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	6,326,100	6,768,927	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Wiyung		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**3,258,900**	**3,487,023**	
1.02.02.2.02 .0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	116 Orang	3,258,900	3,487,023	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	**4,409,100**	**4,717,737**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	masalah kesehatan pada Puskesmas Wonokromo		Gangguan Jiwa Berat sesuai standar				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	76 Orang	4,409,100	4,717,737	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan pada Puskesmas Wonokusumo		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	100%	**5,751,000**	**6,139,168**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	150 Orang	5,751,000	6,139,168	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Asemrowo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**21,263,040**	**22,751,453**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1046 Orang	21,263,040	22,751,453	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Balasklumprik		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,053,040**	**19,316,753**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang	18,053,040	19,316,753	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Balongsari		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,722,240**	**21,102,797**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Balongsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	780 Orang	19,722,240	21,102,797	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Bangkingan		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,695,040**	**20,003,693**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	323 Orang	18,695,040	20,003,693	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Banyuurip		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,507,340**	**18,732,854**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1425 Orang	17,507,340	18,732,854	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**17,667,840**	**18,904,589**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Benowo		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Benowo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1300 Orang	17,667,840	18,904,589	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Bulak Banteng		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,695,040**	**20,003,693**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	785 Orang	18,695,040	20,003,693	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Dr. Soetomo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**25,115,040**	**26,873,093**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1283 Orang	25,115,040	26,873,093	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Dukuh Kupang		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,951,840**	**20,278,469**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1341 Orang	18,951,840	20,278,469	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Dupak		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,374,040**	**19,660,223**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Dupak	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	511 Orang	18,374,040	19,660,223	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Gading		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**23,189,040**	**24,812,273**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Gading	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2071 Orang	23,189,040	24,812,273	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Gayungan		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,951,840**	**20,278,469**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Gayungan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	978 Orang	18,951,840	20,278,469	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**17,796,240**	**19,041,977**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Gundih		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Gundih	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	920 Orang	17,796,240	19,041,977	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Gunung Anyar		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,337,040**	**20,690,633**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1326 Orang	19,337,040	20,690,633	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Jagir		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,979,040**	**21,377,573**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Jagir	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1403 Orang	19,979,040	21,377,573	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Jemursari		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,951,840**	**20,278,469**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Jemursari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	467 Orang	18,951,840	20,278,469	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Jeruk		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**21,263,040**	**22,751,453**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Jeruk	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	391 Orang	21,263,040	22,751,453	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Kalijudan		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,951,840**	**20,278,469**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1011 Orang	18,951,840	20,278,469	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Kalirungkut		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**25,115,040**	**26,873,093**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1176 Orang	25,115,040	26,873,093	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**18,374,040**	**19,660,223**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Kebonsari		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1174 Orang	18,374,040	19,660,223	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Kedungdoro		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,374,040**	**19,660,223**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	934 Orang	18,374,040	19,660,223	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Kedurus		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,181,440**	**19,454,141**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Kedurus	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1669 Orang	18,181,440	19,454,141	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Kenjeran		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,796,240**	**19,041,977**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1011 Orang	17,796,240	19,041,977	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Keputih		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,411,040**	**18,629,813**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Keputih	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	827 Orang	17,411,040	18,629,813	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Ketabang		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,759,240**	**20,072,387**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Ketabang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	431 Orang	18,759,240	20,072,387	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Klampis Ngasem		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,722,240**	**21,102,797**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547 Orang	19,722,240	21,102,797	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**18,566,640**	**19,866,305**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Krembangan Selatan		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 Orang	18,566,640	19,866,305	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Lidah Kulon		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,732,040**	**18,973,283**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	654 Orang	17,732,040	18,973,283	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Lontar		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,411,040**	**18,629,813**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Lontar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1134 Orang	17,411,040	18,629,813	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Made		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**25,115,040**	**26,873,093**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Made	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang	25,115,040	26,873,093	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Manukan Kulon		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,732,040**	**18,973,283**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1282 Orang	17,732,040	18,973,283	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Medokan Ayu		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**23,176,200**	**24,798,534**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1458 Orang	23,176,200	24,798,534	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Menur		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,016,040**	**20,347,163**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Menur	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1114 Orang	19,016,040	20,347,163	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**22,033,440**	**23,575,781**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Mojo		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Mojo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1818 Orang	22,033,440	23,575,781	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Morokrembangan		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**21,263,040**	**22,751,453**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1028 Orang	21,263,040	22,751,453	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Mulyorejo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**22,033,440**	**23,575,781**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	929 Orang	22,033,440	23,575,781	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Ngagel Rejo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**22,547,040**	**24,125,333**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1253 Orang	22,547,040	24,125,333	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Pacar Keling		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**24,473,040**	**26,186,153**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1398 Orang	24,473,040	26,186,153	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Pakis		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,374,040**	**19,660,223**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Pakis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	817 Orang	18,374,040	19,660,223	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Pegirian		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,117,240**	**19,385,447**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Pegirian	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	18,117,240	19,385,447	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**18,053,040**	**19,316,753**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Peneleh		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Peneleh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	880 Orang	18,053,040	19,316,753	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Perak Timur		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,722,240**	**21,102,797**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1692 Orang	19,722,240	21,102,797	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Pucang Sewu		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,796,240**	**19,041,977**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1229 Orang	17,796,240	19,041,977	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Putat Jaya		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,181,440**	**19,454,141**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1042 Orang	18,181,440	19,454,141	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Rangkah		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,337,040**	**20,690,633**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Rangkah	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1592 Orang	19,337,040	20,690,633	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Sawahan		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,951,840**	**20,278,469**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Sawahan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1242 Orang	18,951,840	20,278,469	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Sawahpulo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,566,640**	**19,866,305**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 Orang	18,566,640	19,866,305	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**17,411,040**	**18,629,813**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Sememi		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Sememi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1525 Orang	17,411,040	18,629,813	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Sidosermo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,053,040**	**19,316,753**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	926 Orang	18,053,040	19,316,753	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Sidotopo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**13,696,000**	**14,654,720**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1122 Orang	13,696,000	14,654,720	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Sidotopo Wetan		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,951,840**	**20,278,469**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1374 Orang	18,951,840	20,278,469	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Simolawang		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,979,040**	**21,377,573**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Simolawang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	859 Orang	19,979,040	21,377,573	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Simomulyo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**9,865,400**	**10,555,978**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1722 Orang	9,865,400	10,555,978	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Siwalankerto		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**21,263,040**	**22,751,453**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 Orang	21,263,040	22,751,453	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**22,803,840**	**24,400,109**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Tambakrejo		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1266 Orang	22,803,840	24,400,109	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Tambakwedi		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**15,151,200**	**16,211,784**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	403 Orang	15,151,200	16,211,784	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,695,040**	**20,003,693**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1316 Orang	18,695,040	20,003,693	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Tanjungsari		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,732,040**	**18,973,283**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	609 Orang	17,732,040	18,973,283	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Tembok Dukuh		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,465,440**	**20,828,021**	
1.02.02.2.02 .0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	1296 Orang	19,465,440	20,828,021	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Sesuai Standar				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Tenggilis		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**18,566,640**	**19,866,305**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1307 Orang	18,566,640	19,866,305	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Wiyung		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**17,507,340**	**18,732,854**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Wiyung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1318 Orang	17,507,340	18,732,854	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	**20,300,040**	**21,721,043**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	produktif pada Puskesmas Wonokromo		terduga tuberkulosis sesuai standar				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	914 Orang	20,300,040	21,721,043	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif pada Puskesmas Wonokusumo		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	**19,008,480**	**20,339,842**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1576 Orang	19,008,480	20,339,842	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Asemrowo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,288,214**	**1,361,384**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,288,214	1,361,384	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Balasklumprik		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,092,536**	**1,154,592**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,092,536	1,154,592	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Balongsari		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,127,998**	**2,248,869**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,127,998	2,248,869	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Bangkingan		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan	100%	**1,190,375**	**1,257,988**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,190,375	1,257,988	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Banyuurip		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,323,676**	**2,455,661**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,323,676	2,455,661	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Benowo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,975,936**	**3,144,969**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,975,936	3,144,969	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Bulak Banteng		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**913,164**	**965,032**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	913,164	965,032	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Dr. Soetomo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**5,136,548**	**5,428,303**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,136,548	5,428,303	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Dukuh Kupang		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,261,300**	**3,446,542**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,261,300	3,446,542	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Dupak		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,565,424**	**1,654,340**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,565,424	1,654,340	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Gading		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**4,198,924**	**4,437,423**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,198,924	4,437,423	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Gayungan		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan	100%	**5,136,548**	**5,428,303**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,136,548	5,428,303	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Gundih		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,288,214**	**1,361,384**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,288,214	1,361,384	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Gunung Anyar		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**4,198,924**	**4,437,423**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,198,924	4,437,423	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Jagir		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,886,251**	**3,050,190**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,886,251	3,050,190	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Jemursari		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,144,305**	**2,266,101**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,144,305	2,266,101	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Jeruk		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,386,053**	**1,464,780**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,386,053	1,464,780	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Kalijudan		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,323,676**	**2,455,661**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,323,676	2,455,661	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Kalirungkut		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**6,074,171**	**6,419,184**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	6,074,171	6,419,184	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Kebonsari		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan	100%	**3,522,204**	**3,722,265**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,522,204	3,722,265	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Kedungdoro		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,581,731**	**1,671,573**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,581,731	1,671,573	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Kedurus		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,261,300**	**3,446,542**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,261,300	3,446,542	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Kenjeran		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**896,858**	**947,799**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	896,858	947,799	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Keputih		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,483,892**	**1,568,177**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,483,892	1,568,177	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Ketabang		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,359,139**	**3,549,938**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,359,139	3,549,938	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Klampis Ngasem		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**5,095,781**	**5,385,222**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,095,781	5,385,222	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Krembangan Selatan		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,793,715**	**1,895,598**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,793,715	1,895,598	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Lidah Kulon		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan	100%	**2,698,726**	**2,852,013**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,698,726	2,852,013	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Lontar		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,519,354**	**2,662,454**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,519,354	2,662,454	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Made		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,565,424**	**1,654,340**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,565,424	1,654,340	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Manukan Kulon		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,261,300**	**3,446,542**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,261,300	3,446,542	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Medokan Ayu		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,772,105**	**2,929,561**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,772,105	2,929,561	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Menur		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**4,940,870**	**5,221,511**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,940,870	5,221,511	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Mojo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**4,198,924**	**4,437,423**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,198,924	4,437,423	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Morokrembangan		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,483,892**	**1,568,177**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,483,892	1,568,177	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Mulyorejo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan	100%	**5,046,862**	**5,333,523**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,046,862	5,333,523	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Ngagel Rejo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,261,300**	**3,446,542**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,261,300	3,446,542	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Pacar Keling		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,147,155**	**3,325,913**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,147,155	3,325,913	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Pakis		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,793,715**	**1,895,598**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,793,715	1,895,598	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Pegirian		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,190,375**	**1,257,988**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,190,375	1,257,988	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Peneleh		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,772,105**	**2,929,561**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,772,105	2,929,561	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Perak Timur		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,323,676**	**2,455,661**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,323,676	2,455,661	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Pucang Sewu		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**4,647,353**	**4,911,322**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,647,353	4,911,322	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Putat Jaya		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan	100%	**1,793,715**	**1,895,598**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,793,715	1,895,598	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Rangkah		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,065,622**	**3,239,749**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,065,622	3,239,749	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Sawahan		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,261,300**	**3,446,542**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,261,300	3,446,542	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Sawahpulo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,225,837**	**2,352,265**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,225,837	2,352,265	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Sememi		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,948,627**	**2,059,309**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,948,627	2,059,309	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Sidosermo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,022,006**	**2,136,856**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,022,006	2,136,856	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Sidotopo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,345,286**	**1,421,699**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,345,286	1,421,699	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Sidotopo Wetan		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,345,286**	**1,421,699**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,345,286	1,421,699	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Simolawang		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan	100%	**2,225,837**	**2,352,265**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,225,837	2,352,265	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Simomulyo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**3,139,001**	**3,317,297**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,139,001	3,317,297	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Siwalankerto		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,315,523**	**2,447,045**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,315,523	2,447,045	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Tambakrejo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,127,998**	**2,248,869**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,127,998	2,248,869	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Tambakwedi		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,278,430**	**1,351,044**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,278,430	1,351,044	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**1,116,995**	**1,180,441**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,116,995	1,180,441	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Tanjungsari		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**4,198,924**	**4,437,423**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,198,924	4,437,423	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Tembok Dukuh		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,323,676**	**2,455,661**	
1.02.02.2.02 .0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,323,676	2,455,661	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Tenggilis		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan	100%	**4,198,924**	**4,437,423**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,198,924	4,437,423	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Wiyung		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,323,676**	**2,455,661**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,323,676	2,455,661	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Wonokromo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,323,676**	**2,455,661**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,323,676	2,455,661	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu) pada Puskesmas Wonokusumo		Persentase Kelompok Pembinaan Terpadu (Bindu) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	**2,425,422**	**2,570,557**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,425,422	2,570,557	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Asemrowo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**131,716,789**	**140,935,242**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7745 Orang	1,283,712	1,373,559	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,545,846	9,142,346	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	121,887,231	130,419,337	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Balasklumprik		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**65,498,828**	**70,083,112**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2249 Orang	1,123,248	1,201,864	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,115,940	3,333,433	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	61,259,640	65,547,815	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Balongsari		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**147,349,496**	**157,662,244**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Balongsari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5259 Orang	1,347,898	1,442,237	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,513,767	9,108,028	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	137,487,831	147,111,979	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Bangkingan		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**105,594,113**	**112,984,506**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2183 Orang	1,412,083	1,510,915	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,911,090	6,323,685	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	98,270,940	105,149,906	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Banyuurip		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**101,239,707**	**108,325,267**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9484 Orang	1,219,526	1,304,881	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,039,406	6,460,957	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	93,980,775	100,559,429	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Benowo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**144,269,196**	**154,365,559**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Benowo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9359 Orang	3,851,136	4,120,677	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12,207,129	13,059,186	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	128,210,931	137,185,696	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Bulak Banteng		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**129,015,011**	**138,045,322**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5879 Orang	1,444,176	1,545,254	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,629,204	3,882,523	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	123,941,631	132,617,545	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Dr. Soetomo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**174,908,737**	**187,150,434**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8111 Orang	5,776,704	6,181,016	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,283,663	9,931,662	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	159,848,370	171,037,756	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Dukuh Kupang		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**133,923,038**	**143,295,105**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8664 Orang	2,759,981	2,953,152	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12,592,077	13,471,004	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	118,570,980	126,870,949	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Dupak		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**62,802,539**	**67,198,126**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Dupak	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4173 Orang	1,283,712	1,373,559	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,891,387	3,093,206	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	58,627,440	62,731,361	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Gading		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**121,866,972**	**130,395,759**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Gading	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13898 Orang	1,219,526	1,304,881	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,444,058	10,103,253	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	111,203,388	118,987,625	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Gayungan		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**143,467,525**	**153,507,995**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Gayungan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6367 Orang	3,337,651	3,571,253	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,116,443	11,892,371	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	129,013,431	138,044,371	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Gundih		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**142,467,644**	**152,439,202**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Gundih	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6039 Orang	2,053,939	2,197,694	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,782,774	6,186,412	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	134,630,931	144,055,096	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Gunung Anyar		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**134,383,563**	**143,788,176**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9029 Orang	1,925,568	2,060,339	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,084,364	11,858,052	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	121,373,631	129,869,785	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Jagir		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**116,362,674**	**124,506,295**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Jagir	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8551 Orang	2,439,053	2,609,762	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,706,241	9,313,936	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	105,217,380	112,582,597	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Jemursari		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**82,107,236**	**87,854,059**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Jemursari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3122 Orang	962,784	1,030,169	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,372,572	3,607,978	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	77,771,880	83,215,912	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Jeruk		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**136,753,604**	**146,325,059**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Jeruk	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2781 Orang	1,251,619	1,339,220	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,424,354	6,872,774	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	129,077,631	138,113,065	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Kalijudan		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**114,738,237**	**122,768,041**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6197 Orang	1,540,454	1,648,271	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,283,663	9,931,662	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	103,914,120	111,188,108	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Kalirungkut		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**99,297,415**	**106,248,115**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7472 Orang	1,733,011	1,854,305	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	513,264	549,090	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	97,051,140	103,844,720	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Kebonsari		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**137,400,706**	**147,016,491**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8153 Orang	2,792,074	2,987,491	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,180,601	11,961,007	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	123,428,031	132,067,993	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Kedungdoro		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**104,445,071**	**111,755,030**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6149 Orang	706,042	755,457	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,943,169	6,358,003	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	97,795,860	104,641,570	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Kedurus		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**132,167,761**	**141,416,982**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Kedurus	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10854 Orang	1,733,011	1,854,305	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12,527,919	13,402,368	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	117,906,831	126,160,309	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Kenjeran		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**122,803,078**	**131,397,117**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7276 Orang	1,733,011	1,854,305	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,795,653	11,549,189	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	110,274,414	117,993,623	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Keputih		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**104,172,605**	**111,463,613**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Keputih	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9312 Orang	770,227	824,135	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,333,668	5,705,958	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	98,068,710	104,933,520	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Ketabang		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**83,605,703**	**89,457,009**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Ketabang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2795 Orang	2,695,795	2,884,474	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,333,668	5,705,958	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	75,576,240	80,866,577	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Klampis Ngasem		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**106,184,546**	**113,616,182**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3564 Orang	1,026,970	1,098,847	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,360,196	6,804,138	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	98,797,380	105,713,197	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Krembangan Selatan		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**108,480,239**	**116,072,113**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6777 Orang	2,631,610	2,815,796	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,577,925	9,176,664	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	97,270,704	104,079,653	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Lidah Kulon		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**109,442,176**	**117,101,834**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4612 Orang	3,530,208	3,777,287	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,296,038	6,735,502	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	99,615,930	106,589,045	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Lontar		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**126,705,139**	**135,572,942**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Lontar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7761 Orang	2,888,352	3,090,508	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,643,356	8,176,863	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	116,173,431	124,305,571	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Made		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**97,816,298**	**104,662,244**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Made	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2214 Orang	1,347,898	1,442,237	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,911,090	6,323,685	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	90,557,310	96,896,322	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Manukan Kulon		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**148,299,274**	**158,678,547**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8958 Orang	1,797,197	1,922,983	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,289,214	8,867,801	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	138,212,863	147,887,763	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Medokan Ayu		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**133,358,119**	**142,690,894**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10115 Orang	1,283,712	1,373,559	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,400,877	12,196,658	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,673,530	129,120,677	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Menur		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**154,284,289**	**165,082,101**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Menur	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7236 Orang	3,851,136	4,120,677	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,246,033	10,961,206	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	140,187,120	150,000,218	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Mojo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**149,948,518**	**160,443,061**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Mojo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11258 Orang	4,653,456	4,979,151	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,027,031	9,657,117	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	136,268,031	145,806,793	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Morokrembangan		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**66,352,380**	**70,996,317**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7158 Orang	1,091,155	1,167,525	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,597,125	3,848,205	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	61,664,100	65,980,587	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Mulyorejo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**131,588,219**	**140,797,703**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6086 Orang	2,695,795	2,884,474	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,321,293	8,902,119	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,571,131	129,011,110	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Ngagel Rejo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**103,782,765**	**111,046,131**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7867 Orang	2,182,310	2,335,050	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,033,855	7,524,819	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	94,566,600	101,186,262	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Pacar Keling		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**137,113,600**	**146,709,699**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9192 Orang	4,332,528	4,635,762	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,054,832	9,686,860	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 .0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	123,726,240	132,387,077	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Pakis		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**128,084,511**	**137,049,803**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02 .0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Pakis	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5285 Orang	1,347,898	1,442,237	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 .0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,051,782	3,264,797	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	123,684,831	132,342,769	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Pegirian		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**56,091,365**	**60,017,003**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Pegirian	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5020 Orang	1,925,568	2,060,339	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,693,362	3,951,159	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	50,472,435	54,005,505	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Peneleh		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**118,943,651**	**127,268,012**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Peneleh	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5474 Orang	2,952,538	3,159,186	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,321,293	8,902,119	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	107,669,820	115,206,707	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Perak Timur		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**118,886,904**	**127,206,732**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11245 Orang	1,925,568	2,060,339	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,180,601	11,961,007	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	105,780,735	113,185,386	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Pucang Sewu		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**132,711,627**	**141,999,668**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7525 Orang	1,797,197	1,922,983	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,770,399	9,382,572	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	122,144,031	130,694,113	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Putat Jaya		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**111,144,908**	**118,924,390**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7291 Orang	1,283,712	1,373,559	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,244,256	3,470,705	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	106,616,940	114,080,126	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Rangkah		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**129,087,135**	**138,121,535**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Rangkah	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10314 Orang	3,466,022	3,708,609	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,321,293	8,902,119	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	117,299,820	125,510,807	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Sawahan		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**97,324,154**	**104,135,396**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Sawahan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7656 Orang	2,310,682	2,472,406	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,130,092	7,627,773	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87,883,380	94,035,217	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Sawahpulo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**158,995,948**	**170,124,991**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5660 Orang	5,006,477	5,356,880	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,115,940	3,333,433	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	150,873,531	161,434,678	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Sememi		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**144,846,564**	**154,983,258**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Sememi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11065 Orang	4,653,456	4,979,151	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12,592,077	13,471,004	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	127,601,031	136,533,103	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Sidosermo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**114,657,633**	**122,681,724**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6125 Orang	2,182,310	2,335,050	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,604,453	10,274,843	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	102,870,870	110,071,831	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Sidotopo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**97,906,022**	**104,758,219**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8108 Orang	1,668,826	1,785,627	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,039,406	6,460,957	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	90,197,790	96,511,635	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Sidotopo Wetan		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**61,605,829**	**65,917,388**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9981 Orang	2,021,846	2,163,355	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4,142,468	4,431,612	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	55,441,515	59,322,421	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Simolawang		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**150,940,631**	**161,504,994**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Simolawang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5816 Orang	4,236,250	4,532,745	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,194,250	7,696,409	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	139,510,131	149,275,840	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Simomulyo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**128,346,610**	**137,329,192**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11814 Orang	320,928	343,390	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,385,451	8,970,755	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	119,640,231	128,015,047	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Siwalankerto		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**130,042,375**	**139,144,685**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2487 Orang	2,021,846	2,163,355	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,180,098	3,402,069	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	124,840,431	133,579,261	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Tambakrejo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**109,492,150**	**117,154,933**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8242 Orang	1,604,640	1,716,949	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,257,135	8,833,483	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	99,630,375	106,604,501	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Tambakwedi		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**80,655,627**	**86,300,653**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3260 Orang	1,412,083	1,510,915	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4,270,784	4,568,885	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	74,972,760	80,220,853	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**125,910,869**	**134,723,995**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9687 Orang	1,925,568	2,060,339	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,083,861	3,299,115	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,901,440	129,364,541	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Tanjungsari		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**143,400,609**	**153,436,744**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3648 Orang	1,155,341	1,236,203	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,476,137	10,137,571	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	132,769,131	142,062,970	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Tembok Dukuh		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**131,002,420**	**140,172,349**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8488 Orang	2,214,403	2,369,389	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1,090,686	1,166,816	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	127,697,331	136,636,144	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Tenggilis		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**153,131,195**	**163,847,530**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8492 Orang	3,466,022	3,708,609	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	14,067,711	15,049,637	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	135,597,462	145,089,284	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Wiyung		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**141,089,455**	**150,963,981**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Wiyung	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8377 Orang	3,851,136	4,120,677	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,481,688	9,073,709	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	128,756,631	137,769,595	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Wonokromo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**97,611,076**	**104,443,137**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5898 Orang	2,824,166	3,021,830	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,436,730	3,676,614	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91,350,180	97,744,693	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi pada Puskesmas Wonokusumo		Cakupan imunisasi bayi lengkap	100%	**131,319,655**	**140,552,428**	
			Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 1 x 24 jam	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11616 Orang	3,277,249	3,518,847	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,199,262	3,439,159	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	124,843,144	133,594,422	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas obat dan perbekalan kesehatan		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL	100%	**29,667,846,998**	**30,777,900,112**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**29,667,846,998**	**30,777,900,112**	
	Meningkatnya kualitas obat dan perbekalan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100%	**29,667,846,998**	**30,777,900,112**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	5 Paket	29,667,846,998	30,777,900,112	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				
	Meningkatnya cakupan pembiayaan peserta jaminan kesehatan daerah		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	**554,411,653,367**	**540,981,270,601**	
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%			
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**554,411,653,367**	**540,981,270,601**	
	Meningkatnya Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dalam pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dalam Jaminan Kesehatan Nasional	231%	**554,411,653,367**	**540,981,270,601**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	554,411,653,367	540,981,270,601	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	79%	**450,708,791,195**	**230,258,485,608**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**450,708,791,195**	**230,258,485,608**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah		Persentase Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai persyaratan	100%	**450,708,791,195**	**230,258,485,608**	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						
	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	352,619,996,137	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas						
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	17,017,082,724	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	43,870,000	46,600,000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	13 Unit	5,864,215,425	8,083,105,118	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	339,802,789	2,411,188,628	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70 Unit	70,337,306,739	72,697,672,628	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	4,486,517,381	4,491,227,381	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RS Surabaya Selatan	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		0	142,528,691,853	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	**68,653,104,758**	**72,478,375,181**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,01 per 1.000 kelahiran hidup			
			Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	0,076 %			
			Presentase lanjut usia yang mandiri	90,5 %			
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**68,653,104,758**	**72,478,375,181**	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100%	**2,646,223,964**	**2,831,459,652**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100%			
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36664 Orang	552,384,691	591,051,620	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36468 Orang	117,700,000	125,939,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35139 Orang	1,856,198,207	1,986,131,922	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	472640 Orang	119,941,066	128,337,110	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan		Persentase orang dengan masalah kesehatan yang ditemukan dan ditangani	100%	**269,233,126**	**288,079,445**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	269,233,126	288,079,445	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**1,177,726,475**	**1,233,416,610**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	44,907,900	48,051,453	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	804,583,652	834,153,790	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	328,234,923	351,211,367	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**2,585,006,490**	**2,944,344,774**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181238 Orang	2,543,918,484	2,900,380,818	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	41,088,006	43,963,956	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Asemrowo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**322,913,944**	**345,517,920**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	322,913,944	345,517,920	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Balasklumprik		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**246,671,327**	**263,938,319**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	246,671,327	263,938,319	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Balongsari		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**190,918,648**	**204,282,953**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	190,918,648	204,282,953	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Bangkingan		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**202,929,338**	**217,134,392**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	202,929,338	217,134,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Banyuurip		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**370,102,899**	**396,010,102**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	370,102,899	396,010,102	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Benowo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**342,321,134**	**366,283,613**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	342,321,134	366,283,613	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Bulak Banteng		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**292,303,853**	**312,765,123**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	292,303,853	312,765,123	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Dr. Soetomo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**251,515,439**	**269,121,520**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	251,515,439	269,121,520	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Dukuh Kupang		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**305,043,864**	**326,396,934**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	305,043,864	326,396,934	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Dupak		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**308,792,193**	**330,407,647**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	308,792,193	330,407,647	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Gading		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**411,783,070**	**440,607,885**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	411,783,070	440,607,885	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Gayungan		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**231,678,418**	**247,895,907**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	231,678,418	247,895,907	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Gundih		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**265,670,418**	**284,267,347**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	265,670,418	284,267,347	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Gunung Anyar		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**298,829,986**	**319,748,085**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	298,829,986	319,748,085	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Jagir		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**322,794,922**	**345,390,566**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	322,794,922	345,390,566	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Jemursari		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**262,091,374**	**280,437,770**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	262,091,374	280,437,770	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Jeruk		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**175,939,667**	**188,255,443**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	175,939,667	188,255,443	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Kalijudan		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**236,082,498**	**252,608,273**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	236,082,498	252,608,273	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Kalirungkut		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**294,892,198**	**315,534,652**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	294,892,198	315,534,652	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Kebonsari		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**309,456,761**	**331,118,734**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	309,456,761	331,118,734	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Kedungdoro		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**278,957,814**	**298,484,861**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	278,957,814	298,484,861	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Kedurus		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**357,663,279**	**382,699,709**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	357,663,279	382,699,709	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Kenjeran		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**212,111,433**	**226,959,233**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	212,111,433	226,959,233	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Keputih		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**307,426,282**	**328,946,121**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	307,426,282	328,946,121	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Ketabang		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**227,482,010**	**243,405,750**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	227,482,010	243,405,750	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Klampis Ngasem		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**201,235,597**	**215,322,088**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	201,235,597	215,322,088	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada		Prevalensi Bayi Mendapat ASI	86,86 %	**268,882,775**	**287,704,569**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Puskesmas Krembangan Selatan		Ekslusif sesuai standar				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	268,882,775	287,704,569	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Lidah Kulon		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**254,419,809**	**272,229,195**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	254,419,809	272,229,195	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Lontar		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**313,356,462**	**335,291,415**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	313,356,462	335,291,415	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Made		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**197,361,616**	**211,176,929**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	197,361,616	211,176,929	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Manukan Kulon		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**300,174,155**	**321,186,345**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	300,174,155	321,186,345	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Medokan Ayu		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**323,813,963**	**346,480,940**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	323,813,963	346,480,940	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Menur		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**203,032,059**	**217,244,303**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	203,032,059	217,244,303	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Mojo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**349,489,681**	**373,953,959**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	349,489,681	373,953,959	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Morokrembangan		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**403,321,826**	**431,554,354**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	403,321,826	431,554,354	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Mulyorejo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**282,741,562**	**302,533,471**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	282,741,562	302,533,471	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Ngagel Rejo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**325,829,841**	**348,637,930**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	325,829,841	348,637,930	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Pacar Keling		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**289,087,699**	**309,323,838**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	289,087,699	309,323,838	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Pakis		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**283,772,122**	**303,636,171**	
1.02.02.2.02 .0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	283,772,122	303,636,171	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Pegirian		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**326,868,697**	**349,749,506**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	326,868,697	349,749,506	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Peneleh		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**231,299,658**	**247,490,634**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	231,299,658	247,490,634	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Perak Timur		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**342,962,497**	**366,969,872**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	342,962,497	366,969,872	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Pucang Sewu		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**263,043,034**	**281,456,046**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	263,043,034	281,456,046	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Putat Jaya		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**346,742,767**	**371,014,761**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	346,742,767	371,014,761	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Rangkah		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**284,621,661**	**304,545,177**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	284,621,661	304,545,177	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Sawahan		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**347,578,831**	**371,909,349**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	347,578,831	371,909,349	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Sawahpulo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**236,655,903**	**253,221,816**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	236,655,903	253,221,816	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Sememi		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**369,692,247**	**395,570,704**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	369,692,247	395,570,704	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Sidosermo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**282,055,011**	**301,798,862**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	282,055,011	301,798,862	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Sidotopo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**295,455,371**	**316,137,247**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	295,455,371	316,137,247	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Sidotopo Wetan		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**445,219,359**	**476,384,714**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	445,219,359	476,384,714	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Simolawang		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**216,433,549**	**231,583,898**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	216,433,549	231,583,898	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Simomulyo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**424,325,755**	**454,028,558**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	424,325,755	454,028,558	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Siwalankerto		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**206,549,943**	**221,008,439**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	206,549,943	221,008,439	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Tambakrejo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**289,935,501**	**310,230,986**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	289,935,501	310,230,986	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Tambakwedi		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**270,626,445**	**289,570,296**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	270,626,445	289,570,296	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**336,142,924**	**359,672,928**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	336,142,924	359,672,928	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Tanjungsari		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**160,538,318**	**171,776,000**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	160,538,318	171,776,000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Tembok Dukuh		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**268,523,008**	**287,319,618**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	268,523,008	287,319,618	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Tenggilis		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**254,434,392**	**272,244,799**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	254,434,392	272,244,799	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Wiyung		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**250,293,984**	**267,814,563**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	250,293,984	267,814,563	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Wonokromo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**290,445,405**	**310,776,584**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	290,445,405	310,776,584	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat pada Puskesmas Wonokusumo		Prevalensi Bayi Mendapat ASI Ekslusif sesuai standar	86,86 %	**378,912,026**	**405,578,552**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	378,912,026	405,578,552	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Asemrowo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**3,433,416**	**3,673,068**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,433,416	3,673,068	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Balasklumprik		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Balongsari		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**3,080,448**	**3,295,463**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,080,448	3,295,463	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Bangkingan		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Banyuurip		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Benowo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**4,428,144**	**4,737,228**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,428,144	4,737,228	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Bulak Banteng		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,117,808**	**2,265,631**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,117,808	2,265,631	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Dr. Soetomo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Dukuh Kupang		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**3,818,472**	**4,085,001**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,818,472	4,085,001	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Dupak		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**1,572,312**	**1,682,059**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1,572,312	1,682,059	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Gading		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,214,072**	**2,368,614**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,214,072	2,368,614	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Gayungan		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Gundih		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Gunung Anyar		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Jagir		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**4,813,200**	**5,149,161**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,813,200	5,149,161	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Jemursari		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**1,315,608**	**1,407,437**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1,315,608	1,407,437	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Jeruk		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Kalijudan		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,823,744**	**3,020,841**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,823,744	3,020,841	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Kalirungkut		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Kebonsari		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Kedungdoro		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Kedurus		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Kenjeran		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Keputih		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Ketabang		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Klampis Ngasem		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Krembangan Selatan		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Lidah Kulon		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Lontar		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**3,593,856**	**3,844,707**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,593,856	3,844,707	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Made		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Manukan Kulon		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Medokan Ayu		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Menur		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,952,096**	**3,158,152**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,952,096	3,158,152	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Mojo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Morokrembangan		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,470,776**	**2,643,236**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,470,776	2,643,236	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Mulyorejo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Ngagel Rejo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Pacar Keling		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**3,112,536**	**3,329,791**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,112,536	3,329,791	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Pakis		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Pegirian		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Peneleh		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Perak Timur		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**3,465,504**	**3,707,396**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,465,504	3,707,396	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Pucang Sewu		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Putat Jaya		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Rangkah		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Sawahan		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Sawahpulo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,695,392**	**2,883,530**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,695,392	2,883,530	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Sememi		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Sidosermo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02 .0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Sidotopo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,406,600**	**2,574,581**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,406,600	2,574,581	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Sidotopo Wetan		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Simolawang		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Simomulyo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Siwalankerto		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Tambakrejo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Tambakwedi		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Tanjungsari		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,181,984**	**2,334,286**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,181,984	2,334,286	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Tembok Dukuh		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**4,331,880**	**4,634,245**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,331,880	4,634,245	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Tenggilis		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Wiyung		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Wonokromo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**299,488**	**320,392**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	299,488	320,392	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan pada Puskesmas Wonokusumo		Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	153 Kelurahan	**2,774,168**	**2,978,717**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	2,774,168	2,978,717	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Asemrowo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**823,435,564**	**859,709,115**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	623 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	743,877,051	774,733,071	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Asemrowo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8,165,986	8,858,462	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Asemrowo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,540,800	1,648,656	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Bangkingan		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**457,790,456**	**478,402,429**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	183 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	398,536,074	415,067,351	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Bangkingan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8,554,843	9,280,293	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Bangkingan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Dr. Soetomo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**633,202,201**	**662,086,565**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	539,079,640	561,440,664	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Puskesmas				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13,998,834	15,185,935	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	10,272,000	10,991,040	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Gading		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**949,860,918**	**991,473,071**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Gading	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1083 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	867,595,035	903,582,877	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Gading	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9,332,556	10,123,956	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Gading	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	3,081,600	3,297,312	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Jagir		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**840,037,030**	**876,885,630**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Jagir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	685 Orang	60,538,163	64,539,736	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	766,945,342	798,758,235	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Jagir	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10,499,125	11,389,451	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Jagir	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,054,400	2,198,208	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Jemursari		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**483,668,220**	**504,577,344**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Jemursari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	234 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	452,001,255	470,750,267	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Jemursari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2,721,995	2,952,821	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Jemursari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	4,108,800	4,396,416	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Jeruk		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**670,253,632**	**699,665,393**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Jeruk	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	249 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	610,250,789	635,563,992	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Jeruk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6,221,704	6,749,304	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Jeruk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	4,108,800	4,396,416	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Kebonsari		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**730,048,149**	**762,804,128**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	719 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	637,929,016	664,390,312	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Kebonsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10,887,982	11,811,283	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Kebonsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	513,600	549,552	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Made		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**497,733,981**	**519,970,584**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Made	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	437,995,251	456,163,294	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Made	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5,443,991	5,905,641	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Made	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	4,622,400	4,945,968	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Morokrembangan		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**831,675,680**	**867,122,689**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	692 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	796,413,515	829,448,748	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2,721,995	2,952,821	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	7,704,000	8,243,280	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Ngagel Rejo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**891,047,530**	**929,743,794**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	712 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	827,434,861	861,756,859	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7,777,130	8,436,630	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6,163,200	6,594,624	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Pacar Keling		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**813,219,382**	**848,599,447**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	752,688,313	783,909,824	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7,777,130	8,436,630	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	3,081,600	3,297,312	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Peneleh		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**625,052,867**	**653,133,391**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Peneleh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	514 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	544,841,384	567,441,405	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Peneleh	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9,332,556	10,123,956	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Peneleh	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Pucang Sewu		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**520,005,456**	**543,728,613**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	541 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	439,793,973	458,036,627	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9,332,556	10,123,956	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Sawahan		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**480,233,981**	**501,743,221**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02 .0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Sawahan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	593 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 .0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	421,757,312	439,251,806	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 .0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Sawahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7,777,130	8,436,630	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Sawahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Sidosermo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**823,718,836**	**860,184,308**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	740,264,445	770,970,614	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Puskesmas				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Sidosermo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12,832,264	13,920,440	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Sidosermo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	770,400	824,328	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Sidotopo Wetan		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**921,199,609**	**960,188,690**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	886 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	892,350,131	929,364,814	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,499,708	3,796,484	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	513,600	549,552	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Siwalankerto		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**625,106,022**	**651,991,112**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	207 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	590,218,087	614,700,333	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,888,565	4,218,315	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6,163,200	6,594,624	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Tambakrejo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**739,344,009**	**772,209,272**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	494 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	657,591,726	684,868,630	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9,332,556	10,123,956	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Tambakwedi		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**612,027,135**	**638,218,839**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	582,025,713	606,168,139	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,110,852	3,374,652	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,054,400	2,198,208	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**912,609,304**	**951,432,847**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	794 Orang	27,940,691	29,787,570	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	877,138,195	913,521,887	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4,448,818	4,826,078	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	3,081,600	3,297,312	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Tembok Dukuh		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**946,019,026**	**987,800,664**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	852,828,174	888,203,487	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10,499,125	11,389,451	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12,840,000	13,738,800	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Tenggilis		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**834,369,651**	**871,669,677**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	617 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	737,070,640	767,644,331	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Puskesmas				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Tenggilis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	15,554,260	16,873,261	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Tenggilis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Wonokusumo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**1,008,096,213**	**1,050,970,584**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	913 Orang	24,865,463	26,465,287	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	971,630,719	1,012,052,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,905,631	4,232,049	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	7,694,400	8,220,408	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Balasklumprik		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**431,237,673**	**449,949,274**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	400,972,138	417,604,463	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,888,565	4,218,315	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,540,800	1,648,656	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Balongsari		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**660,630,832**	**690,354,849**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Balongsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	575,143,980	599,000,952	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Balongsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10,499,125	11,389,451	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Balongsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5,136,000	5,495,520	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Bulak Banteng		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**767,387,245**	**800,035,005**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	567 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	737,378,510	767,964,970	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,888,565	4,218,315	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,284,000	1,373,880	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Dupak		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**574,926,417**	**599,583,579**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Dupak	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	304 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	545,174,482	567,788,320	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Dupak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,888,565	4,218,315	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Dupak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Gunung Anyar		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**653,220,842**	**682,989,236**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	816 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	554,923,883	577,942,126	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12,443,408	13,498,609	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5,136,000	5,495,520	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Kedurus		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**685,047,732**	**716,019,122**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Kedurus	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	934 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	590,859,573	615,368,428	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Puskesmas				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Kedurus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12,443,408	13,498,609	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Kedurus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Kenjeran		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**702,283,901**	**733,955,600**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	608,609,342	633,854,458	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Kenjeran	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12,443,408	13,498,609	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Kenjeran	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	513,600	549,552	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Keputih		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**666,882,965**	**696,144,657**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Keputih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	511 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	607,643,209	632,848,249	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Keputih	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6,999,417	7,592,967	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Keputih	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Ketabang		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**476,413,634**	**497,663,334**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Ketabang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	247 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	420,270,104	437,702,908	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Ketabang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5,443,991	5,905,641	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Ketabang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Krembangan Selatan		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**564,282,637**	**589,835,820**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	483,696,924	503,760,672	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8,165,986	8,858,462	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Lidah Kulon		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**551,227,772**	**575,741,889**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	489,434,642	509,736,391	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5,443,991	5,905,641	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6,676,800	7,144,176	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Manukan Kulon		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**625,154,813**	**653,347,962**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	715 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	542,353,391	564,850,210	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	11,665,695	12,654,946	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,284,000	1,373,880	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Medokan Ayu		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**651,987,787**	**681,403,827**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	757 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	565,334,365	588,784,435	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	11,665,695	12,654,946	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5,136,000	5,495,520	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Mojo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**766,451,997**	**800,871,618**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Mojo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	976 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	671,441,606	699,293,004	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Mojo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12,832,264	13,920,440	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Mojo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12,326,400	13,189,248	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Mulyorejo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**568,649,819**	**594,384,153**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	488,064,106	508,309,005	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8,165,986	8,858,462	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Perak Timur		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**1,017,688,738**	**1,062,721,739**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	908 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	914,255,779	952,179,109	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Perak Timur	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12,443,408	13,498,609	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Perak Timur	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	10,272,000	10,991,040	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Rangkah		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**777,910,189**	**812,512,870**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Rangkah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	452 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	692,540,767	721,267,358	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Rangkah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	11,665,695	12,654,946	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Rangkah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	3,852,000	4,121,640	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Sawahpulo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**583,823,325**	**608,966,713**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	384 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	549,962,590	572,775,038	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,888,565	4,218,315	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5,136,000	5,495,520	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Sememi		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**853,629,534**	**891,540,964**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Sememi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1135 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	760,483,201	792,028,044	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Puskesmas				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Sememi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10,887,982	11,811,283	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Sememi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,540,800	1,648,656	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Simolawang		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**706,563,934**	**737,612,214**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Simolawang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	643,200,752	669,880,720	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Simolawang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8,554,843	9,280,293	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Simolawang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5,136,000	5,495,520	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Tanjungsari		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**528,568,947**	**552,639,994**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	448,614,264	467,222,784	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9,332,556	10,123,956	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	770,400	824,328	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Wiyung		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**772,127,940**	**806,454,154**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Wiyung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	688,042,518	716,582,522	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Wiyung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	11,665,695	12,654,946	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Wiyung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Banyuurip		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**642,133,162**	**670,563,049**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	783 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	576,466,093	600,377,906	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Banyuurip	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7,777,130	8,436,630	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Banyuurip	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	8,217,600	8,792,832	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Benowo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**874,100,872**	**913,312,610**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Benowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	695 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	767,557,061	799,395,328	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Benowo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	15,554,260	16,873,261	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Benowo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	10,272,000	10,991,040	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Dukuh Kupang		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**594,642,750**	**621,922,733**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	867 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	498,400,191	519,073,831	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12,443,408	13,498,609	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	3,081,600	3,297,312	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Gayungan		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**609,998,929**	**637,819,210**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Gayungan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	565 Orang	80,717,551	86,052,981	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	516,338,996	537,756,738	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Puskesmas				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Gayungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10,887,982	11,811,283	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Gayungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,054,400	2,198,208	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Gundih		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**593,409,005**	**619,574,659**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Gundih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	502 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	535,460,562	557,671,466	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Gundih	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6,221,704	6,749,304	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Gundih	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,054,400	2,198,208	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Kalijudan		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**467,792,174**	**489,335,609**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	690 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	387,463,261	403,535,237	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Kalijudan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8,165,986	8,858,462	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Kalijudan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,311,200	2,472,984	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Kalirungkut		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**877,478,937**	**916,301,812**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	787,134,824	819,785,176	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8,165,986	8,858,462	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12,326,400	13,189,248	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Kedungdoro		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**649,465,736**	**678,044,510**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	588,435,693	612,844,005	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6,221,704	6,749,304	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5,136,000	5,495,520	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Klampis Ngasem		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**420,175,413**	**439,169,986**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	361,713,370	376,717,241	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6,221,704	6,749,304	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Lontar		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**664,403,827**	**693,451,361**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02 .0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Lontar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	588 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 .0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	608,260,297	633,490,935	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02 .0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Lontar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5,443,991	5,905,641	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Lontar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,027,200	1,099,104	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Menur		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**672,179,458**	**702,359,809**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Menur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	387 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	588,094,036	612,488,177	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelayanan Puskesmas				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Menur	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	11,665,695	12,654,946	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Menur	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Pakis		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**455,315,395**	**475,055,035**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Pakis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	424,022,660	441,611,120	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Pakis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,888,565	4,218,315	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Pakis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Pegirian		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**715,824,327**	**746,474,611**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Pegirian	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	351 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	681,061,136	709,311,552	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Pegirian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4,277,421	4,640,147	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Pegirian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5,649,600	6,045,072	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Putat Jaya		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**882,573,292**	**920,035,589**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	661 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	851,280,557	886,591,674	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3,888,565	4,218,315	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2,568,000	2,747,760	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Sidotopo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**1,175,821,751**	**1,226,198,619**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ibu Hamil sesuai standar				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	664 Orang	49,672,339	52,955,681	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,116,831,482	1,163,157,652	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Sidotopo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7,777,130	8,436,630	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Sidotopo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1,540,800	1,648,656	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Simomulyo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**860,862,406**	**898,956,481**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	981 Orang	69,851,727	74,468,926	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	774,326,415	806,445,475	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Simomulyo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12,832,264	13,920,440	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Simomulyo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	3,852,000	4,121,640	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia pada Puskesmas Wonokromo		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	**348,155,522**	**363,560,762**	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	517 Orang	24,836,170	26,477,840	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	312,379,757	325,337,269	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Puskesmas Wonokromo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2,721,995	2,952,821	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Puskesmas Wonokromo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	8,217,600	8,792,832	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	95.45%	**1,536,372,229**	**1,567,904,226**	
			Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	68%			
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**				**1,123,294,556**	**1,125,911,116**	
	Meningkatkan Integrasi Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	1 Aplikasi	**1,123,294,556**	**1,125,911,116**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	1,123,294,556	1,125,911,116	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**413,077,673**	**441,993,110**	
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya		Persentase pelayanan kesehatan rujukan yang melakukan perbaikan atas rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan	100%	**104,967,000**	**112,314,690**	
1.02.02.2.04 .0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						
	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	104,967,000	112,314,690	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar		Persentase pelayanan kesehatan dasar yang melakukan perbaikan atas rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan	100%	**308,110,673**	**329,678,420**	
1.02.02.2.04 .0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator	63 Unit	308,110,673	329,678,420	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**147,524,084,732**	**143,673,875,952**	
	Meningkatnya mutu dan distribusi SDM Kesehatan		Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	100%	**147,524,084,732**	**143,673,875,952**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**				**145,666,733,792**	**141,686,510,446**	
	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan yang sesuai kebutuhan		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	5,78 per 1.000 penduduk	**145,666,733,792**	**141,686,510,446**	
1.02.03.2.02 .0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1632 Orang	145,325,517,212	141,321,408,705	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02 .0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	341,216,580	365,101,741	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1,857,350,940**	**1,987,365,506**	
	Meningkatnya pembinaan SDM Kesehatan		Persentase SDM kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas komptensi dan/atau kapasitas SDM Kesehatan sesuai standar	55%	**1,857,350,940**	**1,987,365,506**	
1.02.03.2.03 .0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	299 Orang	1,857,350,940	1,987,365,506	Dinas Kesehatan
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**509,901,176**	**545,594,258**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya keamanan pangan olahan		Persentase pelaku industri rumah tangga dan produsen makanan siap saji memenuhi standar keamanan pangan	100%	**509,901,176**	**545,594,258**	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**				**509,901,176**	**545,594,258**	
	Meningkatnya kualitas pemeriksaan sampel makanan minuman industri rumah tangga dan siap saji		Persentase pelaku usaha industri rumah tangga dan produsen makanan siap saji memenuhi standar keamanan pangan	100%	**509,901,176**	**545,594,258**	
1.02.04.2.06 .0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	509,901,176	545,594,258	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**930,191,459**	**996,218,361**	
	Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	65%	**930,191,459**	**996,218,361**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**930,191,459**	**996,218,361**	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Kader Posyandu Strata Madya	20%	**700,241,459**	**749,258,361**	
			Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%			
1.02.05.2.03 .0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	700,241,459	749,258,361	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,252,015**	**3,492,664**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Asemrowo		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,252,015	3,492,664	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Balasklumprik		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**5,037,855**	**5,410,656**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5,037,855	5,410,656	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Balongsari		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**4,272,495**	**4,588,659**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,272,495	4,588,659	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Bangkingan		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,144,935**	**4,451,660**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,144,935	4,451,660	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Banyuurip		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,072,070**	**3,299,403**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Banyuurip	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,072,070	3,299,403	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Benowo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,400,055**	**4,725,659**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,400,055	4,725,659	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,507,135**	**3,766,663**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Bulak Banteng		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,507,135	3,766,663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Dr. Soetomo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,347,670**	**4,669,398**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,347,670	4,669,398	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**4,400,055**	**4,725,659**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Dukuh Kupang		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,400,055	4,725,659	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Dupak		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,072,070**	**3,299,403**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,072,070	3,299,403	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gading		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**5,113,030**	**5,491,394**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5,113,030	5,491,394	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gayungan		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**2,880,730**	**3,093,904**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,880,730	3,093,904	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gundih		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,634,695**	**3,903,662**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,634,695	3,903,662	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gunung Anyar		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,507,135**	**3,766,663**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,507,135	3,766,663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jagir		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,582,310**	**3,847,401**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,582,310	3,847,401	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jemursari		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,634,695**	**3,903,662**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,634,695	3,903,662	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jeruk		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,008,290**	**3,230,903**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,008,290	3,230,903	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kalijudan		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,454,750**	**3,710,402**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,454,750	3,710,402	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**6,069,730**	**6,518,890**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Kalirungkut		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6,069,730	6,518,890	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kebonsari		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,144,935**	**4,451,660**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,144,935	4,451,660	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,634,695**	**3,903,662**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Kedungdoro		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,634,695	3,903,662	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kedurus		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,008,290**	**3,230,903**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,008,290	3,230,903	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kenjeran		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,507,135**	**3,766,663**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,507,135	3,766,663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Keputih		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**2,933,115**	**3,150,165**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,933,115	3,150,165	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Ketabang		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,199,630**	**3,436,403**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,199,630	3,436,403	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Klampis Ngasem		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,252,015**	**3,492,664**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,252,015	3,492,664	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,454,750**	**3,710,402**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Krembangan Selatan		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,454,750	3,710,402	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Lidah Kulon		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,570,915**	**3,835,162**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,570,915	3,835,162	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Lontar		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**2,837,445**	**3,047,416**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,837,445	3,047,416	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Made		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,220,110**	**4,532,398**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,220,110	4,532,398	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**2,880,730**	**3,093,904**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Manukan Kulon		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,880,730	3,093,904	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Medokan Ayu		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,252,015**	**3,492,664**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,252,015	3,492,664	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Menur		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**4,411,450**	**4,737,897**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,411,450	4,737,897	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Mojo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,347,670**	**4,669,398**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,347,670	4,669,398	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,454,750**	**3,710,402**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Morokrembangan		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Morokrembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,454,750	3,710,402	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Mulyorejo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,252,015**	**3,492,664**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,252,015	3,492,664	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,507,135**	**3,766,663**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Ngagel Rejo		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,507,135	3,766,663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pacar Keling		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,124,455**	**3,355,664**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,124,455	3,355,664	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pakis		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**2,996,895**	**3,218,665**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,996,895	3,218,665	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pegirian		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,507,135**	**3,766,663**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,507,135	3,766,663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Peneleh		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,582,310**	**3,847,401**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,582,310	3,847,401	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Perak Timur		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,602,790**	**4,943,396**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,602,790	4,943,396	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,454,750**	**3,710,402**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Pucang Sewu		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,454,750	3,710,402	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Putat Jaya		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,582,310**	**3,847,401**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,582,310	3,847,401	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Rangkah		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,582,310**	**3,847,401**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,582,310	3,847,401	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sawahan		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,582,310**	**3,847,401**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,582,310	3,847,401	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sawahpulo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,634,695**	**3,903,662**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sawahpulo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,634,695	3,903,662	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sememi		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,060,675**	**3,287,165**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,060,675	3,287,165	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sidosermo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**2,880,730**	**3,093,904**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,880,730	3,093,904	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sidotopo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,443,355**	**3,698,163**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,443,355	3,698,163	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,076,620**	**3,304,289**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Sidotopo Wetan		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,076,620	3,304,289	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Simolawang		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,017,375**	**4,314,660**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,017,375	4,314,660	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Simomulyo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,507,135**	**3,766,663**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,507,135	3,766,663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Siwalankerto		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,507,135**	**3,766,663**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,507,135	3,766,663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**4,272,495**	**4,588,659**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Tambakrejo		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,272,495	4,588,659	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tambakwedi		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,507,135**	**3,766,663**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambakwedi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,507,135	3,766,663	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,327,190**	**3,573,402**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,327,190	3,573,402	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tanjungsari		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,486,640**	**3,744,651**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,486,640	3,744,651	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,008,290**	**3,230,903**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Tembok Dukuh		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,008,290	3,230,903	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tenggilis		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**4,272,495**	**4,588,659**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,272,495	4,588,659	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Wiyung		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**3,008,290**	**3,230,903**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,008,290	3,230,903	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Wonokromo		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan pelayanan sasaran siklus hidup	100%	**3,634,695**	**3,903,662**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,634,695	3,903,662	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat		Persentase Posyandu Keluarga aktif yang melakukan kegiatan	100%	**5,029,265**	**5,395,140**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Puskesmas Wonokusumo		pelayanan sasaran siklus hidup				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5,029,265	5,395,140	Dinas Kesehatan
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**266,832,691,429**	**270,679,557,414**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Bhakti Dharma Husada	92,41 %	**89,228,180,229**	**89,948,267,014**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**89,228,180,229**	**89,948,267,014**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**89,228,180,229**	**89,948,267,014**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	510 Orang/bulan	89,228,180,229	89,948,267,014	RSUD Bhakti Dharma Husada

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase capaian SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	95,98 %	**177,604,511,200**	**180,731,290,400**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**177,604,511,200**	**180,731,290,400**	
	Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase Jenis Kebutuhan Penunjang Pelayanan BLUD RS Terpenuhi	100%	**177,604,511,200**	**180,731,290,400**	
			Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	177,604,511,200	180,731,290,400	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**36,782,907,920**	**39,015,814,198**	
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase sarana prasarana Rumah Sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%	**36,782,907,920**	**39,015,814,198**	
			Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan standar	89,5 %			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**36,782,907,920**	**39,015,814,198**	
	Terpenuhinya sarana prasarana dan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan standar	98,20 %	**36,782,907,920**	**39,015,814,198**	
			Persentase pemenuhan dokter spesialis sesuai standar RS	100%			
1.02.02.2.01 .0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 Unit	3,114,100,000	3,587,019,731	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02.2.01 .0022	Pengembangan Rumah Sakit						
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah	1 Unit	33,668,807,920	35,428,794,467	RSUD Bhakti Dharma Husada

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**417,288,021,975**	**424,258,723,356**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Dokter Mohamad Soewandhie	91,4 %	**138,782,429,415**	**139,906,811,129**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**138,782,429,415**	**139,906,811,129**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**138,782,429,415**	**139,906,811,129**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan	138,782,429,415	139,906,811,129	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase Capaian SPM RSUD dr.	88,89 %	**278,505,592,560**	**284,351,912,227**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Mohamad Soewandhie				
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**278,505,592,560**	**284,351,912,227**	
	Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	**278,505,592,560**	**284,351,912,227**	
			Persentase Jenis Kebutuhan Penunjang Pelayanan BLUD RS Terpenuhi	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	278,505,592,560	284,351,912,227	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**4,455,756,220**	**5,683,470,272**	
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%	**4,455,756,220**	**5,683,470,272**	
			Persentase ketersediaan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan standar	89,5 %			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**4,455,756,220**	**5,683,470,272**	
	Terpenuhinya sarana prasarana dan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan standar	100%	**4,455,756,220**	**5,683,470,272**	
			Persentase pemenuhan dokter spesialis sesuai standar RS	100%			
1.02.02.2.01 .0022	Pengembangan Rumah Sakit						
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	4,455,756,220	5,683,470,272	RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**147,041,812,432**	**151,208,450,474**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	85,10 %	**111,166,812,432**	**111,745,950,474**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**75,827,183,985**	**76,366,078,175**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**75,827,183,985**	**76,366,078,175**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476 Orang/bulan	75,827,183,985	76,366,078,175	RSUD Eka Candrarini
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**35,339,628,447**	**35,379,872,299**	
	Meningkatnya Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**35,339,628,447**	**35,379,872,299**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35,339,628,447	35,379,872,299	RSUD Eka Candrarini

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD Eka Candrarini		Persentase Capaian SPM RSUD Eka Candrarini	95,95 %	**35,875,000,000**	**39,462,500,000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**35,875,000,000**	**39,462,500,000**	
	Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD Eka Candrarini		Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	**35,875,000,000**	**39,462,500,000**	
			Persentase Jenis Kebutuhan Penunjang Pelayanan BLUD RS Terpenuhi	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	35,875,000,000	39,462,500,000	RSUD Eka Candrarini
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**67,837,753,848**	**67,686,319,554**	
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD Eka Candrarini		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	**67,837,753,848**	**67,686,319,554**	
			Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Eka Candrarini sesuai dengan standar	82%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%			
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**67,837,753,848**	**67,686,319,554**	
	Terpenuhinya sarana prasarana dan SDM pada RSUD Eka Candrarini		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan standar	92%	**67,837,753,848**	**67,686,319,554**	
			Jumlah Unit Layanan yang Terpenuhi Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RSUD Eka Candrarini	1 Unit			
			Persentase pemenuhan dokter spesialis sesuai standar RS	100%			
1.02.02.2.01 .0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	55,253,465,247	49,802,030,952	RSUD Eka Candrarini

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	624,000,000	624,000,000	RSUD Eka Candrarini
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	11,960,288,601	17,260,288,602	RSUD Eka Candrarini

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**4,049,865,715,036**	**3,120,853,531,424**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**205,294,061,909**	**198,934,790,736**	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang bangunan gedung		Persentase bangunan yang ber IMB/PBG	2,01 %	**205,294,061,909**	**198,934,790,736**	
			Persentase bangunan gedung yang berfungsi baik	91,39 %			
			Persentase penyelesaian perizinan bangunan	83%			
			Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	75%			
			Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	100%			
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**				**205,294,061,909**	**198,934,790,736**	
	Meningkatnya pelayanan tata bangunan gedung		Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	2503 berkas	**2,296,497,793**	**2,299,249,345**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	2,296,497,793	2,299,249,345	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pemeliharaan dan pembangunan gedung daerah		Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	240 Bangunan	**201,041,464,843**	**194,675,314,790**	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	140 Bangunan Gedung	159,464,981,166	153,951,725,850	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	161 Bangunan Gedung	36,002,986,755	35,010,754,595	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	57 Dokumen	5,573,496,922	5,712,834,345	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Meningkatnya pengawasan bangunan berizin		Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 dokumen	**1,956,099,273**	**1,960,226,601**	
			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	2108 lokasi			
			Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	100 kasus			
1.03.08.2.01 .0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						
	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	422,600,000	422,600,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		serta Pertanahan					n serta Pertanahan
1.03.08.2.01 .0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						
	Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2124 Orang	1,533,499,273	1,537,626,601	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				**547,012,061**	**557,345,661**	
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkompeten	100%	**547,012,061**	**557,345,661**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				**547,012,061**	**557,345,661**	
	Meningkatnya pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi		Jenis kelembagaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	**547,012,061**	**557,345,661**	
1.03.11.2.01 .0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						
	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan	Dinas Perumahan Rakyat dan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan	20 Lembaga	547,012,061	557,345,661	Dinas Perumahan Rakyat dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Ditingkatkan Kapasitasnya				Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				**7,198,369,029**	**5,929,818,401**	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan		Persentase kepatuhan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksaaan pemanfaatan tata ruang	96%	**7,198,369,029**	**5,929,818,401**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**				**1,990,733,011**	**3,522,367,167**	
	Meningkatnya perencanaan tata ruang		Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	**1,990,733,011**	**3,522,367,167**	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1,240,733,011	3,522,367,167	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.01 .0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750,000,000	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**3,000,000,000**	**0**	
	Meningkatnya sinkronisasi penyelenggaraan tata ruang		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	1 Laporan	**3,000,000,000**	**0**	
1.03.12.2.02 .0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						
	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3,000,000,000	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**2,207,636,018**	**2,407,451,234**	
	Meningkatnya pelayanan tata ruang		Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	**2,207,636,018**	**2,407,451,234**	
1.03.12.2.03 .0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						
	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	918,022,901	1,114,398,677	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.03 .0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						
	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1,289,613,117	1,293,052,557	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**157,414,994,724**	**163,764,493,547**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air dan bina marga		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95,5 %	**97,240,613,404**	**103,436,188,301**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**97,240,613,404**	**103,436,188,301**	
	Meningkatnya pengelolaan alat berat dan alat angkut		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 Unit	**38,943,729,022**	**41,647,541,292**	
1.03.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	17,964,796,553	18,653,904,075	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09 .0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dinas Sumber Daya Air	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan	73 Unit	20,978,932,469	22,993,637,217	Dinas Sumber Daya Air

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	dan Bina Marga	dibayarkan Perizinannya				dan Bina Marga
	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran		Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%	**58,296,884,382**	**61,788,647,009**	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	58,296,884,382	61,788,647,009	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada dinas sumber daya air dan bina marga		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93,36 %	**60,174,381,320**	**60,328,305,246**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**157,227,811**	**157,242,259**	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	**157,227,811**	**157,242,259**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	157,227,811	157,242,259	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**53,556,837,866**	**53,973,988,554**	
	Terlaksananya pelayanan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**53,556,837,866**	**53,973,988,554**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	53,556,837,866	53,973,988,554	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,460,315,643**	**6,197,074,433**	
	Terlaksananya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	**6,460,315,643**	**6,197,074,433**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,460,315,643	6,197,074,433	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**74,025,203,557**	**74,653,382,280**	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan genangan		Persentase rumah pompa yang beroperasi dan berfungsi baik	100%	**74,025,203,557**	**74,653,382,280**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**74,025,203,557**	**74,653,382,280**	
	Meningkatnya operasional dan fungsi rumah pompa		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	76 Rumah Pompa	**74,025,203,557**	**74,653,382,280**	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir						
	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	319 Unit	74,025,203,557	74,653,382,280	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**913,791,855**	**914,479,743**	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang layak dan aman	3%	**913,791,855**	**914,479,743**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**				**913,791,855**	**914,479,743**	
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpadu		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	**913,791,855**	**914,479,743**	
1.03.03.2.01 .0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	913,791,855	914,479,743	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**12,660,181,721**	**13,993,931,796**	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	1%	**12,660,181,721**	**13,993,931,796**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**12,660,181,721**	**13,993,931,796**	
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpadu		Jumlah jenis lokasi IPAL dan tangki septic yang dipelihara dan berfungsi baik	7 Jenis	**12,660,181,721**	**13,993,931,796**	
1.03.05.2.01 .0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5900 Unit	10,974,412,724	12,280,505,457	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05.2.01 .0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1,685,768,997	1,713,426,339	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				**2,308,422,447,898**	**1,807,580,609,256**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya sistem drainase perkotaan yang terintegrasi dan efektif		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang telah dilakukan Kegiatan Monitoring	100%	**2,308,422,447,898**	**1,807,580,609,256**	
			Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional	87,5 %			
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**2,308,422,447,898**	**1,807,580,609,256**	
	Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan dan perkotaan		Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan lingkungan	250 lokasi	**1,907,604,831,867**	**1,580,290,726,728**	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7500 M	348,298,355,325	258,840,934,064	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						
	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	22 Sistem Drainase Perkotaan	1,559,306,476,542	1,321,449,792,664	Dinas Sumber Daya Air

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dan Bina Marga					dan Bina Marga
	Tersedianya perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan sistem drainase		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	**19,613,450,277**	**19,614,888,773**	
1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						
	Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	12 Sistem Drainase Perkotaan	17,457,281,720	17,457,969,608	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	2,156,168,557	2,156,919,165	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Meningkatnya fungsi optimal saluran sistem drainase		Jumlah lokasi normalisasi sistem drainase perkotaan dan lingkungan	1200 lokasi	**381,204,165,754**	**207,674,993,755**	
			Jumlah Dokumen atas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	240 Dokumen			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dengan Sungai yang telah dilakukan pengawasan / pengendalian				
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	240 Dokumen	1,419,907,337	1,421,283,113	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						
	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	12 Sistem Drainase Perkotaan	278,919,769,014	88,405,427,551	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	100,864,489,403	117,848,283,091	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**1,283,389,652,282**	**854,524,680,004**	
	Meningkatnya kemantapan jalan		Tingkat kemantapan jalan	99,24 %	**1,189,526,541,246**	**758,223,092,260**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**1,189,526,541,246**	**758,223,092,260**	
	Meningkatnya Pembangunan jalan, jembatan, dan kelengkapannya		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	**1,189,526,541,246**	**758,223,092,260**	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	325 lokasi			
			Jumlah lokasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan	3 Lokasi			
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	70 Dokumen	8,449,820,348	8,450,508,236	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jalan dan Jembatan yang Disusun				
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	11.7 KM	774,901,656,866	696,917,091,173	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						
	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	11.7 KM	8,788,783,060	8,794,974,052	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar						
	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 KM	397,386,280,972	44,060,518,799	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan		Persentase rekomendasi Penyelenggaraan Jalan yang telah dilakukan pengawasan / pengendalian	9%	**93,863,111,036**	**96,301,587,744**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki	21%			
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**93,863,111,036**	**96,301,587,744**	
	Meningkatnya pemeliharaan rutin jalan, jembatan, dan kelengkapannya		Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1501 lokasi	**93,008,871,024**	**95,445,971,956**	
1.03.10.2.01 .0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	93,008,871,024	95,445,971,956	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Meningkatnya pengawasan teknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang telah diselesaikan	13 Dokumen	**854,240,012**	**855,615,788**	
1.03.10.2.01 .0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						
	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	10 KM	854,240,012	855,615,788	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**155,695,722,590**	**160,435,082,110**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**38,765,080,625**	**42,046,419,115**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96%	**38,765,080,625**	**42,046,419,115**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**41,600,000**	**39,000,000**	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	**41,600,000**	**39,000,000**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	41,600,000	39,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**31,588,187,307**	**31,830,924,353**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**31,588,187,307**	**31,830,924,353**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	31,588,187,307	31,830,924,353	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**5,212,316,222**	**7,651,293,519**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	**5,212,316,222**	**7,651,293,519**	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,212,316,222	7,651,293,519	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,922,977,096**	**2,525,201,243**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	**1,922,977,096**	**2,525,201,243**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	1,922,977,096	2,525,201,243	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**25,011,454,338**	**24,354,324,662**	
	Meningkatnya pemanfaatan rumah susun sewa		Persentase rumah susun yang dimanfaatkan tepat sasaran	100%	**25,011,454,338**	**24,354,324,662**	
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%			
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**				**25,011,454,338**	**24,354,324,662**	
	Meningkatnya pengelolaan rumah susun sederhana sewa		Persentase keterisian rumah susun sederhana sewa	100%	**25,011,454,338**	**24,354,324,662**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						
	Terlaksananya Penatausahaan	Dinas Perumahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah	109 Dokumen	25,011,454,338	24,354,324,662	Dinas Perumahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				**90,512,878,425**	**92,620,256,148**	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase penyediaan rumah layak huni	100%	**90,512,878,425**	**92,620,256,148**	
			Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%			
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**				**90,512,878,425**	**92,620,256,148**	
	Meningkatnya pembangunan dan /atau rehabilitasi permukiman		Jumlah rumah layak huni yang dilakukan pembangunan, perbaikan, dan/atau rehabilitasi	1200 lokasi	**90,512,878,425**	**92,620,256,148**	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1190 Unit Rumah	74,987,889,345	76,035,926,419	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit	15,524,989,080	16,584,329,729	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				**1,406,309,202**	**1,414,082,185**	
	Meningkatnya kualitas PSU perumahan		Persentase PSU yang diserahkan	71,51 %	**1,406,309,202**	**1,414,082,185**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				**1,406,309,202**	**1,414,082,185**	
	Meningkatnya Penyerahan Prasarana, Sarana dan		Jumlah perumahan yang telah dilakukan	12 dokumen	**1,406,309,202**	**1,414,082,185**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Utilitas Umum dari pengembang secara administrasi dan fisik		penyerahan PSU secara fisik				
			Jumlah perumahan yang telah dilakukan penyerahan PSU secara admin	6 dokumen			
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6 Laporan	270,537,877	270,561,397	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12 Lokasi	1,135,771,325	1,143,520,788	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**375,022,904,544**	**380,986,610,375**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**16,472,374,773**	**16,906,235,780**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96,20 %	**16,472,374,773**	**16,906,235,780**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**157,190,757**	**157,204,241**	
	Tersusunnya dokumen perencanaan, pendanaan, dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	**157,190,757**	**157,204,241**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	157,190,757	157,204,241	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**12,129,700,336**	**12,222,684,598**	
	Terpenuhinya pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara tepat waktu		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**12,129,700,336**	**12,222,684,598**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	12,129,700,336	12,222,684,598	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**2,351,338,328**	**2,579,579,617**	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kondisi baik		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**2,351,338,328**	**2,579,579,617**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	2,351,338,328	2,579,579,617	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,834,145,352**	**1,946,767,324**	
	Tersedianya jasa penunjang umum yang mendukung operasional kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**1,834,145,352**	**1,946,767,324**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penanggula	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1,834,145,352	1,946,767,324	Badan Penanggula

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	ngan Bencana Daerah		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				ngan Bencana Daerah
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**26,253,624,986**	**26,673,905,726**	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana bagi Korban Bencana	100%	**2,522,834,400**	**2,528,682,036**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**2,522,834,400**	**2,528,682,036**	
	Meningkatnya pemenuhan bantuan logistik bagi korban bencana		Jumlah kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan korban bencana	100 kegiatan	**2,522,834,400**	**2,528,682,036**	
1.05.03.2.03 .0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	2,522,834,400	2,528,682,036	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana dengan waktu respon ≤ 7 menit	100%	**20,630,065,132**	**21,026,000,941**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**20,630,065,132**	**21,026,000,941**	
	Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase kejadian bencana dan kedaruratan yang ditangani dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	**20,630,065,132**	**21,026,000,941**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	17500 Orang	20,630,065,132	21,026,000,941	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Kapasitas Kawasan dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	100%	**2,770,725,454**	**2,789,222,749**	
			Persentase kawasan siap siaga bencana	100%			
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**2,086,355,633**	**2,096,598,272**	
	Meningkatnya penyebaran informasi rawan bencana		Persentase warga negara yang	100%	**874,421,122**	**969,037,080**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			memperoleh layanan informasi rawan bencana				
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						
	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	625,366,482	625,419,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	249,054,640	343,617,280	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Terlaksananya layanan pencegahan dan		Persentase warga negara dan aparatur	0,115 %	**915,643,440**	**919,814,880**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kesiapsiagaan terhadap bencana		yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1750 Kawasan	915,643,440	919,814,880	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya tata kelola mitigasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan sesuai kebutuhan	42,86 %	**296,291,071**	**207,746,312**	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						
	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	125,991,071	207,746,312	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	170,300,000	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**684,369,821**	**692,624,477**	
	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase kegiatan pembinaan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	**684,369,821**	**692,624,477**	
1.05.03.2.04 .0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	684,369,821	692,624,477	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam Upaya Mitigasi Bencana		Persentase aparatur yang meningkat kompetensinya dalam mitigasi dan penanganan bencana	100%	**330,000,000**	**330,000,000**	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**330,000,000**	**330,000,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Optimalnya pembinaan dan pengawasan petugas dalam penanggulangan bencana		Persentase petugas kebencanaan yang memiliki kompetensi dasar	100%	**330,000,000**	**330,000,000**	
1.05.03.2.04 .0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	349 Orang	180,000,000	179,691,955	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04 .0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi	90 Orang	150,000,000	150,308,045	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)						
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**98,487,970,034**	**99,313,963,425**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	97,7 %	**98,487,970,034**	**99,313,963,425**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**52,000,000**	**52,000,000**	
	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	**52,000,000**	**52,000,000**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	52,000,000	52,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**94,497,875,256**	**95,278,026,518**	
	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**94,497,875,256**	**95,278,026,518**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	726 Orang/bulan	94,497,875,256	95,278,026,518	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**859,864,848**	**860,353,280**	
	Tersedianya laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	**859,864,848**	**860,353,280**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	859,864,848	860,353,280	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,078,229,930**	**3,123,583,627**	
	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket	**3,078,229,930**	**3,123,583,627**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,078,229,930	3,123,583,627	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**52,224,003,559**	**53,583,513,889**	
	Meningkatnya kualitas penanggulangan dan penyelamatan kebakaran		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap kurang dari 15 menit	100%	**49,981,059,097**	**51,333,233,299**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**49,981,059,097**	**51,333,233,299**	
	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan		Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	90%	**49,981,059,097**	**51,333,233,299**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	3,584,669,031	3,614,625,215	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	8,662,796,997	8,687,665,784	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						
	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk	Dinas Pemadam	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk	1 Dokumen	104,000,000	104,000,000	Dinas Pemadam

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Kebakaran dan Penyelamatan	Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	825 Unit	37,629,593,069	38,926,942,300	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejadian kebakaran		Persentase kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran	70%	**581,873,800**	**583,478,200**	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**				**581,873,800**	**583,478,200**	
	Terlaksananya simulasi pencegahan kebakaran dan penyelamatan		Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui	105 kegiatan	**581,873,800**	**583,478,200**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			sosialisasi dan simulasi				
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1050 Orang	581,873,800	583,478,200	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya kualitas sistem proteksi kebakaran pada bangunan		Persentase gedung dengan hasil laik fungsi	30%	**708,976,091**	**711,039,755**	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**				**708,976,091**	**711,039,755**	
	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran bangunan		Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran bangunan	2 Jenis	**708,976,091**	**711,039,755**	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan	Dinas Pemadam Kebakaran dan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan	510 Dokumen	708,976,091	711,039,755	Dinas Pemadam Kebakaran dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penyelamatan	Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				Penyelamatan
	Meningkatnya kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan		Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompetensinya meningkat	86.50%	**952,094,571**	**955,762,635**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**952,094,571**	**955,762,635**	
	Meningkatnya pelatihan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan		Persentase petugas pemadam kebakaran yang berpredikat baik dalam pelatihan sertifikasi	100%	**952,094,571**	**955,762,635**	
1.05.04.2.01 .0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						
	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	952,094,571	955,762,635	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**132,820,542,706**	**135,199,822,933**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%	**132,820,542,706**	**135,199,822,933**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**39,976,976**	**40,041,152**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja	100%	**39,976,976**	**40,041,152**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	39,976,976	40,041,152	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**97,414,740,056**	**98,234,545,641**	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**97,414,740,056**	**98,234,545,641**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	838 Orang/bulan	97,414,740,056	98,234,545,641	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**32,728,273,255**	**34,235,127,102**	
	meningkatnya pelayanan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**32,728,273,255**	**34,235,127,102**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	32,728,273,255	34,235,127,102	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,637,552,419**	**2,690,109,038**	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	**2,637,552,419**	**2,690,109,038**	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,637,552,419	2,690,109,038	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**48,764,388,486**	**49,309,168,622**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Menurunnya pelanggaran Perda		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	**6,197,662,121**	**6,497,894,606**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**				**6,197,662,121**	**6,497,894,606**	
	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada		Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	96 Objek	**6,197,662,121**	**6,497,894,606**	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4975 Objek			
1.05.02.2.02 .0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	1,042,294,361	1,148,778,974	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02 .0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Satuan Polisi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas	12 Laporan	4,076,127,580	4,269,664,863	Satuan Polisi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Pamong Praja	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				Pamong Praja
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
	TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	1,079,240,180	1,079,450,769	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kapasitas SDM penegak peraturan		Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	**136,953,952**	**137,082,304**	
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**				**136,953,952**	**137,082,304**	
	Meningkatnya pembinaan SDM penegak peraturan		Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	4 Kegiatan	**136,953,952**	**137,082,304**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas	Satuan Polisi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan	4 Laporan	136,953,952	137,082,304	Satuan Polisi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pejabat PPNS Penegak Perda	Pamong Praja	Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				Pamong Praja
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	**41,963,662,175**	**42,205,596,580**	
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%			
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%			
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**41,963,662,175**	**42,205,596,580**	
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1400 Orang	**41,963,662,175**	**42,205,596,580**	
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	104 Titik/Lokasi			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Jumlah pelaksanaan pembinaan SDM Satuan Polisi Pamong Praja	12 Kegiatan			
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						
	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	147,558,556	147,674,073	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	37,159,231,696	37,221,010,520	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan						
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						
	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	3,311,871,000	3,490,721,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	270,631,147	271,246,194	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01 .0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	820 Orang	1,074,369,776	1,074,944,793	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas		Persentase Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	**466,110,238**	**468,595,132**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**466,110,238**	**468,595,132**	
	Meningkatnya pembinaan SDM Satlinmas		Jumlah pelaksanaan pembinaan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	12 Kegiatan	**466,110,238**	**468,595,132**	
1.05.02.2.01 .0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	366,784,959	368,091,582	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	459 Orang	99,325,279	100,503,550	Satuan Polisi Pamong Praja
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**105,852,106,889**	**107,149,696,952**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**20,815,015,974**	**20,968,375,982**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang sosial		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,81 %	**20,815,015,974**	**20,968,375,982**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**7,544,742**	**7,698,764**	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Sosial	100%	**7,544,742**	**7,698,764**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perangkat Daerah pada Dinas Sosial						
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7,544,742	7,698,764	Dinas Sosial
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**18,384,860,653**	**18,524,687,683**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,384,860,653**	**18,524,687,683**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	18,384,860,653	18,524,687,683	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,003,237,180**	**1,004,783,056**	
	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Administrasi Umum Dinas Sosial		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	**1,003,237,180**	**1,004,783,056**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,003,237,180	1,004,783,056	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,419,373,399**	**1,431,206,479**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kantor Dinas Sosial		Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	**1,419,373,399**	**1,431,206,479**	
1.06.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,419,373,399	1,431,206,479	Dinas Sosial
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**6,951,239,189**	**6,955,834,438**	
	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%	**6,951,239,189**	**6,955,834,438**	
			Persentase Lembaga Kepahlawanan yang aktif	100%			
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**6,951,239,189**	**6,955,834,438**	
	Meningkatnya pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		Jumlah PSKS yang memenuhi standar kompetensi	299 Orang	**6,951,239,189**	**6,955,834,438**	
			Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber	52 Lembaga			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi				
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Lembaga	766,480,902	768,874,509	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	486 Orang	6,184,758,287	6,186,959,929	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**45,248,569,953**	**46,274,412,398**	
	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	**45,248,569,953**	**46,274,412,398**	
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%			
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%			
			Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%			
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%			
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**38,055,728,395**	**38,871,400,489**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Kampung Anak Negeri		Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	100%	**13,614,768,893**	**13,893,620,674**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	376 Orang	13,614,768,893	13,893,620,674	Dinas Sosial
	Meningkatnya reunifikasi keluarga bagi PPKS		Persentase PPKS yang berhasil di reunifikasi	100%	**160,926,254**	**160,926,254**	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	160,926,254	160,926,254	Dinas Sosial
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Liponsos Keputih		Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Liponsos Keputih	100%	**15,352,629,423**	**15,712,583,524**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1595 Orang	15,352,629,423	15,712,583,524	Dinas Sosial
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat		Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat	100%	**8,927,403,825**	**9,104,270,037**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	255 Orang	8,927,403,825	9,104,270,037	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**7,192,841,558**	**7,403,011,909**	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS melalui layanan kedaruratan, alat bantu, dan asistensi rehabilitasi sosial		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial	6452 Orang	**7,192,841,558**	**7,403,011,909**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	3,783,948,183	3,784,208,760	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu						
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	873,411,105	964,654,053	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)						
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	1335 Orang	2,535,482,270	2,654,149,096	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**30,280,662,491**	**30,340,181,887**	
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	**30,280,662,491**	**30,340,181,887**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**30,280,662,491**	**30,340,181,887**	
	Tersedianya data Keluarga Miskin yang mutakhir dan akurat		Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100%	**30,280,662,491**	**30,340,181,887**	
			Pesentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	79%			
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	69260 Orang	5,573,755,281	5,596,835,130	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan	680 Orang	3,792,301,016	3,814,830,427	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25574 Orang	20,914,606,194	20,928,516,330	Dinas Sosial
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**55,105,320**	**55,105,320**	
	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	**55,105,320**	**55,105,320**	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**				**55,105,320**	**55,105,320**	
	Meningkatnya peran serta pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial dalam penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana		Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan	100%	**55,105,320**	**55,105,320**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pasca bencana sesuai standar				
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Orang	55,105,320	55,105,320	Dinas Sosial
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**2,501,513,962**	**2,555,786,927**	
	Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola Dalam Kondisi Baik	100%	**2,501,513,962**	**2,555,786,927**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**				**2,501,513,962**	**2,555,786,927**	
	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional di Kota Surabaya		Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	**2,501,513,962**	**2,555,786,927**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam	7 Makam	2,501,513,962	2,555,786,927	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Nasional Kabupaten/Kota		Pahlawan Kabupaten/Kota				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,973,456,114,111**	**1,809,100,520,054**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**33,578,609,537**	**34,552,874,076**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**17,530,719,617**	**17,594,022,959**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang tenaga kerja		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.50%	**17,530,719,617**	**17,594,022,959**	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**96,200,000**	**18,200,000**	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		Presentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100%	**96,200,000**	**18,200,000**	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	96,200,000	18,200,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**15,749,741,311**	**15,871,202,159**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15,749,741,311**	**15,871,202,159**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15,749,741,311	15,871,202,159	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,684,778,306**	**1,704,620,800**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa	100%	**1,684,778,306**	**1,704,620,800**	
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140,638,097	140,638,097	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,544,140,209	1,563,982,703	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**7,752,970,415**	**8,060,433,639**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kesesuaian pelatihan dan sertifikasi dengan kebutuhan pasar kerja		Persentase peserta pelatihan dan sertifikasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	41,5 %	**5,594,045,960**	**5,850,894,424**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**				**5,594,045,960**	**5,850,894,424**	
	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan		Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	650 Orang	**5,594,045,960**	**5,850,894,424**	
2.07.03.2.01 .0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	5,594,045,960	5,850,894,424	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya produktivitas kerja		Tingkat produktivitas tenaga kerja	32,96 %	**2,158,924,455**	**2,209,539,215**	
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**2,158,924,455**	**2,209,539,215**	
	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi		Jumlah peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi	760 Orang	**2,158,924,455**	**2,209,539,215**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						
	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	2,158,924,455	2,209,539,215	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				**1,771,061,773**	**1,856,681,956**	
	Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor formal		Persentase pencari kerja terserap ke sektor formal	40,00 %	**1,147,735,597**	**1,207,894,181**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**				**551,793,683**	**611,095,563**	
	Meningkatnya pelayanan antar kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelayanan antar kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan	3275 orang	**551,793,683**	**611,095,563**	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						
	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2075 Orang	53,834,400	97,536,280	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						
	Terlaksananya Penyuluhan dan	Dinas Perindustria	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	1200 Orang	497,959,283	513,559,283	Dinas Perindustria

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	n dan Tenaga Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				n dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**				**226,104,800**	**226,104,800**	
	Meningkatnya akses pekerjaan melalui Bursa Kerja		Jumlah perusahaan yang mengikuti dan menyerap tenaga kerja pada Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	50 Perusahaan	**226,104,800**	**226,104,800**	
2.07.04.2.03 .0003	Job Fair/Bursa Kerja						
	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	226,104,800	226,104,800	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**				**369,837,114**	**370,693,818**	
	Meningkatnya kompetensi CPMI/PMI		Persentase CPMI/PMI yang meningkat kompetensinya	100%	**369,837,114**	**370,693,818**	
2.07.04.2.04 .0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	369,837,114	370,693,818	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
	Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor informal		Persentase tenaga kerja terserap ke sektor informal	10,00 %	**623,326,176**	**648,787,775**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**				**623,326,176**	**648,787,775**	
	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan melalui padat karya		Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan siap kerja	250 orang	**623,326,176**	**648,787,775**	
2.07.04.2.01 .0005	Perluasan Kesempatan Kerja						
	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	623,326,176	648,787,775	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**6,523,857,732**	**7,041,735,522**	
	Meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	16,06 %	**6,523,857,732**	**7,041,735,522**	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	60,78 %			
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya**				**743,415,616**	**744,189,406**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	419.413 orang	**33,600,000**	**33,600,000**	
2.07.05.2.01 .0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	230 Perusahaan	33,600,000	33,600,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan		Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	57%	**709,815,616**	**710,589,406**	
2.07.05.2.01 .0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB,	Dinas Perindustrian dan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS	12 Laporan	709,815,616	710,589,406	Dinas Perindustrian dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Tenaga Kerja	Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				Tenaga Kerja
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**5,780,442,116**	**6,297,546,116**	
	Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan		Persentase menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	2,13 %	**5,780,442,116**	**6,297,546,116**	
2.07.05.2.02 .0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	282,707,189	282,707,189	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02 .0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	326,694,927	326,694,927	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25650 Orang	5,171,040,000	5,688,144,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**28,238,833,230**	**28,695,598,564**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**17,109,844,976**	**17,363,669,594**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang		Tingkat kepuasan pegawai terhadap	98.26%	**17,109,844,976**	**17,363,669,594**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		pelayanan kesekretariatan				
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**11,080,000**	**11,137,805**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	**11,080,000**	**11,137,805**	
2.08.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	11,080,000	11,137,805	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14,482,012,020**	**14,591,879,927**	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,482,012,020**	**14,591,879,927**	
2.08.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	14,482,012,020	14,591,879,927	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**2,136,935,191**	**2,280,398,494**	
	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**2,136,935,191**	**2,280,398,494**	
2.08.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2,136,935,191	2,280,398,494	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**479,817,765**	**480,253,368**	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	**479,817,765**	**480,253,368**	
2.08.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	479,817,765	480,253,368	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Keluarga Berencana					dan Keluarga Berencana
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**3,101,740,427**	**3,152,008,452**	
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan peran pemberdayaan perempuan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100%	**3,101,740,427**	**3,152,008,452**	
			Persentase organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan gender	100%			
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**700,506,414**	**709,094,117**	
	Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah		Persentase lembaga yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	100%	**700,506,414**	**709,094,117**	
2.08.02.2.01 .0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						
	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	58 Lembaga	700,506,414	709,094,117	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**548,692,273**	**550,617,553**	
	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	58 Lembaga	**548,692,273**	**550,617,553**	
2.08.02.2.02 .0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial,	610 Orang	548,692,273	550,617,553	Dinas Pemberdayaan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**1,852,541,740**	**1,892,296,782**	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kegiatan	**1,852,541,740**	**1,892,296,782**	
2.08.02.2.03 .0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota						
	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan	Dinas Pemberday	jumlah dokumen hasil monitoring dan	12 laporan	1,852,541,740	1,892,296,782	Dinas Pemberday

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	aan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				aan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**1,676,930,662**	**1,685,075,516**	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu ≤ 12 jam	100%	**1,676,930,662**	**1,685,075,516**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**36,212,400**	**36,399,690**	
	Terlaksananya Advokasi dan pencegahan KtP dan TPPO		Jumlah Kegiatan Advokasi dan pencegahan KtP dan TPPO	1 Kegiatan	**36,212,400**	**36,399,690**	
2.08.03.2.01 .0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	184 Lembaga	36,212,400	36,399,690	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**1,274,737,650**	**1,281,609,356**	
	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 Kasus	**1,274,737,650**	**1,281,609,356**	
2.08.03.2.02 .0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						
	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah	6 Orang	375,312,775	377,730,174	Dinas Pemberdayaan Perempuan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	807,314,675	811,525,266	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	92,110,200	92,353,916	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**365,980,612**	**367,066,470**	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		Presentase lembaga yang responsif terhadap perlindungan perempuan	100%	**365,980,612**	**367,066,470**	
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi	Dinas Pemberday	Jumlah Lembaga penyedia Layanan	184 Lembaga	331,596,046	332,681,904	Dinas Pemberday

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	aan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				aan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	50 orang	34,384,566	34,384,566	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				**1,154,750,739**	**1,277,616,404**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Persentase keluarga yang memiliki akses dan mendapat layanan konseling/konsultasi Puspaga	100%	**1,154,750,739**	**1,277,616,404**	
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1,154,750,739**	**1,277,616,404**	
	Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak		Jumlah Puspaga yang aktif	2 Lokasi	**1,154,750,739**	**1,277,616,404**	
2.08.04.2.03 .0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota						
	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	120 Orang	1,154,750,739	1,277,616,404	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**248,611,597**	**249,826,597**	
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan program atau kegiatan	100%	**248,611,597**	**249,826,597**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**248,611,597**	**249,826,597**	
	Tersedianya Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data		Jumlah perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	58 Lembaga	**248,611,597**	**249,826,597**	
2.08.05.2.01 .0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	248,611,597	249,826,597	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Keluarga Berencana
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**2,207,812,590**	**2,211,484,893**	
	Meningkatnya peran kelurahan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak		Persentase Kelurahan Layak Anak	100%	**2,207,812,590**	**2,211,484,893**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**2,207,812,590**	**2,211,484,893**	
	Terlaksananya Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	4 Kegiatan	**2,207,812,590**	**2,211,484,893**	
2.08.06.2.01 .0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak	153 Lembaga	2,207,812,590	2,211,484,893	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendali

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Keluarga Berencana	Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				an Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**2,739,142,239**	**2,755,917,108**	
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu ≤ 12 jam	100%	**2,739,142,239**	**2,755,917,108**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**65,287,600**	**65,752,358**	
	Meningkatnya peran lembaga dalam advokasi pencegahan KtA		Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kabupaten/Kota	184 lembaga	**65,287,600**	**65,752,358**	
2.08.07.2.01 .0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi	Dinas Pemberday	Jumlah pengambil kebijakan dan	2 Kegiatan	65,287,600	65,752,358	Dinas Pemberday

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	aan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				aan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**2,639,219,205**	**2,655,529,316**	
	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 Kasus	**2,639,219,205**	**2,655,529,316**	
2.08.07.2.02 .0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	150 Orang	1,082,204,679	1,084,316,864	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						
	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	33 Orang	1,337,599,226	1,350,594,216	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban	150 Orang	219,415,300	220,618,236	Dinas Pemberdayaan Perempuan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tingkat Kabupaten/Kota				dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**34,635,434**	**34,635,434**	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Presentase lembaga yang responsif terhadap perlindungan anak	100%	**34,635,434**	**34,635,434**	
2.08.07.2.03 .0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai						
	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalia	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	34,635,434	34,635,434	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		n Penduduk dan Keluarga Berencana					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**26,574,284,299**	**26,776,256,892**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**24,871,566,551**	**25,059,738,516**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pangan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,60 %	**24,871,566,551**	**25,059,738,516**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**62,400,000**	**62,400,000**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100%	**62,400,000**	**62,400,000**	
2.09.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	62,400,000	62,400,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**21,440,327,898**	**21,606,473,401**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,440,327,898**	**21,606,473,401**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	21,440,327,898	21,606,473,401	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,368,838,653**	**3,390,865,115**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**3,368,838,653**	**3,390,865,115**	
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601,314,621	601,779,561	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,767,524,032	2,789,085,554	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**678,042,470**	**687,401,109**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	95,35 Nilai	**678,042,470**	**687,401,109**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**678,042,470**	**687,401,109**	
	Meningkatnya Cakupan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Cakupan wilayah yang mendapatkan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	31 Kecamatan	**678,042,470**	**687,401,109**	
2.09.03.2.04 .0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	678,042,470	687,401,109	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				**479,938,455**	**480,511,695**	
	Meningkatnya ketahanan daerah dari kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0%	**479,938,455**	**480,511,695**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**479,938,455**	**480,511,695**	
	Meningkatnya efektivitas upaya penanganan dan		Jenis Penanganan Kerawanan Pangan	4 Jenis	**479,938,455**	**480,511,695**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pencegahan kerawanan pangan		dan Gizi Kabupaten/Kota				
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	15 Laporan	479,938,455	480,511,695	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				**544,736,823**	**548,605,572**	
	Meningkatnya mutu dan keamanan bahan pangan segar		Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	97,91 %	**544,736,823**	**548,605,572**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**				**544,736,823**	**548,605,572**	
	Meningkatnya upaya pengawasan keamanan pangan segar		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12 Kali	**544,736,823**	**548,605,572**	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						
	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan	36 Dokumen	544,736,823	548,605,572	Dinas Ketahanan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pangan dan Pertanian	Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Pangan dan Pertanian
2.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**60,501,400,000**	**83,276,690,079**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**				**60,251,069,854**	**83,026,308,592**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum		Presentase Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	**60,251,069,854**	**83,026,308,592**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**60,251,069,854**	**83,026,308,592**	
	Tersedianya luas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum		Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 lokasi	**60,251,069,854**	**83,026,308,592**	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,251,069,854	83,026,308,592	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**				**250,330,146**	**250,381,487**	
	Optimalnya fasilitasi penataan akses pada obyek reforma agraria pada kewenangan Kota		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penataan Aset dan Akses Reforma	100%	**250,330,146**	**250,381,487**	
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**250,330,146**	**250,381,487**	
	Terlaksananya redistribusi tanah untuk kepentingan umum		Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	1 Bidang Tanah	**250,330,146**	**250,381,487**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						
	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1 Berita Acara	250,330,146	250,381,487	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**584,881,583,705**	**562,853,192,542**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**63,294,497,645**	**63,791,027,055**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang lingkungan hidup		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%	**63,294,497,645**	**63,791,027,055**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**41,600,000**	**41,600,000**	
	Meningkatnya efektifitas penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup	100%	**41,600,000**	**41,600,000**	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	41,600,000	41,600,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**49,158,822,238**	**49,540,532,375**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**49,158,822,238**	**49,540,532,375**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	181 Orang/bulan	49,158,822,238	49,540,532,375	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**13,551,028,594**	**13,649,803,795**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**13,551,028,594**	**13,649,803,795**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13,551,028,594	13,649,803,795	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**543,046,813**	**559,090,885**	
	Meningkatnya pengelolaan sarana perkantoran		Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	**543,046,813**	**559,090,885**	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	543,046,813	559,090,885	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**6,378,018,295**	**6,451,920,641**	
	Meningkatnya kualitas mutu air dan udara		Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	40.61%	**6,378,018,295**	**6,451,920,641**	
			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	88%			
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				**6,378,018,295**	**6,451,920,641**	
	Meningkatnya pencegahan pencemaran air dan udara		Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	**6,378,018,295**	**6,451,920,641**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1,553,703,405	1,625,413,405	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Dinas Lingkungan Hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi	3,793,231,063	3,808,423,409	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						
	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	3 Dokumen	517,720,627	504,720,627	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	513,363,200	513,363,200	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**120,345,026,715**	**123,260,805,620**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH perkotaan		Persentase RTH publik perkotaan yang dirawat dan dipelihara	100%	**120,345,026,715**	**123,260,805,620**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**				**120,345,026,715**	**123,260,805,620**	
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati		Luas taman, makam dan jalur hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	413,16 Ha	**120,345,026,715**	**123,260,805,620**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.9 Ha	89,652,292,858	91,899,122,991	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						
	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	9,374,875,666	9,607,464,051	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						
	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Unit	21,317,858,191	21,754,218,578	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**				**2,247,245,927**	**2,392,974,186**	
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase ketepatan waktu rincian teknis/standard teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang telah dinilai	80%	**2,247,245,927**	**2,392,974,186**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**				**227,912,926**	**250,012,926**	
	Meningkatnya rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3		Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diproses	275 berkas	**227,912,926**	**250,012,926**	
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Elektronik (Online Single Submission)						
	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	350 Dokumen	227,912,926	250,012,926	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**2,019,333,001**	**2,142,961,260**	
	Meningkatnya kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan		Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	**2,019,333,001**	**2,142,961,260**	
2.11.05.2.02 .0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan,	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan	1 Dokumen	2,019,333,001	2,142,961,260	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**1,690,555,960**	**1,866,285,857**	
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Persentase ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	60%	**1,690,555,960**	**1,866,285,857**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**1,690,555,960**	**1,866,285,857**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan		Persentase ketepatan waktu penerbitan Persetujuan Lingkungan, Pertek Bidang PPLH, SLO, PB Sektor Lingkungan	80%	**1,690,555,960**	**1,866,285,857**	
			Jumlah obyek usaha dan/atau kegiatan usaha yang dibina dan diawasi ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan	705 Usaha dan/atau Kegiatan			
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						
	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	350 Dokumen	885,542,284	972,717,030	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	475 Badan Usaha	805,013,676	893,568,827	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**5,317,103,714**	**5,404,571,214**	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Kapasitas Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	48,00 %	**5,317,103,714**	**5,404,571,214**	
			Persentase peningkatan peran aktif kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	73,27 %			
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**5,317,103,714**	**5,404,571,214**	
	Terwujudnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan		Jumlah kegiatan edukasi dan	12 Kali	**5,317,103,714**	**5,404,571,214**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan				
			Jumlah kampung Zero Waste	720 RW			
2.11.08.2.01 .0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4,605,640,884	4,687,607,296	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01 .0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						
	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1725 Orang	711,462,830	716,963,918	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				**546,114,728**	**606,208,078**	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	100%	**546,114,728**	**606,208,078**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**				**546,114,728**	**606,208,078**	
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	**546,114,728**	**606,208,078**	
2.11.10.2.01 .0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	47 Pengaduan	546,114,728	606,208,078	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**385,063,020,721**	**359,079,399,891**	
	Meningkatnya tata kelola persampahan		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	95%	**194,068,409,943**	**164,422,657,012**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**				**194,068,409,943**	**164,422,657,012**	
	Meningkatnya Pemanfaatan Sampah, Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	**194,068,409,943**	**164,422,657,012**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persampahan, dan Penanganan Sampah		Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis			
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	231 Unit	45,450,424,703	15,532,495,182	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan	14600 Ton	95,485,824	96,183,136	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
2.11.11.2.01 .0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	568047 Ton	148,522,499,416	148,793,978,694	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya proporsi sampah rumah tangga yang dikelola		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	100%	**190,994,610,778**	**194,656,742,879**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**				**190,994,610,778**	**194,656,742,879**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pengumpulan dan pengangkutan sampah		Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis	**190,994,610,778**	**194,656,742,879**	
			Persentase ketepatan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA < 24 jam	100%			
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						
	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	568047 Ton	190,207,474,778	193,869,606,879	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						
	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	85 Persentase	787,136,000	787,136,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**59,680,665,670**	**60,465,447,702**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**50,660,344,742**	**51,049,488,517**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,25 %	**50,660,344,742**	**51,049,488,517**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**15,600,000**	**15,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	100%	**15,600,000**	**15,600,000**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15,600,000	15,600,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**41,299,132,422**	**41,624,375,210**	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**41,299,132,422**	**41,624,375,210**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/bulan	41,299,132,422	41,624,375,210	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,332,477,477**	**6,369,220,681**	
	Meningkatnya ketepatan waktu ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	**6,332,477,477**	**6,369,220,681**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas				
2.12.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,332,477,477	6,369,220,681	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,013,134,843**	**3,040,292,626**	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**3,013,134,843**	**3,040,292,626**	
2.12.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,013,134,843	3,040,292,626	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**4,213,248,156**	**4,361,020,787**	
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	95%	**4,213,248,156**	**4,361,020,787**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**3,712,693,022**	**3,837,396,128**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk	12 Laporan	**3,712,693,022**	**3,837,396,128**	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	404543 Dokumen	2,234,818,976	2,299,205,970	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	85969 Dokumen	1,477,874,046	1,538,190,158	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				**500,555,134**	**523,624,659**	
	Terselenggaranya pendaftaran penduduk		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	**500,555,134**	**523,624,659**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	40 Laporan	178,992,205	215,281,413	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						
	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	60,078,250	65,721,898	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk						
	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	10 Dokumen	261,484,679	242,621,348	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**2,626,754,512**	**3,016,979,521**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase dokumen pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	95%	**2,626,754,512**	**3,016,979,521**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**				**2,070,388,923**	**2,307,833,371**	
	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	**2,070,388,923**	**2,307,833,371**	
2.12.03.2.01 .0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	70748 Dokumen	2,070,388,923	2,307,833,371	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**				**556,365,589**	**709,146,150**	
	Terselenggaranya pencatatan sipil		Jumlah Laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	12 Laporan	**556,365,589**	**709,146,150**	
2.12.03.2.02 .0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						
	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	3050 Laporan	556,365,589	709,146,150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**2,061,838,260**	**1,919,461,853**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kemudahan layanan administrasi kependudukan		Rata-rata waktu tanggap gangguan layanan administrasi kependudukan	24 jam	**2,061,838,260**	**1,919,461,853**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**2,061,838,260**	**1,919,461,853**	
	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	**2,061,838,260**	**1,919,461,853**	
2.12.04.2.03 .0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	1,430,401,526	1,280,060,681	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03 .0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan						
	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	631,436,734	639,401,172	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**118,480,000**	**118,497,024**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	**118,480,000**	**118,497,024**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**				**118,480,000**	**118,497,024**	
	Tersusunnya informasi profil kependudukan		Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	**118,480,000**	**118,497,024**	
2.12.05.2.01 .0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						
	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	118,480,000	118,497,024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**28,505,169,813**	**29,214,822,162**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**609,139,500**	**609,882,008**	
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	1,68 %	**609,139,500**	**609,882,008**	
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19	5,80 kelahiran			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	hidup per 1000 perempuan			
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				**234,964,500**	**235,675,807**	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi		Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi	6 Kegiatan	**234,964,500**	**235,675,807**	
2.14.02.2.01 .0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,000,000	110,394,130	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal						
	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	57 Satuan Pendidikan	124,964,500	125,281,677	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**374,175,000**	**374,206,201**	
	Terlaksananya koordinasi pemetaan data perkiraan dalam rangka pengendalian penduduk		Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	66 organisasi	**374,175,000**	**374,206,201**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						
	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	212,700,000	212,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Lapangan dan Pelayanan KB						
	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	101,475,000	101,506,201	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**8,038,204,731**	**8,335,165,263**	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB)	14,50 %	**8,038,204,731**	**8,335,165,263**	
			Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	20,0 %			
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**815,000,000**	**815,000,000**	
	Terlaksananya kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan mini lokakarya	31 Kecamatan	**815,000,000**	**815,000,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	465,000,000	465,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						
	Terlaksananya Promosi dan KIE Program	Dinas Pemberday	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	Dinas Pemberday

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	aan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				aan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						
	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi	250,000,000	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**813,184,841**	**854,747,984**	
	Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	10 Kali	**813,184,841**	**854,747,984**	
2.14.03.2.02 .0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2214 Orang	428,400,000	428,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02 .0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						
	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	384,784,841	426,347,984	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				**5,726,724,834**	**5,976,923,967**	
	Terkendalinya pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	84,02 %	**5,726,724,834**	**5,976,923,967**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	543,519,834	793,718,967	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalia	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	5,169,705,000	5,169,705,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		n Penduduk dan Keluarga Berencana					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	13,500,000	13,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				**683,295,056**	**688,493,312**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Kampung KB dengan kategori berkelanjutan	70%	**683,295,056**	**688,493,312**	
2.14.03.2.04 .0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah DASHAT di Kampung KB	3 Unit	318,495,056	323,693,312	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04 .0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas						
	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	153 Kampung	364,800,000	364,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**19,857,825,582**	**20,269,774,891**	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22,45 tahun	**19,857,825,582**	**20,269,774,891**	
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	100%			
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**5,909,625,582**	**6,321,574,891**	
	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga		Jumlah laporan pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	**5,909,625,582**	**6,321,574,891**	
			Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	20 Kelompok			
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)						
	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	156,164,000	204,524,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						
	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalia	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	1 Laporan	1,550,379,007	1,647,281,204	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n Penduduk dan Keluarga Berencana	Ekonomi Keluarga/UPPKS)				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						
	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	6 Unit	120,000,000	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						
	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	153 Kelompok	4,083,082,575	4,349,769,687	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**13,948,200,000**	**13,948,200,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6642 Orang	**13,948,200,000**	**13,948,200,000**	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						
	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	6,642,000,000	6,642,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						
	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	7,306,200,000	7,306,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**800,962,874,669**	**562,027,453,830**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**100,357,319,261**	**100,855,905,262**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perhubungan		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	**70,583,963,519**	**71,076,838,011**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**52,743,582**	**52,842,243**	
	Terpenuhinya ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan	100%	**52,743,582**	**52,842,243**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dinas Perhubungan Kota Surabaya		evaluasi Dinas Perhubungan				
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	52,743,582	52,842,243	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**58,398,664,297**	**58,857,784,989**	
	Terpenuhinya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan Kota Surabaya		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**58,398,664,297**	**58,857,784,989**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	58,398,664,297	58,857,784,989	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,273,000,000**	**4,273,000,000**	
	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	**4,273,000,000**	**4,273,000,000**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	4,273,000,000	4,273,000,000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7,859,555,640**	**7,893,210,779**	
	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	**7,859,555,640**	**7,893,210,779**	
2.15.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	7,859,555,640	7,893,210,779	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya		Persentase kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir	80%	**15,957,666,807**	**15,963,378,316**	
2.15.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**15,957,666,807**	**15,963,378,316**	
	Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum		Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	**15,957,666,807**	**15,963,378,316**	
2.15.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	15,957,666,807	15,963,378,316	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Tata Kelola Transportasi Umum Kota Surabaya		Persentase kepatuhan pelayanan transportasi umum	62%	**13,815,688,935**	**13,815,688,935**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.15.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**13,815,688,935**	**13,815,688,935**	
	Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum		Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan	**13,815,688,935**	**13,815,688,935**	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	13,815,688,935	13,815,688,935	Dinas Perhubungan
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**694,742,283,111**	**455,276,825,865**	
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100%	**215,613,535,399**	**216,553,454,538**	
			Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	21:21 Rasio			
			Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	53%			
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				**14,743,389,528**	**14,895,598,505**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengelolaan terminal angkutan umum tipe C di Kota Surabaya		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola	14 Lokasi	**14,743,389,528**	**14,895,598,505**	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	14,743,389,528	14,895,598,505	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**199,163,354,650**	**199,950,363,220**	
	Optimalisasi operasional layanan angkutan umum di Kota Surabaya melalui peningkatan kapasitas awak angkutan dan cakupan layanan angkutan umum		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas awak angkutan umum	75 Orang	**199,163,354,650**	**199,950,363,220**	
			Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	16 Koridor			
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan	2 Laporan	1,707,253,267	1,709,798,983	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	183 Unit	197,456,101,383	198,240,564,237	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**1,706,791,221**	**1,707,492,813**	
	Tercapainya penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	**1,706,791,221**	**1,707,492,813**	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1,706,791,221	1,707,492,813	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas lalu lintas		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	**455,144,066,102**	**214,340,374,400**	
			Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,90	90%			
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				**426,042,526,685**	**184,855,130,399**	
	Terselenggaranya perlengkapan jalan di Kota Surabaya		Persentase Jalan Kota yang terpenuhi dan terpasang kelengkapannya	100%	**426,042,526,685**	**184,855,130,399**	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	20000 Unit	261,532,752,577	22,425,758,992	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	10,188,526,589	10,470,678,202	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	120344 Unit	132,692,358,960	130,170,938,784	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	21,628,888,559	21,787,754,421	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**29,101,539,417**	**29,485,244,001**	
	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengawasan serta pengendalian jenis sarana angkutan jalan di Kota Surabaya		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis	**29,101,539,417**	**29,485,244,001**	
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 Lokasi			
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	27,552,660,893	27,933,499,277	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan	1,548,878,524	1,551,744,724	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	94%	**6,632,245,522**	**6,702,834,983**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**6,632,245,522**	**6,702,834,983**	
	Terpenuhinya kendaraan bermotor yang lulus uji KIR		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	120000 Unit	**6,632,245,522**	**6,702,834,983**	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	33 Unit	6,632,245,522	6,702,834,983	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Berkala Kendaraan Bermotor		Bermotor yang Tersedia				
	Meningkatnya Kualitas sistem perparkiran		Persentase peningkatan pengelolaan titik parkir	1%	**17,352,436,088**	**17,680,161,944**	
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**17,352,436,088**	**17,680,161,944**	
	Tersusunnya dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	**17,352,436,088**	**17,680,161,944**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	12 Laporan	17,352,436,088	17,680,161,944	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				**1,111,640,348**	**1,113,058,748**	
	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Perairan		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mengikuti Sosialisasi Keselamatan Transportasi Perairan	100%	**1,111,640,348**	**1,113,058,748**	
2.15.03.2.04	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**				**1,111,640,348**	**1,113,058,748**	
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Keselamatan Perairan di Wilayah Kota Surabaya		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	**1,111,640,348**	**1,113,058,748**	
2.15.03.2.04 .0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,111,640,348	1,113,058,748	Dinas Perhubungan
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**				**4,751,631,949**	**4,781,663,955**	
	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Kereta Api		Persentase Petugas Jaga Lintasan Kereta Api yang melaksanakan Upaya Peningkatan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang	100%	**4,751,631,949**	**4,781,663,955**	
2.15.05.2.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**				**4,751,631,949**	**4,781,663,955**	
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian di Kota Surabaya		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian	2 Kali	**4,751,631,949**	**4,781,663,955**	
2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	4,751,631,949	4,781,663,955	Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**112,521,366,111**	**114,621,101,352**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**19,671,529,579**	**20,412,527,623**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang komunikasi dan informatika		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93,36 %	**19,671,529,579**	**20,412,527,623**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**67,284,880**	**67,605,760**	
	Meningkatnya efektifitas penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	**67,284,880**	**67,605,760**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	67,284,880	67,605,760	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**17,889,693,426**	**18,026,563,985**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektifitas pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,889,693,426**	**18,026,563,985**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	17,889,693,426	18,026,563,985	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,353,757,169**	**1,530,130,862**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**1,353,757,169**	**1,530,130,862**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,353,757,169	1,530,130,862	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**360,794,104**	**788,227,016**	
	Meingkatnya pengelolaan sarana perkantoran		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**360,794,104**	**788,227,016**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	360,794,104	788,227,016	Dinas Komunikasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dan Informatika					dan Informatika
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**15,034,760,641**	**15,788,248,192**	
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	71%	**15,034,760,641**	**15,788,248,192**	
			Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan dan permohonan informasi publik	90,5 %			
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**15,034,760,641**	**15,788,248,192**	
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Jumlah koordinasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	12 Koordinasi	**15,034,760,641**	**15,788,248,192**	
			Jumlah informasi/konten publikasi yang didiseminasikan melalui media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah	90 Materi			
			Persentase Cakupan masyarakat yang	66,96 %			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			terjangkau informasi publik [158] [603]				
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	1,347,352,567	1,831,459,784	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						
	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	49,400,000	49,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik						
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai	30 Permohonan	1,731,567,828	1,802,782,057	Dinas Komunikasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Informatika		peraturan perundangan				dan Informatika
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik						
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	382,800,000	382,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	17 Media	11,523,640,246	11,721,806,351	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**77,815,075,891**	**78,420,325,537**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Level	**4,210,908,807**	**4,838,449,519**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**4,210,908,807**	**4,838,449,519**	
	Meningkatnya tata kelola teknologi digital		Persentase penanganan	100%	**4,210,908,807**	**4,838,449,519**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam				
			Persentase penerapan pemerintah digital	80%			
2.16.03.2.02 .0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi						
	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	1,185,755,430	1,209,890,732	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02 .0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan						
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem	10 Aplikasi	196,706,267	221,406,267	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Laporan	2,470,682,137	2,898,115,049	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah						
	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	12 Dokumen	194,391,637	270,264,135	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kabupaten atau Kota Cerdas						
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Dokumen	163,373,336	238,773,336	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi digital		Rata-rata nilai tingkat kematangan aspek teknologi digital	1,75 Nilai	**73,604,167,084**	**73,581,876,018**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**73,604,167,084**	**73,581,876,018**	
	Meningkatnya pengelolaan pusat data dan jaringan intra		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%	**73,604,167,084**	**73,581,876,018**	
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%			
2.16.03.2.02 .0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra	Dinas Komunikasi	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang	58 Perangkat Daerah	40,701,655,069	45,159,437,215	Dinas Komunikasi

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemerintah Daerah Kab/Kota	dan Informatika	terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				dan Informatika
2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah						
	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	12 Laporan	3,332,325,019	4,259,598,671	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet						
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	58 Perangkat Daerah	29,570,186,996	24,162,840,132	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**37,987,666,556**	**38,081,746,217**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**31,621,631,598**	**31,789,639,574**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,23 %	**31,621,631,598**	**31,789,639,574**	
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**35,100,000**	**128,700,000**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan,		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan	100%	**35,100,000**	**128,700,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah		evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	35,100,000	128,700,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**28,924,458,562**	**29,147,252,280**	
	Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**28,924,458,562**	**29,147,252,280**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	28,924,458,562	29,147,252,280	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,662,073,036**	**2,513,687,294**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**291,483,400**	**291,483,400**	
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	291,483,400	291,483,400	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	Meningkatnya efektivitas pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**2,370,589,636**	**2,222,203,894**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,370,589,636	2,222,203,894	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**940,254,625**	**940,254,625**	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi		Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya	86%	**940,254,625**	**940,254,625**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**940,254,625**	**940,254,625**	
	Meningkatnya koperasi yang patuh tata kelola		Jumlah Koperasi yang mematuhi tata kelola perkoperasian	421 Koperasi	**940,254,625**	**940,254,625**	
2.17.03.2.01 .0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	421 Unit Usaha	940,254,625	940,254,625	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				**414,296,000**	**414,296,000**	
	Meningkatnya koperasi berkinerja baik		Persentase koperasi yang memiliki kinerja baik	78%	**414,296,000**	**414,296,000**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**414,296,000**	**414,296,000**	
	Meningkatnya SDM perkoperasian yang		Persentase SDM yang menerapkan	15%	**414,296,000**	**414,296,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	menerapkan pengetahuan perkoperasian		Pengetahuan Perkoperasian				
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	127 Orang	414,296,000	414,296,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**693,043,959**	**661,080,640**	
	Meningkatnya kemampuan pengembangan usaha koperasi		Persentase koperasi yang dapat mengembangkan usahanya	10%	**693,043,959**	**661,080,640**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**693,043,959**	**661,080,640**	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi		Jumlah penambahan anggota koperasi	306 orang	**693,043,959**	**661,080,640**	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dalam Pengembangan Ekonomi						
	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	142,497,713	143,446,020	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	85 Unit Usaha	550,546,246	517,634,620	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**2,860,188,568**	**2,814,761,811**	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki akses sumber daya produktif	25%	**569,222,999**	**512,135,391**	
			Pertumbuhan Wirausaha	1%			
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui**				**569,222,999**	**512,135,391**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
	Meningkatnya pendampingan dan kemitraan usaha mikro		Jumlah pelaku Usaha Mikro yang memiliki mitra kerjasama usaha	50 Usaha Mikro	**569,222,999**	**512,135,391**	
			Jumlah Usaha Mikro yang memiliki ketrampilan usaha	160 Usaha Mikro			
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	349,438,119	292,029,631	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan						
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160 Orang	219,784,880	220,105,760	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	dan Perdagangan					dan Perdagangan
	Meningkatnya okupansi sentra usaha		Persentase sentra usaha yang meningkat okupansinya	39%	**2,290,965,569**	**2,302,626,420**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				**2,290,965,569**	**2,302,626,420**	
	Meningkatnya giat di sentra usaha		Jumlah Sentra Produktif	18 Sentra Produktif	**2,290,965,569**	**2,302,626,420**	
2.17.07.2.01 .0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	2,290,965,569	2,302,626,420	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**1,458,251,806**	**1,461,713,567**	
	Meningkatnya skala kinerja UMKM		Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya	6,64 %	**1,458,251,806**	**1,461,713,567**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**				**1,458,251,806**	**1,461,713,567**	
	Meningkatnya usaha mikro yang yang bertransformasi dari informal ke formal		Persentase Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	64.92%	**1,458,251,806**	**1,461,713,567**	
2.17.08.2.01 .0002	Pengembangan Usaha Mikro						
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha	1,458,251,806	1,461,713,567	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**22,085,934,979**	**22,414,519,582**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**16,260,680,665**	**16,452,070,743**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94,92 %	**16,260,680,665**	**16,452,070,743**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**15,540,240**	**15,587,280**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	100%	**15,540,240**	**15,587,280**	
2.18.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15,540,240	15,587,280	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**12,879,530,557**	**12,977,955,049**	
	Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**12,879,530,557**	**12,977,955,049**	
2.18.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	12,879,530,557	12,977,955,049	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,365,609,868**	**3,458,528,414**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	**126,716,600**	**132,646,600**	
2.18.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,716,600	132,646,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	**3,238,893,268**	**3,325,881,814**	
2.18.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,238,893,268	3,325,881,814	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**538,024,412**	**541,833,353**	
	Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor		Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	**538,024,412**	**541,833,353**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**				**538,024,412**	**541,833,353**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kesesuaian usaha dengan peta potensi dan peluang usaha		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76,5 %	**538,024,412**	**541,833,353**	
2.18.02.2.02 .0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	538,024,412	541,833,353	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**695,251,821**	**730,783,100**	
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5%	**695,251,821**	**730,783,100**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**695,251,821**	**730,783,100**	
	Intensifikasi Kegiatan Promosi Investasi Daerah		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	315 Calon Investor / Investor	**695,251,821**	**730,783,100**	
2.18.03.2.01 .0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman	3 Dokumen	695,251,821	730,783,100	Dinas Penanaman Modal dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Modal Kabupaten/Kota				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**3,709,883,855**	**3,802,510,160**	
	Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	**3,709,883,855**	**3,802,510,160**	
			Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan	100%			
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**3,709,883,855**	**3,802,510,160**	
	Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan berusaha		Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan	14000 berkas	**748,194,177**	**821,858,062**	
2.18.04.2.01 .0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						
	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan	Dinas Penanaman Modal dan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat	12000 Kegiatan Usaha	748,194,177	821,858,062	Dinas Penanaman Modal dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan non berusaha dan non perizinan		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	97219 berkas	**2,961,689,678**	**2,980,652,098**	
2.18.04.2.01 .0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14000 Pelaku Usaha	2,961,689,678	2,980,652,098	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**753,954,871**	**756,582,871**	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian	100%	**753,954,871**	**756,582,871**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha				
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**753,954,871**	**756,582,871**	
	Meningkatnya kualitas pendampingan terhadap penyampaian LKPM dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	1600 Perusahaan	**753,954,871**	**756,582,871**	
2.18.05.2.01 .0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	138,727,284	138,727,284	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01 .0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	295 Pelaku Usaha	129,431,728	129,459,728	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terpadu Satu Pintu	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01 .0006	Pengawasan Penanaman Modal						
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3060 Kegiatan Usaha	485,795,859	488,395,859	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**128,139,355**	**130,739,355**	
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	**128,139,355**	**130,739,355**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi**				**128,139,355**	**130,739,355**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya pemutakhiran data investasi secara berkala		Jumlah pelaku usaha yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	475 Perusahaan	**128,139,355**	**130,739,355**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	128,139,355	130,739,355	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**85,131,079,226**	**151,636,815,699**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**50,621,419,981**	**52,630,858,101**	
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 (tiga) bulan terakhir	9%	**50,621,419,981**	**52,630,858,101**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%			
			Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 (tiga) bulan terakhir	7%			
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**				**50,621,419,981**	**52,630,858,101**	
	Meningkatnya kualitas pembinaan kepemudaan		Persentase Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh yang tepat sasaran	100%	**50,621,419,981**	**52,630,858,101**	
			Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 Jenis			
			Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	19 Jenis			
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota						
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	707,566,917	753,979,009	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	3500 Orang	47,687,061,179	49,128,357,884	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota						
	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan	405,964,488	503,796,785	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota						
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	859 Orang	1,820,827,397	2,244,724,423	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				**34,509,659,245**	**99,005,957,598**	
	Meningkatnya atlet yang kompetitif		Persentase atlet yang kompetitif	60%	**12,857,933,944**	**53,953,154,004**	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				**12,857,933,944**	**53,953,154,004**	
	Meningkatnya cabang olahraga prestasi yang dibina		Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	59 Cabang Olahraga	**12,857,933,944**	**53,953,154,004**	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaa	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang	2214 Orang	12,857,933,944	53,953,154,004	Dinas Kebudayaan, Kepemudaa

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	n dan Olah Raga serta Pariwisata	Dibina dan Diberikan Pengembangan				n dan Olah Raga serta Pariwisata
	Meningkatnya prasarana olahraga yang termanfaatkan		Persentase prasarana olahraga yang termanfaatkan	75%	**21,651,725,301**	**45,052,803,594**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**4,576,503,663**	**29,527,299,441**	
	Meningkatnya sebaran prasarana olahraga		Jumlah wilayah yang memiliki prasarana olahraga	153 Kelurahan	**4,576,503,663**	**29,527,299,441**	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit	4,576,503,663	29,527,299,441	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				**17,075,221,638**	**15,525,504,153**	
	Meningkatnya kegiatan pemasyarakatan olahraga rekreasi		Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara	12 Kegiatan	**17,075,221,638**	**15,525,504,153**	
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan						
	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	4 Laporan	2,011,812,900	2,102,567,612	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						
	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	404 Unit	15,063,408,738	13,422,936,541	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**714,555,948**	**778,547,251**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**714,555,948**	**778,547,251**	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik daerah		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	**714,555,948**	**778,547,251**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**714,555,948**	**778,547,251**	
	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	**714,555,948**	**778,547,251**	
2.20.02.2.01 .0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						
	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	76%	434,513,548	498,504,851	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01 .0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	62%	202,042,400	202,042,400	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01 .0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	81%	78,000,000	78,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**6,016,656,590**	**6,528,804,118**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**6,016,656,590**	**6,528,804,118**	
	Meningkatnya Tata Kelola Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	100%	**6,016,656,590**	**6,528,804,118**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**6,016,656,590**	**6,528,804,118**	
	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		Jumlah pelaksanaan pemeriksaan keamanan informasi pada pusat data Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	**6,016,656,590**	**6,528,804,118**	
2.21.02.2.01 .0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	58 Perangkat Daerah	5,603,012,561	6,115,160,089	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Informasi dan Persandian				
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	413,644,029	413,644,029	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**43,668,711,155**	**44,037,542,007**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**25,514,398,550**	**25,717,415,082**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kebudayaan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,35 %	**25,514,398,550**	**25,717,415,082**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**27,289,608**	**27,374,320**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	100%	**27,289,608**	**27,374,320**	
2.22.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan , Kepemudaa n dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	27,289,608	27,374,320	Dinas Kebudayaa n, Kepemudaa n dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23,767,451,54 1**	**23,950,833,48 3**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,767,451,54 1**	**23,950,833,48 3**	
2.22.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kebudayaan , Kepemudaa n dan Olah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bula n	23,767,451,54 1	23,950,833,48 3	Dinas Kebudayaa n, Kepemudaa n dan Olah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Raga serta Pariwisata						Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,719,657,401**	**1,739,207,279**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**1,719,657,401**	**1,739,207,279**	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%			
2.22.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan , Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	349,182,203	342,889,198	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kebudayaan , Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,370,475,198	1,396,318,081	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**4,706,718,449**	**4,703,162,167**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	100%	**4,706,718,449**	**4,703,162,167**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**4,706,718,449**	**4,703,162,167**	
	Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah		Jumlah pelaksanaan event kebudayaan	420 kali	**4,706,718,449**	**4,703,162,167**	
2.22.02.2.01 .0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	4,525,594,069	4,521,622,247	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.02.2.01 .0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	181,124,380	181,539,920	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**				**1,560,364,791**	**1,560,364,791**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	100%	**1,560,364,791**	**1,560,364,791**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1,560,364,791**	**1,560,364,791**	
	Meningkatnya kualitas pembinaan kesenian daerah		Persentase peserta pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional yang meningkat pemahamannya	100%	**1,560,364,791**	**1,560,364,791**	
2.22.03.2.01 .0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	973 Orang	1,560,364,791	1,560,364,791	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**				**1,052,312,689**	**1,073,672,024**	
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarah lokal		Persentase masyarakat yang memahami nilai sejarah lokal	79%	**1,052,312,689**	**1,073,672,024**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**1,052,312,689**	**1,073,672,024**	
	Meningkatnya kualitas pembinaan sejarah lokal		Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema	10 kali	**1,052,312,689**	**1,073,672,024**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			sejarah dan kepahlawanan				
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						
	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	1,052,312,689	1,073,672,024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**1,178,731,903**	**1,179,497,671**	
	Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan		Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan	89,16 %	**1,178,731,903**	**1,179,497,671**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**				**1,178,731,903**	**1,179,497,671**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian cagar budaya		Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	285 Objek	**1,178,731,903**	**1,179,497,671**	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						
	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	285 Objek	940,800,975	941,374,215	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						
	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	237,930,928	238,123,456	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**				**9,656,184,773**	**9,803,430,272**	
	Meningkatnya kunjungan ke museum		Persentase peningkatan kunjungan ke museum	4%	**9,656,184,773**	**9,803,430,272**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**				**9,656,184,773**	**9,803,430,272**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan museum		Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 Lokasi	**9,656,184,773**	**9,803,430,272**	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1101 Unit	450,849,059	456,066,127	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum						
	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	6 Unit	813,648,000	814,424,530	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	235,502,940	239,524,593	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						
	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	8,156,184,774	8,293,415,022	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**39,322,421,436**	**39,997,935,063**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**22,258,456,090**	**22,473,450,204**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perpustakaan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,09	**22,258,456,090**	**22,473,450,204**	
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**33,675,416**	**33,900,032**	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	**33,675,416**	**33,900,032**	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	33,675,416	33,900,032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**19,076,625,645**	**19,225,758,579**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,076,625,645**	**19,225,758,579**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	19,076,625,645	19,225,758,579	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**343,563,705**	**359,035,967**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**343,563,705**	**359,035,967**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	343,563,705	359,035,967	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,804,591,324**	**2,854,755,626**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	**2,804,591,324**	**2,854,755,626**	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,804,591,324	2,854,755,626	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**17,016,699,882**	**17,476,739,016**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Persentase anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan.	55%	**17,016,699,882**	**17,476,739,016**	
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	49.01%			
			Persentase masyarakat yang dihasilkan menjadi pegiat literasi	1,5 %			
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**16,478,023,580**	**16,910,035,997**	
	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan layanan baca		Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi	758835 Orang	**16,478,023,580**	**16,910,035,997**	
			Jumlah Perpustakaan yang memenuhi SNP	723 Perpustakaan			
			Jumlah pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	2500 Eksemplar			
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	621 Perpustakaan	55,675,000	66,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	307 Perpustakaan	15,266,746,345	15,585,072,335	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						
	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	17305 Eksemplar	914,381,756	1,001,540,519	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	241,220,479	256,623,143	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**538,676,302**	**566,703,019**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berliterasi		Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Event Literasi	7200 Orang	**538,676,302**	**566,703,019**	
2.23.02.2.02 .0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						
	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	260 Lokus	538,676,302	566,703,019	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**				**47,265,464**	**47,745,843**	
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		Persentase naskah kuno yang dilestarikan	50%	**47,265,464**	**47,745,843**	
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**				**47,265,464**	**47,745,843**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pelestarian naskah kuno		Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	8 eksemplar	**47,265,464**	**47,745,843**	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						
	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	6 Orang	17,488,488	17,904,691	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						
	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Eksemplar	29,776,976	29,841,152	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**3,084,301,187**	**3,141,172,918**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				**3,084,301,187**	**3,141,172,918**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	15.25%	**2,852,545,851**	**2,904,030,825**	
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30.78%			
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**				**922,891,308**	**929,618,200**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis		Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9600 item	**922,891,308**	**929,618,200**	
2.24.02.2.01 .0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						
	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1666 Berkas	922,891,308	929,618,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**				**1,434,899,767**	**1,447,646,980**	
	Meningkatnya pengelolaan arsip statis		Arsip yang dialih mediakan	9600 Lembar	**1,434,899,767**	**1,447,646,980**	
2.24.02.2.02 .0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						
	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	396 Arsip	1,434,899,767	1,447,646,980	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**				**494,754,776**	**526,765,645**	
	Pelaksanaan dokumentasi arsip dalam SIKN melalui JIKN		Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	13783 item	**494,754,776**	**526,765,645**	
2.24.02.2.03 .0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	318,428,319	338,118,365	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03 .0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	230 Laporan	176,326,457	188,647,280	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan kearsipan unit kerja		Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	36.48%	**231,755,336**	**237,142,093**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**				**231,755,336**	**237,142,093**	
	Meningkatnya kualitas pengawasan kearsipan		Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori minimal Baik	68 Instansi	**231,755,336**	**237,142,093**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Laporan	231,755,336	237,142,093	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**44,922,319,575**	**46,067,289,582**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**4,248,315,975**	**4,106,586,953**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**1,199,045,486**	**1,021,045,206**	
	Meningkatnya nelayan yang memiliki sarana prasarana memadai		Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	45%	**1,199,045,486**	**1,021,045,206**	
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1,199,045,486**	**1,021,045,206**	
	Meningkatnya upaya pemberdayaan nelayan kecil		Persentase sarana dan prasarana	100%	**1,199,045,486**	**1,021,045,206**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			perikanan tangkap yang didistribusikan				
3.25.03.2.02 .0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil						
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	65 Unit	1,199,045,486	1,021,045,206	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**1,079,166,516**	**1,083,498,700**	
	Meningkatnya pembudidaya perikanan yang konsisten berproduksi		Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang	**1,079,166,516**	**1,083,498,700**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**				**289,530,000**	**289,992,446**	
	Meningkatnya upaya pemberdayaan pembudidaya perikanan		Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	38 kali	**289,530,000**	**289,992,446**	
3.25.04.2.02 .0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						
	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,	38 Kelompok	289,530,000	289,992,446	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pendidikan dan Pelatihan		Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**789,636,516**	**793,506,254**	
	Meningkatnya upaya pendampingan pembudidaya perikanan		Persentase sarana dan prasarana perikanan budidaya yang didistribusikan	100%	**789,636,516**	**793,506,254**	
3.25.04.2.04 .0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Unit	789,636,516	793,506,254	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**365,975,844**	**366,893,897**	
	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		Persentase Kepatuhan Nelayan Perikanan Tangkap	95%	**365,975,844**	**366,893,897**	
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**				**365,975,844**	**366,893,897**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya upaya pengawasan sumber daya perikanan		Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	**365,975,844**	**366,893,897**	
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	131,561,840	131,722,280	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam						
	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	105 Pelaku Usaha	234,414,004	235,171,617	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				**1,604,128,129**	**1,635,149,150**	
	Meningkatnya kualitas pemasaran hasil usaha perikanan		Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil	75%	**1,604,128,129**	**1,635,149,150**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kelautan dan perikanan yang aktif				
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**1,604,128,129**	**1,635,149,150**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sentra pemasaran hasil perikanan		Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	**1,604,128,129**	**1,635,149,150**	
3.25.06.2.03 .0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	1,604,128,129	1,635,149,150	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**10,554,853,053**	**10,762,423,423**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**7,100,606,564**	**7,185,729,140**	
	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Destinasi Wisata Kota Surabaya		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke destinasi Pariwisata Kota Surabaya	3%	**7,100,606,564**	**7,185,729,140**	
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**254,357,072**	**255,893,288**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas SDM stakeholder bidang pariwisata		Persentase stakeholder bidang pariwisata yang memahami materi kegiatan pengembangan SDM Pariwisata	100%	**254,357,072**	**255,893,288**	
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	60 Orang	254,357,072	255,893,288	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**6,846,249,492**	**6,929,835,852**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi pariwisata daerah		Persentase Destinasi Yang Memenuhi 5 Elemen Kunci Pengembangan Pariwisata (Atraksi, Akomodasi, Aksesibilitas, Aktivitas, dan Amenitas)	70%	**6,846,249,492**	**6,929,835,852**	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Perencanaan Destinasi	Dinas Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	148,000,000	148,000,000	Dinas Kebudayaa

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pariwisata Kabupaten/Kota	, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				n, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	907,662,304	908,235,544	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	5,668,761,348	5,751,774,468	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	121,825,840	121,825,840	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**2,026,912,106**	**2,134,859,844**	
	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Kota Surabaya	3%	**2,026,912,106**	**2,134,859,844**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**2,026,912,106**	**2,134,859,844**	
	Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata daerah		Jumlah kemitraan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	40 Mitra	**2,026,912,106**	**2,134,859,844**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	300 Kegiatan	2,026,912,106	2,134,859,844	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**				**76,638,608**	**76,670,696**	
	Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase produk kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	100%	**76,638,608**	**76,670,696**	
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**				**76,638,608**	**76,670,696**	
	Meningkatnya intensitas kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Jumlah pelaksanaan kegiatan edukasi tentang Hak Kekayaan Intelektual	2 Kegiatan	**76,638,608**	**76,670,696**	
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual						
	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	4 Produk	76,638,608	76,670,696	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**1,350,695,775**	**1,365,163,743**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan		Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 produk	**1,350,695,775**	**1,365,163,743**	
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**				**1,350,695,775**	**1,365,163,743**	
	Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif		Persentase creative hub yang beroperasional	100%	**1,350,695,775**	**1,365,163,743**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						
	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	220 Orang	1,350,695,775	1,365,163,743	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**14,076,780,580**	**14,619,998,268**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**4,045,469,252**	**4,404,926,602**	
	Meningkatnya produksi hortikultura pertanian perkotaan		Produksi Hortikultura Pertanian Perkotaan	8,33 Ton	**4,045,469,252**	**4,404,926,602**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				**2,487,440,120**	**2,803,281,736**	
	Meningkatnya upaya pendampingan dan pembinaan budidaya pertanian perkotaan		Jumlah kelompok pertanian perkotaan (kampung sayur) yang	45 Kelompok	**2,487,440,120**	**2,803,281,736**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			konsisten berbudidaya				
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	2,487,440,120	2,803,281,736	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1,558,029,132**	**1,601,644,866**	
	Meningkatnya upaya pendampingan dan pembinaan budidaya peternakan		Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 Jenis	**1,558,029,132**	**1,601,644,866**	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						
	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	1,558,029,132	1,601,644,866	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				**6,048,070,495**	**6,189,513,017**	
	Meningkatnya produksi pertanian pada prasarana pertanian milik Pemerintah		Produksi pertanian pada lahan aset	14 Ton	**6,048,070,495**	**6,189,513,017**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**				**6,048,070,495**	**6,189,513,017**	
	Meningkatnya usaha pengembangan prasarana pertanian		Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	**6,048,070,495**	**6,189,513,017**	
3.27.03.2.01 .0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						
	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	35.975 Ha	6,048,070,495	6,189,513,017	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				**1,924,783,405**	**1,958,436,009**	
	Meningkatnya kualitas produksi peternakan dan pengendalian kesehatan hewan		Pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	8 Unit Usaha	**1,924,783,405**	**1,958,436,009**	
			Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%			
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**				**616,596,035**	**619,207,147**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya upaya pengendalian kesehatan hewan		Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	90%	**616,596,035**	**619,207,147**	
3.27.04.2.01 .0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	616,596,035	619,207,147	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**936,293,390**	**944,093,209**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner		Jumlah pelayanan jasa medik dan jasa laboratorium veteriner	2828 pelayanan	**936,293,390**	**944,093,209**	
3.27.04.2.03 .0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	936,293,390	944,093,209	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**371,893,980**	**395,135,653**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya upaya pengawasan unit usaha produk hewan		Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	45 Unit	**371,893,980**	**395,135,653**	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						
	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	45 Unit Usaha	371,893,980	395,135,653	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**2,058,457,428**	**2,067,122,640**	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase penyuluh yang memenuhi standar kompetensi	100%	**2,058,457,428**	**2,067,122,640**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**				**2,058,457,428**	**2,067,122,640**	
	Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian		Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	25 orang	**2,058,457,428**	**2,067,122,640**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1,038,020,837	1,045,675,227	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						
	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	96 Unit	1,020,436,591	1,021,447,413	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**14,980,564,244**	**15,504,984,057**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**				**1,035,734,435**	**1,039,861,763**	
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perdagangan		Persentase kepatuhan pelaku usaha	90%	**1,035,734,435**	**1,039,861,763**	
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**				**286,278,746**	**286,966,634**	
	Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan / pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan		Persentase Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditindaklanjuti	100%	**286,278,746**	**286,966,634**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	286,278,746	286,966,634	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**				**275,597,983**	**276,973,759**	
	Terlaksananya pengawasan gudang		Jumlah Gudang yang diawasi	200 Gudang	**275,597,983**	**276,973,759**	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						
	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	160 Dokumen	275,597,983	276,973,759	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**				**118,019,235**	**118,707,123**	
	Meningkatnya tindak lanjut atas pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri		Persentase hasil verifikasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri yang ditindaklanjuti	100%	**118,019,235**	**118,707,123**	
3.30.02.2.03 .0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri						
	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	118,019,235	118,707,123	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.04	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**				**60,800,000**	**60,800,000**	
	Meningkatnya tindak lanjut atas pembinaan / pengawasan terhadap		Persentase hasil verifikasi Pemenuhan Komitmen Perolehan	100%	**60,800,000**	**60,800,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Luar Negeri		Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) luar Negeri yang ditindaklanjuti				
3.30.02.2.04 .0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri						
	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	60,800,000	60,800,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**				**292,438,471**	**293,814,247**	
	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C		Jumlah pelaku usaha penjualan Minuman Beralkohol yang diawasi	150 pelaku usaha	**292,438,471**	**293,814,247**	
3.30.02.2.05 .0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	292,438,471	293,814,247	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.07	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Meningkatnya koordinasi terkait penerbitan Surat Keterangan Asal dengan Instansi yang ditetapkan sebagai penerbit Surat Keterangan Asal		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	**2,600,000**	**2,600,000**	
3.30.02.2.07 .0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						
	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**5,136,309,471**	**5,296,275,163**	
	Meningkatnya omset pelaku usaha perdagangan		Persentase peningkatan omset pelaku usaha perdagangan	2%	**5,136,309,471**	**5,296,275,163**	
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				**5,136,309,471**	**5,296,275,163**	
	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang terstandarisasi		Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang memiliki standarisasi pengelolaan usaha	101 Sarana Distribusi Perdagangan	**5,136,309,471**	**5,296,275,163**	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	5,136,309,471	5,296,275,163	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**613,798,635**	**775,648,999**	
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga		Persentase ketersediaan komoditas bapokting	100%	**613,798,635**	**775,648,999**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	barang kebutuhan pokok dan barang penting						
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**				**613,798,635**	**775,648,999**	
	Terlaksananya Operasi Pasar dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Jumlah Operasi Pasar yang dilaksanakan	217 Operasi Pasar	**613,798,635**	**775,648,999**	
			Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	100 Pelaku Usaha			
3.30.04.2.02 .0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	350,404,587	469,508,747	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04.2.02 .0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	263,394,048	306,140,252	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**				**2,760,772,399**	**2,912,016,307**	
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Persentase Usaha Mikro yang memiliki kemampuan ekspor	2.01%	**2,760,772,399**	**2,912,016,307**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**2,760,772,399**	**2,912,016,307**	
	Meningkatnya transaksi/pemesanan Usaha Mikro skala nasional		Jumlah usaha mikro peserta pameran dagang yang mendapatkan transaksi / Pemesanan	50 Usaha mikro	**2,760,772,399**	**2,912,016,307**	
3.30.05.2.01 .0002	Pameran Dagang Nasional						
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 Pelaku Usaha	2,760,772,399	2,912,016,307	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Menengah dan Perdagangan					Menengah dan Perdagangan
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**628,493,396**	**632,449,515**	
	Meningkatnya Pelayanan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai teknis kemetrologian		Persentase Alat UTTP yang Memenuhi syarat teknis kemetrologian	92,44 %	**628,493,396**	**632,449,515**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**				**628,493,396**	**632,449,515**	
	Meningkatnya Pengawasan dan Pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Memenuhi Standar Tera	24290 Unit	**628,493,396**	**632,449,515**	
3.30.06.2.01 .0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	24290 Unit	529,117,898	532,486,002	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.06.2.01 .0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1222 Orang	99,375,498	99,963,513	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**				**4,805,455,908**	**4,848,732,310**	
	Meningkatnya cakupan pemasaran usaha mikro		Persentase Usaha Mikro yang meningkat cakupan pemasarannya	7%	**4,805,455,908**	**4,848,732,310**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**				**4,805,455,908**	**4,848,732,310**	
	Meningkatnya transaksi/pemesanan Usaha Mikro skala lokal		Jumlah usaha mikro peserta kegiatan pemasaran lokal yang mendapatkan transaksi / pemesanan	1800 Usaha Mikro	**4,805,455,908**	**4,848,732,310**	
3.30.07.2.01 .0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui	5220 UMKM	4,805,455,908	4,848,732,310	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Menengah dan Perdagangan	kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				Menengah dan Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1,061,805,723**	**1,073,296,881**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				**555,711,687**	**555,711,687**	
	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil menengah yang berdaya		Persentase pelaku usaha industri yang berdaya	24%	**555,711,687**	**555,711,687**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**				**555,711,687**	**555,711,687**	
	Meningkatnya pendampingan peningkatan kualitas produk dan akses kemitraan pelaku usaha industri kecil menengah		Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pemberdayaan	427 Pelaku Usaha Industri	**555,711,687**	**555,711,687**	
3.31.02.2.01 .0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	198,309,480	152,109,480	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01 .0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi,	Dinas Perindustria	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen	113,092,727	113,092,727	Dinas Perindustria

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	n dan Tenaga Kerja	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				n dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01 .0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	244,309,480	290,509,480	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**				**263,094,036**	**263,094,035**	
	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil menengah yang patuh perizinannya		Persentase Industri Kecil Menengah yang patuh	25%	**263,094,036**	**263,094,035**	
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**				**263,094,036**	**263,094,035**	
	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah		Jumlah pelaku usaha industri yang diawasi	445 Pelaku Usaha Industri	**263,094,036**	**263,094,035**	
3.31.03.2.01 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	137,539,700	137,539,700	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						
	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	125,554,336	125,554,335	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**				**243,000,000**	**254,491,159**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kepatuhan penyampaian data pelaku usaha industri kecil menengah		Persentase kepatuhan penyampaian data industri	81%	**243,000,000**	**254,491,159**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**				**243,000,000**	**254,491,159**	
	Meningkatnya pelaporan operasional pelaku usaha industri		Jumlah pelaku usaha industri yang menyampaikan data industri	344 Pelaku Usaha Industri	**243,000,000**	**254,491,159**	
3.31.04.2.01 .0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	243,000,000	254,491,159	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**822,172,164,171**	**857,520,679,230**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**623,404,640,964**	**654,039,400,063**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**226,848,301,782**	**236,248,474,357**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan dan kerumahtanggaan bagi KDH dan WKDH		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	**31,773,167,902**	**33,160,802,482**	
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%			
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**12,222,470,887**	**12,931,470,887**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan serta biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%	**12,222,470,887**	**12,931,470,887**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	186,001,452	195,001,452	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	12,036,469,435	12,736,469,435	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**19,550,697,015**	**20,229,331,595**	
	Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase keberhasilan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	**19,550,697,015**	**20,229,331,595**	
			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	19,046,451,000	19,517,893,325	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	504,246,015	711,438,270	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	100%	**739,188,301**	**860,109,882**	
			Persentase rekomendasi Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	100%			
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**				**739,188,301**	**860,109,882**	
	Terselenggaranya pendampingan penerapan akuntabilitas dan pelaporan kinerja perangkat daerah		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 Perangkat Daerah	**739,188,301**	**860,109,882**	
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan Lkj tepat waktu	100%			
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	739,188,301	860,109,882	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan dan organisasi		Persentase kematangan perangkat daerah pada level 5	85%	**1,340,800,892**	**1,460,346,365**	
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik	97.20%			
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**				**1,340,800,892**	**1,460,346,365**	
	Meningkatnya kualitas penataan organisasi Kota Surabaya		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penilaian tingkat kematangan	58 Perangkat Daerah	**1,340,800,892**	**1,460,346,365**	
			Jumlah perangkat daerah dan/atau unit penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan evaluasi pelayanan publik	283 UPP dan/atau PD			
4.01.01.2.13 .0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	719,152,265	838,697,738	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13 .0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	621,648,627	621,648,627	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	**192,995,144,687**	**200,767,215,628**	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%			
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**156,000,000**	**156,000,000**	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Sekretariat Daerah	100%	**156,000,000**	**156,000,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	156,000,000	156,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**79,011,533,942**	**79,611,548,135**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**79,011,533,942**	**79,611,548,135**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan	79,011,533,942	79,611,548,135	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**113,827,610,745**	**120,999,667,493**	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah		Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	**113,827,610,745**	**120,999,667,493**	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			
			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,156,796,000	2,269,796,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,300,451,505	3,470,691,505	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	108,370,363,240	115,259,179,988	Sekretariat Daerah
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**376,262,847,072**	**397,205,265,444**	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Presentase pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100%	**7,854,076,881**	**7,898,670,676**	
			Persentase jenis data yang telah disajikan pada aplikasi Basis Data Kewilayahan	100%			
			Kinerja SPM	97.43 nilai			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3 nilai			
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**				**7,854,076,881**	**7,898,670,676**	
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Kecamatan yang melakukan pendataan Pilar Batas	22 Kecamatan	**7,854,076,881**	**7,898,670,676**	
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%			
			Jumlah jenis data yang telah ditampilkan pada aplikasi Basis Data Kewilayahan	48 Jenis Data			
4.01.02.2.01 .0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2,309,888,092	2,316,161,516	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01 .0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	3,706,026,883	3,711,811,098	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01 .0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	1,838,161,906	1,870,698,062	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kesejahteraan Rakyat		Persentase intervensi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara tepat sasaran	100%	**360,927,986,442**	**381,777,408,946**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				**360,927,986,442**	**381,777,408,946**	
	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	5 Kegiatan	**360,927,986,442**	**381,777,408,946**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	37,102,467,402	39,429,087,532	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Sekretariat Daerah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	613340 Keluarga	262,794,423,415	281,314,223,636	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sekretariat Daerah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	21000 Keluarga	61,031,095,625	61,034,097,778	Sekretariat Daerah
	Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum		Persentase Keberhasilan Pemberian Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah	100%	**1,559,935,540**	**1,564,435,836**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**1,559,935,540**	**1,564,435,836**	
	Meningkatnya efektifitas penanganan permasalahan hukum oleh Pemerintah Daerah		Persentase pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan	100%	**1,559,935,540**	**1,564,435,836**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan	20 Kasus	1,559,935,540	1,564,435,836	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Fasilitasi Bantuan Hukum				
	Meningkatnya Kolaborasi Kerja Sama di berbagai Sektor		Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal	100%	**1,425,783,797**	**1,457,408,841**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**				**1,425,783,797**	**1,457,408,841**	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja Sama Daerah		Jumlah kerja sama dalam negeri yang difasilitasi dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan	20 Lembaga	**1,425,783,797**	**1,457,408,841**	
			Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan	12 Lembaga			
			Jumlah evaluasi kerja sama yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan	32 Lembaga			
4.01.02.2.04 .0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	567,819,381	597,094,480	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	451,958,426	452,062,211	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	406,005,990	408,252,150	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kebijakan dan Regulasi Hukum		Indeks Kualitas Kebijakan	86 nilai	**4,495,064,412**	**4,507,341,145**	
			Indeks Reformasi Hukum	97.2 nilai			
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**4,495,064,412**	**4,507,341,145**	
	Meningkatnya efektifitas penyusunan produk hukum daerah oleh Pemerintah Daerah		Persentase produk hukum yang dilakukan harmonisasi	100%	**4,495,064,412**	**4,507,341,145**	
			Jumlah laporan evaluasi kebijakan	3 laporan			
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	3,180,695,893	3,190,238,844	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	60 Dokumen	1,314,368,519	1,317,102,301	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengelolaan Informasi Hukum		Hukum yang Didokumentasi				
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**20,293,492,110**	**20,585,660,262**	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan dan Pembangunan		Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,5 %	**15,436,652,141**	**15,484,556,557**	
			Tingkat Kematangan UKPBJ	40 Nilai			
			Pemanfaatan Sistem Pengadaan	28,75 Nilai			
			Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	17,14 Nilai			
			Persentase capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	76%			
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**				**9,040,619,700**	**9,083,336,660**	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	**9,040,619,700**	**9,083,336,660**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	2,492,948,551	2,508,937,792	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6,547,671,149	6,574,398,868	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				**6,396,032,441**	**6,401,219,897**	
	Meningkatnya Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Menunjang Proses Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	96%	**6,396,032,441**	**6,401,219,897**	
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	4,550,219,501	4,555,406,957	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1,539,212,940	1,539,212,940	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	306,600,000	306,600,000	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan BUMD		Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD	100%	**1,995,339,962**	**2,212,239,822**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				**1,943,339,962**	**2,152,439,822**	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Perekonomian sesuai dengan Rekomendasi yang Ditetapkan		Persentase kesesuaian pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	**1,943,339,962**	**2,152,439,822**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1,235,740,016	1,442,640,022	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	707,599,946	709,799,800	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**				**52,000,000**	**59,800,000**	
	Meningkatnya Efektifitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase efektifitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	**52,000,000**	**59,800,000**	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	52,000,000	59,800,000	Sekretariat Daerah
	Tersedianya data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan		Persentase penyediaan data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung	100%	**2,861,500,007**	**2,888,863,883**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pengambilan keputusan				
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				**2,861,500,007**	**2,888,863,883**	
	Meningkatnya kebijakan di bidang perekonomian sesuai dengan rekomendasi TPID yang ditetapkan		Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi TPID	100%	**2,861,500,007**	**2,888,863,883**	
4.01.03.2.01 .0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	2,861,500,007	2,888,863,883	Sekretariat Daerah
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**198,767,523,207**	**203,481,279,167**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**136,826,327,295**	**141,438,136,851**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Sekretariat DPRD		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	**49,355,906,630**	**49,813,173,808**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**15,923,200**	**15,923,200**	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	**15,923,200**	**15,923,200**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15,923,200	15,923,200	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14,819,563,581**	**14,934,620,550**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**14,819,563,581**	**14,934,620,550**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	14,819,563,581	14,934,620,550	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**29,527,735,220**	**29,865,210,269**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**29,527,735,220**	**29,865,210,269**	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	29,527,735,220	29,865,210,269	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4,992,684,629**	**4,997,419,789**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**4,992,684,629**	**4,997,419,789**	
4.02.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	105 Unit	4,992,684,629	4,997,419,789	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya ketepatan layanan pendukung terhadap DPRD		Persentase pelaksanaan layanan pendukung DPRD yang difasilitasi	100%	**87,470,420,665**	**91,624,963,043**	
4.02.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**32,390,554,899**	**36,526,877,457**	
	Terlaksananya protokol dan komunikasi DPRD		Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	**32,390,554,899**	**36,526,877,457**	
4.02.01.2.14 .0001	Fasilitasi Keprotokolan						
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	32,390,554,899	36,526,877,457	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**54,522,056,860**	**54,522,056,860**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan anggota DPRD		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	**54,522,056,860**	**54,522,056,860**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	54,522,056,860	54,522,056,860	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**				**557,808,906**	**576,028,726**	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian laporan perjalanan dinas		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	**557,808,906**	**576,028,726**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	557,808,906	576,028,726	Sekretariat DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**61,941,195,912**	**62,043,142,316**	
	Meningkatnya ketepatan fasilitasi tugas dan fungsi utama DPRD		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	**61,941,195,912**	**62,043,142,316**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Prolegda yang yang diproses menjadi Ranperda	52,5 %			
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**909,425,790**	**915,566,817**	
	Terlaksananya Pembahasan dan Pengesahan Raperda dan/atau Rancangan Peraturan DPRD		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	**909,425,790**	**915,566,817**	
4.02.02.2.01 .0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	909,425,790	915,566,817	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**				**27,315,121,571**	**27,407,833,062**	
	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	**27,315,121,571**	**27,407,833,062**	
4.02.02.2.04 .0002	Pendalaman Tugas DPRD						
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	546,000,000	580,161,049	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04 .0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	26,769,121,571	26,827,672,013	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**30,361,679,497**	**30,362,438,841**	
	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	**30,361,679,497**	**30,362,438,841**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						
	Terlaksananya Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	30,361,679,497	30,362,438,841	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**				**3,354,969,054**	**3,357,303,596**	
	Terfasilitasinya Rapat terkait Tugas dan Fungsi DPRD		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna	≤ 2 hari	**3,354,969,054**	**3,357,303,596**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	3,354,969,054	3,357,303,596	Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**344,297,983,832**	**385,282,212,092**	
5.01	**PERENCANAAN**				**39,877,510,565**	**40,204,287,837**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**32,584,857,365**	**32,875,873,234**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perencanaan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,69 %	**32,584,857,365**	**32,875,873,234**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**180,500,000**	**180,500,000**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100%	**180,500,000**	**180,500,000**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	180,500,000	180,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**28,184,849,481**	**28,397,642,822**	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**28,184,849,481**	**28,397,642,822**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	28,184,849,481	28,397,642,822	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4,219,507,884**	**4,297,730,412**	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**4,219,507,884**	**4,297,730,412**	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	819,444,919	812,129,573	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Perencanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	3,400,062,965	3,485,600,839	Badan Perencanaan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kantor yang Disediakan				Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**2,070,576,470**	**2,070,576,470**	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	**2,070,576,470**	**2,070,576,470**	
			Persentase hasil analisa data dan evaluasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan	100%			
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**1,000,777,115**	**1,000,777,115**	
	Terjaganya ketepatan penyusunan perencanaan pendanaan pembangunan daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	**1,000,777,115**	**1,000,777,115**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1,000,777,115	1,000,777,115	Badan Perencanaan Pembangun

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		an Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				an Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**1,069,799,355**	**1,069,799,355**	
	Terjaganya ketepatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	**1,069,799,355**	**1,069,799,355**	
5.01.02.2.03 .0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	1,069,799,355	1,069,799,355	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**5,222,076,730**	**5,257,838,133**	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan		Persentase capaian indikator program	98,63 %	**1,511,554,979**	**1,525,193,214**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA		Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Perekonomian dan SDA				
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%			
			Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Perekonomian dan SDA	90%			
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**1,511,554,979**	**1,525,193,214**	
	Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase ketepatan waktu verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	**1,511,554,979**	**1,525,193,214**	
5.01.03.2.02 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	785,808,308	786,446,543	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	725,746,671	738,746,671	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%	**1,746,203,465**	**1,768,326,633**	
			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,63 %			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%			
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**1,746,203,465**	**1,768,326,633**	
	Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase ketepatan waktu verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	**1,746,203,465**	**1,768,326,633**	
5.01.03.2.03 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	870,928,273	872,251,441	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	875,275,192	896,075,192	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90%	**1,964,318,286**	**1,964,318,286**	
			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,63 %			
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	100%			

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**1,964,318,286**	**1,964,318,286**	
	Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase ketepatan waktu verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	**1,964,318,286**	**1,964,318,286**	
5.01.03.2.01 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	749,728,821	749,728,821	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.01 .0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Bidang Pembangunan Manusia						
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1,214,589,465	1,214,589,465	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.02	**KEUANGAN**				**244,359,772,286**	**285,209,048,729**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**54,001,835,907**	**54,516,179,382**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang keuangan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96%	**53,762,696,334**	**54,276,454,497**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**180,500,000**	**180,500,000**	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Badan Pendapatan Daerah	100%	**180,500,000**	**180,500,000**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	180,500,000	180,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**45,488,214,040**	**45,833,104,179**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**45,488,214,040**	**45,833,104,179**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/bulan	45,488,214,040	45,833,104,179	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**8,093,982,294**	**8,262,850,318**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran serta meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**8,093,982,294**	**8,262,850,318**	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,384,501,662	2,368,644,785	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,709,480,632	5,894,205,533	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya kualitas analisis pengembangan retribusi daerah		Cakupan retribusi daerah yang dilakukan analisis dan pengembangan	100%	**239,139,573**	**239,724,885**	
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**239,139,573**	**239,724,885**	
	Terlaksananya kegiatan penyusunan analisa potensi pendapatan bukan pajak		Cakupan Perangkat Daerah penghasil retribusi daerah yang dilakukan analisis dan dimonitoring	100%	**239,139,573**	**239,724,885**	
5.02.01.2.04 .0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						
	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	239,139,573	239,724,885	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**384,452,902**	**385,038,325**	
	Optimalisasi tata kelola dana transfer		Persentase kesesuaian penyaluran dana transfer sesuai	100%	**384,452,902**	**385,038,325**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			dengan ketentuan perundang-undangan				
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**384,452,902**	**385,038,325**	
	Terjaganya kesesuaian pelaporan penyaluran pendapatan transfer		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	**384,452,902**	**385,038,325**	
5.02.02.2.02 .0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	384,452,902	385,038,325	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**17,726,726,940**	**18,222,308,203**	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan retribusi daerah		Cakupan retribusi daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	**302,747,195**	**302,760,870**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**302,747,195**	**302,760,870**	
	Terlaksananya Kegiatan Monev Pendapatan Bukan Pajak		Cakupan Perangkat Daerah penghasil retribusi daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	**302,747,195**	**302,760,870**	
5.02.04.2.01 .0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	302,747,195	302,760,870	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya pajak daerah pada sektor pajak PBB, BPHTB		Persentase Capaian PBB, BPHTB	88,49 %	**7,930,769,267**	**8,029,191,794**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**7,930,769,267**	**8,029,191,794**	
	Terlaksananya Pembayaran Piutang PBB dan BPHTB		Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	77,37 %	**3,221,236,257**	**3,294,690,291**	
5.02.04.2.01 .0011	Penagihan Pajak Daerah						
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3,221,236,257	3,294,690,291	Badan Pendapatan Daerah
	Terlaksananya Kepatuhan Wajib Pajak		Persentase kepatuhan wajib pajak	59,27 %	**4,709,533,010**	**4,734,501,503**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Obyek Pajak	4,709,533,010	4,734,501,503	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya pajak daerah pada sektor Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah		Persentase Capaian Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah	98,77 %	**9,493,210,478**	**9,890,355,539**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**9,493,210,478**	**9,890,355,539**	
	Terlaksananya sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir		Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	73%	**9,493,210,478**	**9,890,355,539**	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	6,526,269,361	6,533,152,676	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,966,941,117	3,357,202,863	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**45,285,978,401**	**45,319,325,454**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang keuangan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,63 %	**45,285,978,401**	**45,319,325,454**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**15,128,000**	**15,128,000**	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	**15,128,000**	**15,128,000**	
5.02.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15,128,000	15,128,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**38,137,453,330**	**38,423,880,055**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**38,137,453,330**	**38,423,880,055**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	38,137,453,330	38,423,880,055	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,288,221,324**	**3,034,884,858**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**496,755,194**	**496,705,494**	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	496,755,194	496,705,494	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**2,791,466,130**	**2,538,179,364**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2,791,466,130	2,538,179,364	Badan Pengelolaan Keuangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dan Aset Daerah	Kantor yang Disediakan				dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,845,175,747**	**3,845,432,541**	
	Terjaganya ketepatan pemeliharaan dan tertib administrasi kendaraan dinas		Persentase ketepatan pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	**3,845,175,747**	**3,845,432,541**	
5.02.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1074 Unit	3,845,175,747	3,845,432,541	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**100,343,282,400**	**138,137,298,788**	
	Meningkatnya tata kelola anggaran		Persentase Kesesuaian Alokasi Mandatory Spending	100%	**3,483,618,438**	**3,545,818,158**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**				**3,483,618,438**	**3,545,818,158**	
	Terjaminnya kualitas penyusunan penganggaran		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%	**3,483,618,438**	**3,545,818,158**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%			
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran	100%			
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1,134,049,400	1,134,049,400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	283,261,535	283,261,535	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	682,313,851	682,887,091	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1,383,993,652	1,445,620,132	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	**1,317,746,568**	**1,511,487,338**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**1,317,746,568**	**1,511,487,338**	
	Terjaminnya kualitas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	**1,317,746,568**	**1,511,487,338**	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	1,317,746,568	1,511,487,338	Badan Pengelolaan Keuangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dan Aset Daerah					dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	70%	**95,541,917,394**	**133,079,993,292**	
			Persentase Penurunan SILPA	3,64 %			
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**48,041,917,394**	**75,579,993,292**	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah		Persentase penyusunan dokumen Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	**47,090,101,841**	**74,631,893,126**	
5.02.02.2.02 .0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	644,984,121	641,056,486	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02 .0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						
	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	46,445,117,720	73,990,836,640	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Penerimaan dan		Persentase penyusunan dokumen Penerimaan dan	100%	**951,815,553**	**948,100,166**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengeluaran Kas yang ditindaklanjuti		Pengeluaran Kas yang ditindaklanjuti				
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100440 Dokumen	951,815,553	948,100,166	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**47,500,000,000**	**57,500,000,000**	
	Terjaminnya ketepatan penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana sesuai ketentuan yang berlaku		Persentase ketepatan penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	**500,000,000**	**500,000,000**	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terjaminnya ketepatan realisasi dana darurat dan mendesak sesuai ketentuan yang berlaku		Persentase ketepatan realisasi dana darurat dan mendesak	100%	**47,000,000,000**	**57,000,000,000**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	47,000,000,000	57,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**26,617,495,736**	**28,628,898,577**	
	Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase register tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	16,01 %	**26,617,495,736**	**28,628,898,577**	
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2.56%			
			Persentase Aset Produktif	6%			
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**26,617,495,736**	**28,628,898,577**	
	Meningkatnya Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan		Jumlah register yang dilakukan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	155 Register	**7,522,069,603**	**7,933,809,231**	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	5,888,063,083	6,296,415,879	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1,634,006,520	1,637,393,352	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah		Persentase aset tanah dan bangunan yang digunakan dan / atau dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	**17,623,127,632**	**19,218,589,354**	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	18 Laporan	713,280,280	713,280,280	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
	Terlaksananya Optimalisasi	Badan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	7679 Dokumen	16,909,847,352	18,505,309,074	Badan Pengelolaa

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Keuangan dan Aset Daerah	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				n Keuangan dan Aset Daerah
	Terlaksananya Pendataan dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Persentase penyusunan laporan Barang Milik Daerah	100%	**1,472,298,501**	**1,476,499,992**	
5.02.03.2.01 .0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	61 Orang	1,472,298,501	1,476,499,992	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**25,465,663,302**	**25,929,706,005**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**20,037,191,137**	**20,166,170,297**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kepegawaian		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94.18%	**20,037,191,137**	**20,166,170,297**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**87,659,614**	**87,782,656**	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan	100%	**87,659,614**	**87,782,656**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	87,659,614	87,782,656	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**18,677,442,199**	**18,819,071,250**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,677,442,199**	**18,819,071,250**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	18,677,442,199	18,819,071,250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**706,393,192**	**688,644,106**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	**706,393,192**	**688,644,106**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	706,393,192	688,644,106	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**565,696,132**	**570,672,285**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	**565,696,132**	**570,672,285**	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	565,696,132	570,672,285	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**5,428,472,165**	**5,763,535,708**	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan ASN		Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	**1,304,321,999**	**1,298,296,427**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**1,304,321,999**	**1,298,296,427**	
	Meningkatnya pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	90%	**1,304,321,999**	**1,298,296,427**	
5.03.02.2.01 .0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	264,836,150	260,336,150	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01 .0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	806,785,849	800,660,277	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01 .0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						
	Terkelolanya Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	232,700,000	237,300,000	Badan Kepegawaian dan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pengembangan Sumber Daya Manusia					Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN		Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	96%	**2,730,370,778**	**2,904,603,605**	
			Persentase ASN yang disiplin	97%			
			Persentase PNS yang telah mengikuti asesmen	28%			
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**2,730,370,778**	**2,904,603,605**	
	Meningkatnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	**2,730,370,778**	**2,904,603,605**	
			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis			
			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis			
5.03.02.2.04 .0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7169 Dokumen	710,406,765	786,344,718	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1,232,500,000	1,232,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	787,464,013	885,758,887	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi kepegawaian		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu	100%	**1,393,779,388**	**1,560,635,676**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**				**1,393,779,388**	**1,560,635,676**	
	Meningkatnya pelayanan mutasi dan promosi ASN		Jumlah Pegawai ASN yang mendapatkan Fasilitas Layanan Administrasi Kepegawaian	8678 Orang	**1,393,779,388**	**1,560,635,676**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						
	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi	Badan Kepegawaia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	488,662,700	525,062,700	Badan Kepegawai

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	n dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1132 Dokumen	364,016,688	429,472,976	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						
	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	541,100,000	606,100,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**4,541,267,751**	**4,561,503,681**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**4,541,267,751**	**4,561,503,681**	
	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai		Persentase ASN yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	97%	**4,541,267,751**	**4,561,503,681**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**				**1,916,468,574**	**1,921,384,953**	
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis	11 kegiatan	**1,916,468,574**	**1,921,384,953**	
5.04.02.2.01 .0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2282 Orang	1,916,468,574	1,921,384,953	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**				**2,624,799,177**	**2,640,118,728**	
	Meningkatnya Sertifikasi, Kelembagaan,		Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi	171 Orang	**2,624,799,177**	**2,640,118,728**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2,624,799,177	2,640,118,728	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**30,053,769,928**	**29,377,665,840**	
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**19,301,489,970**	**18,392,987,036**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penelitian dan pengembangan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,69 %	**19,301,489,970**	**18,392,987,036**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**180,500,000**	**180,500,000**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	**180,500,000**	**180,500,000**	
5.05.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	180,500,000	180,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16,242,544,225**	**16,311,402,681**	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,242,544,225**	**16,311,402,681**	
5.05.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	16,242,544,225	16,311,402,681	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,878,445,745**	**1,901,084,355**	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	**2,878,445,745**	**1,901,084,355**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,389,763,131	337,967,607	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,488,682,614	1,563,116,748	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**				**10,752,279,958**	**10,984,678,804**	
	Meningkatnya pemanfaatan riset dalam pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah	100%	**3,360,100,000**	**3,010,400,000**	
5.05.03.2.01	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**				**3,360,100,000**	**3,010,400,000**	
	Terlaksananya pemantauan penyelenggaraan riset		Jumlah fasilitasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan riset	4 Fasilitasi	**330,000,000**	**330,000,000**	
5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	65,000,000	65,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01 .0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						
	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	176,600,000	176,600,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01 .0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2 Dokumen	88,400,000	88,400,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Terlaksananya penyusunan riset berbasis bukti		Jumlah pelaksanaan penyusunan riset berbasis bukti	23 Kegiatan	**3,030,100,000**	**2,680,400,000**	
5.05.03.2.01 .0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						
	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	180,500,000	180,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01 .0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	22 Laporan	2,650,700,000	2,250,300,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01 .0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	198,900,000	249,600,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan/atau Badan Usaha di Daerah	100%	**7,392,179,958**	**7,974,278,804**	
5.05.03.2.02	**Invensi dan Inovasi**				**7,392,179,958**	**7,974,278,804**	
	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan inovasi		Jumlah pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Kegiatan	**7,035,059,958**	**7,468,958,804**	
			Jumlah fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan inovasi	1 Fasilitasi			
5.05.03.2.02 .0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk	1 Laporan	259,648,800	261,728,799	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			promosi dan kampanye Inovasi				
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	282,560,000	361,860,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						
	Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2 Sistem Informasi	123,800,000	223,900,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi						
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan	71,500,000	144,300,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.05.03.2.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah						
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan	6,297,551,158	6,477,170,005	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Terlaksananya difusi inovasi		Persentase pelaksanaan pembinaan difusi inovasi	100%	**357,120,000**	**505,320,000**	
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	67,200,000	71,100,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	213,600,000	224,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02 .0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.						
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	76,320,000	210,220,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**31,791,011,099**	**32,139,828,991**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**31,791,011,099**	**32,139,828,991**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**27,496,103,557**	**27,699,245,234**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Inspektorat		Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95.30%	**27,496,103,557**	**27,699,245,234**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**13,390,790**	**13,416,460**	
	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tepat waktu		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat	100%	**13,390,790**	**13,416,460**	
6.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	13,390,790	13,416,460	Inspektorat
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**25,524,131,961**	**25,716,277,875**	
	Terlaksananya penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25,524,131,961**	**25,716,277,875**	
6.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	25,524,131,961	25,716,277,875	Inspektorat
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**592,090,363**	**592,217,653**	
	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**592,090,363**	**592,217,653**	
6.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	592,090,363	592,217,653	Inspektorat
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,366,490,443**	**1,377,333,246**	
	Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	**1,366,490,443**	**1,377,333,246**	
6.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,366,490,443	1,377,333,246	Inspektorat
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**2,193,537,456**	**2,428,230,512**	
	Meningkatnya Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI		Persentase Pemenuhan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	100%	**273,096,976**	**273,161,152**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**273,096,976**	**273,161,152**	
	Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI	12 kegiatan	**273,096,976**	**273,161,152**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kepada Perangkat Daerah				
6.01.02.2.01 .0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	273,096,976	273,161,152	Inspektorat
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah		Persentase pengawasan keuangan dan kinerja yang telah selesai	100%	**1,086,492,528**	**1,320,993,056**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**1,086,492,528**	**1,320,993,056**	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan oleh APIP		Persentase pengawasan keuangan yang telah dilaksanakan	100%	**672,538,952**	**931,721,304**	
6.01.02.2.01 .0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66 Laporan	298,670,000	557,724,000	Inspektorat
6.01.02.2.01 .0004	Reviu Laporan Keuangan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	373,868,952	373,997,304	Inspektorat
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja oleh APIP		Persentase pengawasan kinerja yang telah dilaksanakan	100%	**413,953,576**	**389,271,752**	
6.01.02.2.01 .0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	107,181,600	107,181,600	Inspektorat
6.01.02.2.01 .0003	Reviu Laporan Kinerja						
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	306,771,976	282,090,152	Inspektorat
	Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaporkan	100%	**833,947,952**	**834,076,304**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**833,947,952**	**834,076,304**	
	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah diselesaikan	25 Laporan	**833,947,952**	**834,076,304**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						
	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	321,046,976	321,111,152	Inspektorat
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	512,900,976	512,965,152	Inspektorat
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**2,101,370,086**	**2,012,353,245**	
	Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Evaluasi, serta Verifikasi terkait Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah yang telah diselesaikan	100%	**334,325,000**	**334,325,000**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**				**334,325,000**	**334,325,000**	
	Terlaksananya penyelenggaraan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapatkan Nilai Minimal 90	61 Perangkat Daerah	**334,325,000**	**334,325,000**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	61 perangkat daerah	334,325,000	334,325,000	Inspektorat
	Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas		Persentase Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang terpenuhi dengan nilai > 90	100%	**1,206,845,086**	**1,117,828,245**	
			Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBK	100%			
			Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBBM	100%			
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**				**1,206,845,086**	**1,117,828,245**	
	Terlaksananya pendampingan dan asistensi di bidang reformasi birokasi, pemberantasan korupsi dan penegakan integritas		Persentase Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	100%	**1,206,845,086**	**1,117,828,245**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Korupsi yang Telah Dilaksanakan				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan dan Asistensi ZI - WBK	2 perangkat daerah			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan dan Asistensi ZI - WBBM	1 perangkat daerah			
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	260,310,000	260,310,000	Inspektorat
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	581,111,086	492,094,245	Inspektorat

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	365,424,000	365,424,000	Inspektorat
	Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Evaluasi, serta Verifikasi terkait Akuntabilitas Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang disusun	100%	**560,200,000**	**560,200,000**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**560,200,000**	**560,200,000**	
	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan terkait urusan pemerintah daerah		Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	7 Rekomendasi	**560,200,000**	**560,200,000**	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	306,550,000	306,550,000	Inspektorat
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	253,650,000	253,650,000	Inspektorat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1,362,464,313,792**	**1,386,384,644,474**	
7.01	**KECAMATAN**				**1,362,464,313,792**	**1,386,384,644,474**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**18,677,361,073**	**18,887,337,085**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,08 %	**18,677,361,073**	**18,887,337,085**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,001**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Asemrowo	100%	**2,600,000**	**2,665,001**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Asemrowo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,001	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**15,643,123,459**	**15,763,095,322**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**15,643,123,459**	**15,763,095,322**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Asemrowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15,643,123,459	15,763,095,322	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**2,923,872,614**	**3,042,259,609**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**2,923,872,614**	**3,042,259,609**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Asemrowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	2,923,872,614	3,042,259,609	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**107,765,000**	**79,317,153**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**107,765,000**	**79,317,153**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	107,765,000	79,317,153	Kec. Asemrowo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**74,124,000**	**74,124,000**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**74,124,000**	**74,124,000**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**74,124,000**	**74,124,000**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 lembaga	**74,124,000**	**74,124,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74,124,000	74,124,000	Kec. Asemrowo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**9,261,581,226**	**9,491,857,742**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**9,261,581,226**	**9,491,857,742**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**46,020,000**	**46,020,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	60 kegiatan	**46,020,000**	**46,020,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	46,020,000	46,020,000	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**9,215,561,226**	**9,445,837,742**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**9,211,061,226**	**9,441,337,742**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Asemrowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,568,292,092	2,632,499,390	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,675,856,375	1,717,752,782	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,717,872,486	1,760,819,296	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	639,509,417	655,497,151	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	697,131,816	714,560,110	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Asemrowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,912,399,040	1,960,209,013	Kec. Asemrowo
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**4,500,000**	**4,500,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Asemrowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,500,000	4,500,000	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**128,772,000**	**120,959,205**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**128,772,000**	**120,959,205**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**128,772,000**	**120,959,205**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	**128,772,000**	**120,959,205**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Kec. Asemrowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	6 Laporan	128,772,000	120,959,205	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21,903,533,599**	**22,248,146,855**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,18 %	**21,903,533,599**	**22,248,146,855**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Benowo	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Benowo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Benowo
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**18,396,162,478**	**18,537,339,853**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,396,162,478**	**18,537,339,853**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Benowo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	18,396,162,478	18,537,339,853	Kec. Benowo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3,412,123,621**	**3,613,787,390**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,412,123,621**	**3,613,787,390**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benowo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3,412,123,621	3,613,787,390	Kec. Benowo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**92,647,500**	**94,419,612**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**92,647,500**	**94,419,612**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	92,647,500	94,419,612	Kec. Benowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**116,251,200**	**116,251,200**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**116,251,200**	**116,251,200**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**116,251,200**	**116,251,200**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	198 lembaga	**116,251,200**	**116,251,200**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116,251,200	116,251,200	Kec. Benowo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**14,634,687,824**	**14,892,075,324**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**14,634,687,824**	**14,892,075,324**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**112,500,000**	**6,892,825**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	6 kegiatan	**112,500,000**	**6,892,825**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	112,500,000	6,892,825	Kec. Benowo
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**14,522,187,824**	**14,885,182,499**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	4 Lokasi	**14,519,787,824**	**14,882,782,499**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,134,451,989	2,187,813,286	Kec. Benowo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,996,790,064	2,046,709,813	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,600,675,799	2,665,692,690	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,968,851,365	3,043,072,645	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Romokalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	447,932,056	459,130,357	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kandangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,538,900,229	1,577,372,732	Kec. Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sememi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,228,728,459	2,284,446,667	Kec. Benowo
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	603,457,863	618,544,309	Kec. Benowo
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan [3022]		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**2,400,000**	**2,400,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Benowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2,400,000	2,400,000	Kec. Benowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**174,625,050**	**174,625,050**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**174,625,050**	**174,625,050**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**174,625,050**	**174,625,050**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**174,625,050**	**174,625,050**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Kec. Benowo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	12 Laporan	174,625,050	174,625,050	Kec. Benowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**23,500,410,785**	**23,777,037,421**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.14%	**23,500,410,785**	**23,777,037,421**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Bubutan	100%	**2,600,000**	**2,665,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bubutan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,000	Kec. Bubutan
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**18,672,370,679**	**18,814,574,610**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,672,370,679**	**18,814,574,610**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	18,672,370,679	18,814,574,610	Kec. Bubutan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,744,665,106**	**4,879,022,811**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,744,665,106**	**4,879,022,811**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bubutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4,744,665,106	4,879,022,811	Kec. Bubutan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**80,775,000**	**80,775,000**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**80,775,000**	**80,775,000**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	80,775,000	80,775,000	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**208,071,401**	**208,188,139**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**208,071,401**	**208,188,139**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**208,071,401**	**208,188,139**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 lembaga	**208,071,401**	**208,188,139**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	208,071,401	208,188,139	Kec. Bubutan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**21,969,491,074**	**22,514,115,819**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62.58%	**21,969,491,074**	**22,514,115,819**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**180,000,000**	**180,000,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	1 kegiatan	**180,000,000**	**180,000,000**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	180,000,000	180,000,000	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**21,789,491,074**	**22,334,115,819**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**21,784,991,074**	**22,329,615,819**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	3,364,073,867	3,448,175,709	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,661,505,855	1,703,043,499	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,174,983,141	2,229,357,716	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,041,393,309	2,092,428,139	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	886,603,923	908,769,020	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,992,619,452	2,042,434,935	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	1,997,600,000	2,047,539,997	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,929,758,484	1,978,002,443	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3,589,053,043	3,678,779,364	Kec. Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,147,400,000	2,201,084,997	Kec. Bubutan
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**4,500,000**	**4,500,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bubutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,500,000	4,500,000	Kec. Bubutan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**160,965,000**	**160,965,000**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**160,965,000**	**160,965,000**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**160,965,000**	**160,965,000**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**160,965,000**	**160,965,000**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	160,965,000	160,965,000	Kec. Bubutan
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**22,464,870,807**	**22,647,815,593**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.37%	**22,464,870,807**	**22,647,815,593**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Bulak	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Bulak
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**17,673,280,959**	**17,809,054,006**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,673,280,959**	**17,809,054,006**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	17,673,280,959	17,809,054,006	Kec. Bulak
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,703,227,348**	**4,713,129,803**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,703,227,348**	**4,713,129,803**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4,703,227,348	4,713,129,803	Kec. Bulak
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**85,762,500**	**123,031,784**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**85,762,500**	**123,031,784**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	85,762,500	123,031,784	Kec. Bulak
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**94,576,800**	**94,576,800**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**94,576,800**	**94,576,800**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**94,576,800**	**94,576,800**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 lembaga	**94,576,800**	**94,576,800**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	94,576,800	94,576,800	Kec. Bulak
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**10,721,752,931**	**10,987,246,739**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	88.50%	**10,721,752,931**	**10,987,246,739**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**72,000,000**	**72,000,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	4 kegiatan	**72,000,000**	**72,000,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	72,000,000	72,000,000	Kec. Bulak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**10,649,752,931**	**10,915,246,739**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**10,619,752,931**	**10,885,246,739**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,755,142,230	1,799,020,783	Kec. Bulak
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,522,341,531	1,560,400,067	Kec. Bulak
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,365,649,985	1,399,791,233	Kec. Bulak
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,527,609,144	1,565,799,370	Kec. Bulak
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	709,120,183	726,848,187	Kec. Bulak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	521,375,667	534,410,058	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,437,275,361	1,473,207,243	Kec. Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,781,238,830	1,825,769,798	Kec. Bulak
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**30,000,000**	**30,000,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bulak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	30,000,000	Kec. Bulak
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**107,310,000**	**187,525,191**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**107,310,000**	**187,525,191**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**107,310,000**	**187,525,191**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	**107,310,000**	**187,525,191**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	107,310,000	187,525,191	Kec. Bulak
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21,391,328,883**	**21,615,542,291**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.29%	**21,391,328,883**	**21,615,542,291**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Dukuh Pakis	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**17,430,536,975**	**17,564,209,764**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,430,536,975**	**17,564,209,764**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	17,430,536,975	17,564,209,764	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3,824,656,908**	**3,944,314,405**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,824,656,908**	**3,944,314,405**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,824,656,908	3,944,314,405	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**133,535,000**	**104,418,122**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**133,535,000**	**104,418,122**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	133,535,000	104,418,122	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**140,519,344**	**140,602,728**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**140,519,344**	**140,602,728**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**140,519,344**	**140,602,728**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 lembaga	**140,519,344**	**140,602,728**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	140,519,344	140,602,728	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**14,527,557,290**	**14,888,706,200**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	68.32%	**14,527,557,290**	**14,888,706,200**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**78,000,000**	**78,000,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	25 kegiatan	**78,000,000**	**78,000,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	78,000,000	78,000,000	Kec. Dukuh Pakis

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**14,449,557,290**	**14,810,706,200**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	8 Lokasi	**14,445,957,290**	**14,807,106,200**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,394,892,531	1,429,764,842	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,371,438,888	3,455,724,855	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,156,780,683	1,185,700,198	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,020,943,766	2,071,467,357	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	2,329,087,193	2,387,314,369	Kec. Dukuh Pakis

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	966,600,000	990,764,999	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,761,290,250	1,805,322,504	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,444,923,979	1,481,047,076	Kec. Dukuh Pakis
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**3,600,000**	**3,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,600,000	3,600,000	Kec. Dukuh Pakis
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**141,649,200**	**159,139,230**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**141,649,200**	**159,139,230**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**141,649,200**	**159,139,230**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**141,649,200**	**159,139,230**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	141,649,200	159,139,230	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**22,649,386,376**	**22,896,250,282**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,50 %	**22,649,386,376**	**22,896,250,282**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Gayungan	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Gayungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Gayungan
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**18,891,139,482**	**19,036,869,215**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,891,139,482**	**19,036,869,215**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gayungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	18,891,139,482	19,036,869,215	Kec. Gayungan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3,660,374,894**	**3,761,509,067**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,660,374,894**	**3,761,509,067**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gayungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3,660,374,894	3,761,509,067	Kec. Gayungan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**95,272,000**	**95,272,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**95,272,000**	**95,272,000**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	95,272,000	95,272,000	Kec. Gayungan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**130,677,600**	**130,677,600**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**130,677,600**	**130,677,600**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**130,677,600**	**130,677,600**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 lembaga	**130,677,600**	**130,677,600**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	130,677,600	130,677,600	Kec. Gayungan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**14,015,715,825**	**14,365,846,199**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**14,015,715,825**	**14,365,846,199**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**6,900,000**	**6,900,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	4 kegiatan	**6,900,000**	**6,900,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	6,900,000	6,900,000	Kec. Gayungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**14,008,815,825**	**14,358,946,199**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**14,005,215,825**	**14,355,346,199**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,668,570,417	2,735,284,673	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,485,895,632	1,523,043,021	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gayungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,137,866,558	2,191,313,219	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ketintang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,627,210,102	1,667,890,352	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,287,357,549	1,319,541,486	Kec. Gayungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,592,660,034	1,632,476,532	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,044,795,488	2,095,915,372	Kec. Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ketintang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,160,860,045	1,189,881,544	Kec. Gayungan
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**3,600,000**	**3,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gayungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,600,000	3,600,000	Kec. Gayungan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**145,941,600**	**145,941,600**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**145,941,600**	**145,941,600**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**145,941,600**	**145,941,600**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**145,941,600**	**145,941,600**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Gayungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	145,941,600	145,941,600	Kec. Gayungan
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**24,574,215,182**	**24,854,093,516**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.70%	**24,574,215,182**	**24,854,093,516**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Genteng	100%	**2,600,000**	**2,665,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Genteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,000	Kec. Genteng
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**19,750,082,181**	**19,901,416,923**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,750,082,181**	**19,901,416,923**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Genteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	19,750,082,181	19,901,416,923	Kec. Genteng
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,724,408,001**	**4,822,208,870**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,724,408,001**	**4,822,208,870**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Genteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4,724,408,001	4,822,208,870	Kec. Genteng
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**97,125,000**	**127,802,723**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**97,125,000**	**127,802,723**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	97,125,000	127,802,723	Kec. Genteng
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**318,860,160**	**322,710,720**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**318,860,160**	**322,710,720**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**318,860,160**	**322,710,720**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 lembaga	**318,860,160**	**322,710,720**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	318,860,160	322,710,720	Kec. Genteng
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**15,768,719,702**	**16,162,337,670**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**15,768,719,702**	**16,162,337,670**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**13,500,000**	**13,500,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	2 kegiatan	**13,500,000**	**13,500,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	13,500,000	13,500,000	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**15,755,219,702**	**16,148,837,670**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**15,744,719,702**	**16,138,337,670**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Peneleh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,175,081,165	1,204,458,192	Kec. Genteng
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,413,039,463	1,448,365,447	Kec. Genteng
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,780,988,714	1,825,513,429	Kec. Genteng
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Genteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,231,396,576	1,262,181,489	Kec. Genteng
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ketabang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,147,642,354	1,176,333,411	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,397,257,824	1,432,189,268	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,934,506,252	1,982,868,905	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ketabang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,607,280,275	1,647,462,279	Kec. Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Peneleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,250,566,528	2,306,830,688	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,806,960,551	1,852,134,562	Kec. Genteng
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**10,500,000**	**10,500,000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Genteng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10,500,000	10,500,000	Kec. Genteng
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**128,772,000**	**128,772,000**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai	100%	**128,772,000**	**128,772,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			standar pelayanan atau SOP				
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**128,772,000**	**128,772,000**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**128,772,000**	**128,772,000**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Genteng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	128,772,000	128,772,000	Kec. Genteng
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**27,765,984,846**	**28,084,506,969**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,61 %	**27,765,984,846**	**28,084,506,969**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Gubeng	100%	**2,600,000**	**2,665,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Gubeng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,000	Kec. Gubeng
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**21,802,841,459**	**21,969,848,605**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**21,802,841,459**	**21,969,848,605**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gubeng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	21,802,841,459	21,969,848,605	Kec. Gubeng
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**5,818,918,387**	**5,955,406,864**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk	100%	**5,818,918,387**	**5,955,406,864**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			menunjang administrasi umum yang disediakan				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gubeng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,818,918,387	5,955,406,864	Kec. Gubeng
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**141,625,000**	**156,586,500**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**141,625,000**	**156,586,500**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	141,625,000	156,586,500	Kec. Gubeng
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**230,284,800**	**234,784,800**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**230,284,800**	**234,784,800**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**230,284,800**	**234,784,800**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 lembaga	**230,284,800**	**234,784,800**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	230,284,800	234,784,800	Kec. Gubeng
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**22,052,781,831**	**22,603,351,342**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**22,052,781,831**	**22,603,351,342**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**101,100,000**	**102,900,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	12 Kegiatan	**101,100,000**	**102,900,000**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	101,100,000	102,900,000	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**21,951,681,831**	**22,500,451,342**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**21,947,181,831**	**22,495,861,342**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,691,145,961	1,733,424,607	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baratajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,464,160,718	1,500,764,734	Kec. Gubeng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kertajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,132,271,358	2,185,578,139	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Airlangga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,120,447,745	2,173,458,935	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gubeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,760,398,548	1,804,408,509	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mojo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,232,355,626	2,288,164,513	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baratajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,971,160,992	2,020,440,014	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gubeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,026,480,000	1,052,141,998	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kertajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,947,960,000	1,996,658,997	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mojo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,698,200,000	2,765,654,996	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1,235,800,883	1,266,695,903	Kec. Gubeng
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Airlangga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,666,800,000	1,708,469,997	Kec. Gubeng
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**4,500,000**	**4,590,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gubeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,500,000	4,590,000	Kec. Gubeng
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**188,865,600**	**193,158,000**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**188,865,600**	**193,158,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**188,865,600**	**193,158,000**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	**188,865,600**	**193,158,000**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Gubeng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	188,865,600	193,158,000	Kec. Gubeng
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21,151,521,038**	**21,822,764,882**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap	100%	**21,151,521,038**	**21,822,764,882**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesekretariatan				
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Gunung Anyar	100%	**2,600,000**	**2,665,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,000	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16,090,934,172**	**16,214,109,903**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,090,934,172**	**16,214,109,903**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	16,090,934,172	16,214,109,903	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,956,538,367**	**5,504,541,480**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100%	**4,956,538,367**	**5,504,541,480**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			administrasi umum yang disediakan				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	4,956,538,367	5,504,541,480	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**101,448,499**	**101,448,499**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	10%	**101,448,499**	**101,448,499**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	101,448,499	101,448,499	Kec. Gunung Anyar
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**118,965,606**	**118,965,606**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan	99.30%	**118,965,606**	**118,965,606**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			sesuai standar pelayanan atau SOP				
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**118,965,606**	**118,965,606**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 lembaga	**118,965,606**	**118,965,606**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118,965,606	118,965,606	Kec. Gunung Anyar
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**11,327,130,892**	**11,610,052,133**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**11,327,130,892**	**11,610,052,133**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**9,252,516**	**9,252,516**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	4 kegiatan	**9,252,516**	**9,252,516**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	9,252,516	9,252,516	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**11,317,878,376**	**11,600,799,617**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	3 Lokasi	**11,316,850,319**	**11,599,771,560**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,598,221,167	1,638,176,694	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,532,374,456	1,570,683,815	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,544,275,660	1,582,882,549	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,915,938,669	1,963,837,133	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,316,240,367	1,349,146,374	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	795,600,000	815,489,999	Kec. Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,174,200,000	1,203,554,998	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,440,000,000	1,475,999,998	Kec. Gunung Anyar
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**1,028,057**	**1,028,057**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,028,057	1,028,057	Kec. Gunung Anyar
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**193,284,323**	**193,284,323**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai	100%	**193,284,323**	**193,284,323**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			standar pelayanan atau SOP				
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**193,284,323**	**193,284,323**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**193,284,323**	**193,284,323**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Gunung Anyar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	193,284,323	193,284,323	Kec. Gunung Anyar
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**22,397,266,773**	**22,638,122,312**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.59%	**22,397,266,773**	**22,638,122,312**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Jambangan	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jambangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Jambangan
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**19,018,592,312**	**19,164,922,524**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,018,592,312**	**19,164,922,524**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jambangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	19,018,592,312	19,164,922,524	Kec. Jambangan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3,247,010,961**	**3,341,536,288**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,247,010,961**	**3,341,536,288**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jambangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3,247,010,961	3,341,536,288	Kec. Jambangan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**129,063,500**	**129,063,500**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**129,063,500**	**129,063,500**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	129,063,500	129,063,500	Kec. Jambangan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**143,904,818**	**143,904,818**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**143,904,818**	**143,904,818**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**143,904,818**	**143,904,818**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 lembaga	**143,904,818**	**143,904,818**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	143,904,818	143,904,818	Kec. Jambangan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**13,210,791,840**	**13,539,434,166**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	25%	**13,210,791,840**	**13,539,434,166**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**61,468,000**	**61,468,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	1 kegiatan	**61,468,000**	**61,468,000**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	61,468,000	61,468,000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**13,149,323,840**	**13,477,966,166**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**13,145,693,840**	**13,474,336,166**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	3,437,567,215	3,523,506,390	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,518,365,254	1,556,324,383	Kec. Jambangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,744,251,720	1,787,858,010	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebonsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,109,010,796	2,161,736,063	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	777,000,000	796,424,999	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,161,806,070	1,190,851,220	Kec. Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	12 Pokmas / Ormas	1,729,892,785	1,773,140,102	Kec. Jambangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	667,800,000	684,494,999	Kec. Jambangan
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**3,630,000**	**3,630,000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Jambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,630,000	3,630,000	Kec. Jambangan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**193,335,090**	**193,335,090**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan		Persentase pelaksanaan keamanan dan	100%	**193,335,090**	**193,335,090**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	ketertiban umum di wilayah Kecamatan		ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP				
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**193,335,090**	**193,335,090**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**193,335,090**	**193,335,090**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Jambangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	193,335,090	193,335,090	Kec. Jambangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**22,091,258,004**	**22,345,093,691**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,81 %	**22,091,258,004**	**22,345,093,691**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Karangpilang	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangpilang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**17,976,161,913**	**18,114,367,543**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,976,161,913**	**18,114,367,543**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangpilang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	17,976,161,913	18,114,367,543	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,004,183,841**	**4,119,813,898**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,004,183,841**	**4,119,813,898**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangpilang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	4,004,183,841	4,119,813,898	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**108,312,250**	**108,312,250**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**108,312,250**	**108,312,250**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karangpilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	108,312,250	108,312,250	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**132,677,600**	**132,677,600**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**132,677,600**	**132,677,600**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**132,677,600**	**132,677,600**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 lembaga	**132,677,600**	**132,677,600**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	132,677,600	132,677,600	Kec. Karangpilang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**13,439,659,225**	**13,773,109,486**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**13,439,659,225**	**13,773,109,486**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**90,248,000**	**90,248,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	1 kegiatan	**90,248,000**	**90,248,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90,248,000	90,248,000	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**13,349,411,225**	**13,682,861,486**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**13,338,011,225**	**13,671,461,486**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,586,667,620	1,626,334,308	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	708,628,384	726,344,093	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,766,900,910	1,811,073,430	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,289,220,276	3,371,450,778	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	636,000,000	651,899,999	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3,142,827,627	3,221,398,313	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,757,166,408	1,801,095,566	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	450,600,000	461,864,999	Kec. Karangpilang
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**11,400,000**	**11,400,000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Karangpilang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11,400,000	11,400,000	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**275,779,800**	**275,779,800**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**275,779,800**	**275,779,800**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**275,779,800**	**275,779,800**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**275,779,800**	**275,779,800**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Kec. Karangpilang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	12 Laporan	275,779,800	275,779,800	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21,464,029,463**	**22,101,406,291**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.32%	**21,464,029,463**	**22,101,406,291**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**22,927,520**	**23,059,232**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Kenjeran	100%	**22,927,520**	**23,059,232**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenjeran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	22,927,520	23,059,232	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16,694,658,086**	**16,821,983,007**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,694,658,086**	**16,821,983,007**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	16,694,658,086	16,821,983,007	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,629,323,857**	**5,139,244,052**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,629,323,857**	**5,139,244,052**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenjeran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,629,323,857	5,139,244,052	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**117,120,000**	**117,120,000**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**117,120,000**	**117,120,000**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	117,120,000	117,120,000	Kec. Kenjeran

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**37,437,600**	**37,437,600**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**37,437,600**	**37,437,600**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**37,437,600**	**37,437,600**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 lembaga	**37,437,600**	**37,437,600**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37,437,600	37,437,600	Kec. Kenjeran
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**19,389,470,148**	**19,488,645,482**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**19,389,470,148**	**19,488,645,482**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**8,550,000**	**6,750,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	1 kegiatan	**8,550,000**	**6,750,000**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8,550,000	6,750,000	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**19,380,920,148**	**19,481,895,482**	
	Output [Kegiatan] Aksi Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**19,379,970,148**	**19,481,145,482**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	4,148,565,572	4,174,903,998	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	4,155,765,570	4,186,903,998	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,571,419,503	2,607,668,743	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,561,819,503	2,607,668,743	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,073,600,000	2,078,400,000	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,057,200,000	1,030,800,000	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,024,400,000	2,024,400,000	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	787,200,000	770,400,000	Kec. Kenjeran
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**950,000**	**750,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	950,000	750,000	Kec. Kenjeran

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**178,608,804**	**178,753,760**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**178,608,804**	**178,753,760**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**178,608,804**	**178,753,760**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	**178,608,804**	**178,753,760**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	12 Laporan	178,608,804	178,753,760	Kec. Kenjeran

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**23,091,726,244**	**23,310,707,211**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44%	**23,091,726,244**	**23,310,707,211**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Krembangan	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Krembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Krembangan
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**17,334,008,295**	**17,465,817,912**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,334,008,295**	**17,465,817,912**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Krembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	17,334,008,295	17,465,817,912	Kec. Krembangan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**5,649,987,949**	**5,737,159,299**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,649,987,949**	**5,737,159,299**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Krembangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	5,649,987,949	5,737,159,299	Kec. Krembangan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**105,130,000**	**105,130,000**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**105,130,000**	**105,130,000**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Krembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	105,130,000	105,130,000	Kec. Krembangan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**203,643,190**	**203,643,190**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**203,643,190**	**203,643,190**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**203,643,190**	**203,643,190**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 lembaga	**203,643,190**	**203,643,190**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	203,643,190	203,643,190	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**22,653,118,935**	**23,216,520,875**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	**22,653,118,935**	**23,216,520,875**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**105,040,000**	**105,040,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	5 kegiatan	**105,040,000**	**105,040,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	105,040,000	105,040,000	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**22,548,078,935**	**23,111,480,875**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**22,536,078,935**	**23,099,480,875**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	3,637,585,529	3,728,525,162	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	477,894,543	489,841,906	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Perak Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,459,703,316	2,521,195,895	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dupak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,109,520,617	1,137,258,631	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,264,002,650	1,295,602,714	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Perak Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,869,548,069	1,916,286,768	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	3,568,284,442	3,657,491,548	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	3,710,842,385	3,803,613,439	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dupak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2,644,157,247	2,710,261,174	Kec. Krembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,794,540,137	1,839,403,638	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**12,000,000**	**12,000,000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Krembangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	12,000,000	Kec. Krembangan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**160,830,000**	**229,639,461**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**160,830,000**	**229,639,461**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**160,830,000**	**229,639,461**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan		Objek yang berpotensi mengganggu	12 Lokasi	**160,830,000**	**229,639,461**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepala Daerah wilayah Kecamatan		ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Krembangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	160,830,000	229,639,461	Kec. Krembangan
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**28,245,625,112**	**28,546,246,116**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26%	**28,245,625,112**	**28,546,246,116**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Lakarsantri	100%	**2,600,000**	**2,665,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lakarsantri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,000	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23,419,912,966**	**23,599,891,141**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,419,912,966**	**23,599,891,141**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lakarsantri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	23,419,912,966	23,599,891,141	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,704,100,332**	**4,821,702,865**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,704,100,332**	**4,821,702,865**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lakarsantri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,704,100,332	4,821,702,865	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**119,011,814**	**121,987,110**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**119,011,814**	**121,987,110**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	119,011,814	121,987,110	Kec. Lakarsantri
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**38,042,322**	**38,993,380**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**38,042,322**	**38,993,380**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**				**38,042,322**	**38,993,380**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	200 lembaga	**38,042,322**	**38,993,380**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	38,042,322	38,993,380	Kec. Lakarsantri
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**18,025,277,110**	**18,475,909,012**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**18,025,277,110**	**18,475,909,012**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**8,688,105**	**8,905,309**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	2 kegiatan	**8,688,105**	**8,905,309**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8,688,105	8,905,309	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**18,016,589,005**	**18,467,003,703**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**18,015,623,660**	**18,466,014,225**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jeruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,547,363,329	1,586,047,410	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	2,108,972,877	2,161,697,196	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,245,241,224	3,326,372,250	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,929,753,951	1,977,997,797	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	2,518,921,643	2,581,894,680	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,062,244,117	2,113,800,217	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	781,800,000	801,344,999	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	415,800,000	426,194,999	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	727,800,000	745,994,999	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,393,800,000	1,428,644,998	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	444,000,000	455,099,999	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jeruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	839,926,519	860,924,681	Kec. Lakarsantri
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah	3 Laporan	**965,345**	**989,478**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Perencanaan Pembangunan Kewilayahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Lakarsantri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	965,345	989,478	Kec. Lakarsantri
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**181,493,834**	**186,031,180**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**181,493,834**	**186,031,180**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**181,493,834**	**186,031,180**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 Lokasi	**181,493,834**	**186,031,180**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			yang dipantau dan ditertibkan				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Lakarsantri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	181,493,834	186,031,180	Kec. Lakarsantri
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**28,806,443,436**	**29,134,144,847**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,03 %	**28,806,443,436**	**29,134,144,847**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,711,807**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan	100%	**2,600,000**	**2,711,807**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			evaluasi pada Kecamatan Mulyorejo				
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,711,807	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23,043,997,279**	**23,220,823,768**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,043,997,279**	**23,220,823,768**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	23,043,997,279	23,220,823,768	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**5,617,720,135**	**5,768,483,250**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,617,720,135**	**5,768,483,250**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	5,617,720,135	5,768,483,250	Kec. Mulyorejo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**142,126,022**	**142,126,022**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**142,126,022**	**142,126,022**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	142,126,022	142,126,022	Kec. Mulyorejo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**45,430,816**	**45,430,816**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**45,430,816**	**45,430,816**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**45,430,816**	**45,430,816**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 lembaga	**45,430,816**	**45,430,816**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	45,430,816	45,430,816	Kec. Mulyorejo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**22,157,192,209**	**22,710,862,594**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87.50%	**22,157,192,209**	**22,710,862,594**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**10,375,490**	**10,375,490**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	12 kegiatan	**10,375,490**	**10,375,490**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10,375,490	10,375,490	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**22,146,816,719**	**22,700,487,104**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**22,145,663,887**	**22,699,305,451**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,620,569,183	3,711,083,407	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,816,025,815	2,886,426,456	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,229,080,101	2,284,807,100	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,013,081,302	2,063,408,332	Kec. Mulyorejo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,158,659,044	2,212,625,517	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,533,118,636	1,571,446,600	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	975,675,188	1,000,067,066	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,429,025,280	1,464,750,910	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	629,598,965	645,338,938	Kec. Mulyorejo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,376,400,000	1,410,809,998	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,060,630,373	2,112,146,129	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,303,800,000	1,336,394,998	Kec. Mulyorejo
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**1,152,832**	**1,181,653**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,152,832	1,181,653	Kec. Mulyorejo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**216,743,159**	**216,743,159**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**216,743,159**	**216,743,159**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**216,743,159**	**216,743,159**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	**216,743,159**	**216,743,159**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	216,743,159	216,743,159	Kec. Mulyorejo
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**22,923,569,638**	**23,204,584,593**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,2 %	**22,923,569,638**	**23,204,584,593**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**4,400,000**	**4,400,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Pabean Cantian	100%	**4,400,000**	**4,400,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	4,400,000	4,400,000	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**17,474,675,538**	**17,608,622,788**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,474,675,538**	**17,608,622,788**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	17,474,675,538	17,608,622,788	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**5,305,935,939**	**5,446,075,736**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,305,935,939**	**5,446,075,736**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,305,935,939	5,446,075,736	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**138,558,161**	**145,486,069**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**138,558,161**	**145,486,069**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	138,558,161	145,486,069	Kec. Pabean Cantian
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**220,943,392**	**220,992,843**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**220,943,392**	**220,992,843**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**220,943,392**	**220,992,843**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	**220,943,392**	**220,992,843**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	220,943,392	220,992,843	Kec. Pabean Cantian
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**15,945,352,919**	**16,342,274,039**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**15,945,352,919**	**16,342,274,039**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**59,207,200**	**59,207,200**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	50 kegiatan	**59,207,200**	**59,207,200**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	59,207,200	59,207,200	Kec. Pabean Cantian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**15,886,145,719**	**16,283,066,839**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**15,876,845,719**	**16,273,766,839**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,474,627,016	2,536,492,688	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bongkaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	762,581,708	781,646,250	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,521,608,086	1,559,648,286	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Perak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,493,889,245	1,531,236,474	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,984,560,549	2,034,174,560	Kec. Pabean Cantian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Perak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3,982,261,234	4,081,817,759	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bongkaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,929,557,330	1,977,796,260	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,727,760,551	1,770,954,562	Kec. Pabean Cantian
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**9,300,000**	**9,300,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9,300,000	9,300,000	Kec. Pabean Cantian
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**146,340,586**	**146,340,586**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**146,340,586**	**146,340,586**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**146,340,586**	**146,340,586**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	**146,340,586**	**146,340,586**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pabean Cantian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	146,340,586	146,340,586	Kec. Pabean Cantian
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21,797,223,095**	**22,060,700,600**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,45 %	**21,797,223,095**	**22,060,700,600**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Pakal	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pakal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Pakal
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16,741,522,181**	**16,869,348,876**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,741,522,181**	**16,869,348,876**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	16,741,522,181	16,869,348,876	Kec. Pakal
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,917,803,364**	**5,053,454,174**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,917,803,364**	**5,053,454,174**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pakal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4,917,803,364	5,053,454,174	Kec. Pakal
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**135,297,550**	**135,297,550**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**135,297,550**	**135,297,550**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	135,297,550	135,297,550	Kec. Pakal
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**145,137,600**	**145,137,600**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**145,137,600**	**145,137,600**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**145,137,600**	**145,137,600**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 lembaga	**145,137,600**	**145,137,600**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	145,137,600	145,137,600	Kec. Pakal
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**16,762,951,269**	**17,179,852,126**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	88%	**16,762,951,269**	**17,179,852,126**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**82,416,000**	**82,416,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	4 kegiatan	**82,416,000**	**82,416,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	82,416,000	82,416,000	Kec. Pakal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**16,680,535,269**	**17,097,436,126**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**16,676,035,269**	**17,092,936,126**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,570,888,070	3,660,160,266	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,960,021,791	3,034,022,331	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2,306,798,987	2,364,468,958	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	3,008,326,421	3,083,534,577	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 Pokmas / Ormas	2,248,800,000	2,305,019,997	Kec. Pakal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	902,400,000	924,959,999	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	932,400,000	955,709,999	Kec. Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	746,400,000	765,059,999	Kec. Pakal
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**4,500,000**	**4,500,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pakal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,500,000	4,500,000	Kec. Pakal
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**138,276,900**	**138,276,900**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**138,276,900**	**138,276,900**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**138,276,900**	**138,276,900**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**138,276,900**	**138,276,900**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	138,276,900	138,276,900	Kec. Pakal
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**29,183,070,123**	**29,536,174,773**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	**29,183,070,123**	**29,536,174,773**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Rungkut	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rungkut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Rungkut
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**22,506,872,594**	**22,679,408,987**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan AS		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,506,872,594**	**22,679,408,987**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rungkut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	22,506,872,594	22,679,408,987	Kec. Rungkut
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,572,955,929**	**6,753,524,186**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,572,955,929**	**6,753,524,186**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rungkut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,572,955,929	6,753,524,186	Kec. Rungkut
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100,641,600**	**100,641,600**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**100,641,600**	**100,641,600**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100,641,600	100,641,600	Kec. Rungkut
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**408,379,360**	**409,083,201**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**408,379,360**	**409,083,201**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**408,379,360**	**409,083,201**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 lembaga	**408,379,360**	**409,083,201**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	408,379,360	409,083,201	Kec. Rungkut
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**20,669,453,879**	**21,185,878,296**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**20,669,453,879**	**21,185,878,296**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**12,476,000**	**12,476,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	6 kegiatan	**12,476,000**	**12,476,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	12,476,000	12,476,000	Kec. Rungkut

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**20,656,977,879**	**21,173,402,296**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	4 Lokasi	**20,655,592,683**	**21,171,982,470**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,507,588,637	1,545,278,351	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,145,817,754	1,174,463,196	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,111,570,565	2,164,359,826	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,947,468,404	1,996,155,111	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Penjaringan sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,389,659,156	1,424,400,633	Kec. Rungkut

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,902,511,545	1,950,074,331	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,254,000,000	1,285,349,998	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,121,000,000	2,174,024,997	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penjaringan sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,781,239,022	1,825,769,995	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,577,337,600	1,616,771,038	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,544,600,000	2,608,214,996	Kec. Rungkut
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,372,800,000	1,407,119,998	Kec. Rungkut
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan3 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**1,385,196**	**1,419,826**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rungkut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,385,196	1,419,826	Kec. Rungkut
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**153,829,800**	**153,829,800**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**153,829,800**	**153,829,800**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**153,829,800**	**153,829,800**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	**153,829,800**	**153,829,800**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Rungkut	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	153,829,800	153,829,800	Kec. Rungkut
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**20,734,310,082**	**20,981,390,961**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,46 %	**20,734,310,082**	**20,981,390,961**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**7,800,000**	**7,800,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Sambikerep	100%	**7,800,000**	**7,800,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sambikerep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7,800,000	7,800,000	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16,212,969,169**	**16,336,794,876**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,212,969,169**	**16,336,794,876**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	16,212,969,169	16,336,794,876	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,387,317,713**	**4,510,572,885**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,387,317,713**	**4,510,572,885**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambikerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,387,317,713	4,510,572,885	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**126,223,200**	**126,223,200**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan	100%	**126,223,200**	**126,223,200**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemerintah Daerah yang disediakan				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	126,223,200	126,223,200	Kec. Sambikerep
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**249,439,980**	**250,100,589**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**249,439,980**	**250,100,589**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**249,439,980**	**250,100,589**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	262 lembaga	**249,439,980**	**250,100,589**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	249,439,980	250,100,589	Kec. Sambikerep
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**15,009,855,270**	**15,384,571,264**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**15,009,855,270**	**15,384,571,264**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**10,414,615**	**10,414,615**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	2 kegiatan	**10,414,615**	**10,414,615**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10,414,615	10,414,615	Kec. Sambikerep

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**14,999,440,655**	**15,374,156,649**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	10 Lokasi	**14,988,640,655**	**15,363,356,649**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,921,719,823	2,994,762,814	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,279,577,343	2,336,566,773	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,392,210,706	1,427,015,972	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,768,020,120	2,837,220,619	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	462,160,480	473,714,491	Kec. Sambikerep

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	855,832,000	877,227,799	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,933,200,000	1,981,529,997	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,375,920,183	2,435,318,184	Kec. Sambikerep
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**10,800,000**	**10,800,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10,800,000	10,800,000	Kec. Sambikerep
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**164,634,842**	**164,634,842**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**164,634,842**	**164,634,842**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**164,634,842**	**164,634,842**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**164,634,842**	**164,634,842**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	164,634,842	164,634,842	Kec. Sambikerep
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**29,421,009,377**	**29,779,924,462**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,20 %	**29,421,009,377**	**29,779,924,462**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Sawahan	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sawahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Sawahan
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**22,613,251,291**	**22,786,120,140**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**22,613,251,291**	**22,786,120,140**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sawahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	22,613,251,291	22,786,120,140	Kec. Sawahan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,709,411,886**	**6,895,458,122**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,709,411,886**	**6,895,458,122**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sawahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	6,709,411,886	6,895,458,122	Kec. Sawahan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**95,746,200**	**95,746,200**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**95,746,200**	**95,746,200**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	95,746,200	95,746,200	Kec. Sawahan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**320,006,794**	**320,039,761**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**320,006,794**	**320,039,761**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**320,006,794**	**320,039,761**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	**320,006,794**	**320,039,761**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	320,006,794	320,039,761	Kec. Sawahan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**30,594,225,459**	**31,354,469,014**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**30,594,225,459**	**31,354,469,014**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**181,481,503**	**181,481,503**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	4 kegiatan	**181,481,503**	**181,481,503**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	181,481,503	181,481,503	Kec. Sawahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**30,412,743,956**	**31,172,987,511**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**30,409,743,956**	**31,169,987,511**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,867,411,088	2,939,096,361	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3,075,782,632	3,152,677,193	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2,483,416,763	2,545,502,178	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3,377,009,307	3,461,434,535	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	3,164,251,240	3,243,357,516	Kec. Sawahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Petemon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,002,205,072	2,052,260,196	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,181,600,000	2,236,139,997	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,787,000,000	2,856,674,996	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,337,907,763	2,396,355,454	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,700,960,091	1,743,484,091	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petemon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,943,600,000	3,017,189,996	Kec. Sawahan
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,488,600,000	1,525,814,998	Kec. Sawahan
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayaha		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**3,000,000**	**3,000,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sawahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	3,000,000	Kec. Sawahan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**130,919,904**	**130,919,904**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**130,919,904**	**130,919,904**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**130,919,904**	**130,919,904**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**130,919,904**	**130,919,904**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sawahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	130,919,904	130,919,904	Kec. Sawahan
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**25,992,707,734**	**26,310,834,953**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.92%	**25,992,707,734**	**26,310,834,953**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Semampir	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Semampir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Semampir

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**19,553,888,044**	**19,703,486,424**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,553,888,044**	**19,703,486,424**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	19,553,888,044	19,703,486,424	Kec. Semampir
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,277,403,938**	**6,445,932,777**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,277,403,938**	**6,445,932,777**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semampir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6,277,403,938	6,445,932,777	Kec. Semampir
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**158,815,752**	**158,815,752**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**158,815,752**	**158,815,752**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	158,815,752	158,815,752	Kec. Semampir
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**50,765,715**	**50,853,479**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**50,765,715**	**50,853,479**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**50,765,715**	**50,853,479**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamata		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 lembaga	**50,765,715**	**50,853,479**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50,765,715	50,853,479	Kec. Semampir
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**24,464,610,852**	**25,075,904,036**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**24,464,610,852**	**25,075,904,036**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**11,593,875**	**11,593,875**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	1 kegiatan	**11,593,875**	**11,593,875**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	11,593,875	11,593,875	Kec. Semampir
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**24,453,016,977**	**25,064,310,161**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	2 Lokasi	**24,451,728,769**	**25,063,021,953**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,288,071,498	1,320,273,284	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,372,256,686	2,431,563,100	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,111,316,194	2,164,099,096	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,209,683,736	2,264,925,826	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,630,172,781	2,695,927,097	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,325,389,415	2,383,524,147	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	3,734,400,000	3,827,759,994	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,483,541,451	2,545,629,984	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,598,485,326	2,663,447,455	Kec. Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,698,411,682	2,765,871,970	Kec. Semampir
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayaha	3 Laporan	**1,288,208**	**1,288,208**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Semampir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,288,208	1,288,208	Kec. Semampir
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**242,195,112**	**242,195,112**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**242,195,112**	**242,195,112**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**242,195,112**	**242,195,112**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	**242,195,112**	**242,195,112**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	242,195,112	242,195,112	Kec. Semampir
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**23,740,747,094**	**24,007,865,059**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap	97,32 %	**23,740,747,094**	**24,007,865,059**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesekretariatan				
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Simokerto	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Simokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Simokerto
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**19,521,955,820**	**19,671,537,985**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,521,955,820**	**19,671,537,985**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Simokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	19,521,955,820	19,671,537,985	Kec. Simokerto
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,105,474,743**	**4,223,010,543**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100%	**4,105,474,743**	**4,223,010,543**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			administrasi umum yang disediakan				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Simokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4,105,474,743	4,223,010,543	Kec. Simokerto
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**110,716,531**	**110,716,531**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110,716,531**	**110,716,531**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	110,716,531	110,716,531	Kec. Simokerto
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**210,516,395**	**210,549,362**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan	100%	**210,516,395**	**210,549,362**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			sesuai standar pelayanan atau SOP				
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**210,516,395**	**210,549,362**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamata		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	**210,516,395**	**210,549,362**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	210,516,395	210,549,362	Kec. Simokerto
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**19,182,839,410**	**19,659,795,407**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**19,182,839,410**	**19,659,795,407**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**101,598,400**	**101,598,400**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	6 kegiatan	**101,598,400**	**101,598,400**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	101,598,400	101,598,400	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**19,081,241,010**	**19,558,197,007**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	2 laporan	**19,078,241,010**	**19,555,197,007**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,931,703,033	1,979,995,606	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,225,872,774	2,281,519,590	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,492,151,445	1,529,455,229	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simolawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,093,454,608	2,145,790,970	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidodadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,137,031,712	2,190,457,502	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simokerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,024,360,091	2,074,969,090	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidodadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,532,396,505	1,570,706,415	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,572,420,413	1,611,730,921	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simolawang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,000,570,385	2,050,584,642	Kec. Simokerto
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,068,280,044	2,119,987,042	Kec. Simokerto
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**3,000,000**	**3,000,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Simokerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	3,000,000	Kec. Simokerto
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**168,843,470**	**168,843,470**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**168,843,470**	**168,843,470**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**168,843,470**	**168,843,470**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**168,843,470**	**168,843,470**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Simokerto	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	168,843,470	168,843,470	Kec. Simokerto
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**32,234,179,386**	**32,604,055,380**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26 %	**32,234,179,386**	**32,604,055,380**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Sukolilo	100%	**2,600,000**	**2,665,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sukolilo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,000	Kec. Sukolilo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**25,150,256,246**	**25,343,034,128**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**25,150,256,246**	**25,343,034,128**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukolilo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	25,150,256,246	25,343,034,128	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,906,589,257**	**7,079,254,021**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,906,589,257**	**7,079,254,021**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukolilo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,906,589,257	7,079,254,021	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**174,733,883**	**179,102,231**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**174,733,883**	**179,102,231**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukolilo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	174,733,883	179,102,231	Kec. Sukolilo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**55,853,972**	**57,250,322**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**55,853,972**	**57,250,322**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**55,853,972**	**57,250,322**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	441 lembaga	**55,853,972**	**57,250,322**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	55,853,972	57,250,322	Kec. Sukolilo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**23,888,499,080**	**24,485,711,521**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**23,888,499,080**	**24,485,711,521**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**12,755,931**	**13,074,830**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	4 kegiatan	**12,755,931**	**13,074,830**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12,755,931	13,074,830	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**23,875,743,149**	**24,472,636,691**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	2 Lokasi	**23,874,325,824**	**24,471,183,933**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,623,265,432	2,688,847,064	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keputih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,564,920,818	2,629,043,835	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,575,064,454	2,639,441,061	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,149,207,135	2,202,937,310	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	846,986,965	868,161,638	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Semolowaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,319,710,018	1,352,702,766	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,624,563,901	1,665,177,996	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semolowaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,733,945,165	1,777,293,792	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,965,860,776	2,015,007,292	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,079,462,280	1,106,448,835	Kec. Sukolilo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,204,200,000	1,234,304,998	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,459,800,000	1,496,294,998	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,383,600,000	1,418,189,998	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keputih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,343,738,880	1,377,332,350	Kec. Sukolilo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**1,417,325**	**1,452,758**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukolilo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,417,325	1,452,758	Kec. Sukolilo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**266,470,371**	**273,132,132**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**266,470,371**	**273,132,132**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**266,470,371**	**273,132,132**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan		Objek yang berpotensi mengganggu	11 Lokasi	**266,470,371**	**273,132,132**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepala Daerah wilayah Kecamatan		ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sukolilo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	266,470,371	273,132,132	Kec. Sukolilo
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**26,934,743,403**	**27,250,796,406**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,29 %	**26,934,743,403**	**27,250,796,406**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Sukomanunggal	100%	**2,600,000**	**2,665,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,000	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**20,561,038,913**	**20,717,749,274**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**20,561,038,913**	**20,717,749,274**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	20,561,038,913	20,717,749,274	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,213,895,476**	**6,369,242,892**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,213,895,476**	**6,369,242,892**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6,213,895,476	6,369,242,892	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**157,209,014**	**161,139,240**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**157,209,014**	**161,139,240**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	157,209,014	161,139,240	Kec. Sukomanunggal
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**50,252,119**	**51,508,422**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**50,252,119**	**51,508,422**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**				**50,252,119**	**51,508,422**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 lembaga	**50,252,119**	**51,508,422**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50,252,119	51,508,422	Kec. Sukomanunggal
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**20,797,238,495**	**21,317,169,427**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	**20,797,238,495**	**21,317,169,427**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**11,476,580**	**11,763,495**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	3 Kegiatan	**11,476,580**	**11,763,495**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11,476,580	11,763,495	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**20,785,761,915**	**21,305,405,932**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**20,784,486,740**	**21,304,098,877**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,031,587,213	2,082,376,890	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,751,292,219	2,820,074,520	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,900,624,102	1,948,139,702	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,072,051,336	2,123,852,616	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,630,127,226	1,670,880,404	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,255,116,119	2,311,494,019	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,195,944,824	1,225,843,443	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,375,196,497	1,409,576,407	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,257,200,000	2,313,629,997	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,134,574,425	1,162,938,784	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,106,888,459	1,134,560,669	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,073,884,320	1,100,731,426	Kec. Sukomanunggal
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah	3 Laporan	**1,275,175**	**1,307,055**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Perencanaan Pembangunan Kewilayahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,275,175	1,307,055	Kec. Sukomanunggal
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**239,744,825**	**245,738,447**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**239,744,825**	**245,738,447**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**239,744,825**	**245,738,447**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat	24 Lokasi	**239,744,825**	**245,738,447**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			yang dipantau dan ditertibkan				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	239,744,825	245,738,447	Kec. Sukomanunggal
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**36,166,289,934**	**36,606,091,950**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.92%	**36,166,289,934**	**36,606,091,950**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			evaluasi pada Kecamatan Tambaksari				
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tambaksari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**27,481,022,797**	**27,691,426,774**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**27,481,022,797**	**27,691,426,774**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	27,481,022,797	27,691,426,774	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**8,572,660,137**	**8,802,058,176**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**8,572,660,137**	**8,802,058,176**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambaksari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,572,660,137	8,802,058,176	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**110,007,000**	**110,007,000**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**110,007,000**	**110,007,000**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	110,007,000	110,007,000	Kec. Tambaksari
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**367,996,000**	**367,996,000**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**367,996,000**	**367,996,000**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**367,996,000**	**367,996,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	751 lembaga	**367,996,000**	**367,996,000**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	367,996,000	367,996,000	Kec. Tambaksari
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**35,275,371,700**	**36,160,349,833**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**35,275,371,700**	**36,160,349,833**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**100,077,840**	**105,853,680**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	1 kegiatan	**100,077,840**	**105,853,680**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100,077,840	105,853,680	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**35,175,293,860**	**36,054,496,153**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**35,168,093,860**	**36,047,296,153**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,449,775,635	2,511,020,022	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,276,742,964	2,333,661,535	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,229,687,965	2,285,430,161	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,833,616,116	1,879,456,516	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,488,428,729	2,550,639,443	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,184,812,387	2,239,432,693	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,971,648,842	3,045,940,059	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,999,577,837	3,074,567,278	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,814,380,505	2,884,740,013	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,146,200,000	2,199,854,997	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,237,800,000	1,268,744,998	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,520,280,000	1,558,286,998	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,770,600,000	1,814,864,997	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,063,980,800	2,115,580,317	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,961,962,080	2,011,011,129	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,218,600,000	2,274,064,997	Kec. Tambaksari
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**7,200,000**	**7,200,000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000	7,200,000	Kec. Tambaksari
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**246,412,050**	**246,412,050**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**246,412,050**	**246,412,050**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**246,412,050**	**246,412,050**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 Lokasi	**246,412,050**	**246,412,050**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	246,412,050	246,412,050	Kec. Tambaksari
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**29,525,373,000**	**29,858,801,301**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,20 %	**29,525,373,000**	**29,858,801,301**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Tandes	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tandes	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Tandes

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23,804,526,774**	**23,987,273,900**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,804,526,774**	**23,987,273,900**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tandes	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	23,804,526,774	23,987,273,900	Kec. Tandes
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**5,595,113,626**	**5,745,794,801**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,595,113,626**	**5,745,794,801**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tandes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,595,113,626	5,745,794,801	Kec. Tandes
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**123,132,600**	**123,132,600**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**123,132,600**	**123,132,600**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	123,132,600	123,132,600	Kec. Tandes
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**250,362,807**	**250,574,792**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**250,362,807**	**250,574,792**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**250,362,807**	**250,574,792**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	**250,362,807**	**250,574,792**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	250,362,807	250,574,792	Kec. Tandes
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**22,040,393,430**	**22,596,455,493**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	**22,040,393,430**	**22,596,455,493**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**186,770,112**	**197,166,624**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	12 kegiatan	**186,770,112**	**197,166,624**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	186,770,112	197,166,624	Kec. Tandes
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**21,853,623,318**	**22,399,288,869**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**21,826,623,318**	**22,372,288,869**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Balongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,001,593,745	2,051,633,586	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tandes	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,765,655,753	1,809,797,144	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,779,920,725	1,824,418,740	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,908,171,311	1,955,875,591	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karangpoh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,030,700,881	3,106,468,398	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,716,456,403	2,784,367,809	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Balongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,754,618,900	1,798,484,370	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	886,200,000	908,354,999	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,919,000,000	2,991,974,996	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	753,105,600	771,933,239	Kec. Tandes

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangpoh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,342,200,000	1,375,754,998	Kec. Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tandes	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	969,000,000	993,224,999	Kec. Tandes
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan [3022] Narasi Program: Meningkatnya Inovasi Unggulan berbasis wilayah d		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**27,000,000**	**27,000,000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Tandes	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 Lembaga Kemasyarakatan	27,000,000	27,000,000	Kec. Tandes

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan				
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**266,606,400**	**266,606,400**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**266,606,400**	**266,606,400**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**266,606,400**	**266,606,400**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	**266,606,400**	**266,606,400**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Kec. Tandes	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	12 Laporan	266,606,400	266,606,400	Kec. Tandes

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**23,643,844,727**	**23,923,346,971**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,41 %	**23,643,844,727**	**23,923,346,971**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Tegalsari	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tegalsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**18,508,498,684**	**18,649,934,356**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**18,508,498,684**	**18,649,934,356**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tegalsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	18,508,498,684	18,649,934,356	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**5,032,021,043**	**5,170,087,615**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**5,032,021,043**	**5,170,087,615**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tegalsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	5,032,021,043	5,170,087,615	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100,725,000**	**100,725,000**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**100,725,000**	**100,725,000**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita	Kec. Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	7 Unit	100,725,000	100,725,000	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**176,868,000**	**176,868,000**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**176,868,000**	**176,868,000**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**176,868,000**	**176,868,000**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 lembaga	**176,868,000**	**176,868,000**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	176,868,000	176,868,000	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**21,354,064,608**	**21,887,623,692**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**21,354,064,608**	**21,887,623,692**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**10,800,000**	**10,800,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	2 kegiatan	**10,800,000**	**10,800,000**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10,800,000	10,800,000	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**21,343,264,608**	**21,876,823,692**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**21,342,364,608**	**21,875,923,692**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,008,592,830	2,058,807,648	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keputran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1,992,220,152	2,042,025,653	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	3,482,129,648	3,569,182,884	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1,828,422,443	1,874,133,001	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,703,615,365	2,771,205,745	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,427,635,036	1,463,325,910	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,089,086,972	2,141,314,143	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,273,297,521	2,330,129,956	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,765,140,135	1,809,268,636	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keputran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,772,224,506	1,816,530,116	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan [847]	3 Laporan	**900,000**	**900,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	900,000	900,000	Kec. Tegalsari
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**198,747,600**	**198,747,600**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**198,747,600**	**198,747,600**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**198,747,600**	**198,747,600**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan		Objek yang berpotensi mengganggu	21 Lokasi	**198,747,600**	**198,747,600**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepala Daerah wilayah Kecamatan		ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tegalsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	198,747,600	198,747,600	Kec. Tegalsari
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21,068,645,251**	**21,303,031,556**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,04 %	**21,068,645,251**	**21,303,031,556**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Tenggilis Mejoyo	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**17,215,691,428**	**17,347,486,049**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**17,215,691,428**	**17,347,486,049**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	17,215,691,428	17,347,486,049	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3,753,665,423**	**3,856,257,107**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**3,753,665,423**	**3,856,257,107**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3,753,665,423	3,856,257,107	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**96,688,400**	**96,688,400**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**96,688,400**	**96,688,400**	
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	96,688,400	96,688,400	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**118,639,372**	**118,739,433**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	96.50%	**118,639,372**	**118,739,433**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**				**118,639,372**	**118,739,433**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 lembaga	**118,639,372**	**118,739,433**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118,639,372	118,739,433	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**13,039,133,122**	**13,364,875,179**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**13,039,133,122**	**13,364,875,179**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**7,500,000**	**7,500,000**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	4 kegiatan	**7,500,000**	**7,500,000**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7,500,000	7,500,000	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**13,031,633,122**	**13,357,375,179**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	2 Lokasi	**13,029,683,122**	**13,355,425,179**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,619,653,028	1,660,144,351	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kendangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,180,569,950	1,210,084,197	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kutisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,785,195,608	2,854,825,494	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,213,769,857	2,269,114,100	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kendangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,311,524,768	1,344,312,885	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,133,780,321	1,162,124,827	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,587,960,230	1,627,659,233	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kutisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	1,197,229,360	1,227,160,092	Kec. Tenggilis Mejoyo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Kelurahan				
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**1,950,000**	**1,950,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,950,000	1,950,000	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**126,625,800**	**126,625,800**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**126,625,800**	**126,625,800**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**126,625,800**	**126,625,800**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	**126,625,800**	**126,625,800**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	126,625,800	126,625,800	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**20,920,240,720**	**21,162,380,946**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.46%	**20,920,240,720**	**21,162,380,946**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Wiyung	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Wiyung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Wiyung
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16,457,720,525**	**16,583,086,188**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**16,457,720,525**	**16,583,086,188**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wiyung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	16,457,720,525	16,583,086,188	Kec. Wiyung
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,375,773,695**	**4,492,548,258**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**4,375,773,695**	**4,492,548,258**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wiyung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,375,773,695	4,492,548,258	Kec. Wiyung
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**84,146,500**	**84,146,500**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**84,146,500**	**84,146,500**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	84,146,500	84,146,500	Kec. Wiyung
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**143,906,400**	**143,906,400**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**143,906,400**	**143,906,400**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**143,906,400**	**143,906,400**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	**143,906,400**	**143,906,400**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	143,906,400	143,906,400	Kec. Wiyung
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**14,479,968,149**	**14,843,932,184**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**14,479,968,149**	**14,843,932,184**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**68,731,713**	**72,489,860**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	4 kegiatan	**68,731,713**	**72,489,860**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan						
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	68,731,713	72,489,860	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**14,411,236,436**	**14,771,442,324**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	4 Lokasi	**14,408,236,436**	**14,768,442,324**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wiyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,048,838,705	3,125,059,668	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,869,946,561	1,916,695,222	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1,690,434,808	1,732,695,676	Kec. Wiyung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,682,725,283	2,749,793,411	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,162,571,198	1,191,635,476	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,044,000,000	1,070,099,998	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,866,719,881	1,913,387,875	Kec. Wiyung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wiyung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,043,000,000	1,069,074,998	Kec. Wiyung
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**3,000,000**	**3,000,000**	
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wiyung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	3,000,000	Kec. Wiyung
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**143,149,200**	**143,149,200**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**143,149,200**	**143,149,200**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**143,149,200**	**143,149,200**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	6 Lokasi	**143,149,200**	**143,149,200**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Wiyung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	143,149,200	143,149,200	Kec. Wiyung
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**25,017,574,737**	**25,302,124,985**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap	96,4 %	**25,017,574,737**	**25,302,124,985**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelayanan kesekretariatan				
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,665,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Wonocolo	100%	**2,600,000**	**2,665,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Wonocolo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,665,000	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**19,985,398,980**	**20,138,571,836**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**19,985,398,980**	**20,138,571,836**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	19,985,398,980	20,138,571,836	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4,899,474,766**	**5,027,534,631**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100%	**4,899,474,766**	**5,027,534,631**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			administrasi umum yang disediakan				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonocolo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4,899,474,766	5,027,534,631	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**130,100,991**	**133,353,518**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**130,100,991**	**133,353,518**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130,100,991	133,353,518	Kec. Wonocolo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**186,746,400**	**186,746,400**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan	100%	**186,746,400**	**186,746,400**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			sesuai standar pelayanan atau SOP				
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**186,746,400**	**186,746,400**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 lembaga	**186,746,400**	**186,746,400**	
7.01.02.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	186,746,400	186,746,400	Kec. Wonocolo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**17,507,905,687**	**17,948,235,212**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	**17,507,905,687**	**17,948,235,212**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**144,979,670**	**151,743,820**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	1 kegiatan	**144,979,670**	**151,743,820**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	144,979,670	151,743,820	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**17,362,926,017**	**17,796,491,392**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	1 Lokasi	**17,342,616,017**	**17,776,181,392**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	3,244,487,902	3,325,600,095	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,278,051,560	3,360,002,844	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,867,079,236	1,913,756,214	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,056,612,755	1,083,028,072	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,150,322,060	1,179,080,110	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,918,500,688	1,966,463,202	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,418,361,816	1,453,820,859	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	915,600,000	938,489,999	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,506,000,000	1,543,649,998	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	987,600,000	1,012,289,999	Kec. Wonocolo
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**20,310,000**	**20,310,000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	20,310,000	20,310,000	Kec. Wonocolo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**141,448,800**	**141,448,800**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**141,448,800**	**141,448,800**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**141,448,800**	**141,448,800**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	**141,448,800**	**141,448,800**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	141,448,800	141,448,800	Kec. Wonocolo
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**29,490,454,139**	**29,831,351,829**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,08 %	**29,490,454,139**	**29,831,351,829**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,600,000**	**2,600,000**	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan, perencanaan dan evaluasi pada Kecamatan Wonokromo	100%	**2,600,000**	**2,600,000**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Wonokromo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,600,000	2,600,000	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23,019,207,959**	**23,195,483,134**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**23,019,207,959**	**23,195,483,134**	
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonokromo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	23,019,207,959	23,195,483,134	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,334,947,630**	**6,499,570,145**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	**6,334,947,630**	**6,499,570,145**	
7.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonokromo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6,334,947,630	6,499,570,145	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**133,698,550**	**133,698,550**	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		Persentase barang milik daerah penunjang urusan	100%	**133,698,550**	**133,698,550**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemerintah Daerah yang disediakan				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	133,698,550	133,698,550	Kec. Wonokromo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**225,230,400**	**225,230,400**	
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**225,230,400**	**225,230,400**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**225,230,400**	**225,230,400**	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 lembaga	**225,230,400**	**225,230,400**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	225,230,400	225,230,400	Kec. Wonokromo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**28,489,401,136**	**29,210,517,225**	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	**28,489,401,136**	**29,210,517,225**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**232,441,816**	**247,237,593**	
	Meningkatnya pemberdayaan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan inovasi di Kecamatan		jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	6 kegiatan	**232,441,816**	**247,237,593**	
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	232,441,816	247,237,593	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**28,256,959,320**	**28,963,279,632**	
	Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan		Jumlah inovasi unggulan yang disusun konsepnya	3 Lokasi	**28,245,267,011**	**28,951,398,646**	
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokromo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,913,364,678	2,986,198,791	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Darmo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,637,311,383	1,678,244,165	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngagel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,787,627,446	2,857,318,128	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jagir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,080,981,234	2,133,005,762	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	3,310,958,303	3,393,732,256	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,861,380,658	2,932,915,170	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,836,440,000	2,907,350,996	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,073,430,198	2,125,265,950	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngagel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	952,200,000	976,004,999	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Darmo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	2,389,603,827	2,449,343,919	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jagir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,771,040,697	1,815,316,712	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokromo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,630,928,587	2,696,701,798	Kec. Wonokromo
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	3 Laporan	**11,692,309**	**11,880,986**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Wonokromo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11,692,309	11,880,986	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan				
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**273,444,121**	**274,188,563**	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	**273,444,121**	**274,188,563**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**273,444,121**	**274,188,563**	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 lokasi/bulan	**273,444,121**	**274,188,563**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Kec. Wonokromo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	12 Laporan	273,444,121	274,188,563	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**59,935,900,153**	**60,948,557,176**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**59,935,900,153**	**60,948,557,176**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**14,308,143,384**	**14,413,344,480**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesatuan bangsa dan politik		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,92 %	**14,308,143,384**	**14,413,344,480**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**13,732,732**	**13,780,864**	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	**13,732,732**	**13,780,864**	
8.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	13,732,732	13,780,864	Badan Kesatuan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Bangsa dan Politik					Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11,269,656,347**	**11,354,677,950**	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**11,269,656,347**	**11,354,677,950**	
8.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	11,269,656,347	11,354,677,950	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**170,241,323**	**134,359,883**	
	Meningkatnya Ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	**170,241,323**	**134,359,883**	
8.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	170,241,323	134,359,883	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,854,512,982**	**2,910,525,783**	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	**2,854,512,982**	**2,910,525,783**	
8.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,854,512,982	2,910,525,783	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**3,275,596,614**	**3,750,334,016**	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	93,22 %	**3,275,596,614**	**3,750,334,016**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**3,275,596,614**	**3,750,334,016**	
	meningkatnya jumlah lembaga yang difasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40 Lembaga	**3,275,596,614**	**3,750,334,016**	
8.01.02.2.01 .0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang	Badan Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi	320 Orang	3,275,596,614	3,750,334,016	Badan Kesatuan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangsa dan Politik	di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Bangsa dan Politik
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				**29,086,004,217**	**29,086,200,246**	
	Meningkatnya peran serta lembaga pendidikan dan lembaga politik dalam peningkatan etika dan budaya politik		Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	23%	**29,086,004,217**	**29,086,200,246**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**29,086,004,217**	**29,086,200,246**	
	Meningkatnya lembaga yang mendapatkan fasilitasi		Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi	59 Lembaga	**29,086,004,217**	**29,086,200,246**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik		pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	118 Orang	29,086,004,217	29,086,200,246	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**84,747,113**	**84,978,147**	
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan		Indeks Kinerja Ormas	68.2 Nilai	**84,747,113**	**84,978,147**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**84,747,113**	**84,978,147**	
	Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	15 Lembaga	**84,747,113**	**84,978,147**	
8.01.04.2.01 .0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	84,747,113	84,978,147	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**381,555,894**	**810,427,407**	
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat		Persentase potensi konflik umat beragama yang terfasilitasi	90,5 %	**381,555,894**	**810,427,407**	
			Persentase pencegahan P4GN di kawasan rawan narkoba	90,5 %			
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**381,555,894**	**810,427,407**	
	Meningkatnya lembaga yang berkontribusi dalam mendukung Kerukunan Beragama dan P4GN		Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	6 Lembaga	**381,555,894**	**810,427,407**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	381,555,894	810,427,407	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**12,799,852,931**	**12,803,272,880**	
	Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud		Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	98,00 %	**12,799,852,931**	**12,803,272,880**	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**12,799,852,931**	**12,803,272,880**	
	Meningkatnya pelaksanaan pemantauan orang asing dan potensi konflik		Persentase hasil pemantauan orang asing yang teridentifikasi	100%	**12,799,852,931**	**12,803,272,880**	
			Persentase hasil potensi konflik yang teridentifikasi	96%			
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	15 Orang	12,086,612,792	12,088,230,027	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8.01.06.2.01 .0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	44 Laporan	713,240,139	715,042,853	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Penanganan Konflik di Daerah				
TOTAL					**14,524,846,404,696**	**13,399,814,971,016**	

5.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisis keuangan tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 dan target tahun 2025. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja daerah disajikan dalam Tabel V.2 tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2026.

Tabel V.2
Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2026

NO	URAIAN		PROYEKSI/TARGET TA. 2026
1	**PENERIMAAN**		**14,719,000,773,357**
1,1	**PENDAPATAN**		**11,516,174,322,502**
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,997,220,556,726
	a	Pajak Daerah	6,536,968,649,361
	b	Retribusi Daerah	383,745,531,123
	c	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	214,439,345,444
	d	Lain-Lain PAD yang sah	862,067,030,798
1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER		3,518,953,765,776
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		3,085,199,540,477
	a	1) Dana Perimbangan	3,039,717,272,539
	b	2) Insentif Fiskal	45,482,267,938
	Transfer Antar - Daerah		433,754,225,299
	a	1) Pendapatan Bagi Hasil	433,754,225,299
	b	2) Bantuan Keuangan	-
1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		-
	a	Pendapatan Hibah	-
	b	Pendapatan Dana Darurat	-
	c	Pendapatan Lainnya	-
1,2	**PEMBIAYAAN**		**3,202,826,450,855**
1.2.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		3,202,826,450,855
	a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	263,996,494,318
	b	Penerimaan Pembiayaan Alternatif	2,938,829,956,537
2	**PENGELUARAN**		**14,719,000,773,357**
2,1	**BELANJA**		**14,524,846,404,696**
	BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL		14,477,346,404,696
2.1.1	BELANJA OPERASI		9,587,377,908,808
	a	Belanja Pegawai	3,640,632,345,710
	b	Belanja Barang dan Jasa	5,416,453,159,436
	c	Belanja Bunga	46,445,117,720
	d	Belanja Subsidi	132,428,989,564
	e	Belanja Hibah	350,218,296,378
	f	Belanja Bantuan Sosial	1,200,000,000
2.1.2	BELANJA MODAL		4,889,968,495,888
	a	Belanja Modal Tanah	452,222,363,825
	b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	378,218,858,563
	c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	751,488,185,321
	d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,296,440,838,131
	e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,532,612,900
	f	Belanja Modal Aset Lainnya	8,065,637,148

NO	URAIAN		PROYEKSI/TARGET TA. 2026
2.1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		47,000,000,000
	a	Belanja Tidak Terduga	47,000,000,000
2.1.4	BELANJA TRANSFER		500,000,000
	a	Belanja Bagi Hasil	-
	b	Belanja Bantuan Keuangan	500,000,000
2,2	**PEMBIAYAAN**		**194,154,368,661**
2.2.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		184,154,368,661
	a	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	184,154,368,661
	b	Penyertaan Modal	10,000,000,000

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (diolah tahun 2025).

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui suatu indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah tersebut merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali kota dan Wakil Wali kota Surabaya dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Penyusunan indikator mengacu pada indikator tujuan (*impact indicators)* dan indikator sasaran (*outcome indicators*) yang telah ditetapkan serta didasarkan pada hasil analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator kinerja program pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja daerah secara keseluruhan. Proses ini memastikan bahwa setiap indikator kinerja daerah memiliki keterukuran yang jelas, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Surabaya periode tahun 2025 - 2029. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Penentuan target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025 - 2029 dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Sedangkan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Indikator Kinerja Daerah

(IKD). IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dimana tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggungjawab kepala daerah periode berikutnya.

Sasaran pembangunan diarahkan untuk mencapai target indikator makro sebagaimana disampaikan pada tabel VI. 1

Tabel VI. 1
Keselarasan Indikator Makro Tahun 2026

No	Indikator Makro	Target RKPD Provinsi Jawa Timur	Target Surabaya dari Provinsi Jawa Timur	Target RKPD Kota Surabaya	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90 – 5,40	5,11 – 5,91	5,80	
2	PDRB Per Kapita (juta)	80,10 – 90,71	266,01 -274,64	289,29	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	14,2	-	-	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,95 – 9,10	3,57 – 4,09	3,85	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70 – 4,48	5,25 – 4,34	4,47	
6	Rasio Gini (nilai)	0,370 – 0,380	0,369 - 0,409	0,375	
7	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,64 – 0,65	-	-	Untuk Kota Surabaya menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia - Target Surabaya dari Provinsi Jawa Timur :85,15 - 85,75 - Target RKPD Kota Surabaya : 85,77
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Penurunan Emisi GRK Kumulatif	1 – 2,17 -	219.120,9 -	245.816,22	Untuk Kota Surabaya menggunakan indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif - Target Surabaya dari Provinsi Jawa Timur : 219.120,90 Ton CO_2 eq - Target RKPD Kota Surabaya : 245.816,22 Ton CO_2 eq
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,08 – 74,25	-	61,53	

Tabel VI.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Baseline 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Kondisi Kinerja Akhir Periode	Satuan
1	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**5,76**	**5,77**	**5,80**	**5,84**	**5,88**	**5,92**	**5,96**	**5,96**	**%**
2	**PDRB Per Kapita**	**264,37**	**274,83**	**289,29**	**303,75**	**318,21**	**332,67**	**347,13**	**347,13**	**Rp Juta**
3	**Indeks Akses Keuangan Daerah**	**N/A**	**7,34**	**7,40**	**7,46**	**7,51**	**7,57**	**7,60**	**7,60**	**Indeks**
4	ICOR	4,76	4,72	4,71	4,70	4,67	4,64	4,62	4,62	%
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,83	25,35	25,20	25,05	24,94	24,74	24,60	24,60	%
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	16,34	16,50	16,67	16,83	16,97	17,09	17,20	17,20	%
7	Rasio PDRB Industri Pengolahan	19,07	18,93	18,44	18,00	17,61	17,26	16,95	16,95	%
8	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,75	27,78	28,13	28,44	28,72	29,19	29,29	29,29	%
9	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	83,06	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	Indeks
10	Tingkat Inflasi	1,38	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	%
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91	4,50	4,47	4,44	4,40	4,37	4,34	4,34	%
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,48	60,56	61,02	61,49	61,95	62,42	62,88	62,88	%
13	**Indeks Pembangunan Manusia**	**84,69**	**85,26**	**85,77**	**86,3**	**86,81**	**87,31**	**87,86**	**87,86**	**Indeks**
14	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,02	76,15	76,50	76,85	77,20	77,55	77,95	77,95	Tahun
15	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,89	11,18	11,34	11,51	11,67	11,83	12,00	12,00	Tahun
16	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,87	14,96	15,01	15,06	15,11	15,15	15,20	15,20	Tahun
17	Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	0,94	0,95	0,95	0,95	0,97	0,99	0,99	0,99	Indeks
18	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**100,67**	**101,54**	**105,21**	**108,87**	**112,54**	**116,20**	**119,87**	**119,87**	**Indeks**
19	Indeks Inovasi Daerah	94,17	94,25	94,50	94,75	95,00	95,25	95,50	95,50	Angka
20	Nilai SAKIP Kota Surabaya	90,24	90,28	90,39	90,58	90,77	90,96	91,15	91,15	Nilai

No	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Baseline 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Kondisi Kinerja Akhir Periode	Satuan
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	N/A	1,7	1,8	1,8	2,12	2,12	2,18	2,18	Indeks
22	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	71,97	79,38	81,78	84,19	86,59	89,00	91,40	91,40	Indeks
23	Indeks Sistem Merit	28,18	28,33	28,49	28,65	28,82	28,98	29,14	29,14	%
24	Indeks Pelayanan Publik	4,57	4,59	4,61	4,67	4,69	4,70	4,72	4,72	Indeks
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,21	97,23	97,25	97,27	97,30	97,32	97,34	97,34	%
26	Nilai Survey Penilaian Integritas	72,11	73,91	75,71	77,51	79,31	81,11	82,91	82,91	Nilai
27	**Indeks Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan**	**53,91**	**65,80**	**67,94**	**69,47**	**71,17**	**72,88**	**74,75**	**74,75**	**Indeks**
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,76	61,46	61,53	61,61	61,69	61,77	61,85	61,85	Poin
29	Penurunan emisi GRK kumulatif	210.612,16	225.714,19	245.816,22	265.918,25	296.020,28	326.122,31	361.224,34	361.224,34	Ton CO_2 eq
30	Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	0,64	0,66	0,69	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	Indeks
31	Indeks Risiko Bencana	112,08	108,77	107,65	106,54	105,42	104,31	102,81	102,81	Indeks
32	**Tingkat Kemiskinan**	**3,96**	**3,90**	**3,85**	**3,78**	**3,53**	**3,26**	**3,00**	**3,00**	**%**
33	**Rasio Gini**	**0,381**	**0,380**	**0,375**	**0,373**	**0,372**	**0,370**	**0,365**	**0,365**	**Angka**
34	**Indeks Harmoni Indonesia (IHal)**	**N/A**	**7,31**	**7,33**	**7,36**	**7,37**	**7,40**	**7,41**	**7,41**	**Indeks**
35	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,31	60,50	62,70	65,10	67,90	70,50	72,70	72,70	Indeks
36	Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	357	359	361	363	365	367	369	369	Skor
37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,171	0,112	0,111	0,109	0,106	0,103	0,100	0,100	Indeks
38	Indeks Toleransi Umat Beragama	N/A	0,960	0,968	0,972	0,980	0,984	0,988	0,988	Nilai
39	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	80,23	80,30	80,71	81,16	81,66	82,16	82,66	82,66	Indeks
40	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	57,00	57,40	57,80	58,20	58,60	59,00	59,00	%

Sumber : Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-202

Tabel VI. 3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2029

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI											
	1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Sasaran Kota & Tujuan PD	83,06	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	Indeks
	2.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	-	4,06	3,66	3,49	3,31	3,14	2,97	2,79	2,79	%
	3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Sasaran PD	47,45	50,45	53,45	56,45	60,45	64,45	70,72	70,72	%
	4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sasaran Kota & Tujuan PD	60,76	61,46	61,53	61,61	61,69	61,77	61,85	61,85	Poin
	5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Sasaran PD	12,98	13,98	14,98	15,98	16,98	20,46	24,00	24,00	%
	6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Program PD	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	%
	7.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	8.	Penurunan emisi GRK kumulatif	Sasaran Kota	210.612,16	225.714,19	245.816,22	265.918,25	296.020,28	326.122,31	361.224,34	361.224,34	Ton CO_2 eq

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	9.	Indeks Risiko Bencana	Sasaran Kota	112,08	108,77	107,65	106,54	105,42	104,31	102,81	102,81	Indeks
	10.	Indeks Ketahanan Daerah	Tujuan PD	0,63	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72	Indeks
	11.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Sasaran PD	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	%
B.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan Kota	5,76	5,77	5,80	5,84	5,88	5,92	5,96	5,96	%
	2.	PDRB Per Kapita	Tujuan Kota	264,37	274,83	289,29	303,75	318,21	332,67	347,13	347,13	Rp Juta
	4.	Indeks Pembangunan Manusia	Tujuan Kota	84,69	85,26	85,77	86,30	86,81	87,31	87,86	87,86	Indeks
	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Tujuan Kota	100,67	101,54	105,21	108,87	112,54	116,20	119,87	119,87	Indeks
	6.	Tingkat Kemiskinan	Tujuan Kota	3,96	3,90	3,85	3,78	3,53	3,26	3,00	3,00	%
	7.	Rasio Gini	Tujuan Kota	0,381	0,380	0,375	0,373	0,372	0,370	0,365	0,365	Angka
	8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Sasaran Kota & Tujuan PD	4,91	4,50	4,47	4,44	4,40	4,37	4,34	4,34	%
	9.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Sasaran Kota & Tujuan PD	76,02	76,15	76,50	76,85	77,20	77,55	77,95	77,95	Tahun
	10.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Sasaran PD	0,600	0,600	0,598	0,596	0,594	0,592	0,590	0,590	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	11.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Sasaran Kota & Tujuan PD	10,89	11,18	11,34	11,51	11,67	11,83	12,00	12,00	Tahun
	12.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Sasaran Kota & Tujuan PD	14,87	14,96	15,01	15,06	15,11	15,15	15,20	15,20	Tahun
	13.	Skor Kemampuan Literasi SD	Program PD	69,37	71,87	74,37	76,87	79,37	81,87	84,37	84,37	Nilai
	14.	Skor Kemampuan Literasi SMP	Program PD	84,01	85,11	86,21	87,31	88,41	89,51	90,61	90,61	Nilai
	15.	Skor Kemampuan Numerasi SD	Program PD	57,99	60,89	63,79	66,69	69,59	72,49	75,39	75,39	Nilai
	16.	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Program PD	71,68	73,18	74,68	76,18	77,68	79,18	80,68	80,68	Nilai
	17.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tujuan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nilai
	18.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program PD	39,07	58,78	60,78	62,78	64,78	66,78	68,58	68,58	%
	19.	Indeks Toleransi Umat Beragama	Sasaran Kota	N/A	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	Nilai
	20.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Sasaran Kota & Tujuan PD	N/A	57,00	57,40	57,80	58,20	58,60	59,00	59,00	%
	21.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Sasaran PD	87,22	87,34	87,47	87,59	87,72	87,84	87,96	87,96	Indeks
	22.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Sasaran PD	73,91	73,95	73,96	73,97	73,98	73,99	74,00	74,00	Indeks

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	23.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Sasaran PD	95,86	96,11	96,27	96,44	96,63	96,84	97,06	97,06	Indeks
	24.	Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Sasaran Kota & Tujuan PD	0,94	0,95	0,95	0,95	0,97	0,99	0,99	0,99	Indeks
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Tujuan Kota	53,91	65,80	67,94	69,47	71,17	72,88	74,75	74,75	Indeks
	2.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Tujuan Kota	N/A	7,34	7,40	7,46	7,51	7,57	7,60	7,60	Indeks
	3.	Indeks Harmoni Indonesia (IHal)	Tujuan Kota	N/A	7,31	7,33	7,36	7,37	7,40	7,41	7,41	Indeks
	4.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Sasaran Kota & Tujuan PD	16,34	16,50	16,67	16,83	16,97	17,09	17,20	17,20	%
	5.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Sasaran Kota & Tujuan PD	19,07	18,93	18,44	18,00	17,61	17,26	16,95	16,95	%
	6.	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sasaran Kota & Tujuan PD	27,75	27,78	28,13	28,44	28,72	29,19	29,29	29,29	%
	7.	ICOR	Sasaran Kota	4,76	4,72	4,71	4,70	4,67	4,64	4,62	4,62	%
	8.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Sasaran Kota	26,83	25,35	25,20	25,05	24,94	24,74	24,60	24,60	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Sasaran Kota	59,48	60,56	61,02	61,49	61,95	62,42	62,88	62,88	%
	10.	Indeks Inovasi Daerah	Sasaran Kota & Tujuan PD	94,17	94,25	94,50	94,75	95,00	95,25	95,50	95,50	Angka
	11.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Sasaran PD	98,02	98,40	98,64	98,89	99,16	99,21	99,26	99,26	%
	12.	Tingkat Inflasi	Sasaran Kota & Tujuan PD	1,38	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	%
D.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**											
	Layanan Urusan Wajib Dasar											
	1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**										
	1.1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Sasaran Kota & Tujuan PD	10,89	11,18	11,34	11,51	11,67	11,83	12,00	12,00	Tahun
	1.2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Sasaran Kota & Tujuan PD	14,87	14,96	15,01	15,06	15,11	15,15	15,20	15,20	Tahun
	2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**										
	2.1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Sasaran Kota &	76,02	76,15	76,50	76,85	77,20	77,55	77,95	77,95	Tahun

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Tujuan PD									
	3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	3.1. Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Sasaran Kota	0,64	0,66	0,69	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	Indeks
	3.1.1. Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	Tujuan PD	0,827	0,860	0,880	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	Indeks
	3.1.2. Indeks Bangunan Gedung dan Penataan Ruang	Tujuan PD	0,2880	0,2920	0,4157	0,4157	0,4158	0,4158	0,4133	0,4133	Indeks
	4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
	4.1. Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Sasaran Kota	0,64	0,66	0,69	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	Indeks
	4.1.1. Indeks Keciptakaryaan	Tujuan PD	0,480	0,486	0,487	0,488	0,489	0,490	0,492	0,492	Indeks
	5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	5.1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Tujuan PD	N/A	78,33	78,43	78,53	78,63	78,73	78,83	78,83	Indeks
	5.2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Tujuan PD	N/A	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	Indeks
	5.3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Sasaran Kota	80,23	80,30	80,71	81,16	81,66	82,16	82,66	82,66	Indeks
	5.3.1. Indeks Penyelenggaraan	Tujuan PD	80,40	80,50	80,91	81,41	81,91	82,41	82,91	82,91	Indeks

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)										
		5.3.2.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Tujuan PD	80,05	80,10	80,50	80,91	81,41	81,91	82,41	82,41	Indeks
	6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**											
	6.1.	Indeks Kesejahteraan Sosial		Sasaran Kota & Tujuan PD	58,31	60,50	62,70	65,10	67,90	70,50	72,70	72,70	Indeks
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar												
	1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**											
	1.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka		Sasaran Kota & Tujuan PD	4,91	4,50	4,47	4,44	4,40	4,37	4,34	4,34	%
	2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.1.	Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)		Sasaran Kota	357	359	361	363	365	367	369	369	Skor
		2.1.1.	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tujuan PD	895	896	897	898	899	900	900	900	Nilai

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	2.2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Sasaran Kota	0,171	0,112	0,111	0,109	0,106	0,103	0,100	0,100	Indeks
	2.2.1. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Tujuan PD	910	911	912	913	914	915	916	916	Nilai
	3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
	3.1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Sasaran Kota & Tujuan PD	83,06	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	Indeks
	4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan										
	4.1. Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Sasaran Kota	0,64	0,66	0,69	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	Indeks
	4.1.1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Lahan	Tujuan PD	0,020	0,079	0,082	0,086	0,090	0,095	0,100	0,100	indeks
	5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
	5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sasaran Kota & Tujuan PD	60,76	61,46	61,53	61,61	61,69	61,77	61,85	61,85	Poin
	5.2. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	5.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Program PD	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	%
	5.4. Penurunan emisi GRK kumulatif	Sasaran Kota	210.612,16	225.714,19	245.816,22	265.918,25	296.020,28	326.122,31	361.224,34	361.224,34	Ton CO_2 eq
	6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
	6.1. Cakupan layanan pencatatan sipil	Tujuan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	6.2. Cakupan layanan pendaftaran kependudukan	Tujuan PD	50,00	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	65,00	%
	7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
	7.1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Tujuan PD	63,74	64,50	65,10	65,50	66,01	66,50	67,01	67,01	Indeks
	8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
	8.1. Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Sasaran Kota	0,64	0,66	0,69	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	Indeks
	8.1.1. Indeks Penyelenggaraan Perhubungan	Tujuan PD	0,704	0,713	0,726	0,745	0,757	0,770	0,770	0,770	Indeks
	9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
	9.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sasaran Kota & Tujuan PD	N/A	1,70	1,80	1,80	2,12	2,12	2,18	2,18	Indeks

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	(SPBE)/Pemerintahan Digital										
	10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
	10.1. Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	Tujuan PD	N/A	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	%
	11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										
	11.1. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Daerah	Tujuan PD	7,67	5,49	1,50	1,70	1,90	2,05	2,07	2,07	%
	12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan										
	12.1. Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Sasaran Kota & Tujuan PD	0,94	0,95	0,95	0,95	0,97	0,99	0,99	0,99	Indeks
	13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
	13.1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Tujuan PD	2,70	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,10	Indeks
	14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
	14.1. Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Tujuan PD	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	81,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	15.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**										
	15.1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Sasaran Kota & Tujuan PD	N/A	57,00	57,40	57,80	58,20	58,60	59,00	59,00	%
	16.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**										
	16.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tujuan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nilai
	17.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**										
	17.1.	Persentase arsip daerah yang siap dimanfaatkan oleh stakeholder	Tujuan PD	52,36	53,36	54,36	55,36	56,36	57,36	58,00	58,00	%
	Layanan Urusan Pilihan											
	1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**										
	1.1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Sasaran Kota & Tujuan PD	16,34	16,50	16,67	16,83	16,97	17,09	17,20	17,20	%
	2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**										
	2.1.	Hasil produksi sektor pertanian	Tujuan PD	18.586,21	18.587,05	18.609,93	18.634,12	18.657,61	18.682,43	18.706,57	18.706,57	ton
	3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**										

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	3.1. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sasaran Kota & Tujuan PD	27,75	27,78	28,13	28,44	28,72	29,19	29,29	29,29	%
	4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
	4.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan	Sasaran Kota & Tujuan PD	19,07	18,93	18,44	18,00	17,61	17,26	16,95	16,95	%
	5. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan										
	5.1. Hasil Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan	Tujuan PD	18.502,20	18.971,71	19.298,97	19.626,23	19.953,48	20.280,74	20.608,00	20.608,00	ton
	Penunjang Urusan										
	1. Perencanaan										
	1.1. Indeks Kualitas Perencanaan	Tujuan PD	96,35	97,00	97,00	98,00	98,00	98,50	99,00	99,00	Indeks
	2. Keuangan										
	2.1. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Sasaran Kota	71,97	79,38	81,78	84,19	86,59	89,00	91,40	91,40	Indeks
	2.1.1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	Tujuan PD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai
	2.1.2. Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Daerah	Tujuan PD	59,70	71,16	54,33	59,12	67,41	67,62	68,01	68,01	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		2.1.3.	Persentase kontribusi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap APBD Daerah	Tujuan PD	38,27	27,03	23,91	26,05	30,64	30,77	30,88	30,88	%
	3.	**Kepegawaian**											
	3.1.	Indeks Sistem Merit		Sasaran Kota	28,18	28,33	28,49	28,65	28,82	28,98	29,14	29,14	%
		3.1.1.	Nilai Maturitas penyelenggaraan sistem merit	Tujuan PD	0,80	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90	nilai
	4.	**Pendidikan dan Pelatihan**											
	4.1.	Indeks Sistem Merit		Sasaran Kota	28,18	28,33	28,49	28,65	28,82	28,98	29,14	29,14	%
		4.1.1.	Nilai Maturitas penyelenggaraan sistem merit	Tujuan PD	0,80	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90	nilai
	5.	**Penelitian dan Pengembangan**											
	5.1.	Indeks Inovasi Daerah		Sasaran Kota & Tujuan PD	94,17	94,25	94,50	94,75	95,00	95,25	95,50	95,50	Angka
	6.	**Sekretariat Daerah**											

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	6.1. Tingkat Inflasi	Sasaran Kota & Tujuan PD	1,38	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	%
	6.2. Nilai SAKIP Kota Surabaya	Sasaran Kota & Tujuan PD	90,24	90,28	90,39	90,58	90,77	90,96	91,15	91,15	Nilai
	6.3. Indeks Pelayanan Publik	Sasaran Kota & Tujuan PD	4,57	4,59	4,61	4,67	4,69	4,70	4,72	4,72	Indeks
	6.4. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sasaran Kota & Tujuan PD	97,21	97,23	97,25	97,27	97,30	97,32	97,34	97,34	%
	6.5. Indeks Reformasi Hukum	Program PD	96,98	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80	98,00	98,00	nilai
	7. Sekretariat DPRD										
	7.1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Tujuan PD	N/A	80,00	80,00	83,00	83,00	85,00	85,00	85,00	%
	8. Inspektorat Daerah										
	8.1. Nilai Survey Penilaian Integritas	Sasaran Kota	72,11	73,91	75,71	77,51	79,31	81,11	82,91	82,91	Nilai
	8.1.1. Nilai SPIP Pemerintah Kota Surabaya	Tujuan PD	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,80	Nilai

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		8.1.2.	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Surabaya	Tujuan PD	72,11	78,00	78,40	78,80	79,20	79,60	80,00	80,00	Nilai
	9.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**											
	9.1.	Indeks Wawasan Kebangsaan serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Tujuan PD	N/A	3,48	3,49	3,50	3,52	3,54	3,56	3,56	Nilai
	10.	**Kecamatan**											
	10.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan		Tujuan PD	sesuai kecamatan masing-masing	sesuai kecamatan masing-masing	sesuai kecamatan masing-masing	sesuai kecamatan masing-masing	sesuai kecamatan masing-masing	sesuai kecamatan masing-masing	sesuai kecamatan masing-masing	sesuai kecamatan masing-masing	%
	INDIKATOR KINERJA KUNCI												
	A	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**											
	1	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun		Program PD	86,04	88,96	91,88	94,43	96,98	99,53	100,00	100,00	%
	2	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun		Program PD	99,17	99,55	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan		Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	4	Skor Kemampuan Literasi SD	Program PD	69,37	71,87	74,37	76,87	79,37	81,87	84,37	84,37	Nilai
	5	Skor Kemampuan Literasi SMP	Program PD	84,01	85,11	86,21	87,31	88,41	89,51	90,61	90,61	Nilai
	6	Skor Kemampuan Numerasi SD	Program PD	57,99	60,89	63,79	66,69	69,59	72,49	75,39	75,39	Nilai
	7	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Program PD	71,68	73,18	74,68	76,18	77,68	79,18	80,68	80,68	Nilai
	8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Program PD	78,22	78,63	79,04	79,46	79,87	80,28	80,69	80,69	%
	9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Program PD	63,77	87,32	87,82	88,32	88,82	89,32	89,82	89,82	%
	10	Iklim Inklusivitas SD	Program PD	61,07	63,57	66,07	68,57	71,07	73,57	76,07	76,07	Nilai
	11	Iklim Inklusivitas SMP	Program PD	63,41	65,81	68,21	70,61	73,01	75,41	77,81	77,81	Nilai
	12	Iklim Keamanan SD	Program PD	77,00	77,90	78,80	79,70	80,60	81,50	82,40	82,40	Nilai
	13	Iklim Keamanan SMP	Program PD	74,58	76,08	77,58	79,08	80,58	82,08	83,58	83,58	Nilai
	14	Iklim Kebinekaan SD	Program PD	75,77	76,77	77,77	78,77	79,77	80,77	81,77	81,77	Nilai
	15	Iklim Kebinekaan SMP	Program PD	73,71	74,71	75,71	76,71	77,71	78,71	79,71	79,71	Nilai
	B	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**										
	1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	Sasaran PD	30,38	30,38	30,18	29,42	28,42	27,42	26,42	26,42	Angka

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Sasaran PD	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	%
	3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	7	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Kegiatan PD	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	8	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	10	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	11	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	C	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
	1	Persentase penurunan luas genangan	Sasaran PD	18,14	27,80	38,79	47,40	49,52	50,34	51,60	51,60	%
	2	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang layak dan aman	Program PD	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	6,27	6,27	%
	3	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program PD	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	3,55	3,55	3,55	%
	4	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	5	Tingkat kemantapan jalan	Program PD	99,21	99,23	99,24	99,25	99,26	99,27	99,28	99,28	%
	6	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkompeten	Program PD	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	7	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	8	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Program PD	72,00	75,00	75,24	76,14	76,37	76,72	77,06	77,06	%
	D	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**										
	1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Program PD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program PD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	3	Persentase penyediaan rumah layak huni	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi	Sasaran PD	77,20	80,85	84,49	88,14	92,09	96,04	100,00	100,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)										
	E	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**										
	1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Sasaran PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	3	Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	4	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Sub Kegiatan PD	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Dokumen
	5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kegiatan PD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	6	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan PD	N/A	0,11	0,12	0,23	0,35	0,46	0,58	0,58	%
	7	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Sub Kegiatan PD	19.277	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Orang
	8	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan PD	N/A	0	1	0	0	1	0	1	Dokumen

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun										
	9	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Sub Kegiatan PD	N/A	0	1	1	1	1	1	1	Dokumen
	10	Persentase kegiatan pembinaan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan PD	100	100	100	100	100	100	100	100	%
	11	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Sub Kegiatan PD	5	5	5	5	5	5	5	5	Unit
	12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap kurang dari 15 menit	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	F	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**										
	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat	Kegiatan PD	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	6	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Kegiatan PD	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	7	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Liponsos Keputih	Kegiatan PD	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	8	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	9	Persentase Korban Bencana Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	10	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Kegiatan PD	93,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	11	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	12	Jumlah PSKS yang memenuhi standar kompetensi	Kegiatan PD	0	0	299	299	299	299	299	299	Orang
	13	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program PD	99,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	14	Pesentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Kegiatan PD	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	87,00	%
	15	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Sub Kegiatan PD	69.288	69.260	69.260	69.260	69.260	69.260	69.260	69.260	Orang
	G	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**										
	1	Persentase peserta pelatihan dan sertifikasi yang memiliki kompetensi	Program PD	40,00	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	43,50	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		sesuai kebutuhan pasar kerja										
	2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Program PD	N/A	32,18	32,96	33,76	34,59	35,43	36,29	36,29	%
	3	Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak	Sasaran PD	14,36	15,02	15,56	16,70	17,83	18,97	20,10	20,10	%
	4	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	Sasaran PD	22,67	22,89	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	58,00	%
	H	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Sasaran PD	95,86	96,11	96,27	96,44	96,63	96,84	97,06	97,06	Indeks
	2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Sasaran Kota	0,171	0,112	0,111	0,109	0,106	0,103	0,100	0,100	Indeks
	3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program PD	53,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Sasaran PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Sasaran PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**										
	1	Skor Pola Pangan Harapan	Program PD	94,00	95,35	95,35	95,35	95,40	95,45	95,50	95,50	Nilai
	2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	3	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Program PD	97,89	97,90	97,91	97,93	97,95	97,97	97,99	97,99	%
	J	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**										
	1	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penataan Aset dan Akses Reforma	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	2	Presentase pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	3	Jumlah register yang dilakukan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	Kegiatan PD	141	145	155	160	165	170	173	968	Register
	4	Persentase register tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	Program PD	N/A	14,98	16,01	16,53	17,05	17,56	17,87	100,00	%
	K	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**										
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sasaran Kota & Tujuan PD	60,76	61,46	61,53	61,61	61,69	61,77	61,85	61,85	Poin
	2	Persentase ketepatan waktu penerbitan Persetujuan Lingkungan, Pertek Bidang	Kegiatan PD	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		PPLH, SLO, PB Sektor Lingkungan										
	L	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
	1	Cakupan layanan pendaftaran kependudukan	Tujuan PD	50,00	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	65,00	%
	2	Persentase dokumen pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	Program PD	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	%
	3	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	Program PD	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	%
	4	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Sub Kegiatan PD	2	2	2	2	2	2	2	2	Dokumen
	M	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Tujuan PD	63,74	64,50	65,10	65,50	66,01	66,50	67,01	67,01	Indeks
	2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Program PD	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	kelahiran hidup per 1000 perempuan
	3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program PD	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	%
	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB)	Program PD	15,05	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,50	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Kegiatan PD	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	%
	N	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**										
	1	Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Program PD	21:21	21:21	21:21	21:21	21:21	21:21	21:21	21:21	Rasio
	3	Persentase Jalan Kota yang terpenuhi dan terpasang kelengkapannya	Kegiatan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	O	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**										
	1	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Sub Kegiatan PD	58	58	58	58	58	58	58	58	Perangkat Daerah
	2	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Sub Kegiatan PD	58	58	58	58	58	58	58	58	Perangkat Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	3	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan PD	10	10	10	10	10	10	10	10	Aplikasi
	P	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**										
	1	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Koperasi Aktif	Sasaran PD	N/A	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	%
	2	Pertumbuhan Wirausaha	Program PD	N/A	0,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	%
	3	Persentase Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Kegiatan PD	N/A	0,00	64,92	68,17	71,41	74,66	77,91	77,91	%
	Q	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**										
	1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Daerah	Tujuan PD	7,67	5,49	1,50	1,70	1,90	2,05	2,07	2,07	%
	2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program PD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	R	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan**										
	1	Persentase Atlet Berprestasi	Sasaran PD	70,84	72,00	73,16	74,32	75,48	76,64	77,80	77,80	%
	2	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 (tiga) bulan terakhir	Program PD	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	15,00	%
	S	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**										

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Tujuan PD	2,70	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,10	Indeks
	T	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**										
	1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Tujuan PD	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	81,00	%
	U	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**										
	1	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Sasaran PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	2	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan sesuai dengan kaidahnya	Sasaran PD	92,04	92,04	92,04	92,04	892,04	92,04	92,04	92,04	%
	3	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	Program PD	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	V	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**										
	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tujuan PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nilai
	2	Tingkat Kegemaran Membaca	Sasaran PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nilai
	W	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**										

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Sasaran PD	92,00	92,10	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60	Nilai
	X	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**										
	1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Kota Surabaya	Program PD	N/A	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00	%
	2	Persentase produk kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	Program PD	N/A	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	Y	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**										
	1	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Program PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	Z	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**										
	1	Persentase Pelaku usaha yang menggunakan Alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah / legal dalam transaksi perdagangan	Sasaran PD	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	%
	AA	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**										
	1	Persentase Industri Kecil Menengah yang patuh	Program PD	N/A	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	33,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	2	Persentase kepatuhan penyampaian data industri	Program PD	N/A	76,00	81,00	86,00	90,00	95,00	100,00	100,00	%
	AB	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**										
	1	Produksi Perikanan Tangkap	Sasaran PD	8.705,69	9.141,20	9.434,56	9.727,92	10.021,28	10.314,64	10.608,00	10.608,00	ton
	2	Produksi Perikanan Budidaya	Sasaran PD	9.796,51	9.830,51	9.864,41	9.898,31	9.932,20	9.966,10	10.000,00	10.000,00	ton
	AC	**Perencanaan**										
	1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Program Daerah	Sasaran PD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	AD	**Keuangan**										
	1	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Sasaran PD	60,93	72,47	69,44	69,42	68,75	68,73	68,77	68,77	%
	2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program PD	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	%
	3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program PD	2,37	2,46	2,56	2,65	2,75	2,84	2,94	2,94	%
	4	Persentase Penurunan SILPA	Program PD	6,00	6,00	3,64	0,93	5,08	5,45	5,73	5,73	%
	5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Kegiatan PD	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	6	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Kegiatan PD	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	%
	AE	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**										
	1	Nilai Maturitas penyelenggaraan sistem merit	Tujuan PD	0,80	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90	nilai
	AF	**Penelitian dan Pengembangan**										
	1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah	Program PD	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan/atau Badan Usaha di Daerah	Program PD	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	AG	**Sekretariat Daerah**										
	1	Indeks Pelayanan Publik	Sasaran Kota & Tujuan PD	4,57	4,59	4,61	4,67	4,69	4,70	4,72	4,72	Indeks
	2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Program PD	15,54	16,61	17,14	17,68	18,21	18,75	19,29	19,29	Nilai

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD	Satuan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	3	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Program PD	28,12	28,43	28,75	29,06	29,37	29,68	30,00	30,00	Nilai
	4	Tingkat Kematangan UKPBJ	Program PD	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Nilai
	AH	**Sekretariat DPRD**										
	1	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	Sasaran PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
	2	Persentase Prolegda yang yang diproses menjadi Ranperda	Program PD	51,20	51,20	52,50	52,50	53,60	53,60	53,60	53,60	%
	AI	**Fungsi Pengawasan**										
	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Tujuan PD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai
	2	Nilai SPIP Pemerintah Kota Surabaya	Tujuan PD	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,80	Nilai
	3	Persentase Hasil Pengawasan BPK-RI yang ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh BPK-RI dengan status sesuai	Sasaran PD	98,30	98,30	98,40	98,60	98,80	99,00	99,00	99,00	%
	4	Nilai Kapabilitas APIP	Sasaran PD	3,215	3,311	3,410	3,503	3,614	3,708	3,805	3,805	Nilai

Sumber : Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029

BAB VII
PENUTUP

7.1. KESIMPULAN SUBSTANSIAL

RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan memuat visi, misi, tema pembangunan, tujuan, sasaran, isu strategis, arah kebijakan, dan program Pemerintah Kota Surabaya. Dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta penelaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 berpedoman pada prioritas nasional sesuai Asta Cita sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya, serta visi dan misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam mendukung pencapaian visi misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2024, telah diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka sesuai dengan ketentuan ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disahkan maksimal 6 (enam) bulan sejak pelantikan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan selanjutnya Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusunan Rancangan Akhir

RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih

Visi misi Kepala Daerah terpilih untuk periode jabatan tahun 2025-2030 adalah *"**Transformasi Surabaya menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan**"*, yang kemudian dijabarkan dalam 5 misi yakni :

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan;
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul & Berkarakter;
3. Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
4. Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tema RKP Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**", tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**", serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2026, serta Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Tahunan Kota Surabaya Tahun 2026-2030 yang termuat pada Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, maka Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 yaitu "***Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur***". Adapun Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 yang disebut dengan Panca Darma Karya, diarahkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan yang adil dan inklusif

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan. Di bidang kesehatan, pendekatan dilakukan secara menyeluruh melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, serta stunting. Sementara itu, di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu untuk menghasilkan generasi berkarakter dan berdaya saing tinggi

2. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif

Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan efisiensi investasi untuk mendorong penyediaan lapangan kerja yang layak dan pengurangan pengangguran, penguatan sektor unggulan Surabaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat serta terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat

3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan kota, yang tidak hanya difokuskan pada peningkatan konektivitas dan mobilitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjadi modal jangka panjang dalam memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik sekaligus menjaga keseimbangan ekologis serta ketahanan atas risiko bencana.

4. Reformasi birokrasi berbasis digital

Pemerintah Kota Surabaya menempatkan reformasi birokrasi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi birokrasi diarahkan melalui digitalisasi sistem pemerintahan untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Digitalisasi bukan hanya alat bantu, melainkan menjadi roh dari pelayanan publik yang adaptif dan modern

5. Harmonisasi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kesenjangan, baik dalam bentuk sosial maupun ekonomi, diatasi melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta layanan sosial yang inklusif. Dengan membangun solidaritas dan rasa keadilan, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang rukun, inklusif, dan sejahtera. Selanjutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ruang hidup yang nyaman dan produktif. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas lembaga keamanan, serta sinergi antara aparat dan masyarakat terus diperkuat. Pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dikedepankan guna mencegah potensi konflik sosial dan meningkatkan ketanggapan terhadap gangguan

kamtibmas. Penerapan teknologi informasi dalam sistem keamanan lingkungan juga didorong sebagai bagian dari tata kelola kota yang adaptif dan partisipatif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 sebesar Rp 7.997.220.556.726,- dan jumlah pendapatan transfer sebesar Rp 3.518.953.765.776,- Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan di tahun 2026 sebesar Rp 3.202.826.450.855,-.

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif utuk mendukung ***"Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur".*** Total belanja pada tahun 2026 sebesar Rp 14.524.846.404.696 yang terbagi pada belanja operasi sebesar Rp 9.587.377.908.808,-, belanja modal sebesar Rp 4.889.968.495.888,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp 47.000.000.000,- Sedangkan untuk jumlah belanja transfer sebesar Rp 500.000.000,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 194.154.368.661,-

7.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikantercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah, meliputi : Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Adapun ruang lingkup pengendalian dan evaluasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahunan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan tahunan Kota Surabaya mencakup sinkronisasi visi, misi, dan tema pembangunan Kota Surabaya dengan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perumusan isu strategis, arah kebijakan, program prioritas, kebutuhan pendanaan pagu indikatif, dan indikator kinerja Daerah. Pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.

2. Pengendalian pelaksanaan RKPD mencakup program pembangunan Daerah dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Pemantauan dan supervisi yang dilaksanakan harus dapat menjamin :
   a. Program pembangunan pada RKPD Tahun 2026 telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
   b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan pada RKPD Tahun 2026 telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

   Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan tahunan telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
3. Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tahunan Kota Surabaya. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tema pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai untuk mewujudkan misi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

7.3. PENUTUP

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2026 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 ini berpedoman pada prioritas nasional sesuai Asta Cita sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya, serta visi dan misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam mendukung pencapaian visi misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

KONSISTENSI PROGRAM
ANTARA RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pendidikan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,11 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pendidikan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,11 %		Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	100%	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	100%		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	91.88%		Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	91.88%		Dinas Pendidikan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	99.93%		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	99.93%		Dinas Pendidikan
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	56.91%		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	56.91%		Dinas Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%		Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas lingkungan pembelajaran di satuan pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	66.07 Nilai	Meningkatnya kualitas lingkungan pembelajaran di satuan pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	66.07 Nilai		Dinas Pendidikan
		Iklim Inklusivitas SMP	68.21 Nilai		Iklim Inklusivitas SMP	68.21 Nilai		Dinas Pendidikan
		Iklim Keamanan SD	78.8 Nilai		Iklim Keamanan SD	78.8 Nilai		Dinas Pendidikan
		Iklim Keamanan SMP	77.58 Nilai		Iklim Keamanan SMP	77.58 Nilai		Dinas Pendidikan
		Iklim Kebinekaan SD	77.77 Nilai		Iklim Kebinekaan SD	77.77 Nilai		Dinas Pendidikan
		Iklim Kebinekaan SMP	75.71 Nilai		Iklim Kebinekaan SMP	75.71 Nilai		Dinas Pendidikan
		Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		Dinas Pendidikan
		Persentase lembaga PAUD berkualitas	89.93%		Persentase lembaga PAUD berkualitas	89.93%		Dinas Pendidikan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	100%		Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	100%		Dinas Pendidikan
		Persentase SD terakreditasi minimal B	92.37%		Persentase SD terakreditasi minimal B	92.37%		Dinas Pendidikan
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	96.22%		Persentase SMP terakreditasi minimal B	96.22%		Dinas Pendidikan
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	79.04%		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	79.04%		Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas kompetensi siswa	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00%	Meningkatnya kualitas kompetensi siswa	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00%		Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SMP/MTS	100%		Angka Kelulusan SMP/MTS	100%		Dinas Pendidikan
		Skor Kemampuan Literasi SD	74.37 Nilai		Skor Kemampuan Literasi SD	74.37 Nilai		Dinas Pendidikan
		Skor Kemampuan Literasi SMP	86.21 Nilai		Skor Kemampuan Literasi SMP	86.21 Nilai		Dinas Pendidikan
		Skor Kemampuan Numerasi SD	63.79 Nilai		Skor Kemampuan Numerasi SD	63.79 Nilai		Dinas Pendidikan
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	74.68 Nilai		Skor Kemampuan Numerasi SMP	74.68 Nilai		Dinas Pendidikan
	Meningkatnya minat dan bakat siswa	Persentase siswa SD SMP yang berprestasi TK provinsi	0.60%	Meningkatnya minat dan bakat siswa	Persentase siswa SD SMP yang berprestasi TK provinsi	0.60%		Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	35%	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	35%		Dinas Pendidikan
		Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%		Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%		Dinas Pendidikan
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	87.82%		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	87.82%		Dinas Pendidikan
		Prosentase jumlah guru yang mendapat jumlah jam mengajar di sekolah	100%		Prosentase jumlah guru yang mendapat jumlah jam mengajar di sekolah	100%		Dinas Pendidikan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89,96 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89,96 %		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Bhakti Dharma Husada	92,41 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Bhakti Dharma Husada	92,41 %		RSUD Bhakti Dharma Husada
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase capaian SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	95,98 %	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase capaian SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	95,98 %		RSUD Bhakti Dharma Husada

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Dokter Mohamad Soewandhie	91,4 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Dokter Mohamad Soewandhie	91,4 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase Capaian SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	88,89 %	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase Capaian SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	88,89 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	85,10 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	85,10 %		RSUD Eka Candrarini
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD Eka Candrarini	Persentase Capaian SPM RSUD Eka Candrarini	95,95 %	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD Eka Candrarini	Persentase Capaian SPM RSUD Eka Candrarini	95,95 %		RSUD Eka Candrarini
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular	Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)	90,9 %	Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular	Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)	90,9 %		Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	79%		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	79%		Dinas Kesehatan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	38%		Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	38%		Dinas Kesehatan
		Persentase Merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	12,2 %		Persentase Merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	12,2 %		Dinas Kesehatan
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,59 %		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,59 %		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,7 %		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,7 %		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL	100%	Meningkatnya kualitas obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL	100%		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya cakupan pembiayaan peserta jaminan kesehatan daerah	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	Meningkatnya cakupan pembiayaan peserta jaminan kesehatan daerah	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%		Dinas Kesehatan
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	79%	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	79%		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,01 per 1.000 kelahiran hidup	Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,01 per 1.000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia	100%		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia	100%		Dinas Kesehatan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		produktif sesuai standar			produktif sesuai standar			
		Presentase lanjut usia yang mandiri	90,5 %		Presentase lanjut usia yang mandiri	90,5 %		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	0,076 %		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	0,076 %		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	95.45%	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	95.45%		Dinas Kesehatan
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	68%		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	68%		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan standar	89,5 %	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan standar	89,5 %		RSUD Bhakti Dharma Husada
		Persentase sarana prasarana Rumah Sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%		Persentase sarana prasarana Rumah Sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%		RSUD Bhakti Dharma Husada
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase ketersediaan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan standar	89,5 %	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase ketersediaan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan standar	89,5 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%		Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD Eka Candrarini	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD Eka Candrarini	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%		RSUD Eka Candrarini
		Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Eka Candrarini sesuai dengan standar	82%		Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Eka Candrarini sesuai dengan standar	82%		RSUD Eka Candrarini
		Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%		Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%		RSUD Eka Candrarini
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
	Meningkatnya mutu dan distribusi SDM Kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	100%	Meningkatnya mutu dan distribusi SDM Kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	100%		Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
	Meningkatnya keamanan pangan olahan	Persentase pelaku industri rumah tangga dan produsen makanan siap saji memenuhi standar keamanan pangan	100%	Meningkatnya keamanan pangan olahan	Persentase pelaku industri rumah tangga dan produsen makanan siap saji memenuhi standar keamanan pangan	100%		Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	65%	Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	65%		Dinas Kesehatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air dan bina marga	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95,5 %	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air dan bina marga	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95,5 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada dinas sumber daya air dan bina marga	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93,36 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada dinas sumber daya air dan bina marga	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93,36 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan genangan	Persentase rumah pompa yang beroperasi dan berfungsi baik	100%	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan genangan	Persentase rumah pompa yang beroperasi dan berfungsi baik	100%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang layak dan aman	3%	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang layak dan aman	3%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	1%	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	1%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
	Meningkatnya sistem drainase perkotaan yang terintegrasi dan efektif	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang telah dilakukan Kegiatan Monitoring	100%	Meningkatnya sistem drainase perkotaan yang terintegrasi dan efektif	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang telah dilakukan Kegiatan Monitoring	100%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional	87,5 %		Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional	87,5 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berfungsi baik	91,39 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berfungsi baik	91,39 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase bangunan yang ber IMB/PBG	2,01 %		Persentase bangunan yang ber IMB/PBG	2,01 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	100%		Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	75%		Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	75%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase penyelesaian perizinan bangunan	83%		Persentase penyelesaian perizinan bangunan	83%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat kemantapan jalan	99,24 %	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat kemantapan jalan	99,24 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki	21%	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki	21%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		Persentase rekomendasi Penyelenggaraan Jalan yang telah dilakukan pengawasan / pengendalian	9%		Persentase rekomendasi Penyelenggaraan Jalan yang telah dilakukan pengawasan / pengendalian	9%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkompeten	100%	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkompeten	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan	Persentase kepatuhan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksaaan pemanfaatan tata ruang	96%	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan	Persentase kepatuhan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksaaan pemanfaatan tata ruang	96%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
	Meningkatnya pemanfaatan rumah susun sewa	Persentase rumah susun yang dimanfaatkan tepat sasaran	100%	Meningkatnya pemanfaatan rumah susun sewa	Persentase rumah susun yang dimanfaatkan tepat sasaran	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni	100%	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%		Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
	Meningkatnya kualitas PSU perumahan	Persentase PSU yang diserahkan	71,51 %	Meningkatnya kualitas PSU perumahan	Persentase PSU yang diserahkan	71,51 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96,20 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96,20 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	97,7 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	97,7 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%		Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Menurunnya pelanggaran Perda	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	Menurunnya pelanggaran Perda	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kapasitas SDM penegak peraturan	Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	Meningkatnya kapasitas SDM penegak peraturan	Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%		Satuan Polisi Pamong Praja

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Persentase Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Persentase Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana bagi Korban Bencana	100%	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana bagi Korban Bencana	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana dengan waktu respon ≤ 7 menit	100%	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana dengan waktu respon ≤ 7 menit	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Kapasitas Kawasan dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kawasan siap siaga bencana	100%	Meningkatnya Kapasitas Kawasan dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kawasan siap siaga bencana	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	100%		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam Upaya Mitigasi Bencana	Persentase aparatur yang meningkat kompetensinya dalam mitigasi dan penanganan bencana	100%	Meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam Upaya Mitigasi Bencana	Persentase aparatur yang meningkat kompetensinya dalam mitigasi dan penanganan bencana	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	Meningkatnya kualitas penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap kurang dari 15 menit	100%	Meningkatnya kualitas penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap kurang dari 15 menit	100%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejadian kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran	70%	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejadian kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran	70%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya kualitas sistem proteksi kebakaran pada bangunan	Persentase gedung dengan hasil laik fungsi	30%	Meningkatnya kualitas sistem proteksi kebakaran pada bangunan	Persentase gedung dengan hasil laik fungsi	30%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompetensinya meningkat	86.50%	Meningkatnya kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompetensinya meningkat	86.50%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang sosial	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,81 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang sosial	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,81 %		Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Lembaga Kepahlawanan yang aktif	100%	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Lembaga Kepahlawanan yang aktif	100%		Dinas Sosial
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%		Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		Dinas Sosial
		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		Dinas Sosial
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		Dinas Sosial

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		Dinas Sosial
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%		Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%		Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
	Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola Dalam Kondisi Baik	100%	Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola Dalam Kondisi Baik	100%		Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			PROGRAM PENUNJANG URUSAN				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang tenaga kerja	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.50%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang tenaga kerja	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Meningkatnya kesesuaian pelatihan dan sertifikasi dengan kebutuhan pasar kerja	Persentase peserta pelatihan dan sertifikasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	41,5 %	Meningkatnya kesesuaian pelatihan dan sertifikasi dengan kebutuhan pasar kerja	Persentase peserta pelatihan dan sertifikasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	41,5 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya produktivitas kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	32,96 %	Meningkatnya produktivitas kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	32,96 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor formal	Persentase pencari kerja terserap ke sektor formal	40,00 %	Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor formal	Persentase pencari kerja terserap ke sektor formal	40,00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor informal	Persentase tenaga kerja terserap ke sektor informal	10,00 %	Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor informal	Persentase tenaga kerja terserap ke sektor informal	10,00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
		Cakupan Kepesertaan	60,78 %		Cakupan Kepesertaan	60,78 %		Dinas Perindustrian

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	16,06 %	Meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	16,06 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.26%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.26%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan peran pemberdayaan perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100%	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan peran pemberdayaan perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan gender	100%		Persentase organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan gender	100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu ≤ 12 jam	100%	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu ≤ 12 jam	100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang memiliki akses dan mendapat layanan konseling/konsultasi Puspaga	100%	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang memiliki akses dan mendapat layanan konseling/konsultasi Puspaga	100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan program atau kegiatan	100%	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan program atau kegiatan	100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	Meningkatnya peran kelurahan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	100%	Meningkatnya peran kelurahan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu ≤ 12 jam	100%	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu ≤ 12 jam	100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,60 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,60 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,35 Nilai	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,35 Nilai		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
	Meningkatnya ketahanan daerah dari kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0%	Meningkatnya ketahanan daerah dari kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
	Meningkatnya mutu dan keamanan bahan pangan segar	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	97,91 %	Meningkatnya mutu dan keamanan bahan pangan segar	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	97,91 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
	Meningkatnya ketepatan waktu pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum	Presentase Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	Meningkatnya ketepatan waktu pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum	Presentase Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
	Optimalnya fasilitasi penataan akses pada obyek reforma agraria pada kewenangan Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penataan Aset dan Akses Reforma	100%	Optimalnya fasilitasi penataan akses pada obyek reforma agraria pada kewenangan Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penataan Aset dan Akses Reforma	100%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang lingkungan hidup	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang lingkungan hidup	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%		Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Meningkatnya kualitas mutu air dan udara	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	40.61%	Meningkatnya kualitas mutu air dan udara	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	40.61%		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	88%		Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	88%		Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH perkotaan	Persentase RTH publik perkotaan yang dirawat dan dipelihara	100%	Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH perkotaan	Persentase RTH publik perkotaan yang dirawat dan dipelihara	100%		Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan	Persentase ketepatan waktu rincian teknis/standard	80%	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan	Persentase ketepatan waktu rincian teknis/standard	80%		Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang telah dinilai		Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang telah dinilai			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	60%	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	60%		Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Kapasitas Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	48,00 %	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Kapasitas Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	48,00 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase peningkatan peran aktif kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	73,27 %		Persentase peningkatan peran aktif kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	73,27 %		Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN			PROGRAM PENANGANAN				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	100%	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	100%		Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	95%	Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	95%		Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya proporsi sampah rumah tangga yang dikelola	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	100%	Meningkatnya proporsi sampah rumah tangga yang dikelola	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	100%		Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,25 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,25 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	95%	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	95%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	95%	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	95%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	Meningkatnya kemudahan layanan administrasi kependudukan	Rata-rata waktu tanggap gangguan layanan administrasi kependudukan	24 jam	Meningkatnya kemudahan layanan administrasi kependudukan	Rata-rata waktu tanggap gangguan layanan administrasi kependudukan	24 jam		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	5,80 kelahiran hidup per 1000 perempuan	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	5,80 kelahiran hidup per 1000 perempuan		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	1,68 %		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	1,68 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB)	14,50 %	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB)	14,50 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	20,0 %		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	20,0 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22,45 tahun	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22,45 tahun		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	100%		Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap	92%	Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap	92%		Dinas Perhubungan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	kesekretariatan pada bidang perhubungan	Pelayanan Kesekretariatan		kesekretariatan pada bidang perhubungan	Pelayanan Kesekretariatan			
	Meningkatnya Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya	Persentase kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir	80%	Meningkatnya Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya	Persentase kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir	80%		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Tata Kelola Transportasi Umum Kota Surabaya	Persentase kepatuhan pelayanan transportasi umum	62%	Meningkatnya Tata Kelola Transportasi Umum Kota Surabaya	Persentase kepatuhan pelayanan transportasi umum	62%		Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100%	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100%		Dinas Perhubungan
		Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	21:21 Rasio		Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	21:21 Rasio		Dinas Perhubungan
		Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	53%		Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	53%		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas lalu lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	Meningkatnya kualitas lalu lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam		Dinas Perhubungan
		Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,90	90%		Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,90	90%		Dinas Perhubungan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	94%	Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	94%		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas sistem perparkiran	Persentase peningkatan pengelolaan titik parkir	1%	Meningkatnya Kualitas sistem perparkiran	Persentase peningkatan pengelolaan titik parkir	1%		Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Perairan	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mengikuti Sosialisasi Keselamatan Transportasi Perairan	100%	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Perairan	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mengikuti Sosialisasi Keselamatan Transportasi Perairan	100%		Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Kereta Api	Persentase Petugas Jaga Lintasan Kereta Api yang melaksanakan Upaya Peningkatan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang	100%	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Kereta Api	Persentase Petugas Jaga Lintasan Kereta Api yang melaksanakan Upaya Peningkatan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang	100%		Dinas Perhubungan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang komunikasi dan informatika	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93,36 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang komunikasi dan informatika	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93,36 %		Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan dan permohonan informasi publik	90,5 %	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan dan permohonan informasi publik	90,5 %		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	71%		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	71%		Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Level	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Level		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi digital	Rata-rata nilai tingkat kematangan aspek teknologi digital	1,75 Nilai	Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi digital	Rata-rata nilai tingkat kematangan aspek teknologi digital	1,75 Nilai		Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,23 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,23 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya	86%	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya	86%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
	Meningkatnya koperasi berkinerja baik	Persentase koperasi yang memiliki kinerja baik	78%	Meningkatnya koperasi berkinerja baik	Persentase koperasi yang memiliki kinerja baik	78%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
	Meningkatnya kemampuan pengembangan usaha koperasi	Persentase koperasi yang dapat mengembangkan usahanya	10%	Meningkatnya kemampuan pengembangan usaha koperasi	Persentase koperasi yang dapat mengembangkan usahanya	10%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki akses sumber daya produktif	25%	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki akses sumber daya produktif	25%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Pertumbuhan Wirausaha	1%		Pertumbuhan Wirausaha	1%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	Meningkatnya okupansi sentra usaha	Persentase sentra usaha yang meningkat okupansinya	39%	Meningkatnya okupansi sentra usaha	Persentase sentra usaha yang meningkat okupansinya	39%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Meningkatnya skala kinerja UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya	6,64 %	Meningkatnya skala kinerja UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya	6,64 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94,92 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94,92 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
	Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5%	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
	Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan	100%		Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan	100%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 (tiga) bulan terakhir	7%	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 (tiga) bulan terakhir	7%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial	9%		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial	9%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		kemasyarakatan dalam 3 (tiga) bulan terakhir			kemasyarakatan dalam 3 (tiga) bulan terakhir			dan Olah Raga serta Pariwisata
		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	Meningkatnya atlet yang kompetitif	Persentase atlet yang kompetitif	60%	Meningkatnya atlet yang kompetitif	Persentase atlet yang kompetitif	60%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	Meningkatnya prasarana olahraga yang termanfaatkan	Persentase prasarana olahraga yang termanfaatkan	75%	Meningkatnya prasarana olahraga yang termanfaatkan	Persentase prasarana olahraga yang termanfaatkan	75%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik daerah	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik daerah	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%		Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PENGAMANAN INFORMASI			PENGAMANAN INFORMASI				
	Meningkatnya Tata Kelola Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	100%	Meningkatnya Tata Kelola Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	100%		Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kebudayaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,35 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kebudayaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,35 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	100%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	100%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarah lokal	Persentase masyarakat yang memahami nilai sejarah lokal	79%	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarah lokal	Persentase masyarakat yang memahami nilai sejarah lokal	79%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
	Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan	Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan	89,16 %	Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan	Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan	89,16 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
	Meningkatnya kunjungan ke museum	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	4%	Meningkatnya kunjungan ke museum	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	4%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perpustakaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,09	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perpustakaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,09		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan.	55%	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan.	55%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase masyarakat yang dihasilkan menjadi pegiat literasi	1,5 %		Persentase masyarakat yang dihasilkan menjadi pegiat literasi	1,5 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	49.01%		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	49.01%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	50%	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	50%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30.78%	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30.78%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	15.25%		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	15.25%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan kearsipan unit kerja	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	36.48%	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan kearsipan unit kerja	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	36.48%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Meningkatnya nelayan yang memiliki sarana prasarana memadai	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	45%	Meningkatnya nelayan yang memiliki sarana prasarana memadai	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	45%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Meningkatnya pembudidaya perikanan yang konsisten berproduksi	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang	Meningkatnya pembudidaya perikanan yang konsisten berproduksi	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kepatuhan Nelayan Perikanan Tangkap	95%	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kepatuhan Nelayan Perikanan Tangkap	95%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pemasaran hasil usaha perikanan	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang aktif	75%	Meningkatnya kualitas pemasaran hasil usaha perikanan	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang aktif	75%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Destinasi Wisata Kota Surabaya	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke destinasi Pariwisata Kota Surabaya	3%	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Destinasi Wisata Kota Surabaya	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke destinasi Pariwisata Kota Surabaya	3%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Kota Surabaya	3%	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Kota Surabaya	3%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
	Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	100%	Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	100%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 produk	Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 produk		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Meningkatnya produksi hortikultura pertanian perkotaan	Produksi Hortikultura Pertanian Perkotaan	8,33 Ton	Meningkatnya produksi hortikultura pertanian perkotaan	Produksi Hortikultura Pertanian Perkotaan	8,33 Ton		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Meningkatnya produksi pertanian pada prasarana pertanian milik Pemerintah	Produksi pertanian pada lahan aset	14 Ton	Meningkatnya produksi pertanian pada prasarana pertanian milik Pemerintah	Produksi pertanian pada lahan aset	14 Ton		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
	Meningkatnya kualitas produksi peternakan dan pengendalian kesehatan hewan	Pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan	8 Unit Usaha	Meningkatnya kualitas produksi peternakan dan pengendalian kesehatan hewan	Pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan	8 Unit Usaha		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		hasil layak dipasarkan			hasil layak dipasarkan			
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase penyuluh yang memenuhi standar kompetensi	100%	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase penyuluh yang memenuhi standar kompetensi	100%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha	90%	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha	90%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	Meningkatnya omset pelaku usaha perdagangan	Persentase peningkatan omset pelaku usaha perdagangan	2%	Meningkatnya omset pelaku usaha perdagangan	Persentase peningkatan omset pelaku usaha perdagangan	2%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan komoditas bapokting	100%	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan komoditas bapokting	100%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Usaha Mikro yang memiliki kemampuan ekspor	2.01%	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Usaha Mikro yang memiliki kemampuan ekspor	2.01%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Meningkatnya Pelayanan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai teknis kemetrologian	Persentase Alat UTTP yang Memenuhi syarat teknis kemetrologian	92,44 %	Meningkatnya Pelayanan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai teknis kemetrologian	Persentase Alat UTTP yang Memenuhi syarat teknis kemetrologian	92,44 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
	Meningkatnya cakupan pemasaran usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat cakupan pemasarannya	7%	Meningkatnya cakupan pemasaran usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat cakupan pemasarannya	7%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil menengah yang berdaya	Persentase pelaku usaha industri yang berdaya	24%	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil menengah yang berdaya	Persentase pelaku usaha industri yang berdaya	24%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil menengah yang patuh perizinannya	Persentase Industri Kecil Menengah yang patuh	25%	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil menengah yang patuh perizinannya	Persentase Industri Kecil Menengah yang patuh	25%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
	Meningkatnya kepatuhan penyampaian data pelaku usaha industri kecil menengah	Persentase kepatuhan penyampaian data industri	81%	Meningkatnya kepatuhan penyampaian data pelaku usaha industri kecil menengah	Persentase kepatuhan penyampaian data industri	81%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	SEKRETARIAT DAERAH			**SEKRETARIAT DAERAH**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan dan kerumahtanggaan bagi KDH dan WKDH	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan dan kerumahtanggaan bagi KDH dan WKDH	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan	100%		Sekretariat Daerah

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	100%	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	100%		Sekretariat Daerah
		Persentase rekomendasi Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	100%		Persentase rekomendasi Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	100%		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan dan organisasi	Persentase kematangan perangkat daerah pada level 5	85%	Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan dan organisasi	Persentase kematangan perangkat daerah pada level 5	85%		Sekretariat Daerah
		Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik	97.20%		Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik	97.20%		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan	100%		Sekretariat Daerah

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		Sekretariat Daerah
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%		Sekretariat Daerah
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kinerja SPM	97.43 nilai	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kinerja SPM	97.43 nilai		Sekretariat Daerah
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3 nilai		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3 nilai		Sekretariat Daerah
		Persentase jenis data yang telah disajikan pada aplikasi Basis Data Kewilayahan	100%		Persentase jenis data yang telah disajikan pada aplikasi Basis Data Kewilayahan	100%		Sekretariat Daerah
		Presentase pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100%		Presentase pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100%		Sekretariat Daerah

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kesejahteraan Rakyat	Persentase intervensi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara tepat sasaran	100%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kesejahteraan Rakyat	Persentase intervensi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara tepat sasaran	100%		Sekretariat Daerah
	Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum	Persentase Keberhasilan Pemberian Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah	100%	Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum	Persentase Keberhasilan Pemberian Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah	100%		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kolaborasi Kerja Sama di berbagai Sektor	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal	100%	Meningkatnya Kolaborasi Kerja Sama di berbagai Sektor	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal	100%		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kebijakan dan Regulasi Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	86 nilai	Meningkatnya Kebijakan dan Regulasi Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	86 nilai		Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Hukum	97.2 nilai		Indeks Reformasi Hukum	97.2 nilai		Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan dan Pembangunan	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	17,14 Nilai	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan dan Pembangunan	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	17,14 Nilai		Sekretariat Daerah
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	28,75 Nilai		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	28,75 Nilai		Sekretariat Daerah
		Persentase capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	76%		Persentase capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	76%		Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,5 %		Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,5 %		Sekretariat Daerah
		Tingkat Kematangan UKPBJ	40 Nilai		Tingkat Kematangan UKPBJ	40 Nilai		Sekretariat Daerah

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan BUMD	Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD	100%	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan BUMD	Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD	100%		Sekretariat Daerah
	Tersedianya data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan	Persentase penyediaan data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan	100%	Tersedianya data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan	Persentase penyediaan data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan	100%		Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD			**SEKRETARIAT DPRD**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		Sekretariat DPRD
	Meningkatnya ketepatan layanan pendukung terhadap DPRD	Persentase pelaksanaan layanan pendukung DPRD yang difasilitasi	100%	Meningkatnya ketepatan layanan pendukung terhadap DPRD	Persentase pelaksanaan layanan pendukung DPRD yang difasilitasi	100%		Sekretariat DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
	Meningkatnya ketepatan fasilitasi tugas dan fungsi utama DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	Meningkatnya ketepatan fasilitasi tugas dan fungsi utama DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%		Sekretariat DPRD

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Prolegda yang yang diproses menjadi Ranperda	52,5 %		Persentase Prolegda yang yang diproses menjadi Ranperda	52,5 %		Sekretariat DPRD
	PERENCANAAN			**PERENCANAAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perencanaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,69 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perencanaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,69 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
	Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase hasil analisa data dan evaluasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan	100%	Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase hasil analisa data dan evaluasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan	100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Perekonomian dan SDA	98,63 %	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Perekonomian dan SDA	98,63 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Perekonomian dan SDA	90%		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Perekonomian dan SDA	90%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,63 %	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,63 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada	90%		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada	90%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,63 %	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,63 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90%		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	KEUANGAN			**KEUANGAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang keuangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang keuangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96%		Badan Pendapatan Daerah

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas analisis pengembangan retribusi daerah	Cakupan retribusi daerah yang dilakukan analisis dan pengembangan	100%	Meningkatnya kualitas analisis pengembangan retribusi daerah	Cakupan retribusi daerah yang dilakukan analisis dan pengembangan	100%		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang keuangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,63 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang keuangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,63 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
	Optimalisasi tata kelola dana transfer	Persentase kesesuaian penyaluran dana transfer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Optimalisasi tata kelola dana transfer	Persentase kesesuaian penyaluran dana transfer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Kesesuaian Alokasi Mandatory Spending	100%	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Kesesuaian Alokasi Mandatory Spending	100%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA	3,64 %	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA	3,64 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	70%		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	70%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Aset Produktif	6%	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Aset Produktif	6%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2.56%		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2.56%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase register tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	16,01 %		Persentase register tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	16,01 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan retribusi daerah	Cakupan retribusi daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan retribusi daerah	Cakupan retribusi daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya pajak daerah pada sektor pajak PBB, BPHTB	Persentase Capaian PBB, BPHTB	88,49 %	Meningkatnya pajak daerah pada sektor pajak PBB, BPHTB	Persentase Capaian PBB, BPHTB	88,49 %		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya pajak daerah pada sektor Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah	Persentase Capaian Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah	98,77 %	Meningkatnya pajak daerah pada sektor Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah	Persentase Capaian Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah	98,77 %		Badan Pendapatan Daerah
	KEPEGAWAIAN			**KEPEGAWAIAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94.18%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94.18%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan ASN	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan ASN	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	96%	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	96%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang disiplin	97%		Persentase ASN yang disiplin	97%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase PNS yang telah mengikuti asesmen	28%		Persentase PNS yang telah mengikuti asesmen	28%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya ketepatan waktu dalam pelayanan	Persentase Layanan Administrasi	100%	Meningkatnya ketepatan waktu dalam pelayanan	Persentase Layanan Administrasi	100%		Badan Kepegawaian dan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	administrasi kepegawaian	Kepegawaian Yang Tepat Waktu		administrasi kepegawaian	Kepegawaian Yang Tepat Waktu			Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai	Persentase ASN yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	97%	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai	Persentase ASN yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	97%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penelitian dan pengembangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,69 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penelitian dan pengembangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,69 %		Badan Riset dan Inovasi Daerah
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
	Meningkatnya pemanfaatan riset dalam pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi	100%	Meningkatnya pemanfaatan riset dalam pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi	100%		Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Pembangunan Daerah			Pembangunan Daerah			
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan/atau Badan Usaha di Daerah	100%	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan/atau Badan Usaha di Daerah	100%		Badan Riset dan Inovasi Daerah
INSPEKTORAT DAERAH				**INSPEKTORAT DAERAH**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Inspektorat	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95.30%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Inspektorat	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95.30%		Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
Meningkatnya Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	100%	Meningkatnya Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	100%		Inspektorat
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pengawasan keuangan dan kinerja yang telah selesai	100%	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pengawasan keuangan dan kinerja yang telah selesai	100%		Inspektorat
Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan	100%	Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan	100%		Inspektorat

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	tujuan tertentu yang dilaporkan			tujuan tertentu yang dilaporkan				
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
	Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Evaluasi, serta Verifikasi terkait Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah yang telah diselesaikan	100%	Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Evaluasi, serta Verifikasi terkait Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah yang telah diselesaikan	100%		Inspektorat
	Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas	Persentase Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang terpenuhi dengan nilai > 90	100%	Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas	Persentase Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang terpenuhi dengan nilai > 90	100%		Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBBM	100%		Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBBM	100%		Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBK	100%		Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBK	100%		Inspektorat
	Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Evaluasi,	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Evaluasi,	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	100%		Inspektorat

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	serta Verifikasi terkait Akuntabilitas Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang disusun		serta Verifikasi terkait Akuntabilitas Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang disusun			
	KECAMATAN			**KECAMATAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,08 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,08 %		Kec. Asemrowo
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,18 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,18 %		Kec. Benowo
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.14%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.14%		Kec. Bubutan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.37%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.37%		Kec. Bulak
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.29%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.29%		Kec. Dukuh Pakis
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap	96,50 %	Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap	96,50 %		Kec. Gayungan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	kesekretariatan pada Kecamatan	pelayanan kesekretariatan		kesekretariatan pada Kecamatan	pelayanan kesekretariatan			
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.70%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.70%		Kec. Genteng
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,61 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,61 %		Kec. Gubeng
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		Kec. Gunung Anyar
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.59%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.59%		Kec. Jambangan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,81 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,81 %		Kec. Karangpilang
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.32%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.32%		Kec. Kenjeran
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44%		Kec. Krembangan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26%		Kec. Lakarsantri
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap	97,03 %	Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap	97,03 %		Kec. Mulyorejo

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	kesekretariatan pada Kecamatan	pelayanan kesekretariatan		kesekretariatan pada Kecamatan	pelayanan kesekretariatan			
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,2 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,2 %		Kec. Pabean Cantian
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,45 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,45 %		Kec. Pakal
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		Kec. Rungkut
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,46 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,46 %		Kec. Sambikerep
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,20 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,20 %		Kec. Sawahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.92%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.92%		Kec. Semampir
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,32 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,32 %		Kec. Simokerto
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26 %		Kec. Sukolilo

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,29 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,29 %		Kec. Sukomanunggal
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.92%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.92%		Kec. Tambaksari
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,20 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,20 %		Kec. Tandes
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,41 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,41 %		Kec. Tegalsari
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,04 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,04 %		Kec. Tenggilis Mejoyo
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.46%	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.46%		Kec. Wiyung
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,4 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,4 %		Kec. Wonocolo
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,08 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,08 %		Kec. Wonokromo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Asemrowo
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Benowo
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Bubutan
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Bulak
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Dukuh Pakis
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Gayungan
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Genteng
	Terselenggaranya pelayanan publik di	Persentase pelayanan yang	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di	Persentase pelayanan yang	100%		Kec. Gubeng

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kecamatan yang sesuai ketentuan	dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP		Kecamatan yang sesuai ketentuan	dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP			
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	99.30%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	99.30%		Kec. Gunung Anyar
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Jambangan
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Karangpilang
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Kenjeran
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Krembangan
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Lakarsantri
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai	100%		Kec. Mulyorejo

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		standar pelayanan atau SOP			standar pelayanan atau SOP			
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Pabean Cantian
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Pakal
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Rungkut
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Sambikerep
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Sawahan
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Semampir
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Simokerto

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Sukolilo
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Sukomanunggal
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Tambaksari
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Tandes
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Tegalsari
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	96.50%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	96.50%		Kec. Tenggilis Mejoyo
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Wiyung
	Terselenggaranya pelayanan publik di	Persentase pelayanan yang	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di	Persentase pelayanan yang	100%		Kec. Wonocolo

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kecamatan yang sesuai ketentuan	dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP		Kecamatan yang sesuai ketentuan	dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP			
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Wonokromo
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Asemrowo
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Benowo
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62.58%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62.58%		Kec. Bubutan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	88.50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	88.50%		Kec. Bulak
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	68.32%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	68.32%		Kec. Dukuh Pakis

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Gayungan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Genteng
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Gubeng
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Gunung Anyar
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	25%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	25%		Kec. Jambangan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Karangpilang
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Kenjeran
	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase kampung yang berpartisipasi	70%	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase kampung yang berpartisipasi	70%		Kec. Krembangan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	dalam pengembangan inovasi		di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	dalam pengembangan inovasi			
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Lakarsantri
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87.50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87.50%		Kec. Mulyorejo
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Pabean Cantian
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	88%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	88%		Kec. Pakal
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Rungkut
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Sambikerep
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam	50%		Kec. Sawahan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	dalam peningkatan inovasi	pengembangan inovasi		dalam peningkatan inovasi	pengembangan inovasi			
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Semampir
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Simokerto
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Sukolilo
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%		Kec. Sukomanunggal
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Tambaksari
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%		Kec. Tandes
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Tegalsari

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Tenggilis Mejoyo
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Wiyung
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%		Kec. Wonocolo
	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%		Kec. Wonokromo
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Asemrowo
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Benowo

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Bubutan
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Bulak
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Dukuh Pakis
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Gayungan
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Genteng
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan	Persentase pelaksanaan	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan	Persentase pelaksanaan	100%		Kec. Gubeng

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP		dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP			
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Gunung Anyar
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Jambangan
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Karangpilang
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Kenjeran
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang	100%		Kec. Krembangan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP			dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP			
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Lakarsantri
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Mulyorejo
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Pabean Cantian
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Pakal
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai	100%		Kec. Rungkut

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		standar pelayanan atau SOP			standar pelayanan atau SOP			
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Sambikerep
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Sawahan
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Semampir
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Simokerto
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Sukolilo

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Sukomanunggal
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Tambaksari
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Tandes
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Tegalsari
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Tenggilis Mejoyo
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan	Persentase pelaksanaan	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan	Persentase pelaksanaan	100%		Kec. Wiyung

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP		dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP			
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Wonocolo
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%		Kec. Wonokromo
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesatuan bangsa dan politik	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,92 %	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesatuan bangsa dan politik	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,92 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Persentase partisipan yang	93,22 %	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Persentase partisipan yang	93,22 %		Badan Kesatuan

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan		akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan			Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
	Meningkatnya peran serta lembaga pendidikan dan lembaga politik dalam peningkatan etika dan budaya politik	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	23%	Meningkatnya peran serta lembaga pendidikan dan lembaga politik dalam peningkatan etika dan budaya politik	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	23%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	68.2 Nilai	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	68.2 Nilai		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase pencegahan P4GN di kawasan rawan narkoba	90,5 %	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase pencegahan P4GN di kawasan rawan narkoba	90,5 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN /PROGRAM/OUTCOME RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase potensi konflik umat beragama yang terfasilitasi	90,5 %		Persentase potensi konflik umat beragama yang terfasilitasi	90,5 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
	Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	98,00 %	Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	98,00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,40	Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,40	
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	
		PDRB Per Kapita	Rp Juta	289,29		PDRB Per Kapita	Rp Juta	289,29	
	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	ICOR	%	4,71	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	ICOR	%	4,71	
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	25,20		Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	25,20	
	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Tingkat Inflasi	%	2,5	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Tingkat Inflasi	%	2,5	
	Meningkatnya Produktivitas	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,44	Meningkatnya Produktivitas	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,44	
		Rasio PDRB Penyediaan	%	16,67		Rasio PDRB Penyediaan	%	16,67	

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
	PDRB Sektor Unggulan	Akomodasi Makan dan Minum			PDRB Sektor Unggulan	Akomodasi Makan dan Minum			
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	28,13		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	28,13	
	Meningkatnya Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,02	Meningkatnya Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,02	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,47		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,47	
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	85	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	85	
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,77	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,77	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,50	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,50	
	Meratanya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,01	Meratanya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,01	
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,34		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,34	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Indeks	0,95	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Indeks	0,95	

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
	dan Keolahragaan				dan Keolahragaan				
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	105,21	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	105,21	
	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Angka	94,50	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Angka	94,50	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	97,25	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	97,25	
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,61		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,61	
		Nilai SAKIP Kota Surabaya	Nilai	90,39		Nilai SAKIP Kota Surabaya	Nilai	90,39	
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	Indeks	1,8	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	Indeks	1,8	
	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	81,78	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	81,78	

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	%	28,49	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	%	28,49	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	75,71	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	75,71	
	Meningkatnya Keseimbangan dan Kesinambungan Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Indeks	67,94	Meningkatnya Keseimbangan dan Kesinambungan Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Indeks	67,94	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,53	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,53	
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO_2 eq	245816,22		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO_2 eq	245816,22	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks	0,69	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks	0,69	
	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	107,65	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	107,65	

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Rasio Gini	Indeks	0,375	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Rasio Gini	Indeks	0,375	
		Tingkat Kemiskinan	%	3,85		Tingkat Kemiskinan	%	3,85	
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	62,7	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	62,7	
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,111	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,111	
		Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	Skor	361		Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	Skor	361	
	Terciptanya Masyarakat Maju dan Berbudaya dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	7,33	Terciptanya Masyarakat Maju dan Berbudaya dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	7,33	
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	80,71	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	80,71	
		Indeks Toleransi Umat Beragama	Nilai	0,968		Indeks Toleransi Umat Beragama	Nilai	0,968	

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026				RKPD TAHUN 2026				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	57,4	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	57,4	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

KESELARASAN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	penyandang disabilitas.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	37574	16362	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Orang	-	450	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan					Pendidikan yang dilaksanakan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	-	-	Pembangunan unit sekolah baru (USB) di jenjang PAUD direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2027

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	45	90	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan	Unit	1	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau	Unit	1	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
							dalam rangka p				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	5	5	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			KESEHATAN MASYARAKAT			yang disediakan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	5	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	penyandang disabilitas.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	768	768	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			MASYARAKAT							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	-	1632	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan,	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki jaringan irigasi permukaan, karena saluran berfungsi sebagai sistem

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		energi, dan air									drainase perkotaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki jaringan irigasi permukaan, karena saluran berfungsi sebagai sistem drainase perkotaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki jaringan irigasi permukaan, karena saluran berfungsi sebagai sistem drainase perkotaan
URUSAN PEMERINTAHAN	Memantapkan sistem pertahanan	Meningkatnya ketahana	1.03.02	PROGRAM PENGELO	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi	KM	-	-	Kota Surabaya tidak

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	n air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air		LAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Permukaan yang Direhabilitasi				memiliki jaringan irigasi permukaan, karena saluran berfungsi sebagai sistem drainase perkotaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	-	-	Penyediaan dan pengembangan sistem air minum telah ditangani dan dilaksanakan oleh BUMD (PDAM Surya Sembada)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapai	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	-	-	Penyediaan dan pengembangan sistem air minum telah ditangani dan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
PENATAAN RUANG	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	an swasembada pangan, energi, dan air		AN AIR MINUM							dilaksanakan oleh BUMD (PDAM Surya Sembada)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	-	-	Perluasan sistem air minum telah ditangani dan dilaksanakan oleh BUMD (PDAM Surya Sembada)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan,	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	-	-	Perluasan sistem air minum telah ditangani dan dilaksanakan oleh BUMD (PDAM Surya Sembada)

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	energi, dan air									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Terlaksananya pembangunan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAA	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	Pemerintah Kota Surabaya telah

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	daerah sesuai dengan rencana tata ruang		N PENATAAN RUANG							menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2025 tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045 di tahun 2025
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2025 tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045 di tahun 2025
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Terpenuhinya rumah layak,	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk	Unit Rumah	10	1190	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	terjangkau, dan berkelanjutan		KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	-	10	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	-	-	Terkait dengan perbaikan PSU di perumahan diarahkan untuk dilaksanakan oleh

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
PERMUKIMAN	an kemiskinan.			UMUM (PSU)							pengembang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	-	12	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-	1	
URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan	357,00 - Terwujudnya	1.05.03	PROGRAM PENANGG	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan	Jumlah dokumen Rencana	Dokumen	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		ULANGAN BENCANA		Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakara	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	-	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		n sesuai standar									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	-	12	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	laporan	12	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
MASYARAKAT		Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar					Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	12	12	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi,	358,00 - Terwujudnya manajem	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan	Laporan	12	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	dan hak asasi manusia (HAM).	en bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		dan Peraturan Kepala daerah	Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	yang adil dan makmur.	pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	-	1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulang	Dokumen	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Penyelamatan (RISPKP)	an Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	459	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	Lembaga	12	459	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	486	
URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkuat pembangunan sumber	Penurunan Kemiskin	1.06.02	PROGRAM PEMBERD	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Penyuluh Sosial,	Orang	-	486	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
BIDANG SOSIAL	daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	an Melalui Graduasi		AYAAN SOSIAL		Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2229	680	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Penurunan Kemiskinan	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	Orang	2229	680	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melalui Graduasi		JAMINAN SOSIAL			Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	25574	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan	Orang	-	25574	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			JAMINAN SOSIAL			Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	720	720	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	720	720	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	220	230	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		kesempatan kerja dan perlindungan pekerja									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	220	230	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Orang	-	25650	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja					Kesejahteraan Pekerja				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	-	25650	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	58	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	-	610	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	-	2	
URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkuat pembangunan sumber	325,00 - Meningkatnya	2.08.07	PROGRAM PERLINDU	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan	Orang	-	150	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak		NGAN KHUSUS ANAK		Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	;-	-	Berkaitan dengan ketahanan pangan keluarga ini telah diakomodir dalam subkegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	hijau, dan ekonomi biru										Daya Lokal. Bentuk kegiatannya yaitu mengedepankan pengembangan kapasitas keluarga dalam kreasi pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	;-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan	Dokumen	;-	-	Akan dilaksanakan oleh BUMD milik Pemerintah

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			AN PANGAN		Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Kota Surabaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	-	15	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIA	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan	Dokumen	-		Berdasarkan SK Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/202/436.1.2/2024

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah		N PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		(satu) Kabupaten/Kota	Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Surabaya, ketua pelaksana harian adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	produksi melalui peran aktif koperasi.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	-	3	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks	Lokasi	-	3	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	masyarakat yang adil dan makmur.						Kualitas Air Laut)				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	-	1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	yang adil dan makmur.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	570129	568047	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	570129	568047	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	yang adil dan makmur.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	-	85	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	-	85	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	yang adil dan makmur.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	-	14600	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	Ton	-	14600	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	650430	568047	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota	Ton	650430	568047	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						atau TPA/TPST Regional				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		40	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memperkuat pembangunan sumber daya	Meningkatnya kualitas layanan	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Laporan	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital		PENDUDUK			pendaftaran penduduk				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui	Laporan	-	-	Pada Program Pencatatan Sipil tidak dilaksanakan Koordinasi dangan Kementrian bidang Agama dengan pertimbangan : 1. Berdasar Peraturan Pemerintah

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					dan Pencatatan Sipil K	Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d				No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Pasal 2 ayat (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
											sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 2. Sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Bidang Pencatatan Sipil hanya melaksanakan pencatatan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
											perkawinan untuk yang non muslim dan tidak pernah berkoordinasi dengan Kementrian bidang agama di tingkat kota/kabupaten. 3. Dalam pencatatan perkawinan non muslim tidak dipersyaratkan koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang agama
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependu	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	-	3050	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	dukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki desa

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki desa

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	-	-	Kota Surabaya tidak memiliki desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	;-	3	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARG	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	Laporan / Dokumen	;-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
KELUARGA BERENCANA	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berkualitas (IPKK)		A SEJAHTERA (KS)			Sejahtera (PPKS)				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	Kelompok	57	153	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	penyandang disabilitas.						Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2500	2500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2500	2500	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	12	14	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	Terwujudnya Peningkatan Konektivi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	12	14	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
PERHUBUNGAN	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	tas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			yang terehabilitasi dan terpelihara				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	-	-	Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas pelabuhan sungai dan danau

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		Jalan Kabupaten/Kota									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	-	-	Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas pelabuhan sungai dan danau
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurun	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberanga	Unit	-	-	Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas pelabuhan sungai, danau, dan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	tambah di dalam negeri.	an Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					n yang Tersedia				penyeberangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	-	-	Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan
URUSAN PEMERIN	Memperkuat reformasi	Teraksel erasinya	2.16.02	PROGRAM	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif,	Jumlah laporan	Laporan	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
TAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	transformasi pemerintah digital di daerah		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	-	1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Terakselerasinya transformasi	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang	Permohonan	36	30	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintah digital di daerah		INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			diselesaikan sesuai peraturan perundangan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	36	30	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	12	
URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkokoh ideologi Pancasila,	Terakselerasinya transform	2.16.02	PROGRAM PENGELO	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini,	Jumlah rekomendasi komunikasi	Rekomendasi	-	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	asi pemerintah digital di daerah		LAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		dan Aspirasi Publik	terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Teraksel erasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	34	17	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Teraksel erasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	34	17	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	7	7	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	7	7	
URUSAN PEMERIN	Memperkuat reformasi	Terakselerasinya	2.16.03	PROGRAM	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem	Jumlah Aplikasi SPBE	Aplikasi	-	10	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
TAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	transformasi pemerintah digital di daerah		PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	10	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-	58	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-	58	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	-	6	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	-	6	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Peningkatan Produktivitas	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok	Pembinaan dan/atau Pendampinga	Kelompok Masyarakat	-	20	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Koperasi dan UMKM		DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	n yang dilaksanakan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembang	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	85	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	kan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	9	10	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Peningkatan Produktivitas	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan	Orang	-	160	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Koperasi dan UMKM		USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Usaha Mikro dan Kewirausahaan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	-	5	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSA	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah	Kegiatan Usaha	2960	3060	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
MAN MODAL	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			NAAN PENANAMAN MODAL			Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	500	700	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa yang menjadi sasaran intervensi

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
											adalah perorangan pemuda, bukan organisasi pemuda
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan kepada atlet yang terdaftar di KONI dan KORMI, bukan melakukan seleksi atlet
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memperkuat pembangunan sumber daya	Meningkatnya kualitas pemuda,	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kot	Orang	700	2214	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga		KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Berprestasi kabupaten/kota	a yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	-	62	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	-	81	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	-	58	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	-	58	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan	Menguatnya keamanan siber dan	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Dokumen	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
PERSANDIAN	mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	sandi lingkungan Pemerintah Daerah		PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Pemerintah Daerah	Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma,	Dokumen	-	1	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
							Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	2	
URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan	330,00 - Peningkatan	2.22.02	PROGRAM PENGEMB	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek	2	2	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
BIDANG KEBUDAYAAN	yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)		ANGAN KEBUDAYAAN		Objek Pemajuan Kebudayaan	yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	-	20	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	melalui peran aktif koperasi.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	-	20	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	-	-	Kota Surabaya telah memiliki tim ahli cagar budaya dan dalam menetapkan sebagai cagar budaya tidak dilakukan setiap tahun.

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										Untuk penetapan cagar budaya telah diakomodir dalam subkegiatan Pelindungan Cagar Budaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	-	-	Kota Surabaya telah memiliki tim ahli cagar budaya dan dalam menetapkan sebagai cagar budaya tidak dilakukan setiap tahun. Untuk penetapan cagar budaya telah diakomodir dalam subkegiatan Pelindunga

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
											n Cagar Budaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	-	4	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	-	4	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	200	307	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	Meningkatnya Kegemaran Membac	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai	Perpustakaan	200	307	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
PERPUSTAKAAN	dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	a dan Literasi Masyarakat		PERPUSTAKAAN			kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	-	17305	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	-	17305	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	-	6	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	-	6	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	-	2	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	-	2	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	66	68	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kolektif Bangsa									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	100	1200	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Berkelanjutan									dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	-	65	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan	Pelaku Usaha	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						kabupaten/kota				Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	1768	1768	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	-	105	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas borobudur Yogyakarta Prambanan (bukan di kota Surabaya)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINAS	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik	Dokumen	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		I PARIWISATA			Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				Kabupaten/ Kota. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung kegiatan prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok Gili Tramena (bukan di Kota Surabaya)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	-	60	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung kegiatan prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba (bukan di Kota Surabaya)
URUSAN PEMERINTAHAN	Melanjutkan pengembangan	Meningkatnya Kontribus	3.26.02	PROGRAM PENINGK	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	2	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
BIDANG PARIWISATA	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	i Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		ATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	-	2	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	-	-	Pengembangan dari prasarana ekonomi kreatif memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Kota Surabaya yang pemeliharaan dan pengelolaannya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
											kegiatan prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	-	-	Telah diakomodir dalam subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota. Selain itu dalam rakortek, subkegiatan ini untuk mendukung kegiatan prioritas percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
											Lombok Gili Tramena
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	-	-	Master plan terkait ekonomi kreatif sedang dalam proses penyusunan di Tahun 2025
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDU	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	-	-	Master plan terkait ekonomi kreatif sedang dalam proses penyusunan di Tahun 2025

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		NGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	-	-	Master plan terkait ekonomi kreatif sedang dalam proses penyusunan di Tahun 2025

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	aktif koperasi.										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	-	4	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	-	-	Kota Surabaya bukan merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										Pangan dikarenakan Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk disebut sebagai lumbung pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	-	-	Kota Surabaya bukan merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan dikarenakan Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
											yang cukup untuk disebut sebagai lumbung pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	6	-	Kota Surabaya bukan merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan dikarenakan Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk disebut sebagai lumbung pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	-	35.975	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
PERTANIAN	negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	-	-	Berdasarkan pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
											bahan berbahaya dilakukan dengan dikoordinasikan oleh Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	-	2	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	-	50	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	-	-	Pemerintah Kota Surabaya mengikuti/menjadi peserta pada misi dagang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	-	1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	12	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	12	1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan	Dokumen	-	12	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
						Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	-	-	Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	-	-	Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang transmigrasi

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	-	-	Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang transmigrasi
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	-	118	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	-	118	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Orang	-	118	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
	untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pancasila		AN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	30	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesi	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANIS	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	Orang	-	30	

BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
		a serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila		ASI KEMASYARAKATAN		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	30	

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

DAFTAR KESELARASAN
SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90 – 5,40	5,11 – 5,91	5,80	
2	PDRB Per Kapita (juta)	80,10 – 90,71	266,01 - 274,64	289,29	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	14,2	-	-	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,95 – 9,10	3,57 – 4,09	3,85	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70 – 4,48	5,25 – 4,34	4,47	
6	Rasio Gini (nilai)	0,370 – 0,380	0,369 - 0,409	0,375	
7	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,64 – 0,65	-	-	Untuk Kota Surabaya menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia - Target Surabaya dari Provinsi Jawa Timur :85,15 - 85,75 - Target RKPD Kota Surabaya : 85,77

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026	KETERANGAN
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1 – 2,17	-	-	Untuk Kota Surabaya menggunakan indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif - Target Surabaya dari Provinsi Jawa Timur : 219.120,90 Ton CO2 eq - Target RKPD Kota Surabaya : 245.816,22 Ton CO2 eq
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,08 – 74,25	-	61,53	

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

DAFTAR KESELARASAN
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
(1)		(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		74,68	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		76.50	Indikator Sasaran Kota dan Tujuan PD
2	Kesehatan Ibu dan Anak:				Kesehatan Ibu dan Anak:			
	-	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109	2	-	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	30.18	Indikator sasaran PD
	-	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,50	3	-	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	0,60	Indikator sasaran PD
3	-	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	410	Indikator sasaran PD
	-	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,00			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	79	Indikator program PD
	-	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,00			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,9	Indikator program PD
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)		98,70		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)		98,70	Indikator program PD
5	Hasil Pembelajaran:				Hasil Pembelajaran:			
	a)	Rata-rata Nilai PISA			a)	Rata-rata Nilai PISA		

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
	-	Membaca	396		-	Membaca	N/A	
	-	Matematika	404		-	Matematika	N/A	
	-	Sains	416		-	Sains	N/A	
	b)	Rata-rata nilai asesmen nasional			b)	Rata-rata nilai asesmen nasional		
	-	Literasi membaca	65,89		-	Literasi membaca SD	74.37	Indikator program PD
						Literasi membaca SMP	86.21	Indikator program PD
	-	Numerasi	58,86		-	Numerasi SD	63.79	Indikator program PD
						Numerasi SMP	74.68	Indikator program PD
	c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45	4	c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11.34	Indikator tujuan PD
	d)	Harapan Lama Sekolah	13,36	5	d)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.01	Indikator tujuan PD
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		34,92	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		N/A	
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		68,50		Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		N/A	Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi
8	Tingkat kemiskinan (%)		6,5-7,5	7	Tingkat kemiskinan (%)		3.85	Indikator tujuan kota
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		34,99	8	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		60,78	Indikator program PD

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		10,40		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) diusulkan untuk menggunakan proksi :		N/A	
						a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	N/A	
						b) Proxy : Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	N/A	
11	Produktivitas Industri dan Pertanian				Produktivitas Industri dan Pertanian			
	a)	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,20	9	a)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18.44	Indikator tujuan PD
	b)	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)			b)	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	N/A	Bukan sektor unggulan di Kota Surabaya
12	Pengembangan Pariwisata				Pengembangan Pariwisata			
	a)	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70	10	a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	16.67	Indikator tujuan kota
	b)	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00 - 24,70			Devisa Pariwisata (miliar USD)	N/A	
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		7,40-8,00		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		N/A	Belum ada data terkait PDB Ekonomi Kreatif
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
	a)	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,15			Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	N/A	
	b)	Rasio kewirausahaan (%)	3,18			Rasio kewirausahaan (%)	N/A	
	c)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,12			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	N/A	
	d)	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,26			Return on Asset (ROA) BUMN (%)	N/A	

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik				Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
	a)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44 - 4,96	11	a)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.47	Indikator Sasaran Kota dan tujuan PD
	b)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	N/A	
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		56,40 - 59,31	12	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)		61.02	Indikator sasaran kota
17	Tingkat penguasaan IPTEK				Tingkat penguasaan IPTEK			
	a)	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31		a)	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	N/A	
	b)	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	52		b)	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	N/A	
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
	a)	Indeks Ekonomi Hijau	71,01		a)	Indeks Ekonomi Hijau	N/A	
	b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00		b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	N/A	
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		41		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		N/A	
20	Biaya Logistik (% PDB)		13,30		Biaya Logistik (% PDB)		N/A	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		29,44	13	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		25.20	Indikator tujuan kota
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		22, 7		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		N/A	
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan				Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			
	a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58		a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	N/A	
	b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,66	14	b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	98.64	Indikator sasaran PD
	c)	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91	15	c)	Persentase Desa Mandiri (%)	N/A	
24	Indeks Materi Hukum		N/A		Indeks Materi Hukum		N/A	

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
25		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,70	16		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.80	Indikator Sasaran Kota dan tujuan PD
26		Indeks Pelayanan Publik	N/A			Indeks Pelayanan Publik	4.61	Indikator Sasaran Kota dan tujuan PD
27	Anti Korupsi				Anti Korupsi			
	-	Indeks Integritas Nasional	89,17		-	Nilai Survey Penilaian Integritas	75.71	Indikator sasaran kota
	-	Indeks Persepsi Korupsi	40		-	Indeks Persepsi Korupsi	N/A	
28		Indeks Pembangunan Hukum	0,70		Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi :		N/A	
					a	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	Indikator program PD
					b	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	N/A	
29		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	68,00		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		N/A	
30		Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66		Indeks Demokrasi Indonesia		N/A	
31		Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	N/A		Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		N/A	
32		Tingkat Inflasi (%)	2,50 ± 1,00		Tingkat Inflasi (%)		2,50	Indikator Sasaran Kota dan tujuan PD
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
	a)	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51		a)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	N/A	
	b)	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63		b)	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	N/A	
	c)	Aset Asuransi/PDB (%)	9,30		c)	Aset Asuransi/PDB (%)	N/A	
	d)	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,90		d)	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	N/A	
	e)	Total Kredit/PDB (%)	38,46		e)	Total Kredit/PDB (%)	N/A	
34		Inklusi Keuangan (%)	91,50		Inklusi Keuangan (%)		N/A	

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		65,8	17	Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi :		N/A	
						Jumlah kerjasama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (Sister Province/Sister City)	N/A	
36	Asia Power Index (Military Capability)		17,0	18	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		58,99		Indeks Pembangunan Kebudayaan (%)		57.4	Indikator tujuan kota
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama		77,14		Indeks Kerukunan Umat Beragama		N/A	
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		73,83		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		65.10	Indikator tujuan PD
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,421	19	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0.111	Indikator tujuan kota
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,47		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		N/A	
42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		76,67		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		61.53	Indikator tujuan kota
	a)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	N/A	20	a)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75.76	Indikator sasaran PD
		Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A			Indeks Kualitas Air (IKA)	62.48	Indikator sasaran PD
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	N/A			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33.60	Indikator sasaran PD
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	bukan kewenangan kota
	b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	17	21	b)	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	14.98	Indikator sasaran PD
	c)			22	c)	Pengelolaan sampah		

NO	RKP 2026**			NO	RKPD 2026 KABUPATEN/KOTA*			KETERANGAN
		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)		-	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	95	Indikator program PD
				23	-	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	100	Indikator program PD
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan				Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan			
	a)	Ketahanan Energi			a)	Ketahanan Energi		
	-	Indeks Ketahanan Energi	6,82			- Konsumsi Listrik per kapita (kWh)	N/A	
						- Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	N/A	
	b)	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	6,55	24	b)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	3.49	
	c)	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50		c)	Ketahanan Air		
	-	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	60,16		-	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	N/A	
	-	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,24	25	-	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	53.45	Indikator sasaran PD
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB		0,136	26	Indeks Risiko bencana (IRB)		107.65	Indikator sasaran kota
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		N/A	
	a)	Kumulatif	19,07		a)	Kumulatif (ton CO2 eq.)	245,816.22	Indikator sasaran kota
	b)	Tahunan	27,35		b)	Tahunan	N/A	

Keterangan :

****) Indikator Utama Pembangunan kabupaten/kota dapat disesuikan dengan kebijakan masing-masing provinsi.***

*****) Sumber Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026***

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

DAFTAR KESELARASAN
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	**Prioritas Nasional 1**	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2	**Prioritas Nasional 2**	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3	**Prioritas Nasional 2**	Pengembangan Pangan Hewani	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
4	**Prioritas Nasional 2**	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
5	**Prioritas Nasional 2**	Peningkatan penyediaan energi	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
6	**Prioritas Nasional 2**	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
7	**Prioritas Nasional 2**	Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** **Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
8	**Prioritas Nasional 2**	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
9	**Prioritas Nasional 2**	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
10	**Prioritas Nasional 2**	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** **Pengelolaan Sampah** Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Penanganan sampah melalui pengangkutan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
11	**Prioritas Nasional 2**	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** Pengawasan Ekstraksi Garam Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
12	**Prioritas Nasional 3**	Pengembangan koperasi sektor produksi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
13	**Prioritas Nasional 4**	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Pengadaan Perlengkapan PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
14	**Prioritas Nasional 4**	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
15	**Prioritas Nasional 4**	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
16	**Prioritas Nasional 4**	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
17	**Prioritas Nasional 4**	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** **Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan** Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset **Invensi dan Inovasi** Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
18	**Prioritas Nasional 4**	Pencegahan dan penurunan stunting	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
19	**Prioritas Nasional 4**	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Peningkatan Pelayanan BLUD** Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
20	**Prioritas Nasional 4**	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
21	**Prioritas Nasional 4**	Investasi pelayanan kesehatan primer	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** Pembangunan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
22	**Prioritas Nasional 4**	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pengembangan Rumah Sakit **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** **Pengelolaan Barang Milik Daerah** Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
23	**Prioritas Nasional 4**	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
24	**Prioritas Nasional 4**	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
25	**Prioritas Nasional 6**	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
26	**Prioritas Nasional 7**	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
27	**Prioritas Nasional 7**	Transformasi digital layanan publik prioritas	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
			Penyediaan Akses Internet Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

DAFTAR KESELARASAN
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	**Provinsi Jawa Timur**	1. Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output:			
1a	**Provinsi Jawa Timur**	- Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis;	Kota Surabaya	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
1b	Provinsi Jawa Timur	- Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional;	Kota Surabaya		Pemerintah Kota Surabaya memiliki sistem Aplikasi Sayang Warga (ASW) dimana dalam ASW ini terdapat pendataan terkait status gizi balita di Kota Surabaya seperti Balita dengan status gizi Stunting, Pra Stunting, Rawan Stunting, Gizi Buruk dan Gizi Kurang. Berdasarkan data yang diinput pada aplikasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Perangkat Daerah terkait dapat memberikan intervensi secara tepat sasaran
1c	**Provinsi Jawa Timur**	- Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** **Pengelolaan Barang Milik Daerah** Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
1d	**Provinsi Jawa Timur**	- Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha;	Kota Surabaya	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** Perluasan Kesempatan Kerja **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
1e	**Provinsi Jawa Timur**	- Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor.	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
2	**Provinsi Jawa Timur**	2. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat	Kota Surabaya	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.			
3	**Provinsi Jawa Timur**	3. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output:			
3a	**Provinsi Jawa Timur**	- Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Kota Surabaya		Penyediaan sarana pembelajaran PAUD di Kota Surabaya berupa APE
3b	**Provinsi Jawa Timur**	- SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
3c				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Provinsi Jawa Timur	- SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Kota Surabaya	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
3d	**Provinsi Jawa Timur**	- SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Kota Surabaya		Pendidikan jenjang SMA/SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3e	**Provinsi Jawa Timur**	- SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Kota Surabaya		Pendidikan jenjang SMA/SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3f	**Provinsi Jawa Timur**	- SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran	Kota Surabaya		Pendidikan jenjang SLB merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4	**Provinsi Jawa Timur**	4. Direktif Presiden : Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output:			
4a	**Provinsi Jawa Timur**	- Peningkatan kapasitas usaha koperasi;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
4b	**Provinsi Jawa Timur**	- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.	Kota Surabaya	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
5	**Provinsi Jawa Timur**	6. Direktif Presiden : Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output:			

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
5a	**Provinsi Jawa Timur**	- Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
5b	**Provinsi Jawa Timur**	- Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan;	Kota Surabaya		Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang kehutanan
5c	**Provinsi Jawa Timur**	- Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;	Kota Surabaya		Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang kehutanan
5d	**Provinsi Jawa Timur**	- Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH);	Kota Surabaya		Kota Surabaya tidak mengambil urusan pemerintahan bidang kehutanan
5e	**Provinsi Jawa Timur**	- Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
5f	**Provinsi Jawa Timur**	- Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
5g	**Provinsi Jawa Timur**	- Kartu Prakerja;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** Pelayanan antar Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
5h	**Provinsi Jawa Timur**	- Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha;	Kota Surabaya	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
5i	**Provinsi Jawa Timur**	- Alat dan mesin pertanian pra panen;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
5j	**Provinsi Jawa Timur**	- Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** **Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
5k	**Provinsi Jawa Timur**	- Asuransi peternakan,	Kota Surabaya		Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan intervensi

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan;			dalam bentuk program asuransi pertanian dan peternakan secara langsung, hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah Kota Surabaya yang lebih dominan sebagai kawasan urban, dengan keterbatasan lahan untuk pertanian dan peternakan skala besar. Namun Pemerintah Kota Surabaya tetap memberikan intervensi kepada petani, peternak, pembudidaya melalui kegiatan pendampingan, penyuluhan, bantuan sarana dan prasarana hingga pemasaran.
5l	**Provinsi Jawa Timur**	- Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
5m	**Provinsi Jawa Timur**	- Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5n	**Provinsi Jawa Timur**	- Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
50	**Provinsi Jawa Timur**	- Pemuda yang Terfasilitasi	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		sebagai Kader Kewirausahaan;		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
5p	**Provinsi Jawa Timur**	- Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN).	Kota Surabaya		Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Surabaya melalui OJK melakukan pelaporan pendanaan usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan
6	**Provinsi Jawa Timur**	Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output:			
6a	**Provinsi Jawa Timur**	- Bantuan PBI JKN;	Kota Surabaya	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
6b	**Provinsi Jawa Timur**	- Kartu Indonesia Pintar;	Kota Surabaya		Pemberian Kartu Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
6c	**Provinsi Jawa Timur**	- Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
6d	**Provinsi Jawa Timur**	- Keluarga Yang Memperoleh			Program bantuan sosial sembako merupakan

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		Bantuan Sosial Sembako;			kewenangan dan program dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dan badan pangan nasional. Pemerintah Kota Surabaya berperan dalam mendukung pelaksanaan dan penyaluran program tersebut sesuai dengan data dari pemerintah pusat
6e	**Provinsi Jawa Timur**	- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;			Dalam rangka penyaluran cadangan pangan pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya membantu koordinasi penyaluran di lapangan dengan pihak-pihak terkait, sehingga penyaluran cadangan pangan dapat berjalan lancar
6f	**Provinsi Jawa Timur**	- Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan;			Bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pengan di Kota Surabaya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pemeirntah Kota Surabaya membantu koordinasi di lapangan dengan pihak-pihak terkait
6g	**Provinsi Jawa Timur**	- Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;			Merupakan kewenangan pemerintah pusat

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
6h	**Provinsi Jawa Timur**	- Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik;		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	
6i	**Provinsi Jawa Timur**	- Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana;		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
6j	**Provinsi Jawa Timur**	- Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial;		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
6k	**Provinsi Jawa Timur**	- Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya.		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	
7	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya •**	- Pembangunan Jalur Ganda KA Segmen Sepanjang–Wonokromo;		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** Pembangunan Jalan	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	
8	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan**	- Pembangunan SPAM Regional Surabaya dan peningkatan SPAM Mojolagres serta Perluasan jaringan distribusi di Gresik;		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
9	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan**	- Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Surabaya, termasuk pengendalian banjir Kali Buntung, Kali Lamong, dan Kali Mas;		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
10	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan**	- Peningkatan ketangguhan terhadap banjir termasuk pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir (Bojonegoro-Tuban);		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
11	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan**	- Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya;		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	
12	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan**	- Surabaya Regional Railway Line (Phase I);		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** Pembangunan Jalan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	
13	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan**	- SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensi (PHLN) di Kota Surabaya;			Pendidikan jenjang Perguruan Tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Kemendikub)
14	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota**	- Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga;		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan			**Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
15	**Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo •**	- Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul.			Dalan penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menyiapkan dan menyelenggarakan kualitas pendidikan yang merata di seluruh sekolah di Kota Surabaya

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Kab. Bangkalan				
16	**Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan**	- Pengembangan koridor industri Gresik Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan (sektor industri prioritas: hilirisasi nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, hilirisasi sawit, industri tekstil dan produk tekstil, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, hilirisasi tembaga, industri logam dasar, besi, dan baja);		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
17	**Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan**	- Masterclass for Game Developers di Kota Surabaya;		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
18	**Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab.**	- Women for Indonesian Game di Kota Surabaya;		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan				
19	**Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan**	- Inkubasi startup gim di Kota Surabaya;		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
20	**Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan**	- Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim di Kota Surabaya;		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
21	**Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan**	- Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional di Kota Surabaya;		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan	- Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan;			Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berada pada skala industri kecil dan menengah
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab.	- Restrukturasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia;			Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berada pada skala industri kecil dan menengah

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan				
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan	- Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit;			Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berada pada skala industri kecil dan menengah
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik	- Fasilitasi pendampingan teknis			Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berada pada skala industri kecil dan menengah

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan	pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi;			
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo •	- Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim;			Fasilitasi potensi usaha koperasi tidak secara khusus pada sektor agromaritim yang notabene bukan sektor dominan di Kota Surabaya

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan				
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan	- Pengembangan biofuel untuk pemenuhan kebutuhan domestic			Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berada pada skala industri kecil dan menengah
	Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya-Sidoarjo Mojokerto Pasuruan	- Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan.			Pendampingan dan pembinaan untuk perlindungan dan pemanfaatan intelektual diberikan kepada pelaku riset dan inovasi di Kota Surabaya yang bermanfaat bagi

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	• Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan				pembangunan kota (termasuk terkait energi baru terbarukan)
	Provinsi Jawa Timur	- BMHP untuk Skrining Kesehatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;	Kota Surabaya	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
	Provinsi Jawa Timur	- Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian	Kota Surabaya	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		Kendaraan Listrik Umum (SPKLU);		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Provinsi Jawa Timur	- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;	Kota Surabaya	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	Provinsi Jawa Timur	- Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;	Kota Surabaya		Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan melakukan pengadaan peta dasar skala 1 : 5.000 di Tahun 2025
	Provinsi Jawa Timur	- Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Provinsi Jawa Timur	- Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan;	Kota Surabaya	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	Provinsi Jawa Timur	- Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang mengalami kerusakan;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
	Provinsi Jawa Timur	- Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD;	Kota Surabaya		Pembangunan unit sekolah baru (USB) di jenjang PAUD direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2027
	Provinsi Jawa Timur	- Revitalisasi bangunan SD	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		yang sudah mengalami kerusakan;		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	Provinsi Jawa Timur	- Pembangunan unit sekolah baru SD;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	Provinsi Jawa Timur	- Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	Provinsi Jawa Timur	- Pembangunan unit sekolah baru SMP;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	Provinsi Jawa Timur	- Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan;	Kota Surabaya		Pendidikan jenjang SMA/SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi
	Provinsi Jawa Timur	- Pembangunan unit sekolah baru SMA;	Kota Surabaya		Pendidikan jenjang SMA/SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi
	Provinsi Jawa Timur	- Penyediaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran;	Kota Surabaya		Pendidikan jenjang madrasah merupakan kewenangan Kantor Kementerian Agama
	Provinsi Jawa Timur	- Bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran	Kota Surabaya		Dalam rangka pencegahan terhadap terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, Pemerintah Kota

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		perumahan kumuh;			Surabaya melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Rutilahu dilaksanakan dengan melakukan perbaikan rumah tinggal agar memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dan dilaksanakan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) yang dibentuk dan dikukuhkaan di setiap Kelurahan
	Provinsi Jawa Timur	- Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian;	Kota Surabaya	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	Provinsi Jawa Timur	- Sertifikasi halal dengan	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		pernyataan halal pelaku usaha;		Pengembangan Usaha Mikro **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	Provinsi Jawa Timur	- Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** Pengembangan Usaha Mikro	
	Provinsi Jawa Timur	- Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;	Kota Surabaya		Merupakan kewenangan MUI
	Provinsi Jawa Timur	- Akreditasi lembaga halal;	Kota Surabaya		Merupakan kewenangan MUI
	Provinsi Jawa Timur	- MoU kemitraan jaminan produk halal;	Kota Surabaya		Dalam rangka mendorong kewirausahaan yang berdaya saing, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pelaku usaha UMKM untuk memiliki sertifikat halal. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pendampingan dan berkoordinasi secara intens

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
					dengan instansi terkait yang mengeluarkan sertifikat halal
	Provinsi Jawa Timur	- Peningkatan kapasitas SDM Iptekin;	Kota Surabaya	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	
				Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
	Provinsi Jawa Timur	- Penguatan infrastruktur Iptekin strategis;	Kota Surabaya	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Invensi dan Inovasi	
				Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
	Provinsi Jawa Timur	- Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin;	Kota Surabaya		Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan riset dan inovasi mendorong difusi inovasi namun tidak/belum mengarah pada komersialisasi
	Provinsi Jawa Timur	- Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian	Kota Surabaya		Pemerintah Kota Surabaya melakukan fasilitasi terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembag Penelitian, dan

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		Masyarakat (LPPM);			lembaga lainnya dalam bentuk pendampingan, penyediaan data penelitian, dan/atau penyusunan karya tulis ilmah bersama
	Provinsi Jawa Timur	- Penguatan kapasitas Science Techno Park (STP);	Kota Surabaya		Pemerintah Kota Surabaya mendorong peningkatan ekosistem riset dan inovasinya melalui penguatan riset dan inovasi oleh masyarakat dan lembaga lainnya dalam bentuk kolaborasi yang memungkinkan berbagai pakai sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan pembiayaan
	Provinsi Jawa Timur	- Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah;	Kota Surabaya		Pemeirntah Kota Surabaya melakukan fasilitasi dan pembinaan inovasi yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga lainnya termasuk pemanfaatan termasuk kekayaan intelektual, peningkatan difusi inovasi, dan perlindungan pengetahuan/teknologi masyarakat
	Provinsi Jawa Timur	- Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas;	Kota Surabaya		Bukan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya
	Provinsi Jawa Timur	- Pengembangan pilot project hub	Kota Surabaya		Bukan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		prioritas tematik Iptekin di BRIN;			
	Provinsi Jawa Timur	- Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas;	Kota Surabaya		Pemeirntah Kota Surabaya melakukan fasilitasi dan pembinaan inovasi yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga lainnya termasuk pemanfaatan termasuk kekayaan intelektual, peningkatan difusi inovasi, dan perlindungan pengetahuan/teknologi masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di daerah dan mendukung peningkatan produk unggulan daerah
	Provinsi Jawa Timur	- Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Peningkatan Pelayanan BLUD** Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Provinsi Jawa Timur	- Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;	Kota Surabaya		Dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit di Kota Surabaya
	Provinsi Jawa Timur	- Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;	Kota Surabaya	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	Provinsi Jawa Timur	- Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan	Kota Surabaya	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		program pemeriksaan kesehatan gratis;		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	Provinsi Jawa Timur	- Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Provinsi Jawa Timur	- Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;	Kota Surabaya	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Provinsi Jawa Timur	- Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu	Kota Surabaya	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
		pemeriksaan kesehatan gratis;		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Provinsi Jawa Timur	- Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya	
	Provinsi Jawa Timur	- Desa pemajuan kebudayaan;	Kota Surabaya		Kota Surabaya tidak memiliki desa
	Provinsi Jawa Timur	- Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
	Provinsi Jawa Timur	- Penyelenggaraan event film, musik, dan seni;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
	Provinsi Jawa Timur	- Fasilitasi dan kemitraan warisan budaya;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
	Provinsi Jawa Timur	- Giat warisan budaya;	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
	Provinsi Jawa Timur	- Peningkatan kebudayaan; kompetensi SDM	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
	Provinsi Jawa Timur	- Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan;	Kota Surabaya	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Provinsi Jawa Timur	- Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya.	Kota Surabaya	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

